BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual

MELAJU MENUJU ERA BARU



LAPORAN TAHUNAN 2024

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual



MELAJU MENUJU ERA BARU

LAPORAN TAHUNAN 2024

Tahun 2024 merupakan tahun yang Istimewa untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). BSI telah mencanangkan untuk "*Level Up To The Next Journey*" setelah melewati 3 (tiga) tahun pertama dengan berbagai pencapaian yang patut disyukuri. Level up ini dilakukan dari berbagai sisi baik kompetensi dan kapabilitas pegawai serta kinerja keuangan BSI agar dapat bersaing di pasar Global. Pada tahun 2024, BSI terus melangkah ke depan dan bertransformasi menuju suatu era baru yang lebih maju, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. BSI berupaya untuk terus berkembang, memperkuat posisi di pasar, dan menjadi lebih relevan dengan perkembangan teknologi, dinamika ekonomi, serta keinginan masyarakat terhadap produk perbankan yang lebih modern dan berkelanjutan.

BSI telah melakukan transformasi digital dan inovasi dalam produk serta layanan. Bank ini berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan lebih sesuai dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan tren global dan tantangan yang ada Bank melakukan inovasi dalam produk keuangan syariah, keberlanjutan, serta upaya untuk menjangkau lebih banyak nasabah baru, terutama melalui *platform digital*. Berbagai transformasi yang telah dilakukan Bank pada tahun 2024, telah memberikan pencapaian kinerja yang baik dalam hal pertumbuhan aset, peningkatan laba, serta ekspansi yang lebih luas ke seluruh Indonesia dan pasar global. Ke depan, Bank mampu memperkuat daya saing baik di pasar perbankan syariah domestik maupun internasional. Dengan demikian, BSI semakin diakui sebagai bank syariah unggul, yang mampu bersaing dengan bank konvensional maupun institusi keuangan lainnya.

Kesinambungan
Tema

Ekspansi dan Akselerasi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Tahun 2023 memberikan catatan penting bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Bertepatan dengan 17 Agustus 2023, Bank berhasil meningkatkan status *representative office* di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi *full branch*. Perubahan ini akan sangat mendukung ekspansi BSI dalam memaksimalkan potensi pasar global. Kebijakan strategis ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Bank untuk menjadi "Top 10 Global Islamic Bank".

Ekspansi Bank tak berhenti melalui pemantapan jaringan operasional di luar negeri maupun penyaluran pembiayaan. Inisiatif akselerasi juga terus dilakukan melalui pengembangan layanan digital agar dapat memberikan layanan yang maksimal, aman, dan nyaman kepada nasabah, sekaligus memperluas akses pasar. Bank terus memastikan pengamanan serta kerahasiaan data dari akses digital tersebut melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko di bidang teknologi informasi.

Seiring dengan kegiatan ekspansi dan akselerasi tersebut, BSI telah menyusun prosedur *Business Continuity Management* (BCM) dan penguatan manajemen organisasi. BSI berharap kebijakan strategis serta pencapaian pada tahun 2023 dapat mendukung penciptaan pertumbuhan kinerja Bank.

Beragam inisiatif dan inovasi yang dikembangkan tersebut membuat kinerja BSI terus tumbuh secara konsisten, seimbang, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan kontribusi positif untuk turut serta mendorong perekonomian nasional.

Pada saat bersamaan, BSI sebagai bank syariah terbesar terus mengembangkan dan mendampingi UMKM agar naik kelas. Bank juga tak berhenti memperkuat "*Islamic Ecosystem*", sehingga menjadi modal bagi BSI untuk bersaing di kancah global.



2023



2022

Kolaborasi untuk Akselerasi Pertumbuhan Negeri

Tahun 2022 merupakan tahun penuh pertama operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dapat dilakukan secara komprehensif dan integratif, setelah ditetapkannya "Operational Day 1" pada tanggal 1 November 2021. Sepanjang tahun tersebut, BSI konsisten membangun sinergi antara kekuatan-kekuatan tiga bank syariah besar menjadi satu, baik dari sisi permodalan, teknologi informasi, infrastruktur layanan maupun ragam produk dan jasa. BSI juga bergerak cepat menggalang kolaborasi dengan berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Langkah-langkah sinergi dan kolaborasi tersebut terbukti mampu mendorong kinerja BSI ke tingkat yang memuaskan, sebagai ujung tombak perbankan syariah dalam lanskap perbankan nasional..

Energi Baru untuk Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang lahir dari merger 3 (tiga) bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) baru berusia 1 (satu) tahun. Kelahirannya pada 1 Februari 2021 langsung diresmikan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara.

Di usia yang masih belia, BSI telah menorehkan pencapaian yang menakjubkan. Rata-rata kinerja keuangan tumbuh tinggi. Integrasi kegiatan operasional dari *bank legacy* pun berjalan lancar. Bahkan BSI telah resmi membuka *representative office* di Dubai, yang merupakan pusat keuangan dunia.

Semua itu berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh Insan BSI serta dukungan para pemangku kepentingan, sehingga Bank mampu memberikan manfaat besar. Atas dasar inilah, kami semua meneguhkan tekad, mengobarkan semangat, untuk membesarkan Bank Syariah Indonesia menjadi lebih kuat agar mampu menjadi Energi Baru Untuk Indonesia.



2021

Daftar Isi

Tema dan Arti Tema 1
Kesinambungan Tema 2
Daftar Isi 4
Sekilas tentang Perusahaan 6
Jejak Langkah 8
Kontribusi Terbaik Kami 10

Kilas Kinerja

Pencapaian Kinerja Penting 2024 14
Ikhtisar Data Keuangan Penting 18
Ikhtisar Operasional 22
Informasi Saham 22
Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi 24
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya 24
Peristiwa Penting 26

Laporan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Laporan Direksi 32
Laporan Dewan Komisaris 44
Laporan Dewan Pengawas Syariah 52
Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2024 56

Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan 60
Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang 62
Brand Perusahaan 71
Riwayat Singkat Perusahaan 72
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan 74
Kegiatan Usaha 76
Wilayah Operasional 84
Daftar Keanggotaan Asosiasi 89
Struktur Organisasi 90
Profil Direksi 92
Profil Dewan Komisaris 107
Dewan Pengawas Syariah 122
Profil Pejabat Eksekutif 130
Profil Pegawai 135
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 135
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 135
Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia 135
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 136
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 136
Komposisi Pemegang Saham 137
Pemegang saham utama dan pengendali 144
Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama 144
Struktur Grup Perusahaan 145
Informasi Kelompok Usaha Bank 145
Kronologis pencatatan saham 146
Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya 146
Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 148
Lembaga dan/atau Profesi Penunjang 149
Penghargaan dan Sertifikasi 151
Informasi pada *Website* 156

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan

Tinjauan Perekonomian 160
Analisis Perekonomian Global 160
Analisis Perekonomian Nasional 161
Analisis Industri Perbankan Syariah 161
Analisis Posisi BSI dalam Industri Perbankan 162
Tinjauan Operasional 164
Strategi Bank 164
Aspek Pemasaran 164
Penanganan Pengaduan Nasabah 169
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha 170
Tinjauan Keuangan 178
Kinerja Keuangan 178
Kemampuan Membayar Utang dan kolektibilitas Piutang 194
Analisis Kualitas Aset Produktif 196
Struktur Permodalan 200
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan 203
Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal 241
Investasi Barang Modal 241
Komitmen dan Kontinjensi 242
Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan 243
Prospek Usaha dan Strategi ke Depan 244
Pencapaian Target dan Target ke Depan 246
Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen 253
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 254
Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang dan Modal 256
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi 258
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya 264
Perubahan Kebijakan Akuntansi 266
Tingkat Kesehatan Bank 266
Informasi Kelangsungan Usaha 267
Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan Pengendalian Aspek Perpajakan 267

Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) 268
Transaksi *Spot* dan *Forward* 269

Human Capital

Strategi Manajemen *Human Capital* 272
Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen *Human Capital* 273
Rekrutmen 273
Pengembangan Kompetensi 273
Pengembangan Karir 275
Penilaian Kinerja 275
Remunerasi 275
Program Pensiun 275
System and Infrastructure Human Capital 276
Internalisasi Budaya 277
Keterbukaan Informasi Kepada Pegawai 278
Struktur Pengelola *Human Capital* 279
Rencana Kerja *Human Capital* Tahun 2025 279

Teknologi Informasi

Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi 282
Inovasi Teknologi Informasi 282
Infrastruktur Teknologi Informasi 283
Tata Kelola Teknologi Informasi 283
Struktur Pengelola Teknologi Informasi 288
Rencana Kerja Teknologi Informasi Tahun 2025 288

Tata Kelola Perusahaan

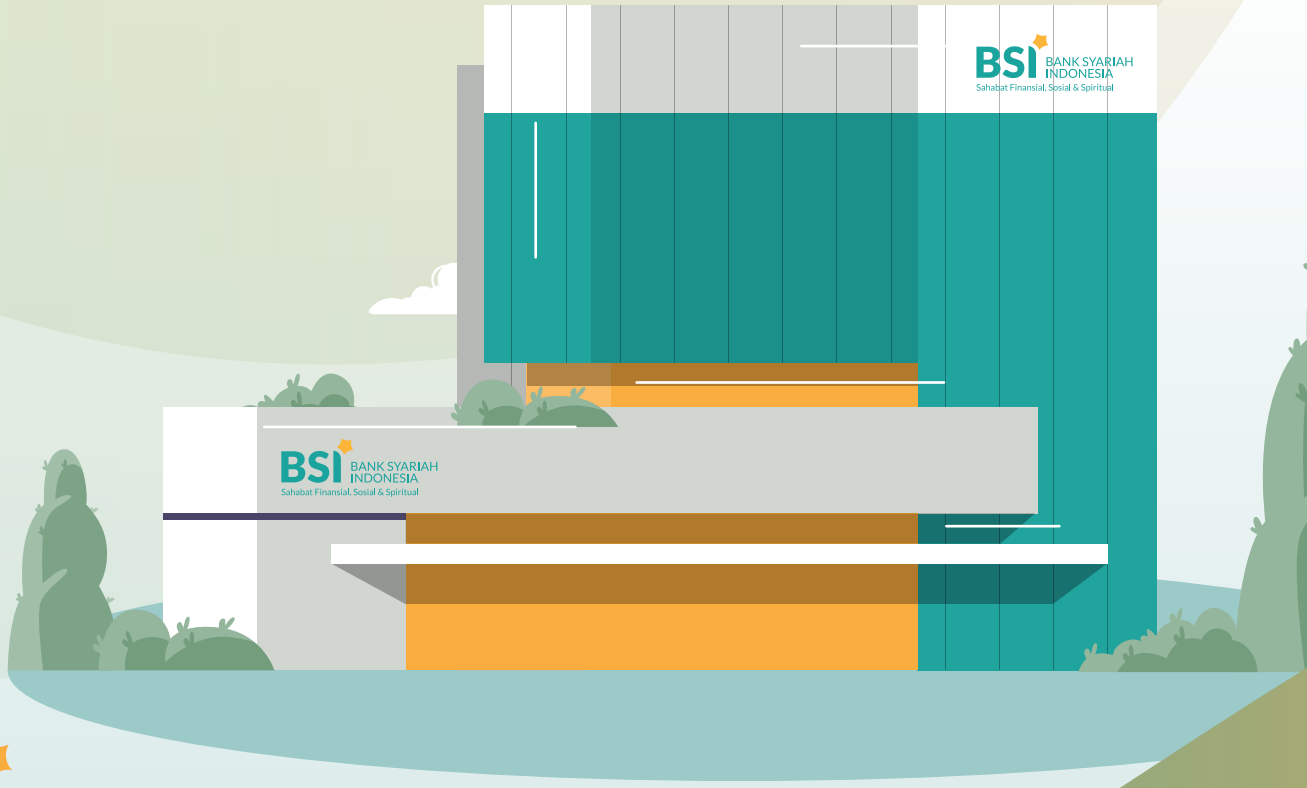
Komitmen Penerapan Tata Kelola 292
Pencapaian Penerapan Tata Kelola 292
Roadmap Tata Kelola Perusahaan 293
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan 294
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 295
Struktur Organ Perusahaan 295
Governance Soft Structure 296
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 296
Pemegang Saham 296
RUPS 297
Direksi 307
Dewan Komisaris 329
Dewan Pengawas Syariah 358
Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 370
Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris 372
Transparansi Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah 375
Komite di Bawah Dewan Komisaris 378
Organ dan Komite di Bawah Direksi 408
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah 430
Akuntan Publik 436
Sistem Pengendalian Internal 437
Manajemen Risiko 442
Fungsi Kepatuhan 453
Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPTT-PPPSPM) 456
Perkara Hukum 458
Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas lainnya 460
Akses Informasi dan Data Perusahaan 462
Kode Etik 474
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan yang Dimiliki. 477
Whistleblowing System 477
Program Anti Korupsi 479
Pengelolaan Benturan Kepentingan 483
Insider Trading 483
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 484
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS 485
Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan Itu yang Digunakan oleh BUS 485
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya 485
Buyback Shares dan/atau *Buyback* Obligasi 485
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana 485
Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya 486
Penerapan Tata Kelola Terintegrasi 486
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 489
Good Corporate Governance Assessment 492

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 502
Indeks Referensi OJK 505
Informasi Keuangan 526

Sekilas
Tentang Perseroan

Produk dan Jasa:

Individu, Perusahaan, Digital, Banking dan Kartu



Tanggal Berdiri:

1 Februari 2021

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual

Kepemilikan Saham:



Negara Republik Indonesia	0,00%
PT Bank Mandiri (Persero)	51,47%
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	23,24%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	15,38%
Masyarakat	9,91%



Jumlah Karyawan:

17.234 orang

Jejak Langkah

2007

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta.

2008

- Bank Indonesia mengeluarkan izin usaha melalui suratnya No.10/67/Kep.GBI/DpG/2008.
- Pada 16 Oktober 2008 PT Bank BRIsyariah secara resmi beroperasi dengan mengubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
- Pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan unit usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

2009

Grand launching BRIsyariah oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil pada 1 Juli 2009.

2010

- Peluncuran 7 nilai budaya kerja BRIsyariah: PASTI OKE, yaitu Profesional, Antusias, Penghargaan SDM, Tawakal, Integritas, Orientasi bisnis dan Kepuasan pelanggan.
- *Live Core Banking System* SyIAR (Syariah *Integrated & Automated Realtime*) yang dilengkapi dengan aplikasi *electronic Financing Originating System* (efoS) dan *Management Information System* (MIS).

2018

BRIsyariah *go public* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia, melakukan penawaran saham perdana (*initial public offering*) sebesar 2.623.350.600 kepada investor domestik maupun asing, dengan nilai nominal Rp500 per saham.

2019

- Pada milad ke-11, BRIsyariah mengembangkan inovasi teknologi untuk internal business process guna mempercepat layanan kepada nasabah, yaitu Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (i-Kurma). i-Kurma merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro.
- Dimulainya implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang dilakukan oleh BRI dan BRIsyariah.

2020

BRIsyariah melakukan pengembangan i-Kurma Gen 2 untuk semakin meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. i-Kurma Gen 2 ini merupakan pengembangan dari produk sebelumnya untuk mempercepat proses permohonan pencairan pembiayaan mikro.

2021

Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bergabung dengan BRIsyariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H.

2022

BSI mampu menyelesaikan proses *right issue* pertama melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Proses ini tercatat *over subscribe* (kelebihan permintaan) sebanyak 1,4 kali dan menghasilkan tambahan modal sekitar Rp5 trilun.

2023

BSI resmi mendapatkan lisensi penuh untuk beroperasi di Dubai, Uni Emirat Arab.

2011

Implementasi layanan syariah Bank BRIsyariah di 18 kantor cabang BRI.

2012

- BRIsyariah mengukuhkan diri sebagai bank syariah pertama di dunia yang memiliki layanan *mobile banking* di 4 (empat) *market online*, yaitu Blackberry App World, Google Play, Apple Store dan Nokia Store.
- Peluncuran Tabungan Impian BRIsyariah.

2013

- BRIsyariah mengembangkan program *Sharia Officer Development Program* (SODP) untuk menciptakan bankir-bankir yang memiliki kompetensi besar dalam perbankan syariah serta kesamaan pemahaman terhadap bisnis BRIsyariah.
- *Rebranding* Tabungan BRIsyariah iB menjadi Tabungan Faedah BRIsyariah iB.
- BRIsyariah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai bank devisa.

2014

- Peluncuran *internet banking* BRIsyariah.
- Implementasi aplikasi penunjang pembiayaan elektronik (Appel) untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan secara cepat dan akurat.

2015

- BRIsyariah ditunjuk oleh OJK sebagai *Indonesia First Movers on Sustainable Banking*.
- BRIsyariah sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang meluncurkan laku pandai Syariah BRISSMART.
- BRIsyariah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang Surat Berharga Syariah negara (SBSN).

2016

BRIsyariah menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I BRIsyariah tahun 2016 untuk memperkuat permodalan.

2017

- Bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah.
- Bekerja sama dalam penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk ASN dan swasta untuk pembiayaan KPR FLPP pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp950 miliar.
- Ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan.

2024

- Penerbitan *Sustainability* Sukuk Pertama di Indonesia
- Launching BYOND by BSI

Kontribusi
Terbaik Kami

Penerbitan *Sustainability* Sukuk Pertama Di Indonesia

BSI berkomitmen tinggi untuk terus terlibat aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan melalui program dan pembiayaan *sustainable financing*. Bank siap mendorong transisi menuju *green economy* melalui implementasi instrumen keuangan syariah yang fokus terhadap *environment*, *social*, *governance* (ESG). Untuk itu, BSI menerbitkan instrumen ESG sukuk pertama di Indonesia berupa *Sustainability* Sukuk BSI atau Sukuk *Mudharabah* Keberlanjutan. Efek syariah dengan aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (*underlying sukuk*) ini adalah pembiayaan dengan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Instrumen ini akan memberikan *values* berbeda bagi investor yakni memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

BSI telah mendapatkan ijin dari OJK melalui POJK No. 18 Tahun 2023 untuk menerbitkan sukuk sebanyak-banyaknya sebesar Rp3 Triliun. *Sustainability* Sukuk dalam mata uang Rupiah ini ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dan diharapkan dapat memberikan kisaran imbal hasil 6,40% - 7,20% untuk jangka waktu 1,2 dan 3 tahun. Kehadiran Sukuk *Sustainability* ini merupakan inovasi yang dapat memperkaya instrumen keuangan syariah di Indonesia. Terlebih inovasi ini terkategori instrumen yang mengedepankan keberlanjutan ekonomi sekaligus kontribusi BSI pada upaya mitigasi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan ekonomi hijau, serta senantiasa memberikan manfaat kepada umat.

BSI melihat pasar obligasi hijau global dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat dan membaca peluang untuk turut mengembangkan instrumen baru tersebut untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan melalui penerbitan Sukuk *Sustainability*. Di dalamnya BSI juga akan mengatur pengelolaan dan penggunaan dana, evaluasi dan seleksi proyek serta pengelolaan hasil dan mekanisme pelaporannya. BSI sebagai bank syariah terbesar mempelopori penerbitan sukuk *sustainability* di Indonesia. Sukuk *Sustainability* menggabungkan kegiatan usaha ramah lingkungan dan berwawasan sosial sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus dapat mendorong pencapaian target kontribusi pembiayaan berkelanjutan yang ditentukan secara nasional.



BYOND
by BSI



PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi meluncurkan BYOND by BSI sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan dan keuangan yang semakin kompleks di era digital. BYOND by BSI merupakan SuperApp layanan finansial, sosial, dan spiritual komprehensif yang lebih mudah dan nyaman diakses, dengan keamanan yang semakin maksimal. BYOND by BSI dapat memenuhi harapan dan memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat terkait layanan perbankan syariah dan ekosistem ekonomi Islam. Kemudian hal-hal terkait layanan umroh dan haji juga bisa disinergikan dengan *accessibility* BSI ke depan.

Kehadiran BYOND by BSI bukan sekadar SuperApp layanan perbankan melainkan hasil transformasi berkelanjutan BSI dalam menjawab berbagai tantangan di era digitalisasi. BSI akan selalu *agile* dalam mengembangkan produk baru sejalan dengan digitalisasi. Transformasi ini juga sejalan program pemerintah baru yang ingin mendorong infrastruktur digital. BYOND by BSI terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dengan memberikan kemudahan, kecepatan, kenyamanan tapi juga berfokus pada keamanan transaksi. ''Sesuai *tagline*-nya #SemuaJadiMudah, dengan BYOND by BSI semua urusan jadi mudah, bagi siapa pun, kapan pun, dan di mana pun."

BYOND by BSI didukung teknologi dan infrastruktur IT yang mumpuni karena mencakup pengembangan teknologi baru, peningkatan keamanan siber, dan infrastruktur. Sebagai aplikasi super yang *beyond banking*, BYOND by BSI hadir dengan teknologi yang lebih baik. Dengan *user interface* (UI) dan *user experience* (UE) yang lebih canggih dan lebih *fresh*, sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan nasabah yang lebih *sophisticated*, yang semakin hari terus semakin dinamis sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini dan ke depannya.

BYOND by BSI didesain untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih intuitif dan relevan bagi generasi muda, khususnya yang ingin proses transaksi serba cepat dan mudah. Untuk mengkreasi inovasi, BSI juga memainkan peran besar dalam menciptakan cara kerja baru yaitu dengan membangun *Digital Lab*. Di sini, BSI menerapkan konsep *agile*, memungkinkan tim bekerja dalam siklus pendek untuk segera menguji dan menyempurnakan fitur BYOND by BSI. Salah satu hasilnya, ada lima solusi yang ditawarkan BYOND by BSI, sekaligus menjadi pembeda dari BSI Mobile, yaitu: Pengkinian teknologi, Modernisasi tampilan aplikasi (New UI/UX), *Re-branding*, metode kerja baru dan Ekosistem.

Selain itu, ketika merancang BYOND by BSI keamanan nasabah adalah prioritas utama. BYOND by BSI dibangun dengan berbagai lapisan keamanan untuk melindungi nasabah. Pertama, untuk aktivasi, nasabah harus memasukkan PIN dan data kartu debit mereka. Kedua, BYOND by BSI menerapkan fraud detection system (FDS) yang dapat mengenali pola transaksi anomali. Ketiga, BYOND by BSI dilengkapi dengan *hardware security module* (HSM). Ini adalah teknologi tinggi yang digunakan untuk melindungi PIN dan data nasabah dalam bentuk yang sangat aman. Proses keamanan BYOND by BSI pun sangat ketat. Setiap fitur melewati beragam uji coba—*grey box*, *white box*, dan *black box penetration test*—untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.



IKHTISAR UTAMA

01 »



Pencapaian Kinerja Penting
Tahun 2024



Aset

Rp408,61 Triliun

15,55% yoy

Dana Pihak Ketiga

Rp327,45 Triliun

11,46% yoy

NPF *Gross*

1,90%

(0,18)% yoy

Fee Based Income

Rp5,56 Triliun

32,16%
yoy

Laba Bersih

Rp7,00 Triliun

22,83%
yoy

ROE

17,77%

0,89%
yoy





Mobile Banking

User Registrasi BYOND by BSI + BSI Mobile

7,99 Juta

26,6% yoy

Jumlah Transaksi

546 Juta

45,2% yoy

BYOND by BSI

Sejak Launching November 2024

User Registrasi

1,98 Juta **405,5%** Mtm

Penghargaan Pihak Ketiga

30 World's Most Trustworthy Companies 2024

Kategori Bank Versi Newsweek dari 66 Bank Dunia

Euromoney Awards for Excellence 2024

Indonesia's Best Digital Bank 2024

Zakat

2024

Zakat Perusahaan

232,1 M

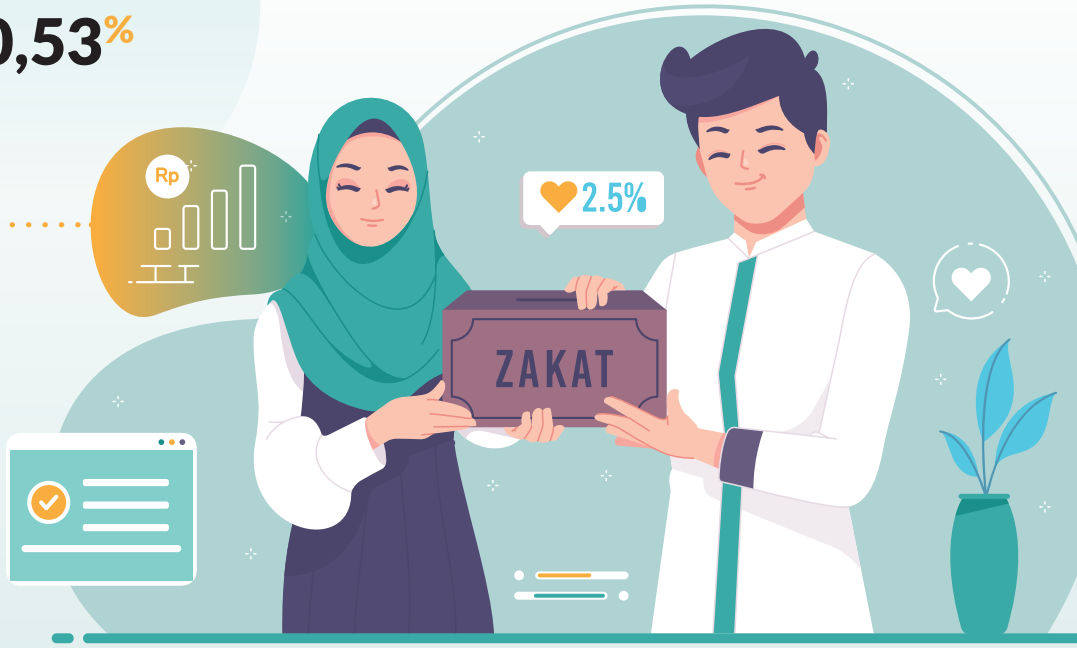
Zakat Pegawai

36,5 M

20,53%

Total Zakat

268,6 M



The Digital Banker Global Islamic Finance Award

Best Islamic Wealth Manager - Indonesia

Anugerah ESG Republika Award 2024

Best Practices in Regulation Compliance

Good Corporate Governance Award 2024

CGPI Award 2024
(Kategori Sangat Terpercaya)

Ikhtisar
Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta rupiah)

Uraian	2024	2023	2022*
ASET			
Kas	8.080.689	5.255.841	4.951.469
Giro dan Penempatan Pada Bank Indonesia	49.966.279	32.440.778	31.778.458
Giro dan Penempatan Pada Bank Lain - Bersih	3.866.065	2.303.728	2.475.917
Investasi Pada Surat Berharga - Bersih	62.216.518	71.169.020	57.841.271
Tagihan Akseptasi - Bersih	183.294	426.916	476.589
Piutang *Murabahah* - Bersih	140.025.625	132.154.963	120.700.195
Piutang *Istishna* - Bersih	11	28	131
Piutang *Ijarah* - Bersih	169.901	205.167	1.653
Pinjaman *Qardh* - Bersih	12.986.090	10.489.164	8.867.013
Pembiayaan *Mudharabah* - Bersih	2.843.591	1.831.652	1.001.957
Pembiayaan *Musyarakah* - Bersih	109.042.087	83.756.501	66.450.946
Aset Yang Diperoleh Untuk *Ijarah* - Bersih	3.122.255	2.190.107	1.484.573
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Bersih	7.723.853	5.352.843	5.396.010
Aset Tidak Berwujud - Bersih	2.102.344	1.128.334	258.688
Aset Pajak Tangguhan	2.056.727	1.665.694	1.675.103
Aset Lain - Bersih	4.228.103	3.253.388	2.367.465
JUMLAH ASET	408.613.432	**353.624.124**	**305.727.438**
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	858.643	1.316.067	1.009.502
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	291.578	255.932	192.775
Simpanan *Wadiah*			
Giro *wadiah*	19.147.079	20.847.524	21.797.852
Tabungan *wadiah*	55.280.067	47.026.374	44.214.405
Simpanan dari Bank Lain			
Giro *wadiah*	174.879	125.337	142.388
Tabungan *wadiah*	8.985	7.788	1.309
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	3.366.650	1.628.176	2.075.000
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	600.834	-	-
Liabilitas Kepada Bank Indonesia	18.417.864	11.900.055	-
Liabilitas Akseptasi	185.145	431.228	481.403
Utang Pajak	889.642	539.042	667.485
Liabilitas Imbalan Kerja	534.730	667.264	689.018
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	24.045	32.017	28.873
Liabilitas Lain-Lain	5.867.830	2.446.107	2.355.781
JUMLAH LIABILITAS	105.647.971	**87.222.911**	**73.655.791**

Uraian	2024	2023	2022*
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Giro *mudharabah*	37.235.801	32.417.260	22.754.968
Tabungan *mudharabah*	85.790.658	78.280.185	72.897.352
Deposito *mudharabah*	130.678.867	115.984.789	100.760.342
Sukuk *mudharabah* subordinasi	200.000	200.000	1.375.000
Sukuk *mudharabah muqayyadah*	3.018.563	3.608	-
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	1.000.000	776.250	778.375
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	257.923.889	**227.662.092**	**198.566.037**
EKUITAS			
Modal Disetor	23.064.630	23.064.630	23.064.630
Tambahan modal disetor	(3.929.100)	(3.929.100)	(3.929.100)
Keuntungan revaluasi aset tetap	553.440	444.530	444.530
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	347.644	241.462	268.904
Keuntungan/(kerugian)			
Surat berharga - Bersih	(56.814)	6.154	(55.477)
Saldo Laba Telah ditentukan penggunaannya	3.377.462	2.236.713	1.384.677
Saldo Laba Belum ditentukan penggunaannya	21.684.310	16.674.732	12.327.446
JUMLAH EKUITAS	45.041.572	**38.739.121**	**33.505.610**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	408.613.432	**353.624.124**	**305.727.438**

*Direklasifikasi

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam juta rupiah)

Uraian	2024	2023	2022
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib	25.298.203	22.251.743	19.622.865
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil	(7.889.029)	(5.993.168)	(4.032.169)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	17.409.174	**16.258.575**	**15.590.696**
Pendapatan Usaha Lainnya	5.556.479	4.204.466	3.701.111
Beban Usaha	(11.793.642)	(10.249.204)	(9.895.336)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - Bersih	(1.893.867)	(2.622.479)	(3.748.797)
Laba Usaha	9.278.144	**7.591.358**	**5.647.674**
Pendapatan Non Usaha - Bersih	4.312	(2.156)	8.534
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	9.282.456	**7.589.202**	**5.656.208**
Zakat	(232.061)	(189.730)	(141.405)
Beban Pajak	(2.044.507)	(1.695.729)	(1.254.621)
Laba Bersih	7.005.888	5.703.743	4.260.182
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	152.124	34.189	50.893
Jumlah Laba Komprehensif	7.158.012	**5.737.932**	**4.311.075**
Laba Per Saham Dasar (nilai penuh)	151.88	123.65	102.54
Laba Per Saham Dilusian (nilai penuh)	151.88	123.65	102.54

Laporan Arus Kas

(dalam juta rupiah)

Uraian	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas Bersih dihasilkan dari aktivitas operasi	6.812.261	2.041.035	1.885.530
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Kas Bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	6.345.483	(11.404.359)	5.994.708
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kas Bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	8.749.006	10.162.997	4.798.909
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	21.906.750	**799.673**	**12.679.147**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	40.021.092	**39.221.419**	**26.542.272**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	61.927.842	**40.021.092**	**39.221.419**

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

(dalam juta rupiah)

Uraian	2024	2023	2022
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	25.298.203	22.251.743	19.622.865
Pengurangan			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima	(1.787.637)	(1.691.143)	(1.576.539)
Penambahan			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:	1.691.143	1.576.539	1.429.789
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	25.201.709	22.137.139	19.476.115
Hak bagi hasil milik Bank	(17.312.680)	(16.143.971)	(15.443.946)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	7.889.029	5.993.168	4.032.169

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

(dalam juta rupiah)

Uraian	2024	2023	2022
Sumber dana zakat			
Internal bank	232.061	189.730	141.405
Eksternal bank			
Pegawai	36.452	33.041	31.661
Nasabah dan umum	38.743	34.731	38.656
	307.256	257.502	211.722
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan ke lembaga lain	(268.348)	(205.881)	(170.771)
Penurunan dana zakat	38.908	51.621	40.951
Saldo awal dana zakat	196.774	**145.153**	**104.202**
Saldo akhir dana zakat	235.682	**196.774**	**145.153**

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(dalam juta rupiah)

Uraian	2024	2023	2022
Sumber dana kebajikan			
Infaq dan *shadaqah*	84.691	63.947	73.857
Denda	21.972	17.915	12.877
Pendapatan nonhalal	1.240	1.733	3.168
Sumbangan/hibah	4.094	-	-
	111.997	83.595	89.902
Penggunaan dana kebajikan			
Sumbangan	(117.028)	(80.736)	(108.831)
Kenaikan/(penurunan) dana kebajikan	(5.031)	2.859	(18.929)
Saldo awal dana kebajikan	9.907	7.048	25.977
Saldo akhir dana kebajikan	4.876	9.907	7.048

Rasio Keuangan

(dalam juta rupiah)

Uraian	2024	2023	2022
Likuiditas			
Financing to Deposit Ratio (FDR)	84,97	81,73	79,37
Kualitas Kredit			
Non Performing Financing (NPF) Gross	1,90	2,08	2,42
Non Performing Financing (NPF) Nett	0,50	0,55	0,57
Profitabilitas			
Cost to Income Ratio (CIR)	50,89	49,86	51,01
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	69,93	71,27	75,88
Return on Assets (ROA)	2,49	2,35	1,98
Return on Equity (ROE)	17,77	16,88	16,84
Net Imbalan (NI)	5,66	5,82	6,31
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan	22,71	21,56	18,27
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	88,98	89,05	89,04
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	807,19	812,83	812,47
Aset Produktif			
Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	1,11	1,21	1,35
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	1,39	1,54	1,79
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	2,72	2,99	3,29
Permodalan			
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	21,40	21,04	20,29
Kepatuhan			
Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD)	0,00	0,00	0,00
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	4,83	6,76	8,30
Giro Wajib Minimum (Valas)	1,46	1,13	1,18
Posisi Devisa Neto	2,26	2,47	0,57

Ikhtisar Operasional

Tabel Ikhtisar Operasional

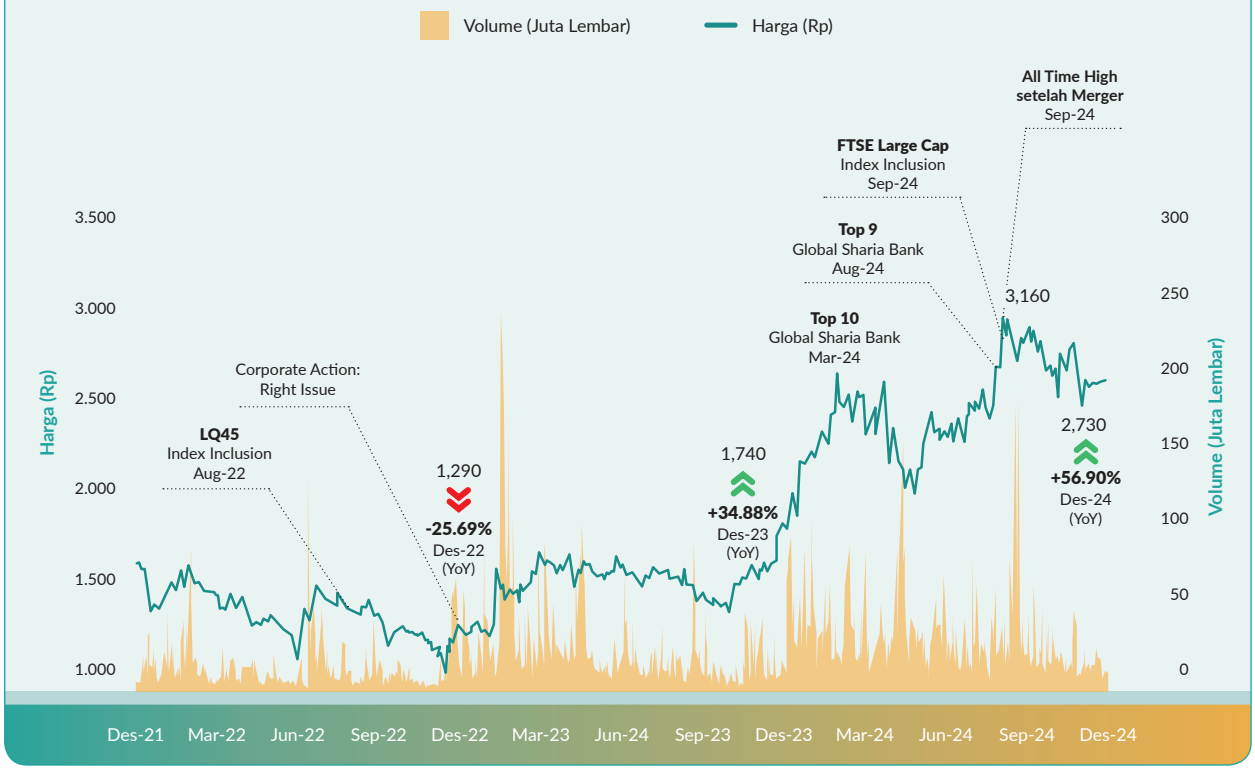
Keterangan	2024	2023
Corporate Banking		
Pembiayaan	58.719.889	54.541.919
Pendanaan/DPK	21.619.859	22.354.117
Commercial Banking		
Pembiayaan	18.497.916	12.969.097
Pendanaan/DPK	12.013.780	6.990.589
Hubungan Kelembagaan		
Pendanaan/DPK	89.456.637	79.770.650
Ritel		
Pembiayaan	201.263.437	172.805.028
Pendanaan/DPK	205.226.059	185.573.903

Informasi Saham

Tabel Informasi Saham BSI 2023-2024

Tahun	Harga per saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (lembar saham)	Volume Perdagangan (Jutaan lembar saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2024							
Triwulan I	2.740	2.750	2.670	2.710	46.129.260.138	2.804	125,01
Triwulan II	2.550	2.630	2.550	2.620	46.129.260.138	2.342	120,86
Triwulan III	3.060	3.060	3.000	3.010	46.129.260.138	2.622	138,85
Triwulan IV	2.780	2.790	2.700	2.730	46.129.260.138	1.555	125,93
2023							
Triwulan I	1.650	1.700	1.650	1.680	46.129.260.138	3.133	77,49
Triwulan II	1.670	1.690	1.655	1.690	46.129.260.138	1.779	77,96
Triwulan III	1.620	1.630	1.605	1.625	46.129.260.138	1.449	74,96
Triwulan IV	1.740	1.745	1.710	1.740	46.129.260.138	1.169	80,26

Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham BSI Tahun 2021-2024



Aksi Korporasi

Pada tahun 2024, BSI tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, di antaranya pemecahan saham, penggabungan saham, saham bonus dan perubahan nilai nominal saham.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi

Informasi Obligasi

Sampai dengan 31 Desember 2023, BSI belum menerbitkan Obligasi.

Informasi Sukuk

Tabel Sukuk BSI

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor	Mata Uang	Jumlah Sukuk
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2023 Tahap I	26 Desember 2023	12 Tahun	Rp	3,7 Miliar
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2023	15 Desember 2023	5 Tahun	Rp	200 Miliar
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2023 Tahap II	26 Maret 2024	12 Tahun	Rp	7,76 Miliar
Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024	14 Juni 2024	370 hari 2 tahun 3 tahun	Rp	3 Triliun
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2024 Tahap III	20 Desember 2024	12 Tahun	Rp	3,97 Miliar

Informasi, Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI belum menerbitkan Obligasi Konversi.

	Tanggal Jatuh Tempo	Bagi Hasil	Status Pembayaran	Peringkat	
				2024	2023
	26 Desember 2035	0,55%	Belum Lunas	-	-
	15 Desember 2028	7,90%	Belum Lunas	idAA (sy) (PEFINDO)	idAA (sy) (PEFINDO)
	26 Juni 2036	0,55%	Belum Lunas	-	-
	24 Juni 2025	6,65%	Belum Lunas	idAAA (Pefindo)	-
	14 Juni 2026	6,70%			
	14 Juni 2027	6,80%			
	26 Desember 2036	0,55%	Belum Lunas	-	-



Peristiwa Penting di Tahun 2024

16 Januari 2024



Grand Launching Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Online Bank Syariah Pertama di Indonesia di Bursa Efek Indonesia.

1 Februari 2024



Milad ke-3 BSI.

13 Maret 2024



Pembayaran Zakat Perseroan 2023 >Rp223 Miliar.

19 Maret 2024



Santunan 3.333 Anak Yatim.

5 April 2024



Mudik Asyik Bersama BUMN.

17 Mei 2024



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

30 Mei 2024



Peresmian *Green Building* BSI Aceh dan Desa Binaan BSI.

Juni 2024



Penerbitan *Sustainability* Sukuk Pertama di Indonesia.

17 Juni 2024



BSI Salurkan 9.390 Hewan Potong ke Seluruh Indonesia pada Idul Adha 2024.

20-23 Juni 2024



BSI International Expo.

19 Juli 2024



Hujan Rejeki BSI Mobile 2024.

26 Juli 2024



BSI meresmikan UMKM Center Makassar.

9 September 2024



BSI mensukseskan PON XXI Aceh.

15 September 2024



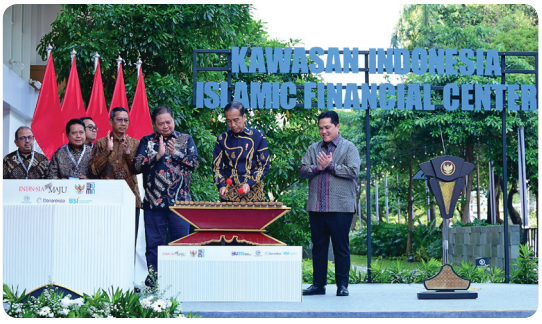
BSI meraih penghargaan sebagai Indonesia's Best Digital Bank 2024 dari Euromoney Awards for Excellence.

17 September 2024



BSI masuk ke peringkat 9 berdasarkan kapitalisasi pasar senilai Rp138,85 Triliun pada September 2024 sehingga menjadikan BSI sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang masuk kedalam Top 10 Islamic Global Bank.

17 September 2024



BSI memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam mengakselerasi pengembangan global hub dan *Islamic Ecosystem* yang berkelanjutan dengan mendirikan BSI Tower di Indonesia Islamic Financial Center (IIFC).

19 September 2024



BSI Masuk ke dalam 30 Besar *World Most Trustworthy Companies* 2024 kategori Bank versi Newsweek.

18 Oktober 2024



BSI resmikan Sentra UMKM Bedugul, Bali.

9 November 2024



Launching BYOND by BSI.

17 November 2024



BYONDAY *Funwalk*.

26 November 2024



BSI berhasil meraih penghargaan Indonesia Most Trusted Companies dalam ajang *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) Award 2024.

28 November 2024



Grand Launching BSI Gold.

10 Desember 2024



Talenta Wirausaha BSI 2024.



LAPORAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH



02 »

Laporan Direksi



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada tahun 2024 BSI dapat menorehkan kinerja yang positif bagi Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya.

Hery Gunardi
Direktur Utama

Sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya, BSI terus berupaya untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian Indonesia, sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan nasabah.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan kinerja Bank selama tahun buku 2024 yang meliputi hasil kinerja Bank, analisis prospek perusahaan, perkembangan penerapan tata kelola Bank, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

Analisis Atas Kinerja Bank

BSI adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang berfokus pada penyediaan layanan perbankan berbasis prinsip-prinsip syariah Islam untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia. BSI menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan profil masing-masing nasabah. Produk dan layanan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu produk dan layanan individu, perusahaan, *digital banking* dan kartu. Rincian produk dan layanan Bank adalah sebagai berikut:

1. Produk dan layanan Individu terdiri dari, Bisnis, Emas, Haji dan Umroh, Investasi, Pembiayaan (termasuk pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), Prioritas, Tabungan dan Transaksi.
2. Produk dan layanan Perusahaan terdiri dari, *Cash Management*, Tresuri, *Service*, Pembiayaan dan Simpanan.
3. Produk dan layanan *Digital Banking* terdiri dari, BSI Mobile, Buka Rekening Online, Solusi Emas, BSI QRIS, BSI Cardless Withdrawal, BSI Debit Card, BSI Debit OTP, BSI ATM CRM, BSI Aisyah, BSI Net, BSI Merchant Business, BSI API Platform, BSI Smart Agent, BSI Payment Point, Deposito Mobile, dan Griya Hasanah *Online Top Up* Melalui BSI Mobile.
4. Produk dan layanan Kartu terdiri dari, Kartu Pembiayaan dan Kartu Debit.

Untuk mengoptimalkan produk dan layanan kepada nasabah, Bank telah memiliki jaringan bisnis dan wilayah operasi yang didukung oleh Kantor Wilayah hingga Kantor Fungsional Operasi. Per 31 Desember 2024, Bank memiliki 10 (sepuluh) Kantor Wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Wilayah 1 meliputi wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Kantor Wilayah 2 meliputi Sumatera Utara, Kep. Riau, dan Riau. Kantor Wilayah 3 meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Kep. Bangka Belitung, dan Lampung. Kantor Wilayah 4 meliputi Banten, DKI Jakarta, Kota Bekasi, dan Kab. Bekasi. Kantor Wilayah 5 meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi. Kantor Wilayah 6 meliputi wilayah Jawa Barat. Kantor Wilayah 7 meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Wilayah 8 meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kantor Wilayah 9 meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Kantor Wilayah 10 meliputi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Pelaksanaan jalannya kepengurusan Bank terlihat pada struktur organisasi Bank yang terbagi menjadi 8 (delapan) Direktorat di bawah Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama yaitu Direktorat Information Technology, Direktorat Treasury & International Banking, Direktorat Wholesale Transaction Banking, Direktorat Risk Management, Direktorat Compliance & Human Capital, Direktorat Finance & Strategi, Direktorat Retail Banking dan Direktorat Sales & Distribution. Selain itu, dalam mendukung operasi dan pengambilan keputusan di Bank, Direktur Utama juga didukung oleh beberapa SEVP antara lain SEVP Operation, SEVP Information Technology, SEVP Digital Banking, SEVP Wholesale Risk, SEVP Retail & Consumer Risk, SEVP Human Capital, SEVP Corporate Strategy, SEVP Consumer Product Solution, dan SEVP Internal Audit serta beberapa tingkatan manajemen lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank memiliki sebanyak 17.234 pegawai. Per 31 Desember 2024, sebanyak 14 Pegawai berjenjang Pendidikan Doktor, 1.016 Pegawai berjenjang pendidikan Pasca Sarjana, 14.603 Pegawai berjenjang pendidikan Sarjana, 1.572 Pegawai berjenjang pendidikan Diploma serta 29 Pegawai berjenjang pendidikan SMU. Bank senantiasa memberikan pengembangan kompetensi kepada pegawai yang mengacu kepada pendekatan *experience*, *engagement*, dan *education*. Komposisi pengembangan disesuaikan dengan level dan kebutuhan jabatan saat ini (*current*) maupun jabatan proyeksi (*future*). Pengembangan kompetensi pegawai di BSI merupakan salah satu fokus utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendukung pencapaian visi dan misi Bank. Pengembangan kompetensi tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional.

Secara berkala BSI melakukan pengembangan pada teknologi informasi. Setelah fokus penguatan dan stabilitas teknologi informasi di 2023, pada tahun 2024 BSI masif melakukan penguatan *platform digital* dengan terus meningkatan jumlah *user mobile banking*, menambah *merchant* QRIS, EDC, memperbanyak dan juga merelokasi mesin ATM dan CRM ke tempat strategis, meningkatkan kapabilitas transaksi *cash management* dengan menghadirkan Bewize dan juga meningkatkan aksesibilitas masyarakat melalui BSI Agen. Konsistensi dalam transformasi digital berlanjut dengan melahirkan inovasi SuperApp BYOND by BSI. BYOND by BSI hadir sebagai jawaban atas segala kebutuhan nasabah, dengan tagline #SEMUA JADI MUDAH. Hadirnya SuperApp ini menegaskan semangat Bank untuk menyediakan layanan finansial, sosial dan spiritual yang komprehensif dan terintegrasi.

Puncak inovasi ini menjadi sebuah langkah revolusioner untuk memperluas inklusi perbankan syariah sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintah, serta menjadi *game changer* bagi layanan digital perbankan syariah di Indonesia. BYOND by BSI menandai komitmen kuat Bank untuk senantiasa adaptif, *agile*, inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki Bank, Direksi telah melakukan pengelolaan secara efektif terhadap sumber daya tersebut sehingga di tahun 2024 Bank telah mencatatkan kinerja yang baik. Direksi senantiasa mempertimbangkan kondisi perekonomian baik global, nasional maupun industri perbankan dalam mengembangkan strategi bisnis, sehingga mampu mengatasi kendala-kendala khususnya yang terkait dengan dampak kondisi perekonomian terhadap bisnis Bank. Oleh karena itu, pada analisis kinerja Bank, izinkan kami menyampaikan telaah perekonomian baik di tingkat global, nasional maupun pada industri perbankan.

Tinjauan Makro Ekonomi

International Monetary Fund (IMF), dalam World Economic Outlook (WEO) Januari 2025, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 3,2% *year-on-year* (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat 3,3% yoy. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tersebut terutama disebabkan oleh pemulihan ekonomi di beberapa negara, terutama di Kawasan Euro Area (EA) dan Asia, yang tidak sesuai dengan prakiraan awal.

Ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh solid, terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, sejalan dengan meredanya tekanan inflasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Euro Area (EA) cenderung tertahan meskipun inflasi dalam tren menurun. Sejalan dengan Euro Area, pemulihan ekonomi Tiongkok juga terhambat akibat krisis properti yang berkepanjangan, meski sejumlah kebijakan ekspansif telah diimplementasikan oleh Pemerintah Tiongkok. Selain itu, Jepang juga mengalami perlambatan akibat disrupsi pasokan yang bersifat temporer.

Di tengah tekanan eskalasi tensi geopolitik ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi dengan tumbuh stabil pada tahun 2024, sebesar 5,03% yoy. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah kontraksi net eskpor, seiring dengan penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi domestik juga sedikit tertahan akibat turunnya permintaan eksternal, yang tercermin dari kontraksi *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur sejak awal Triwulan III-2024 hingga November 2024, namun keyakinan konsumen dan pertumbuhan penjualan eceran masih kuat, sejalan dengan tetap resiliennya permintaan domestik.

Sektor perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2024. Untuk terus memperkuat daya saing dan mendorong pengembangan yang berkelanjutan, OJK telah menetapkan lima fokus utama pengembangan perbankan syariah periode 2024–2025. Fokus tersebut meliputi konsolidasi bank syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyusunan pedoman untuk inovasi produk, penguatan peran bank syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan kontribusi bank syariah dalam pengembangan UMKM. Untuk mendukung strategi ini, OJK telah meluncurkan tiga pedoman produk baru yang dirancang untuk memperluas dan memperkuat portofolio produk perbankan syariah. Pedoman tersebut mencakup Produk Pembiayaan *Mudarabah*, Implementasi *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA) dengan akad *Mudharabah Muqayyadah*, serta Implementasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Ketiga pedoman ini diharapkan dapat mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan memperkuat posisi perbankan syariah di pasar nasional.

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri serta memperhatikan tantangan yang ada, maka Bank menetapkan target pasar pembiayaan sebesar Rp272,99 triliun dan sebesar Rp321,27 triliun untuk dana pihak ketiga. Berdasarkan target pasar tersebut, Bank menargetkan Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib* sebesar Rp24,70 triliun di tahun 2024.

Untuk mencapai target pasar tersebut, telah ditetapkan persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Persentase Penyaluran Dana BSI per 31 Desember 2024

Jenis		Tenor	*Rate*	
Corporate		1-10 Tahun	6,04%-10,09%	
Commercial		1-10 Tahun	8,79%-12,84%	
SME	*Linkage*	1-10 Tahun	Non-Murabahah 11,25%-12,00%	Murabahah 11,50%-12,25%
		>10 Tahun	Non-Murabahah 12,25%-13,00%	Murabahah 12,50%-13,25%
	Local Champion Value Chain	<5 tahun	Non-Murabahah 12,25%-13,00%	Murabahah 12,50%-14,25%
		>5 - 10 tahun	Non-Murabahah 13,25%-14,00%	Murabahah 12,50%-14,25%
Mikro		1-5 tahun	17,58% - 33,94%	
Griya		1-30 Tahun	8,75 % - 11,25%	
Cicilan Emas		1-5 tahun	9,25% - 9,50%	
Gadai Emas		1 tahun	0,81% - 1,51% flat/bulan	
Mitraguna		1-15 tahun	9,25% - 10,50%	
Pensiun		1-15 tahun	10,50% - 11,50%	
Oto	*New Car*	1-7 tahun	8,75%	
	Used Car & New Motorcycle	1-5 tahun	9,75% - 10,50%	

Selain itu, BSI juga telah menetapkan persentase penghimpunan dana untuk tabungan deposito dan giro yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Persentase Penghimpunan Dana BSI per 31 Desember 2024

Jenis	Nisbah (%)
Giro *mudharabah*	43,07
Deposito *mudharabah*	-
1 Bulan	25,19
3 Bulan	27,69
6 Bulan	28,15
12 Bulan	26,19

Strategi dan Kebijakan Strategis

Tahun 2024 masih menjadi tahun yang *challenging* akibat ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan *moneter* yang ketat. Secara global inflasi mengalami trend penurunan. Akan tetapi tingkat inflasi turun dalam laku yang lebih lamban dibandingkan dengan target Bank Sentral negara-negara maju. Sementara itu, suku bungan acuan BI diperkirakan akan dijaga tinggi untuk menjaga *outflow* aliran dana dari pasar keuangan domestik akibat perilaku *wait and see* dari pelaku bisnis.

Ditengah kondisi likuiditas yang masih menantang dan sebagai upaya untuk mendukung target usaha serta pencapaian jangka menengah dan jangka panjang, maka BSI telah menyiapkan strategi dan kebijakan strategis yang akan ditempuh sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan *Sustain*, BSI akan terus menjalankan strategi yang terbukti memberikan nilai tambah kepada kinerja bank yaitu mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan *sustain*.
2. Optimalisasi DPK dan *Liquidity Management*, BSI akan melakukan strategi ekspansi dana ritel khususnya pada produk tabungan, menjaga konsentrasi deposan inti, dan menggali peluang pendanaan lainnya seperti dengan penerbitan sukuk.
3. Penetrasi *Ecosystem*, BSI akan mempercepat pertumbuhan bisnis melalui fokus penetrasi pada 6 (enam) *ecosystem* unggulan antara lain *household*, *education*, *spiritual and charity*, *government spending*, *healthcare*, dan *investment* dengan menawarkan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan nasabah.

4. *Digital and Transaction Banking*, BSI akan terus meningkatkan digitalisasi pada bisnis bank melalui peningkatan *user* aktif *mobile banking*, *shifting* transaksi dari cabang ke *channel* elektronik dan *digital*, serta digitalisasi *business process* untuk mempercepat SLA layanan nasabah dan peningkatan *fee based income* Bank.
5. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas dengan melanjutkan penataan jaringan dan meningkatkan produktivitas pegawai dengan melakukan *redeployment* pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan 5 (lima) fokus strategi di atas, BSI juga melakukan penguatan *fundamental enablers* yaitu penguatan manajemen organisasi, stabilisasi dan *upgrade core banking*, peningkatan keamanan siber IT, penguatan keamanan jaringan & informasi, pengembangan operasional TI, kerjasama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kriteria jaminan pengamanan dan kerahasiaan data, penyusunan *Business Continuity Management* (BCM), dan implementasi prinsip *Environmental*, *Social*, *Governance*, *Risk & Compliance* (ES-GRC) untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Direksi memimpin langsung perumusan strategi Bank melalui berbagai rapat antara Direksi dengan para manajemen kunci. Strategi tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024-2026 dan *Corporate Plan* yang pelaksanaannya senantiasa dilakukan evaluasi oleh Direksi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan melalui berbagai evaluasi laporan internal serta rapat-rapat bersama para *Group Head*.

Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan strategi yang telah diterapkan, pada tahun 2024 BSI telah menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Analisis kinerja BSI disajikan sebagai berikut.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Pada tahun 2024, BSI berhasil menjaga momentum pertumbuhan kinerja positif dan berkelanjutan dengan mencetak laba bersih mencapai Rp7,01 triliun, tumbuh dobel digit 22,83% secara tahunan (yoy). Tidak hanya laba bersih, BSI mencatat semua indikator keuangan lain rerata tumbuh dobel digit mulai dari Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan, dan aset Bank. Fokus pada pembiayaan yang berkualitas, transformasi digital dan inovasi menjadi kunci BSI menjaga kinerja yang impresif di tengah dinamika kondisi perekonomian.

Tahun 2024 merupakan periode menantang di mana kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian, dengan likuiditas yang ketat dan persaingan pasar yang tinggi. Di tengah kondisi itu, BSI terus mempertahankan fokus untuk senantiasa agile dan inovatif melalui transformasi digital serta menjaga pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas. Kinerja impresif tersebut adalah *impact* dari implementasi strategi 2024. Pertama, BSI fokus memperbaiki infrastruktur *transaction banking* dengan meluncurkan BYOND by BSI dan memperbanyak mesin ATM/CRM, EDC, BSI Agent, serta merchant QRIS. Kedua, menggali potensi bisnis model yang baru yakni bisnis berbasis emas, Tabungan haji, *bancassurance* dan bisnis *treasury*. Langkah yang diambil terbukti efektif sehingga BSI berhasil mempertahankan kinerja dengan pertumbuhan yang konsisten di atas industri perbankan, dengan fundamental yang kuat.

Dengan pertumbuhan laba bersih 22,83% yoy pada 2024, BSI menjadi salah satu di jajaran Top 10 Bank yang mencatatkan pertumbuhan kinerja tertinggi. Pencapaian laba yang tinggi tidak terlepas dari pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) yang tepat serta pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang tepat dan *sustain*.

Di tengah ketatnya kompetisi likuiditas sektor perbankan, BSI mencatat pertumbuhan DPK sebesar 11,46% menjadi Rp327,45 triliun. Pencapaian ini ditopang oleh dana murah (CASA) yang mencapai rasio 60,12% dari total DPK. Sepanjang 2024, CASA BSI mencapai Rp197 triliun atau naik 10,65% yoy. Tercatat, DPK BSI dari produk-produk tabungan mencapai Rp140,53 triliun, disusul deposito Rp130,58 triliun, dan giro Rp56,33 triliun. Pengelolaan DPK yang tepat memberikan dampak positif pada penurunan beban bagi hasil. Dengan memanfaatkan potensi *Islamic ecosystem* yang hanya dimiliki oleh bank syariah. Salah satunya lewat bisnis emas dan haji. Inovasi dan transformasi digital yang memudahkan transaksi secara digital juga turut berdampak positif terhadap penghimpunan DPK, ujarnya.

Penyaluran pembiayaan BSI juga menunjukkan kinerja impresif dengan pertumbuhan di atas industri. Pada 2024, BSI tercatat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp278,48 triliun, tumbuh 15,88% yoy. Berdasarkan segmen, pembiayaan yang disalurkan oleh BSI ke segmen *wholesale* mencapai Rp77,22 triliun atau tumbuh 14,38% yoy, disusul segmen ritel senilai Rp49,38 triliun (naik 16,86% yoy). Selain itu, pembiayaan untuk segmen konsumer tercatat Rp151,88 triliun atau naik 16,34% yoy. BSI memiliki demand side yang kuat, sehingga terus meningkatkan dan memperbaiki sisi *supply*. *Supply* ini adalah dari sisi produk hingga distribution channel, tidak hanya cabang tetapi juga elektronik *channel* seperti ATM, *mobile banking*, QRIS dan lainnya.

Pengelolaan pembiayaan secara tepat berimbas pada membaiknya kualitas pembiayaan yang disalurkan. Per akhir 2024, rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*/ NPF) *gross* BSI membaik menjadi 1,90%. *Cost of credit* (CoC) Bank juga membaik di level 0,83% pada 2024. Bank juga mencetak rasio imbal hasil menarik, yang terlihat dari angka *return on equity* (ROE) sebesar 17,77%. BSI menutup tahun 2024 dengan kenaikan aset sebesar 15,55% menjadi Rp408,61 triliun. Adapun *rasio return on asset* (ROA) perseroan pada 2024 berada di level 2,49%.

Langkah-langkah inovasi yang dilakukan Bank untuk membuka potensi bisnis yang lebih luas serta transformasi digital telah memberikan dampak yang besar terhadap keberhasilan perusahaan dalam menjaga tren pertumbuhan kinerja yang

berkelanjutan. Pada 2024, BSI berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*/FBI) sebesar Rp5,51 triliun, tumbuh signifikan sebesar 32,58% yoy. *Fee-based ratio* (FBR) Bank mencapai 17,95%, lebih baik dari periode sebelumnya.

Pada tahun 2024 BSI juga mampu melewati tantangan dengan memanfaatkan potensi *Islamic ecosystem* yang hanya dimiliki oleh bank syariah. BSI berhasil menggali potensi bisnis dari bisnis emas dan haji yang menjadi *unique product* BSI dan juga sebuah *golden opportunity*. Inovasi Bank dilakukan dengan membuka keran potensi baru dari bisnis emas baik gadai dan cicil emas yang memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pembiayaan. Hingga Desember 2024, bisnis emas di BSI mencapai Rp12,82 triliun, tumbuh 78,18% yoy, ditopang oleh produk cicil emas yang melesat 177,42% yoy menjadi Rp6,40 triliun dan produk gadai emas yang naik 31,33% menjadi Rp6,42 triliun. Basis nasabah bisnis emas juga berkembang, dengan nasabah gadai emas bertumbuh 11% yoy dan nasabah cicil emas naik 81% yoy.

BSI juga terus mendorong pertumbuhan tabungan haji melalui platform digital. Dari lini bisnis haji, Bank mencatatkan tren kenaikan jumlah nasabah tabungan haji menjadi 5,6 juta pada akhir 2024. Seiring dengan kenaikan jumlah penabung di segmen haji, saldo tabungan haji juga menunjukkan tren peningkatan menjadi Rp14,5 triliun pada akhir 2024.

Dari dua peluang tersebut, BSI dapat menyeimbangkan pertumbuhan dana, pembiayaan, hingga transaksi e-channel melalui SuperApp BYOND by BSI yang secara resmi diluncurkan pada November 2024. Terbukti dari kombinasi *Islamic ecosystem* dengan inovasi pada digitalisasi transaksi berdampak positif pada pertumbuhan FBI. Peluncuran BYOND by BSI mendorong peralihan (shifting) nasabah dan meningkatkan transaksi digital. Pada 2024, transaksi melalui e-channel BSI telah mencapai 851,5 juta transaksi, di mana sekitar 98,03% transaksi nasabah BSI sudah menggunakan *e-channel*. Jumlah pengguna BYOND by BSI saat ini mencapai 2 juta *user*, dengan jumlah transaksi 16 juta.

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Secara umum BSI telah memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan. Berbagai target yang telah ditetapkan telah terealisasi di tahun 2024. Laba bersih BSI tahun 2024 tercatat sebesar Rp7,00 triliun, yang melebihi target RKAP/RBB dengan pencapaian target sebesar 115,23%. Pencapaian target laba bersih telah berhasil mendorong pencapaian target total aset. Total aset BSI tercatat sebesar Rp408,61 triliun, yang melampaui target dalam RKAP/RBB, dengan pencapaian target sebesar 107,99%. Total pembiayaan yang diberikan oleh BSI tahun 2024 mencapai Rp278,49 triliun, yang juga melampaui target RKAP/RBB, dengan pencapaian target sebesar 102,01%. DPK BSI tahun 2024 tercatat sebesar Rp327,45 triliun, dengan pencapaian terhadap target RKAP/RBB sebesar 101,92%.

Kendala yang Dihadapi Bank

Sepanjang tahun 2024, Bank masih mengalami sejumlah kendala dan tantangan dalam pencapaian target, antara lain berupa kehandalan dan keamanan sistem serta produktivitas pegawai dan outlet yang masih belum optimal. Namun untuk mengatasi hal tersebut, Bank akan tetap melanjutkan strategi penataan jaringan khususnya penataan jaringan kantor yang masih berdekatan (*overlapping*), pemerataan sebaran lokasi (*coverage*), dan evaluasi kantor berkinerja rendah. Selain itu, bank juga akan melakukan redeployment pegawai dari unit *support/service/operation* ke unit bisnis disertai dengan *upskilling* dan *reskilling* kapabilitas pegawai.

Kendala lainnya yaitu tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank memiliki strategi yaitu berpartisipasi aktif dalam *event* regulator, seperti yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperkenalkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Selain itu, BSI juga menggelar *signature event* berskala besar, seperti BSI International Expo, yang mendukung penguatan *Islamic Ecosystem*. Acara ini menjadi wadah edukasi dan kolaborasi, menghadirkan *workshop*, pameran produk keuangan syariah, hingga *talkshow* bersama para ahli. Untuk mendukung pemberdayaan UMKM, BSI meluncurkan program seperti Talenta Wirausaha BSI dan Aceh Muslim Preneur. Melalui langkah ini, BSI berperan aktif dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM sebagai pilar penting ekonomi Indonesia.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang dan Prospek Usaha

Ekonomi global diprakirakan dalam tren perbaikan dengan pertumbuhan di kisaran 3,3% pada tahun 2025. Namun sejumlah risiko masih perlu terus diperhatikan, utamanya terkait terhambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok serta eskalasi tensi geopolitik di tengah ketidakpastian akibat pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat, yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di kisaran 4-8%-5,6% didorong oleh permintaan domestik. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap solid dan berada dalam tren yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid terutama didorong oleh permintaan domestik yang disertai dengan membaiknya kondisi perekonomian global. Namun demikian, sejumlah risiko seperti perlambatan pemulihan ekonomi global dan dampak eskalasi tensi geopolitik global perlu terus diperhatikan karena berpotensi menahan pemulihan kinerja sektor eksternal.

Dari sisi perbankan, penurunan suku bunga ke depan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar, sehingga dapat mendukung intermediasi perbankan. Penyesuaian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan sebagai respons atas kebijakan suku bunga BI, berpotensi mendorong pertumbuhan kredit pada kisaran 11%-13% di tahun 2025. Sementara itu, DPK diprakirakan tumbuh dikisaran 10% pada tahun 2025 sejalan dengan potensi pelonggaran kebijakan moneter BI di tahun 2025. Meski demikian, penurunan BI *rate* juga berpotensi menyebabkan peralihan dana ke instrumen keuangan lain, yang dapat menahan pertumbuhan DPK.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia akan mengimplementasikan kebijakan *pro-growth* untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh konsumsi, investasi, hingga ekspor.

Kondisi perekonomian baik global maupun nasional serta perkembangan industri perbankan khususnya perbankan syariah di masa yang akan datang menunjukkan adanya beberapa peluang yang dimiliki oleh BSI, di antaranya:

1. Preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan Syariah mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pertumbuhan pada sektor industry halal. Potensi besar ini didukung oleh keberadaan populasi Muslim Indonesia yang terbesar di dunia serta sinergi dari *stakeholders* ekonomi Syariah dari berbagai segment yang turut mendorong pertumbuhan bisnis dari Syariah Ekosistem.
2. Indonesia memiliki potensi mengembangkan industri halal pada sektor makanan dan minuman, fashion, farmasi, kosmetik dan *tourism*. Dalam mendukung pemberdayaan industry halal nasional BSI akan memberikan Solusi produk dan jasa yang komprehensif meliputi produk pembiayaan, pendanaan dan *transactional banking*.
3. BSI merupakan Bank Syariah terbesar dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan. Hal ini menjadi perluang bagi BSI untuk meningkatkan penetrasi produk perbankan Syariah.
4. Dukungan dari pemerintah terhadap keuangan syariah memberikan peluang besar bagi pertumbuhan BSI Dimana pemerintah mendorong percepatan pengembangan *industry* halal, UMKM berbasis syariah, dan peningkatan literasi keuangan syariah.
5. BSI berpotensi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di industri perbankan nasional dengan melayani semua lapisan Masyarakat dan memberikan Solusi *financial, social* dan spiritual.
6. BSI akan memperkuat sinergi dengan dengan Grup Usaha Bank Induk untuk semakin meningkatkan kapabilitas operasional bank dan produk yang ditawarkan kepada Masyarakat tentunya yang berbasis Syariah.

Tata Kelola Perusahaan

Sebagai bank syariah, BSI berkewajiban menerapkan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip syariah didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah, Bank telah menerapkan Tata Kelola Syariah yang meliputi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, penerapan fungsi kepatuhan syariah, penerapan fungsi manajemen risiko syariah, penerapan fungsi audit intern syariah dan pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.

Untuk memastikan penerapan tata kelola syariah, BSI telah melakukan *self assessment* terhadap penerapan GCG mengacu pada Surat Edaran OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Termasuk dalam penilaian 3 (tiga) aspek *governance* tersebut di antaranya adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

Penilaian *self assessment* dilakukan secara berkala setiap semester yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. Hasil *self assessment* pada bulan Juni 2024 dan bulan Desember 2024 berada pada peringkat 2 (dua) yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Dari hasil *assessment* tersebut, Bank telah melakukan upaya-upaya perbaikan dengan menindaklanjuti beberapa kelemahan yang direkomendasikan berdasarkan hasil *assessment*.

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola secara berkelanjutan, Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG TARIF yaitu, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertanggungjawaban), Independensi dan *Fairness* (Kewajaran/ Kesetaraan). Terkait dengan transparansi, BSI memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan Bank dapat diakses dengan jelas oleh pemangku kepentingan, baik nasabah, investor, regulator, maupun masyarakat umum. Transparansi di BSI juga berfungsi untuk menciptakan kepercayaan publik dan memperkuat integritas Bank sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. BSI secara rutin menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. BSI juga menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi yang lengkap tentang kinerja keuangan, pencapaian strategi, serta kegiatan operasional lainnya. Laporan ini juga mencakup informasi terkait dengan pengelolaan risiko, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, BSI juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang menunjukkan komitmen Bank terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan, termasuk inisiatif yang mendukung aspek sosial dan lingkungan.

Sebagai lembaga keuangan syariah, transparansi produk dan layanan yang ditawarkan oleh BSI sangat penting untuk memastikan bahwa nasabah dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang lengkap dan jelas. Setiap produk dan layanan yang ditawarkan oleh BSI dijelaskan dengan rinci, mencakup syarat dan ketentuan, manfaat, biaya, risiko, serta prosedur penggunaannya. Ini membantu nasabah memahami

sepenuhnya apa yang mereka dapatkan dari produk tersebut dan bagaimana produk tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. BSI juga melakukan kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman nasabah tentang produk-produk syariah yang ada, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait penggunaan produk perbankan.

BSI memberikan akses yang luas dan terbuka bagi pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kinerja, kebijakan, serta aktivitas yang dilakukan oleh bank. BSI menyediakan website yang mudah diakses, yang berisi berbagai informasi terkait produk, layanan, kebijakan, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, serta pengumuman-pengumuman penting lainnya. Selain website, BSI juga menggunakan berbagai saluran komunikasi lain seperti sosial media dan email untuk menyampaikan informasi kepada nasabah dan publik secara terbuka dan teratur.

Terkait Akuntabilitas, seluruh organ Bank telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selama tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain melaksanakan RUPS Tahunan, menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan rencana kerja lainnya, menyusun Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Keberlanjutan, memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian internal, melaksanakan rapat internal Direksi maupun bersama group terkait, memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalian risiko yang dihadapi Bank serta membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Bank, yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Pengawasan yang dilakukan antara lain melakukan fungsi pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB), menelaah Informasi Keuangan, pengendalian internal di BSI, Tingkat Kesehatan Bank, Satuan Kerja Manajemen Risiko, pelaksanaan kepatuhan di BSI, teknologi informasi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Dewan Komisaris juga telah memberikan Persetujuan terhadap hal-hal yang Wajib Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris serta melakukan kunjungan pengawasan.

Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah memberikan nasihat dan saran melalui berbagai cara yang memastikan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal. Pemberian nasihat dilakukan melalui rapat dan diskusi rutin dengan manajemen Bank atau lembaga yang terlibat, guna membahas masalah operasional dan memastikan kesesuaian dengan syariah. Selain itu, DPS juga dapat mengeluarkan laporan tertulis yang merinci hasil audit dan pengawasan mereka, termasuk rekomendasi atau perbaikan yang diperlukan.

Akuntabilitas organ perusahaan telah terlihat dengan berbagai macam capaian kinerja Bank, baik dari aspek operasional maupun keuangan. Dari sisi kepatuhan syariah, Bank telah memastikan bahwa seluruh produk dan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Terkait Responsibilitas (Pertanggungjawaban), BSI telah memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasionalnya, serta menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai bank syariah, landasan utama pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan BSI adalah *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Prinsip-prinsip syariah tersebut dijalankan BSI dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang tunduk dan berpedoman pada berbagai ketentuan serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur BSI sebagai perseroan terbatas, bank dan/atau perusahaan terbuka. Selain itu, Bank mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
2. ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF).
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
4. Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision.

Terkait dengan Independensi, BSI menjaga independensi dalam pengambilan keputusan, bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh pihak eksternal yang tidak sah, untuk memastikan objektivitas dan integritas dalam operasional bank. BSI melakukan optimalisasi seluruh fungsi organ yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan mendukung integritas informasi yang digunakan untuk pelaporan maupun pengambilan keputusan, sehingga mendorong penguatan pertahanan tiga lapis (*three lines model*), dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, serta mencapai tujuan BSI tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

Terkait dengan *Fairness* (Kewajaran/Kesetaraan), BSI memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi, serta menghormati hak-hak mereka sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku. BSI memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, diperlakukan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kesetaraan Hak bagi Pemangku Kepentingan
   BSI memastikan bahwa hak-hak seluruh pemegang saham, nasabah, mitra bisnis, karyawan, dan masyarakat dihormati sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setiap pihak mendapatkan akses informasi yang jelas dan akurat tanpa perlakuan khusus atau diskriminatif.
2. Keadilan dalam Pengambilan Keputusan
   Seluruh kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh BSI berlandaskan prinsip keadilan dan tidak menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar. Dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa, BSI menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya.
3. Kesetaraan dalam Kesempatan Kerja
   BSI menerapkan sistem rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier secara transparan dan adil tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya. Seluruh karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kariernya berdasarkan kinerja dan kemampuan.
4. Transparansi dan Perlindungan Nasabah
   BSI memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan layanan, termasuk risiko, manfaat, serta ketentuan yang berlaku, sehingga nasabah dapat mengambil keputusan finansial yang tepat. Bank juga menjamin perlindungan terhadap data dan hak-hak nasabah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan menerapkan prinsip *Fairness*, BSI berupaya menciptakan lingkungan yang adil dan kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Dalam rangka evaluasi penerapan prinsip TARIF, pada tahun 2024 Bank juga telah turut serta dalam kegiatan penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Hasil CGPI tahun 2024 memperoleh skor sebesar 91,80 dengan predikat "Sangat Tepercaya" yang menggambarkan bahwa organ perusahaan dan segenap anggota perusahaan BSI telah berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan prinsip dan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG).

Penilaian Komite di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan cakupan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite di bawah Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko
2. IT Steering Committee
3. Komite Policy & Procedure
4. Komite Bisnis
5. Komite Sumber Daya Manusia
6. Komite Aset dan Liabilitas
7. Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management

Penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan secara tahunan berdasarkan pelaksanaan tugas dan rapat yang telah dilaksanakan masing-masing komite selama tahun buku. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Direksi, selama tahun 2024 seluruh Komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DIREKSI SEBELUM RUPS TAHUNAN TAHUN 2024

Komposisi Direksi sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 8 (delapan) orang Direktur sebagai berikut:

Hery Gunardi	:	Direktur Utama
Bob Tyasika Ananta	:	Wakil Direktur Utama
Ngatari	:	Direktur Retail Banking
Tribuana Tunggadewi	:	Direktur Compliance & Human Capital
Anton Sukarna	:	Direktur Sales & Distribution
Ade Cahyo Nugroho	:	Direktur Finance & Strategy
Zaidan Novari	:	Direktur Wholesale Transaction Banking
Moh. Adib	:	Direktur Treasury & International Banking
Saladin Dharmanugraha Effendi	:	Direktur Information Technology
Grandhis Helmi Harumansyah	:	Direktur Risk Managament

KOMPOSISI DIREKSI SETELAH RUPS TAHUNAN TAHUN 2024

Pada tanggal 17 Mei 2024, RUPS Tahunan memutuskan:

1. Memberhentikan Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan, Ngatari sebagai Direktur Retail Banking, Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital, Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy, Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution, serta Moh Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking.
2. Mengangkat kembali untuk periode kedua Hery Gunardi sebagai Direktur Utama, Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital, Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy, serta Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution.
3. Mengangkat Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking dan Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking.

Sehingga komposisi Direksi setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 8 (delapan) orang Direktur sebagai berikut:

Hery Gunardi	: Direktur Utama
Bob Tyasika Ananta	: Wakil Direktur Utama
Tribuana Tunggadewi	: Direktur Compliance & Human Capital
Anton Sukarna	: Direktur Sales & Distribution
Ade Cahyo Nugroho	: Direktur Finance & Strategy
Zaidan Novari	: Direktur Wholesale Transaction Banking
Saladin Dharmanugraha Effendi	: Direktur Information Technology
Grandhis Helmi Harumansyah	: Direktur Risk Managament
Harry Gusti Utama	: Direktur Retail Banking
Ari Rizaldi	: Direktur Treasury & International Banking

Penutup

Direksi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Insan BSI yang terus berinovasi, berkarya, adaptif dan unggul, sehingga memberi kontribusi besar dalam kemajuan Bank serta ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Semoga tahun 2025 BSI dapat mewujudkan aspirasi sebagai bank yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah global, dan senantiasa mengalirkan kebermanfaatan secara berkelanjutan bagi umat.

Mari mensyukuri pencapaian yang telah kita raih sepanjang tahun 2024, dan bersiap menghadapi tantangan, menciptakan inovasi dan peluang, serta mengoptimalkan ruang pertumbuhan di masa depan. Bersama meniti masa depan, memberi manfaat untuk umat dan berkontribusi bagi negeri.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 21 Maret 2025
Atas Nama Direksi

Hery Gunardi
Direktur Utama



Dari kiri ke kanan:

1. **Ade Cahyo Nugroho** _ Direktur Finance & Strategy
2. **Tribuana Tunggadewi** _ Direktur Compliance & Human Capital (duduk)
3. **Anton Sukarna** _ Direktur Sales & Distribution
4. **Bob Tyasika Ananta** _ Wakil Direktur Utama (duduk)
5. **Saladin Dharmanugraha Effendi** _ Direktur Information Technology



Dari kiri ke kanan:

6. **Zaidan Novari** _ Direktur Wholesale Transaction Banking
7. **Hery Gunardi** _ Direktur Utama
8. **Grandhis Helmi Harumansyah** _ Direktur Risk Managament
9. **Ari Rizaldi** _ Direktur Treasury & International Banking (duduk)
10. **Harry Gusti Utama** _ Direktur Retail Banking

Laporan
Dewan Komisaris



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, dengan perjalanan yang penuh tantangan, BSI tetap menunjukkan ketahanan yang luar biasa.

Muliaman Dharmansyah Hadad
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

BSI mencatatkan pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan, dengan berbagai inovasi produk dan layanan yang terus memperluas inklusi keuangan serta memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. BSI telah menjalankan prinsip-prinsip syariah, memberikan solusi keuangan yang adil, transparan, dan memberikan manfaat sosial yang luas.

Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Bank untuk tahun buku 2024. Dalam laporan ini, akan disampaikan penilaian atas kinerja Direksi selama tahun 2024, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penilaian atas Komite di bawah Dewan Komisaris dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Direksi sejalan dengan kepentingan Bank. Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, rapat dengan manajemen Bank, serta Rapat dengan komite-komite. Sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) kali.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris terlibat aktif dalam penyusunan strategi Bank dan pengawasan terhadap implementasi strategi Bank. Pengawasan terhadap perumusan strategi Bank dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan memberikan arahan terhadap penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024-2026 dan *Corporate Plan*. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap implementasi strategi Bank melalui Rapat Gabungan bersama Direksi. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk evaluasi terhadap RBB dan *Corporate Plan* serta kinerja keuangan tahun 2024 setiap bulan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting dalam rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas, dan efisiensi.

Pandangan Atas Kinerja Direksi

Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 3,2%, sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun inflasi berhasil ditekan, ketidakpastian tetap tinggi akibat ketegangan perdagangan dan faktor geopolitik lainnya. Tensi geopolitik Israel-Palestina tereskalasi menjadi konflik beberapa negara di kawasan Timur Tengah, turut menahan pertumbuhan ekonomi global lebih lanjut. Sebagai kawasan penghasil minyak, konflik tersebut memicu volatilitas di pasar komoditas, terutama minyak mentah. Merespon hal tersebut, harga minyak mentah Brent sempat meningkat pada Oktober 2024 sebagai dampak *shock* akibat sentimen eskalasi tensi geopolitik. Namun demikian, secara umum harga komoditas sepanjang tahun 2024 terus mengalami penurunan, sejalan dengan suplai yang memadai di tengah permintaan yang relatif masih tertahan. Meredanya disrupsi suplai akibat menurunnya intensitas konflik Rusia-Ukraina juga turut mendukung terjaganya harga komoditas.

Dari sisi ekonomi nasional, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dengan stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan yang meningkat. Perekonomian Indonesia menunjukan resiliensi yang tumbuh stabil pada tahun 2024, sebesar 5,03% yoy. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah kontraksi net eskpor, seiring dengan penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Terjaganya permintaan domestik juga didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali selama tahun 2024, sehingga menopang daya beli masyarakat. Penurunan inflasi pada tahun 2024 terutama didorong oleh meredanya dampak *El Nino*, sehingga suplai pangan cukup terkendali. Selain itu, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang sejalan dengan turunnya harga minyak dunia, serta kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan kereta api, juga turut mendorong turunnya inflasi. Di samping itu naiknya harga emas global mendorong kenaikan harga emas dan perhiasan domestik sehingga mendorong inflasi inti.

Pada industri perbankan syariah, perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2024. Total aset perbankan syariah mencapai Rp980,29 triliun, tumbuh 9,89% yoy dengan pangsa pasar sebesar 7,72% pada Desember 2024. Pembiayaan syariah meningkat 9,92% yoy menjadi Rp643,55 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,09% yoy menjadi Rp753,6 triliun.

Likuiditas perbankan syariah tetap memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) sebesar 154,52% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 32,09%, jauh di atas batas minimum. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah tercatat sebesar 25.4%. Profitabilitas perbankan syariah tetap terjaga dengan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,04%. Risiko pembiayaan tetap terkendali, dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) gross sebesar 2,12% dan NPF *nett* sebesar 0,79%. Perbankan syariah juga terus beradaptasi dengan penguatan ekosistem keuangan syariah melalui berbagai kebijakan strategis.

Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2024. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencapaian kinerja dari sisi operasional maupun keuangan. Dari sisi operasional, total pembiayaan segmen *Commercial Banking* tahun 2024 sebesar Rp18,50 triliun, meningkat 42,63% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp12,97 triliun. Demikian pula dengan total pendanaan segmen *Commercial Banking* yang meningkat 71,86% dari Rp6,99 triliun di tahun 2023 menjadi Rp12,01 triliun di tahun 2024. Total pendanaan segmen Hubungan Kelembagaan tahun 2024 sebesar Rp89,46 triliun, meningkat 12,14% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp79,77 triliun. Total pembiayaan Segmen Ritel tahun 2024 sebesar Rp201,26 triliun, meningkat 16,47% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp172,81 triliun. Demikian pula dengan pendanaan Segmen Ritel tahun 2024 yang tumbuh 10,59% dari Rp185,57 triliun di tahun 2023 menjadi Rp205,23 triliun di tahun 2024. Pendanaan pada segmen *Treasury Banking* dan Kantor Pusat tahun 2024 sebesar Rp26,60 triliun meningkat Rp12,10 triliun dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp14,51 triliun.

Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib di tahun 2024 sebesar Rp25,30 triliun, meningkat 13,69% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp22,25 triliun. Dari pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, Hak bagi hasil milik bank tahun 2024 meningkat 7,08% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp16,26 triliun menjadi sebesar Rp17,41 triliun di tahun 2024. Laba bersih tahun 2024 sebesar Rp7,01 triliun, meningkat 22,83% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,70 triliun. Aset tahun 2024 sebesar Rp408,61 triliun, meningkat 15,55% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp353,62 triliun. Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp45,04 triliun, meningkat 16,27% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp38,74 triliun.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan bank juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Tingkat Kesehatan Bank dinilai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08/POJK 03/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*/RBBR). Peringkat Tingkat Kesehatan BSI dengan metode penilaian berbasis risiko (RBBR) berada pada Peringkat Komposit 2 (PK 2) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Meskipun ada beberapa tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan perubahan iklim, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan stabil di kisaran 3% hingga 3,5% pada tahun 2025. Risiko seperti terhambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok dan eskalasi tensi geopolitik di tengah ketidakpastian dari pergantian kepemimpinan Amerika Serikat masih perlu terus dicermati karena berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah kondisi perekonomian global tersebut, pada tahun 2025 ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan stabil, dengan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 5% hingga 5,5%. Harga komoditas terus ternormalisasi, sehingga inflasi secara umum, termasuk inflasi domestik, dalam tren yang menurun. Ke depan, inflasi diprakirakan tetap dalam kisaran target, yakni 2,51% dan dalam tren yang menurun. Inflasi yang rendah dan terkendali tersebut juga mendukung daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sejumlah risiko, terutama terkait dengan dampak dari eskalasi tensi geopolitik, antara lain berupa kenaikan harga komoditas, termasuk minyak, risiko terkait iklim, dan risiko terkait *imported inflation* dari naiknya harga komoditas global dan dari risiko depresiasi nilai tukar Rupiah perlu terus diperhatikan dan dicermati.

Pada tahun 2025, sektor perbankan syariah di Indonesia diperkirakan akan mengalami perkembangan yang signifikan. Beberapa faktor utama yang akan memengaruhi kondisi perekonomian dari sisi perbankan syariah pada tahun tersebut adalah dinamika pasar, kebijakan pemerintah, dan tren global yang mendorong pertumbuhan sektor ini. Penurunan suku bunga ke depan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar, sehingga dapat mendukung intermediasi perbankan. Suku bunga BI berdampak terhadap penyesuaian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan kredit dengan kisaran 11%-13% pada tahun 2025. Sementara itu, DPK diprakirakan tumbuh dikisaran 10% pada 2025 sejalan dengan adanya potensi pelonggaran kebijakan moneter BI di tahun 2025.

Pada tahun 2025, Bank Indonesia akan mengimplementasikan kebijakan pro-growth dengan fokus pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah diperkirakan akan terus melanjutkan tren positif, dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 4,8% hingga 5,6%.

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa BSI akan dapat memanfaatkan peluang yang ada di antaranya adalah preferensi syariah yang tinggi dari masyarakat atau nasabah, *positioning* BSI di industri perbankan syariah yang kuat, dukungan dari pemerintah terhadap keuangan syariah, *market share* syariah di industri nasional yang masih terbuka luas serta sinergi Bank Induk.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG) merupakan salah satu faktor kunci untuk

menjaga keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Untuk itu, BSI berkomitmen untuk merapkan GCG dalam kegiatan operasionalnya karena tata kelola yang baik tidak hanya mendukung pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa Bank beroperasi dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Bank. Dewan Komisaris berpandangan bahwa Penerapan GCG di Bank telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen sebagai berikut.

Pemenuhan Prinsip Syariah

BSI senantiasa berkomitmen untuk menerapkan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. Untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah, Bank telah menerapkan Tata Kelola Syariah yang meliputi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, penerapan fungsi kepatuhan syariah, penerapan fungsi manajemen risiko syariah, penerapan fungsi audit intern syariah dan pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah. Dewan Komisaris senantiasa berkoordinasi dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank telah memenuhi prinsip syariah.

Manajemen Risiko

Seiring dengan dinamika eksternal serta produk dan jasa BSI terus berkembang, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai wujud komitmen atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga sikap kehati-hatian manajemen dalam pengelolaan Bank. Dengan harapan, kinerja BSI akan terus tumbuh secara berkelanjutan dengan dukungan penerapan manajemen risiko yang memadai. Melalui penerapan manajemen risiko yang tepat, diharapkan dapat melindungi Bank secara individu maupun entitas afiliasinya dari dampak perubahan di lingkungan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Bank. Sesuai dengan regulasi, manajemen risiko Bank merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. BSI senantiasa melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kerangka manajemen risiko serta melakukan sosialisasi di lingkungan organisasi agar tercipta budaya risiko yang baik di lingkungan Bank.

Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi bersama Manajemen, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Internal Audit dan Eksternal Auditor, serta beberapa Unit terkait, Direksi dan Dewan Komisaris menilai pada tahun 2024 manajemen risiko telah berjalan secara memadai.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi BSI dalam rangka mengawal tercapainya tujuan Bank. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan 5 (lima) elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Di BSI, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang terdiri atas lingkungan pengendalian (*Internal Environment*), penetapan tujuan (*Objective Setting*), identifikasi kejadian/peristiwa (*Event Identification*), Penilaian risiko (*Risk Assessment*), respon atas risiko (*Risk Response*), aktivitas pengendalian (*Control Activity*), informasi dan komunikasi (*Information & Communication*) serta pemantauan (*Monitoring*).

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi. Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidentil terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja. Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan dimonitoring pelaksanaannya secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara keseluruhan telah berjalan memadai.

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan setiap pihak untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini tindakan penyimpangan di Bank. BSI memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor, menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Tindak lanjut tersebut dilakukan setelah Bank melakukan verifikasi bahwa laporan yang masuk terbukti benar dan didukung bukti memadai.

Unit Kerja atau fungsi yang menangani pengelolaan WBS bertanggungjawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama, serta mempunyai hubungan

komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Terkait implementasi *Whistleblowing System* (WBS), Dewan Komisaris memiliki peran dalam menelaah hasil laporan audit khusus dari laporan WBS.

Sosialisasi media pelaporan *whistleblowing system* dan Anti Gratifikasi kepada seluruh pegawai melalui *desktop* komputer pegawai, *website* Bank, penyampaian pada kegiatan *training, sharing session*, dan Taujih Pekanan, serta pemberitahuan kepada nasabah, mitra/rekanan Bank dan masyarakat. Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing Sytem* di Bank telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari pengelolaan laporan pengaduan serta tindaklanjut dari pengaduan tersebut. Pengaduan yang masuk selama tahun 2024 berjumlah 60 pengaduan. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 20 pengaduan sudah ditindaklanjuti, 3 pengaduan sedang ditindaklanjuti, 3 pengaduan belum ditindaklanjuti dan 34 pengaduan tidak layak untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil laporan yang telah ditindaklanjuti terdapat 17 (tujuh belas) laporan yang terbukti dan telah diberikan sanksi sesuai dengan aturan Bank.

Sustainabillity Governance

Sebagai bank syariah, BSI juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan memberikan manfaat sosial untuk masa depan. Hal ini sesuai dengan Maqashid Syariah yang meliputi Hifdz Ad-Din (menjaga agama), Hifdz An-Nafs (menjaga jiwa), Hifdz Al'Aql (menjaga akal), Hifdz Al-Maal (menjaga kekayaan), Hifdz An-Nasb (menjaga anak) dan Hifdz Al-Bi'ah (menjaga lingkungan).

Sebagai bentuk komitmen BSI dalam menjalankan praktik keberlanjutan yang sejalan dengan Maqasid Syariah, Bank telah memiliki struktur tata kelola keberlanjutan (ESG *Governance Structure*) yang tercantum dalam ESG *Guiding Principle*. Dalam mengimplementasikan ESG, BSI melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan aktif pada penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pengawasan aktif yang dilaksanakan mencakup penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, penyusunan Laporan Keberlanjutan, dan penetapan strategi keberlanjutan.

BSI telah melakukan penguatan struktur tata kelola keberlanjutan dengan membentuk ESG Working Group yang berada di bawah supervisi Wakil Direktur Utama sesuai dalam Surat Keputusan Direksi No. 03/219-KEP/DIR tanggal 6 Juni 2024 tentang Pembentukan ESG Group di bawah supervisi Wakil Direktur Utama & Penunjukkan Pejabat Perlindungan Data Pribadi (PPDP) di bawah supervisi Direktur Kepatuhan & SDM; serta menetapkan ESG Sub-Committee berada di bawah Risk Management Committee. Penguatan tata kelola juga dilakukan dengan penyusunan dan penerbitan Standar Prosedur Operasional (SPO) keuangan berkelanjutan, serta penyusunan dan penerbitan ESG Guiding Principle. BSI juga memperkuat tata kelola yang dilakukan dengan mengembangkan kerangka kerja keuangan berkelanjutan yang didasarkan pada visi keberlanjutan BSI yaitu "*The Best Global Islamic Bank Based on Implementation of Sustainable Finance*." Kerangka kerja keuangan berkelanjutan terdiri dari 3 (tiga) pilar strategi yaitu *Sustainable Banking, Sustainable Operation* dan *Sustainable Beyond Banking*.

Terkait dengan pilar *sustainable banking*, BSI memiliki komitmen menjadi *leader in sustainable product innovation*. Selanjutnya, pada pilar *sustainable operation* BSI memiliki komitmen untuk mencapai *net zero emission in operation by* 2033. Pada pilar *sustainable beyond banking*, komitmen BSI yaitu *menjadi leader in ZISWAF ecosystem for social impact to archive SDGs*.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara tahunan.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SEBELUM RUPS TAHUNAN TAHUN 2024

Komposisi Dewan Komisaris sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai berikut:

Muliaman Dharmansyah Hadad	: Komisaris Utama merangkap Independen
Adiwarman Azwar Karim	: Wakil Komisaris Utama merangkap Independen
Masduki Baidlowi	: Komisaris
Suyanto	: Komisaris
Abu Rokhmad	: Komisaris
Imam Budi Sarjito	: Komisaris
Sutanto	: Komisaris
Komaruddin Hidayat	: Komisaris Independen
Mohamad Nasir	: Komisaris Independen

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SETELAH RUPS TAHUNAN TAHUN 2024

Pada tanggal 17 Mei 2024, RUPS Tahunan memutuskan:

1. Memberhentikan Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen, Suyanto sebagai Komisaris, Masduki Baidlowi sebagai Komisaris, Imam Budi Sarjito sebagai Komisaris, Sutanto sebagai Komisaris, serta Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen.
2. Mengangkat kembali untuk periode kedua Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen, Suyanto sebagai Komisaris, Masduki Baidlowi sebagai Komisaris serta Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen.
3. Mengangkat Fauzi sebagai Komisaris, Nazaruddin sebagai Komisaris, serta Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen sebagai berikut:

Muliaman Dharmansyah Hadad	: Komisaris Utama merangkap Independen
Adiwarman Azwar Karim	: Wakil Komisaris Utama merangkap Independen
Masduki Baidlowi	: Komisaris
Suyanto	: Komisaris
Abu Rokhmad	: Komisaris
Fauzi	: Komisaris
Nazaruddin	: Komisaris
Komaruddin Hidayat	: Komisaris Independen
Mohamad Nasir	: Komisaris Independen
Felicitas Tallulembang	: Komisaris Independen

Penutup

Pencapaian di tahun 2024 tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Direksi, manajemen, dan karyawan BSI yang senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Bank. Dewan Komisaris juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah yang terus mempercayakan BSI sebagai mitra keuangan mereka, serta kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung perjalanan BSI selama ini.

Semoga pencapaian yang telah diraih pada tahun 2024 menjadi pijakan yang kokoh bagi BSI untuk terus berkembang di masa mendatang. Kami optimis bahwa dengan kerjasama yang solid, komitmen terhadap prinsip syariah, serta fokus pada keberlanjutan, BSI akan terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan perekonomian Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada BSI. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 21 Maret 2025
Atas Nama Dewan Komisaris



Muliaman Dharmansyah Hadad
Komisaris Utama merangkap Independen



Dari kiri ke kanan:

1. **Mohamad Nasir** _ Komisaris Independen
2. **Felicitas Tallulembang** _ Komisaris Independen (duduk)
3. **Abu Rokhmad** _ Komisaris
4. **Adiwarman Azwar Karim** _ Wakil Komisaris Utama merangkap Independen (duduk)
5. **Fauzi** _ Komisaris



Dari kiri ke kanan:

6. **Muliaman Dharmansyah Hadad** _ Komisaris Utama merangkap Independen (duduk)
7. **Nazaruddin** _ Komisaris
8. **Komaruddin Hidayat** _ Komisaris Independen
9. **Suyanto** _ Komisaris
10. **Masduki Baidlowi** _ Komisaris (duduk)

Laporan
Dewan Pengawas Syariah



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham yang Terhormat,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua.

Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Ketua
Dewan Pengawas Syariah

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan dan peluang bagi BSI dalam perjalanan menjalankan operasionalnya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang berpegang pada prinsip syariah, kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap produk dan layanan yang disediakan oleh bank agar senantiasa sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang berlaku.

Sesuai regulasi yang berlaku, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan akivitas BSI berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami, DPS senantiasa berkolaborasi dengan Direksi dan Manajemen, dalam rangka memberikan arahan serta mengawasi implementasi kebijakan syariah yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Pada tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Rapat**
   Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh keputusan dan hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan hal tersebut merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib didokumentasikan dengan baik oleh Bank. Sepanjang Tahun 2024, DPS telah melaksanakan 27 (dua puluh tujuh) kali rapat DPS.
2. **Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah**
   Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran melalui berbagai cara atau media untuk memastikan ketentuan internal BSI sesuai dengan prinsip syariah. Pemberian nasihat dilakukan melalui rapat dan diskusi rutin dengan manajemen BSI, terkait berjalannya bisnis dan operasional. Selain menerbitkan Risalah Rapat atau Opini DPS terkait bisnis dan operasional BSI, DPS juga menerbitkan laporan tertulis yang merinci hasil audit dan pengawasan syariah, termasuk rekomendasi atau perbaikan yang diperlukan. Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah menerbitkan sebanyak 54 (lima puluh empat) Risalah Rapat atau Opini DPS.
3. **Laporan Hasil Pengawasan DPS**
   Pada periode tahun 2024, DPS telah melakukan pelaporan atas Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu, berkaitan dengan kebijakan dan jalannya Kepengurusan oleh Direksi terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah, nasihat dan Opini DPS Kepada Direksi, Pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, dan berkaitan dengan program DPS lainnya.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan penilaian kinerja DPS dilakukan secara *Self assessment* yang dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selama tahun 2024, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBELUM RUPS TAHUNAN TAHUN 2024

Komposisi Dewan Pengawas Syariah sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	: Ketua Dewan Pengawas Syariah
DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	: Anggota Dewan Pengawas Syariah
Dr. H. Oni Sahroni, MA	: Anggota Dewan Pengawas Syariah
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	: Anggota Dewan Pengawas Syariah

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH SETELAH RUPS TAHUNAN TAHUN 2024

Pada tanggal 17 Mei 2024, RUPS Tahunan memutuskan:

1. Memberhentikan Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, serta Didin Hafidhuddin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengangkat kembali untuk periode kedua Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah, Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, serta Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengangkat Jaih Mubarok sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, serta Abdul Ghofur Maimoen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.

Sehingga Komposisi Dewan Pengawas Syariah setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 4 (empat) orang anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah
DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	:	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Dr. H. Oni Sahroni, MA	:	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	:	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag	:	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Penutup

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak; Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, SEVP, karyawan, maupun seluruh nasabah yang telah memberikan dukungan kepada BSI dalam menjalankan bisnis dan operasional sesuai dengan Prinsip Syariah. Kepercayaan yang diberikan kepada BSI adalah amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Kami berharap BSI akan terus berkembang menjadi bank syariah yang tidak hanya unggul dalam hal kinerja, tetapi juga dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia melalui penerapan prinsip syariah yang adil dan *rahmatan lil 'alamin*.

Semoga Allah SWT senaniasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya untuk keberhasilan BSI dalam menjalankan visi dan misi nya di masa mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 21 Maret 2025
Atas Nama Dewan Pengawas Syariah



Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Ketua Dewan Pengawas Syariah



Dari kiri ke kanan:

1. **Dr. H. Oni Sahroni, MA** _ Anggota Dewan Pengawas Syariah
2. **Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag** _ Anggota Dewan Pengawas Syariah (duduk)
3. **Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag** _ Ketua Dewan Pengawas Syariah
4. **DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H** _ Anggota Dewan Pengawas Syariah (duduk)
5. **Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.** _ Anggota Dewan Pengawas Syariah

Surat Pernyataan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan Tahun 2024
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 Maret 2025

DIREKSI



Hery Gunardi
Direktur Utama



Bob Tyasika Ananta
Wakil Direktur Utama



Harry Gusti Utama
Direktur Retail Banking



Tribuana Tunggadewi
Direktur Compliance & Human Capital



Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance & Strategy



Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution



Saladin Dharmanugraha Effendi
Direktur Information Technology



Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Risk Management



Zaidan Novari
Direktur Wholesale Transaction Banking



Ari Rizaldi
Direktur Treasury & International Banking

DEWAN KOMISARIS



Muliaman Dharmansyah Hadad
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen



Adiwarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen



Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen



Mohamad Nasir
Komisaris Independen



Felicitas Tallulembang
Komisaris Independen



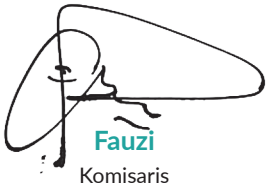
Suyanto
Komisaris



Masduki Baidlowi
Komisaris



Abu Rokhmad
Komisaris



Fauzi
Komisaris



Nazaruddin
Komisaris



PROFIL PERUSAHAAN

03 »



Identitas Perusahaan



NAMA PERUSAHAAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

NAMA PANGGILAN

BSI

BIDANG USAHA

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

DASAR HUKUM PENDIRIAN

- Berita Negara RI No.43 – 28 Mei 1971-Tambahan No. 242.
- Berita Negara RI No. 85 - 23 Oktober 2009 - Tambahan No. 26142
- Berita Negara RI No. 96 - 1 Desember 2009 Tambahan No. 27908.
- Akta No. 8 - 8 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris Fathia Helmi S.H.
- Akta No. 38 - 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn.

IZIN USAHA

- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009
- Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021.

DATA JARINGAN KANTOR

- 10 Kantor Wilayah
- 153 Kantor Cabang (KC)
- 1 Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)
- 886 Kantor Cabang Pembantu (KCP)
- 60 KCP Mobile (dhi: MKK)
- 91 Kantor Fungsional (KF)
- 23 Konter Layanan Priority
- 754 Layanan Gadai
- 5.425 Anjungan Tunai Mandiri (ATM)



MODAL DASAR

Rp40.000.000.000.000

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Rp23.064.630.069.000

KODE SAHAM

BRIS

AKSES INFORMASI

Alamat Kantor Pusat

Gedung The Tower,
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930

Telepon

(62-21) 30405999

Faksimili

(62-21) 30421888

Website

https://www.bankbsi.co.id/

Email

contactus@bankbsi.co.id

Sekretaris Perusahaan

Wisnu Sunandar
Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

Investor Relation
Rizky Budinanda
Email: investor-relations@bankbsi.co.id

Media Sosial

Facebook : Bank Syariah Indonesia
Instagram : @banksyariahindonesia
@lifewithbsi
@BSIMobile
Youtube : Bank Syariah Indonesia
Twitter : @bsihelp
@bankbsi_id

Call Center

14040
1500789
(khusus melayani nasabah perusahaan dan institusi)

Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang

Kantor Wilayah

Region Office Aceh

Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh No. 15 H,
Kel. Keuramat, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh
Telp : 061-4534466
Fax : 061-4534466
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Region Office Medan

Jl. Kejaksaan No. 3B, Kel. Petisah Tengah,
Kec. Medan Petisah Kota Medan
Telp : 061-4534466
Fax : 061-4534466
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Region Office Palembang

Jl. Demang Lebar Daun No. 507, Kel. Lorok Pakjo,
Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
Telp : 0711-318904
Fax : -
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Region Office Jakarta 1

Wisma Mandiri 2, Jl. M.H. Thamrin No.5, RT.2/RW.1,
Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Wil. Kota Jakarta Pusat
Telp : -
Fax : -
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Region Office Jakarta 2

Gedung BSI, Jl. Sultan Hasanudin No.57 RT/RW 6/3,
Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan
Telp : 021-7212 0169
Fax : -
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Region Office Bandung

Jl. Asia Afrika No.174,
Kel. Paledang, Kec. Lengkong Kota Bandung
Telp : +62 22 20544940
Fax :
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Region Office Semarang

Jl. Pandanaran No.127,
Kel. Mugassari, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
Telp : 024-76442018/024-76442021
Fax : -
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Region Office Surabaya

Jl. Basuki Rahmat No.17-19,
Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya
Telp : 031 99255416
Fax : 031 99255416
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Region Office Kalimantan

Jl. Lambung Mangkurat No. 16,
Kel. Kertak Baru, Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin
Telp : (0511) 3366408, 3366409
Fax : -
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id

Region Office Makassar

Jl. Dr. Ratulangi No. 79,
Kel. Labuang Baji, Kec. Mamajang Kota Makassar
Telp : 0411 5088811
Fax : -
Email : contactus@bankbsi.co.id
Web : www.bankbsi.co.id



Kantor Cabang

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
1.	KC Banda Aceh Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 6, Kel. Kp. Baru, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh	Telp : (0655) 7551109, 7551558 Fax : (0651) 33945	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
2.	KC Banda Aceh Ahmad Dahlan	Jl. Ahmad Dahlan No. 111, Kel. Merduati, Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh	Telp : 0651 - 32313, 32314, 32301 Fax : 0651 - 32317	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
3.	KC Banda Aceh T. Panglima Nyak Makam	Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 100 A - 100 D, Kel. Desa Doy, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh	Telp : 0651) 22900 (hunting), 7410714, 32929, 33869 Fax : 31190	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
4.	KC Sigli 2	Jalan Merdeka No.6, Kel. Blok Bengkel, Kec. Kota Sigli Kab. Pidie	Telp : (0653) 22450 Fax : 21306	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
5.	KC Sigli 1	Jl. Prof. A Majid Ibrahim No. 6, Kel. Blang Asan, Kec. Kota Sigli Kab. Pidie	Telp : - Fax : -	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
6.	KC Lhokseumawe 1	Jl. Muhammad Malikul Zahir No.135C, Kel. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Telp : (0645) 631146, 631147, 631148 Fax : (0645) 41555	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
7.	KC Bireuen Simpang IV	JL. Medan - Banda Aceh, Simpang IV, Kel. Bireuen Meunasah Capa, Kec. Kota Juang Kab. Bireuen	Telp : (0644) 21126, 22044 Fax : 22040	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
8.	KC Kuala Simpang	Jl. Tengku Panglima Polem No. 23 - 24, Kel. Kuala Simpang, Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang	Telp : (0641) 333366 Fax : 333367	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
9.	KC Langsa Darussalam	Jl. Darussalam No.1, Kel. Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota Kota Langsa	Telp : (0641) 21033 Fax : 21170	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
10.	KC Lhokseumawe Merdeka 3	Jl. Merdeka No.1, Kel. Kota Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Telp : (0645) 41906 Fax : 21306	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
11.	KC Takengon	Jl. Yos Sudarso No.164, Takengon, Kel. Kuteni Reje, Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah	Telp : (0643) 21294 Fax : 21119	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
12.	KC Meulaboh Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol, Kel. Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	Telp : (0655) 7551961 Fax : 7551010	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
13.	KC Simeulue	Pertokoan Suak Tungkul Kavling 1 No. 5/6, Jl. Tgk. Diujung Sinabang, Kel. Amiria Bahagia, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue	Telp : (0650) 21547 Fax : (0650) 21556	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
14.	KC Blangpidie	Jl. Persada No. 99A, Kel. Keudee Siblah, Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya	Telp : (0659) 91008, 91127 Fax : 91070	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
15.	KC Kutacane	Jl. Iskandar Muda No.14, Kel. Perapat Hilir, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara	Telp : (0629) 21031 Fax : 21170	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
16.	KC Tapaktuan	Jl. Nyak Adam Kamil No. 42, Kel. Hulu, Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan	Telp : (0656) 21456 Fax : 21088	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
17.	KC Batam Windsor Central	Komplek Windsor Central Blok A No. 3-4, Jl. Pembangunan, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja Kota Batam	Telp : (0778) 431331 Fax : (0778) 432727	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
18.	KC Tanjung Pinang	Jl. Basuki Rahmat No. 1-3, Kel. Tanjung Ayun Sakti, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	Telp : (0771) 313788 Fax : (0771) 313995	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
19.	KC Medan Kejaksaan	Jl. Kejaksaan No. 3B, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan	Telp : (061) 4153866, 4151466 Fax : (061) 4511867	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
20.	KC Lubuk Pakam	Jl. Dr. Sutomo No.12A-12B, Kel. Lubuk Pakam I - II, Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang	Telp : (061) 7952555 Fax : (061) 7950419	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
21.	KC Medan S Parman	Jl. S. Parman No. 250 E/8, Kel. Petisah Hulu , Kec. Medan Baru Kota Medan	Telp : (061) 455 6870/451 5683 Fax : 451 5671	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
22.	KC Medan Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 7, Kel. Petisah Hulu, Kec. Medan Baru Kota Medan	Telp : (061) 4550755 Fax : (061) 4550766, 4537627	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
23.	KC Binja	Jl. Sukarno Hatta No. 22-23, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur Kota Binjai	Telp : (061) 8826396 Fax : (061) 8826138	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
24.	KC Pekanbaru Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 450, Kel. Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru	Telp : (0761) 849191, 849192, 849193, 849194 Fax : (0761) 849190, 31668	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
25.	KC Dumai	Jl. Jenderal Sudirman No. 162, Kel. Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur Kota Dumai	Telp : (0765) 33555 Fax : (0765) 32379	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
26.	KC Pekanbaru Harapan Raya	Jl. Haji Imam Munandar No. 8, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Kota Pekan	Telp : (0761) 862222 Fax : (0761) 849799	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
27.	KC Duri	Jl. Hangtuah, Kel. Batang Dui, Kec. Mandau Kab. Bengkalis	Telp : (0765) 598990 Fax : (0765) 598993	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
28.	KC Pematangsiantar Perintis	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar	Telp : (0622) 435858, 435857, 435861 Fax : (0622) 435848	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
29.	KC Rantau Prapat	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 4, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu	Telp : (0624) 24880, 24205, 25186 Fax : (0624) 24653	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
30.	KC Padangsidempuan	Jl. Sudirman No. 130 A, Kel. Wek I, Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan	Telp : (0634) 28200 Fax : (0634) 28103	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
31.	KC Sibolga	Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 22, Kel. Huta Tonga Tonga, Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga	Telp : (0631) 24555 Fax : (0631) 26722	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
32.	KC Bandar Lampung Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 189, Kel. Gotong Royong, Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	Telp : (0721) 258952, 258960 Fax : (0721) 263588	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
33.	KC Bandar Jaya	Komp. Pertokoan Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3, Jl. Proklamator Raya, Kel. Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah	Telp : (0725) 529825, 529826 Fax : (0725) 529831	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
34.	KC Metro A Yani	Jl. Ahmad Yani No. 9, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat Kota Metro	Telp : (0725) 7851606 Fax : (0725) 7851605	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
35.	KC Bengkulu S Parman 1	Jl. S. Parman No. 15, Kel. Padang Jati, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu	Telp : (0736) 342007 Fax : (0736) 346707	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
36.	KC Bengkulu Adam Malik	Jl. Adam Malik RT/RW 023/08, Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu	Telp : (0736) 27688/20938 Fax : 26448	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
37.	KC Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No. 12 RT 05, Kel. Taba Jemekeh, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau	Telp : 0733-7329623/14/16/ 082881131705/ 82881131704 Fax : -	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
38.	KC Jambi Gatot Subroto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 127 A-B, Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi Kota Jambi	Telp : (0741) 27730, 27726 Fax : (0741) 27733	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
39.	KC Jambi Pattimura	Jl. Kapt. Pattimura No. 29-30 RT 21, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru Kota Jambi	Telp : 0741 - 7552571, 7552572, 7552573 Fax : 0741 - 7552574	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
40.	KC Padang Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol No.17, Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan Kota Padang	Telp : (0751) 21113, 20765 Fax : (0751) 24768	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
41.	KC Bukittinggi Sudirman 1	Jl. Jenderal Sudirman No. 73, Kel. Kayu Ramang, Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi	Telp : (0752) 627633 Fax : (0752) 627637	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
42.	KC Padang Belakang Olo	Jl. Belakang Olo No. 45, Kel. Kamp Jao, Kec. Padang Barat Kota Padang	Telp : 0751 - 841818, 841819 Fax : (0751) 841808	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
43.	KC Palembang Demang	Jl. Demang Lebar Daun No. 2311, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang	Telp : (0711) 421919 Fax : (0711) 419952	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
44.	KC Pangkal Pinang	Jl. Masjid Jamik No. 123, Kel. Masjid Jamik, Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang	Telp : (0717) 432229 Fax : (0717) 431445	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
45.	KC Prabumulih Sudirman	JL. Jend. Sudirman No. 7-8 RT 01/10, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih	Telp : (0713) 322888 Fax : (0713) 322565	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
46.	KC Palembang Sudirman	Jl. Jendral Sudirman KM 3,5, Kel. 20 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang	Telp : (0711) 315999, 310751 Fax : (0711) 310752	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
47.	KC Baturaja Rahman Hamidi	Jl. Let. R Hamidi No. 30 A-B RT 03 RW 01 , Kel. Kemalaraja , Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu	Telp : (0735) 324888/0735 323333/0735 325522/0735 325554 Fax : (0735) 324888	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
48.	KC Bekasi Summarecon	Komplek Ruko Summarecon Bekasi, Rukan Sapphire Commercial Blok SF 11 12, Jl. Bulevar Selatan, Kel. Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi	Telp : (021) 8853990, 8856368, 8840355, 8853991, 88855418 Fax : (021) 8856406	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
49.	KC Bekasi Cikarang	Ruko Cikarang Central City, Blok G No. 1-2, Kel. Ciantra, Kec. Cikarang Selatn Kab. Bekasi	Telp : (021) 89902076, 89902077 Fax : (021) 89906765	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
50.	KC Jakarta Kebon Jeruk 1	Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 54 D (Jl. Raya Kelapa Dua No. 1) RT. 004 RW. 003, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk Wil. Kota Jakarta Barat	Telp : (021) 53662464, 53662465, 53662467 Fax : (021) 53662472	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
51.	KC Tangerang Ciledug	Jl. HOS Cokroaminoto No. 69, Kel. Sudimara Jaya, Kec. Ciledug Kota Tangerang	Telp : (021) 73458147, 73458148, 73458149 Fax : (021) 73458150	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
52.	KC Jakarta Kelapa Gading 1	Komplek Graha Bulevar Blok KGC No. A-02 dan A-03, Jl. Boulevard Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Wil. Kota Jakarta Utara	Telp : (021) 29375262, 29375261 Fax : (021) 29375197, 29375198	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
53.	KC Jakarta Tanjung Priok 1	Jl. Enggano No. 42B - 42, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok Wil. Kota Jakarta Utara	Telp : (021) 43906060, 43906055 Fax : (021) 43906058, 43906059	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
54.	KC Jakarta Pemuda	Komplek Graha Mas Pemuda, Blok AB1 dan AB2 Jl. Pemuda, Rawamangun, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung Wil. Kota Jakarta Timur	Telp : 021 - 47882680 / 81/82/83 Fax : 021 - 47882684 / 85	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
55.	KC Jakarta Pondok Kelapa	Ruko Komplek Billy & Moon Blok E No. 5A-5B, Jl. Raya Kalimalang, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Wil. Kota Jakarta Timur	Telp : (021) 86903501 Fax : (021) 86903502	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
56.	KC Jakarta Jatinegara	Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No. 8-9, Jl. Matraman Raya No. 148, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Wil. Kota Jakarta Timur	Telp : (021) 85904866 Fax : (021) 85905634	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
57.	KC Jakarta Thamrin	Jl. M. H. Thamrin No. 5, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng Wil. Kota Jakarta Pusat	Telp : (021) 2300509, 39839000 Fax : (021) 39832939	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
58.	KC Jakarta Bendungan Hilir	Jl. Bendungan Hilir Raya No. 84 A - B, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang Wil. Kota Jakarta Pusat	Telp : 021 - 57851054 - 56 Fax : 021 - 57851038	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
59.	KC Jakarta The Tower	Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27 Kav.12, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi Wil. Kota Jakarta Selatan	Telp : - Fax : -	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
60.	KC Tangerang Hasyim Ashari	Jl. KH. Hasyim Ashari 8 A-C, Kel. Buaran Indah, Kec. Cipondoh Kota Tangerang	Telp : (021) 55781230, 55781231, 55781232 Fax : (021) 55781233	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
61.	KC Cilegon Tirtayasa 1	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 115 A, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang Kota Cilegon	Telp : (0254) 399444, 375648 Fax : (0254) 375645	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
62.	KC Serang	Jl. Ahmad Yani No. 175 C-D, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang Kota Serang	Telp : (0254) 222984, 210191 Fax : 0254) 222985	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
63.	KC Bogor Pajajaran Sukasari	Jl. Pajajaran No. 8, Kel. Baranang Siang, Kec. Bogor Timur Kota Bogor	Telp : (0251) 8350562, 8350563, 8350564 Fax : (0251) 8350565	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
64.	KC Bogor Cibinong	Ruko Graha Cibinong Blok D No. 2, Jl. Raya Bogor KM 43, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong Kab. Bogor	Telp : (021) 87915703, 87915704 Fax : (021) 87919008	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
65.	KC Bogor Pajajaran Bantarjati	Jl. Pajajaran Raya No. 63, Kel. Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara Kota Bogor	Telp : 0251 - 8337306, 8337620, 8337828 Fax : (0251) 8384968	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
66.	KC Depok Margonda 2	Jl. Margonda Raya No. 209, Kel. Kemirimuka, Kec. Beji Kota Depok	Telp : 021 - 77210117 (hunting) Fax : 021 - 77210027	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
67.	KC Depok Margonda 1	Ruko Depok Mas Blok A1-2, Jl. Margonda Raya No. 42, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas Kota Depok	Telp : (021) 7765231, 7765251, 7765289, 77213804 Fax : (021) 77202905, 77203598	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
68.	KC Jakarta Cibubur Citra Grand	Ruko Citra Gran Blok R-2 No. 8-9, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna Kota Bekasi	Telp : (021) 84300107, 84300108, 8449778 Fax : (021) 84590918	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
69.	KC Jakarta Fatmawati 2	Jl. RS Fatmawati No. 12, Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan	Telp : 021-7696807/7696808/ 75902925/ 75902930/ 75902934 Fax : 021-75902899/75902983	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
70.	KC Jakarta Hasanudin	Jl. S. Hasanudin No. 57, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan	Telp : (021) 2701515, 2701505 Fax : (021) 7220362	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
71.	KC Jakarta Mayestik	Jl. Kyai Maja Blok D/1 Persil No. 6-6A, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru Wil. Kota Jakarta Selatan	Telp : (021) 7202451, 7202728, 7202509, 739452 Fax : (021) 7220822	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
72.	KC Jakarta Pondok Indah	Komplek Ruko Pondok Indah Plaza 1 Kav. II, Blok UA No. 6, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Wil. Kota Jakarta Selatan	Telp : (021) 7662029, 7662030 Fax : (021) 7662028, 7665391	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
73.	KC Tangerang Ciputat	Jl. Ir. H. Juanda No. 111, RT 006/001, Kel. Pisangan, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan	Telp : (021) 7425267 Fax : (021) 7423018	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
74.	KC Jakarta Saharjo	Jl. Saharjo No.204A RT. 04/05, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet Wil. Kota Jakarta Selatan	Telp : (021) 8308768, 8292824, 8357309 Fax : (021) 8308769, 8357310	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
75.	KC Jakarta Kalibata	Jl. Raya Pasar Minggu No. 75, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran Wil. Kota Jakarta Selatan	Telp : (021) 7940323, 7940341, 7940353 Fax : (021) 7940420	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
76.	KC Tangerang Bintaro	Bintaro Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Blok A1 No. 7 - 8, Bintaro Sektor 7, Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	Telp : (021) 7450120, 7453301, 7450296, 7450297 Fax : (021) 7450116	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
77.	KC Tangerang BSD ITC	Jl. Pahlawan Seribu ITC BSD No. 21-23A, Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	Telp : 021 - 53153155, 53153144-46 Fax : 021 - 53161611	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
78.	KC Bandung Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 24, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan Kota Bandung	Telp : (022) 84469443 Fax : (022) 4200011	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
79.	KC Garut	Jl. Ciledug No. 148-149, Kel. Kota Kulon , Kec. Garut Kota Kab. Garut	Telp : (0262) 243689, 243692 Fax : (0262) 233137	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
80.	KC Bandung Asia Afrika	Jl. Asia Afrika No. 174 RT 009 RW 004, Kel. Paledang, Kec. Lengkong Kota Bandung	Telp : 022 - 7314546, 7323142, 7323143 Fax : 022 - 7323141	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
81.	KC Bandung Suniaraja	Jl. Suniaraja No.82, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung Kota Bandung	Telp : (022) 423 2584, 423 1185, 423 6614, 423 2585, 423 2586, 423 2587 423 86 / 423 89 Fax : -	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
82.	KC Sukabumi A Yani	Jl. A.Yani no. 29, Kel. Gunung Parang, Kec. Cikole Kota Sukabumi	Telp : 0266 - 6247300 Fax : 0266 - 6247400	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
83.	KC Karawang	Jl. Panatayuda I No 68, Kel. Karawang Kulon, Kec. Karawang Barat Kab. Karawang	Telp : 0267 - 8490449 (hunting), 0828-17096715 / 16 / 17 / 18 / 29 / 30 / 31 / 32 Fax : (0267) 401505	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
84.	KC Bandung Ahmad Yani	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 252, Kel. Kacapiring, Kec. Batunuggal Kota Bandung	Telp : (022) 7202688, 7231090, 082819030694 Fax : (022) 7271334	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
85.	KC Purwakarta RE Martadinata	Jl. R.E Martadinata No. 5, RT 25 RW 05, Kel. Nagri Tengah, Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	Telp : (0264) 231760 Fax : (0264) 231761	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
86.	KC Cimahi	Jl. Jend. Amir Machmud No. 118, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi	Telp : (022) 6632228 Fax : (022) 6632212	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
87.	KC Cianjur Siliwangi	Jl. Siliwangi No. 6, Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur Kab. Cianjur	Telp : (0263) 284648 Fax : (0263) 284677	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
88.	KC Cirebon Dr Cipto	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 79, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi Kota Cirebon	Telp : (0231) 202760, 202092, 202093, 200423 Fax : (0231) 202067	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
89.	KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 74-78, Kel. Empangsari, Kec. Tawang Kota Tasikmalaya	Telp : (0265) 312995, 312999 Fax : (0265) 311199	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
90.	KC Purwokerto Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 433, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas	Telp : (0281) 641108, 641685 Fax : (0281) 625955	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
91.	KC Cilacap A Yani	Jl. A. Yani No. 97, Kel. Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap	Telp : (0282) 531015, 531038 Fax : (0282) 535870	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
92.	KC Semarang A Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No.152, Kel. Karang Kidul, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Telp : 024 - 8313247, 8315027 Fax : 024 - 8313217	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
93.	KC Semarang Pandanaran	Jl. Pandanaran No. 90, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Telp : (024) 3568891, 3568894 Fax : (024) 3568890	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
94.	KC Kudus A Yani 1	Ruko Ahmad Yani No. 9, Jl. Ahmad Yani, Kel. Gondang Manis, Kec. Kota Kudus Kab. Kudus	Telp : (0291) 439272 Fax : (0291) 439274	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
95.	KC Pati Sudirman	Jl. P. Sudirman No. 207, Plaza Pati Blok A1-A2, Kel. Pati Lor , Kec. Pati Kab. Pati	Telp : (0295) 386699 Fax : (0295) 387799	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
96.	KC Salatiga	Jl. Diponegoro Ruko Salatiga Square No. 77-A6 dan 77-A7, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo Kota Salatiga	Telp : (0298) 328558, 328885 Fax : (0298) 314407	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
97.	KC Tegal KH Mansyur	Jl. KH. Mansyur No.4, Kel. Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur Kota Tegal	Telp : (0283) 325300, 325301 Fax : (0283) 351460	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
98.	KC Kendal Soetta	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 325, Kel. Bugangin, Kec. Kendal Kab. Kendal	Telp : (0294) 388173, 388175 Fax : (0294) 388172	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
99.	KC Pekalongan Pemuda	Masjid Syuhada, Jl.Pemuda No.52-54, Kel. Panjangwetan, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan	Telp : 0285 - 434918, 434919 Fax : 0285 - 434920	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
100.	KC Solo Slamet Riyadi 1	Jl. Slamet Riyadi No. 388, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan Kota Surakarta	Telp : (0271) 710820 Fax : (0271) 742085, 742086	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
101.	KC Solo Slamet Riyadi 2	Jl. Slamet Riyadi No. 318, Kel. Sriwedari, Kec. Laweyan Kota Surakarta	Telp : 0271 - 742555, 725222 Fax : 0271 - 736718	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
102.	KC Yogyakarta Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 42, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta	Telp : (0274) 555022 Fax : (0274) 555021	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
103.	KC Mataram Hasanudin	Jl. Hasanudin No. 40, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara Kota Mataram	Telp : (0370) 644888, 622300, 622700 Fax : (0370) 634999	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
104.	KC Kupang	Jl. Mohammad Hatta No.56, Kel. Fontein, Kec. Oebobo Kota Kupang	Telp : (0380) 834100, 823466, 828617 Fax : (0380) 826150	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
105.	KC Bima Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 9 RT/RW 014/005, Kel. Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima	Telp : (0374) 444 03/ 444 04 Fax : 444 86	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
106.	KC Denpasar	Jl. Raya Puputan No.114, Kel. Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar	Telp : (0361) 432595 Fax : (0361) 434045	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
107.	KC Jember Sudirman	Jl. P. B. Sudirman No. 41-43, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember	Telp : (0331) 411522 Fax : (0331) 411525	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
108.	KC Banyuwangi Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rakhmat No. 30, Kel. Singotrunan, Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi	Telp : (0333) 418624, 418625, 418626, 418627 Fax : (0333) 418628	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
109.	KC Kediri Hassanudin	Ruko Hassanuddin Bussines Center Jl. Hasanuddin No. 21 , Kel. Dandangan, Kec. Kota Kota Kediri	Telp : (0354) 672 114-5 Fax : 672 685	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
110.	KC Madiun Agus Salim	JL. Agus Salim No. 120, Kel. Pandean, Kec. Taman Kota Madiun	Telp : (0351) 454000 Fax : (0351) 458300	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
111.	KC Blitar	Jl. Cokroaminoto No. 10 RT.01 RW. 02, Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul Kota Blitar	Telp : (0342) 816999 Fax : (0342) 816777	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
112.	KC Malang Suprapto	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 48, Kel. Rampalcelaket, Kec. Klojen Kota Malang	Telp : 0341 - 359129, 359130 Fax : 0341 - 359128	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
113.	KC Pasuruan Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No.77, Kel. Purworejo, Kec. Purworejo Kota Pasuruan	Telp : (0343) 418 955 Fax : 418 956	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
114.	KC Surabaya Darmo	Jl. Raya Darmo No. 15, Kel. Tegalsari, Kec. Keputran Kota Surabaya	Telp : (031) 5674848, 5679842 Fax : (031) 5679841	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
115.	KC Sidoarjo Jenggolo	Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jl. Jenggolo No. 9, Kel. Celep, Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo	Telp : (031) 8946449, 8947231, 8921033, 8922129 Fax : (031) 8957429	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
116.	KC Surabaya Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rachmat No. 17-19, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya	Telp : 031-99254882, 031- 99254883, 031-99254885, 031-99254887 Fax : 031 - 7385678	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
117.	KC Surabaya Dharmawangsa	Jl. Dharmawangsa No. 115 A, Kel. Kertajaya, Kec. Gubeng Kota Surabaya	Telp : 031 - 5045082, 5045085, 5030222 Fax : 031 - 5037222	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
118.	KC Pamekasan	Jl. KH. Agus Salim No. 3A, Kel. Barurambat Kota, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan	Telp : (0324) 331223, 331224, 331225 Fax : (0324) 331218	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
119.	KC Gresik Kartini	JL. RA. Kartini No. 180, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas Kab. Gresik	Telp : (031) 3972053 Fax : (031) 3972065, 3979791	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
120.	KC Bojonegoro	Jl. Panglima Sudirman No. 99A, Kel. Klangon, Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro	Telp : (0353) 892124, 892125 Fax : (0353) 892123	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
121.	KC Surabaya Jemur Handayani	Jl. Jemur Handayani No. 3, Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo Kota Surabaya	Telp : (031) 8411230, 8411250 Fax : (031) 8411260	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
122.	KC Jombang	Ruko Cempaka Mas Blok A/9, Jl. Soekarno-Hatta No. 1, Kel. Desa Kepuh Kembeng, Kec. Peterongan Kab. Jombang	Telp : (0321) 855527, 855528 Fax : (0321) 855526	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
123.	KC Balikpapan Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 330, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan	Telp : (0542) 413382, 414630 Fax : (0542) 412109	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
124.	KC Samarinda Antasari	Jl. Antasari No. 33 RT 02, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda	Telp : (0541) 7271271, 7271272, 7271273, 7271274 Fax : (0541) 7271276, 7271277, 7271278	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
125.	KC Kutai Kartanegara	Jl. KH. Akhmad Muksin RT. 01, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara	Telp : (0541) 665362, 665365 Fax : (0541) 665017	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
126.	KC Bontang	Jl. MT. Haryono No. 53, Kel. Gn. Elai, Kec. Bontang Utara Kota Bontang	Telp : (0548) 20007 Fax : (0548) 25005	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
127.	KC Tarakan	Jl. Yos Sudarso No. 64, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan	Telp : (0551) 35050 Fax : (0551) 35051	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
128.	KC Banjarmasin Lambung Mangkurat	Jl. Lambung Mangkurat No. 16, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Telp : (0511) 3366408, 3366409 Fax : (0511) 3366426	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
129.	KC Martapura	Jl. A. Yani No. 20 Km. 37,4, Kel. Sungai Paring, Kec. Martapura Kab. Banjar	Telp : (0511) 4722713, 4722755 Fax : (0511) 4722714	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
130.	KC Pangkalan Bun	Jl. Sukma Arianingrat No. 14, Kel. Baru, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat	Telp : (0532) 25624, 25625 Fax : (0532) 25636	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
131.	KC Tanjung	Jl. Ir. Pangeran Haji Muhammad Noor No. 12, Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong	Telp : (0526) 2024484 Fax : (0526) 2024494	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
132.	KC Sampit	Jl. M. T. Haryono No. 6, Kel. Mentawa Baru Hulu , Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur	Telp : (0531) 24222 Fax : (0531) 24400	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
133.	KC Palangkaraya Diponegoro	Jl. Diponegoro No.10, Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya	Telp : 0536 - 3224862, 3224863, 3224864 Fax : 0536 - 3224870	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
134.	KC Banjarbaru	Jl. A.Yani Km 35,5 , Kel. Kelurahan Komet, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru	Telp : 0511 - 4774939, 0511-6749031 Fax : 0511 - 4774939	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
135.	KC Pontianak Abdurrachman	Jl. Sultan Abdurrachman No. 23, Kel. Pontianak, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak	Telp : (0561) 745004 Fax : (0561) 744774	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
136.	KC Ketapang	Jl. R. Soeprapto No. 88, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang	Telp : (0534) 34600 Fax : (0534) 34395	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
137.	KC Sambas	Jl. Gusti Hamzah No. 41, Kel. Desa Durian, Kec. Sambas Kab. Sambas	Telp : (0562) 391900 Fax : (0562) 392200	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
138.	KC Singkawang	Jl. Alianyang No. 16 C-D, Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang	Telp : (0562) 639866 Fax : (0562) 639865	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
139.	KC Makassar 1	Jl. Dr. Ratulangi No.79, Kel. Labuang Baji, Kec. Mamajang Kota Makassar	Telp : (0411) 833070 Fax : (0411) 833069	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
140.	KC Mamuju	Jl. Urip Sumoharjo No. 44, Kel. Karema, Kec. Mamuju Kab. Mamuju	Telp : (0426) 22651, 2703380 Fax : (0426) 21922	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
141.	KC Bone	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone	Telp : (0481) 28774 Fax : (0481) 28775	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
142.	KC Makassar 2	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140, Kel. Mario, Kec. Mariso Kota Makassar	Telp : 0411 - 8914670, 8914610, 8914130 Fax : 0411 - 8914275	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
143.	KC Palopo	Jl. Andi Jemma No.150, Kel. Tompotikka, Kec. Wara Kota Palopo	Telp : (0471) 327432, (0471) 327225, (0471) 327360 Fax : -	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
144.	KC Parepare	JL. Lahalede No.15, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare	Telp : (0421) 22456, 26534, 24624 Fax : -	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
145.	KC Jayapura	Komplek Perniagaan Kelapa Dua - Entrop Jl. Raya Kelapa Dua No. 1-2, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan Kota Jayapura	Telp : (0967) 550965, 550966 Fax : (0967) 550968	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
146.	KC Ternate Jatiland	Ruko Jatiland Business Center No. 19-20, Kel. Gamalama, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate	Telp : (0921) 3127220 Fax : (0921) 3127336	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
147.	KC Sorong	Jl. Ahmad Yani No. 21, Kel. Malawei, Kec. Sorong Kota Kota Sorong	Telp : (0951) 323366 Fax : (0951) 323360	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
148.	KC Ambon	Jl. Pala No. 2, Kel. Uritetu, Kec. Sirimau Kota Ambon	Telp : (0911) 344572, 344337 Fax : (0911) 344582	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
149.	KC Manado Mantos	Jl. Tendean (Boulevard) Ruko Mantos No.11-12, Kel. Sario Utara, Kec. Sario Kota Manado	Telp : (0431) 876 166 Fax : 888 1502	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
150.	KC Palu Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 77, Kel. Ujuna, Kec. Palu Barat Kota Palu	Telp : (0451) 426222 Fax : (0451) 452108	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
151.	KC Gorontalo	Jl. Ahmad Yani No. 127, Kel. Heledulaa Selatan, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo	Telp : (0435) 828666 Fax : (0435) 830056	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat	No. Telp dan Fax	Email dan Web
152.	KC Luwuk	Jl. Urip Sumoharjo No. 18C dan 18D, Kel. Karaton, Kec. Luwuk Kab. Banggai	Telp : (0461) 21214, 22779, 8118671544 Fax : (0461) 325456	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id
153.	KC Kendari A Silondae 1	Jl. Abdullah Silondae No. 137, Kel. Korumba , Kec. Mandonga Kota Kendari	Telp : (0401) 3128822, 3128245, 3128897 Fax : (0401) 3127478	Email : contactus@bankbsi.co.id Web : www.bankbsi.co.id

Brand Perusahaan

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual

Logo BSI, yang terdiri dari *wordmark* (nama brand) dan ikon (bintang segi lima), dirancang untuk menyampaikan pesan brand yang jelas serta membangun pengenalan yang jelas. Ikon bintang segi lima BSI memiliki tiga makna utama:

- **Mewakili "cahaya penuntun" yang melambangkan visi kami yakni hadir sebagai sarana untuk menginspirasi kebaikan dan hal positif. Visi ini berpedoman kepada ayat Al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 1: Alif Lam Ra.**

  (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang-benderang dengan izin Tuhan, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

- **Mewakili lima rukun Islam, yang memandu setiap Muslim untuk hidup yang bijaksana dan bermakna.**

- **Mewakili lima sila Pancasila, falsafah yang menjadi landasan negara Indonesia untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan seluruh rakyatnya.**

Riwayat Singkat Perusahaan



PT Bank BRIsyariah Tbk ("Bank") berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., notaris di Jakarta. BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008.

Pada tahun 2009, BSBRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Pemegang Saham BSBRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. PT Bank BRISyariah berubah nama menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386. AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pada bulan Januari 2021, telah terjadi penggabungan antara PT Bank BRIsyariah Tbk dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Penggabungan antara PT Bank BRIsyariah Tbk dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif pada tanggal 1 Februari 2021.

Pada bulan Juni 2022, terjadi perubahan klasifikasi saham pada anggaran dasar sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta sehubungan dengan:

- Penerapan klasifikasi saham pada Bank menjadi saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan saham biasa Seri B yang merupakan saham biasa atas nama.
- Reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Bank menjadi 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi saham biasa Seri B.

Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03- 0269107 tanggal 22 Juli 2022.

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir terkait penambahan modal disetor dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.



Keterangan Perubahan Nama

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, BSI pernah melakukan perubahan nama yaitu sebagai berikut:

3 April 1969

PT Bank Jasa Arta

Akta No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Notaris Liem Toeng Kie, S.H., dan Penetapan Menteri Kehakiman No.J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970

9 Oktober 2008

PT Bank Syariah BRI

Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Jasa Arta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-71478.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008

5 November 2009

PT Bank BRISyariah

Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009 dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-53631. AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 November 2009

10 Januari 2018

PT Bank BRIsyariah Tbk

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No.8 tanggal 8 Januari 2018 dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0000386. AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta Penerimaan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018

1 Februari 2021

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.38 tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0006268.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 dan Penerimaan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan



VISI

TOP 10
GLOBAL
ISLAMIC BANK

Budaya Perusahaan

Bank Syariah Indonesia didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang saat ini menjadi pemegang saham mayoritas Bank. Sejalan dengan hal itu, BSI menjadikan "AKHLAK" sebagai nilai perusahaan, selaras dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 yang mewajibkan setiap BUMN mengimplementasikan nilai-nilai utama (*core values*) tersebut sebagai dasar pembentukan karakter SDM.

Amanah	Kompeten	Harmonis
Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.
A	K	H

MISI

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual

Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian dan *review* terhadap visi dan misi Bank, dan menyatakan bahwa visi dan misi tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini dan sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Bank ke depan. Visi dan Misi Bank telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada Penyampaian Dokumen Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024-2026 PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

L

Adaptif

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

A

Kolaboratif

Kami membangun kerja sama yang sinergis

K

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-0035266. AH.01.02.TAHUN 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Maksud dan Tujuan Bank adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan-barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau-sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *Hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
   a. *Wakalah*
   b. *Hawalah*
   c. *Kafalah*
   d. *Rahn*
10. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
11. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
12. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah.
14. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad* amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah.
16. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah.
17. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah.
18. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah.
19. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah.
20. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.
21. Melakukan kegiatan pengalihan piutang.
22. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Penunjang yang Mendukung Kegiatan Utama

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah dan/atau perusahaan lain untuk mendukung industri perbankan syariah dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal.
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerjasama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip syariah.

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Bank.



Produk dan Jasa

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, BSI menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan profil masing-masing nasabah. Produk dan layanan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu individu, perusahaan, digital banking dan kartu.

Individu

BISNIS	
Bank Guarantee Under Counter Guarantee	Instrumen penjaminan perbankan yang diterbitkan atas dasar permintaan dan kontra jaminan (*counter guarantee*) yang diterima baik dari bank ataupun non bank.
BSI Bank Garansi	Bank garansi yang dikhususkan kepada *vendor*/kontraktor dari PT PLN (PLN) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN.
BSI Cash Management	Saluran distribusi elektronik berupa layanan *internet banking* bagi nasabah perusahaan atau institusi untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan monitoring arus kas dengan aman, cepat dan mudah.
BSI Deposito Ekspor SDA	Bersama membangun negeri dengan devisa ekspor.
BSI Giro Ekspor SDA	Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah atau properti berhadiah porsi haji.
BSI Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan *tiering*.
BSI Giro Pemerintah	Dana berkah untuk negeri.
BSI Pembiayaan Investasi	Fasilitas Pembiayaan Jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Giro Vostro	Layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan (*financial institutions*) Bank dan bukan Bank, koresponden domestik maupun internasional pada BSI.
Jasa Penagihan Transaksi *Trade Finance* Antar Bank	Jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek under LC/SKBDN yang dimiliki oleh *Nominated Bank* kepada BSI yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (*issuing Bank*) sesuai prinsip syariah. BSI dapat memberikan dana talangan kepada *Nominated Bank* berdasarkan berita akseptasi dari *Issuing Bank* ke *Nominated Bank*.
Pembiayaan Yang Diterima (PYD)	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima Bank Syariah Indonesia dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Bank Syariah Indonesia memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga yang merujuk pada *underlying* aset PYD yang disepakati.
SIF (*Supply Infrastructure Financing*) BPJS Kesehatan	Layanan pembiayaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Klinik Utama, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan, dan Praktik Dokter Gigi.

EMAS	
BSI Cicil Emas	Pembelian emas dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas kemudian.
BSI Gadai Emas	Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.



HAJI DAN UMROH

BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk usia 17 tahun ke atas berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah* dalam bentuk mata uang IDR atau USD. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *e-Channel* apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Haji Muda Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk usia kurang dari 17 tahun berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah* dalam bentuk mata uang IDR atau USD. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *e-Channel* apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

INVESTASI

Bancassurance	Kerja sama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
BSI Deposito	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang diperuntukan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam bentuk mata uang IDR atau USD. Tersedia pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) atau Non ARO.
BSI Reksa Dana Syariah	Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.
Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)	*Cash Waqf Linked* Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakaf dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Referral Retail Brokerage	Merupakan layanan *referral* produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerja sama dengan perusahaan sekuritas.
SBSN Ritel	- SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan. - Sukuk Negara Ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. - Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

PEMBIAYAAN

Bilateral Financing	Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/*financing* dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.
BSI Cash Collateral	Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.
BSI Distributor Financing	Pembiayaan modal kerja dengan skema *value chain* adalah pembiayaan *post financing* (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu *invoice* atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada *supplier* yang merupakan *supplier* khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.
BSI Griya	Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut: 1. Pembelian rumah baru/rumah second/ruko/rukan/apartemen. 2. Ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*). 3. *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.
BSI KPR Sejahtera	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.
BSI KUR Kecil	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta.
BSI KUR Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta.
BSI KUR Super Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon sampai dengan Rp10 juta.
BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*)	Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad *murabahah/musyarakah mutanaqishah/ijarah* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.
BSI Mitraguna Berkah	Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai *payroll* di BSI.
BSI OTO	Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

PEMBIAYAAN	
BSI Pensiun Berkah	Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, di antaranya sebagai berikut: 1. Pensiunan ASN dan Pensiunan Janda ASN. 2. Pensiunan BUMN/BUMD. 3. Pensiunan dan Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.
BSI Umrah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah melalui Bank yang telah bekerja sama dengan *travel agent* sesuai dengan prinsip syariah.
Mitraguna Online	Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

PRIORITAS	
BSI Prioritas	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia kepada nasabah perorangan terpilih.
BSI Private	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia yang dibuat kepada nasabah perorangan yang memiliki saldo akumulatif minimal sebesar Rp5 miliar.
Safe Deposite Box (SDB)	Merupakan suatu wadah harta atau surat berharga, yang ditempatkan pada suatu ruang khazanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunanya.

TABUNGAN	
BSI Tabungan Bisnis	Tabungan dalam bentuk mata uang IDR yang dapat memberikan kemudahan transaksi nasabah segmen pebisnis, dengan keuntungan: limit transaksi *e-channel* lebih besar (fasilitas kartu debit visa bisnis), gratis biaya transfer BI Fast, deskripsi mutasi rekening yang lebih lengkap, dan nisbah yang kompetitif dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan Easy Wadiah	Tabungan untuk kemudahan transaksi harian dengan fitur gratis biaya administrasi bulanan dalam bentuk mata uang IDR.
BSI Tabungan Easy Mudharabah	Tabungan untuk kemudahan transaksi harian dengan skema bagi hasil dalam bentuk mata uang IDR.
BSI Tabungan Junior	Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dalam bentuk mata uang IDR dengan akad *Wadiah* atau *Mudharabah Mutlaqah*.
BSI Tabungan Mahasiswa	Tabungan yang diperuntukkan untuk para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota perusahaan/lembaga/asosiasi/organisasi profesi yang bekerja sama dengan Bank dengan akad akad *Wadiah* atau *Mudharabah Mutlaqah*.
BSI Tabungan Payroll	Tabungan yang diperuntukkan untuk Nasabah Payroll yang memiliki 4 (empat) variasi biaya pengelolaan rekening yang berbeda berdasarkan PKS Bank dengan Institusi dengan akad *Wadiah* atau *Mudharabah Mutlaqah*.
BSI Tabungan Pensiun	Tabungan yang diperuntukan untuk perorangan yang menjadi mitra bayar dari lembaga pengelola dana pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank dengan pilihan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan Efek Syariah	Tabungan efek syariah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan Valas	Tabungan dalam bentuk mata uang USD yang diperuntukkan untuk Nasabah Perorangan dan Non Perorangan akad *Wadiah* atau *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan Pendidikan	Tabungan berjangka untuk perencanaan pendidikan dengan sistem *autodebet* dan mendapatkan perlindungan asuransi dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.

TABUNGAN	
BSI Tabungan Berencana	Tabungan berjangka untuk perencanaan investasi dengan sistem *autodebet* dan mendapatkan perlindungan asuransi dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tapenas Reguler	Tabungan berjangka untuk perencanaan keuangan nasabah dengan sistem *autodebet* dan mendapatkan perlindungan asuransi dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tapenas Kolektif	Tabungan berjangka untuk perencanaan keuangan masa depan pegawai pada institusi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sistem *autodebet* dan akad *Mudharabah Muthlaqah*.
BSI Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)	Tabungan yang diperuntukan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini dengan akad *Wadiah*.
BSI Tabungan Smart	Tabungan perorangan yang merupakan literasi dari OJK untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan akad *Wadiah*.
BSI TabunganKu	Tabungan perorangan yang merupakan literasi dari OJK untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan akad *Wadiah*.

TRANSAKSI	
BSI Giro Wadiah Perorangan	Simpanan yang diperuntukan untuk nasabah perorangan yang menggunakan media penarikan berupa: kartu debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dalam mata uang IDR, USD, SGD, EURO dengan akad *Wadiah*.
BSI Giro Wadiah Non Peorangan	Simpanan yang diperuntukan untuk nasabah non perorangan yang menggunakan media penarikan berupa: kartu debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dalam mata uang IDR, USD, SGD, EURO dengan akad *Wadiah*.
BSI Giro Mudharabah Umum	Simpanan yang diperuntukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan yang menggunakan media penarikan berupa: kartu debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dalam mata uang IDR, dan USD dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*.
BSI Giro Mudharabah Khusus	Simpanan yang diperuntukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan dengan yang menggunakan media penarikan berupa: kartu debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dalam mata uang IDR, dan USD dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* (nisbah dan biaya sesuai dengan kebijakan Bank secara khusus).

Perusahaan

CASH MANAGEMENT	
CMS	Layanan transaksi meliputi transfer kepada rekanan atau pihak ketiga di bank BSI maupun bank lain (*online*, SKN, RTGS), transfer kepada pegawai (*payroll*), pembayaran kewajiban pajak, pembayaran dan pembelian produk Pertamina, pembayaran tagihan utiltas serta tagihan lainnya.
OPBS (SO/DO) Pertamina	BSI Pembayaran Pertamina adalah layanan pembayaran dan penerimaan atas produk Pertamina. Bersama dengan Pertamina, BSI hadir dengan layanan *host to host* untuk memudahkan mitra/pelanggan Pertamina dalam melakukan pemesanan dan atau pembayaran produk Pertamina melalui BSI Cash Management System dan Cabang BSI.

TRESURI	
Transaksi Sukuk	Melayani kebutuhan transaksi surat berharga syariah (sukuk): - Sukuk Negara - Sukuk Korporat
Deposito On Call (DOC)	Produk simpanan dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu kepada penempatan harian di Bank Indonesia. Akad yang digunakan *mudharabah mutlaqah*.
BSI Lindung Nilai Syariah	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi penjualan/pembelian valuta asing yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Akad yang digunakan *aqd' al-tahaww al-basith* dan *al sharf*.
Transaksi Valuta Asing - Devisa Umum/Telegraphic Transfer	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi pembelian/penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tenor waktu tertentu. Transaksi *today* untuk penyerahan pada hari yang sama, transaksi *tomorrow* (Tom) untuk penyerahan setelah satu hari kerja dan transaksi *spot* untuk penyerahan setelah dua hari kerja. Mata uang yang ditransaksikan adalah USD, SAR, EUR, SGD, JPY, AUD, HKD, CHF, CAD, CNY dan GBP.
Transaksi Valuta Asing - Uang Kertas Asing (Banknotes)	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi uang kertas asing (*banknotes*) baik untuk penarikan dan setoran maupun jual beli terhadap rupiah, dengan *akad al sharf*.

SERVICE	
Wali Amanat	Mewakili pemegang sukuk, serta dapat bertindak selaku agen pemantau, agen jaminan, dan agen *escrow* terkait dengan transaksi di pasar modal syariah. - Wali Amanat Memantau kewajiban emiten sesuai perjanjian perwaliamanatan penerbitan sukuk. - *Agency* Memantau kewajiban para pihak terkait layanan agen pemantau, agen jaminan, agen *escrow* pasar modal.
Kustodian	Tata kelola sesuai prinsip syariah dengan sistem kustodian yang modern dan terpercaya. **Core Custody** - *Safekeeping* Konsep dari penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. - *Transaction Handling Service* Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. - *Corporate Action* Fungsi kustodian sebagai *corporate action* antara lain yaitu jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain (*corporate action*) serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (proxy). - *Sub Registry (Government Bond)* Layanan pembukuan, pencatatan dan pengadministrasian untuk transaksi obligasi pemerintah baik perusahaan maupun individu, baik secara langsung dengan nasabah dan/atau melalui *selling agent* lain. - *Income Collection* Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak-hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. - *Portofolio Accounting* Jasa atas pembukuan atau pencatatan portofolio aset milik nasabah. **Fund Services and Unit Link** - *Fund Accounting* Pembukuan transaksi efek atau surat berharga dalam suatu portofolio dan melaporkannya ke nasabah. - *Fund Administration* Pencatatan atas kepemilikan unit penyertaan nasabah reksa dana dan atau unit link dan melaporkannya kepada investor dari pada produk tersebut. - *Safekeeping* Konsep penyimpanan efek adalah penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. - *Transaction Handling Service* Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. - *Income Collection* Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. - *Reporting/Tax* Hasil akhir atau jasa pelaporan yang dilakukan Bank Kustodian atas aset Reksa Dana yang dikirim kepada manager investasi dan/atau unit *holder*.
Pembiayaan Investasi	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Penyelesaian Wesel Ekspor	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah (Eksportir) dalam rangka membantu pengurusan dokumen, penagihan piutang, serta membantu pemenuhan modal kerja nasabah. Termasuk penyelesaian wesel ekspor *single bank*, *documentary*, *non documentary*, dan *open account* baik dilakukan secara *collection (services)* maupun negosiasi/diskonto (*financing*).
LC Issuance/SKDBN	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Buyer Financing	Fasilitas dimana Bank memenuhi kewajiban/utang *Buyer* kepada *Seller* berdasarkan dokumen kontrak jual beli/ tagihan/invoice yang telak diaksep *Buyer*.
Distributor Financing	Fasilitas dimana Bank memenuhi kewajiban/utang Distributor kepada *Principal* berdasarkan dokumen kontrak jual beli/tagihan/*invoice*.
Supplier Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia dimana pihak yang berpiutang (*supplier*) mewakilkan kepada Bank untuk melakukan penagihan piutang. Bank kemudian melakukan penagihan piutang kepada pihak yang berutang (*buyer*), atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
Bank Garansi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).

PEMBIAYAAN	
Investasi Terikat Syariah Mandiri	Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.
Pembiayaan Investasi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Refinancing	Fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan dana *fresh money* atas aset/objek eksisting calon nasabah untuk kebutuhan: - Akuisisi aset - *Take over* - Kebutuhan investasi lainnya
Multifinance	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan kepada *multifinance* dengan pola *channeling* atau *executing*.
Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja seasonal.
Agency, Sindikasi dan Clubdeal	Seiring berkembangnya usaha nasabah, sering kali diperlukan lebih dari satu bank dan/atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang besar. Dengan tenaga profesional kami di bidang sindikasi syariah, nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan Bank Syariah Indonesia yang sekaligus akan membantu nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.
Pembiayaan Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).

SIMPANAN	
Giro SBSN	Simpanan *non saving account* yang dikelola dengan akad *mudharabah* diperuntukkan kepada institusi yang memerlukan imbal hasil maksimal.
Deposito DHE SDA	Simpanan *saving account* yang bersumber dari dana DHE SDA milik nasabah di Bank atau bank lain.
Giro DHE SDA	Simpanan *non saving account* yang dikelola dengan akad *mudharabah* dan *wadiah* diperuntukkan kepada eksportir dalam rangka kegiatan perdagangan ekspor DHE SDA.
Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan *tiering*.

Digital Banking

BSI Mobile	Solusi untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi. BSI Mobile menemani nasabah 24 jam dan membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual dan sosial.
Buka Rekening Online	Layanan pembukaan rekening *online* melalui BSI Mobile adalah solusi untuk nasabah yang ingin membuka rekening dengan mudah tanpa harus datang ke cabang.
Solusi Emas	Layanan kepemilikan emas melalui BSI Mobile dengan pembelian emas mulai dari Rp50.000. Nasabah bisa beli, jual, transfer, serta tarik fisik emas dan gadai emas online dengan mudah dan aman tanpa perlu datang ke cabang.
BSI QRIS	Layanan transaksi dengan *scan* kode QR Code yang menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia.
BSI Cardless Withdrawal	Solusi praktis bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang tunai tanpa kartu. Melalui BSI Mobile, tarik tunai tanpa kartu bisa dilakukan di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia, Indomaret dan Alfamart.
BSI Debit Card	BSI Kartu Debit merupakan kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM dan EDC di jaringan GPN dan International (Visa).
BSI Debit OTP	BSI Debit OTP merupakan layanan transaksi berbasis kartu debit yang menggunakan kode OTP sebagai PIN dalam setiap penggunaan transaksinya.
BSI ATM CRM	BSI ATM *Cash Recycle Machine* (CRM) atau ATM Setor Tarik merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi semua Nasabah Bank Syariah Indonesia.
BSI Aisyah	Aisyah adalah Asisten Interaktif Bank Syariah Indonesia yang akan membantu memberikan informasi produk, layanan, dan promo terbaru dari Bank Syariah Indonesia.
BSI Net	Transaksi bisnis kini lebih mudah melalui layanan BSI Net kapan pun dan di mana pun. Berbagai kemudahan bertransaksi seperti melakukan transfer secara massal dan monitoring transaksi bisa anda lakukan di BSI Net.
BSI Merchant Business	EDC Bank Syariah Indonesia merupakan layanan yang disediakan Bank Syariah Indonesia kepada nasabah yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran kartu ATM Debit kepada pelanggannya.
BSI API Platform	BSI API Platform adalah sebuah portal yang menyediakan layanan *open banking* untuk memudahkan proses integrasi antara layanan Bank Syariah Indonesia dengan aplikasi nasabah.
BSI Smart Agent	BSI Smart Agent merupakan Layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) BSI untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dengan didukung sarana teknologi informasi.
BSI Payment Point	Layanan transaksi Payment Point di Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan oleh nasabah di setiap *outlet* Bank Syariah Indonesia atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai (cash).
Deposito Mobile	Mudahnya investasi dengan deposito di BSI Mobile, kapanpun dan di manapun, tanpa perlu datang ke cabang.
Griya Hasanah Online Top Up Melalui BSI Mobile	Pembiayaan BSI Griya Hasanah Online Top Up merupakan Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia dalam bentuk penambahan pembiayaan dari pembiayaan eksisting Bank Syariah Indonesia untuk tujuan konsumtif nasabah. Pembiayaan Griya Hasanah Online Top Up menggunakan akad *refinancing* syariah dengan skema *al-bai'* dalam rangka *musyarakah mutanaqishah* (MMQ).

Kartu

KARTU PEMBIAYAAN	
BSI Hasanah Card Classic	BSI Hasanah Card Classic merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang berfungsi seperti kartu kredit, diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, dan dapat digunakan untuk transaksi di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM berlogo Mastercard di seluruh dunia (internasional). BSI Hasanah Card Classic dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: - *Kafalah* - *Qardh* - *Ijarah* Limit BSI Hasanah Card Classic Rp4 juta hingga Rp6 juta.
BSI Hasanah Card Gold	BSI Hasanah Card Gold merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang berfungsi seperti kartu kredit, diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, dan dapat digunakan untuk transaksi di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM berlogo Mastercard di seluruh dunia (internasional) BSI Hasanah Card Gold dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah antara lain: - *Kafalah* - *Qardh* - *Ijarah* Limit BSI Hasanah Card Gold Rp8 juta hingga Rp30 juta.
BSI Hasanah Card Platinum	BSI Hasanah Card Platinum merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang berfungsi seperti kartu kredit, diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia, dan dapat digunakan untuk transaksi di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM berlogo Mastercard di seluruh dunia (internasional) BSI Hasanah Card Platinum dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: - *Kafalah* - *Qardh* - *Ijarah* Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp40 juta hingga Rp900 juta dengan fasilitas *free executive lounge airport* di bandara yang bekerja sama.

KARTU DEBIT	
BSI Debit GPN	BSI Debit GPN, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
BSI Debit OTP	Kartu ATM debit dimana sistem PIN menggunakan *One Time Password* (OTP) yang diregister melalui *mobile banking*.
BSI Debit Visa	BSI Debit Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Visa Worldwide yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh dunia (Internasional).
Kartu BSI Debit Sabi	BSI Debit SaBi, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik tabungan anak yang terafiliasi dengan orang tua. Kartu BSI Debit SaBi mendukung edukasi literasi keuangan bagi anak dengan limitasi khusus untuk menjaga keamanan anak dalam bertransaksi.
Kartu Debit BSI SimPel	BSI Debit SimPel, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik Tabungan Sim panan Pelajar. Kartu BSI Debit SimPel memiliki limit khusus agar para pelajar dapat bertransaksi dengan aman dan mudah. Kartu dapat dipergunakan oleh pelajar di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
Kartu Debit Mabrur	Kartu Debit Mabrur merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia yang diperuntukkan khusus bagi nasabah Tabungan Haji Indonesia untuk memberikan kemudahan bertransaksi saat nasabah melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

Wilayah Operasional

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual



Jaringan bisnis dan wilayah operasi BSI didukung oleh kantor wilayah hingga kantor fungsional operasi, yang pada tahun 2024 rinciannya dijelaskan di bawah ini.

Tabel Jaringan Kantor BSI

Jenis Kantor	2024	2023	2022	2021
Kantor Wilayah	10	10	10	10
Kantor Cabang (KC)	153	153	153	272
Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)	1	1	-	-
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	886	886	959	985
KCP Mobile (dhi: MKK)	60	60	60	-
Kantor Fungsional (KF)	91	91	96	34
Kantor Kas (KK)	-	-	-	74
Payment Point (PP)	-	-	-	179
Konter Layanan Priority	23	20	16	11
Layanan Gadai	754	765	734	530
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	5.425	2.571	2.548	2.618

Keterangan:
- PP tahun 2022 Reformat menjadi KFO (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)
- KK tahun 2022 Reformat menjadi KCP (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)



Tabel Jaringan Kantor Per Wilayah Tahun 2024

Wilayah	Jenis Kantor						
	KC	KCLN	KCP	KCP Mobile	KF	Konter Layanan Priority	Layanan Gadai
Kantor Wilayah 1	16	0	136	1	7	2	80
Kantor Wilayah 2	15	0	80	7	7	2	58
Kantor Wilayah 3	16	0	87	8	2	1	73
Kantor Wilayah 4	15	0	111	10	11	5	85
Kantor Wilayah 5	15	0	84	2	7	5	63
Kantor Wilayah 6	12	0	68	6	0	2	65
Kantor Wilayah 7	13	0	91	7	13	3	71
Kantor Wilayah 8	20	0	119	10	26	1	127
Kantor Wilayah 9	16	0	53	5	0	1	55
Kantor Wilayah 10	15	0	57	4	18	1	77
TOTAL	**153**	**0**	**886**	**60**	**91**	**23**	**754**

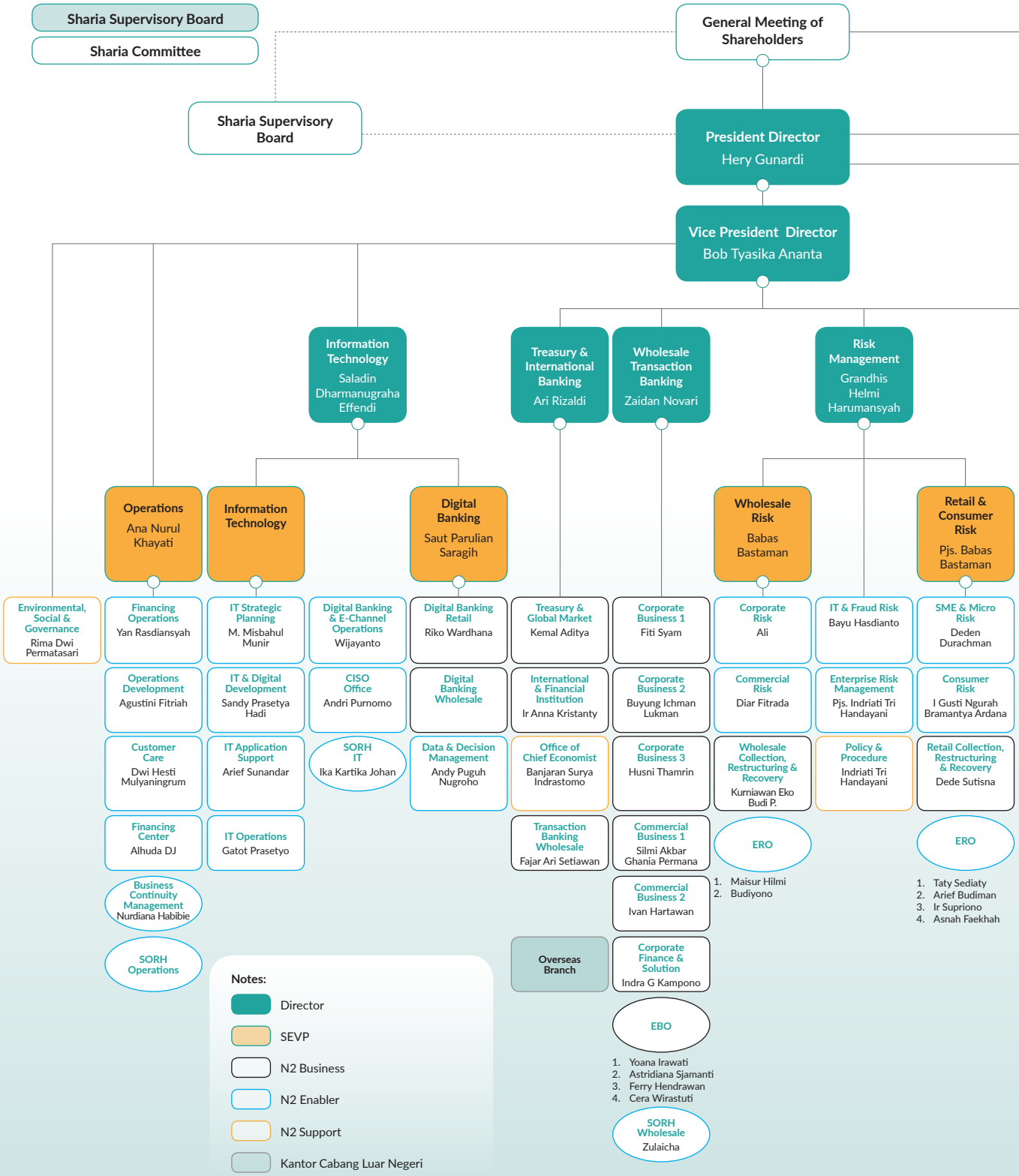
Kantor Wilayah				
Kantor Wilayah 1	Kantor Wilayah 2	Kantor Wilayah 3	Kantor Wilayah 4	Kantor Wilayah 5
Nanggroe Aceh Darussalam	Sumatera Utara, Kep. Riau, Riau	Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Lampung	Banten, DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kab. Bekasi	Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi
Kantor Wilayah 6	**Kantor Wilayah 7**	**Kantor Wilayah 8**	**Kantor Wilayah 9**	**Kantor Wilayah 10**
Jawa Barat	Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara	Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara

Daftar
Keanggotaan Asosiasi

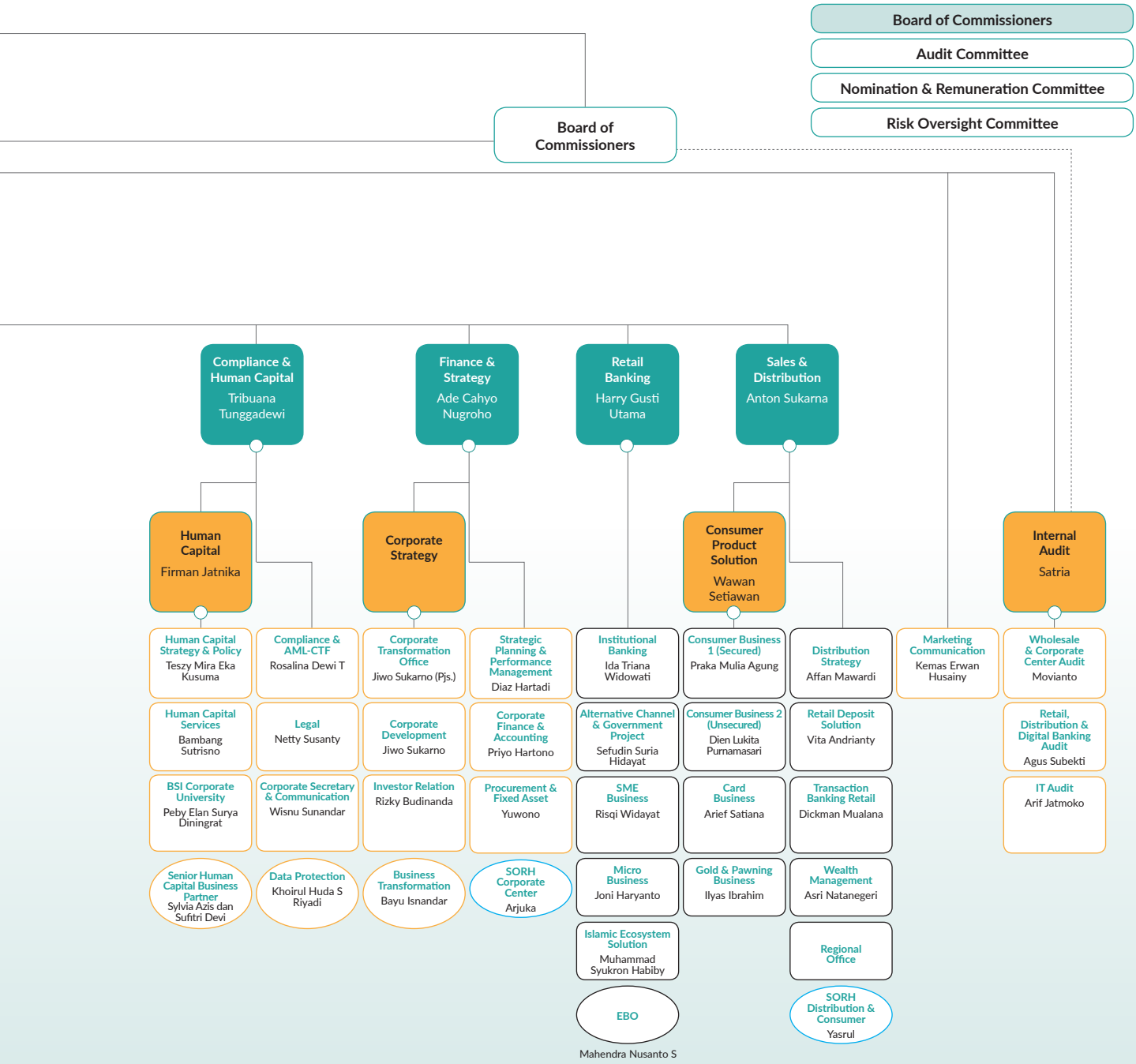
Untuk memperkuat bisnis Bank, BSI telah tergabung dalam keanggotaan asosiasi di antaranya adalah:

No.	Asosiasi	Posisi	Skala
1.	Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas)	Anggota	Nasional
2.	Pekumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)	Ketua Umum	Nasional
3.	Islamic Financial Services Board (IFSB)	Anggota	Internasional
4.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Anggota	Nasional
5.	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota	Nasional
6.	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota	Nasional
7.	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)	Anggota	Nasional
8.	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota	Nasional
9.	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Anggota	Nasional
10.	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Anggota	Nasional
11.	Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)	Anggota	Nasional
12.	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD)	Anggota	Nasional
13.	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK IJK)	Anggota	Nasional
14.	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Anggota	Nasional
15.	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota	Nasional
16.	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)	Anggota	Nasional
17.	Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI)	Anggota	Nasional
18.	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO)	Anggota	Nasional
19.	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Anggota	Nasional

Struktur Organisasi



Struktur Organisasi BSI ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. 04/425-KEP/DIR Tanggal 17 September 2024.
Berikut adalah struktur organisasi per 31 Desember 2024.



Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Komite Audit**: Mohamad Nasir (Ketua Merangkap Anggota), Muliaman D. Hadad (Anggota), Adiwarman A. Karim (Anggota), Komaruddin Hidayat (Anggota), Felicitas Tallulembang (Anggota), Suharto (Anggota), Rahmatina Awaliah Kasri (Anggota).
2. **Komite Nominasi dan Remunerasi**: Komaruddin Hidayat (Ketua merangkap Anggota), Muliaman D. Hadad (Anggota), Adiwarman A. Karim (Anggota), Mohamad Nasir (Anggota), Felicitas Tallulembang (Anggota), Masduki Baldlowi (Anggota).
3. **Komite Pemantau Risiko**: Adiwarman A. Karim (Ketua Merangkap Anggota), Muliaman D. Hadad (Anggota), Mohamad Nasir (Anggota), Komaruddin Hidayat (Anggota), Felicitas Tallulembang (Anggota), Suyanto (Anggota), Abu Rokhmad (Anggota), Fauzi (Anggota), Nazaruddin (Anggota), Bowo Setiyono (Anggota), Noor Anis (Anggota).

Nama Anggota Komite di Bawah Direksi dapat di lihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Profil
Direksi



Hery Gunardi

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia

Lahir di Bengkulu, pada tahun 1962. Usia 62 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 - 2024 (Periode Pertama)
- 2024 - 2027 (Periode Kedua)

Kepemilikan Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 3.354.400 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas 17 Agustus Surabaya (1987).
- Master Finance and Accounting dari University of Oregon USA (1991).
- Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran Bandung (2021).

Sertifikasi

- Sertifikasi Penyelarasan Managemen Risiko Level 7, BARA (2024).
- Sertifikasi Islamic Banking, Karim Consulting (2020).
- Sertifikasi Managemen Risiko Level 5, BARA (2013).
- Certified Financial Planning (CFP), Standard Board of Indonesia (2007).
- Certified Wealth Manager (CWM), University of Greenwich and IBI (2005).
- Chartered Life Underwriter (CLU), Singapore College of Insurance (2004).
- Chartered Financial Consultant (ChFC), Singapore Collage of Insurance (2004)
- Money Market and Foreign Exchange Dealer, TRAC Consultant Singapore (1997).

Pengalaman Kerja

- Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2021-Sekarang).
- Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021).
- Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN (2020-2021).
- Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020).
- Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2020).
- Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019).
- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2019).
- Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2018).
- Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016).
- Direktur Micro & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015).
- Direktur Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:
- Ketua Komite Bisnis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua Komite Sumber Daya Manusia di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua Komite Aset & Liabilitas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite IT di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Policy & Procedure di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Bob Tyasika Ananta

Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia

Lahir di Surakarta, pada tahun 1963. Usia 61 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Wakil Direktur Utama melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 23 September 2022.

Periode Jabatan

2022 – 2025 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 1.134.400 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1986).
- Magister Finance, Business Administration dari University of Oregon USA (1989).

Sertifikasi

Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi 7 - Bidang Manajemen Risiko Perbankan (2024).

Pengalaman Kerja

- Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-sekarang).
- Direktur Human Capital & Kepatuhan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2022).
- Direktur Treasury & International, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020).
- Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019).
- Direktur Perencanaan & Operasional, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018).
- Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:
- Ketua Komite Crisis Management PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite IT PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite Bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite Aset & Liabilitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Policy & Procedure di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Tribuana Tunggadewi

Direktur Compliance & Human Capital

Warga Negara Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1967. Usia 57 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Compliance & Human Capital melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 - 2024 (Periode Pertama).
- 2024 - 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 2.280.100 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1990).
- Spesialis Kenotariatan dari Universitas Airlangga Surabaya (1993).
- Magister Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia (2002).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Pengalaman Kerja

- Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang).
- Direktur Kepatuhan & Risiko, PT Bank BNI Syariah (2017-2021).
- Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko & Komunikasi, PT Bank BNI Syariah (2017).
- Senior Executive Vice President (SEVP) Risk & Compliance, PT Bank BNI Syariah (2015-2017).
- Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011–2015).
- Vice President (VP) Wakil Pemimpin 2 Divisi Bidang GCG dan Biro Direksi Corporate Secretary, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009–2011).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:

- Wakil Ketua Komite Policy & Procedure di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite Sumber Daya Manusia di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite IT di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Bisnis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Aset & Liabilitas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Crisis Management di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Anton Sukarna

Direktur Sales & Distribution

Warga Negara Indonesia

Lahir di Bandung, pada tahun 1970. Usia 54 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Depok, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Sales & Distribution melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 - 2024 (Periode Pertama).
- 2024 - 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 2.280.100 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan dari Institut Pertanian Bogor (1994).
- Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah dari Institut Pertanian Bogor (2023).

Sertifikasi

Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7

Pengalaman Kerja

- Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang).
- Direktur Distribution & Sales, PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021).
- SEVP Distribution & Sales, PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020).
- Regional Head-Region III/Jakarta, PT Bank Syariah Mandiri (2018-2019).
- Regional Head-Region VII/Indonesia Timur, PT Bank Syariah Mandiri (2016-2018).
- Group Head Commercial Banking Group, PT Bank Syariah Mandiri (2012-2016).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:

- Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Bisnis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Aset dan Liabilitas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Crisis Management di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Ade Cahyo Nugroho

Direktur Finance & Strategy

Warga Negara Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1978. Usia 46 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Finance & Strategy melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 - 2024 (Periode Pertama).
- 2024 - 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 2.280.100 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (2003).
- Master in Business Administration dari Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherland (2011).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7

Pengalaman Kerja

- Direktur Finance & Strategy PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang).
- Direktur Finance, Strategy & Treasury, PT Bank Syariah Mandiri (2018-2021).
- Direktur Finance & Strategy, PT Bank Syariah Mandiri (2017-2018).
- Senior Executive Vice President (SEVP) Finance & Strategy, PT Bank Syariah Mandiri (2016-2017).
- Direktur Finance & Strategy, PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016).
- Senior Executive Vice President (SEVP)/Deputy Director, PT Mandiri Tunas Finance (2014-2015).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:

- Wakil Ketua Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite IT di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Policy & Procedure di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Aset & Liabilitas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Crisis Management di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Zaidan Novari

Direktur Wholesale Transaction Banking

Warga Negara Indonesia

Lahir di Palembang, pada tahun 1967. Usia 57 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Wholesale Transaction Banking melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapat keputusan efektif dari OJK tanggal 31 Januari 2023.

Periode Jabatan
2022 – 2025 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 1.071.400 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan dari Universitas Sriwijaya Palembang (1991).
- Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1999).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7

Pengalaman Kerja

- Direktur Wholesale Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-sekarang).
- Senior Vice President Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2022).
- Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2017).
- Senior Account Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2008-2012).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Bisnis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Aset & Liabilitas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Saladin Dharmanugraha Effendi

Direktur Information Technology

Warga Negara Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1974. Usia 50 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Information Technology Informasi melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 September 2023.

Periode Jabatan
2023 – 2026 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 343.100 lembar saham

Riwayat Pendidikan

Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering dari Swinburne University of Technology Melbourne Australia (1999).

Sertifikasi

- Chief Information Security Officer (CISO), Carnegie Mellon University (2022).
- Chief Data Officer (CDO), Carnegie Mellon University (2023).
- Manajemen Risiko Level 7, Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (2024).

Pengalaman Kerja

- Direktur Information Technology Informasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023-sekarang).
- Group Head Chief Information Security Officer, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2023).
- Head of IT Division, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2014-2018).
- Head of Information Technology, Senior Vice President (SVP), HSBC Indonesia (2006-2014).
- Head of Competence (HoC), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2003-2006).
- Information Technology Consultant, PT Astra Graphia Information Technology (2000-2003).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:
- Wakil Ketua Komite IT di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Wakil Ketua Komite Crisis Management di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Policy & Procedure di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Grandhis Helmi Harumansyah

Direktur Risk Management

Warga Negara Indonesia

Lahir di Ngawi, pada tahun 1981. Usia 43 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Risk Management melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 September 2023.

Periode Jabatan
2023 – 2026 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 343.100 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Industri dari Universitas Indonesia (2003).
- Magister Business Administration-Strategic Management dari Washington University St. Louis (2013).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7

Pengalaman Kerja

- Direktur Risk Management Informasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023-sekarang).
- Group Head Commercial Risk 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-2023).
- Head of Business Development PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore (BMSG) (2016-2019).
- Departement Head Sector Sea Port & Transportation, Corporate Banking II & IV Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015–2016).
- Departement Head Sector Energy, Corporate Banking V Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:
- Ketua Komite Manajemen Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua Komite Policy & Procedure di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite IT di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Bisnis di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Sumber Daya Manusia di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Aset & Liabilitas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komie Crisis Management di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Harry Gusti Utama

Direktur Retail Banking

Warga Negara Indonesia

Lahir di Palembang, pada tahun 1968. Usia 56 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Malang, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Retail Banking melalui RUPST tanggal 17 Mei 2024 dan mendapatkan Keputusan efektif dari OJK tanggal 8 Oktober 2024.

Periode Jabatan
2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (1991).
- Magister Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (1999).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7

Pengalaman Kerja

- Direktur Retail Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-sekarang).
- Division Head Wholesale Credit Risk Analyst, PT Bank BRI (Persero) Tbk (2021-2024).
- Kepala Audit Intern Wilayah Yogyakarta PT Bank BRI (Persero) Tbk (2020-2021).
- Komisaris PT Bringin Sejahtera Makmur (2020-2022).
- Pimpinan Wilayah Pekanbaru PT Bank BRI (Persero) Tbk (2019-2020).
- Komisaris Utama PT Bringin Sejahtera Makmur (2018-2020).
- Kepala Divisi Bisnis Korporasi PT Bank BRI (Persero) Tbk (2018-2019).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal
- Komite Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Komite Bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Asset and Liability Committee PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Ari Rizaldi

Direktur Treasury & International Banking

Warga Negara Indonesia

Lahir di Sanggau, pada tahun 1970. Usia 54 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Treasury & International Banking melalui RUPST tanggal 17 Mei 2024 dan mendapatkan Keputusan efektif dari OJK tanggal 8 Oktober 2024.

Periode Jabatan

2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 13.400 lembar saham

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Akutansi dari Universitas Andalas Padang (1995).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7

Pengalaman Kerja

- Direktur Treasury & International Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-sekarang).
- Group Head Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-2024).
- Definitif Deputy Group Head Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-2020).
- PJ. Deputy Group Head Treasury PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2019).
- Dept. Head Strategic Banking Book PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2019).
- PJ. Dept. Head Strategic Banking Book PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2015).
- Chief Dealer Retail Marketing Jakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal
- Komite Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Asset and Liability Committee PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Ngatari*

Direktur Retail Banking

Warga Negara Indonesia

Lahir di Mojokerto, pada tahun 1965. Usia 59 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Wakil Direktur Utama 1 melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada tanggal 1 Februari 2021. Menerima pengalihan tugas menjadi Direktur Retail Banking melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022.

Periode Jabatan

2021 – 2024 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/Pengolahan Hasil Pertanian, dari Universitas Brawijaya Malang (1990).

Sertifikasi

-

Pengalaman Kerja

- Direktur Retail Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-2024).
- Wakil Direktur Utama 1 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022).
- Direktur Utama, PT Bank BRIsyariah Tbk (2019-2021).
- Pemimpin Wilayah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung (2018-2019).
- Pemimpin Wilayah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 1 (2017-2018).
- Pemimpin Wilayah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar (2016-2017).

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024



Moh. Adib*

Direktur Treasury & International Banking

Warga Negara Indonesia

Lahir di Sidoarjo, pada tahun 1965. Usia 59 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Direktur Treasury & International Banking melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 23 September 2022.

Periode Jabatan

2022 – 2024 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ilmu Agronomi dari Institut Pertanian Bogor (1989).
- Magister Manajemen Agrobisnis dari Universitas Padjajaran (2000).

Sertifikasi

-

Pengalaman Kerja

- Direktur Treasury & International Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-2024).
- Direktur PT BRI Danareksa Sekuritas (2021-2022).
- Senior Executive Vice President (SEVP) Retail Capital Market PT BRI Danareksa Sekuritas (2019-2021).
- Kepala Divisi Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019).
- Wakil Kepala Divisi Bisnis Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018).
- Kepala Bagian Credit Line Management Divisi Bisnis Internasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015).

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hery Gunardi	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama		√		√		√		√		√		√		√
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy		√		√		√		√		√		√		√
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution		√		√		√		√		√		√		√
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital		√		√		√		√		√		√		√
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking		√		√		√		√		√		√		√
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology		√		√		√		√		√		√		√
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Managament		√		√		√		√		√		√		√
Ari Rizaldi	Direktur Treasury & International Banking		√		√		√		√		√		√		√
Harry Gusti Utama	Direktur Retail Banking		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung maupun tidak langsung

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Direksi pada tahun buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi anggota Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun 2024

Komposisi Direksi sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 8 (delapan) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sebelum RUPS Tahunan Tahun 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hery Gunardi	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	23 September 2022
Ngatari	Direktur Retail Banking	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	OJK	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	31 Januari 2023
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	OJK	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	23 September 2022
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Managament	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023

Komposisi Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun 2024

Pada tanggal 17 Mei 2024, RUPS Tahunan memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama;
   b. Ngatari sebagai Direktur Retail Banking;
   c. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital;
   d. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy;
   e. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution;
   f. Moh Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking;
2. Mengangkat kembali untuk periode kedua:
   a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama;
   b. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital;
   c. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy;
   d. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution;
3. Mengangkat:
   a. Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking;
   b. Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking;

Sehingga komposisi Direksi setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama, dan 8 (delapan) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Setelah RUPS Tahunan Tahun 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Hery Gunardi	Direktur Utama	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 - RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	1 Februari 2021
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	23 September 2022
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 - RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	1 Februari 2021
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 - RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	1 Februari 2021
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 - RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	1 Februari 2021
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	OJK	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	31 Januari 2023
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Managament	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Harry Gusti Utama	Direktur Retail Banking	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	8 Oktober 2024
Ari Rizaldi	Direktur Treasury & International Banking	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	8 Oktober 2024

Profil
Dewan Komisaris



Muliaman Dharmansyah Hadad

Komisaris Utama merangkap Independen

Warga Negara Indonesia

Lahir di Bekasi, pada tahun 1960. Usia 64 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 September 2023.

Periode Jabatan

2023 – 2026 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia (1984).
- Master of Public Administration dari Harvard University Massachusetts (1990).
- Doctor of Philosophy, Monash University Melbourne (1996).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7

Pengalaman Kerja

- Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) di Kabinet Merah Putih (2024).
- Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta (UNS) (2024- Sekarang).
- Komisaris Independen, PT Astra International Tbk (2023-Sekarang).
- Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023-Sekarang).
- Duta Besar RI Untuk Swiss dan Liechtenstein, Kedutaan Besar Republik Indonesia (2018-2023).
- Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro, Semarang, (2017-Sekarang).
- Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Diponegoro (UNDIP) (2016-2021).
- Ketua OJK, Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017).
- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) (2011-2012).
- Alternate Member Islamic Financial Stability Board (IFSB) (2007-2012).
- Anggota Basel Committee and Banking supervision (BCBS) dan Financial Stability Board (FSB) (2006-2017).
- Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2006-2012).
- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) (2006-2011).
- Direktur Direktorat penelitian dan Pengaturan Perbankan (2005-2006).
- Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia (BI) (2003-2005).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Nominasi & Remunerasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
- Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta (UNS) (2024- Sekarang).
- Kepala Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara (DANANTARA) di Kabinet Merah Putih (2024).
- Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk (2023-sekarang).
- Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro, Semarang, (2017-Sekarang).



Adiwarman Azwar Karim

Wakil Komisaris Utama merangkap Independen

Warga Negara Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1963. Usia 61 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui RUPSLB 24 Agustus 2021 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 7 Februari 2022. Menerima pengalihan tugas menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 pada tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Insinyur Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1986).
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1989).
- Master Administrasi Bisnis dari European University, Belgium (1990).
- Master Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi dari Boston University, United State of America (1992).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5

Pengalaman Kerja

- Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023-Sekarang).
- Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2023).
- Dewan Penasihat Muslim Excellent Centre Unilever Indonesia (2020-2022).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (2020-2022).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multi Infrastruktur (2018-2020).
- Founder KARIM Consulting Indonesia (2013-2022).
- Komisaris Independen Bank Sahabat Sampoerna (2012 – 2020).
- Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2010-2025).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Prudential Life Assurance (2007-2012).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BNP Paribas Investment Partners (formerly Fortis Investments) (2007-2012).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah HSBC Amanah Syariah Indonesia (2003-2008).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Great Eastern Lifes (2002-2012).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Danamon Syariah, (2002-2010).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:

- Anggota Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Nominasi & Remunerasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Masduki Baidlowi

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Lahir di Bangkalan, pada tahun 1958. Usia 66 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 pada tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 1.086.400 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Muda Sastra Arab, Fakultas Adab dari IAIN Sunan Ampel Surabaya (1983).
- Sarjana Bidang Pendidikan dari Sekolah Tinggi Tarbiyah Taruna, Surabaya (2004).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4

Pengalaman Kerja

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-Sekarang).
- Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2020-2025).
- Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021).
- Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden) (2019-2024).
- Anggota DPR RI anggota Komisi IV bidang pertanian dan Kelautan(2007-2009).
- Anggota Komisi I Bidang politik Luar Negeri (2007-2007).
- Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang Pendidikan (2004-2007).
- Staf ahli bidang komunikasi Komisi I (2000-2004).
- Pendiri NU Online (Situs Berita dan Informasi keislaman) PBNU (2000).
- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), (1999-2021).
- Wakil Pemimpin Redaksi di Majalah Tiras, (1997-1999).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:

- Anggota Komite Nominasi & Remunerasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:

- Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2020-2025).



Suyanto

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1962. Usia 62 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 pada tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 1.086.400 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Studi Pembangunan dari Universitas Balikpapan (1994).
- Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta dari Univeristas Pertahanan Citeureup (2011).
- Doktor Ekonomi-Manajemen Strategi dari Universitas Trisakti Jakarta (2020).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5

Pengalaman Kerja

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-Sekarang).
- Staf Khusus Ka BIN Badan Intelijen Negara (2020-2024).
- Direktur Utama PT Laboratorium EBDC Indonesia (2020-2024).
- Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021).
- Agen Madya, pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara (2019-2020).
- Staf Ahli Ka BIN bidang SDA-LH Badan Intelijen Negara (2019).
- Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara (2018).
- Pejabat Pembuat Komitmen bidang Teknologi Badan Intelijen Negara (2015-2020).
- Kepala Biro Umum pada Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara (2015-2017).
- Kasubdit Eropa II, Sub Direktorat Eropa II Direktorat Amerop pada Deputi intelijen Luar Negeri Badan Intelijen Negara (2014-2015).
- Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara (2012-2014).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:

- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Abu Rokhmad

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Lahir di Jepara, pada tahun 1976. Usia 48 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris melalui RUPST tanggal 22 Mei 2023 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 21 September 2023.

Periode Jabatan

2023 – 2026 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 163.500 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Syari'ah/Hukum Perdata Islam dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (1999).
- Magister Agama dari Universitas Muhammadiyah Malang (2001).
- Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang (2010).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 4

Pengalaman Kerja

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023-Sekarang).
- Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (2024).
- Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementrian Agama (2024-sekarang).
- Plt. Rektor UIN Sultan Thaha Saefuddin Jambi (2023).
- Plt. Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Kementerian Agama (2022-2023).
- Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama (2021-2024).
- Plt. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2021-2022).
- Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Umum, Perencanaan dan Keuangan FISIP UIN Walisongo (2016-2019).
- Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo (2015-2016).
- Sekretaris, Program Studi Magister Islamic Studies Program Pascasarjana IAIN Walisongo (2011-2013).
- Ketua Program Studi Magister Ilmu Falak Program Pascasarjana IAIN Walisongo (2011).
- Ketua Program Khusus Penyuluh Agama (PKPA) Fakultas Dakwah IAIN Walisongo (2009-2010).
- Dosen dan Guru Besar UIN Walisongo (2002-2021).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:

- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:

- Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kementrian Agama (2024-sekarang).



Fauzi

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Lahir di Bonjol, pada tahun 1967. Usia 57 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Bekasi, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris melalui RUPST 17 Mei 2024 dan Mendapatkan Keputusan dari OJK pada tanggal 10 Desember 2024.

Periode Jabatan
2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
PT Bank Syariah Indonesia Tbk: 115.000 lembar saham

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas Padang (1992).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6

Pengalaman Kerja

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-Sekarang).
- SEVP Operations PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021-2024).
- Pemimpin Satuan Audit Internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2021).
- Pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019).
- Pemimpin Kantor Wilayah Bandung PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018).
- Pemimpin Divisi Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014-2016).
- Wakil Pimpinan 3 Divisi Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010-2014).
- Pemimpin Kantor Cabang Utama Bekasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009-2010).
- Pemimpin Kelompok Pengembangan Jaringan Divisi Pengelolaan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2005-2009).
- Sub Project Manager Branch Operation Restructuring PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2005-2007).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Nazaruddin

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Lahir di Sigli, pada tahun 1968. Usia 56 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris melalui RUPST 17 Mei 2024 dan Efektif Menjabat pada 10 Desember 2024.

Periode Jabatan
2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

Sarjana Manajemen dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (1993).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6

Pengalaman Kerja

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-sekarang).
- Regional CEO BRI Jakarta III PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022-2024).
- Regional CEO BRI Banjarmasin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021-2022).
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Mikro RO BRI Semarang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2020-2021).
- PJ Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis Ritel RO BRI Makassar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2020).
- Pimpinan Cabang KC Bandung Dewi Sartika PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018).
- Pimpinan Cabang KC Medan Iskandar Muda PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2016).
- Pimpinan Cabang Banda Aceh Cut Mutia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2013-2014).
- Pimpinan Cabang Kantor Cabang Tabanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2009-2013).
- Pimpinan Cabang Kantor Cabang Curup PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007-2009).
- Pimpinan Cabang Kantor Cabang Sigli PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2003-2007).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Komaruddin Hidayat

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia

Lahir di Magelang, pada tahun 1953. Usia 71 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris Independen melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 pada tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ushuluddin dari IAIN Jakarta (1981).
- Magister Filsafat dari Middle East Technical University Ankara Turki (1986).
- Doktor Filsafat dari Middle East Technical University Ankara Turki (1990).
- Post-Doctorate Research Program di McGill University, Canada (Satu semester, 1995)
- Post-Doctorate Research Program di Hartfort Seminary Connecticut, USA (Satu semester, 1997)

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5

Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang).
- Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (2019-2024).
- Komisaris Independen BNI Syariah (2019-2020).
- Pendiri/Ketua Yayasan Pendidikan Madania (2018-sekarang).
- Anggota Timsel dan Calon anggota KPU RI dan Bawaslu RI (2017-2022).
- Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta (2015-sekarang).
- Komisaris Independen BRI Syariah (2015-2019).
- Anggota Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) (2015-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri (BSM) (2013-2016).
- Ketua Departemen Pendidikan Yayasan Sukma Bangsa (2013-sekarang).
- Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2006-2014).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:

- Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi & Remunerasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:

- Pendiri/Ketua Yayasan Pendidikan Madania (2018-sekarang).
- Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta (2015-sekarang).
- Anggota Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) (2015-sekarang).
- Ketua Departemen Pendidikan Yayasan Sukma Bangsa (2013-sekarang).



Mohamad Nasir

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia

Lahir di Ngawi, pada tahun 1960. Usia 64 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Semarang, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris Independen melalui RUPST 27 Mei 2022 dan efektif menjabat pada 6 Januari 2023.

Periode Jabatan

2022-2025 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi (Drs) dari Universitas Diponegoro Semarang (1988).
- Magister Sains (M.Si) in Accounting dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1994).
- Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting dari University of Science Malaysia (2004).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 5

Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023-sekarang).
- Dewan Penasehat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik (2022-Sekarang).
- Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro (2021-2026).
- Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang Reformasi Birokrasi (2019-2024).
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022).
- Dewan Penasehat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2017-2022).
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ke-12 (2014-2019).
- Rektor Universitas Diponegoro (2014-2018).
- Komisaris Independen PTPN IX (2013-2014).
- Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (2010-2014).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:

- Ketua merangkap Anggota Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Nominasi & Remunerasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:

Dewan Penasehat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik (2022-Sekarang).



Felicitas Tallulembang

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia

Lahir di Rantepao, pada tahun 1959. Usia 65 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris Independen melalui RUPST 17 Mei 2024 Efektif Menjabat pada 10 Desember 2024.

Periode Jabatan
2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

Sarjana Kedokteran dari Universitas Hasanuddin Makassar (1990).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 6

Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-sekarang).
- Anggota Dewan Pembina dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Partai Gerindra (2020).
- Anggota Komisi IV DPR RI (2014-2019).
- Komisaris di PT Cetara Bangun Persada (2003-2017).
- Direktur Rumah Sakit Umum Kab. Sinjai (1999-2008).
- Kepala Puskesmas di Puskesmas Galesong Utara, Takalar (1992-1999).
- Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Kab. Takalar (1991-1992).

Jabatan Rangkap

Rangkap Jabatan Internal:
- Anggota Komite Audit di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rangkap Jabatan Eksternal:
Tidak memiliki jabatan di perusahaan terbuka lainnya.



Imam Budi Sarjito*

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Lahir di Semarang, pada tahun 1959. Usia 65 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.

Periode Jabatan

2021 – 2024 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

822.700 lembar saham

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang (1982).
- Master Economy dari University of Illinois USA (1991).
- Doctor Economy dari Claremont Graduate School USA (1995).

Sertifikasi

-

Pengalaman Kerja

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2024).
- Komisaris BNI Syariah (2018-2021).
- Direktur Kepatuhan Dan Risiko Perusahaan BNI (2015-2018).
- Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management (2011-2015).
- Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2005-2011).
- Wakil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2004-2005).
- Wakil Pemimpin Bidang Pemasaran Ritel Kantor Wilayah 05 Semarang (2003-2004).
- Wakil Pemimpin Bidang Pembinaan Cabang Kantor Wilayah 08 Denpasar (2002-2003).

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024



Sutanto*

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Lahir di Semarang, pada tahun 1963. Usia 61 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan
Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.

Periode Jabatan
2021 – 2024 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham
Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

Sarjana Administrasi dari Universitas Diponegoro Semarang (1989).

Sertifikasi

-

Pengalaman Kerja

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2024).
- Komisaris PT Bank BRIsyariah Tbk (2019-2021).
- Kepala Audit Intern, Audit Intern Wilayah Bandung, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019).
- Inspektur, Kantor Inspeksi Semarang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018).
- Inspektur, Kantor Inspeksi Banda Aceh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016).
- Wakil Inspektur Bidang Audit KP, KCK, UKLN & PA Audit Intern Kantor Pusat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015).

Jabatan Rangkap

Tidak memiliki jabatan rangkap baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen		√		√		√		√		√		√		√
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen		√		√		√		√		√		√		√
Masduki Baidlowi	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Suyanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Abu Rokhmad	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Fauzi	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Nazaruddin	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Mohamad Nasir	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung maupun tidak langsung

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris pada tahun buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun 2024

Komposisi Dewan Komisaris sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Sebelum RUPS Tahunan Tahun 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 24 Agustus 2021	31 Januari 2022
Masduki Baidlowi	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Suyanto	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Abu Rokhmad	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Imam Budi Sarjito	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Sutanto	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	6 Januari 2023

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun 2024

Pada tanggal 17 Mei 2024, RUPS Tahunan memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen;
   b. Suyanto sebagai Komisaris;
   c. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris;
   d. Imam Budi Sarjito sebagai Komisaris;
   e. Sutanto sebagai Komisaris;
   f. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen;
2. Mengangkat kembali untuk periode kedua:
   a. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen;
   b. Suyanto sebagai Komisaris;
   c. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris;
   d. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen;
3. Mengangkat:
   a. Fauzi sebagai Komisaris;
   b. Nazaruddin sebagai Komisaris;
   c. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen;

Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama merangkap Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama merangkap Independen, dan 5 (lima) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Setelah RUPS Tahunan Tahun 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 24 Agustus 2021 - RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	7 Februari 2022
Masduki Baidlowi	Komisaris	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 - RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	1 Februari 2021
Suyanto	Komisaris	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 - RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	1 Februari 2021
Abu Rokhmad	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023	21 September 2023
Fauzi	Komisaris		RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	10 Desember 2024
Nazaruddin	Komisaris		RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	10 Desember 2024
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	OJK	- RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 - RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	1 Februari 2021
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022	6 Januari 2023
Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	10 Desember 2024

Profil
Dewan Pengawas Syariah



Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia

Lahir di Cirebon, pada tahun 1961. Usia 63 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Tangerang, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Selanjutnya, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989).
- Magister Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997).
- Doktor Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008).

Sertifikasi

- Sertifikat Kompetensi Bidang Pengawas Syariah DSN-MUI (2017).
- Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) (2021).

Pengalaman Kerja

- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021).
- Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2020-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management (2015-2024).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services (2012-sekarang).
- Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS), Ikatan Ahli Akuntan Indonesia (2012-2016).
- Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah (2010-2021).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-sekarang).

Rangkap Jabatan

Perusahaan Terbuka Lainnya:
Anggota Dewan Pengawas Syariah UUS PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-sekarang).

Institusi Lainnya:
- Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2020-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services (2012-sekarang).



DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1967. Usia 57 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Jakarta Timur, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah melalui RUPS LB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Selanjutnya, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Syariah dari IAIN / UIN Syarief Hidayatullah Jakarta (1992).
- Magister Ilmu Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum: Institute of Business Law and Legal Management Jakarta (2004).
- Doktor Islamic Economic and Finance dari Universitas Trisakti (2014).

Sertifikasi

Ijtima'Sanawi (Annual Meeting) DPS-DSN MUI (2023) .

Pengalaman Kerja

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2020-2024).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (2023-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Syariah Tbk (2018-2023).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life Syariah (2017-sekarang).

Rangkap Jabatan

Perusahaan Terbuka Lainnya:

-

Institusi Lainnya:

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia (2023-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life Syariah (2017-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2010 - sekarang).



Dr. H. Oni Sahroni, MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia

Lahir di Serang, pada tahun 1975. Usia 49 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Depok, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Anggota Dewan Pengawas melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Kemudian diangkat kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024.

Periode Jabatan

- 2021 – 2024 (Periode Pertama).
- 2024 – 2027 (Periode Kedua).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Syariah Islamiyah dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2000).
- Magister Fiqh Muqaran dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2005).
- Doktor Fiqh Muqaran dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2009).

Sertifikasi

-

Pengalaman Kerja

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah, PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah, Maybank Islamic Berhard Syariah (2018-2020).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2017-2020).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners (2016-sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2012-2021).

Rangkap Jabatan

Perusahaan Terbuka Lainnya:

-

Institusi Lainnya:

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners (2016-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) (2016 - sekarang).



Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia

Lahir di Bogor, pada tahun 1967. Usia 57 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Bandung, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui RUPS tanggal 17 Mei 2024 dan efektif menjabat pada 14 Oktober 2024.

Periode Jabatan

2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Syariah dari Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1991).
- Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional (2009).
- Magister Agamadari IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (1995).
- Magister Ilmu Hukum Universitas Djuanda Bogor (2010).
- Doktordari IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (1999).

Sertifikasi

Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan keputusan OJK No. Kep-09/PM.223/PJ-ASPM/2021 Tanggal 18 Mei 2021.

Pengalaman Kerja

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-sekarang).
- Ketua DPS Bank BJB Syariah tahun (2022-2024).
- Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022-sekarang).
- Anggota DPS Dana Pensiun Iuran Pasti BI (2022-sekarang).
- Anggota DPS Bank Permata Unit Usaha Syariah (2014-sekarang).
- Ketua DPS Asuransi Al - Amin (2010-sekarang).

Rangkap Jabatan

Perusahaan Terbuka Lainnya:

-

Institusi Lainnya:

- Anggota DPS Dana Pensiun Iuran Pasti BI (2022-sekarang).
- Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022-sekarang).
- Anggota DPS Bank Permata Unit Usaha Syariah (2014-sekarang).
- Ketua DPS Asuransi Al - Amin (2010-sekarang).
- Sekretaris Badan Pelaksanan Hariah DSN Majelis Ulama Indonesia (...-...).
- Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (...-...).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Dana Pensiun Iuran Pasti BI (...-...).



Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia

Lahir di Rembang, pada tahun 1973. Usia 51 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Gondan Rojo, Rembang, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui RUPS tanggal 17 Mei 2024 dan efektif menjabat pada 10 Januari 2025.

Periode Jabatan

2024 – 2027 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Tafsir dan Ulumul Qur'an dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir (1998).
- Magister Tafsir dan Ulumul Qur'an dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir (2004).
- Doktor Tafsir dan Ulumul Qur'an dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir (2010).

Sertifikasi

-

Pengalaman Kerja

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-sekarang).
- Anggota Rois Syuriah PBNU (2022-2024).
- Anggota Komisi Fatwa MUI (2020-2025).
- Anggota Katib Syuriah PBNU (2018-2022).
- Anggota Pengurus Harian DSN MUI (2016-sekarang).
- Ketua STAI Al Anwar Serang Rembang (2012-sekarang).

Rangkap Jabatan

Perusahaan Terbuka Lainnya:
-

Institusi Lainnya:
- Anggota Pengurus Harian DSN MUI (2016-sekarang).
- Ketua STAI Al Anwar Serang Rembang (2012-sekarang).



Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc*

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia

Lahir di Bogor, pada tahun 1951. Usia 73 tahun Per Desember 2024.

Berdomisili di Bogor, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat untuk pertama kalinya menjadi Anggota Dewan Pengawas melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.

Periode Jabatan

2021 – 2024 (Periode Pertama).

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1978).
- Magister Penyuluhan Pembangunan dari Institut Pertanian Bogor (1987).
- Diploma Bidang Bahasa Arab dari Universitas Madinah Saudi Arabia (1994).
- Doktor Ilmu Agama/Pengkajian Islam dari UIN Syarif Hidayatullah (2001).

Sertifikasi

-

Pengalaman Kerja

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah (2014-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2010-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT Bank BRIsyariah Tbk (2010-2020).
- Direktur Pasca Sarjana, Universitas Ibnu Khaldun Bogor (2009-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah, BPRS Amanah Ummah Bogor (1992-sekarang).

Rangkap Jabatan

Perusahaan Terbuka Lainnya:
Ketua DPS PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk (2010-sekarang).

Institusi Lainnya:

- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah (2014-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT PNM Invest Management (2010-sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah Bogor (1992-sekarang).

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali*			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah		√		√		√		√		√		√		√

*Langsung maupun tidak langsung

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas Syariah

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Pengawas Syariah pada tahun buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2024, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Sebelum RUPS Tahunan Tahun 2024

Komposisi Dewan Pengawas Syariah sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Pengawas Syariah Sebelum RUPS Tahunan Tahun 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Anggota Dewan Pengawas Syariah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota Dewan Pengawas Syariah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Setelah RUPS Tahunan Tahun 2024

Pada tanggal 17 Mei 2024, RUPS Tahunan memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah;
   b. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
   c. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
   d. Didin Hafidhuddin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;

2. Mengangkat kembali untuk periode kedua:
   a. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah;
   b. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
   c. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;

3. Mengangkat:
   a. Jaih Mubarok sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah;
   b. Abdul Ghofur Maimoen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah;

Sehingga Komposisi Dewan Pengawas Syariah setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 17 Mei 2024 yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 4 (empat) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Setelah RUPS Tahunan Tahun 2024

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Anggota Dewan Pengawas Syariah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota Dewan Pengawas Syariah	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	17 Mei 2024
Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, M.H, M.Ag	Anggota Dewan Pengawas Syariah	OJK	RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024	17 Mei 2024

Profil
Pejabat Eksekutif

Profil Senior Executive Vice President Internal (SEVP)



Babas Bastaman

Senior Executive Vice President (SEVP)
Wholesale Risk

Warga Negara Indonesia

57 Tahun
per 31 Desember 2024

Domisili

Bekasi, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1992).
- Magister Profesional Industri Kecil Menengah Institut Pertanian Bogor (2009).

Pengalaman Kerja

- SEVP Bisnis SME dan Komersial PT Bank BNI Syariah (2020-2021).
- Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020).
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017–2019).
- Pemimpin Divisi Kredit Komersial PT Bank BNI Syariah (2016).

Dasar Hukum Pengangkatan

SK Direksi No. 05/001/DIR-CHC-PKWT tanggal 2 Januari 2025

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki



Wawan Setiawan

Senior Executive Vice President (SEVP)
Consumer Banking

Warga Negara Indonesia

50 Tahun
per 31 Desember 2024

Domisili

Tangerang Selatan, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Sipil Universitas Indonesia (1997).
- Magister Jurusan Manajemen PPM School of Management, Jakarta (2000).

Pengalaman Kerja

- SEVP Retail Banking PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021).
- Senior Vice President, Micro Banking Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019).
- Vice President, Regional Retail Head Kantor Wilayah Sumatera II, Palembang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016).
- Vice President, Deputy Regional Manager Kantor Wilayah Jateng – DIY, Semarang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015).

Dasar Hukum Pengangkatan

SK Direksi No. 2021/64317-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki



Saut Parulian Saragih

Senior Executive Vice President (SEVP)
Digital Banking

Warga Negara Indonesia

50 Tahun
per 31 Desember 2024

Domisili

Depok, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1996).
- Magister Jurusan Bisnis Administrasi dari London Business School (2008).

Pengalaman Kerja

- Executive Vice President - Head of Strategy, Investor Relations and Partnerships Bank CIMB Niaga (2020-2021).
- Executive Vice President - Head of Strategy Bank CIMB Niaga (2019-2020).
- Direktur - Strategy and Business Development OVO PT Visionet International (2017-2019).
- Head of Business Development Sampoerna AGRO (2014-2017).

Dasar Hukum Pengangkatan

SK Direksi No. 01/244-KUA/DIR tanggal 6 Agustus 2021

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki



Satria

Senior Executive Vice President (SEVP)
Internal Audit

Warga Negara Indonesia

57 Tahun
per 31 Desember 2024

Domisili

Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi, Universitas Bandar Lampung (1990).
- Magister Management, Universitas Bandar Lampung (2008).

Pengalaman Kerja

- Chief Retail Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2021-2023).Ketua Dewan Pengawas (2019-sekarang).
- Group Head / Senior Vice President Cash & Trade Operations Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019).
- Regional CEO Sulawesi Maluku (8 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016).
- Regional CEO Sumatera II (6 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015).

Dasar Hukum Pengangkatan

SK Direksi No. 03/153-KEP/DIR tanggal 28 April 2023

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki



Ana Nurul Khayati

Senior Executive Vice President (SEVP)
Operations

Warga Negara Indonesia

52 Tahun
per 31 Desember 2024

Domisili

Depok, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada (1996).
- Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia (2016).

Pengalaman Kerja

- Senior Executive Vice President Operations, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-sekarang).
- Senior Vice President Distribution Strategy Group, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023-2024).
- Senior Vice President Distribution Strategy Group, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-2023).
- Project Leader, Stream Merge Outlet, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022).
- Senior Vice President Policy & Procedure Group, PT Bank Syariah Mandiri (2015-2021).

Dasar Hukum Pengangkatan

SK Direksi No. 04/221-KEP/DIR tanggal 7 Juni 2024

Kepemilikan Saham

Tidak memiliki



Firman Jatnika

Senior Executive Vice President (SEVP)
Human Capital

Warga Negara Indonesia

54 Tahun
per 31 Desember 2024

Domisili

Jakarta Selatan, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Bachelor of Development Economics, Padjajaran University (1989-1995).
- Magister of Economics, University of Indonesia (2001-2005).
- Doctorate of Strategic Management, Padjajaran University (2014-2019).

Pengalaman Kerja

- SEVP Human Capital, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024-sekarang).
- Regional CEO Surabaya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2024).
- Group Head Distribution Strategy Group, PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021).
- Group Head Learning Centre Mandiri Syariah University, PT Bank Syariah Mandiri (2016-2019).
- Head of Team, Branch and People Productivity Enhancement Program, PT Bank Syariah Mandiri (2015-2016).

Dasar Hukum Pengangkatan

SK Direksi No. 04/222-KEP/DIR tanggal 7 Juni 2024

Kepemilikan Saham

9.091,79 lot

Profil Pejabat Eksekutif

No.	Nama	Posisi Jabatan
1.	Sefudin Suria Hidayat	Alternative Channel & Government Project Group Head
2.	Peby Elan Surya Diningrat	BSI Corporate University Group Head
3.	Nurdiana Habibie	Senior Business Continuity Management Head
4.	Bayu Isnandar	Senior Business Transformation Head
5.	Arief Satiana	Card Business Group Head
6.	Andri Purnomo	Chief Information Security Officer
7.	Silmi Akbar Ghania Permana	Commercial Business 1 Group Head
8.	Diar Fitrada	Commercial Risk Group Head
9.	Rosalina Dewi T	Compliance & AML-CFT Group Head
10.	Praka Mulia Agung	Consumer Business 1 (Secured) Group Head
11.	Dien Lukita Purnamasari	Consumer Business 2 (Unsecured) Group Head
12.	I Gusti Ngurah Bramantya Ardana	Consumer Risk Group Head
13.	Fiti Syam	Corporate Business 1 Group Head
14.	Buyung Ichman Lukman	Corporate Business 2 Group Head
15.	Husni Thamrin	Corporate Business 3 Group Head
16.	Jiwo Sukarno	Corporate Development Group Head
17.	Priyo Hartono	Corporate Finance & Accounting Group Head
18.	Indra G Kampono	Corporate Finance & Solution Group Head
19.	Ali	Corporate Risk Group Head
20.	Wisnu Sunandar	Corporate Secretary & Communication Group Head
21.	Dwi Hesti Mulyaningrum	Customer Care Group Head
22.	Andy Puguh Nugroho	Data & Decision Management Group Head
23.	Wijayanto	Digital Banking & E-Channel Operations Group Head
24.	Riko Wardhana	Digital Banking Retail Group Head
25.	Affan Mawardi	Distribution Strategy Group Head
26.	Rima Dwi Permatasari	Environmental, Social & Governance Group Head
27.	Arief Budiman	Executive Risk & Recovery Officer Retail & Consumer (ERO-R)
28.	Asnah Faekhah	Executive Risk & Recovery Officer Retail & Consumer (ERO-R)
29.	Ir Supriono	Executive Risk & Recovery Officer Retail & Consumer (ERO-R)
30.	Taty Sediaty	Executive Risk & Recovery Officer Retail & Consumer (ERO-R)
31.	Budiyono	Executive Risk & Recovery Officer Wholesale (ERO-W)
32.	Maisur Hilmi	Executive Risk & Recovery Officer Wholesale (ERO-W)
33.	Alhuda Dj	Financing Center Group Head
34.	Yan Rasdiansyah	Financing Operations Group Head
35.	Ilyas Ibrahim	Gold & Pawning Business Group Head
36.	Bambang Sutrisno	Human Capital Services Group Head
37.	Teszy Mira Eka Kusuma	Human Capital Strategy & Policy Group Head
38.	Ida Triana Widowati	Institutional Banking Group Head
39.	Ir Anna Kristanty	International & Financial Institution Group Head
40.	Rizky Budinanda	Investor Relation Group Head
41.	Muhammad Syukron Habiby	Islamic Ecosystem Solution Group Head
42.	Sandy Prasetya Hadi	IT & Digital Development Group Head

No.	Nama	Posisi Jabatan
43.	Bayu Hasdianto	IT & Fraud Risk Group Head
44.	Arief Sunandar	IT Application Support Group Head
45.	Arif Jatmoko	IT Audit Group Head
46.	Gatot Prasetyo	IT Operations Group Head
47.	M. Misbahul Munir	IT Strategic Planning Group Head
48.	Netty Susanty	Legal Group Head
49.	Kemas Erwan Husainy	Marketing Communication Group Head
50.	Joni Haryanto	Micro Business Group Head
51.	Banjaran Surya Indrastomo	Chief Economist
52.	Agustini Fitriah	Operations Development Group Head
53.	Khoirul Huda S Riyadi	Pejabat Pelindungan Data Pribadi
54.	Indriati Tri Handayani	Policy & Procedure Group Head
55.	Yuwono	Procurement & Fixed Asset Group Head
56.	Mahendra Nusanto S	Executive Business Officer
57.	Dede Sutisna	Retail Collection, Restructuring & Recovery Group Head
58.	Vita Andrianty	Retail Deposit Solution Group Head
59.	Agus Subekti	Retail, Distribution & Digital Banking Audit Group Head
60.	Wachjono	Regional CEO
61.	Syahrial Alrasyid	Regional CEO
62.	Ari Yusnairy Muslim	Regional CEO
63.	Gunawan Arief Hartoyo	Regional CEO
64.	Ricky Rikardo Mulyadi	Regional CEO
65.	Adjat Djatnika Basarah	Regional CEO
66.	Fitria Ekayani	Regional CEO
67.	Ficko Hardowiseto	Regional CEO
68.	Jajang Abdul Karim	Regional CEO
69.	Sukma Dwie Priardi	Regional CEO
70.	Sylvia Azis	Senior Human Capital Business Partner 1 Head
71.	Sufitri Devi	Senior Human Capital Business Partner 2 Head
72.	Arjuka	Senior Operational Risk Head Corporate Center
73.	Yasrul	Senior Operational Risk Head Distribution
74.	Ika Kartika Johan	Senior Operational Risk Head IT
75.	Zulaicha	Senior Operational Risk Head Wholesale
76.	Deden Durachman	SME & Micro Risk Group Head
77.	Risqi Widayat	SME Business Group Head
78.	Diaz Hartadi	Strategic Planning & Performance Management Group Head
79.	Dickman Maulana	Transaction Banking Retail Group Head
80.	Fajar Ari Setiawan	Transaction Banking Wholesale Group Head
81.	Kemal Aditya	Treasury & Global Market Group Head
82.	Asri Natanegeri	Wealth Management Group Head
83.	Movianto	Wholesale & Corporate Center Audit Group Head
84.	Kurniawan Eko Budi P.	Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group Head
85.	Astridiana Sjamanti	Executive Business Officer
86.	Cera Wirastuti	Executive Business Officer
87.	Ferry Hendrawan	Executive Business Officer
88.	Yoana Irawati	Executive Business Officer

Profil
Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2024	2023
Pria	10.168	10.542
Wanita	7.066	7.367
Jumlah	17.234	**17.909**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	Posisi Jabatan	2024			2023		
		Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
N2	Group Head, Regional Head, Project Manager	69	26	95	75	21	96
N3	Dean, Area Manager, Dept Head, Manager	371	112	483	352	103	455
N4	Manager, Team Leader & Branch Manager, Sec, Head	1.785	578	2.363	1.702	538	578
N5	Relationship Officer, Branch Manager (Cash Outlet Manager), Officer, ODP	3.587	2.189	5.776	3.679	2.148	5.827
N6	Staf/Pelaksana/Pegawai Dasar	4.356	4.161	8.517	4.734	4.557	9.291
Jumlah		10.168	7.066	17.234	**10.542**	**7.367**	**16.247**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2024			2023		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
18-25 Tahun	137	221	358	145	285	430
26-35 Tahun	3.722	3.870	7.592	4.407	4.483	8.890
36-45 Tahun	5.077	2.578	7.655	4.867	2.259	7.126
Di atas 45 Tahun	1.232	397	1.629	1.123	340	1.463
Jumlah	10.168	7.066	17.234	**10.542**	**7.367**	**17.909**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2024			2023		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
SMU	25	4	29	30	6	36
Diploma	829	743	1572	910	810	1.720
S1	8.610	5.993	14.603	8.943	6.257	15.200
S2	693	323	1.016	652	291	943
S3	11	3	14	7	3	10
Jumlah	10.168	7.066	17.234	**10.542**	**7.367**	**17.909**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2024			2023		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pegawai Tetap dan Kontrak	10.168	7.066	17.234	10.220	7.025	17.245
Alih Daya	5.749	994	6.743	5.723	1.243	6.966
Jumlah	15.917	8.060	23.977	**15.943**	**8.268**	**24.211**

Komposisi
Pemegang Saham

Daftar Pemegang Saham

Tabel Daftar Pemegang Saham Per 1 Januari 2024

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500 per Saham		Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	
MODAL DASAR	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	46.129.260.138	23.064.630.069.000	**100**
SAHAM DALAM PORTEPEL	33.870.739.862	16.935.369.931.000	

Tabel Daftar Pemegang Saham Per 31 Desember 2024

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500 per Saham		Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	
MODAL DASAR	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	46.129.260.138	23.064.630.069.000	**100**
SAHAM DALAM PORTEPEL	33.870.739.862	16.935.369.931.000	

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan

Tabel Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan Per 1 Januari 2024

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan terbatas	114	30.928.721.497	67,04795
Dana Pensiun	61	454.391.398	0,98504
Yayasan	18	230.506.592	0,49970
Reksa dana	173	519.349.956	1,12586
Asuransi	134	537.830.296	1,16592
Koperasi	7	108.100	0,00023
Perorangan Indonesia	127.848	1.143.688.011	2,47931
Bank	3	10.725.230.507	23,25038
Sub Total	128.359	**44.539.826.358**	**96,55439**
Asing			
Badan Usaha Asing	154	1.587.923.649	3,44233
Perorangan Asing	98	1.510.131	0,00327
Sub Total	252	**1.589.433.780**	**3,44561**
TOTAL	128.611	**46.129.260.138**	**100,00%**

Tabel Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan Per 31 Desember 2024

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000%
Perseroan Terbatas	112	95.351.406	0,20670%
Dana Pensiun	61	454.391.398	0,98504%
Yayasan	18	230.506.592	0,49970%
Reksadana	173	519.349.956	1,12586%
Asuransi	134	537.830.296	1,16592%
Koperasi	7	108.100	0,00023%
Perorangan Indonesia	127.848	1.143.688.011	2,47931%
Bank	5	41.558.600.598	90,09163%
Sub Total	128.359	**44.539.826.358**	**96,55439%**
Asing			
Badan Usaha Asing	154	1.587.923.649	3,44233%
Perorangan Asing	98	1.510.131	0,00327%
Sub Total	252	**1.589.433.780**	**3,44561%**
TOTAL	128.611	**46.129.260.138**	**100,00000%**

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BSI Per 1 Januari 2024

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
1.	PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	Perseroan Terbatas	23.740.608.436	51,4654004
2.	PT BNI (PERSERO) TBK-DIVISI PPA	Perseroan Terbatas	10.720.230.418	23,2395455
3.	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	Perseroan Terbatas	7.092.761.655	15,3758409
4.	DPLK BANK RAKYAT INDONESIA - SAHAM SYARIAH	Dana Pensiun	322.783.500	0,6997370
5.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15	Badan Usaha Asing	194.799.995	0,4222916
6.	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEKERJA BRI	Yayasan	165.172.842	0,3580652
7.	JPMCB NA RE-EMERGING MARKETS GROWTH FUNDINC	Badan Usaha Asing	164.597.500	0,3568180
8.	JPMCB NA RE-EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Badan Usaha Asing	150.182.500	0,3255688
9.	STATE STREET BANK-SMALLCAP WORLD FUND INC.	Badan Usaha Asing	109.635.200	0,2376695
10.	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Asuransi	103.463.446	0,2242903
11.	JP MORGAN SECURITIES PLC	Badan Usaha Asing	62.472.100	0,1354284
12.	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEKERJA BRI - PROSPENS 3	Yayasan	56.039.500	0,1214836
13.	REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND	Reksadana	55.627.000	0,1205894
14.	JPMSE LUX RE UCITS CLT RE-CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS GROWTH FUND (LUX)	Badan Usaha Asing	55.274.100	0,1198244
15.	BNYMSANV RE BNYMIL RE BKRK FRONTIERS INVTRUST PLC-2039846679	Badan Usaha Asing	54.925.300	0,1190682
16.	JPMCB NA RE-JPMORGAN ASEAN FUND	Badan Usaha Asing	54.336.400	0,1177916
17.	REKSA DANA ASHMORE SAHAM SEJAHTERA NUSANTARA	Reksadana	51.412.221	0,1114525
18.	SUWANTARA GOTAMA	Perorangan Indonesia	45.500.000	0,0986359
19.	JPMSE LUX RE UCITS CLT RE-JPMORGAN FUNDS	Badan Usaha Asing	45.000.900	0,0975539
20.	BBH LUXEMBOURG S/A REDWHEEL FUNDS - REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQ	Badan Usaha Asing	44.962.700	0,0974711

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BSI Per 31 Desember 2024

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
1.	BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT	Perseroan Terbatas	23.740.608.436	51,4654004
2.	PT BNI (PERSERO) TBK-DIVISI PPA	Perseroan Terbatas	10.720.230.418	23,2395455
3.	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT	Perseroan Terbatas	7.092.761.655	15,3758409
4.	DPLK BANK RAKYAT INDONESIA - SAHAM SYARIAH	Dana Pensiun	222.755.500	0,4828942
5.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 15	Badan Usaha Asing	165.439.095	0,3586424
6.	JPMCB NA RE-EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Badan Usaha Asing	127.432.800	0,2762516
7.	JPMCB NA RE-EMERGING MARKETS GROWTH FUNDINC	Badan Usaha Asing	123.109.247	0,2668789
8.	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEKERJA BRI	Yayasan	120.921.942	0,2621372
9.	SSB HG22 SMALLCAP WORLD FUND INC. -2183964820	Badan Usaha Asing	109.635.200	0,2376695

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
10.	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Asuransi	106.346.346	0,2305399
11.	SUWANTARA GOTAMA	Perorangan Indonesia	105.000.000	0,2276213
12.	BBH LUXEMBOURG S/A REDWHEEL FUNDS - REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQ	Badan Usaha Asing	93.847.600	0,2034448
13.	SSB SBGL SWEDBANK ROBUR GLOBAL EMERGING MARKETS -2183965441	Badan Usaha Asing	80.000.000	0,1734257
14.	JP MORGAN SECURITIES PLC	Badan Usaha Asing	64.810.200	0,1404969
15.	CITIBANK SINGAPORE S/A ART A/C PUBLIC ASIA ITTIKAL FUND	Badan Usaha Asing	62.606.600	0,1357199
16.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	57.726.023	0,1251397
17.	YAYASAN KESEJAHTERAAN PEKERJA BRI - PROSPENS 3	Yayasan	54.076.600	0,1172284
18.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	53.769.690	0,1165631
19.	REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND	Reksadana	51.560.800	0,1117746
20.	CITIBANK HONG KONG S/A KIA -FUND 208	Badan Usaha Asing	51.324.700	0,1112628

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih Per 1 Januari 2024

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan (%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
Total	41.553.600.509	**90,09**

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau lebih Per 31 Desember 2024

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan (%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
Total	41.553.600.509	**90,09**

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5%

Tabel Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 1 Januari 2024

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan terbatas	114	30.928.721.497	67,04795
Dana Pensiun	61	454.391.398	0,98504
Yayasan	18	230.506.592	0,49970
Reksa dana	173	519.349.956	1,12586
Asuransi	134	537.830.296	1,16592
Koperasi	7	108.100	0,00023
Perorangan Indonesia	127.848	1.143.688.011	2,47931
Bank	3	10.725.230.507	23,25038
Sub Total	128.359	**44.539.826.358**	**96,55439**
Asing			
Badan Usaha Asing	154	1.587.923.649	3,44233
Perorangan Asing	98	1.510.131	0,00327
Sub Total	252	**1.589.433.780**	**3,44561**
TOTAL	128.611	**46.129.260.138**	**100,00%**

Tabel Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 31 Desember 2024

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan terbatas	105	13.202.748	0,02862
Dana Pensiun	69	417.970.398	0,90609
Yayasan	16	184.489.885	0,39994
Reksa dana	183	482.446.859	1,04586
Asuransi	151	444.061.001	0,96264
Koperasi	9	399.300	0,00087
Perorangan Indonesia	119.208	903.265.377	1,95812
Bank	6	41.558.600.698	90,09163
Sub Total	119.748	**44.004.436.267**	**95,39376**
Asing			
Badan Usaha Asing	245	2.122.440.594	4,60107
Perorangan Asing	98	2.383.277	0,00517
Sub Total	343	**2.124.823.871**	**4,60624**
TOTAL	120.091	**46.129.260.138**	**100,00000%**

Kepemilikan Saham Oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BSI per 1 Januari 2024

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
DIREKSI				
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	2.210.600	0,005
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	548.400	0,001
3.	Ngatari*	Direktur Retail Banking	18.621.200	0.040
4.	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	1.726.600	0,004
5.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	1.726.600	0,004
6.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	1.726.600	0,004
7.	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	517.900	0,001
8.	Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	527.400	0,001
9.	Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	-	-
10.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Managament	-	-
DEWAN KOMISARIS				
1.	Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	-	-
2.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	-	-
3.	Masduki Baidlowi	Komisaris	822.700	0,002
4.	Suyanto	Komisaris	822.700	0,002
5.	Abu Rokhmad	Komisaris	-	-
6.	Imam Budi Sarjito*	Komisaris	822.700	0,002
7.	Sutanto*	Komisaris	1.010.100	0,002
8.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	-	-
9.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	-	-
		TOTAL	**31.083.500**	**0,028**

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BSI per 31 Desember 2024

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
DIREKSI				
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	3.354.400	0,007
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	1.134.400	0,002
3.	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	2.280.100	0,005
4.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	2.280.100	0,005
5.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	2.280.100	0,005
6.	Zaidan Novari	Wholesale Transaction Banking	1.071.400	0,002
7.	Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	343.100	0,001
8.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Managament	343.100	0,001
9.	Ari Rizaldi	Direktur Treasury & International Banking	13.400	0,000
10.	Harry Gusti Utama	Direktur Retail Banking	-	-

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
DEWAN KOMISARIS				
1.	Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	-	-
2.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	-	-
3.	Masduki Baidlowi	Komisaris	1.086.400	0,002
4.	Suyanto	Komisaris	1.086.400	0,002
5.	Abu Rokhmad	Komisaris	163.500	0,000
6.	Fauzi	Komisaris	115.000	0,000
7.	Nazaruddin	Komisaris	-	-
8.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	-	-
9.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	-	-
10.	Felicitas Tallulembang	Komisaris Independen	-	-
		TOTAL	**15.551.400**	**0,032**

Sampai dengan Desember 2024, tidak terdapat kepemilikan saham tidak langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

Kepemilikan Saham oleh Senior Manajemen

Sampai dengan Desember 2024, tidak terdapat kepemilikan saham langsung dan tidak langsung oleh Senior Manajemen Bank.

Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham BSI Per 31 Desember 2024

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Institusi Lokal	511	43.396.138.347	94,07508%
Institusi Asing	154	1.587.923.649	3,44233%
Individu Lokal	127.848	1.143.688.011	2,47931%
Individu Asing	98	1.510.131	0,00327%
Total	128.611	**46.129.260.138**	**100,00000%**

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Bank memiliki 2 (dua) klasifikasi saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna sejumlah 1 (satu) lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (diwakili oleh Kementerian BUMN) dan Saham Seri B yang merupakan saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya.

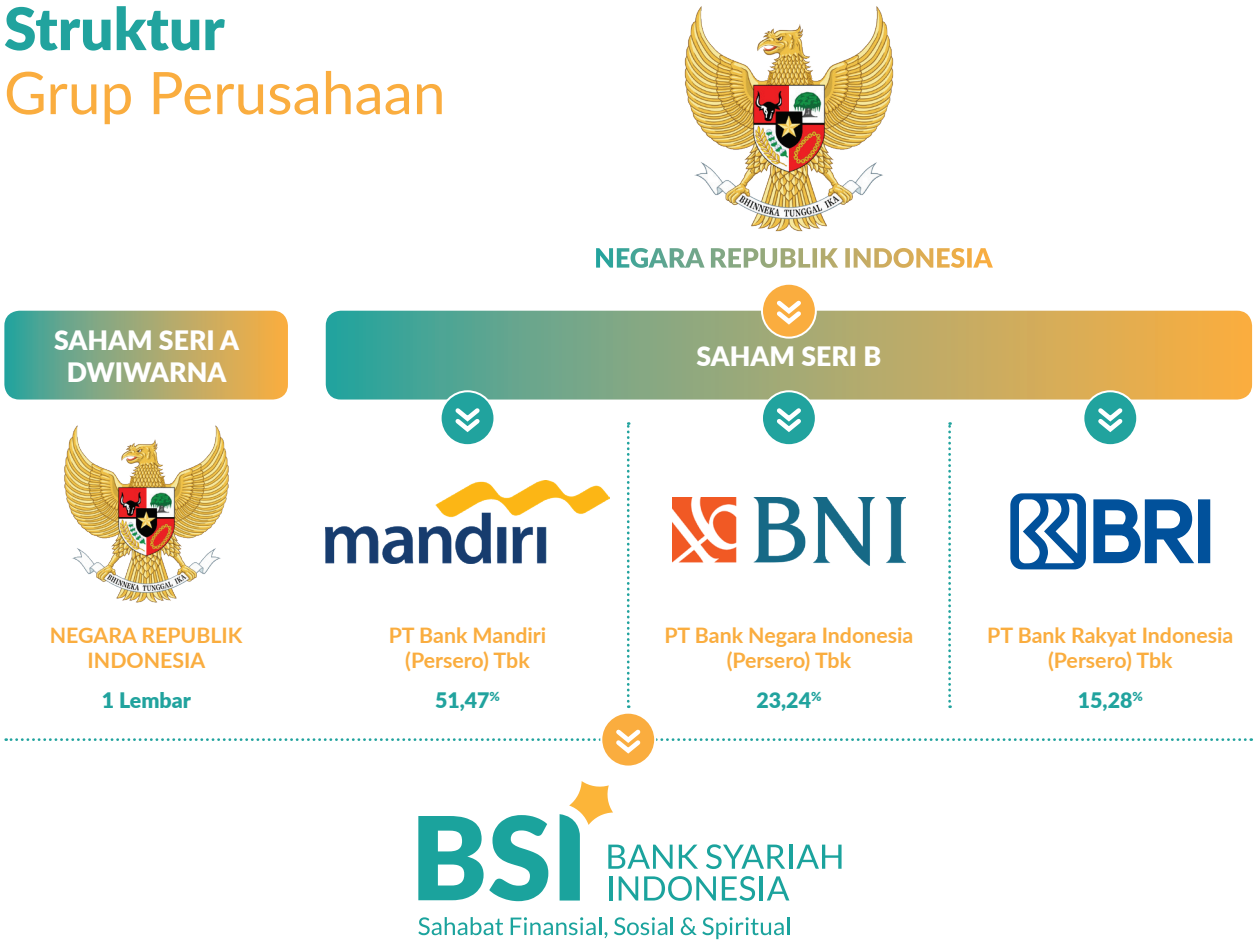


Kepemilikan Saham Seri B mayoritas Bank dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 51,47%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung.

Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan perusahaan ventura bersama sehingga tidak tersedia informasi mengenai: Nama entitas anak, asosiasi dan perusahaan ventura bersama; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha entitas anak, asosiasi dan perusahaan ventura bersama; dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Struktur
Grup Perusahaan



Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Informasi
Kelompok Usaha Bank

Struktur Kelompok Usaha Bank

Struktur kelompok usaha Bank telah disajikan pada sub bagian Struktur Grup Perusahaan.

Struktur Keterkaitan Kepengurusan dalam Kelompok Usaha Bank

Bank BSI merupakan Perusahaan Anak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Per 31 Desember 2024, Bank BSI tidak memiliki Anggota Direksi yang merupakan pegawai penugasan dari Bank Mandiri.

Pemegang Saham yang Bertindak atas Nama Pemegang Saham Lain

Tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

Kronologi
Penerbitan Saham

Kronologis Penerbitan/Pencatatan Saham BSI

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)
1.	Sebelum IPO	-	-	500
2.	2018	Berdasarkan RUPS tanggal 2 Maret 2018, telah dilakukan penambahan modal berupa: • Setoran tambahan modal sebesar Rp1 triliun. • Kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp567.381.449. Tambahan modal menyebabkan adanya penambahan saham induk sebesar Rp1.567.381.449	-	500
3.	2018	Penawaran Umum Perdana Saham	-	500
4.	2020	*Exercise* saham MESOP	-	500
5.	2021	Merger – Bank BRI Syariah Tbk., Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah	-	500
6.	2021	*Exercise* saham MESOP	-	500
7.	2021	*Exercise* saham MESOP	-	500
8.	2022	Penambahan Modal melalui HMETD (*Right Issue*)	Saham Biasa seri B	500

Kronologi Penerbitan
dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Tabel Sukuk BSI

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor	Mata Uang	Jumlah Sukuk
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi 1 Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h. PT Bank BRIsyariah Tbk)	16 November 2016	7 Tahun	Rp	1 Triliun
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h. PT Bank Syariah Mandiri)	22 Desember 2016	7 Tahun	Rp	375 Miliar
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2023 Tahap I	26 Desember 2023	12 Tahun	Rp	3,7 Miliar
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2023	15 Desember 2023	5 Tahun	Rp	200 Miliar

Nama Bursa Tempat Saham Perusahaan Dicatatkan

Seluruh saham Bank BSI telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
			Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
	-	-	3.958.000.000	1.979.000.000.000	-
	-	3.134.762.898	7.092.762.898	3.546.381.449.000	-
	510	2.623.350.600	9.716.113.498	4.858.056.749.000	1.337.908.806.000
	533	184.395.200	9.900.508.698	4.950.254.349.000	98.282.641.600
	-	31.130.700.245	41.031.208.943	20.515.604.471.500	-
	533	97.659.800	41.128.868.743	20.564.434.371.500	52.052.673.400
	533	438.600	41.129.307.343	20.564.653.671.500	233.773.800
	1.000	4.999.952.795	46.129.260.138	23.064.630.069.000	4.999.952.795.000

	Tanggal Jatuh Tempo	Bagi Hasil	Status Pembayaran	Peringkat	
				2024	2023
	16 November 2023	9,5%	Lunas	-	A+ (idn) (PT Fitch Ratings indonesia)
	22 Desember 2023	10%	Lunas	-	$_{id}$AA (sy) (PEFINDO)
	26 Desember 2035	0,55%	Belum Lunas	-	-
	15 Desember 2028	7,90%	Belum Lunas	$_{id}$AA (sy) (PEFINDO)	$_{id}$AA (sy) (PEFINDO)

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor	Mata Uang	Jumlah Sukuk
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2023 Tahap II	26 Maret 2024	12 Tahun	Rp	7,76 Miliar
Sukuk Mudharabah Berlandasan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024	14 Juni 2024	370 hari 2 tahun 3 tahun	Rp	3 Triliun
Sukuk *Mudharabah Muqayadah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI tbk Tahun 2024 Tahap III	20 Desember 2024	12 Tahun	Rp	3,97 Miliar

Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI belum menerbitkan efek lainnya, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Nama KAP	Kantor Akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
Jaringan Asosiasi	PwC
Alamat KAP	Gedung WTC 3, Jl Jend. Sudirman Kav. 29-31, Lantai 34, 36-43, Jakarta 12920
Nama AP	Lucy Luciana Suhenda
Periode Penugasan KAP	Periode Ke 4
Periode Penugasan AP	Periode Ke 1

Jasa Audit	*Fee* Audit
Audit Laporan Keuangan	Rp5.950.000.000
Jasa Non Audit	***Fee* Non Audit**
1. *Comfort Letter* & AUP Gagal Bayar terkait penerbitan *Sustainibility* Sukuk 2. AUP PSA 62 31 Desember 2024 2. AUP Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 31 Desember 2024 3. AUP Kustodian 31 Desember 2024	1. 3.500.000.000 2. 100.000.000 3. 100.000.000 4. 99.000.000

	Tanggal Jatuh Tempo	Bagi Hasil	Status Pembayaran	Peringkat	
				2024	2023
	26 Juni 2036	0,55%	Belum Lunas	-	-
	24 Juni 2025	6,65%	Belum Lunas	$_{Id}$AAA (Pefindo)	-
	14 Juni 2026	6,70%			
	14 Juni 2027	6,80%			
	26 Desember 2036	0,55%	Belum Lunas	-	-

Lembaga
dan/atau Profesi Penunjang

INSTITUSI PASAR MODAL	**PT Bursa Efek Indonesia** Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telp : (021) 5150515 Faks : (021) 5254153 *Website* : www.idx.co.id Jasa yang Diberikan: Jasa Pencatatan Tahunan
	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lt.5 Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telp : (021)5152855 Faks : (021)52991199 *Website* : www.ksei.co.id Jasa yang Diberikan: Pengelolaan Administrasi Efek (Saham dan Sukuk)
BIRO ADMINISTRASI EFEK	**PT Datindo Entrycom** Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 Telp : (021)3508077 Faks : (021)3508078 *Website* : www.datindo.com Jasa yang Diberikan : Jasa Administrasi Saham

NOTARIS	**Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.** Jl. Suryo No 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180 Telp: (021)-29236060 Faks: (021)-29236070

LEMBAGA PEMERINGKAT PERUSAHAAN	**PT Fitch Ratings Indonesia** Prudential Tower Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 Telp : (021) 57957755 Faks : (021) 57957750 *Website* : www.fitchratings.co.id Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan
	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Panin Tower - Senayan City, Lantai 17, Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270 Indonesia Telp : (021) 72782380 Faks : (021) 72782370 *Website* : www.pefindo.com Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

KONSULTAN HUKUM	**Assegaf Hamzah & Partners** Capital Place Level 36 & 37 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan - 12710 Telp : (021) 25557800
	Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP Law Firm) Pacific Century Place Level 35, Sudirman Central Bussiness District Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53, Jakarta Selatan - 12190 Telp : (021) 29608888
	Hotman Paris & Partners The Kensington Commercial Blok A12 Jl. Bulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara
	Karimsyah Alamanda Tower, Level 27 Jl. TB. Simatupang Kav.23-24, Jakarta Selatan, 12340
	Dewan Syam & Partners Law Firm Jl. Cempaka Putih Raya No. 13A, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520
	James Purba & Partners Wisma Nugra Santana, 8 Floor, Suite 1205 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7 - 8, Jakarta Pusat - 10220 Telp : (021) 570 3844
	SSF Law Firm and Partners Gedung Arva Lantai 3 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330 Telp : (021) 3905930
	Suhendra & Partners Jl. Pintu Air V No. 53 G, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat - 10710 Telp : 08111573888

WALI AMANAT	**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** Gedung Grha BNI Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220 Telp : (021) 2511946 Faks : (021) 2511214
	PT Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk Menara 2 BTN Jl. H. R. Rasuna Said No. 1, Jakarta Selatan 12980 Telp : (021) 29069999

Penghargaan
dan Sertifikasi

Penghargaan

25 April 2024



Islamic Finance News (IFN) 2024

Predikat
Best Islamic Bank in Indonesia

Pemberi
IFN

17 Mei 2024



Mata Lokal Award

Predikat
Best CSR Communications

Pemberi
Tribun

23 Mei 2024



Islamic Global Finance 2024

Predikat
Best Islamic Wealth Manager - Indonesia

Pemberi
The Digital Banker

23 Mei 2024



Islamic Global Finance 2024

Predikat
Best New Islamic Wealth Management Product of the Year

Pemberi
The Digital Banker

13 Juni 2024



Bisnis Indonesia Awards 2024

Predikat
Best Bank Sharia in Indonesia 2024

Pemberi
Bisnis Indonesia

9 Juli 2024



14th Institutional Investor Corporate Awards 2024

Predikat
Best Islamic Finance Awards 2024

Pemberi
Alpha Southeast Asia

9 Juli 2024



14th Institutional Investor Corporate Awards 2024

Predikat
Best Islamic Wealth Management Bank In Indonesia

Pemberi
Alpha Southeast Asia

24 Juli 2024



IDX Channel Anugerah ESG 2024

Predikat
Penghargaan Utama pada Sektor Keuangan dan Investasi

Pemberi
IDX Channel

7 Agustus 2024



Katadata Green Initiative Awards 2024

Predikat
Katadata Green Initiative Awards 2024

Pemberi
Katadata

22 Agustus 2024



Gerakan Nasional Cakap Keuangan (GENCARKAN)

Predikat
Bank Implementasi Kejar Terbaik Kategori Bank Umum Syariah

Pemberi
OJK

3 September 2024



7 Most Popular Brand of The Year

Predikat
Kategori Perbankan Syariah

Pemberi
Jawa Pos

12 September 2024



Euromoney Awards fo Excellence 2024

Predikat
Indonesia's Best Digital Bank 2024

Pemberi
Euromoney

17 September 2024



Global Islamic Finance Award 2024

Predikat
GIFA Market Leadership Awards (Perbankan Syariah)

Pemberi
GIFA

19 September 2024



30 World's Most Trustworthy Companies 2024

Predikat
Kategori Bank Versi Newsweek dari 66 Bank Dunia

Pemberi
Newsweek

19 September 2024



Anugerah ESG Republika 2024

Predikat
Best Practices in Regulation Compliance

Pemberi
Republika

17 Oktober 2024



Detikcom Awards 2024

Predikat
Saham Bank Syariah Dengan Pertumbuhan Tertinggi

Pemberi
Detikcom

22 Oktober 2024



Top 20 Financial Institution & The Fiance Awards 2024

Predikat
Top 20 Financial Institution 2024

Pemberi
The Finance

18 September 2024



Bisnis Indonesia Financial Awards 2024

Predikat
The Most Efficient Bank - Bank Syariah

Pemberi
Bisnis Indonesia

19 November 2024



Indonesia Most Reputable Companies

Predikat
State Owned Bank - Very Good

Pemberi
SWA

20 November 2024



CNBC Indonesia Communication Strategist Awards

Predikat
Corporate Communication Strategist

Pemberi
CNBC

25 November 2024



CGPI Award 2024

Predikat
The Most Trusted Company

Pemberi
SWA

10 Desember 2024



IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2024

Predikat
Anugerah Utama Hubungan Eksternal Wealth Management Performance

Pemberi
IDX Channel

11 Desember 2024



CNBC Indonesia Awards 2024

Predikat
Best in Class Sharia Wealth Management

Pemberi
CNBC

19 Desember 2024



Kumparan Award

Predikat
Impact in Sharia

Pemberi
Kumparan

29 Desember 2024



Bank Indonesia Award

Predikat
Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik

Pemberi
Bank Indonesia

Sertifikasi

17 Desember 2021 – 16 Desember 2024



SNI ISO 37001: 2016 Management System

Penerima Sertifikasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Dikeluarkan Oleh
TUV Nord

22 Desember 2022 – 21 Desember 2025



ISO 37301: 2021 Sistem Manajemen Kepatuhan

Penerima Sertifikasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Dikeluarkan Oleh
Chesna

5 Juni 2023 – 4 Juni 2023



ISO 22301:2019 Business Continuity Management System

Penerima Sertifikasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Dikeluarkan Oleh
BSI

12 September 2023 – 11 September 2026



ISO 9001: 2015 Quality Managemet System

Penerima Sertifikasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Dikeluarkan Oleh
LRQA

1 Oktober 2023 – 30 September 2026



ISO 9001: 2015 Quality Managemet System

Penerima Sertifikasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
IT Operation Group

Dikeluarkan Oleh
BSI

4 Februari 2024 – 3 Februari 2027



ISO 9001: 2015 Quality Managemet System

Penerima Sertifikasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Operations Development Group

Dikeluarkan Oleh
BSI

24 Maret 2024 – 23 Maret 2027



ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System

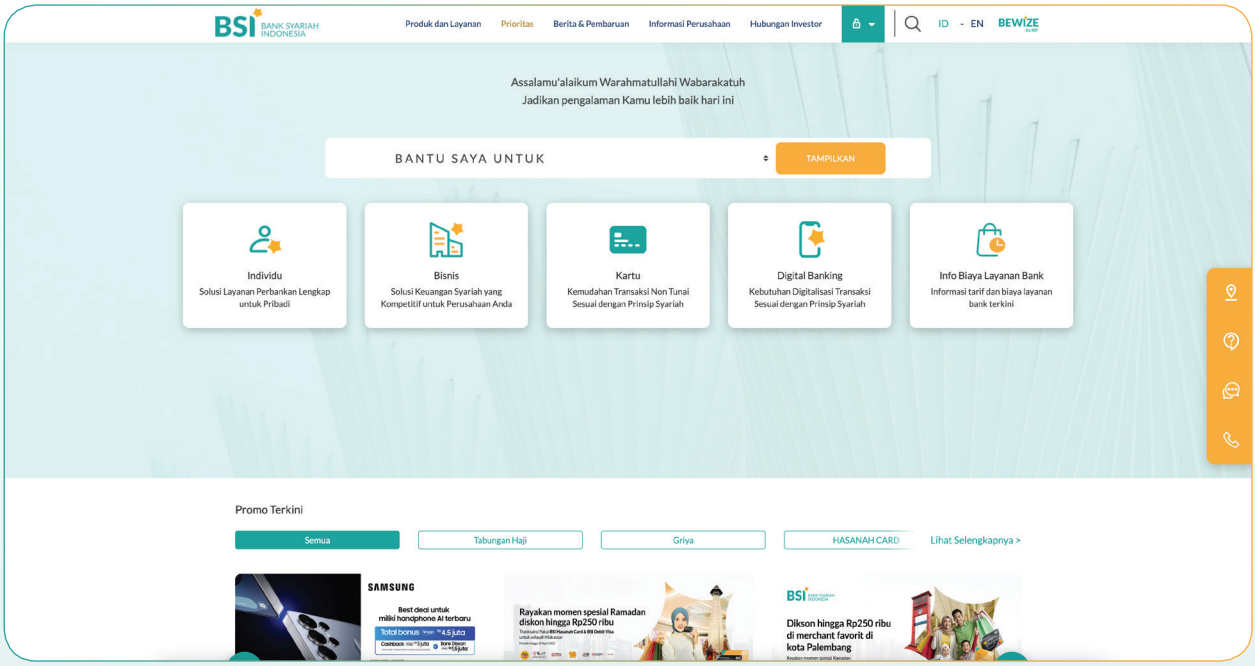
Penerima Sertifikasi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

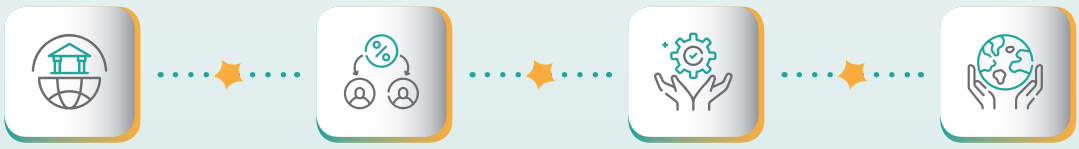
Dikeluarkan Oleh
BSI


BYOND

Informasi
pada *Website*

Informasi yang termuat dalam *website* PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik, di antaranya ialah mengenai:





Informasi Umum Mengenai Emiten atau Perusahaan Publik	Informasi bagi pemodal atau investor	Informasi Tata Kelola Perusahaan	Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penyediaan informasi tersebut juga sebagai implementasi prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs www.bankbsi.co.id:

	Menu Pada *Website*
INFORMASI UMUM	**www.bankbsi.co.id**
Nama, alamat dan kontak kantor pusat/perwakilan	www.bankbsi.co.id
Riwayat singkat perusahaan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Struktur organisasi	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Struktur kepemilikan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/struktur-kepemilikan
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Sekretaris Perusahaan	Profil Direksi & Dewan Komisaris: https://www.bankbsi.co.id/company-information/direksi-dewan?corporateType=Dewan%20Direksi Profil Komite: https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola Profil Sekretaris: https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/sekretaris_perusahaan
Nama dan alamat: Akuntan publik, pemeringkat efek, wali amanat, biro administrasi efek, dokumen Anggaran Dasar	Nama dan alamat: Akuntan publik, pemeringkat efek, wali amanat, biro administrasi efek: https://www.bankbsi.co.id/company-information/profil-penunjang Dokumen Anggaran Dasar: https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/anggaran_dasar
INFORMASI BAGI INVESTOR	**https://ir.bankbsi.co.id/**
Prospektus penawaran umum	https://ir.bankbsi.co.id/misc/Prospektus/Prospektus-Hijrah.pdf
Laporan Tahunan (5 tahun)	https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html
Laporan Keuangan	https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	https://ir.bankbsi.co.id/general_meeting.html
Ikhtisar Saham	https://ir.bankbsi.co.id/stock_chart_interactive.html
Informasi Obligasi	https://ir.bankbsi.co.id/bond_info.html
Informasi Dividen	https://ir.bankbsi.co.id/dividend.html
Informasi Aksi Korporasi	https://ir.bankbsi.co.id/corporate_action.html
Informasi Fakta Material	https://ir.bankbsi.co.id/regulatory_filings.html
INFORMASI TATA KELOLA PERUSAHAAN	**https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola**
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/nominasi&remunerasi https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/audit https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/pemantau_resiko
Pengangkatan/Pemberhentian atau kekosongan Sekretaris Perusahaan serta informasi pendukungnya	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/sekretaris_perusahaan
Piagam Unit Audit Internal	https://ir.bankbsi.co.id/misc/Piagam-Audit-Intern.pdf
Isi Kode Etik	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kode_etik
Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/audit
Uraian Prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Remunerasi dan Nominasi	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/nominasi&remunerasi
Kebijakan Manajemen Risiko	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kebijakan_management_resiko
Kebijakan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/whistle_blowing_system
Kebijakan Anti Korupsi	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kebijakan_anti_fraud
INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	**https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr**
Lingkungan Hidup	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Tanggung Jawab Produk dan/atau Layanan serta Informasi Pendukungnya	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA BANK

04 »



Secara keseluruhan, BSI menunjukkan kinerja yang sangat baik di tahun 2024, dengan pencapaian yang melampaui target di hampir semua aspek penting, termasuk aset, pembiayaan, DPK, dan laba bersih. Keberhasilan ini mencerminkan strategi BSI yang solid dalam mengelola pertumbuhan yang berkelanjutan, menjaga kualitas aset, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pencapaian yang sangat positif ini, BSI optimis akan terus memperkuat posisinya di industri perbankan syariah dan menghadapi tantangan di tahun 2025.

Tinjauan Perekonomian

Analisis Perekonomian Global

International Monetary Fund (IMF), dalam *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2025, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 sebesar 3,2% *year-on-year* (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang tercatat 3,3% yoy. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tersebut terutama disebabkan oleh pemulihan ekonomi di beberapa negara, terutama di Kawasan Euro Area (EA) dan Asia, yang tidak sesuai dengan prakiraan awal.

Ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh solid, terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, sejalan dengan meredanya tekanan inflasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di EA cenderung tertahan meskipun inflasi dalam tren menurun. Tertahannya pertumbuhan ekonomi EA terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Jerman yang rendah akibat pelemahan sektor manufaktur dan ekspor, meski konsumsi mulai berada dalam trajektori pemulihan. Sejalan dengan EA, pemulihan ekonomi Tiongkok juga terhambat akibat krisis properti yang berkepanjangan, meski sejumlah kebijakan ekspansif telah diimplementasikan oleh Pemerintah Tiongkok. Peningkatan net ekspor Tiongkok di akhir tahun belum cukup untuk mengimbangi lemahnya konsumsi dan keyakinan konsumen. India juga tumbuh lebih rendah dibandingkan ekspektasi seiring penurunan aktivitas industrinya. Selain itu, Jepang juga mengalami perlambatan akibat disrupsi pasokan yang bersifat temporer.

Pada 2024, tensi geopolitik Israel-Palestina tereskalasi menjadi konflik beberapa negara di kawasan Timur Tengah, turut menahan pertumbuhan ekonomi global lebih lanjut. Sebagai kawasan penghasil minyak, konflik tersebut memicu volatilitas di pasar komoditas, terutama minyak mentah. Merespon hal tersebut, harga minyak mentah *Brent* sempat meningkat pada Oktober 2024 sebagai dampak *shock* akibat sentimen eskalasi tensi geopolitik. Namun demikian, secara umum harga komoditas sepanjang tahun 2024 terus mengalami penurunan, sejalan dengan suplai yang memadai di tengah permintaan yang relatif masih tertahan. Meredanya disrupsi suplai akibat menurunnya intensitas konflik Rusia-Ukraina juga turut mendukung terjaganya harga komoditas

Sejalan dengan perkembangan tersebut, tekanan inflasi global mulai menurun. Inflasi dalam tren menurun secara gradual, termasuk di negara-negara maju seperti AS dan EA. Meski demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai, terindikasi dari kenaikan inflasi yang mulai terjadi lagi pada Triwulan IV 2024. Tren penurunan inflasi tersebut direspons bank sentral di berbagai negara dengan menurunkan suku bunga acuannya. *European Central Bank* (ECB) mulai menurunkan suku bunganya pada Juni 2024, diikuti oleh *the Fed* yang mulai menurunkan suku bunga acuan pada September 2024. *Fed fund rate* (FFR) telah turun sebesar 100 bps sepanjang 2024.

Penurunan suku bunga tersebut pada awalnya mendorong aliran modal masuk ke *Emerging Markets* (EM). Namun demikian, volatilitas dan ketidakpastian di pasar keuangan global kembali meningkat menjelang pelaksanaan pemilihan umum di AS, dimana Trump memenangkan pemilihan. Kondisi tersebut mendorong kekhawatiran pasar terkait kebijakan proteksionisme di AS yang dapat memicu kembali perang dagang dan peningkatan tarif impor, sehingga berpotensi kembali meningkatkan tingkat inflasi. Ini berdampak pada ekspektasi penurunan FFR yang lebih gradual, mendorong *capital reversal*, dan kembali melemahkan nilai tukar beberapa negara.

Di sisi lain, ketidakpastian yang ditimbulkan akibat eskalasi tensi geopolitik dan berbagai peristiwa lainnya meningkatkan permintaan terhadap aset *safe haven*, terutama emas. Hal tersebut berdampak pada kenaikan harga emas yang cukup signifikan sepanjang 2024.

Sumber: *World Economic Outlook* International Monetary Fund, Januari 2025, Bloomberg

Analisis Perekonomian Nasional

Di tengah tekanan eskalasi tensi geopolitik ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukan resiliensi yang tumbuh stabil pada tahun 2024, sebesar 5,03% yoy. Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat di tengah kontraksi net ekspor, seiring dengan penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Meskipun pertumbuhan ekonomi domestik juga sedikit tertahan akibat turunnya permintaan eksternal, yang tercermin dari kontraksi *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur sejak awal Triwulan III-2024 hingga November 2024. Namun, keyakinan konsumen dan pertumbuhan penjualan eceran masih kuat, sejalan dengan tetap resiliennya permintaan domestik.

Terjaganya permintaan domestik juga didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali selama tahun 2024, sehingga menopang daya beli masyarakat. Penurunan inflasi pada tahun 2024 terutama didorong oleh meredanya dampak *El Nino*, sehingga suplai pangan cukup terkendali. Selain itu, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang sejalan dengan turunnya harga minyak dunia, serta kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan kereta api, juga turut mendorong turunnya inflasi. Di sisi lain, naiknya harga emas global mendorong kenaikan harga emas dan perhiasan domestik sehingga mendorong inflasi inti.

Investasi domestik juga turut menopang pertumbuhan ekonomi. Disiplin fiskal yang tetap dijaga di tengah program-program tambahan di Pemerintahan baru turut menopang sentimen positif untuk menarik investasi. Selain itu, meskipun kinerja sektor eksternal relatif tertahan, ketahanan eksternal tetap terjaga, terlihat dari neraca perdagangan yang mencatatkan surplus sepanjang tahun dan cadangan devisa yang memadai.

Inflasi yang rendah diiringi dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan mendorong volatilitas nilai tukar Rupiah. Kondisi ini membuat kebijakan moneter domestik tetap berfokus pada *pro-stability*. Bank Indonesia (BI) merespon dengan menaikkan BI *rate* sebesar 25 bps pada April 2024 menjadi 6,25%. Seiring dengan meredanya tekanan dari global dan menguatnya nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menurunkan BI *rate* pada September 2024 sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Namun, volatilitas nilai tukar Rupiah kembali meningkat akibat ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global akibat perkembangan politik di AS, sehingga fokus kebijakan moneter tetap diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. BI *rate* dipertahankan pada level 6,00% hingga akhir tahun. Selain itu, BI juga tetap melanjutkan penerapan kebijakan *triple intervention* untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, termasuk melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk menarik *inflow* di pasar sekunder.

Di sisi lain, nonresiden (investor asing) masih mencatatkan *inflow* di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan saham. *Outflow* terjadi di pasar SBN pada Triwulan I-2024 dan di pasar saham pada Triwulan II-2024, sementara pada Triwulan III-2024, kedua pasar mengalami *inflow* yang konsisten. Namun demikian, baik di pasar saham maupun SBN, kecenderungan *outflow* kembali terjadi di Triwulan IV-2024, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global akibat kondisi politik pasca-pemilu di AS.

Sumber:
- Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, Februari 2025
- Tinjauan Kebijakan Moneter Triwulan IV, Bank Indonesia, Februari 2025

Analisis Industri Perbankan Nasional

Dinamika perubahan kebijakan moneter sepanjang tahun 2024 turut mempengaruhi pertumbuhan perbankan nasional. Di tengah kebijakan moneter yang tetap *pro-stability* dengan kenaikan BI *Rate* sebesar 25 bps pada April 2024, kinerja industri perbankan nasional tetap resilien. Kondisi tersebut ditopang oleh kebijakan makroprudensial yang *pro-growth* dan kinerja yang terjaga dari para pelaku usaha di tengah ketidakpastian.

Stabilitas sektor perbankan nasional tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sepanjang tahun 2024. Kinerja intermediasi perbankan terus mencatat pertumbuhan positif dengan risiko yang terkendali. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh 4,49% yoy menjadi Rp8.998 triliun, dengan giro tumbuh 3,34% yoy, tabungan tumbuh 6,76% yoy, dan deposito tumbuh 3,52% yoy. Likuiditas perbankan tetap memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) sebesar 112,87% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,59%, jauh di atas *threshold* yang ditetapkan. Selain itu, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) tercatat 213,23%, mengindikasikan ketahanan likuiditas yang baik. Ketersediaan likuiditas yang memadai tersebut mendukung pertumbuhan kredit/

pembiayaan perbankan. Sejumlah kebijakan makroprudensial BI, seperti Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) juga ditingkatkan pada tahun 2024 untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas (termasuk hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif), serta untuk meningkatkan inklusi keuangan dan ekonomi keuangan hijau.

Hingga Desember 2024, kredit perbankan tumbuh 10,30% yoy mencapai Rp7.995 triliun. Kredit investasi menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 13,56% yoy, kredit konsumsi tumbuh 10,56% yoy, dan kredit modal kerja tumbuh 8,24% yoy. Kualitas kredit tetap terkendali, dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* sebesar 2,26% dan NPL *nett* 0,74%. *Loan at Risk* (LaR) menunjukkan perbaikan dengan penurunan ke level 9,28%, lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi (9,93% pada Desember 2019). Profitabilitas perbankan juga tetap terjaga, dengan *Return on Assets* (ROA) mencapai 2,67%. Sementara itu, permodalan perbankan tetap kuat dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 26,69%, memberikan bantalan yang memadai dalam menghadapi ketidakpastian global.

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari 2025

Analisis Industri Perbankan Syariah

Perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2024. Total aset perbankan syariah mencapai Rp980,29 triliun, tumbuh 9,88% yoy dengan pangsa pasar sebesar 7,72% pada Desember 2024. Pembiayaan syariah meningkat 9,92% yoy menjadi Rp643,55 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,09% yoy menjadi Rp753,6 triliun.

Likuiditas perbankan syariah tetap memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 154,52% dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 32,09%, jauh di atas batas minimum. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan syariah tercatat sebesar 25,30%. Profitabilitas perbankan syariah tetap terjaga dengan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,04%. Risiko pembiayaan tetap terkendali, dengan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* sebesar 2,12% dan NPF *nett* sebesar 0,79%. Perbankan syariah juga terus beradaptasi dengan penguatan ekosistem keuangan syariah melalui berbagai kebijakan strategis.

Untuk memperkuat daya saing dan pengembangan perbankan syariah, OJK telah menetapkan lima fokus utama untuk pengembangan perbankan syariah periode 2024–2025. Fokus tersebut meliputi konsolidasi Bank Syariah, pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS), penyusunan pedoman untuk inovasi produk, penguatan peran Bank Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, serta peningkatan kontribusi Bank Syariah dalam pengembangan UMKM. Untuk mendukung strategi ini, OJK telah meluncurkan tiga pedoman produk baru yang dirancang untuk memperluas dan memperkuat portofolio produk perbankan syariah. Pedoman tersebut mencakup Produk Pembiayaan *Mudharabah*, Implementasi *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA) dengan akad Mudharabah *Muqayyadah*, serta Implementasi *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). Ketiga pedoman ini diharapkan dapat mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, dan memperkuat posisi perbankan syariah di pasar nasional.

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari 2025

Analisis Posisi BSI dalam Industri Perbankan

Perbandingan kinerja BSI terhadap industri perbankan syariah dan industri perbankan disajikan sebagai berikut.

Tabel Kinerja Industri Perbankan, Industri Perbakan Syariah dan BSI

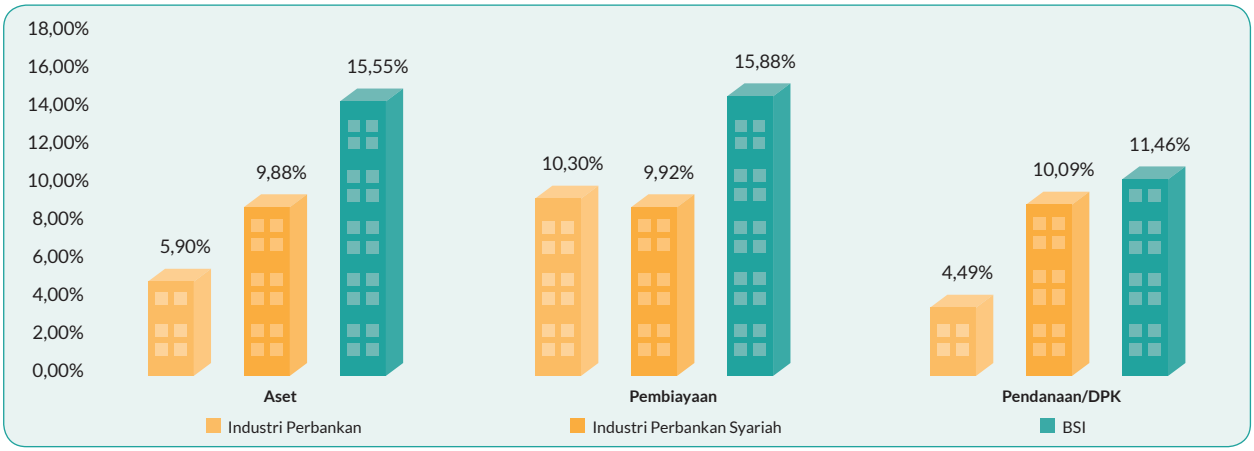
(dalam miliar)

Kinerja	Industri Perbankan			Industri Perbankan Syariah			BSI		
	Desember 2024	Desember 2023	Pertumbuhan	Desember 2024	Desember 2023	Pertumbuhan	Desember 2024	Desember 2023	Pertumbuhan
	miliar	miliar	%	miliar	miliar	%	miliar	miliar	%
Aset	12.690.663	11.983.999	5,90%	980.295	892.163	9,88%	408.613	353.624	15,55%
Pembiayaan	7.994.621	7.248.059	10,30%	643.546	585.461	9,92%	278.481	240.316	15,88%
Pendanaan	8.997.539	8.611.108	4,49%	753.599	684.519	10,09%	327.454	293.776	11,46%

Sumber:
- Statistik Perbankan Indonesia Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari 2025 (diolah)
- Laporan Keuangan BSI Desember 2024 (diolah)

Grafik Pertumbuhan Kinerja Industri Perbankan, Industri Perbankan Syariah dan BSI

(dalam %)



Kinerja Industri Perbankan Syariah dan BSI menunjukkan pertumbuhan positif berdasarkan laporan keuangan per Desember 2024 dibandingkan dengan Desember 2023. Data ini mencakup lima indikator utama, yaitu aset, pembiayaan dan pendanaan, dengan fokus pada pertumbuhan tahunan (yoy). Industri perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan aset sebesar 9,88%, pembiayaan sebesar 9,92%, dan pendanaan sebesar 10,09%. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional. BSI mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan syariah, terutama dalam aset sebesar 15,55%, pembiayaan sebesar 15,88%, dan laba bersih yang melonjak 22,83%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam memperluas bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan strategi keuangan. Secara keseluruhan, perbankan syariah terus berkembang dengan tren positif, dan BSI berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri perbankan syariah Indonesia. Berikut adalah analisis lebih lanjut berdasarkan data yang ditampilkan.

1. **Aset**
   Industri Perbankan mencatat pertumbuhan aset sebesar 5,90% dari Rp11.983,99 triliun pada Desember 2023 menjadi Rp12.690,66 triliun pada Desember 2024. Industri Perbankan Syariah mengalami kenaikan 9,88%, dari Rp892,16 triliun menjadi Rp980,30 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan industri perbankan konvensional. BSI mencatat pertumbuhan aset 15,55%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan syariah, menunjukkan kinerja yang lebih agresif dalam ekspansi bisnis.
2. **Pembiayaan**
   Industri Perbankan menunjukkan pertumbuhan pembiayaan 10,30%, dari Rp7.248,06 triliun pada 2023 menjadi Rp7.994,62 triliun pada 2024. Industri Perbankan Syariah mencatat kenaikan 9,92%, dari Rp585,46 triliun menjadi Rp643,55 triliun, yang menunjukkan peningkatan penyaluran dana oleh Bank Syariah meskipun masih lebih rendah dibandingkan bank konvensional. BSI mencatat pertumbuhan pembiayaan tertinggi, sebesar 15,88%, dari Rp240,32 triliun menjadi Rp278,48 triliun, menunjukkan ekspansi yang lebih agresif dibandingkan industri Perbankan Syariah secara keseluruhan.
3. **Pendanaan**
   Industri Perbankan mencatat pertumbuhan DPK sebesar 4,49%, dari Rp8.611,11 triliun menjadi Rp8.997,54 triliun. Industri Perbankan Syariah mencatat kenaikan 10,09%, dari Rp684,52 triliun menjadi Rp753,60 triliun, menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap Bank Syariah dalam penghimpunan dana. BSI mencatat kenaikan DPK sebesar 11,46%, dari Rp293,78 triliun menjadi Rp327,45 triliun, yang mengindikasikan pertumbuhan likuiditas yang kuat.

Secara keseluruhan, industri perbankan nasional mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2024 dengan tingkat ekspansi yang sehat. Perbankan syariah tumbuh lebih pesat dalam beberapa aspek, terutama dalam penghimpunan dana dan pembiayaan. BSI, sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia, menunjukkan kinerja yang lebih agresif dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan syariah. Kenaikan ekuitas dan laba bersih yang tinggi di BSI menunjukkan keberhasilan strategi ekspansi dan peningkatan profitabilitas.

Tinjauan Operasional

Strategi Bank

Untuk mendorong pengembangan kapabilitas dan pencapaian bisnis, maka fokus strategis yang dijalankan BSI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan *Sustain***
   BSI akan terus menjalankan strategi yang terbukti memberikan nilai tambah kepada kinerja bank yaitu mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan sustain, dengan menyasar segmen yang memiliki kualitas baik dengan imbal hasil yang optimal seperti konsumer, gadai, dan cicil emas. BSI juga akan terus memperkuat pendanaan dengan meningkatkan akuisisi *payroll*, tabungan *wadiah*, tabungan bisnis, dan tabungan haji serta peningkatan *fee based income*.
2. **Optimalisasi DPK dan *Liquidity Management***
   Untuk menjaga likuiditas di level optimal dengan profitabilitas yang terjaga, BSI akan melakukan strategi ekspansi dana ritel khususnya pada produk tabungan, menjaga konsentrasi deposan inti, dan menggali peluang pendanaan lainnya seperti dengan penerbitan sukuk.
3. **Penetrasi *Ecosystem***
   BSI akan mempercepat pertumbuhan bisnis melalui fokus penetrasi pada 6 (enam) *ecosystem* unggulan antara lain *household*, *education*, *spiritual and charity*, *government spending*, *healthcare*, dan *investment* dengan menawarkan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan nasabah.
4. ***Digital and Transaction Banking***
   BSI akan terus meningkatkan digitalisasi pada bisnis bank melalui peningkatan user aktif *mobile banking*, *shifting* transaksi dari cabang ke *channel* elektronik dan digital, serta digitalisasi *business process* untuk mempercepat SLA layanan nasabah dan peningkatan *fee based income* Bank. Selain itu, BSI berusaha untuk menerapkan *customer centric organization* dengan cara memahami *customer profile* lebih baik sehingga dapat memberikan solusi produk dan layanan yang lebih komprehensif melalui penguatan data *analytic*, peningkatan *digital adoption*, dan intensifikasi terhadap nasabah eksisting.
5. **Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas**
   BSI akan melanjutkan penataan jaringan khususnya penataan jaringan kantor yang masih berdekatan *(overlapping)*, pemerataan sebaran lokasi *(coverage)*, dan evaluasi kantor berkinerja rendah. Untuk meningkatkan produktivitas pegawai, BSI akan melakukan *redeployment* pegawai dari unit *support/service/operation* ke unit bisnis disertai dengan *upskilling* dan *reskilling* kapabilitas pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan 5 (lima) fokus strategi di atas, BSI akan melakukan penguatan *fundamental enablers* yaitu penguatan manajemen organisasi, stabilisasi dan *upgrade Core Banking*, peningkatan keamanan siber IT, penguatan keamanan jaringan dan informasi, melakukan pengembangan dan operasional TI, kerjasama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kriteria jaminan pengamanan dan kerahasiaan data, penyusunan prosedur *Business Continuity Management* (BCM), dan implementasi prinsip *Environmental*, *Social*, *Governance*, *Risk and Compliance* (ES-GRC) untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dalam rangka menggarap potensi pasar global, BSI telah mendirikan Kantor Cabang di Dubai. Selain itu, BSI berencana akan melakukan pembukaan jaringan kantor luar negeri di Saudi Arabia dengan tujuan mengoptimalkan bisnis haji dan umrah. Sebagai salah satu strategi optimalisasi likuiditas jangka panjang, BSI akan melakukan penerbitan surat berharga berkelanjutan sebanyak-banyaknya Rp10 triliun yang akan diterbitkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Bank. Selain itu, BSI akan menggali peluang untuk tumbuh secara anorganik antara lain melalui integrasi dengan unit usaha syariah, kolaborasi dengan pihak ketiga dalam bentuk *joint venture*, *strategic partnership*, maupun *equity participation*.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Menuju tahun ke 4 (empat) pasca *merger* dari tiga Bank Syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BSI Syariah dan Bank BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menajamkan kehadirannya untuk menjadi Bank Syariah pilihan utama masyarakat Indonesia berdampingan dengan bank umum lainnya. Kehadiran BSI yang mudah ditemui baik *offline* maupun *online*, maupun melalui materi promosi dan iklan, membuat BSI semakin dikenal di masyarakat.

Saat ini BSI pun sudah meluncurkan *superapp* baru yaitu Byond by BSI yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi dan menggunakan layanan perbankan. Tahun 2024 BSI menargetkan pertumbuhan *Brand Equity* ke angka 0.9 dan *Brand Awareness* di angka 21%

Fokus strategi di tahun 2024 juga tetap dilaksanakan sebagai bentuk keberlanjutan dari strategi tahun sebelumnya:

1. ***Mapping Customer***
   Mapping Customer dibagi menjadi dua yaitu *target business* dan *target audience*.
   a. *Target business* merupakan segmen nasabah yang diharapkan bisa menghasilkan *contribution margin* lebih tinggi seperti: ASN, Pegawai BUMN, Pensiunan, Ekosistem Rumah Sakit, Pelaku UMKM dan Profesional.
   b. *Target audience* merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target utama komunikasi, diantaranya Gen Z, Millennial.
2. ***Mapping Product Champion***
   BSI melakukan strategi pemasaran dengan membuat *house of strategy* yaitu penguatan *brand* dan pertumbuhan bisnis melalui dua pilar strategi yaitu *product heroes and socialization*. Berikut adalah *product heroes* yang menjadi fokus strategi pemasaran di tahun 2024:
   a. BSI Mobile
   b. BYOND by BSI
   c. Cicil Emas dan Gadai Emas
   d. BSI Griya
   e. BSI Mitraguna Berkah
3. ***Integrated Marketing Communication* (IMC)**
   IMC dilakukan berdasarkan strategi *mapping customer* dan *mapping product champion*. Aktivitas *campaign 'hero product'* dilakukan sesuai dengan *target audience* maupun *target business* yang telah ditetapkan. Pendekatan IMC dilakukan melalui aktivitas promosi terintegrasi seperti *campaign* #LevelUpRamadanmu dan campaign BYOND by BSI.
   a. **BSI Mobile #LevelUpRamadanmu**
      Campaign #LevelUpRamadanmu mengangkat produk BSI Mobile serta BSI Card dengan target audience Gen Z dan Millennials. Dilakukan serangkaian aktivitas promosi mulai dari *Above The Line* (ATL) melalui media televisi, koran/majalah, videotron/OOH pada *public transport* dan rute mudik lebaran, serta radio pada kota-kota yang menjadi target. Kemudian *Below The Line* (BTL) melalui *offline event* BSI Gema Ramadan (*open booth* di Masjid) dan Posko Layanan Mudik BSI (*open booth* di *rest area* mudik lebaran), serta didukung kegiatan *digital marketing* melalui *influencer marketing* seperti menggunakan *brand ambassador* yaitu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah serta melakukan kolaborasi dengan KOLs seperti *owner* Bittersweet By Najla untuk membuat *hampers* Ramadan (*brand ambassador* dan KOLs), *Over The Top* (OTT), *digital ads*, *publisher*, dan *social media activation*.
   b. **BSI Mitraguna Berkah**
      Produk BSI Mitraguna Berkah memiliki *target business* yang lebih spesifik yaitu masyarakat Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap), dalam hal ini terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMN, maupun Pegawai Swasta. Aktivitas promosi yang dilakukan lebih bersifat *direct marketing* dan menggunakan targeted media. Aktivitas promosi *Below The Line* (BTL) yang dilakukan diantaranya dengan kunjungan langsung ke nasabah ataupun ke satuan kerja (satker) instansi terkait, pelaksanaan event *mini expo* dengan mengambil tema yang bermanfaat bagi pegawai. Sedangkan untuk promosi *Above The Line* (ATL) dilakukan melalui *office lift branding* dan untuk promosi digital menggunakan *influencer marketing* yang sesuai dengan *niche audience* (kolaborasi dengan KOLs) dan *digital ads* dengan *audience targeting*.
   c. **BSI Griya dan BSI Oto**
      Produk BSI Griya dan BSI Oto merupakan produk pembiayaan dengan *target audience* yang memiliki *interest* pada properti dan otomotif. Aktivitas promosi yang dilakukan melalui *Below The Line* (BTL) diantaranya dengan membuat *mini expo* di *mall* dan *sponsorship* program seperti keikutsertaan BSI Oto pada event Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Sedangkan untuk promosi *Above The Line* (ATL) dilakukan melalui *office lift branding* dan untuk promosi digital menggunakan *influencer marketing* seperti Bapak2.id pada *event* Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 dan *digital ads* yang menyasar *interest* dari *target audience*.
   d. **BSI Cicil Emas dan Gadai Emas**
      Produk BSI Cicil Emas dan Gadai Emas memiliki *target audience* yang berada di *sub-urban* maupun *rural area*. Untuk menjangkau *target audience* tersebut, aktivitas promosi dilakukan melalui *Above The Line* (ATL) yaitu radio di kota-kota yang menjadi target promosi dan dapat menjangkau *rural area*.
   e. **BYOND by BSI**
      SuperApp terbaru dari BSI yaitu BYOND by BSI memiliki *target audience* Gen Z dan Millenials seperti dengan BSI Mobile. Untuk mendorong *awareness* BYOND by BSI pada fase *launching*, aktivitas promosi dilakukan melalui *Above The Line* (ATL), *Below The Line* (BTL) dan *digital marketing*. Promosi *Above The Line* (ATL) dilakukan dengan melalui *out of home media* seperti *branding public transport* dan *LED roadside* pada lokasi-lokasi strategis di Ibu Kota, *branding landmark* di kota-kota besar, *branding* kantor cabang BSI, *branding* mobil dan bus transportasi, dan videotron/

billboard pada kota-kota strategis. Selain itu, promosi ATL dilakukan melalui *sponsorship* program televisi, koran/majalah, dan radio. SuperApp BYOND by BSI erat kaitannya dengan digital media, sehingga aktivitas promosi melalui *digital marketing* dilakukan melalui berbagai *platform sosial media ads, digital ads, publisher, Over The Top* (OTT), *whatsapp blast*, dan *influencer marketing*. *Influencer marketing* dilakukan menggunakan Kolaborasi KOLs dan *brand ambassador* BSI, diantaranya adalah Atta Halilintar - Aurel Hermansyah, Ragnar Oratmangoen, dan Titi Kamal - Christian Sugiono. Promosi melalui *Below The Line* (BTL) dilakukan dengan *event launching* BYOND by BSI dan BYONDay pada *event car free day* di Jakarta, selain itu dilakukan *mall activation* pada 6 (enam) *mall* di Jakarta untuk mempermudah *target audience* melakukan aktivasi akun BYOND by BSI.

4. ***Event and Activation***
   Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI terus berkomitmen meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan berpartisipasi aktif dalam *event regulator*, seperti yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperkenalkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Selain itu, BSI juga menggelar *signature event* berskala besar, seperti BSI International Expo, yang mendukung penguatan *Islamic Ecosystem*. Acara ini menjadi wadah edukasi dan kolaborasi, menghadirkan *workshop*, pameran produk keuangan syariah, hingga *talkshow* bersama para ahli. Untuk mendukung pemberdayaan UMKM, BSI meluncurkan program seperti Talenta Wirausaha BSI dan Aceh Muslim Preneur. Keduanya dirancang untuk memberdayakan pelaku UMKM melalui pelatihan bisnis syariah, pendampingan usaha, dan akses terhadap produk keuangan syariah. Melalui langkah ini, BSI berperan aktif dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM sebagai pilar penting ekonomi Indonesia. Berbagai inisiatif tersebut merupakan beberapa contoh dari komitmen BSI dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Syariah di Indonesia, lebih jauhnya, BSI berharap, inisiatif-inisiatif besar tersebut dapat menumbuh kembangkan *brand* BSI ke depannya.
5. ***Brand Ambassador***
   Brand ambassador digunakan untuk meningkatkan *brand awareness* maupun *product awareness audience* terhadap BSI. Saat ini, BSI memiliki *content creator* Atta Halilintar, Aurel Hermansyah dan Atlet Sepakbola Ragnar Oratmangoen sebagai *brand ambassador* yang aktif mempromosikan produk-produk BSI. Penggunaan *brand ambassador* berhasil meningkatkan *impression* dan juga eng*agement audience* pada digital media serta berhasil meningkatkan pencapaian bisnis, khususnya seperti produk BSI Tabungan Haji dan Kurban yang meningkat setelah dipromosikan oleh Ragnar Oratmangoen.

Pangsa Pasar

BSI sebagai bank syariah, secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan syariah dan secara umum menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan aset, pembiayaan, pendanaan.

Tabel Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah

(dalam miliar Rupiah)

Pangsa Pasar Industri Perbankan Syariah	Uraian	Desember 2024	Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
Aset	BSI	408.613	353.624	54.989
	Industri Perbankan Syariah	980.295	892.163	88.132
	Pangsa Pasar	41,68%	**39,64%**	**2,05%**
Pembiayaan	BSI	278.481	240.316	38.165
	Industri Perbankan Syariah	643.546	585.461	58.085
	Pangsa Pasar	43,27%	**41,05%**	**2,23%**
Pendanaan/DPK	BSI	327.454	293.776	33.678
	Industri Perbankan Syariah	753.599	684.519	69.080
	Pangsa Pasar	43,45%	**42,92%**	**0,53%**

Sumber:
- Statistik Perbankan Indonesia Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari 2025 (diolah)
- Laporan Keuangan BSI Desember 2024 (diolah)

Diagram Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah Desember 2024

(dalam %)

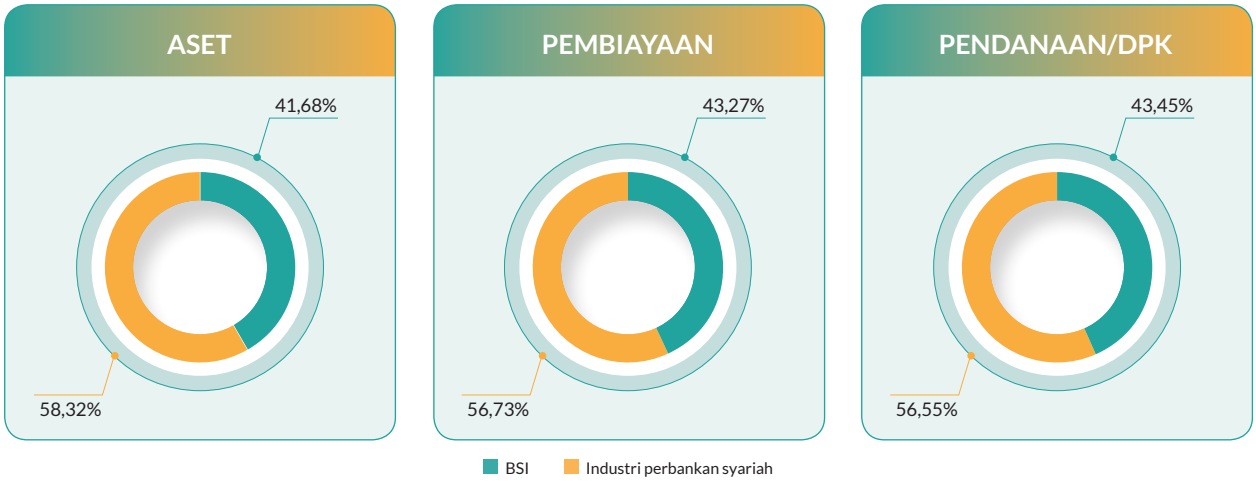
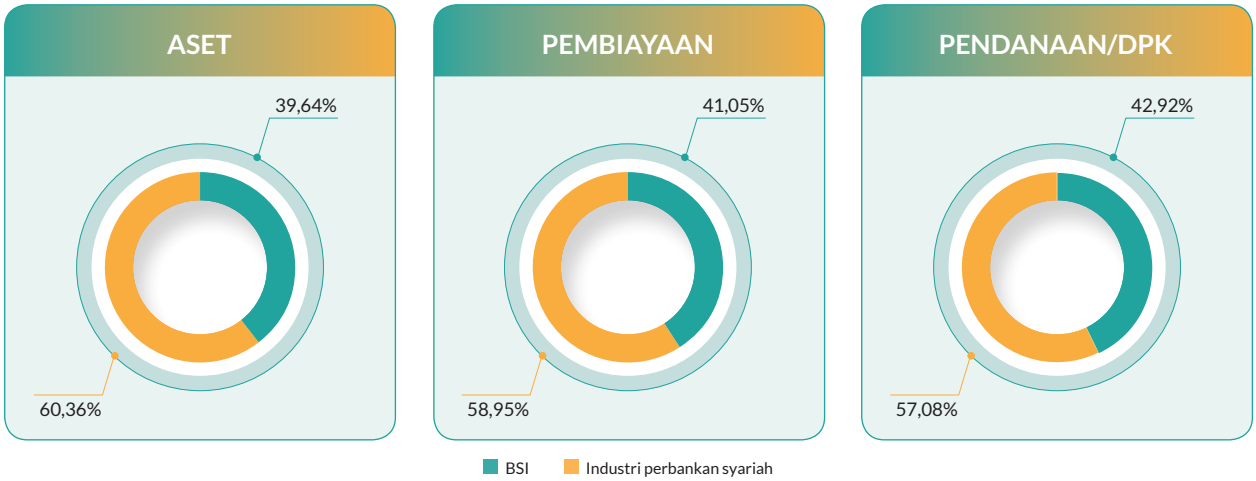


Diagram Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah Desember 2023

(dalam %)



Pada tahun 2024, BSI menunjukkan kinerja yang solid dengan peningkatan pangsa pasar dari sisi aset, pembiayaan, dan DPK.

- Pangsa pasar aset BSI pada Desember 2024 mencapai 41,68%, meningkat dibandingkan Desember 2023 sebesar 39,64%. Aset BSI secara yoy tumbuh mencapai Rp54,99 triliun, yang mencerminkan strategi efektif BSI dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing di industri perbankan syariah.
- Pangsa pasar pembiayaan BSI juga mencatatkan pertumbuhan signifikan yaitu mencapai 43,27% pada Desember 2024. Angka ini naik dari 41,05% pada Desember 2023. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan BSI dalam memperluas portofolio pembiayaan ke sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
- Pangsa pasar DPK BSI mencapai 43,45% pada Desember 2024, meningkat dari Desember 2023 sebesar 42,92%. BSI berhasil menjaga stabilitas penghimpunan dana dengan strategi inovasi produk dan peningkatan kepercayaan nasabah melalui layanan yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan pengembangan layanan digital terus menjadi prioritas, termasuk peluncuran fitur-fitur baru pada Superapps BYOND by BSI yang mempermudah transaksi dan meningkatkan kenyamanan nasabah dalam menjalankan aktivitas perbankan.

Tabel Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan

(dalam miliar Rupiah)

Pangsa Pasar Industri Perbankan	Uraian	Desember 2024	Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
Aset	BSI	408.613	353.624	54.989
	Industri Perbankan	12.690.663	11.983.999	706.664
	Pangsa Pasar	3,22%	**2,95%**	**0,27%**
Pembiayaan	BSI	278.481	240.316	38.165
	Industri Perbankan	7.994.621	7.248.059	746.562
	Pangsa Pasar	3,48%	**3,32%**	**0,17%**
Pendanaan/DPK	BSI	327.454	293.776	33.678
	Industri Perbankan	8.997.539	8.611.108	386.431
	Pangsa Pasar	3,64%	**3,41%**	**0,23%**

Sumber:
- Statistik Perbankan Indonesia Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Februari 2025 (diolah)
- Laporan Keuangan BSI Desember 2024 (diolah)

Diagram Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Desember 2024

(dalam %)

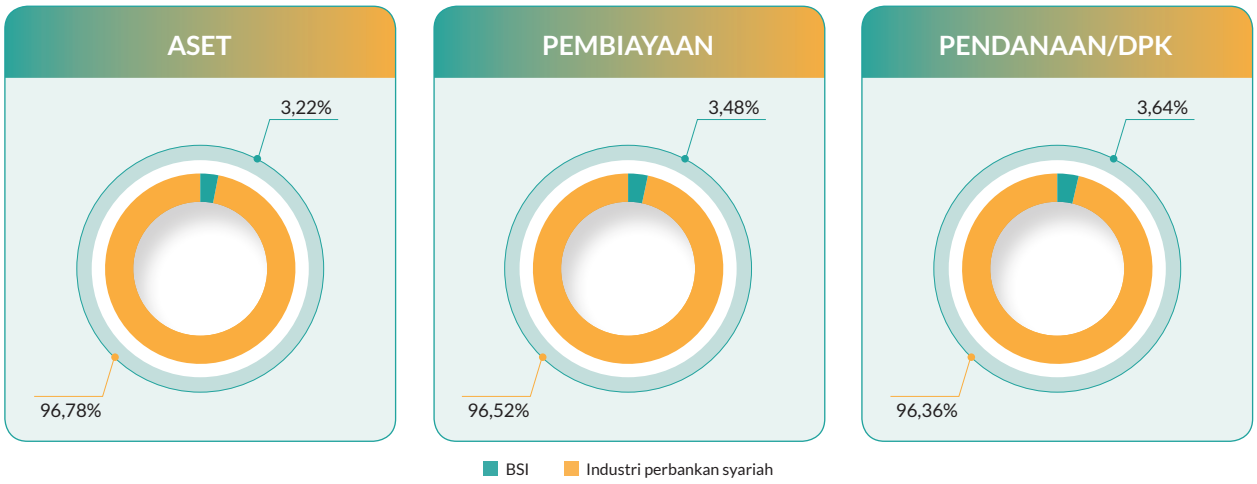
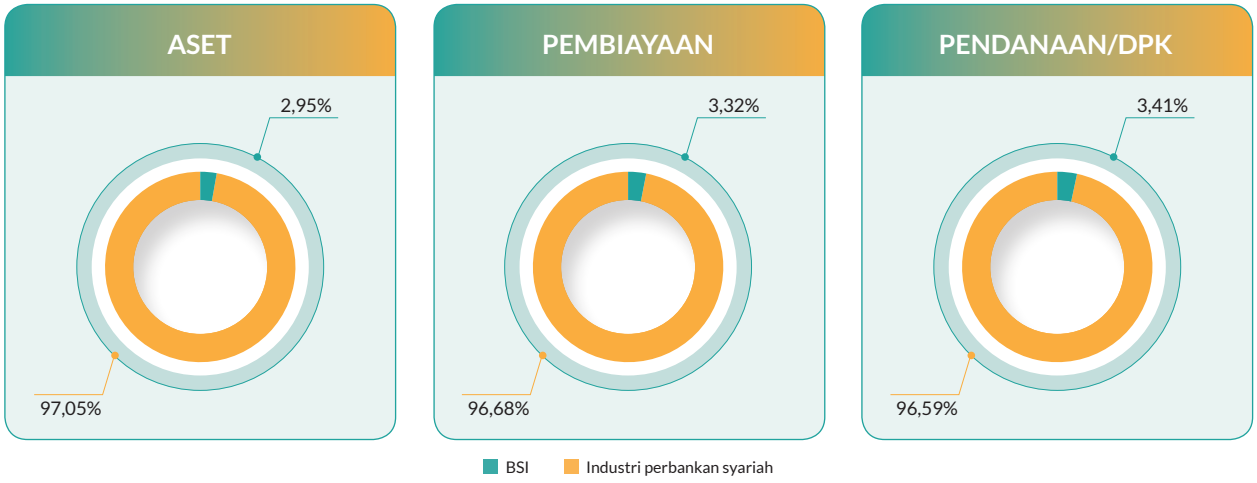


Diagram Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Desember 2023

(dalam %)



Di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan syariah, BSI juga menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan nasional di Indonesia. Pada tahun 2024, BSI menunjukkan kinerja yang solid dengan peningkatan pangsa pasar di tiga indikator utama yaitu aset, pembiayaan, dan DPK.

- Pangsa pasar BSI berdasarkan aset pada industri perbankan nasional mencapai 3,22% pada Desember 2024, mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan strategi efektif BSI dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing, bahkan di tengah persaingan ketat dengan industri perbankan nasional.
- Pangsa pasar pembiayaan BSI pada Desember 2024 mencapai 3,48%, naik dari periode yang sama di tahun 2023 yang sebesar 3,32% menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya dikarenakan BSI memperluas portofolio pembiayaan ke sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.
- Pangsa pasar DPK BSI mencapai 3,64% pada Desember 2024, naik dari periode yang sama di tahun 2023 sebesar 3,41%. Pencapaian ini menggambarkan keberhasilan BSI dalam menjaga stabilitas penghimpunan dana melalui inovasi produk dan peningkatan kepercayaan nasabah.

Penanganan Pengaduan Nasabah

Tata cara penanganan pengaduan nasabah BSI dapat dilihat di bawah ini:

Penanganan Pengaduan Nasabah
Bank Syariah Indonesia



1. Nasabah menyampaikan pengaduan secara lisan melalui BSI Call 14040 dan menerima nomor pengaduan. Untuk pengaduan secara tertulis disampaikan melalui seluruh kantor **cabang Bank Syariah Indonesia, Kantor Pusat, BSI Mobile, BYOND by BSI dan Email: contactus@bankbsi.co.id**
2. Pengaduan nasabah akan diproses oleh unit kerja pengaduan Bank Syariah Indonesia
3. Nasabah akan menerima informasi penyelesaian pengaduan maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 10 hari kerja berikutnya

Syarat Penyampaian Pengaduan

Jenis Pengaduan	Nasabah	Perwakilan Nasabah
Lisan (BSI Call 14040)	**Dokumen Pengaduan:** • Identitas Nasabah yang masih berlaku • Dokumen lainnya terkait pengaduan	Belum Diperkenankan
Tertulis kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Kantor Pusat, BSI Mobile, BYOND by BSI dan Email: contactus@bankbsi.co.id		**Dokumen Pengaduan:** • Asli dan fotokopi bukti identitas perwakilan nasabah yang berlaku • Surat kuasa bermaterai yang menyatakan bahwa nasabah memberikan kewenangan kepada perseorangan, lembaga, atau badan hukum yang mewakilinya bertindak untuk dan atas nama nasabah • Dokumen lainnya terkait dengan pengaduan nasabah.

"Penanganan pengaduan juga dapat disampaikan oleh Nasabah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), layanan mediasi Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan dengan kondisi pengaduan tersebut telah terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya oleh Bank Syariah Indonesia."

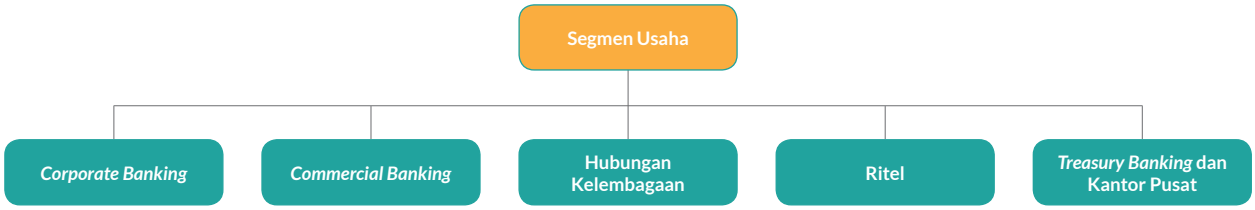
Pada tahun 2024 terdapat 359.280 pengaduan dengan jenis transaksi yang meliputi 8.390 pengaduan kejahatan eksternal, 12.357 pengaduan produk dan 338.533 pengaduan proses/transaksi dan fasilitas yang seluruhnya telah selesai ditangani.

Tabel Publikasi Penanganan Pengaduan

No	Jenis Transaksi keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1.	Kejahatan Eksternal	8.390	2,34%	-	-	-	-	8.390
2.	Produk	12.357	3,44%	-	-	-	-	12.357
3.	Proses/Transaksi dan Fasilitas	338.533	94,23%	-	-	-	-	338.533
Total		359.280	100,00%	-	-	-	-	**359.280**

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Pembahasan kinerja per segmen pada laporan tahunan ini disusun sesuai dengan catatan "informasi segmen" yang tersaji pada Laporan Keuangan *Audited* BSI.



Di tahun 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian segmen operasi yang digunakan dalam laporan kinerja manajemen internal. Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel, dan *Treasury Banking* dan Kantor Pusat.

Segmen Usaha

Corporate Banking

Segmen *Corporate Banking* melayani badan usaha seperti BUMN dan anak perusahaannya, lembaga negara, perusahaan multinasional, bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal ventura *non-linkage*), pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka, dan perusahaan sekuritas.

Penjelasan masing-masing produk *Corporate Banking* telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN INOVASI *CORPORATE BANKING*

Corporate Banking BSI terus mengembangkan produk, solusi dan layanan untuk dapat menyesuaikan kebutuhan nasabah sehingga menghasilkan sinergi yang saling menguntungkan antara nasabah dengan BSI. Hal ini menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat dalam segmen *Corporate Banking*, dengan menjadi mitra strategis bagi target pasarnya yaitu nasabah BUMN dan perusahaan konglomerasi terkemuka di Indonesia. Keunggulan ini berkat komitmen kami untuk memberikan solusi perbankan berbasis prinsip syariah yang inovatif dan fleksibel, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah.

STRATEGI *CORPORATE BANKING* TAHUN 2024

Untuk menghadapi tantangan sekaligus memaksimalkan peluang, strategi yang telah dilakukan oleh *Corporate Banking* adalah sebagai berikut:

1. Fokus pertumbuhan pada nasabah BUMN dan Perusahaan konglomerasi yang sehat dan berkelanjutan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan serta menyalurkan pembiayaan sesuai dengan *best practice* di industri perbankan.
2. Menggarap ekosistem nasabah secara menyeluruh dengan memanfaatkan *relationship* dengan nasabah yang kuat, sehingga segmen Retail mampu melakukan penetrasi bisnis dan memanfaatkan potensi yang ada pada nasabah segmen *Corporate*.
3. Mengembangkan struktur organisasi dan meningkatkan kompetensi SDM segmen *Corporate Banking* agar sejalan dengan industri dan dapat menangkap peluang bisnis yang ada.

PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS *CORPORATE BANKING*

Informasi produktivitas, pendapatan dan profitabilitas Corporate Banking dalam dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel Kinerja Segmen *Corporate Banking*

(jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Pembiayaan	58.719.889	54.541.919	4.177.970	7,66%
NPF %	2,24%	2,79%	-	(0,55%)
Total Pendanaan/DPK	21.619.859	22.354.117	(734.258)	(3,28%)
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	1.076.107	1.187.969	(111.862)	(9,42%)
Pendapatan Usaha Lainnya	374.100	358.216	15.884	4,43%
Beban Usaha	(151.526)	(134.737)	(16.789)	12,46%
Beban CKPN	(109.297)	(336.193)	226.896	(67,49%)
Laba Setelah Zakat dan Pajak	904.526	820.783	83.743	10,20%

Pembiayaan segmen *Corporate Banking* tahun 2024 sebesar Rp58,72 triliun, meningkat 7,66% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp54,54 triliun. Di sisi lain, untuk pendanaan segmen *Corporate Banking* tahun 2024 mengalami penurunan 3,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari Rp22,35 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp21,62 triliun pada tahun 2024. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya giro sebesar Rp1,78 triliun.

Pendapatan pengelolaan dana bersih segmen *Corporate Banking* tahun 2024 sebesar Rp1,08 triliun menurun 9,42% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,19 triliun. Di sisi lain, laba setelah zakat dan pajak tahun 2024 sebesar Rp904,53 miliar, meningkat 10,20% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp820,78 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan total pembiayaan segmen *Corporate Banking* sebesar Rp4,18 triliun di tahun 2024

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI *CORPORATE BANKING* TAHUN 2025

Pada 2025, *Corporate Banking* akan tetap berfokus pada kegiatan usaha di sektor-sektor menarik dengan kualitas yang baik. Selain itu, *Corporate Banking* juga terus mengembangkan proses bisnis yang lebih cepat dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, dan juga memanfaatkan platform BeWize dalam rangka mengoptimalkan *value chain* dan *transactional banking* nasabah guna meningkatkan *fee based income* di tahun 2025 maupun ke depannya.

Commercial Banking

Segmen *Commercial Banking* melayani badan usaha seperti BUMD dan anak perusahaannya, pemerintah daerah, rumah sakit (kecuali diatur dalam produk khusus), perguruan tinggi negeri dan swasta (yayasan yang memiliki perguruan tinggi).

Penjelasan masing-masing produk *Commercial Banking* telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN INOVASI *COMMERCIAL BANKING*

Keunggulan kompetitif dan inovasi *Commercial Banking* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. ***Lead Collaboration with* MUF *in Joint Financing***
   Commercial Banking menjadi *Business Unit* (BU) yang me-*lead* pengembangan kerjasama dengan MUF dalam pembiayaan bersama (*joint financing*) untuk Segmen *Wholesale* yaitu *Commercial* dan *Corporate*.

2. ***Retail and Consumer Business Collaboration***
   Commercial Banking menjadi *entry point* dalam hal *retail and consumer business* yang memberikan *impact* pada DPK dan pembiayaan.
3. ***Hospital Business financing top branding***
   Commercial Banking merepresentasikan BSI sebagai bank yang *advance* dalam pengelolaan bisnis pembiayaan Rumah Sakit, dengan portofolio Rp7,82 triliun dan mengelola ± 500 nasabah Rumah Sakit.
4. ***Highest* DPK *Impact***
   Commercial Banking menjadi *business unit* pembiayaan, yang memberikan *impact* DPK paling tinggi diantara *business unit* pembiayaan lainnya dengan *average* 63% (rasio DPK Pby) selama 2024.

STRATEGI *COMMERCIAL BANKING* TAHUN 2024

Strategi Commercial Banking pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. ***Target Segment***
   a. **Akuisisi *Top Player* di Indonesia**
      - Konglomerasi/group usaha non 150 *richest*.
      - Nasabah DPK eksisting non debitur yang potensial (Berkolaborasi dengan cabang pengelola).
      - *Entrepreneur* yang *prominent* di masing-masing wilayah RCB/ACB (*Local Champion*).
      - Berkolaborasi dengan cabang pengelola nasabah *wealth/priority* yang merupakan *entrepreneur*.

   b. **Layer 2 (L2) dari nasabah-nasabah *Corporate Business* BSI**
      - Target adalah L2 dari ± 113 nasabah *Corporate Business* dengan status lancar/sesuai rekomendasi *Corporate Business.*
      - Koordinasi intensif dengan *Corporate Business 1* (CB1), *Corporate Business 2* (CB2), *Corporate Business 3* (CB3) untuk dapat dieksplorasi dan diberikan akses kepada L2 dari nasabah potensial kelolaan eksisting.
2. ***People Organization***
   a. **Meningkatkan Kapabilitas Pegawai**
      - Pemberian *training* dan sertifikasi kompetensi wajib perbankan sesuai layer jabatan.
      - Bekerjasama dengan *Risk Unit Pairing* dan BSU membuat silabus *training* fokus sektor pembiayaan.
      - Melakukan *update mastery focus* atas sektor-sektor ekonomi unggulan.

   b. ***Reward* dan Benefit Pegawai Berprestasi**
      - Sistem mutasi dan promosi sesuai dengan *talent pooling* yang *proper*.
      - Pemberian *reward* kepada pegawai berprestasi sesuai kebutuhan seperti Umroh, Beasiswa dan lainnya.
3. ***Product/Program***
   a. Penyempurnaan terus menerus dan dinamis terhadap SPB *core* antara lain SPB Pembiayaan Commercial, SPB Segmentasi, maupun MP/PTO yang berpengaruh kepada pencapaian bisnis Segmen *Commercial*.
   b. Pembuatan program Pembiayaan yang potensial (jika diperlukan).
   c. Pembuatan program terkait *pricing* pembiayaan dan *benefit* untuk *take over*/retensi nasabah.
4. ***Campaign***
   a. *Event sponsorship* yang merupakan event yang biasa datang dari permohonan nasabah/potensi nasabah/ *business community*.
   b. *Gathering/vendor gathering*
   c. Nasabah/group potensial yang berkolaborasi dengan *Business Unit* terkait lainnya.

PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS *COMMERCIAL BANKING*

Informasi produktivitas, pendapatan dan profitabilitas Commercial Banking dalam dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel Kinerja Segmen *Commercial Banking*

(jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Pembiayaan	18.497.916	12.969.097	5.528.819	42,63%
NPF %	2,28%	3,05%	-	(0,78%)
Total DPK	12.013.780	6.990.589	5.023.191	71,86%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	463.841	360.522	103.319	28,66%
Pendapatan Usaha Lainnya	198.027	104.025	94.002	90,36%
Beban Usaha	(215.341)	(153.841)	(61.500)	39,98%
Beban CKPN	(124.951)	(133.567)	8.616	(6,45%)
Laba Setelah Zakat dan Pajak	244.558	135.217	109.341	80,86%

Total pembiayaan segmen *Commercial Banking* tahun 2024 sebesar Rp18,50 triliun, meningkat 42,63% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp12,97 triliun. Demikian pula dengan total pendanaan segmen *Commercial Banking* yang meningkat 71,86% dari Rp6,99 triliun di tahun 2023 menjadi Rp12,01 triliun di tahun 2024. Peningkatan pendanaan tersebut dikontribusi dari pertumbuhan deposito sebesar Rp3,60 triliun pada tahun 2024.

Pendapatan pengelolaan dana bersih segmen *Commercial Banking* tahun 2024 sebesar Rp463,84 miliar meningkat 28,66% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp360,52 miliar. Pendapatan usaha lainnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp94 miliar atau 90,36% dibandingkan dengan tahun 2023.

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI *COMMERCIAL BANKING* TAHUN 2025

Prospek usaha dan strategi *Commercial Banking* dituangkan dalam 4 (empat) besaran yang meliputi *Optimization*, *Collaboration*, *Expansion* dan *Program Based*.

1. ***Optimization***
   a. Optimalisasi kelonggaran tarik fasilitas pembiayaan yang telah terbentuk.
   b. Utilisasi dan akuisisi baru fasilitas SCF BPJS Kesehatan (potensi defisit anggaran BPJS Kesehatan) dan *distributor financing*.
2. ***Collaboration***
   a. Kolaborasi *wholesale – ritel* untuk mengakuisisi potensi *value chain financing* dan group nasabah *corporate*.
   b. Sinergi percepatan SLA dengan *risk pairing group*.
   c. Kerjasama dengan induk untuk sindikasi/*club deal*.
3. ***Expansion***
   a. Pemisahan *Large* Comm. menjadi 2 (dua) Departemen Kebun dan non Kebun.
   b. Pembukaan RCB/ACB baru dan pemenuhan SDM-nya.
   c. Intensifikasi pada group usaha nasabah eksisting.
   d. Intensifikasi pada nasabah DPK non debitur dan nasabah *wealth* bekerjasama dengan Cabang.
   e. *Take over* program debitur nasabah top 10 Bank non induk.
4. ***Program Based***
   a. Utilisasi *Joint Financing* (JF) *Wholesale* dengan MUF Syariah.
   b. Usulan revitalisasi produk *supplier financing* dan *buyer financing* BSI.

Hubungan Kelembagaan

Segmen Hubungan Kelembagaan saat ini difokuskan untuk pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah Institusi yang tidak memiliki fasilitas pembiayaan/ *financing line* antara lain Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Rumah Sakit Negeri, BUMD *Subsidiaries* dan Perusahaan Swasta Terbuka.

Penjelasan masing-masing produk Hubungan Kelembagaan telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN INOVASI HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Melalui peningkatan inovasi menjadi sumber utama keunggulan kompetitif dengan terus berinovasi, kebutuhan Kementerian dan Lembaga dapat terpenuhi operasionalnya dengan baik melalui sinergi dan kolaborasi dengan kelembagaan baik transaksi, operasional dan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah, untuk kolaborasi secara internal dengan group terkait menciptakan Solusi dan inovatif. Adapun pemanfaatan aplikasi teknologi yang dapat dilakukan seperti *Cash Management System* (CMS), BSI e-Health, BSI Pembayaran Institusi (BPI), *Host to Host* (H2H) dan lain-lain.

STRATEGI HUBUNGAN KELEMBAGAAN TAHUN 2024

Strategi Hubungan Kelembagaan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan *customer base* dan *deepening relationship* dengan nasabah melalui pengembangan kapabilitas *transactional banking* dan perluasan *value chain*.
2. Mengoptimalkan kerjasama Kementerian Keuangan yang telah mempercayakan kepada BSI sebagai Bank Operasional pengelola rekening Kementerian Keuangan (BO1) dan peningkatan dana pada nasabah Kementerian Negara/ Lembaga beserta seluruh satuan kerja (satker) dan Badan Layanan Umum (BLU).
3. Peningkatan *customer base* melalui ekosistem Kementerian Negara/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit Negeri (SBSN, PNBP, Rekening VA, E-Court, dan lain-lain).
4. Meningkatkan dan mengoptimalisasikan penempatan dana nasabah pareto namun tetap mempertimbangkan risiko konsentrasi nasabah sesuai dengan kebijakan manajemen.

PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Informasi produktivitas, pendapatan dan profitabilitas Hubungan Kelembagaan dalam dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel Kinerja Segmen Hubungan Kelembagaan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Pendanaan/DPK	89.456.637	79.770.650	9.685.987	12,14%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	550.684	329.935	220.749	66,91%
Beban Usaha	(101.896)	(84.689)	(17.207)	20,32%
Laba Setelah Zakat dan Pajak	341.380	187.206	154.174	82,36%

Total pendanaan segmen Hubungan Kelembagaan tahun 2024 sebesar Rp89,46 triliun, meningkat 12,14% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp79,77 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kontribusi pertumbuhan deposito yang sebesar Rp7,54 triliun. Pendapatan pengelolaan dana bersih segmen Hubungan Kelembagaan tahun 2024 sebesar Rp550,68 miliar meningkat 66,91% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp329,94 miliar. Peningkatan laba setelah zakat dan pajak sebesar 82,36%, dari Rp187,21 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp341,38 miliar pada tahun 2024.

Peningkatan produktivitas, pendapatan dan profitabilitas segmen Hubungan Kelembagaan sangat dipengaruhi hal-hal sebagai berikut:

- Komunikasi yang efektif untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan semua pihak berada pada pemahaman yang sama baik kebutuhan nasabah sampai dengan transaksi nasabah.
- Tingkat kepercayaan kelembagaan terhadap penempatan dana dan transaksi ke bank melalui transparansi, konsistensi dan pemenuhan komitmen.
- Koordinasi dan kolaborasi kelembagaan yang baik dapat mengoptimalkan kebutuhan transaksi kelembagaan untuk memberikan kepuasan terhadap nasabah.

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI HUBUNGAN KELEMBAGAAN TAHUN 2025

Penyaluran belanja APBN Kementerian/Lembaga yang baru didirikan pada Kabinet Baru dalam tahun 2025 terdapat 48 Kementerian dan 51.238 Satker diseluruh Indonesia yang memiliki potensi untuk dilakukan Kerjasama, baru sekitar 1.640 Satker atau 3.2% yang telah menggunakan layanan BSI, sehingga tantangan ke depan masih cukup besar untuk dapat melakukan kerjasama di Kementerian.

Untuk perguruan tinggi terdapat 63 PTN, 15 Institut Negeri, 44 Politeknik, 31 Universitas Islam Negeri, 23 Institut Agama Islam Negeri, 5 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 38 Politeknik Kesehatan dan 179 Perguruan Tinggi Kedinasan yang juga menjadi prioritas untuk dapat mengoptimalkan Kerjasama bersama BSI.

Prospek Rumah Sakit Pemerintah terdapat ±1.031 Rumah Sakit Pemerintah, RSUD, dan Rumah Sakit di bawah Kementerian lainnya maupun dibawah TNI/Polri dan BUMN yang masih dapat memberikan potensi yang baik di 2025.

Melalui prospek usaha dalam kelembagaan tersebut strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan giro transaksi kelembagaan melalui aplikasi Be WIZE dengan targeted Institusi.
2. Meningkatkan pertumbuhan dana khususnya giro penempatan dan transaksi melalui optimalisasi Kerjasama dengan kelembagaan serta melalui program kelembagaan.
3. Memahami kebutuhan nasabah melalui *cash in* dan *cash out* nasabah kelembagaan untuk mengoptimalisasi kebutuhan yang diharapkan nasabah.
4. Mengoptimalisasikan penempatan dana nasabah kelembagaan namun tetap mempertimbangkan risiko konsentrasi nasabah sesuai dengan kebijakan manajemen.
5. Peningkatan customer base kelembagaan melalui *ecosystem* yang telah dilakukan pada Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, Rumah Sakit Negeri, BUMD *Subsidiaries* dan Perusahaan Swasta Terbuka.

Ritel

Segmen Ritel saat ini meliputi:

- **Ritel *Small Medium Enterprise* (SME)**
  Melayani badan usaha swasta berbentuk badan hukum dan non badan hukum untuk tujuan produktif, modal kerja dan investasi.
- **Ritel Mikro**
  Ditujukan untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya adalah penyaluran pembiayaan bersubsidi untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat.
- **Ritel Konsumer**
  Melayani perorangan untuk tujuan konsumtif/multiguna (antara lain produk griya, multiguna, kendaraan, pensiunan, kartu pembiayaan, cicil emas dan gadai emas, pembiayaan program pemerintah).

Penjelasan masing-masing produk Ritel telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN INOVASI RITEL

Keunggulan kompetitif dan inovasi Segmen Ritel antara lain sebagai berikut:

1. *Contribution margin* SME terhadap laba BSI meningkat menjadi 8%.
2. *Outstanding* SME tumbuh sebesar 12%.
3. Kualitas pembiayaan SME terus membaik setiap tahunnya.
4. Layanan perbankan yang mudah melalui BYOND by BSI dan terjangkau dengan bebas biaya administrasi untuk akad *wadiah*.

STRATEGI RITEL TAHUN 2024

Strategi yang dilakukan oleh Segmen Ritel pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi bisnis dari 10 ekosistem SME.
2. Pemantauan ketersediaan *pipeline* dan SLA eksekusi.
3. Peningkatan produktivitas pencairan dan perencanaan kapasitas.
4. Fokus pada segmen *payroll* dan pebisnis.

PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS RITEL

Informasi produktivitas, pendapatan dan profitabilitas segmen Ritel dalam dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel Kinerja Segmen Ritel

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Pembiayaan	201.263.437	172.805.028	28.458.409	16,47%
NPF %	1,76%	1,78%	-	(0,02%)
Total DPK	205.226.059	185.573.903	19.652.156	10,59%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	13.455.386	12.349.295	1.106.091	8,96%
Pendapatan Usaha Lainnya	2.257.932	1.679.885	578.047	34,41%
Beban Usaha	(6.208.730)	(5.495.768)	(712.962)	12,97%
Beban CKPN	(1.757.475)	(2.155.440)	397.965	(18,46%)
Laba Setelah Zakat dan Pajak	5.934.732	4.868.547	1.066.185	21,90%

Total pembiayaan Segmen Ritel tahun 2024 sebesar Rp201,26 triliun, meningkat 16,47% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp172,81 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi kontribusi pertumbuhan Ritel Konsumer sebesar Rp21,34 triliun. Demikian pula dengan pendanaan Segmen Ritel tahun 2024 yang tumbuh 10,59% dari Rp185,57 triliun di tahun 2023 menjadi Rp205,23 triliun di tahun 2024. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan tabungan sebesar Rp15,61 triliun.

Pendapatan pengelolaan dana bersih Segmen Ritel tahun 2024 sebesar Rp13,46 triliun meningkat 8,96% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp12,35 triliun. Pendapatan usaha lainnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp578,05 miliar atau 34,41% dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan laba setelah zakat dan pajak sebesar 21,90%, dari Rp4,87 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp5,93 triliun pada tahun 2024.

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI RITEL TAHUN 2025

Prospek usaha dan strategi ke depan tahun 2025 yang dilakukan oleh Segmen Ritel antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi *yield*.
2. Meningkatkan dana pihak ketiga dan *fee based income*.
3. Menjaga kualitas pembiayaan.
4. Optimalisasi pendapatan *recovery*.
5. Fokus pada tabungan haji untuk nasabah *payroll* dan tabungan bisnis melalui segmen pebisnis.

Treasury Banking dan Kantor Pusat

Treasury Banking dan Kantor Pusat merupakan segmen lainnya yang saat ini meliputi:

- ***Treasury Banking***
  Terkait dengan kegiatan *treasury* Bank termasuk transaksi valuta asing, *money market*, *fixed income*, bisnis perbankan internasional, pasar modal, supervisi Kantor Luar Negeri.
- **Kantor Pusat**
  Terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

Penjelasan masing-masing produk *Treasury Banking* dan Kantor Pusat telah disajikan pada bagian Profil Sub Bab Produk dan Jasa dalam Laporan Tahunan ini.

KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN INOVASI *TREASURY BANKING*

Pada tahun 2024, *Treasury Global Market* BSI mendapatkan beberapa penghargaan atas kinerja dan kontribusi di pasar keuangan, yaitu:

1. Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter terbaik dari Bank Indonesia.
2. Bank terbaik sebagai Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS pada KBMI 3 dan 4.
3. *Award* dari Alpha Southeast Asia sebagai *Best Sukuk Mudharabah issuance in SouthEast Asia* 2024
4. IDX SPPA Award 2024 *Rising Star of The Year - Bank Category*.

STRATEGI *TREASURY BANKING* TAHUN 2024

Strategi *Treasury Banking* dan Kantor Pusat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperluas jumlah nasabah dan *counterpart* serta meningkatkan volume transaksi sekunder di pasar uang syariah dan pasar SBSN dan menjadi *market maker* di pasar domestik.
2. Diversifikasi Investasi dan manajemen aktif pada portofolio pasar uang dan pasar modal untuk meningkatkan *yield*.
3. Kolaborasi marketing produk *Treasury* dengan Divisi Wealth Management, *Corporate Banking* dan Jaringan.
4. Penerbitan *sustainability* sukuk sebagai alternatif pendanaan stabil Non-DPK.
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui *targeted training*, forum k*nowledge sharing* dan sertifikasi *dealer*.

PRODUKTIVITAS, PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS *TREASURY BANKING* DAN KANTOR PUSAT

Informasi produktivitas, pendapatan dan profitabilitas segmen *Treasury Banking* dan Kantor Pusat dalam dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut.

Tabel Kinerja Segmen *Treasury Banking* dan Kantor Pusat

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih	1.707.162	1.861.513	(154.351)	(8,29%)
Pendapatan Usaha Lainnya	2.726.319	2.062.340	663.979	32,20%
Beban Usaha	(5.116.149)	(4.380.169)	(735.980)	16,80%
Beban CKPN	97.856	2.721	95.135	3.496,32%

Pendapatan pengelolaan dana bersih Segmen *Treasury Banking* dan Kantor Pusat tahun 2024 sebesar Rp1,71 triliun menurun 8,29% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,86 triliun. Sedangkan pendapatan usaha lainnya tahun 2024 mengalami peningkatan 32,20% dari Rp2,06 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp2,73 triliun pada tahun 2024.

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI *TREASURY BANKING* TAHUN 2025

Sesuai *financial projection* 2025, Treasury (TGM) telah menyusun strategi inisiatif untuk meningkatkan FBI dan pendapatan investasi antara lain melalui intensifikasi transaksi pada segmen nasabah prioritas, *cross-selling* pada segmen *wholesale* dan *commercial*, pengembangan produk-produk *Treasury* dan perdagangan emas, perluasan organisasi marketing *treasury*, perluasan bisnis *treasury* di KCLN dan optimalisasi sistem transaksi *treasury*.

1. **Mencapai target FBI dan yield pendapatan investasi**
   a. Intensifikasi transaksi sukuk sekunder pada segmen prioritas.
   b. Perluasan transaksi lindung nilai syariah dengan nasabah dan bank.
   c. Perluasan organisasi *marketing treasury* di daerah dan *cross-selling* produk *treasury* pada segmen *wholesale* dan *commercial* serta lisensi bisnis *treasury* di KCLN Dubai.
   d. Peningkatan kapasitas perdagangan emas, baik digital maupun fisik.
   e. Optimalisasi open posisi pada instrumen sukuk dan pasar uang baik rupiah maupun valas serta diversifikasi investasi *banking book*.
   f. Meningkatkan volume transaksi sekunder pasar uang syariah.
2. **Pendalaman Pasar Keuangan Syariah**
   a. Pengembangan produk baru antara lain produk terstruktur syariah.
   b. Pendalaman pasar keuangan syariah bekerja sama dengan regulator (BI, OJK) dan *Self Regulatory Organization*/SRO (Apuvindo).
   c. Penjajakan instrumen pendanaan melalui produk pasar uang, *sustainability* sukuk dan *bilateral financing*.
3. ***Business process improvement***
   a. Peningkatan kapasitas sistem dan digitalisasi transaksi *treasury*, baik sukuk maupun *forex*.
   b. Pembaharuan kebijakan dan prosedur *treasury* antara lain efisiensi pengelolaan pagu kas cabang.
   c. Simplifikasi proses dalam penetapan *treasury line* dan aktivitas transaksi sukuk dan *forex* dengan nasabah.
   d. Perekrutan dan Pembukaan kelas ODP *Treasury*.



Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BSI tanggal 31 Desember 2024, serta Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan BSI terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan yang disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
KAS	8.080.689	5.255.841	2.824.848	53,75%
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	49.966.279	32.440.778	17.525.501	54,02%
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN				
Pihak ketiga	3.752.325	2.219.233	1.533.092	69,08%
Pihak berelasi	128.549	105.240	23.309	22,15%
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain	3.880.874	2.324.473	1.556.401	66,96%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.809)	(20.745)	5.936	(28,61%)
Bersih	3.866.065	2.303.728	1.562.337	67,82%
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA - BERSIH				
Pihak ketiga	24.134.169	25.738.013	(1.603.844)	(6,23%)
Pihak berelasi	38.117.637	45.563.513	(7.445.876)	(16,34%)
Jumlah investasi pada surat berharga	62.251.806	71.301.526	(9.049.720)	(12,69%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35.288)	(132.506)	97.218	(73,37%)
Bersih	62.216.518	71.169.020	(8.952.502)	(12,58%)
TAGIHAN AKSEPTASI				
Pihak ketiga	12.694	244.074	(231.380)	(94,80%)
Pihak berelasi	172.451	187.154	(14.703)	(7,86%)
Jumlah tagihan akseptasi	185.145	431.228	(246.083)	(57,07%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.851)	(4.312)	2.461	(57,07%)
Bersih	183.294	426.916	(243.622)	(57,07%)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PIUTANG				
Murabahah				
Pihak ketiga	144.205.651	136.391.384	7.814.267	5,73%
Pihak berelasi	66.883	111.712	(44.829)	(40,13%)
Jumlah *murabahah*	144.272.534	136.503.096	7.769.438	5,69%
Istishna				
Pihak ketiga	11	30	(19)	(63,33%)
Ijarah				
Pihak ketiga	188.361	217.241	(28.880)	(13,29%)
Pihak berelasi	-	1.159	(1.159)	(100,00%)
Jumlah *ijarah*	188.361	218.400	(30.039)	(13,75%)
Jumlah piutang	144.460.906	136.721.526	7.739.380	5,66%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.265.369)	(4.361.368)	95.999	(2,20%)
Bersih	140.195.537	132.360.158	7.835.379	5,92%
PINJAMAN *QARDH*				
Pihak ketiga	12.863.002	9.468.085	3.394.917	35,86%
Pihak berelasi	910.782	1.838.996	(928.214)	(50,47%)
Jumlah pinjaman *qardh*	13.773.784	11.307.081	2.466.703	21,82%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787.694)	(817.917)	30.223	(3,70%)
Bersih	12.986.090	10.489.164	2.496.926	23,80%
PEMBIAYAAN				
Mudharabah				
Pihak ketiga	937.079	881.133	55.946	6,35%
Pihak berelasi	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00%
Jumlah *mudharabah*	2.937.079	1.881.133	1.055.946	56,13%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93.488)	(49.481)	(44.007)	88,94%
Bersih	2.843.591	1.831.652	1.011.939	55,25%
Musyarakah				
Pihak ketiga	88.044.668	63.452.727	24.591.941	38,76%
Pihak berelasi	26.142.550	24.763.470	1.379.080	5,57%
Jumlah *musyarakah*	114.187.218	88.216.197	25.971.021	29,44%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.145.131)	(4.459.696)	(685.435)	15,37%
Bersih	109.042.087	83.756.501	25.285.586	30,19%
Jumlah pembiayaan	117.124.297	90.097.330	27.026.967	30,00%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.238.619)	(4.509.177)	(729.442)	16,18%
Bersih	111.885.678	85.588.153	26.297.525	30,73%
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH	3.122.255	**2.190.107**	**932.148**	**42,56%**
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	7.723.853	**5.352.843**	**2.371.010**	**44,29%**
ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH	2.102.344	**1.128.334**	**974.010**	**86,32%**
ASET PAJAK TANGGUHAN	2.056.727	**1.665.694**	**391.033**	**23,48%**
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	4.228.103	**3.253.388**	**974.715**	**29,96%**
JUMLAH ASET	408.613.432	**353.624.124**	**54.989.308**	**15,55%**

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA				
Pihak ketiga	856.981	1.144.847	(287.866)	(25,14%)
Pihak berelasi	1.662	171.220	(169.558)	(99,03%)
	858.643	1,316,067	(457,424)	(34.76%)
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	291.578	**255.932**	**35.646**	**13,93%**
SIMPANAN WADIAH				
Giro *wadiah*				
Pihak ketiga	16.260.234	18.023.665	(1.763.431)	(9,78%)
Pihak berelasi	2.886.845	2.823.859	62.986	2,23%
Jumlah giro *wadiah*	19.147.079	20.847.524	(1.700.445)	(8,16%)
Tabungan *wadiah*				
Pihak ketiga	55.266.166	47.016.211	8.249.955	17,55%
Pihak berelasi	13.901	10.163	3.738	36,78%
Jumlah tabungan *wadiah*	55.280.067	47.026.374	8.253.693	17,55%
Jumlah simpanan *wadiah*	74.427.146	67.873.898	6.553.248	9,66%
SIMPANAN DARI BANK LAIN				
Giro *wadiah*				
Pihak ketiga	173.510	123.984	49.526	39,95%
Pihak berelasi	1.369	1.353	16	1,18%
Jumlah giro *wadiah*	174.879	125.337	49.542	39,53%
Tabungan *wadiah*				
Pihak ketiga	8.985	7.788	1.197	15,37%
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")				
Pihak ketiga	2.481.425	1.401.191	1.080.234	77,09%
Pihak berelasi	885.225	226.985	658.240	289,99%
Jumlah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	3.366.650	1.628.176	1.738.474	106,77%
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")				
Pihak ketiga	400.000	-	400.000	100,00%
Pihak berelasi	200.834	-	200.834	100,00%
Jumlah Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	600.834	-	600.834	100,00%
Jumlah simpanan dari bank lain	4.151.348	1.761.301	2.390.047	135,70%
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	18.417.864	**11.900.055**	**6.517.809**	**54,77%**
LIABILITAS AKSEPTASI				
Pihak ketiga	72.792	287.323	(214.531)	(74,67%)
Pihak berelasi	112.353	143.905	(31.552)	(21,93%)
Jumlah liabilitas akseptasi	185.145	431.228	(246.083)	(57,07%)
UTANG PAJAK	889.642	**539.042**	**350.600**	**65,04%**
LIABILITAS IMBALAN KERJA	534.730	**667.264**	**(132.534)**	**(19,86%)**

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	24.045	**32.017**	**(7.972)**	**(24,90%)**
LIABILITAS LAIN-LAIN	5.867.830	**2.446.107**	**3.421.723**	**139,88%**
JUMLAH LIABILITAS	105.647.971	**87.222.911**	**18.425.060**	**21,12%**
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				
Giro *mudharabah*				
Pihak ketiga	17.421.912	14.835.449	2.586.463	17,43%
Pihak berelasi	19.813.889	17.581.811	2.232.078	12,70%
Jumlah giro *mudharabah*	37.235.801	32.417.260	4.818.541	14,86%
Tabungan *mudharabah*				
Pihak ketiga	85.414.890	78.088.518	7.326.372	9,38%
Pihak berelasi	375.768	191.667	184.101	96,05%
Jumlah tabungan *mudharabah*	85.790.658	78.280.185	7.510.473	9,59%
Deposito *mudharabah*				
Pihak ketiga	92.556.398	87.628.737	4.927.661	5,62%
Pihak berelasi	38.122.469	28.356.052	9.766.417	34,44%
Jumlah deposito *mudharabah*	130.678.867	115.984.789	14.694.078	12,67%
Jumlah giro, tabungan dan deposito mudharabah	253.705.326	226.682.234	27.023.092	11,92%
Sukuk *mudharabah* subordinasi				
Pihak ketiga	140.000	175.000	(35.000)	(20,00%)
Pihak berelasi	60.000	25.000	35.000	140,00%
Jumlah sukuk *mudharabah* subordinasi	200.000	200.000	-	0,00%
Sukuk *mudharabah* diterbitkan				
Pihak ketiga	2.653.063	3.608	2.649.455	73.432,79%
Pihak berelasi	365.500	-	365.500	100,00%
Jumlah sukuk *mudharabah* diterbitkan	3.018.563	3.608	3.014.955	83.563,05%
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	1.000.000	776.250	223.750	28,82%
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER	257.923.889	**227.662.092**	**30.261.797**	**13,29%**
EKUITAS				
Modal saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	23.064.630	23.064.630	-	0,00%
Tambahan modal disetor	(3.929.100)	(3.929.100)	-	0,00%
Keuntungan revaluasi aset tetap	553.440	444.530	108.910	24,50%
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak	347.644	241.462	106.182	43,97%
(Kerugian)/Keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain – setelah pajak	(56.814)	6.154	(62.968)	1.023,20%
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	3.377.462	2.236.713	1.140.749	51,00%
Belum ditentukan penggunaannya	21.684.310	16.674.732	5.009.578	30,04%
JUMLAH EKUITAS	45.041.572	**38.739.121**	**6.302.451**	**16,27%**
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS	408.613.432	**353.624.124**	**54.989.308**	**15,55%**

Total Aset

Total aset tahun 2024 sebesar Rp408,61 triliun, meningkat 15,55% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp353,62 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan pertumbuhan pembiayaan bersih sebesar Rp26,30 triliun, giro dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp17,53 triliun dan piutang bersih sebesar Rp7,84 triliun.

Kas

Kas tahun 2024 sebesar Rp8,08 triliun, meningkat 53,75% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,26 triliun. Peningkatan kas terjadi pada kas besar sebesar Rp1,27 triliun dan kas ATM Rp933 miliar. Peningkatan seiring dengan penambahan jumlah mesin ATM selama tahun 2024.

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia tahun 2024 sebesar Rp49,97 triliun, meningkat 54,02% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp32,44 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan penempatan pada Fasbis sebesar Rp28 triliun atau meningkat Rp23,5 triliun dibandingkan dengan tahun 2023.

Giro dan Penempatan Pada Bank Lain

Giro dan penempatan pada bank lain – bersih tahun 2024 sebesar Rp3,87 triliun, meningkat 67,82% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,30 triliun. Peningkatan terutama dari SIPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank) yang pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp2,15 triliun dibandingkan dengan tahun 2023.

Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada surat berharga – bersih tahun 2024 sebesar Rp62,22 triliun, menurun 12,58% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp71,17 triliun. Penurunan investasi pada surat berharga di tahun 2024 terutama pada instrument SBSN sebesar Rp6,8 triliun dan sukuk BI sebesar Rp2,8 triliun.

Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi – bersih tahun 2024 sebesar Rp183,29 miliar, menurun 57,07% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp426,92 miliar. Penurunan tersebut berasal dari tagihan akseptasi SKBDN usance impor yang turun sebesar Rp221,53 miliar.

Piutang

Piutang – bersih tahun 2024 sebesar Rp140,19 triliun, meningkat 5,92% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp132,36 triliun. Peningkatan piutang didorong oleh pertumbuhan dari sektor konsumer sebesar Rp2,81 triliun, sektor perdagangan Rp2,46 triliun dan sektor pertanian Rp1,89 triliun.

Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* – bersih tahun 2024 sebesar Rp12,99 triliun, meningkat 23,80% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp10,49 triliun. Peningkatan didominasi oleh gadai emas yang tumbuh sebesar Rp1,53 triliun atau meningkat 31,32% dibandingkan dengan tahun 2023.

Pembiayaan

Pembiayaan – bersih tahun 2024 sebesar Rp111,89 triliun, meningkat 30,73% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp85,59 triliun. Peningkatan pembiayaan terutama dari sektor konsumer sebesar Rp16,09 triliun, pertanian Rp4,51 triliun, dan jasa usaha Rp4,11 triliun.

Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* – Bersih

Aset yang diperoleh untuk ijarah – bersih tahun 2024 sebesar Rp3,12 triliun, meningkat 42,56% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,19 triliun. Peningkatan terutama pada sektor transportasi sebesar Rp1,18 triliun atau meningkat sebesar Rp1,15 triliun dibandingkan dengan tahun 2023.

Aset Tetap dan Aset Hak Guna – Bersih

Aset tetap dan aset hak guna – bersih tahun 2024 sebesar Rp7,72 triliun, meningkat 44,29% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,35 triliun. Peningkatan terutama dari aset terkait infrastruktur IT sebesar Rp754,41 miliar dan mesin ATM dan CRM sebesar Rp487,23 miliar.

Aset Tidak Berwujud – Bersih

Aset tidak berwujud – bersih tahun 2024 sebesar Rp2,10 triliun, meningkat 86,32% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,13 triliun. Peningkatan didominasi oleh lisensi IT terkait peningkatan *security*, *upgrade system* dan pengembangan aplikasi BYOND by BSI.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan tahun 2024 sebesar Rp2,06 triliun, meningkat 23,48% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,67 triliun. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 74 Tahun 2024 tentang pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto berdampak pada penambahan nilai aset pajak tangguhan tahun 2024.

Aset Lain-Lain – Bersih

Aset lain-lain – bersih tahun 2024 sebesar Rp4,23 triliun, meningkat 29,96% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,25 triliun. Peningkatan terutama dari biaya dibayar dimuka sebesar Rp732,20 miliar dan pendapatan pembiayaan dan surat berharga yang akan diterima sebesar Rp178,80 miliar.

Total Liabilitas

Total liabilitas tahun 2024 sebesar Rp105,65 triliun, meningkat 21,12% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp87,22 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan pertumbuhan jumlah tabungan wadiah sebesar Rp8,25 triliun, liabilitas kepada Bank Indonesia sebesar Rp6,52 triliun dan liabilitas lain-lain sebesar Rp3,42 triliun.

Liabilitas Segera

Liabilitas segera tahun 2024 sebesar Rp858,64 miliar, menurun 34,76% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,32 triliun. Penurunan terutama dari kewajiban transaksi ATM sebesar Rp427,32 miliar.

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Bagi hasil yang belum dibagikan tahun 2024 sebesar Rp291,58 miliar, meningkat 13,93% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp255,93 miliar. Peningkatan terutama dari bagi hasil atas deposito yang belum di bagikan yang meningkat sebesar Rp36,88 miliar.

Simpanan *Wadiah*

Simpanan *wadiah* tahun 2024 sebesar Rp74,43 triliun, meningkat 9,66% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp67,87 triliun. Pada 2024 tabungan wadiah mengalami peningkatan sebesar Rp8,25 triliun atau meningkat 17,55% dibandingkan tahun lalu.

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain tahun 2024 sebesar Rp4,15 triliun, meningkat 135,70% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,76 triliun. Peningkatan terdapat pada Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) sebesar Rp1,74 triliun dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA) Rp600,83 miliar.

Liabilitas Kepada Bank Indonesia

Liabilitas kepada Bank Indonesia tahun 2024 sebesar Rp18,42 triliun, meningkat 54,77% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp11,90 triliun.

Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi tahun 2024 sebesar Rp185,15 miliar, menurun 57,07% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp431,23 miliar. Penurunan yaitu dari kewajiban akseptasi SKBDN Usance Impor sebesar Rp220,02 miliar.

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2024 sebesar Rp889,64 miliar, meningkat 65,04% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp539,04 miliar. Peningkatan terutama dari PPh pasal 25/29 yang meningkat sebesar Rp450,37 miliar dibandingkan tahun 2023.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja tahun 2024 sebesar Rp534,73 miliar, menurun 19,86% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp667,26 miliar. Penurunan disebabkan realisasi imbalan kerja atas pegawai pensiun ataupun mengundurkan diri di tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi tahun 2024 sebesar Rp24,05 miliar, menurun 24,90% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp32,02 miliar. Penurunan seiring dengan turunnya *outstanding* dari komitmen dan kontijensi di tahun 2024.

Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain tahun 2024 sebesar Rp5,87 triliun, meningkat 139,88% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,45 triliun. Hal tersebut disebabkan di tahun 2024 terdapat kewajiban atas transaksi *bancassurance* sebesar Rp3,5 triliun.

Total Dana *Syirkah* Temporer

Total dana *syirkah* temporer tahun 2024 sebesar Rp257,92 triliun, meningkat 13,29% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp227,66 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan pertumbuhan jumlah giro, tabungan dan deposito *mudharabah* sebesar Rp27,02 triliun.

Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* tahun 2024 sebesar Rp37,24 triliun, meningkat 14,86% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp32,42 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi pertumbuhan giro *mudharabah* dari pihak ketiga sebesar Rp2,59 triliun.

Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* tahun 2024 sebesar Rp85,79 triliun, meningkat 9,59% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp78,28 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi pertumbuhan tabungan *mudharabah* dari pihak ketiga sebesar Rp7,32 triliun.

Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* tahun 2024 sebesar Rp130,68 triliun, meningkat 12,67% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp115,98 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi pertumbuhan deposito *mudharabah* dari pihak berelasi sebesar Rp9,77 triliun.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi

Sukuk *mudharabah* subordinasi tahun 2024 sebesar Rp200,00 miliar, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 yang juga sebesar Rp200,00 miliar.

Sukuk *Mudharabah* Diterbitkan

Sukuk *mudharabah* diterbitkan tahun 2024 sebesar Rp3,02 triliun, meningkat 83.563,05% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,61 miliar. Pada Juni 2024 BSI menerbitkan sukuk berkelanjutan (ESG) sebesar Rp3 triliun.

Pembiayaan Berjangka *Mudharabah*

Pembiayaan berjangka *mudharabah* tahun 2024 sebesar Rp1,00 triliun, meningkat 28,82% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp776,25 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan adanya fasilitas *line* pembiayaan berjangka *mudharabah* dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada tahun 2024.

Ekuitas

Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp45,04 triliun, meningkat 16,27% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp38,74 triliun. Perolehan laba di tahun 2024 sebesar Rp7,01 triliun meningkatkan ekuitas Bank.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Modal ditempatkan dan disetor penuh tahun 2024 sebesar Rp23,06 triliun, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 yang juga sebesar Rp23,06 triliun.

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor tahun 2024 sebesar Rp3,93 triliun, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023 yang juga sebesar Rp3,93 triliun.

Keuntungan Revaluasi Aset Tetap

Keuntungan revaluasi aset tetap tahun 2024 sebesar Rp553,44 miliar, meningkat 24,50% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp444,53 miliar. Pada tahun 2024 beberapa aset tetap yang dimiliki oleh Bank BSI nilainya mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai revaluasi sebelumnya.

Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak

Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tahun 2024 sebesar Rp347,64 miliar, meningkat 43,97% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp241,46 miliar.

Keuntungan/(Kerugian) yang Belum Direalisasi Atas Surat Berharga dalam Kelompok Diukur pada Nilai Wajar Melalui Pendapatan Komprehensif Lain

Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain – setelah pajak tahun 2024 sebesar Rp56,81 miliar, berbanding terbalik dengan tahun 2023 yang mencatatkan keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain – setelah pajak sebesar Rp6,15 miliar.

Saldo Laba

Saldo laba tahun 2024 sebesar Rp25,06 triliun, meningkat 32,52% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp18,91 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2024.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI *MUDHARI*B				
Pendapatan dari jual beli	13.404.055	12.627.780	776.275	6,15%
Pendapatan dari bagi hasil	8.001.204	5.940.486	2.060.718	34,69%
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	192.124	155.446	36.678	23,60%
Pendapatan usaha utama lainnya	3.700.820	3.528.031	172.789	4,90%
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	(7.889.029)	**(5.993.168)**	**(1.895.861)**	**31,63%**
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	17.409.174	**16.258.575**	**1.150.599**	**7,08%**
PENDAPATAN USAHA LAINNYA				
Pendapatan imbalan jasa perbankan	3.678.362	2.870.774	807.588	28,13%
Keuntungan investasi surat berharga	587.199	242.110	345.089	142,53%
Pendapatan lainnya	1.290.918	1.091.582	199.336	18,26%
Jumlah pendapatan usaha lainnya	5.556.479	4.204.466	1.352.013	32,16%
BEBAN USAHA				
Gaji dan tunjangan	(5.284.136)	(5.035.215)	(248.921)	4,94%
Umum dan administrasi	(6.342.626)	(5.169.938)	(1.172.688)	22,68%
Bonus *wadiah*	(586)	(1.107)	521	(47,06%)
Lain-lain	(166.294)	(42.944)	(123.350)	287,23%
	(11.793.642)	(10.249.204)	(1.544.438)	15,07%
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif - bersih	(1.893.867)	(2.622.479)	728.612	(27,78%)
LABA USAHA	9.278.144	**7.591.358**	**1.686.786**	**22,22%**
PENDAPATAN NON USAHA - BERSIH	4.312	**(2.156)**	**6.468**	**300,00%**
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK	9.282.456	**7.589.202**	**1.693.254**	**22,31%**
ZAKAT	(232.061)	**(189.730)**	**(42.331)**	**22,31%**
BEBAN PAJAK	(2.044.507)	**(1.695.729)**	**(348.778)**	**20,57%**
LABA BERSIH	7.005.888	**5.703.743**	**1.302.145**	**22,83%**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan revaluasi aset tetap	108.910	-	108.910	100,00%
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	136.130	(35.181)	171.311	486,94%
Pajak penghasilan terkait	(29.948)	7.739	(37.687)	(486,98%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
(Kerugian)/Keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(92.116)	61.631	(153.747)	(249,46%)
Pajak penghasilan terkait	29.148	-	29.148	100,00%
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak	152.124	34.189	117.935	344,95%
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	7.158.012	**5.737.932**	**1.420.080**	**24,75%**
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	151,88	**123,65**	**28,23**	**22,83%**

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* tahun 2024 sebesar Rp25,30 triliun, meningkat 13,69% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp22,25 triliun. Pertumbuhan pembiayaan musyarakah selama tahun 2024 mendorong peningkatan pendapatan atas bagi hasil sebesar Rp2 triliun.

Pendapatan dari Jual Beli

Pendapatan dari jual beli tahun 2024 sebesar Rp13,40 triliun, meningkat 6,15% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp12,63 triliun. Pendapatan dari piutang *murabahah* menjadi faktor utama peningkatan pendapatan dari jual beli dimana pada tahun 2024 piutang murabahah tumbuh sebesar 5,69% atau Rp7,77 triliun.

Pendapatan dari Bagi Hasil

Pendapatan dari bagi hasil tahun 2024 sebesar Rp8,00 triliun, meningkat 34,69% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,94 triliun. Peningkatan pedapatan atas bagi hasil terutama dari pendapatan pembiayaan *musyarakah* yang meningkat Rp2 triliun dibandingkan dengan tahun 2023.

Pendapatan dari *Ijarah* – Bersih

Pendapatan dari *ijarah* – bersih tahun 2024 sebesar Rp192,12 miliar, meningkat 23,60% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp155,45 miliar. Peningkatan pendapatan ijarah seiring dengan peningkatan aset *ijarah* sebesar Rp932,15 miliar atau 42,56%.

Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya tahun 2024 sebesar Rp3,70 triliun, meningkat 4,90% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,53 triliun. Peningkatan pendapatan yaitu dari surat berharga sebesar Rp74,15 miliar dan penempatan pada BI sebesar Rp46,61 miliar.

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil tahun 2024 sebesar Rp7,89 triliun, meningkat 31,63% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,99 triliun. Peningkatan hak pihak ketiga atas bagi hasil terutama pada bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar Rp1,39 triliun dan bagi hasil giro *mudharabah* sebesar Rp308,53 miliar. Adapun peningkatan bagi hasil atas deposito *mudahrabah* dan giro *mudharabah* tersebut dikarenakan peningkatan DPK masing-masing sebesar Rp14,69 triliun dan Rp4,82 triliun.

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya tahun 2024 sebesar Rp5,56 triliun, meningkat 32,16% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp4,20 triliun. Kontribusi terbesar yaitu dari pendapatan imbalan jasa perbankan yang meningkat meningkat sebesar Rp807,59 miliar dibandingkan dengan tahun 2023.

Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan tahun 2024 sebesar Rp3,68 triliun, meningkat 28,13% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,87 triliun. Peningkatan pendapatan imbalan jasa perbankan terutama dari pendapatan transaksi *Bancassurance* sebesar Rp343,48 miliar, pendapatan Rahn Rp146,11 miliar, dan pendapatan layanan *internet banking* Rp100,04 miliar.

Keuntungan Investasi Surat Berharga

Keuntungan investasi surat berharga tahun 2024 sebesar Rp587,20 miliar, meningkat 142,53% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp242,11 miliar. Pendapatan dari pelepasan surat berharga menjadi faktor utama meningkatnya keuntungan investasi surat berharga di tahun 2024, dimana mengalami peningkatan sebesar Rp377,24 miliar.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya tahun 2024 sebesar Rp1,29 triliun, meningkat 18,26% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,09 triliun. Peningkatan terutama dari penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapus buku sebesar Rp199,34 miliar.

Beban Usaha

Beban usaha tahun 2024 sebesar Rp11,79 triliun, meningkat 15,07% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp10,25 triliun. Peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp1,17 triliun menjadi faktor utama atas peningkatan beban usaha di tahun 2024.

Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan meningkat sebesar 4,94% yaitu dari Rp5,04 triliun di tahun 2023 menjadi Rp5,28 triliun di tahun 2024.

Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi tahun 2024 sebesar Rp6,34 triliun, meningkat 22,68% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,17 triliun. Peningkatan antara lain dari beban promosi Rp223,56 miliar, penyusutan aset tetap & hak guna Rp212,05 miliar dan beban jasa outsourcing Rp108,23 miliar.

Bonus *Wadiah*

Beban bonus *wadiah* tahun 2024 sebesar Rp586 juta, menurun 47,06% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,11 miliar. Hal tersebut disebabkan penurunan bonus wadiah atas giro wadiah bank lain sebesar Rp276,36 juta dan penurunan giro wadiah non bank sebesar Rp246,53 juta.

Lain-Lain

Beban lain-lain tahun 2024 sebesar Rp166,29 miliar, meningkat 287,23% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp42,94 miliar.

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif – Bersih

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif - bersih tahun 2024 sebesar Rp1,89 triliun, menurun 27,78% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp2,62 triliun. Penurunan tersebut seiring dengan terjaganya kualitas pembiayaan selama tahun 2024. Selain itu juga terdapat *splitting bucket* perhitungan PD LGD pembiayaan KUR dan Non KUR.

Laba Usaha

Laba usaha tahun 2024 sebesar Rp9,28 triliun, meningkat 22,22% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp7,59 triliun. Peningkatan laba usaha sejalan dengan pertumbuhan hak bagi hasil milik bank tahun 2024.

Pendapatan Non Usaha – Bersih

Pendapatan non usaha - bersih tahun 2024 sebesar Rp4,31 miliar, meningkat 300,00% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar (Rp2,16) miliar.

Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak

Laba sebelum zakat dan beban pajak tahun 2024 sebesar Rp9,28 triliun, meningkat 22,31% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp7,59 triliun.

Zakat

Zakat tahun 2024 sebesar Rp232,06 miliar, meningkat 22,31% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp189,73 miliar. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Beban Pajak

Beban pajak tahun 2024 sebesar Rp2,04 triliun, meningkat 20,57% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,70 triliun.

Laba Bersih

Laba bersih tahun 2024 sebesar Rp7,01 triliun, meningkat 22,83% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,70 triliun. Hal ini didorong oleh pendapatan margin dan bagi hasil serta *fee based income* yang terus tumbuh. Untuk meningkatkan profitabilitas, BSI juga terus melakukan efisiensi serta menjaga kualitas aset yang sehat.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain tahun 2024 sebesar Rp152,12 miliar, meningkat 344,95% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp34,19 miliar. Peningkatan pendapatan komprehensif lain terutama dari pengukuran kembali imbalan kerja sebesar Rp171,31 miliar dan revaluasi aset tahun 2024 sebesar Rp108,91 miliar.

Laba Komprehensif

Laba komprehensif tahun 2024 sebesar Rp7,16 triliun, meningkat 24,75% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,74 triliun.

Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar tahun 2024 sebesar Rp151,88, meningkat 22,83 % dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp123,65. Peningkatan laba per saham sejalan dengan pertumbuhan laba pada tahun 2024.

Laporan Arus Kas

Tabel Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan jual beli, bagi hasil, *ijarah* dan usaha utama lainnya	25.260.645	22.356.599	2.904.046	12,99%
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer	(7.854.159)	(5.930.162)	(1.923.997)	32,44%
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	2.097.759	1.703.364	394.395	23,15%
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	4.266.371	3.115.816	1.150.555	36,93%
Pembayaran tantiem	(110.228)	(91.574)	(18.654)	20,37%
Pembayaran beban usaha	(14.283.894)	(12.698.368)	(1.585.526)	12,49%
Penerimaan atas pendapatan nonusaha - bersih	112.287	25.571	86.716	339,12%
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.985.972)	(1.855.197)	(130.775)	7,05%
Pembayaran zakat	(268.348)	(205.881)	(62.467)	30,34%
Penyaluran dana kebajikan	(117.028)	(80.736)	(36.292)	44,95%
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	7.117.433	6.339.432	778.001	12,27%
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				
Surat berharga - diukur pada nilai wajar	(1.472.899)	(3.972.560)	2.499.661	(62,92%)
Surat berharga jangka pendek lainnya	(115.758)	(40.287)	(75.471)	187,33%
Piutang	(7.739.380)	(11.834.760)	4.095.380	(34,60%)
Pinjaman *qardh*	(2.466.703)	(1.605.472)	(861.231)	53,64%
Pembiayaan	(27.026.967)	(18.465.422)	(8.561.545)	46,37%
Tagihan akseptasi	246.083	50.175	195.908	390,45%
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*	(932.147)	(705.535)	(226.612)	32,12%
Aset lain-lain	245.969	(2.886)	248.855	8.622,83%
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	(421.137)	322.716	(743.853)	(230,50%)
Simpanan dari nasabah	6.553.248	1.861.641	4.691.607	252,01%
Simpanan dari bank lain	2.390.047	(457.396)	2.847.443	622,53%
Liabilitas akseptasi	(246.083)	(50.175)	(195.908)	390,45%
Utang pajak	(99.768)	48.173	(147.941)	(307,10%)
Liabilitas lain-lain	3.757.231	283.819	3.473.412	1.223,81%
Kenaikan dana *syirkah* temporer	27.023.092	30.269.572	(3.246.480)	(10,73%)
Kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi	6.812.261	**2.041.035**	**4.771.226**	**233,77%**

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penjualan/pelepasan investasi pada surat berharga	103.380.752	111.080.068	(7.699.316)	(6,93%)
Perolehan surat berharga	(92.955.821)	(120.672.073)	27.716.252	(22,97%)
Hasil penjualan aset tetap	1.274	5.521	(4.247)	(76,92%)
Perolehan aset tetap	(2.935.755)	(826.243)	(2.109.512)	255,31%
Perolehan aset tidak berwujud	(1.144.967)	(991.632)	(153.335)	15,46%
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi	6.345.483	**(11.404.359)**	**17.749.842**	**155,64%**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran liabilitas sewa	(151.913)	(134.742)	(17.171)	12,74%
Pembayaran dividen	(855.561)	(426.018)	(429.543)	100,83%
Pembayaran pembiayaan berjangka *mudharabah*	(7.778.995)	(781.307)	(6.997.688)	895,64%
Penerimaan pembiayaan berjangka *mudharabah*	8.001.935	776.250	7.225.685	930,85%
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan	-	(1.375.000)	1.375.000	(100,00%)
Surat berharga yang diterbitkan	3.015.731	203.759	2.811.972	1.380,05%
Liabilitas kepada Bank Indonesia	6.517.809	11.900.055	(5.382.246)	(45,23%)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	8.749.006	**10.162.997**	**(1.413.991)**	**(13,91%)**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	21.906.750	**799.673**	**21.107.077**	**2.639,46%**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	40.021.092	**39.221.419**	**799.673**	**2,04%**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	61.927.842	**40.021.092**	**21.906.750**	**54,74%**
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				
Kas	8.080.689	5.255.841	2.824.848	53,75%
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49.966.279	32.440.778	17.525.501	54,02%
Giro dan penempatan pada bank lain	3.880.874	2.324.473	1.556.401	66,96%
JUMLAH	61.927.842	**40.021.092**	**21.906.750**	**54,74%**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi tahun 2024 sebesar Rp6,81 triliun, meningkat 233,77% dibandingkan dengan kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi tahun 2023 yang sebesar Rp2,04 triliun. Peningkatan terutama dari simpanan nasabah sebesar Rp4,69 triliun dan pendapatan penerimaan jual beli, bagi hasil, ijarah dan usaha utama lain sebesar Rp2,90 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi tahun 2024 sebesar Rp6,35 triliun, berbanding terbalik dengan tahun 2023 yang mencatatkan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar negatif Rp11,40 triliun. Pada tahun 2024 lebih banyak melakukan penjualan/pelepasan dibandingkan dengan perolehan surat berharga sehingga kas bersih dari investasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2024 sebesar Rp8,75 triliun, menurun 13,91% dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan tahun 2023 yang sebesar Rp10,16 triliun. Liabilitas kepada Bank Indonesia di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5,38 triliun dibandingkan dengan tahun 2023 menjadi penyebab penurunan arus kas aktivitas pendanaan.

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Tabel Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	25.298.203	22.251.743	3.046.460	13,69%
Pengurangan				
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:				
Pendapatan dari jual beli	(620.300)	(623.425)	3.125	(0,50%)
Pendapatan bagi hasil	(79.292)	(44.429)	(34.863)	78,47%
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	(75.137)	(104.229)	29.092	(27,91%)
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	(33.132)	(29.685)	(3.447)	11,61%
Pendapatan usaha utama lainnya	(979.776)	(889.375)	(90.401)	10,16%
	(1.787.637)	(1.691.143)	(96.494)	5,71%
Penambahan				
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:				
Pendapatan dari jual beli	623.425	588.556	34.869	5,92%
Pendapatan bagi hasil	44.429	25.972	18.457	71,06%
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal	104.229	43.778	60.451	138,09%
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	29.685	20.093	9.592	47,74%
Pendapatan usaha utama lainnya	889.375	898.140	(8.765)	(0,98%)
	1.691.143	1.576.539	114.604	7,27%
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	25.201.709	22.137.139	3.064.570	13,84%
Hak bagi hasil milik Bank	(17.312.680)	(16.143.971)	(1.168.709)	7,24%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	7.889.029	5.993.168	1.895.861	31,63%
Dirinci atas:				
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	7.597.451	5.737.236	1.860.215	32,42%
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	291.578	255.932	35.646	13,93%
Jumlah	7.889.029	5.993.168	1.895.861	31,63%

Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* tahun 2024 sebesar Rp25,30 triliun, meningkat 13,69% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp22,25 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp2,06 triliun atau 34,69% dibandingkan dengan tahun 2023.

Pendapatan Tahun Berjalan yang Kas atau Setara Kasnya Belum Diterima

Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima tahun 2024 sebesar Rp1,79 triliun, meningkat 5,71% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,69 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan pertumbuhan pendapatan usaha utama lainnya sebesar Rp90,40 miliar.

Pendapatan Tahun Sebelumnya yang Kas atau Setara Kasnya Diterima pada Tahun Berjalan

Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp1,69 triliun, meningkat 7,27% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,58 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan pertumbuhan pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal.

Pendapatan yang Tersedia Untuk Bagi Hasil

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil tahun 2024 sebesar Rp25,20 triliun, meningkat 13,84% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp22,14 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*.

Hak Bagi Hasil Milik Bank

Hak bagi hasil milik bank tahun 2024 sebesar Rp17,31 triliun, meningkat 7,24% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp16,14 triliun.

Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil tahun 2024 sebesar Rp7,89 triliun, meningkat 31,63% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp5,99 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan pertumbuhan deposito *mudharabah* dan giro *mudharabah*.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sumber dana zakat				
Internal bank	232.061	189.730	42.331	22,31%
Eksternal bank				
Pegawai	36.452	33.041	3.411	10,32%
Nasabah dan umum	38.743	34.731	4.012	11,55%
	307.256	257.502	49.754	19,32%
Penyaluran dana zakat				
Disalurkan ke lembaga lain	(268.348)	(205.881)	(62.467)	30,34%
Penurunan dana zakat	38.908	51.621	(12.713)	(24,63%)
Saldo awal dana zakat	196.774	**145.153**	**51.621**	**35,56%**
Saldo akhir dana zakat	235.682	**196.774**	**38.908**	**19,77%**

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui *platform E-Channel* Bank dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.

Sumber Dana Zakat

Sumber dana zakat tahun 2024 sebesar Rp307,26 miliar, meningkat 19,32% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp257,50 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pertumbuhan sumber dana zakat dari internal bank sebesar Rp42,33 miliar.

Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat tahun 2024 sebesar Rp268,35 miliar, meningkat 30,34% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp205,88 miliar. Dana zakat BSI disalurkan melalui Lembaga dan Badan Amil zakat.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Nominal	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sumber dana kebajikan				
Infaq dan *shadaqah*	84.691	63.947	20.744	32,44%
Denda	21.972	17.915	4.057	22,65%
Pendapatan non halal	1.240	1.733	(493)	(28,45%)
Lainnya	4.094	-	4.094	100,00%
	111.997	83.595	28.402	33,98%
Penggunaan dana kebajikan				
Sumbangan	(117.028)	(80.736)	(36.292)	44,95%
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan	(5.031)	2.859	(7.890)	(275,97%)
Saldo awal dana kebajikan	9.907	**7.048**	**2.859**	**40,56%**
Saldo akhir dana kebajikan	4.876	**9.907**	**(5.031)**	**(50,78%)**

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Dana Kebajikan berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta *infaq* dan *shadaqah* yang berasal dari *E-Channel*. *Infaq* dan *shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Lainnya terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga, rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

Sumber Dana Kebajikan

Total sumber dana kebajikan tahun 2024 sebesar Rp111,99 miliar, meningkat 33,98% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp83,60 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan *infaq* dan *shadaqah* pada tahun 2024 sebesarRp20,74 miliar.

Penggunaan Dana Kebajikan

Penggunaan dana kebajikan tahun 2024 sebesar Rp117,03 miliar, meningkat 44,95% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp80,74 miliar. Hal tersebut disebabkan kenaikan sumbangan pada tahun 2024.

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Selama tahun 2023-2024 distribusi bagi hasil untuk aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Penghimpunan Dana

Total saldo rata-rata penghimpunan dana tahun 2024 sebesar Rp231,61 triliun dengan total pendapatan yang akan dibagihasilkan sebesar Rp1,74 triliun. Sedangkan total saldo rata-rata penghimpunan dana tahun 2023 sebesar Rp208,43 triliun dengan total pendapatan yang akan dibagihasilkan sebesar Rp1,57 triliun.

Tabel Laporan Distribusi Bagi Hasil Penghimpunan Dana Tahun 2024

Jenis Penghimpunan Dana	*Net Revenue Sharing*					*Profit Sharing*				
	Saldo Rata-Rata	Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana			Saldo Rata-Rata	Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi *Rate of Return* (%)			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi *Rate of Return* (%)
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1. Liabilitas kepada bank lain	297.754	2.231	20,44	456	1,84	-	-	-	-	-
2. Giro *mudharabah*	35.781.434	268.101	43,07	115.482	3,87	-	-	-	-	-
3. Tabungan *mudharabah*	78.679.701	589.527	5,71	33.675	0,51	-	-	-	-	-
4. Deposito *mudharabah*	112.646.493	844.033	-	221.594	-	-	-	-	-	-
a. 1 Bulan	61.879.491	463.648	25,19	116.783	2,26	-	-	-	-	-
b. 3 Bulan	29.533.162	221.285	27,69	61.275	2,49	-	-	-	-	-
c. 6 Bulan	12.711.555	95.245	28,15	26.814	2,53	-	-	-	-	-
d. 12 Bulan	8.522.285	63.855	26,19	16.722	2,35	-	-	-	-	-
5. Surat berharga yang diterbitkan	3.200.000	26.397	68,52	18.086	6,78	-	-	-	-	-
6. Pembiayaan yang diterima	1.000.000	7.493	75,63	5.667	6,80	-	-	-	-	-
Jumlah	231.605.382	1.737.782	-	394.960	-	-	-	-	-	-

Tabel Laporan Distribusi Bagi Hasil Penghimpunan Dana Tahun 2023

Jenis Penghimpunan Dana	*Net Revenue Sharing*					*Profit Sharing*				
	Saldo Rata-Rata	Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana			Saldo Rata-Rata	Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi *Rate of Return* (%)			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi *Rate of Return* (%)
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1. Liabilitas kepada bank lain	389.564	2.930	20,31	595	1,83	-	-	-	-	-
2. Giro *mudharabah*	30.295.642	227.875	46,97	107.044	4,24	-	-	-	-	-
3. Tabungan *mudharabah*	72.646.672	546.426	7,53	41.172	0,68	-	-	-	-	-
4. Deposito *mudharabah*	104.125.452	783.200	-	211.707	-	-	-	-	-	-
a. 1 Bulan	59.224.732	445.471	26,74	119.118	2,41	-	-	-	-	-
b. 3 Bulan	26.030.204	195.791	27,68	54.186	2,50	-	-	-	-	-
c. 6 Bulan	8.308.741	62.496	28,10	17.559	2,54	-	-	-	-	-
d. 12 Bulan	10.561.775	79.442	26,24	20.844	2,37	-	-	-	-	-
5. Surat berharga yang diterbitkan	200.000	1.504	87,57	1.317	7,90	-	-	-	-	-
6. Pembiayaan yang diterima	776.250	5.839	71,45	4.172	6,45	-	-	-	-	-
Jumlah	208.433.580	1.567.774	-	366.007	-	-	-	-	-	-

Penyaluran Dana

Total saldo rata-rata penyaluran dana tahun 2024 sebesar Rp290,48 triliun dengan total pendapatan yang akan dibagihasilkan sebesar Rp2,09 triliun. Sedangkan total saldo rata-rata penyaluran dana tahun 2023 sebesar Rp260,63 triliun dengan total pendapatan yang akan dibagihasilkan sebesar Rp1,85 triliun.

Tabel Laporan Distribusi Bagi Hasil Penyaluran Dana

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Penyaluran Dana	2024		2023	
	Saldo Rata- Rata	Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan	Saldo Rata- Rata	Pendapatan Yang Akan Dibagihasilkan
	A	B	A	B
Penempatan pada bank lain	578.681	69	349.737	-
Surat berharga yang dimiliki	42.918.753	238.435	47.197.896	246.704
Piutang *murabahah*	133.680.881	1.107.156	127.477.713	1.049.102
Piutang *istishna*	13	10	32	8
Piutang multijasa	173.810	1.535	207.950	1.975
Pembiayaan gadai	-	-	-	-
Pembiayaan *mudharabah*	2.702.825	10.065	1.770.933	6.591
Pembiayaan *musyarakah*	107.209.841	711.969	81.363.476	530.526
Pembiayaan sewa	3.214.823	19.841	2.260.540	14.527
Pembiayaan lainnya	-	-	-	-
Total	290.479.627	2.089.080	**260.628.277**	**1.849.433**

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Perlindungan Hak Kreditur

BSI memiliki kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur, salah satunya melalui hak pemegang sukuk *mudharabah*. Hak pemegang sukuk *mudharabah* adalah paripassu (setara), tanpa hak preferen, dengan hak-hak kreditur BSI lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di masa depan, kecuali hak-hak kreditur BSI yang dijamin secara khusus dengan kekayaan BSI, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Perlindungan terhadap kreditur mencakup kewajiban BSI untuk membayar seluruh jumlah uang kepada pemegang sukuk *mudharabah*, yang terdiri dari dana sukuk *mudharabah*, pendapatan bagi hasil, dan denda keterlambatan (jika ada). Pembayaran tersebut wajib dilakukan pada tanggal pembayaran kembali dana sukuk *mudharabah* dan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk *mudharabah* (mana yang relevan).

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pembiayaan, likuiditas aset, kewajiban dengan pihak ketiga, dan komitmen pembiayaan kepada debitur. Kecukupan likuiditas Bank dapat dilihat dari Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (*Financing to Deposit Ratio*/FDR). Perhitungan rasio FDR mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

(dalam %)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)
Financing to Deposit Ratio (FDR)	84,97%	81,73%	3,24%

FDR tahun 2024 sebesar 84,97%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 81,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana (pembiayaan) di tahun 2024 lebih optimal dibandingkan tahun 2023 sehingga pertumbuhan pembiayaan lebih tinggi sebesar Rp38,15 triliun atau 15,89% dibandingkan dengan peningkatan DPK sebesar Rp33,68 triliun atau 11,46% secara *year on year*.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Bank mengukur solvabilitas melalui rasio kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio*/CAR). Bank memastikan kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Perhitungan rasio CAR mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Tabel Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

(dalam %)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,40%	21,04%	0,36%

CAR tahun 2024 sebesar 21,40%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 21,04%. Peningkatan perolehan laba bersih pada tahun 2024 menjadi faktor peningkatan modal. Rasio ini juga menunjukkan solvabilitas Bank baik karena telah melebihi minimal *requirement* rasio CAR dari Regulator sehingga mampu mengantisipasi seluruh risiko baik risiko kredit, risiko pasar maupun risiko operasional.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek - Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek-efek yang diterbitkan BSI yaitu sukuk. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek Yang Diterbitkan

Uraian	Peringkat	
	2024	2023
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2023	$_{id}$AA (sy) oleh (Pefindo)	$_{id}$AA (sy) oleh (Pefindo)
Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024	$_{Id}$AAA oleh (Pefindo)	-

Tabel Arti Peringkat

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Arti Peringkat
Pefindo	$_{Id}$AAA	Peringkat tertinggi, menunjukkan bahwa penerbit memiliki kemampuan sangat tinggi untuk memenuhi kewajiban keuangan.
	$_{Id}$AA	ringkat tinggi, menunjukkan kemampuan penerbit untuk membayar utang sangat baik, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan AAA

Kolektibilitas Piutang

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah Bank pada tahun 2024 dan 2023 mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel Rasio Pembiayaan Bermasalah Bank

(dalam %)

Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)
Non Performing Financing (NPF) *Gross*	1,90%	2,08%	(0,18%)
Non Performing Financing (NPF) *Nett*	0,50%	0,55%	(0,05%)

NPF *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2024 sebesar 1,90%, mengalami perbaikan 0,18% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 2,08%. Sedangkan NPF *nett* turun 0,05%, dari 0,55% pada tahun 2023 menjadi 0,50% di tahun 2024. Kualitas pembiayaan yang terjaga dan penyaluran pembiayaan yang selektif di tahun 2024 berdampak pada penurunan atau perbaikan rasio NPF.

Analisis Kualitas Aset Produktif

Pada tahun 2024 total aset produktif pihak terkait dan pihak tidak terkait BSI sebesar Rp346,58 triliun, meningkat 9,35% dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp316,95 triliun. Peningkatan aset produktif didominasi oleh pertumbuhan pembiayaan sebesar Rp38,17 triliun.

Komposisi aset produktif tahun 2024 yang termasuk dalam kategori lancar sebesar Rp336,33 triliun, dalam perhatian khusus sebesar Rp4,97 triliun, kurang lancar sebesar Rp1,32 triliun, diragukan sebesar Rp684,44 miliar, dan macet sebesar Rp3,27 triliun.

Tabel Kualitas Aset Produktif

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL						
		2024						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
A.	**PIHAK TERKAIT**	1.622.945	-	-	-	-	1.622.945	
1	**Penempatan pada bank lain**	128.548	-	-	-	-	128.548	
	a. Rupiah	106.497	-	-	-	-	106.497	
	b. Valuta asing	22.051	-	-	-	-	22.051	
2	**Tagihan *spot* dan *forward***	-	-	-	-	-	-	
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3	**Surat Berharga yang dimiliki**	193.454	-	-	-	-	193.454	
	a. Rupiah	193.454	-	-	-	-	193.454	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
4	**Tagihan akseptasi**	42.433	-	-	-	-	42.433	
5	**Pembiayaan berbasis piutang dan sewa**	57.017	-	-	-	-	57.017	

Tingkat kolektibilitas pembiayaan dapat dilihat dari kelancaran pembayaran pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang telah disalurkan beserta klasifikasi kolektibilitasnya tercermin melalui tabel berikut ini.

Tabel Piutang Berdasarkan Jenis Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024		2023		Kenaikan/Penurunan	
	Pokok	Cadangan kerugian penurunan nilai	Pokok	Cadangan kerugian penurunan nilai	Pokok	Cadangan kerugian penurunan nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2)-(4)	(7) = (3)-(5)
Lancar	268.203.867	4.184.861	230.399.752	3.927.279	37.804.115	257.582
Dalam perhatian khusus	4.998.011	2.225.343	4.929.487	2.088.204	68.524	137.139
Kurang lancar	1.319.945	527.992	1.483.459	706.100	(163.514)	(178.108)
Diragukan	684.435	250.251	866.731	438.182	(182.296)	(187.931)
Macet	3.274.985	3.103.235	2.636.615	2.528.697	638.370	574.538
Total	278.481.243	10.291.682	**240.316.044**	**9.688.462**	**38.165.199**	**603.220**

Total piutang dan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp278,48 triliun, meningkat Rp38,16 triliun dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp240,32 triliun. Piutang dan pembiayaan tahun 2024 dalam kategori lancar sebesar Rp268,20 triliun, dalam perhatian khusus sebesar Rp5,00 triliun, kurang lancar sebesar Rp1,32 miliar, diragukan sebesar Rp684,44 miliar dan macet sebesar Rp3,27 triliun.

INDIVIDUAL						
	2023					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1.527.157	-	-	-	-	**1.527.157**	
105.240	-	-	-	-	**105.240**	
71.630	-	-	-	-	71.630	
33.610	-	-	-	-	33.610	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
147.792	-	-	-	-	**147.792**	
147.792	-	-	-	-	147.792	
-	-	-	-	-	-	
61.610	-	-	-	-	**61.610**	
46.340	-	-	-	-	**46.340**	

No.	POS-POS	INDIVIDUAL						
		2024						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
	a. Nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	
	i, Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	ii, Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan nasabah UMKM	57.017	-	-	-	-	57.017	
	i, Rupiah	57.017	-	-	-	-	57.017	
	ii, Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	
	i, Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	ii, Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6	**Pembiayaan bagi hasil**	1.146.577	-	-	-	-	1.146.577	
	a. Nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	
	i, Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	ii, Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	b. Bukan nasabah UMKM	1.146.577	-	-	-	-	1.146.577	
	i, Rupiah	1.146.577	-	-	-	-	1.146.577	
	ii, Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	
	i, Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	ii, Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
7	**Penyertaan modal**	-	-	-	-	-	-	
8	**Komitmen dan kontinjensi**	54.916	-	-	-	-	54.916	
	a. Rupiah	54.916	-	-	-	-	54.916	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
B.	**PIHAK TIDAK TERKAIT**	334.710.939	4.970.827	1.319.946	684.436	3.274.984	344.961.132	
1	**Penempatan pada bank lain**	1.352.326	-	-	-	-	1.352.326	
	a. Rupiah	193.933	-	-	-	-	193.933	
	b. Valuta asing	1.158.393	-	-	-	-	1.158.393	
2	**Tagihan *spot* dan *forward***	-	-	-	-	-	-	
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
3	**Surat Berharga yang dimiliki**	64.458.351	-	-	-	-	64.458.351	
	a. Rupiah	55.582.680	-	-	-	-	55.582.680	
	b. Valuta asing	8.875.671	-	-	-	-	8.875.671	
4	**Tagihan akseptasi**	147.712	-	-	-	-	147.712	
5	**Pembiayaan berbasis piutang dan sewa**	154.881.030	2.178.512	895.038	555.608	2.169.439	160.679.627	
	a. Nasabah UMKM	35.827.329	528.409	320.714	171.936	437.931	37.286.319	
	i, Rupiah	35.576.086	528.409	320.714	171.936	437.931	37.035.076	
	ii, Valuta asing	251.243	-	-	-	-	251.243	
	b. Bukan nasabah UMKM	119.053.701	1.650.103	574.324	383.672	1.731.508	123.393.308	
	i, Rupiah	116.138.180	1.650.103	574.324	383.672	1.731.508	120.477.787	
	ii, Valuta asing	2.915.521	-	-	-	-	2.915.521	

INDIVIDUAL						
	2023					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	289	-	-	-	-	289
	289	-	-	-	-	289
	-	-	-	-	-	-
	46.051	-	-	-	-	46.051
	46.051	-	-	-	-	46.051
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.084.211	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.084.211**
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	1.084.211	-	-	-	-	1.084.211
	1.084.211	-	-	-	-	1.084.211
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	81.964	**-**	**-**	**-**	**-**	**81.964**
	81.964	-	-	-	-	81.964
	-	-	-	-	-	-
	305.440.046	**4.900.652**	**1.483.459**	**866.730**	**2.735.615**	**315.426.502**
	1.969.233	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.969.233**
	317.627	-	-	-	-	317.627
	1.651.606	-	-	-	-	1.651.606
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	71.304.734	**-**	**-**	**-**	**99.000**	**71.403.734**
	69.304.449	-	-	-	99.000	69.403.449
	2.000.285	-	-	-	-	2.000.285
	369.618	**-**	**-**	**-**	**-**	**369.618**
	144.087.610	**2.193.525**	**856.023**	**693.907**	**1.717.884**	**149.548.949**
	30.419.670	582.952	295.023	246.213	337.464	31.881.322
	30.398.595	582.952	295.023	246.213	337.464	31.860.247
	21.075	-	-	-		21.075
	113.667.940	1.610.573	561.000	447.694	1.380.420	117.667.627
	111.648.069	1.610.573	561.000	447.694	1.380.420	115.647.756
	2.019.871	-	-	-	-	2.019.871

No.	POS-POS	INDIVIDUAL						
		2024						
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi	2.911.577	354.236	302.273	162.287	1.265.413	4.995.786	
	i, Rupiah	2.911.577	354.236	302.273	162.287	1.265.413	4.995.786	
	ii, Valuta asing	-	-	-	-	-	-	
6	**Pembiayaan bagi hasil**	111.526.474	2.791.965	424.908	128.828	1.105.545	115.977.720	
	a. Nasabah UMKM	14.532.326	77.584	101.361	68.284	349.304	15.128.859	
	i, Rupiah	14.064.381	77.584	101.361	68.284	349.304	14.660.914	
	ii, Valuta asing	467.945	-	-	-	-	467.945	
	b. Bukan nasabah UMKM	96.994.148	2.714.381	323.547	60.544	756.241	100.848.861	
	i, Rupiah	94.383.085	2.589.427	158.666	60.544	756.241	97.947.963	
	ii, Valuta asing	2.611.063	124.954	164.881	-	-	2.900.898	
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi	6.991.160	2.574.564	315.893	51.579	794.577	10.727.773	
	i, Rupiah	6.223.892	2.449.610	151.012	51.579	794.577	9.670.670	
	ii, Valuta asing	767.268	124.954	164.881	-	-	1.057.103	
7	**Penyertaan modal**	-	-	-	-	-	-	
8	**Komitmen dan kontinjensi**	2.350.046	350	-	-	-	2.350.396	
	a. Rupiah	1.343.667	350	-	-	-	1.344.017	
	b. Valuta asing	1.006.379	-	-	-	-	1.006.379	
III	INFORMASI LAIN							
1	Total aset bank yang dijaminkan:						19.800.000	
	a. Pada Bank Indonesia						19.800.000	
	b. Pada pihak lain						-	
2	Agunan yang diambil alih						-	

Struktur Permodalan

BSI senantiasa menjaga struktur modal agar tetap opimal dalam rangka menunjang pengembangan usaha BSI.

Rincian Struktur Permodalan

Struktur permodalan Mandiri Syariah terdiri dari Modal Inti (*Tier* 1) dan Modal Pelengkap (*Tier* 2). Adapun rincian struktur modal BSI dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel Rincian Struktur Permodalan

(dalam jutaan Rupiah)

Komponen Modal		Individual	
		2024	2023
I	**Modal Inti (*Tier* I)**	41.685.617	36.095.427
	1. **Modal Inti Utama/*Common Equity Tier* 1 (CET 1)**	41.685.617	36.095.427
	1.1. Modal disetor	22.923.383	22.923.383
	1.2. Cadangan Tambahan Modal	21.699.922	15.503.653

INDIVIDUAL						
	2023					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	4.556.503	687.343	371.121	401.958	1.310.476	7.327.411
	4.474.280	687.343	371.121	401.958	1.310.476	7.245.188
	82.223	-	-	-	-	82.223
	84.587.477	**2.706.652**	**627.436**	**172.823**	**918.731**	**89.013.119**
	12.797.637	153.659	109.497	133.400	298.181	13.492.374
	12.725.685	153.659	109.497	133.400	298.181	13.420.422
	71.952	-	-	-	-	71.952
	71.789.840	2.552.993	517.939	39.423	620.550	75.520.745
	70.020.881	2.552.993	184.145	39.423	620.550	73.417.992
	1.768.959	-	333.794	-	-	2.102.753
	7.487.163	2.523.870	553.633	125.187	752.301	11.442.154
	6.749.120	2.523.870	219.839	125.187	752.301	10.370.317
	738.043	-	333.794	-	-	1.071.837
		-	-	-	-	-
	3.121.374	**475**	-	-	-	**3.121 849**
	2.082.954	475	-	-	-	2.083.429
	1.038.420	-	-	-	-	1.038.420
						12.500.000
						12.500.000
						-
						-

Komponen Modal	Individual	
	2024	2023
1.2.1. Faktor Penambah	29.067.327	22.814.244
1.2.1.1 Penghasilan komprehensif lain	553.440	450.684
1.2.1.1. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	6.154
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	553.440	444.530
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)	28.513.887	22.363.560
1.2.1.2.1 Agio saham biasa	3.381.491	3.381.491
1.2.1.2.2 Cadangan Umum	3.377.462	2.236.713
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	14.678.422	10.970.989

Komponen Modal		Individual	
		2024	2023
	1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	7.005.888	5.703.743
	1.2.1.2.5 Dana setoran modal	-	-
	1.2.1.2.6 Modal sumbangan	-	-
	1.2.1.2.7 Waran yang diterbitkan	-	-
	1.2.1.2.8 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	70.624	70.624
	1.2.2. Faktor Pengurang -/-	7.367.405	7.310.591
	1.2.2.1 Beban komprehensif lain	56.814	-
	1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-
	1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melallui penghasilan komprehensif lain.	56.814	-
	1.2.2.2 Cadangan tambahan modall lainnya (other disclosed reserves)	7.310.591	7.310.591
	1.2.2.2.1 Disagio saham biasa	7.310.591	7.310.591
	1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	-	-
	1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	-	-
	1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	-	-
	1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *Trading Book*	-	-
	1.2.2.2.6 PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk	-	-
	1.3. Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan		
	1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama (-/-)	2.937.688	2.331.609
	1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	2.056.727	1.665.694
	1.4.2 *Goodwill*	-	-
	1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	880.961	665.915
	1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
	1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
	1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-
	1.4.7 Faktor Pengurang modal inti utama lainnya	-	-
	1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
	2. **Modal Inti Tambahan/*Additional Tier* 1 (AT 1)**	-	-
	2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1	-	-
	2.2 Agio/Disagio	-	-
	2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan (-/-)	-	-
	2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain.	-	-
II	**Modal Pelengkap (*Tier* 2)**	2.265.714	**2.019.801**
	1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	160.000	200.000
	2. Agio/Disagio	-	-
	3. Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	2.105.714	1.819.801
	4. Cadangan Tujuan	-	-

Komponen Modal	Individual	
	2024	2023
5. Faktor Pengurang Modal Pelengkap (-/-)	-	-
5.1 *Sinking fund*	-	-
5.2 Penempatan dana pada instrumen *Tier* 2 pada bank lain	-	-
Total Modal	**43.951.331**	**38.115.228**
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO		
ATMR RISIKO KREDIT	168.052.923	145.078.091
ATMR RISIKO PASAR	1.693.430	1.640.536
ATMR RISIKO OPERASIONAL	35.598.536	34.400.820
TOTAL ATMR	205.344.889	181.119.447
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)	9,99	**9,99**
ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO		
Dari CET 1 (%)	8,89	8,88
Dari AT 1 (%)	0,00	0,00
Dari Tier 2 (%)	1,10	**1,11**
RASIO KPMM		
Rasio CET1 (%)	20,30	19,93
Rasio *Tier* 1 (%)	20,30	19,93
Rasio *Tier* 2 (%)	1,10	1,11
Rasio KPMM (%)	21,40	21,04
CET 1 UNTUK *BUFFER* (%)	11,41	**11,05**
PERSENTASE *BUFFER* YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)	3,50	**3,50**
Capital Conservation Buffer (%)	2,50	2,50
Countercyclical Buffer (%)	0,00	0,00
Capital Surcharge untuk bank sistemik (%)	1,00	1,00

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Rencana Permodalan yang disusun oleh BSI didasarkan pada kajian terkini mengenai perkembangan ekonomi, serta hasil analisis terhadap kebutuhan permodalan yang diwajibkan. Direksi menyusun Rencana Permodalan ini sebagai bagian dari Rencana Bisnis BSI, yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris. BSI secara rutin merencanakan dan mengkaji kebutuhan permodalan bersama-sama, dengan didukung oleh data dan analisis yang relevan. Dalam perencanaan ini, BSI selalu menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal dengan risiko yang ada, sehingga bisnis BSI tetap selaras dengan permodalan dan persyaratan likuiditas yang ditetapkan.

Pengelolaan permodalan yang dilakukan BSI bertujuan untuk melindungi kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan demikian, Bank dapat tetap memberikan imbal hasil yang baik bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya serta mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Dalam menghitung kecukupan modal, BSI mengacu kepada ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Pada tahun 2024, rasio kecukupan modal dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar mencapai 21,40%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 21,04%. Rasio tersebut masih di atas rasio kecukupan modal minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang sebesar 9,99%.

Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan

Bagian ini menjelaskan tentang eksposur manajemen risiko, untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan penyelesaian (settlement risk) dan risiko kredit akibat *country risk*.

Berikut adalah infomasi pengungkapan untuk eksposur risiko kredit.

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	109.664.745	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.280.233	13.669.641	1.124.717	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	60.046	3.966.453	529.010	2	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	6.926.650	4.985.024	33.704.441	1.917.984	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	15.888	-	9.574	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	19.781.796	2.820.889	10.456.026	3.564.016	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	26.991.214	4.750.794	27.523.101	4.701.395	
9	Tagihan Kepada Korporasi	18.069.809	19.495.542	31.252.883	17.365.817	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	472.922	129.275	613.660	77.405	
11	Aset Lainnya	3.852.968	11.021.567	3.256.732	778.614	
	Total	78.451.526	170.503.930	108.470.144	28.405.233	

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	103.170.615	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	14.711.814	1.290.564	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional					
4	Tagihan Kepada Bank	97.588	2.400.808	415.155	74	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	6.442.227	4.477.530	28.070.674	2.000.868	

	31 Desember 2024				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	6.000	-	-	-	109.670.745
	-	173.593	-	-	17.248.184
	-	-	-	-	-
	6.518	-	-	-	4.562.029
	1.703.849	924.249	21.134	-	50.183.331
	-	-	-	-	25.462
	6.405.084	2.535.737	314.972	-	45.878.520
	5.239.443	2.804.100	320.054	-	72.330.101
	2.232.909	1.393.640	254.921	816.307	90.881.828
	54.387	63.122	1.163	-	1.411.934
	747.554	319.840	30.091	10.531	20.017.897
	16.395.744	8.214.281	942.335	826.838	412.210.031

	31 Desember 2023				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	-	-	-	-	103.170.615
	-	-	-	-	16.002.378
					-
	10.149	-	-	-	2.923.774
	1.591.560	876.038	19.408	-	43.478.305

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	18.620.732	1.828.532	9.882.078	3.433.883
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	21.605.361	4.494.116	23.503.094	3.426.968
9	Tagihan Kepada Korporasi	15.089.414	18.980.559	27.202.635	12.568.702
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	459.934	141.636	557.261	72.004
11	Aset Lainnya	2.086.523	8.567.744	1.764.624	410.373
	Total	**64.401.779**	**158.773.354**	**92.686.085**	**21.912.872**

Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	83.132.600	12.988.347	7.102.878	6.446.920	-	109.670.745
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	7.093.643	1.708.374	1.417.675	7.028.492	-	17.248.184
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	4.366.607	58.829	86.390	50.203	-	4.562.029
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	192.311	1.436.222	3.686.936	44.867.862	-	50.183.331
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	24.925	-	537	-	-	25.462
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	263.922	2.608.664	5.643.959	37.361.975	-	45.878.520
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	10.210.279	20.301.422	20.122.278	21.696.122	-	72.330.101
9	Tagihan Kepada Korporasi	13.448.867	12.150.297	12.185.301	53.097.363	-	90.881.828
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	169.375	312.207	241.017	689.335	-	1.411.934
11	Aset Lainnya	4.544.744	228.204	411.502	816.158	14.017.289	20.017.897
	Total	123.447.273	51.792.566	50.898.473	172.054.430	14.017.289	412.210.031

	31 Desember 2023				
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	6.923	-	-	-	6.923
	6.027.850	2.182.877	314.674	-	42.290.626
	3.721.270	2.470.361	217.045	-	59.438.215
	1.362.881	668.397	266.108	-	76.138.696
	53.223	51.359	1.752	-	1.337.169
	301.462	102.245	15.413	-	13.248.384
	13.075.318	**6.351.277**	**834.400**	**-**	**358.035.085**

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
		< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	72.061.730	17.904.457	7.139.766	6.064.662	-	103.170.615
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	8.372.624	804.801	1.292.528	5.532.425	-	16.002.378
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	2.632.715	166.911	67.548	56.600	-	2.923.774
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	136.432	1.386.355	2.933.022	39.022.496	-	43.478.305
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	2.838	4.085	-	-	-	6.923
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	158.990	2.189.121	4.484.488	35.458.027	-	42.290.626
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	7.334.172	15.409.195	16.411.344	20.283.504	-	59.438.215
9	Tagihan Kepada Korporasi	13.391.282	10.826.924	12.062.625	39.857.865	-	76.138.696
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	126.385	360.813	241.519	608.452	-	1.337.169
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	13.248.384	13.248.384
	Total	**104.217.168**	**49.052.662**	**44.632.840**	**146.884.031**	**13.248.384**	**358.035.085**

Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2024				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi				
		Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	1.472.686	-	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	4.613.129	-	-	
6	Konstruksi	-	4.892.368	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	4.362	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	26.642	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	1.998.701	-	-	
10	Perantara Keuangan	-	2.951.398	-	4.562.029	
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	905	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.000	16.973	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	
20	Lainnya	109.664.745	1.271.020	-	-	
	Total	109.670.745	17.248.184	-	4.562.029	

	31 Desember 2024						
	Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi						
	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	7.173	4.947.837	18.345.784	45.618	-
	-	-	24.232	480.937	148.506	21.206	-
	-	-	274	10.753	2.012.429	814	-
	-	-	-	2.058.593	8.719.289	69.453	-
	-	-	214	20.078	1.878.074	5.539	-
	-	13.339	-	212.130	10.895.537	17.778	-
	-	537	29.663	13.089.975	5.693.149	264.057	-
	-	-	-	2.595.791	485.082	27.069	-
	-	-	-	622.683	4.570.139	7.590	-
	-	-	-	5.307	2.538.365	-	-
	-	11.586	-	909.563	4.342.281	26.228	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	610	241.920	4.641.879	16.070	-
	-	-	76	605.551	8.740.039	13.192	-
	-	-	20.566	3.214.804	340.561	35.577	-
	-	-	1.156	48.432	106.679	1.333	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	50.152.924	-	45.697.824	43.017.819	11.460.151	846.539	-
	30.407	-	96.732	247.928	5.963.884	13.871	20.017.897
	50.183.331	25.462	45.878.520	72.330.101	90.881.828	1.411.934	20.017.897

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2023				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi				
		Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	-	-	-	
2	Perikanan	-	-	-	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	1.626.317	-	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	2.494.067	-	-	
6	Konstruksi	-	7.721.197	-	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	4.396	-	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	33.962	-	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	2.041.457	-	-	
10	Perantara Keuangan	1.477.500	1.914.403	-	2.923.774	
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	4.773	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	
20	Lainnya	101.693.115	161.806	-	-	
	Total	**103.170.615**	**16.002.378**	**-**	**2.923.774**	

Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

Tabel Tagihan dan Pencadangan Wilayah 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Tagihan	79.382.614	175.127.526	110.713.860	28.556.868	
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)					
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-	-	
	b. Telah jatuh tempo	435.857	337.410	1.885.300	87.820	

	31 Desember 2023						
	Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi						
	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	6.887	3.982.793	12.905.205	52.783	-
	-	-	36.565	509.077	159.083	22.032	-
	-	-	524	12.959	2.381.173	371	-
	-	-	-	1.989.441	6.645.375	108.231	-
	-	-	278	22.155	1.912.413	79.225	-
	-	2.838	-	251.498	10.127.445	16.147	-
	-	-	40.385	11.031.920	5.626.602	228.937	-
	-	-	-	2.116.903	552.189	17.931	-
	-	-	-	476.943	5.767.581	8.902	-
	-	-	-	8.653	2.203.147	25	-
	-	4.085	46	750.292	3.063.358	16.510	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	875	217.044	4.256.304	12.876	-
	-	-	87	512.887	6.275.028	12.155	-
	-	-	32.982	2.806.221	383.267	28.213	-
	-	-	1.999	56.984	90.673	4.817	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	43.478.305	-	42.169.998	34.457.183	9.176.638	728.014	-
	-	-	-	235.262	4.613.215	-	13.248.384
	43.478.305	**6.923**	**42.290.626**	**59.438.215**	**76.138.696**	**1.337.169**	**13.248.384**

	31 Desember 2024				
	Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah				
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	16.652.814	8.328.627	944.954	826.837	420.534.100
					-
	-	-	-	-	-
	59.899	85.283	452	-	2.892.021

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3	CKPN - Individual	136.972	122.531	917.296	12.945	
4	CKPN - Kolektif	1.767.405	3.166.576	3.141.762	466.470	
5	Tagihan yang dihapus buku	673.874	369.645	701.896	119.191	

Tabel Tagihan dan Pencadangan Wilayah 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024				
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah				
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Tagihan	65.761.040	161.621.708	95.903.476	22.212.087	
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)					
	a. Belum jatuh tempo	730.707	701.541	961.823	170.913	
	b. Telah jatuh tempo	459.934	3.436	695.461	72.004	
3	CKPN - Individual	105.827	-	1.109.150	45.428	
4	CKPN - Kolektif	1.605.132	175.726	5.861.667	429.867	
5	Tagihan yang dihapus buku	809.630	351.360	801.714	174.710	

Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Tabel Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2024					
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi					
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	23.556.861	-	142.741	96.646	492.456	83.933
2	Perikanan	721.124	-	25.507	-	44.793	36.510
3	Pertambangan dan Penggalian	2.988.549	-	1.695	-	73.598	7.411
4	Industri Pengolahan	12.766.347	-	1.355.912	982.610	566.197	124.642
5	Listrik, Gas, dan Air	6.756.528	-	176.698	6.911	297.905	2.679
6	Konstruksi	18.854.569	-	89.203	16.227	2.756.665	64.125
7	Perdagangan Besar dan Eceran	19.760.092	-	346.934	44.984	1.018.249	427.267
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	3.205.453	-	28.233	26.783	88.115	46.273

	31 Desember 2024				
	Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah				
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1.874	-	-	-	1.191.618
	407.436	209.914	15.106	1.388	9.176.057
	122.720	62.023	674	-	2.050.023

	31 Desember 2024				
	Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah				
	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	13.393.190	6.469.668	842.747		366.203.916
					-
	214.912	61.046	6.533		2.847.475
	53.223	51.359	1.752		1.337.169
	10.855	-	-	-	1.271.260
	355.063	169.014	10.313	-	8.606.782
	152.899	107.817	947		2.399.077

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2024					
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi					
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	8.655.161	-	25.159	1.208	199.040	33.914
10	Perantara Keuangan	5.806.865	-	64.985	444	132.367	8.398
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5.299.533	-	48.079	51	128.609	26.229
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	4.933.254	-	35.757	7.670	81.390	4.351
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.405.957	-	10.699	6.064	117.078	14.172
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.733.202	-	34.950	18	100.269	64.099

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2024					
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi					
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	168.052	-	8.555	-	12.080	2.714
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	152.126.049	-	496.914	2.002	2.991.548	1.092.685
20	Lainnya	141.796.504	-	-	-	75.698	10.621
	Total	420.534.100	-	2.892.021	1.191.618	9.176.057	2.050.023

Tabel Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2023					
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi					
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	17.131.131	133.442	52.783	119.383	454.505	165.014
2	Perikanan	769.618	19.492	22.032	-	54.915	70.195
3	Pertambangan dan Penggalian	2.416.126	2.764	371	-	25.569	14.190
4	Industri Pengolahan	11.833.328	60.305	108.231	1.012.820	559.615	118.677
5	Listrik, Gas, dan Air	4.769.409	653	79.225	4.194	304.908	638
6	Konstruksi	19.943.956	562.411	16.147	13.593	2.638.405	108.223
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17.638.778	385.962	228.937	31.008	890.958	626.022
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	2.762.902	41.774	17.931	9.843	104.130	38.748
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	8.364.049	40.055	8.902	18.810	271.665	32.293
10	Perantara Keuangan	6.009.903	32.524	25	2.594	111.278	3.686
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.913.493	26.436	16.510	7.139	103.448	81.199
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2023					
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi					
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Jasa Pendidikan	4.526.632	6.526	12.876	14.797	68.162	35.848
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.911.573	9.345	12.155	4.789	94.183	5.063
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.321.171	45.009	28.213	-	145.941	76.339
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	161.075	1.628	4.817	-	8.907	6.519
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	131.922.983	1.479.149	728.014	32.290	2.580.613	1.001.814
20	Lainnya	123.807.789	-	-	-	189.580	14.609
	Total	**366.203.916**	**2.847.475**	**1.337.169**	**1.271.260**	**8.606.782**	**2.399.077**

Rincian Mutasi CKPN

Tabel Rincian Mutasi CKPN 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
		Rincian Mutasi CKPN		Rincian Mutasi CKPN	
		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	CKPN - Individual	CKPN - Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo awal CKPN	1.271.260	8.606.782	1.463.363	7.794.920
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (Net)				
	2.a Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan	(18.090)	2.012.756	(65.303)	2.715.512
	2.b Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan	5.604	801.238	28.124	583.657
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan	(67.156)	(2.259.494)	(154.924)	(2.481.020)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan	-	14.775	-	(6.287)
	Saldo akhir CKPN	1.191.618	9.176.057	1.271.260	8.606.782

Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Potofolio dan Skala Peringkat 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat						
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang					
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating Internasional	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's Investor Service	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		Fitch Rating Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-	id BB+ s.d idBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		9.561.522	3.983.057	2.235.772	748.112	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank		575.469	1.168	38.718	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal							
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial							
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan Kepada Korporasi		4.174.036	219.085	7.083.663	464.336	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		14.311.027	4.203.310	9.358.153	1.212.448	-	

31 Desember 2024								
Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat								
			Peringkat Jangka Pendek					
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d idA4	Kurang dari idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	109.670.745	109.670.745
	-	-	-	-	-	-	719.721	17.248.184
	-	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	3.946.674	4.562.029
	-	-	-	-	-	-	78.940.708	90.881.828
	-	-	-	-	-	-	193.277.848	222.362.786

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Potofolio dan Skala Peringkat 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023						
		Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat						
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang					
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating Internasional	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's Investor Service	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		Fitch Rating Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-	id BB+ s.d idBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		1.477.500	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		3.408.470	7.521.154	2.397.641	900.831	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						-	
4	Tagihan Kepada Bank		640.134	41.695	42.956	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal							
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial							
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan							
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel							
9	Tagihan Kepada Korporasi		1.812.597	985.431	7.689.512	989.450	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo							
11	Aset Lainnya							
	Total		7.338.701	8.548.280	10.130.109	1.890.281	-	

31 Desember 2023								
Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat								
			Peringkat Jangka Pendek					
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d idA4	Kurang dari idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	101.693.115	103.170.615
	-	-	-	-	-	-	1.774.282	16.002.378
	-	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	2.198.989	2.923.774
	-	-	-	-	-	-	64.661.706	76.138.696
	-	-	-	-	-	-	170.328.092	198.235.463

Risiko Kredit Pihak Lawan

Transaksi Linding Nilai Syariah *Over The Counter*

Tabel Transaksi Lindung Nilai Syariah 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2024			
		Transaksi Lindung Nilai Syariah OTC			
		Nilai Nosional			
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	*Shariah compliant profit rate swap*	-	-	-	
2	*Shariah compliant foreign currency swap*	-	-	-	
3	Lainnya	-	-	-	
	Total	-	-	-	

Tabel Transaksi Lindung Nilai Syariah 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Variabel yang Mendasari	31 Desember 2023			
		Transaksi Lindung Nilai Syariah OTC			
		Nilai Nosional			
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	*Shariah compliant profit rate swap*	-	-	-	
2	*Shariah compliant foreign currency swap*	-	-	-	
3	Lainnya	-	-	-	
	Total	-	-	-	

Transaksi *Repo*

Tabel Transaksi Repo 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			
		Transaksi Repo			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

	31 Desember 2024				
	Transaksi Lindung Nilai Syariah OTC				
	Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

	31 Desember 2023				
	Transaksi Lindung Nilai Syariah OTC				
	Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Tabel Transaksi Repo 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Transaksi REPO			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

Transaksi *Reverse Repo*

Tabel Transaksi *Reverse Repo* 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			
		Reverse Repo			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit 31 Desember 2024

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024						
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	109.670.745	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	1.810.116	11.950.061	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	2.450.880	1.785.101	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	25	9.001.871	12.069.393	29.112.042	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	366	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	12.794.242	17.705.235	-	-	-	-	

Tabel Transaksi *Reverse Repo* 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Reverse Repo			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-

	31 Desember 2024					ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-		-	-
	3.238.158	-	-	-		4.009.091	320.727
	-	-	-	-		-	-
	288.920	-	-	-		501.480	40.118
	-	-	-	-		15.006.937	1.200.555
	-	-	25.462	-		25.462	2.037
	45.878.154	-	-	-		22.939.077	1.835.126
	-	40.972.039	-	-		34.270.076	2.741.606

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024						
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	
9	Tagihan Kepada Korporasi	6.111.236	4.430.277	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.399	193.102	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	8.084.179	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	140.923.188	35.155.455	9.854.950	26.060.136	-	-	
B	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	27.161	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	-	27.161	-	-	-	-	
C	**Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi		-					
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	-	-	-	-	-	-	

	31 Desember 2024					ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	6.998.663	-	72.164.746	-		76.550.133	6.124.011
	-	-	1.212.947	-		1.251.567	100.125
	-	-	11.933.717	-		11.933.717	954.697
	54.648.358	38.234.728	68.061.494	260.099		166.487.540	13.319.002
	-	-	-	-		-	-
	249.848	-	-	-		124.924	9.994
	-	-	-	-		-	-
	9.967	-	-	-		10.416	833
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	858.585	-	-		643.939	51.515
	-	-	1.176.906	-		1.176.906	94.152
	-	-	4.485	-		4.485	359
	79.268	871.110	1.764.001	25.938		1.960.670	156.853
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-		-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit 31 Desember 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	45%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	**Eksposur Laporan Posisi Keuangan**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	103.170.615	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.095.788	9.048.574	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	67.191	2.599.896	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	45	7.563.174	9.854.950	26.060.136	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	508	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	7.345.096	12.987.280	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.034.024	2.830.393	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.242	126.138	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	5.255.841	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**122.971.350**	**35.155.455**	**9.854.950**	**26.060.136**	**-**	**-**
B	**Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	48.196	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**-**	**48.196**	**-**	**-**	**-**	**-**

	31 Desember 2023					ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-	-	-	-	-	-	-
	4.597.916	-	-	260.099	-	4.498.821	359.906
	-	-	-	-	-	-	-
	198.327	-	-	-	-	619.143	49.531
	-	-	-	-	-	13.097.420	1.047.794
	-	-	6.923	-	-	6.923	554
	42.290.118	-	-	-	-	21.145.059	1.691.605
	-	38.234.728	-	-	-	31.273.502	2.501.880
	7.561.997	-	58.856.675	-	-	63.203.752	5.056.300
	-	-	1.205.353	-	-	1.230.581	98.446
	-	-	7.992.543	-	-	7.992.543	639.403
	54.648.358	**38.234.728**	**68.061.494**	**260.099**		**143.067.744**	**11.445.419**
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	10.164	-	-	-		14.721	1.178
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	871.110	-	-		653.333	52.267
	69.104	-	1.760.564	25.938		1.834.023	146.722
	-	-	3.437	-		3.437	275
	79.268	**871.110**	**1.764.001**	**25.938**		**2.505.514**	**200.442**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023						
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-			
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-			
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-			
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-			
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-			
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	-	-	-	-			

Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

Tabel Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024						
		Tagihan Bersih dan Teknik MRK						
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin	
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)	
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	109.670.745	-		-		109.670.745	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.998.335	1.810.116		-		15.188.219	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-		-		-	
4	Tagihan Kepada Bank	4.524.902	2.450.880		-		2.074.022	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	50.183.331	25		-		50.183.306	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	25.462	-		-		25.462	
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	45.878.520	366		-		45.878.154	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	71.471.516	12.794.242		17.705.235		40.972.039	

	31 Desember 2023					ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						
	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-		-	-

	31 Desember 2023					
	Tagihan Bersih dan Teknik MRK					
	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)
	103.170.615	-		-		103.170.615
	16.002.378	2.095.788		-		13.906.590
	-	-		-		-
	2.865.414	67.191		-		2.798.223
	43.478.305	45		-		43.478.260
	6.923	-		-		6.923
	42.290.626	508		-		42.290.118
	58.567.105	7.345.096		12.987.280		38.234.729

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024						
		Tagihan Bersih dan Teknik MRK						
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin	
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)	
9	Tagihan Kepada Korporasi	89.704.922	6.111.236		37.156		83.556.530	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.407.449	1.399		193.102		1.212.948	
11	Aset Lainnya	20.017.897	-		-		20.017.897	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	409.883.079	23.168.264	-	17.935.493		368.779.322	
B	Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-		-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	249.848	-	-	-		249.848	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-	
4	Tagihan Kepada Bank	37.127	-	-	-		37.127	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-	
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-		-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	858.585	-	-	-		858.585	
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.176.906	-	-	-		1.176.906	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.485	-	-	-		4.485	
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	2.326.951	-	-	-		2.326.951	
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-		-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-		-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-		-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	-	-	-	-		-	
	Total (A+B+C)	412.210.030	23.168.264	-	17.935.493	-	371.106.273	

	31 Desember 2023					
	Tagihan Bersih dan Teknik MRK					
	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)
	74.283.089	5.034.024		32.365		69.216.700
	1.333.732	2.242		126.138		1.205.352
	13.248.384	-		-		13.248.384
	355.246.571	**14.544.894**		**13.145.783**		**327.555.894**
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	58.359	-	-	-		58.359
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	871.110	-	-	-		871.110
	1.855.607	-	-	-		1.855.607
	3.437	-	-	-		3.437
	2.788.513	**-**	**-**	**-**		**2.788.513**
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-
	358.035.084	**14.544.894**	**-**	**13.145.783**		**330.344.407**

Transaksi Sekuritisasi Aset dalam Hal Bus Bertindak Sebagai Kreditur Awal

Tabel Transaksi Sekuritisasi Aset dalam Hal BUS Bertindak Sebagai Kreditur Awal 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	*Underlying Asset*	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
		Transaksi Sekuritisasi Aset Kreditur Awal		Transaksi Sekuritisasi Aset Kreditur Awal	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/ Kerugian Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/ Kerugian Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	192.490	-	260.485	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Aset Lainnya	-	-	-	-
	Total	192.490	-	**260.485**	**-**

Perhitungan ATMR Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Laporan Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan EksposurAset di Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Eksposur Aset Neraca			Eksposur Aset Neraca		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	109.670.745	-	-	103.170.615	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.998.335	4.435.794	4.009.091	16.002.378	4.982.402	4.498.822
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	4.524.902	1.006.920	501.480	2.865.414	652.738	619.143
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	50.183.331	15.006.942	15.006.937	43.478.305	13.097.429	13.097.419

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Eksposur Aset Neraca			Eksposur Aset Neraca		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	25.462	25.462	25.462	6.923	6.923	6.923
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	45.878.520	22.939.260	22.939.077	42.290.626	21.145.313	21.145.059
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	71.471.516	53.603.637	34.270.076	58.567.105	43.925.329	31.273.502
9	Tagihan Kepada Korporasi	89.704.922	82.648.594	76.550.133	74.283.089	68.213.669	63.203.753
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.407.449	1.407.449	1.251.568	1.333.732	1.333.732	1.230.580
11	Aset Lainnya	20.017.897	-	11.933.717	13.248.384	-	7.992.543
	Total	409.883.078	181.074.058	166.487.542	**355.246.571**	**153.357.535**	**143.067.744**

Laporan Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Tabel Laporan Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Eksposur Komitmen dan Kontinjensi			Eksposur Komitmen dan Kontinjensi		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	249.848	124.924	124.924			
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4	Tagihan Kepada Bank	37.127	10.415	10.415	58.359	14.721	14.721
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	858.585	643.939	643.939	871.110	653.332	653.332
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.176.906	1.176.906	1.176.906	1.855.607	1.834.024	1.834.024
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4.485	4.485	4.485	3.437	3.437	3.437
	Total	2.326.951	1.960.669	1.960.669	**2.788.513**	**2.505.514**	**2.505.514**

Laporan Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

Tabel Laporan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Eksposure Risiko Kredit CCR			Eksposure Risiko Kredit CCR		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-

Laporan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Penyelesaian (*Settlement Risk*)

Tabel Laporan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Penyelesaian (*Settlement Risk*) 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Eksposur Risiko Kredit *Settlement Risk*			Eksposur Risiko Kredit *Settlement Risk*		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	*Delivery versus payment*	-		-	-		-
	a. Beban modal 8% (5-15 hari)	-		-	-		-
	b. Beban modal 50% (16-30 hari)	-		-	-		-
	c. Beban modal 75% (31-45 hari)	-		-	-		-
	d. Beban modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-	-		-
2	*Non-delivery versus payment*	-	-		-	-	
	Total	-	-	-	-	-	-

Laporan Eksposur Sekuritisasi

Tabel Laporan Eksposur Sekuritisasi 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
		Eksposur Sekuritisasi		Eksposur Sekuritisasi	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode External Rating Base Approach (ERBA)		-		-
2	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode Standardized Approach (SA)		8.875		10.831
3	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-		-	
	Total	-	8.875	-	**10.831**

Laporan Total Pengukuran Risiko Kredit

Laporan Total Pengukuran Risiko Kredit 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	168.457.086	145.584.089
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko *benchmark* suku bunga.

Berikut adalah infomasi pengungkapan untuk eksposur risiko pasar.

Laporan Risiko Pasar 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
		Bank		Bank	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko *Benchmark* Suku Bunga	56.023	700.285	55.893	698.668
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	56.023	700.285	55.893	698.668
2	Risiko Nilai Tukar	79.452	993.145	75.350	941.868
3	Risiko Ekuitas [1)]				
4	Risiko Komoditas [1)]				
	Total	135.475	1.693.430	**131.243**	**1.640.536**

Keterangan:
1) Untuk BUS yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan Bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo piutang dan pembiayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya.

Berikut adalah infomasi pengungkapan untuk eksposur risiko likuiditas.

Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah

Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-pos	Saldo	31 Desember 2024					
			Jatuh Tempo *)					
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I	Laporan Posisi Keuangan							
A.	**Aset**	383.068.136	65.447.131	13.293.980	10.889.512	22.341.420	271.096.093	
1.	Kas	7.623.321	7.623.321	-	-	-	-	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	41.470.072	41.470.072	-	-	-	-	
3.	Penempatan pada bank lain	300.430	300.430	-	-	-	-	
4.	Surat berharga yang dimiliki	55.776.134	4.476.080	5.643.665	3.357.983	14.513.511	27.784.895	
5.	Piutang:							
a.	Piutang murabahah (*gross*)	143.652.233	228.408	288.284	700.955	3.195.164	139.239.422	
b.	Piutang *salam*	-	-	-	-	-	-	
c.	Piutang *istishna'*	11	-	-	11	-	-	
d.	Piutang *qardh*	11.507.426	2.462.147	4.109.686	1.409.701	132.499	3.393.393	
6.	Pembiayaan bagi hasil:							
a.	Pembiayaan *mudharabah*	2.914.936	20.669	8.177	2.032.324	57.668	796.098	
b.	Pembiayaan musyarakah	110.840.518	2.292.171	3.243.502	3.385.055	4.211.605	97.708.185	
7.	Pembiayaan sewa	2.410.211	989	666	3.483	230.973	2.174.100	
8.	Aset lainnya	6.572.844	6.572.844	-	-	-	-	
B.	**Liabilitas**	339.321.606	288.673.200	28.086.568	17.504.830	3.536.218	1.520.790	
1.	Dana pihak ketiga							
a.	Giro *wadiah*	17.961.391	17.961.391	-	-	-	-	
b.	Deposito *mudharabah*	123.256.381	75.997.742	28.001.325	15.725.971	3.530.566	777	
c.	Tabungan *wadiah*	54.056.447	54.056.447	-	-	-	-	
d.	Tabungan *mudharabah*	84.630.430	84.630.430	-	-	-	-	
e.	Lainnya	24.492.705	24.492.705	-	-	-	-	
2.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	18.417.864	18.417.864	-	-	-	-	

	Saldo	31 Desember 2023				
		Jatuh Tempo *)				
		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	334.340.403	**51.972.465**	**10.786.045**	**10.785.266**	**23.665.210**	**237.131.418**
	4.912.435	4.912.435	-	-	-	-
	21.401.613	21.401.613	-	-	-	-
	389.257	389.257	-	-	-	-
	69.551.241	16.408.444	3.337.886	2.358.155	15.985.127	31.461.629
	135.797.448	208.608	244.549	566.309	2.229.619	132.548.363
	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	30
	9.348.359	2.126.689	3.818.415	1.460.771	62.825	1.879.659
	1.881.133	17.923	3.506	1.011.544	110.844	737.316
	86.041.493	3.897.471	3.380.288	5.385.407	5.267.590	68.110.737
	2.408.507	1.138	1.401	3.080	9.204	2.393.684
	2.608.887	2.608.887	-	-	-	-
	295.403.060	**256.228.652**	**23.418.538**	**8.649.819**	**6.901.643**	**204.408**
	19.293.355	19.293.355	-	-	-	-
	112.830.232	74.028.280	23.330.092	8.578.629	6.893.231	-
	45.718.046	45.718.046	-	-	-	-
	77.099.281	77.099.281	-	-	-	-
	19.541.100	19.541.100	-	-	-	-
	11.900.055	11.900.055	-	-	-	-

No.	Pos-pos	Saldo	31 Desember 2024					
			Jatuh Tempo *)					
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	3. Liabilitas kepada bank lain	863.788	845.395	8.359	4.382	5.652	-	
	4. Surat berharga yang diterbitkan	6.059.397	2.840.834	-	1.700.000	-	1.518.563	
	5. Pembiayaan yang diterima	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	
	6. Liabilitas lainnya	8.583.203	8.430.392	76.884	74.477	-	1.450	
	C. Laporan Komitmen dan Kontinjensi							
	1. Kewajiban komitmen	2.409.047	220.557	357.436	189.393	170.863	1.470.798	
	2. Kewajiban kontinjensi	1.128.775	372.743	186.529	122.093	170.234	277.176	
	D. Selisih (A-B)	43.746.530	(223.226.069)	(14.792.588)	(6.615.318)	18.805.202	269.575.303	

Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing

Laporan Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pos-pos	Saldo	31 Desember 2024					
			Jatuh Tempo *)					
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
I	Laporan Posisi Keuangan							
	A. Aset	25.545.296	16.742.260	3.102.386	1.026.577	209.212	4.464.861	
	1. Kas	457.368	457.368	-	-	-	-	
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	8.496.207	8.496.207	-	-	-	-	
	3. Penempatan pada bank lain	1.180.444	1.180.444	-	-	-	-	
	4. Surat berharga yang dimiliki	8.875.671	6.202.824	1.932.021	175.440	-	565.386	
	5. Piutang:							
	a. Piutang murabahah (*gross*)	-	-	-	-	-	-	
	b. Piutang *salam*	-	-	-	-	-	-	
	c. Piutang *istishna'*	-	-	-	-	-	-	
	d. Piutang *qardh*	2.266.358	304.776	1.048.330	828.994	84.258	-	
	6. Pembiayaan bagi hasil:							
	a. Pembiayaan *mudharabah*	22.143	-	-	22.143	-	-	
	b. Pembiayaan musyarakah	3.346.700	100.641	122.035	-	124.954	2.999.070	
	7. Pembiayaan sewa	900.405	-	-	-	-	900.405	

	Saldo	31 Desember 2023				
		Jatuh Tempo *)				
		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.086.510	1.039.714	32.951	5.433	8.412	-
	1.708.608	1.505.000	-	-	-	203.608
	776.250	776.250	-	-	-	-
	5.449.623	5.327.571	55.495	65.757	-	800
	4.058.742	**1.223.636**	**276.698**	**241.678**	**575.758**	**1.740.972**
	2.257.318	841.972	132.487	2.424	-	1.280.435
	1.801.424	381.664	144.211	239.254	575.758	460.537
	38.937.343	**(204.256.187)**	**(12.632.493)**	**2.135.447**	**16.763.567**	**236.927.010**

	Saldo	31 Desember 2023				
		Jatuh Tempo *)				
		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	19.283.721	**14.555.894**	**1.190.819**	**912.124**	**310.276**	**2.314.608**
	343.406	343.406	-	-	-	-
	11.039.165	10.654.240	384.925	-	-	-
	1.685.216	1.685.216	-	-	-	-
	2.000.285	1.081.177	463.265	-	157.284	298.559
	82.223	-	-	-	-	82.223
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.958.722	791.855	342.629	801.266	22.972	-
	-	-	-	-	-	-
	2.174.704	-	-	110.858	130.020	1.933.826
	-	-	-	-	-	-

No.	Pos-pos	Saldo	31 Desember 2024					
			Jatuh Tempo *)					
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	8. Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	
B.	**Liabilitas**	24.250.254	23.406.674	437.318	337.209	69.053	-	
	1. Dana pihak ketiga							
	a. Giro *wadiah*	1.185.688	1.185.688	-	-	-	-	
	b. Deposito *mudharabah*	7.327.971	6.484.391	437.318	337.209	69.053	-	
	c. Tabungan *wadiah*	1.223.620	1.223.620	-	-	-	-	
	d. Tabungan *mudharabah*	623.719	623.719	-	-	-	-	
	e. Lainnya	12.695.814	12.695.814	-	-	-	-	
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
	3. Liabilitas kepada bank lain	43	43	-	-	-	-	
	4. Surat berharga yang diterbitkan	1.126.650	1.126.650	-	-	-	-	
	5. Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-	
	6. Liabilitas lainnya	66.749	66.749	-	-	-	-	
C.	**Laporan Komitmen Dan Kontinjensi**							
	1. Kewajiban komitmen	94.429	94.018	411	-	-	-	
	2. Kewajiban kontinjensi	911.951	88.855	102.111	11.032	450.915	259.038	
D.	**Selisih (A-B)**	1.295.042	(6.664.414)	2.665.068	689.368	140.159	4.464.861	

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian/insiden eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Berikut adalah infomasi pengungkapan untuk eksposur risiko operasional.

Laporan Risiko Operasional 2024 dan 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan indikator standar	18.985.886	2.847.883	35.598.536	18.347.104	2.752.066	34.400.820

	Saldo	31 Desember 2023				
		Jatuh Tempo *)				
		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	-	-	-	-	-	-
	19.481.943	**18.745.347**	**262.572**	**67.538**	**406.486**	**-**
	1.554.169	1.554.169	-	-	-	-
	3.017.864	2.281.268	262.572	67.538	406.486	-
	1.308.328	1.308.328	-	-	-	-
	600.789	600.789	-	-	-	-
	12.812.765	12.812.765	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	45	45	-	-	-	-
	123.176	123.176	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	64.807	64.807	-	-	-	-
	2.008	2.008	-	-	-	-
	1.036.413	100.769	46.191	15.495	117.987	755.971
	(198.222)	**(4.198.453)**	**928.247**	**844.586**	**(96.210)**	**2.314.608**

Ikatan Material Investasi Barang Modal

Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapat ikatan material investasi barang modal sehingga BSI tidak menyajikan informasi tujuan dari ikatan, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Investasi Barang Modal

Pada tahun 2024, realisasi penambahan investasi barang modal BSI mencapai Rp3,85 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp1,65 triliun. Aset dalam penyelesaian mengalami peningkatan penambahan yang paling tinggi yaitu sebesar Rp1,27 triliun di tahun 2023 dengan Rp3,39 triliun di tahun 2024.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Realisasi investasi barang modal yang dilakukan BSI sepanjang tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Penambahan Investasi 2024	Penambahan Investasi 2023
(1)	(2)	(3)
Tanah	62	909
Bangunan	27.298	4.096
Instalasi	58.831	22.110
Kendaraan Bermotor	1.011	501
Investasi Kantor	249.465	65.728

Jenis	Penambahan Investasi 2024	Penambahan Investasi 2023
(1)	(2)	(3)
Perangkat Lunak	84.176	276.241
Renovasi atas Aset Sewa	27.095	13.023
Aset dalam Penyelesaian	3.398.166	1.266.390
Total	3.846.104	**1.648.998**

Tujuan Investasi Barang Modal

Tujuan dilakukannya investasi barang modal adalah untuk mendukung dan menunjang aktivitas operasional kegiatan BSI secara menyeluruh, dengan memastikan kelancaran, efisiensi, dan efektivitas dalam setiap aspek operasional.

Komitmen dan Kontinjensi

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut.

Tabel Tagihan dan Liabilitas Komitmen dan Kontijensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023
(1)	(2)	(3)
Tagihan komitmen		
Pihak ketiga		
Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	464.508	-
Liabilitas komitmen		
Pihak ketiga		
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2.090.286	1.775.974
L/C yang tidak dapat dibatalkan	202.609	267.737
Kewajiban subrogasi	140.040	137.094
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	489.752	114.862
	2.922.687	2.295.667
Pihak berelasi		
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	48.602	117.375
L/C yang tidak dapat dibatalkan	161.978	98.238
	210.580	215.613
Liabilitas komitmen - bersih	2.668.759	**2.511.280**
Tagihan kontinjensi		
Pihak ketiga		
Pendapatan dari pembiayaan bermasalah	425.397	335.215
Bank garansi (kafalah) yang diterima	245.046	234.419
Lainnya	35.611	30.923
	706.054	600.557
Liabilitas kontinjensi		
Pihak ketiga		
Garansi yang diterbitkan	1.532.802	2.099.170
Pihak berelasi		
Garansi yang diterbitkan	507.923	738.668
	2.040.725	**2.837.838**
Liabilitas kontinjensi - bersih	1.334.671	**2.237.281**

Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut.

Tabel Transaksi Komitmen dan Kontinjensi yang Mempunyai Risiko Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023
(1)	(2)	(3)
Garansi yang diterbitkan	2.040.725	2.837.838
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2.138.888	1.893.349
L/C yang tidak dapat dibatalkan	364.587	365.975
Total	4.544.200	**5.097.162**

Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut.

Tabel Kolektibilitas Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif yang Mempunyai Risiko Pembiayaan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023
(1)	(2)	(3)
Lancar	4.542.007	5.041.570
Dalam perhatian khusus	2.193	31.313
Kurang lancar	-	15.425
Diragukan	-	-
Macet	-	8.854
Total	4.544.200	**5.097.162**

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontijensi adalah sebagai berikut.

Tabel Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Estimasi Komitmen dan Kontijensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023
(1)	(2)	(3)
Saldo awal tahun	32.017	28.873
Pembentukan selama tahun berjalan	(8.443)	3.246
Selisih kurs	471	(102)
Saldo akhir tahun	24.045	**32.017**

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan atas nilai estimasi komitmen dan kontijensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan ini disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan Tahun 2025

Prospek Usaha

Ekonomi global diperkirakan dalam tren membaik di kisaran 3,3% pada tahun 2025, meski beberapa risiko masih perlu terus diperhatikan. Risiko seperti terhambatnya pemulihan ekonomi Tiongkok dan eskalasi tensi geopolitik di tengah ketidakpastian dari pergantian kepemimpinan Amerika Serikat masih perlu terus dicermati karena berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya di kisaran 4-8%-5,6% didorong oleh permintaan domestik. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid dan dalam *tren* yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid tersebut terutama didorong oleh permintaan domestik diiringi dengan permintaan eksternal yang terus membaik sejalan dengan perbaikan perekonomian global. Namun demikian, sejumlah risiko terkait pemulihan ekonomi global yang lebih lambat dan dampak eskalasi tensi geopolitik global perlu terus diperhatikan karena berpotensi menahan pemulihan kinerja sektor eksternal.

Di tengah tensi geopolitik yang masih tinggi, harga komoditas terus ternormalisasi, sehingga inflasi secara umum, termasuk inflasi domestik, dalam tren yang menurun. Ke depan, inflasi diperkirakan tetap dalam kisaran target, yakni 2,5±1% dan dalam tren yang menurun. Inflasi yang rendah dan terkendali tersebut juga mendukung daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sejumlah risiko, terutama terkait dengan dampak dari eskalasi tensi geopolitik, antara lain berupa kenaikan harga komoditas, termasuk minyak, risiko terkait iklim, dan risiko terkait *imported inflation* dari naiknya harga komoditas global dan dari risiko depresiasi nilai tukar Rupiah perlu terus diperhatikan dan dicermati.

Penurunan suku bunga ke depan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar, sehingga dapat mendukung intermediasi perbankan. Suku bunga BI berdampak terhadap penyesuaian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan kredit dengan kisaran 11%-13% pada tahun 2025. Sementara itu, DPK diperkirakan tumbuh di kisaran 10% pada 2025 sejalan dengan adanya potensi pelonggaran kebijakan moneter BI di tahun 2025. Meski demikian, penurunan BI *rate* berpotensi menyebabkan beralihnya dana ke instrumen keuangan lainnya, yang dapat menahan pertumbuhan DPK. Pada tahun 2025, Bank Indonesia akan mengimplementasikan kebijakan *pro-growth* dengan fokus pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah diperkirakan akan terus melanjutkan tren positif, dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 4,8% hingga 5,6%.

Ke depannya, BSI berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan Syariah yang modern, lengkap, dan universal kepada nasabah dengan melakukan *positioning* untuk menjadi mitra finansial, mitra sosial, dan mitra spiritual bagi nasabah dan masyarakat secara luas.

Sumber:
- *Word Economic Outlook*, International Monetary Fund, Januari 2025
- Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, Februari 2025
- Rapat Dewan Gubernur BI, Bank Indonesia, 17-18 Desember 2024
- Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024, Bank Indonesia 21 Februari 2025.

Analisis SWOT

Mempertimbangkan hal tersebut di atas, BSI melakukan analisis daya saing melalui analisis *Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT). Faktor internal ditunjukkan dalam analisis *strengths* dan *weaknesses* BSI, sementara faktor eksternal melalui analisis *opportunities* dan *threats* dalam industri perbankan saat ini.

Tabel Analisis SWOT

Strengths	*Weaknesses*
- Bank Syariah di Indonesia yang masuk ke dalam Top 10 *Global Islamic Bank*. - Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset. - Memiliki jaringan kantor dan unit kerja yang luas dengan total lebih dari 1.000 jaringan di Indonesia serta jaringan kantor luar negeri di Dubai. - Memiliki jumlah *customer based* yang besar - Produk dan jasa layanan keuangan yang berbasis syariah. - Kualitas pembiayaan yang baik.	- Produktivitas pegawai dan *outlet* yang belum optimal. - Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah.
Opportunities	***Threats***
- Preferensi syariah yang tinggi dari masyarakat atau nasabah. - Pertumbuhan ekonomi syariah global dan nasional. - *Positioning* BSI di industri perbankan syariah yang kuat. - Dukungan dari pemerintah terhadap keuangan syariah. - *Market share* syariah di industri nasional yang masih terbuka luas. - Sinergi Bank Induk.	- Persaingan dengan perbankan konvensional dan *fintech*. - Kondisi geopolitik dan ekonomi global. - Perkembangan teknologi informasi dan keamanan siber.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, BSI optimis memiliki prospek dan peluang yang baik pada masa mendatang, terutama dengan terus berkembangnya industri perbankan syariah dan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Dalam menghadapi prospek dan peluang tersebut, BSI merumuskan strategi untuk mengoptimalkan kinerja bank di tahun 2025.

Strategi ke Depan Tahun 2025

Pada tahun 2025, untuk dapat mencapai visi dan misi dengan fokus strategi sebagai Penyedia *Platform* Keuangan Syariah Terbaik dengan fokus pada Solusi *Financial*, Social, dan Spiritual dengan menggarap *Islamic Ecosystem* sesuai dengan *targeted segment* yaitu:

1. ***Wholesale***
   BSI akan menggarap potensi bisnis *wholesale* dari perusahaan dan group perusahaan dengan meningkatkan *customer based* dan *deepening relationship* dengan nasabah melalui pengembangan kapabilitas transactional banking dan perluasan *value chain*. Bank juga akan memperkuat kolaborasi *wholesale*-retail sebagai *entry gate* untuk menggarap potensi bisnis dari perusahaan atau instansi yang menjadi nasabah *wholesale* seperti potensi *payroll business*, pembiayaan pegawai, *pawning*, dan produk pendanaan.
2. **Institusi/Kelembagaan**
   BSI juga akan menggarap potensi bisnis pada kelembagaan dengan menyasar pada institusi pemerintahan, lembaga negara, BUMN, BUMD, kementerian beserta satuan kerja di bawah kementerian, institusi pendidikan negeri, rumah sakit, serta organ-organ di bawahnya dengan menawarkan produk dan solusi kebutuhan dari institusi yang dapat menjadi solusi *financial* bagi institusi, *vendor* rekanan institusi maupun pegawai institusi tersebut. Sebagai upaya untuk meningkatkan dana murah, bank akan fokus untuk menjadikan BSI sebagai *bank transactional* terutama pada institusi dan kelembagaan dengan mengembangkan produk dan *services* sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti dengan produk *cash management* dengan fitur yang lebih lengkap.
3. **SME dan UMKM**
   BSI juga akan memperkuat bisnis pada segmen SME dan UMKM dengan menyasar pada ekosistem unggulan SME seperti ekosistem inti plasma sawit, kopkar, bisnis *linkage*, jasa pendidikan, jasa kesehatan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan APBN, Travel Haji Umroh, dan BUMN dan Swasta serta menyasar pada pelaku usaha mikro yang produktif, berbasis ekosistem halal, basis *value chain*, dan nasabah eksisting dengan historis lancar. Target segmen ini akan menjadi fokus strategi SME dan UMKM dalam mengelola giro transaksi institusi yang ditargetkan, mengoptimalkan penetrasi pembiayaan SME dari ekosistem yang ditargetkan, serta memastikan penetrasi pembiayaan mikro yang sehat dan *prudent* dengan fokus pada pembiayaan KUR. Selain itu, akan ada pemilihan pertumbuhan produk BSI untuk usaha mikro di ekosistem pasar, supplier grosir, pasar ritel, sektor kesehatan, dan pendidikan yang memiliki *yield* tinggi, serta peningkatan penetrasi melalui BSI Agen.
4. **Konsumer**
   BSI akan terus menjalankan strategi yang terbukti memberikan nilai tambah kepada kinerja perusahaan yaitu mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan sustain salah satunya adalah segmen konsumer melalui program dan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti *SuperApps* BYOND by BSI, Tabungan Haji, produk investasi seperti melalui sukuk ritel dan *bancassurance*, transaksi Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF), serta pembiayaan segmen konsumer melalui produk-produk yang kompetitif di pasar seperti BSI Griya, BSI Oto, Mitraguna Berkah, Pensiun Berkah, Pra Pensiun Berkah, Gadai Emas, dan Cicil Emas.

Dalam mendukung strategi tersebut, BSI akan melakukan penguatan pada *platform* penetrasi bisnis yang dibagi dalam 3 (tiga) besaran yaitu platform fisik seperti Cabang dan BSI Agen, *e-channel* seperti BYOND by BSI, BEWIZE, ATM, EDC, QRIS dan *platform* anorganik/*subsidiaries*.

Untuk mendukung pelaksanaan fokus strategi terhadap target segmen di atas, BSI juga akan melakukan penguatan *fundamental enablers* antara lain pada aspek *Human Capital* melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi pegawai, serta penguatan manajemen organisasi. Di aspek *Information Technology and Operational Excellence*, BSI akan meningkatkan stabilisasi dan *upgrade core banking*, penguatan organisasi 3 (tiga) pilar IT, peningkatan IT *security*, dan *operational excellence*. Di aspek *Environmental*, *Social*, *Risk*, *Governance and Compliance* (ES-GRC), BSI akan melakukan implementasi *Enterprise Risk Management System*, *Resolution Plan*, Anti *Fraud* serta penguatan ESG *Governance* melalui program-program ESG untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sejalan dengan hal tersebut, BSI juga memperkuat aspek data *analytics* dengan membangun infrastruktur yang kuat untuk big data dengan kualitas dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan *artificial intelligence*.

Pencapaian Target dan Target Ke Depan

Pencapaian Target

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan 2024

Informasi perbandingan target dan realisasi keuangan disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	RKAP 2024	Realisasi 2024	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
POSISI KEUANGAN			
Aset	378.370.355	408.613.432	107,99%
Pembiayaan yang Diberikan	272.987.063	278.481.243	102,01%
Dana Pihak Ketiga	321.273.357	327.454.166	101,92%
LABA RUGI			
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	24.704.000	25.298.203	102,41%
Laba Bersih	6.079.690	7.005.888	115,23%
RASIO KEUANGAN (%)			
NPF *Gross*	2,00%	1,90%	105,26%
NPF *Nett*	0,55%	0,50%	110,00%

Pada tahun 2024, total aset BSI tercatat sebesar Rp408,61 triliun, yang melampaui target RKAP/RBB sebesar 107,99%. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berkelanjutan dan adanya kerjasama *bancassurance* yang membantu meningkatkan aliran dana masuk ke bank. Dengan kondisi pasar yang relatif stabil, BSI mampu mengoptimalkan manajemen asetnya, yang mencerminkan pertumbuhan yang solid dan sehat.

Total pembiayaan yang diberikan oleh BSI tahun 2024 mencapai Rp278,48 triliun, yang juga melampaui target RKAP/RBB sebesar 102,01%. Pembiayaan BSI terus mengalami pertumbuhan di semua segmen, yaitu *wholesale*, *retail*, dan konsumer. Fokus utama BSI adalah memastikan kualitas pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan pengelolaan risiko yang hati-hati.

DPK BSI tahun 2024 tercatat sebesar Rp327,45 triliun, dengan pencapaian terhadap target RKAP/RBB sebesar 101,92%. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketatnya persaingan likuiditas di pasar. Meskipun demikian, BSI tetap berhasil mencapai target DPK yang lebih sustain dengan terus meningkatkan agresivitas dalam pertumbuhan *Current Account Saving Account* (CASA), terutama di segmen tabungan. Ini menunjukkan keberhasilan BSI dalam menarik dana dari nasabah, meskipun persaingan likuiditas semakin ketat.

Laba bersih BSI tahun 2024 tercatat sebesar Rp7,00 triliun, yang melebihi target RKAP/RBB dengan pencapaian sebesar 115,23%. Kinerja laba bersih yang sangat baik ini didorong oleh peningkatan pendapatan margin dan bagi hasil, serta pendapatan dari *fee-based income* yang terus berkembang. Selain itu, untuk terus meningkatkan profitabilitas, BSI juga terus melakukan efisiensi biaya yang efektif dan menjaga kualitas aset yang sehat. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sumber pendapatan dan pengendalian biaya secara efisien.

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal 2024

Informasi perbandingan target dan realisasi struktur modal disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	RKAP 2024	Realisasi 2024	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
Modal Inti (*Tier* 1)	41.273.113	41.685.617	101,00%
Modal Pelengkap (*Tier* 2)	2.302.418	2.265.714	98,41%
Total Modal	43.575.531	**43.951.331**	**100,86%**

Total Modal BSI per Desember 2024 sebesar Rp43,95 triliun dengan pencapaian terhadap RKAP/RBB sebesar 100,86%. Hal ini sejalan dengan rasio KPMM yang mencapai 21,40% pada Desember 2024 dengan pencapaian 101,82% dari target. Pencapaian ini didukung oleh pencapaian laba bersih bank yang melebihi target sebesar 115,23%.

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran 2024

Informasi perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Produk	Deskripsi	Realisasi 2024
Rencana Produk Baru Tahun 2024		
Transaksi Online BSI Debit Visa E-commerce	Transaksi *online e-commerce* 3D *Secure* Kartu Debit BSI Visa adalah fitur transaksi *online (e-commerce)* Kartu BSI Debit Visa dengan pengamanan transaksi menggunakan layanan 3DS (Verify by Visa) berupa OTP Transaksi.	Proses perizinan/lapor ke BI
Card Management System BSI Hasanah Card	*Card Management System* BSI Hasanah Card 1. CMS adalah *core banking system* yang akan digunakan oleh CBG untuk memberikan layanan kepada pemegang kartu BSI Hasanah Card, baik dari sisi aktivasi kartu, layanan, otorisasi transaksi, posting/pembukuan, *billing statement*, *maintenance cardholder/customer*, dan lain-lain, 2. CMS BSI Hasanah Card ini sekaligus sebagai pengganti dari CMS yang digunakan oleh CBG saat ini, yaitu Cardlink. 3. BSI akan bekerjasama dengan Artajasa, yang telah tergabung di dalam TPCM, dengan konsep manage service yang akan dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). 4. Pengembangan-pengembangan produk/fitur, termasuk pengembangan modul yang dibutuhkan oleh BSI, akan dilakukan oleh Artajasa. 5. Untuk men-*support* layanan kepada pemegang kartu, modul-modul yang digunakan di CMS, relatif sama dengan yang ada di Cardlink saat ini.	Live
Revamp BSI Mobile	*Revamp* BSI Mobile yaitu pengembangan *platform mobile banking* dengan generasi terbaru yang lebih modern dengan penambahan layanan dan fitur dan dapat terintegrasi dengan *platform* lain.	Live
Pengembangan Transaksi Valas di *Net Banking*	Pengembangan transaksi valas di *net banking* yaitu pengembangan layanan *multi currency* melalui *internet banking*.	Proses perizinan/lapor ke OJK
Limit Qardh Beragun Emas	Limit *qardh* beragun emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp1 miliar untuk setiap nasabah.	Proses perizinan/lapor ke OJK
Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Level 1	Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPPE) merupakan pihak yang menyediakan layanan pemasaran PPE kepada nasabah dan/atau calon nasabah berdasarkan kontrak kerja sama dengan ruang lingkup hanya memberikan referral kepada perusahaan sekuritas.	Piloting untuk *Live*
Transaksi Reksa Dana Online	Transaksi reksa dana secara elektronik yaitu (pembukaan rekening, *subscription*, *redemption* dan *switching*) secara elektronik.	Piloting untuk *Live*
Platform Layanan *Cash Management*	*Platform* layanan *cash management* yang terdiri atas *account payable management*, *account receivable management*, *account liquidity management*, *account administration and information*, serta digital *onboarding* yang ditujukan untuk nasabah segmen *Corporate*, *Institusional*, *Government*, *Small Medium Enterprise* (SME), Koperasi, Perseroan Perorangan.	Live
Sub-registry BI-SSSS	Registry dalam BI-SSSS adalah penambahan aktivitas bank yang menyediakan layanan dalam bentuk transaksi Surat Berharga Negara (SBN) maupun pemerintah daerah yang didukung oleh layanan Bank Indonesia.	Proses perizinan/lapor ke OJK
Financial Institution Bank to *Bank Murabahah Facility*	*Financial institution bank to bank murabahah facility* adalah penghimpunan dan penyaluran dana antar bank dengan memanfaatkan bursa komoditi dengan akad *murabahah*.	Proses perizinan/lapor ke OJK
Penghimpunan Dana (Kartu Tani Digital BLP)	Penyaluran program bantuan sosial untuk mendukung program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan melakukan beberapa pengembangan yaitu: 1. Kartu Tani Digital (BLP) 2. Pelaporan Eksternal (H2H)	Proses Internal

Produk	Deskripsi	Realisasi 2024
BI Fast Tahap 2	BI FAST Tahap 2 kelanjutan project BI Fast tahap 1 yaitu infrastruktur sistem pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara *real time* dan 24 jam 7 hari.	Proses perizinan/lapor ke BI
SNAP *Account Binding* dan *Account Unbinding*	Standarisasi Open API BI SNAP *account binding dan account unbinding* Sejalan dengan program regulator (BI dan OJK) dalam menerapkan layanan *open banking* yang terstandarisasi dalam penerapan teknologi informasi (*Open* API dan *Open Banking*).	Live
Kerjasama *Bancassurance* dengan pola bisnis integrasi	BSI Tabungan Tapenas Reguler adalah tabungan berjangka untuk perorangan dalam mata uang Rupiah dengan jumlah setoran bulanan dan jangka waktu tertentu yang dilengkapi asuransi.	Live
BSI Hasanah Segmen Muda *Contactless*	Turunan produk kartu kredit syariah BSI Hasanah Card yang menyasar young segmen dengan kapabilitas *contactless*.	Proses Internal
BSI Debit Bisnis	Merupakan turunan kartu debit BSI dengan fitur dan keuntungan sesuai kebutuhan nasabah pebisnis.	Live
Kartu Kredit Indonesia (KKI)	Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD)adalah produk pembiayaan berupa kartu yang diberikan kepada nasabah untuk transaksi barang dan jasa dengan sumber pembayaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	Proses perizinan/lapor ke BI
Hasanah Card Lyfe	Hasanah Card Lyfe adalah Fitur BSI Hasanah Card (kartu kredit syariah) dan produk turunannya yang terdapat pada *Super App* BSI (BYOND by BSI) berupa fitur *autobinding*, *virtual card display*, aktivasi, request PIN dan *dashboard* informasi limit, *outstanding*, sisa limit dan lainnya.	Live
Cash Cardless Withdrawal Off Us (CCWL Off Us)	*Cash Cardless Withdrawal* (CCWL) antar bank yaitu transaksi pada mesin ATM BSI dapat digunakan oleh non nasabah dalam bertransaksi penarikan tunai tanpa kartu dan nasabah bank bsi dapat bertransaksi tarik tunai tanpa kartu pada jaringan mesin ATM bank lain.	Live
Fitur *Buyback* BSI Cicil Emas	Produk bank adalah BSI Cicil Emas yang akan tetap dijalankan sesuai mekanisme transaksi eksisting saat ini. Fitur *buyback* merupakan pilihan yang diberikan kepada nasabah ketika nasabah ingin menjual kembali emas dan dibuat sebagai bentuk layanan *after sales*. Pembelian emas akan dilakukan oleh mitra Bank. Peran Bank pada fitur ini adalah sebagai agen yang mempertemukan antara nasabah (penjual emas) dan mitra (pembeli emas). Emas yang telah dibeli oleh mitra disimpan sementara di BSI hingga dilakukan pengambilan oleh mitra (maksimal 7 hari kerja). Seluruh biaya yang timbul atas transaksi fitur *buyback* menjadi kewajiban mitra.	Proses Internal
Cash Wakaf Link Deposit (CWLD) Financing	Produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) merupakan basic produk deposito yang nilai pokoknya akan berfungsi sebagai wakaf uang temporer, dengan bagi hasil depositonya akan langsung dapat dimanfaatkan ke dalam proyek sosial yang akan ditentukan sesuai program yang akan ditetapkan pada setiap seri penerbitan. CWLD Financing merupakan pengembangan lebih *advance* dari CWLD dasar. Dengan CWLD *financing*, proyek sosial dapat direalisasikan lebih awal tanpa menunggu penyelesaian seluruh pembayaran bagi hasil dari pokok depositonya. Dana untuk realisasi program sosial di dapat dari pembiayaan, yang mana *instalment*-nya diambil dari bagi hasil (deposito) bulanan yang didapat. Dengan skema ini proyek akan terealisasi lebih awal dan bagi hasil yang diterima nasabah akan lebih menarik dibanding produk CWLD dasar.	Proses Internal
BSI Investment Account on Balance Sheet	BSI *Investment Account On Balance Sheet* ini merupakan produk yang mengoptimalkan fungsi investasi pada perbankan syariah dengan menghimpun dana dari investor dan menyalurkannya kepada nasabah/instrumen/portfolio yang menarik secara *on balance sheet*, menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*.	Proses Internal
Komoditi Murabahah Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN)	Skema akad *murabahah* komoditi merupakan transaksi penjualan komoditi dengan menegaskan harga beli dan margin keuntungan yang disepakati. Skema ini digunakan untuk produk pembiayaan/penempatan, penghimpunan dana, dan penerbitan sukuk dengan dibatasi untuk mendukung aktivitas Kantor Cabang Luar Negeri.	Proses perizinan/lapor ke OJK
New Trade Finance	Platform E2E *Trade Finance Solutions* dan Document *Pre Checking Automation with Smart* AI.	Proses Internal

Produk	Deskripsi	Realisasi 2024
Global Transaction Sharia/ BEWIZE	Global Transaction Sharia (GTS) merupakan *platform digital* yang dirancang oleh tim BSI untuk menunjang inisiatif bisnis *wholesale* dengan menerapkan *Single Sign on Access* (SSO) untuk semua sub *system banking* yang terintegrasi dalam GTS sehingga nasabah dapat mengakses layanan *cash management*, *value chain*, *trade finance* dan layanan lainnya.	Proses Internal
BSI *Daily Kafalah*	Fasilitas BSI Daily Kafalah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah dengan perjanjian *line facility* untuk tujuan realisasi pembiayaan penjaminan dan modal kerja PRKS dengan menggunakan akad *kafalah bil ujrah* dan/atau akad *musyarakah*.	Proses Internal
Lindung Nilai (*Hedging*) Sederhana Multi Spot Syariah	Produk Lindung Nilai Sederhana *Multi Spot* Syariah merupakan transaksi lindung nilai sederhana *(Aqd al Tahawwuth al-Basith)*. Rangkaian transaksi terdiri dari 1 kali *Wa'd* disertai dengan beberapa kali akad transaksi *spot* sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.	Live
Sukuk Tapera Tahap III	Merupakan sukuk tanpa penawaran umum yang dilakukan bertahap dengan investor tunggal yaitu BP Tapera.	Proses perizinan/lapor ke OJK
Revitalisasi Fitur Limit Jumlah Pembiayaan Kepemilikan Emas	Revitalisasi fitur limit jumlah pembiayaan kepemilikan emas adalah revitalisasi salah satu fitur cicil emas yaitu limit jumlah pembiayaan yang asalnya Rp150 juta menjadi maksimal Rp500 juta per nasabah.	Proses perizinan/lapor ke OJK
Landing Page Consumer	*Landing Page Consumer* adalah *digital platform* yang akan memberikan kemudahan nasabah dalam mencari produk-produk konsumer BSI, mengajukan pembiayaan, menghitung simulasi angsuran, mengetahui informasi program promo pembiayaan consumer BSI dalam satu tempat.	Proses Internal
Pembelian Paket Umroh	Pembelian paket umroh melalui BYOND by BSI merupakan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah BSI untuk melakukan pembelian paket umroh melalui BYOND by BSI. Nasabah dapat memilih paket umroh, mendaftarkan jamaah, dan melakukan pembayaran baik secara *full* ataupun DP dengan pelunasan. Fitur pembelian paket umroh merupakan *one-stop-solution* bagi nasabah dalam melakukan ibadah umroh.	Proses perizinan/lapor ke OJK

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM 2024

Informasi perbandingan target dan realisasi pengembangan SDM disajikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Uraian	RKAP 2024	Realisasi 2024	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
Biaya pengembangan SDM (Rp)	147.623.000.000	141.590.926.496	95,91%

Realisasi biaya pengembangan SDM pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp141,59 miliar, sedikit berada di bawah target RKAP 2024 sebesar 95,91% dari anggaran yang direncanakan, yaitu Rp147,62 miliar.

BSI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM sebagai bagian dari strategi jangka panjang guna memperkuat kinerja bank. Sejumlah pelatihan dan program pengembangan telah diberikan kepada karyawan, dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompleks dan dinamis.

Melalui pelatihan yang lebih intensif dan program pengembangan yang terstruktur, BSI berharap dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, dan siap menghadapi perubahan teknologi serta tuntutan pasar yang terus berkembang.

Target/Proyeksi ke Depan

Asumsi dalam Menyusun Target/Proyeksi 2025

Dalam penyusunan proyeksi tahun 2025, BSI menggunakan beberapa asumsi makro ekonomi sebagai berikut.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Target/Proyeksi 2025

Uraian	2025
(1)	(2)
Pertumbuhan ekonomi	5,14%
Tingkat inflasi	2,70%
Nilai tukar Rp/USD	Rp14.977
7-Day *Reverse Repo Rate*	5,00%

Sumber: *Office of Chief Economist* BSI

Target/Proyeksi Keuangan 2025

Informasi terkait target/proyeksi keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Target/Proyeksi Keuangan 2025

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2025
(1)	(2)
Financing Growth	14,00% - 16,00%
Cost of Credit	<1,00%
Net Interest Margin	>5,00%
NPF Gross	<2,00%

Target/Proyeksi Kebijakan Dividen 2025

Pembagian dividen BSI dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan seluruh Pemegang Saham memiliki hak-hak yang sama dan setara, termasuk hak untuk menerima dividen. Dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan, BSI juga dari waktu ke waktu dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Dengan memperhatikan ketentuan di atas dan kondisi keuangan BSI secara keseluruhan, BSI memiliki kebijakan untuk pembagian dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan setelah menyisihkan cukup cadangan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan pembagian dividen yang akan ditentukan dalam RUPS.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen tunai di masa mendatang akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha dan kondisi keuangan BSI baik sekarang maupun di masa depan serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Para Pemegang Saham BSI, dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. BSI berhak untuk meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

Target/Proyeksi Pemasaran 2025

Informasi terkait proyeksi pemasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target/Proyeksi Pemasaran 2025

Rencana Produk Baru Tahun 2025	Deskripsi	Target Realisasi 2025
Transaksi *Online* BSI Debit Visa *E-commerce*	Transaksi *Online E-Commerce* 3D Secure Kartu Debit BSI Visa adalah fitur transaksi *online (e-commerce)* Kartu BSI Debit Visa dengan pengamanan transaksi menggunakan layanan 3DS (*Verify by* Visa) berupa OTP Transaksi.	Triwulan I - 2025
Card Management System BSI Hasanah Card	*Card Management System* BSI Hasanah Card 1. CMS adalah *core banking system* yang akan digunakan oleh CBG untuk memberikan layanan kepada pemegang kartu BSI Hasanah Card, baik dari sisi aktivasi kartu, layanan, otorisasi transaksi, posting/pembukuan, *billing statement*, *maintenance cardholder/ customer*, dan lain-lain. 2. CMS BSI Hasanah Card ini sekaligus sebagai pengganti dari CMS yang digunakan oleh CBG saat ini, yaitu Cardlink. 3. BSI akan bekerjasama dengan Artajasa, yang telah tergabung di dalam TPCM, dengan konsep *manage service* yang akan dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). 4. Pengembangan-pengembangan produk/fitur, termasuk pengembangan modul yang dibutuhkan oleh BSI, akan dilakukan oleh Artajasa. 5. Untuk mendukung layanan kepada pemegang kartu, modul-modul yang digunakan di CMS, relatif sama dengan yang ada di Cardlink saat ini.	Triwulan I - 2025
Pengembangan Transaksi Valas di Net Banking	Pengembangan transaksi valas di *net banking* yaitu pengembangan layanan *multi currency* melalui *internet banking*.	Triwulan I - 2025
Limit *Qardh* Beragun Emas	Limit *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp1 miliar untuk setiap nasabah.	Triwulan I - 2025
Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek Kelembagaan Level 1	Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPPE) merupakan pihak yang menyediakan layanan pemasaran PPE kepada nasabah dan/atau calon nasabah berdasarkan kontrak kerja sama dengan ruang lingkup hanya memberikan referral kepada perusahaan sekuritas.	Triwulan II - 2025
Transaksi Reksa Dana Secara Elektronik via BSI Mobile	Transaksi reksa dana secara elektronik, yaitu (pembukaan rekening reksa dana, *subscription*, *redemption* dan *switching*) secara elektronik pada aplikasi BYOND by BSI.	Triwulan I - 2025
Sub-registry BI-SSSS	*Registry* dalam BI-SSSS adalah penambahan aktivitas bank yang menyediakan layanan dalam bentuk transaksi Surat Berharga Negara (SBN) maupun pemerintah daerah yang didukung oleh layanan Bank Indonesia.	Triwulan II - 2025
Financial Institution Bank to Bank Murabahah Facility	*Financial Institution Bank to Bank murabahah facility* adalah penghimpunan dan penyaluran dana antar bank dengan memanfaatkan bursa komoditi dengan akad *murabahah*.	Triwulan I - 2025
Penghimpunan Dana (Kartu Tani Digital BLP)	Penyaluran program bantuan sosial untuk mendukung program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan melakukan beberapa pengembangan yaitu: 1. Kartu Tani Digital (BLP) 2. Pelaporan Eksternal (H2H).	Triwulan II - 2025
BI Fast Tahap 2	BI FAST Tahap 2 kelanjutan *project* BI Fast tahap 1 yaitu infrastruktur Sistem Pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara real time dan 24 jam 7 hari.	Triwulan I - 2025
BSI Hasanah segmen Muda Contactless	Turunan produk kartu kredit syariah BSI Hasanah Card yang menyasar *young segment* dengan kapabilitas *contactless*.	Triwulan I -2025
Kartu Kredit Indonesia (KKI)	Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) adalah produk pembiayaan berupa kartu yang diberikan kepada nasabah untuk transaksi barang dan jasa dengan sumber pembayaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	Triwulan I -2025
Hasanah Card Lyfe	Hasanah Card Lyfe adalah Fitur BSI Hasanah Card (kartu kredit syariah) dan produk turunannya yang terdapat pada *SuperApp* BSI (BYOND by BSI) berupa fitur *autobinding*, *virtual card display*, aktivasi, *request* PIN dan dashboard informasi limit, *outstanding*, sisa limit dan lainnya.	Triwulan I -2025
Fitur *Buyback* BSI Cicil Emas	Produk bank adalah BSI Cicil Emas yang akan tetap dijalankan sesuai mekanisme transaksi eksisting saat ini. Fitur *buyback* merupakan pilihan yang diberikan kepada nasabah ketika nasabah ingin menjual kembali emas dan dibuat sebagai bentuk layanan *after sales*. Pembelian emas akan dilakukan oleh mitra Bank. Peran Bank pada fitur ini adalah sebagai agen yang mempertemukan antara nasabah (penjual emas) dan mitra (pembeli emas). Emas yang telah dibeli oleh mitra disimpan sementara di BSI hingga dilakukan pengambilan oleh mitra (maksimal 7 hari kerja). Seluruh biaya yang timbul atas transaksi fitur *Buyback* menjadi kewajiban mitra.	Triwulan I - 2025

Rencana Produk Baru Tahun 2025	Deskripsi	Target Realisasi 2025
Cash Wakaf Link Deposit (CWLD) Financing	Produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) merupakan basic produk deposito yang nilai pokoknya akan berfungsi sebagai wakaf uang temporer dimana bagi hasil depositonya akan langsung dapat dimanfaatkan ke dalam proyek sosial yang akan ditentukan sesuai program yang akan ditetapkan pada setiap seri penerbitan. CWLD Financing merupakan pengembangan lebih *advance* dari CWLD dasar. Dengan CWLD Financing, proyek sosial dapat direalisasikan lebih awal tanpa menunggu penyelesaian seluruh pembayaran bagi hasil dari pokok depositonya. Dana untuk realisasi program sosial di dapat dari pembiayaan, yang mana *instalment*-nya diambil dari bagi hasil (deposito) bulanan yang didapat. Dengan skema ini proyek akan terealisasi lebih awal dan bagi hasil yang diterima nasabah akan lebih menarik dibanding produk CWLD dasar.	Triwulan I - 2025
BSI Investment Account (SRIA)	BSI *Investment Account* (SRIA) ini merupakan produk yang mengoptimalkan fungsi investasi pada perbankan syariah dengan menghimpun dana dari investor dan menyalurkannya kepada nasabah/instrumen/portfolio yang menarik secara *on balance sheet*, menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*.	Triwulan I - 2025
BSI *Overseas* Murabahah Komoditi KCLN	Skema akad *murabahah* komoditi merupakan transaksi penjualan komoditi dengan menegaskan harga beli dan margin keuntungan yang disepakati. Skema ini digunakan untuk produk pembiayaan/penempatan, penghimpunan dana, dan penerbitan sukuk dengan dibatasi untuk mendukung aktivitas Kantor Cabang Luar Negeri.	Triwulan I - 2025
New Trade Finance	Platform E2E *Trade Finance Solutions* dan *Document Pre-Checking Automation with Smart AI*.	Triwulan IV-2025
Global Transaction Sharia/ BEWIZE	Global Transaction Sharia (GTS)/BEWIZE merupakan platform digital yang dirancang oleh tim BSI untuk menunjang inisiatif bisnis *wholesale* dengan menerapkan *single sign on access* (SSO)/BEWIZE untuk semua *sub system banking* yang terintegrasi dalam GTS/BEWIZE sehingga nasabah dapat mengakses layanan cash *management*, *value chain*, *trade finance* dan layanan lainnya.	Triwulan I - 2025
BSI *Daily Kafalah*	Fasilitas BSI *Daily Kafalah* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan perjanjian *line facility* untuk tujuan realisasi pembiayaan penjaminan dan modal kerja PRKS dengan menggunakan akad *kafalah bil ujrah* dan/atau akad *musyarakah*.	Triwulan I - 2025
Sukuk Tapera Tahap III	Merupakan sukuk tanpa penawaran umum yang dilakukan bertahap dengan investor tunggal yaitu BP Tapera.	Triwulan I - 2025
Revitalisasi Fitur Limit Jumlah Pembiayaan Kepemilikan Emas	Revitalisasi fitur *limit* jumlah pembiayaan kepemilikan emas adalah revitalisasi salah satu fitur cicil emas yaitu limit jumlah pembiayaan yang asalnya Rp150 juta menjadi maksimal Rp500 juta per nasabah.	Triwulan I - 2025
Landing Page Consumer	*Landing Page Consumer* adalah *digital platform* yang akan memberikan kemudahan nasabah dalam mencari produk-produk konsumer BSI, mengajukan pembiayaan, menghitung simulasi angsuran, mengetahui informasi program promo pembiayaan konsumer BSI dalam satu tempat.	Triwulan I - 2025
Pembelian Paket Umroh	Pembelian paket umroh melalui BYOND by BSI merupakan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah BSI untuk melakukan pembelian paket umroh melalui BYOND by BSI. Nasabah dapat memilih paket umroh, mendaftarkan jamaah, dan melakukan pembayaran baik secara *full* ataupun DP dengan pelunasan. Fitur pembelian paket umroh merupakan *one-stop-solution* bagi nasabah dalam melakukan ibadah umroh.	Triwulan I - 2025
BSI Debit Visa *Contactless*	Bentuk otorisasi pembayaran transaksi di mana pemegang kartu dapat melakukan transaksi dengan menempelkan (tapping) kartu pada mesin pembaca kartu (EDC) yang tersedia tanpa harus *swipe/dip* kartu.	Triwulan III - 2025
Transaksi Reksa Dana Secara Elektronik via BYOND by BSI	Transaksi reksa dana secara elektronik yaitu (pembukaan rekening, *subscription*, *redemption* dan *switching*) secara elektronik.	Triwulan II - 2025
Penambahan Produk Reksa Dana Baru yang akan dijual melalui BSI	Penambahan jenis produk reksa dana syariah yang akan dijual melalui BSI untuk memberikan diversifikasi/pilihan investasi kepada nasabah.	Triwulan IV-2025
BSI Tabungan Valas *Multicurrency*	Penambahan 5 *currency* pada Produk BSI Tabungan Valas Wadiah (6009) yaitu SGD, SAR, AUD, JPY, EUR. Dengan instrumen penambahan pembukaan rekening dan transaksi pada *core*.	Triwulan I - 2025
BYOND Market Place	Byond Market Place merupakan Fitur yang mengakomodir kebutuhan transaksional seputar Lifestyle User Byond guna mendukung penguatan ekosistem islam atau halal lifestyle pada BSI. Nasabah dapat melakukan pembelian tiket event, tiket transportasi, paket travel umroh, voucher game, dan transaksi- transaksi *lifestyle* secara *end-to-end* di dalam halaman Byond Lyfe.	Triwulan I - 2025

Rencana Produk Baru Tahun 2025	Deskripsi	Target Realisasi 2025
Pembiayaan Griya OL	1. Digitalisasi atas produk pembiayaan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing industri salah satunya dengan pengajuan pembiayaan kepemilikan properti dengan menggunakan digital. 2. Pengajuan Griya Online adalah fitur pengajuan griya pembelian rumah baru, pembelian rumah bekas, *refinancing, take over, top up dan take over & top up* yang dilakukan melalui BYOND by BSI. Pengajuan Griya Online merupakan salah satu kesatuan *surrounding product* dalam Project Medina. 3. Pada implementasinya akan dibuat 2 jenis metode pembiayaan Griya melalui BYOND by BSI yaitu dengan metode *Sales Assignment* (pengajuan dibantu Marketing) dan *Self Service* (pengajuan dilakukan oleh nasabah sendiri).	Triwulan I - 2025
Islamic Structured Account (ISRA)	*Islamic Structured Account* (ISRA) merupakan produk simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan dan giro dengan basis akad Mudharabah Muqayyadah dimana dana simpanan tersebut khusus digunakan untuk aktivitas transaksi Valas oleh unit kerja *Treasury*.	Triwulan I - 2025
Penambahan Akad MMQ untuk penyaluran BSI Griya Indent	Pengembangan akad MMQ untuk pembiayaan PPR indent merupakan inisiasi dari Bank untuk memperbaiki akad yang ada sebelumnya pada produk PPR Indent. Akad yang digunakan pada produk PPR Indent sebelumnya adalah akad murabahah atas tanah dan bahan bangunan. Bank berupaya untuk melakukan perbaikan akad pembiayaan PPR indent agar lebih sesuai dengan prinsip syariah dengan mengembangkan akad MMQ untuk penyaluran PPR indent.	Triwulan I - 2025
Financial Institution Bank to Bank Wakalah Facility	Financial Institution Bank to Bank Wakalah Facility adalah Penghimpunan dan penyaluran dana antar bank dengan memanfaatkan bursa komoditi dengan akad Murabahah.	Triwulan II- 2025
Titipan Emas	Titipan Emas adalah layanan penitipan emas fisik yang disediakan oleh Bank secara dan aman. Emas akan disimpan oleh Bank melalui *vault* khusus emas.	Triwulan I-2025
Perdagangan Emas	Perdagangan Emas merupakan kegiatan usaha bullion yang terkait jual beli emas fisik / logam mulia berstandar SNI dan atau standar Internasional (LBMA).	Triwulan I-2025

Target/Proyeksi Pengembangan SDM

Informasi terkait proyeksi pengembangan SDM tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Target/Proyeksi Pengembangan SDM 2025

Uraian	Proyeksi 2025
(1)	(2)
Biaya pengembangan SDM (Rp)	145.000.000.000

Proyeksi biaya pengembangan SDM untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp145,00 miliar, dimana mengalami kenaikan sebesar 2,41% dari realisasi biaya pengembangan SDM pada tahun 2024. BSI terus berinvestasi dalam kualitas dan kapabilitas SDM, guna mendukung pencapaian tujuan jangka panjang BSI.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

BSI dapat mengumumkan dividen setiap tahun (dalam Rupiah) apabila memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih bank yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan setelah dikurangi pemotongan pajak perusahaan, harus dialokasikan sebagai dana cadangan wajib sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai minimal 20% dari jumlah modal disetor bank, walaupun tidak terdapat jangka waktu yang ditentukan untuk pencapaian tingkat dana cadangan wajib tersebut.

Sisa bagian dari laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen final kecuali ditentukan lain dalam RUPST. Bank juga dapat membagikan dividen khusus secara *ad-hoc* berdasarkan persetujuan dalam RUPS. Penggunaan laba bersih tahun buku 2023 berdasarkan dengan RUPST tanggal 17 Mei 2024 dan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 berdasarkan RUPST tanggal 22 Mei 2023. Sedangkan penggunaan laba bersih BSI tahun buku 2024 akan diputuskan dalam RUPST pada tahun 2025.

Informasi pengumuman dan pembayaran dividen diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian	Tahun Buku 2023	Tahun Buku 2022
Laba Bersih	5.703.743.109.251	4.260.181.677.875
Dividen Kas	855.561.466.388	426.018.167.788
Dividen Non Kas	-	-
Dividen Kas Per Saham	18.5470451	9.23531
Dividen Non Kas Per Saham	-	-
Dividend *Payout Ratio* (%)	15%	10%
Tanggal Pengumuman	17 Mei 2024	22 Mei 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	20 Juni 2024	23 Juni 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas	-	-

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, BSI telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

No.	Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum			Rencana Penggunaan Dana	
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Uraian	
1	Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024	14 Juni 2024	3.000.000.000.000	9.480.000.000	2.990.520.000.000	Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (existing) pada kategori KUBL dan KUBS dengan rincian: 1. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) Energi terbarukan, (2) Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. 2. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) Penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) Peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.	
Jumlah			3.000.000.000.000	9.480.000.000	2.990.520.000.000		

		Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
	Total	Uraian	Total	
		Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (existing) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (existing) pada kategori KUBL dan KUBS dengan rincian:		-
	1.226.113.200.000	1. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya.	1.226.113.200.000	-
	1.764.406.800.000	2. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro , (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.	1.764.406.800.000	-
	2.990.520.000.000		**2.990.520.000.000**	-

Tabel Rincian Biaya Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Biaya	Persentase
1	**Biaya Jasa Untuk Penjaminan Emisi Efek**	2.970.000.000	**0,099%**
	Biaya Jasa Manajemen (*Management Fee*)	2.070.000.000	0,069%
	Biaya Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*)	450.000.000	0,015%
	Biaya Jasa Penjualan (*Selling Fee*)	450.000.000	0,015%
2	**Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal**	3.840.000.000	**0,128%**
	Biaya Jasa Akuntan Publik	3.150.000.000	0,105%
	Biaya Jasa Konsultan Hukum	630.000.000	0,021%
	Biaya Notaris	60.000.000	0,002%
3	**Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal**	1.140.000.000	**0,038%**
	Perusahaan Pemeringkat Efek	900.000.000	0,030%
	Wali Amanat	240.000.000	0,008%
4	**Biaya Lain - lain (Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, KSEI, biaya pencatatan di BEI, serta biaya percetakan, iklan, penyelenggara acara, Ahl Lingkungan, dan akuntan publik untuk audit penjatahan)**	1.530.000.000.00	**0,051%**
	Total Biaya Penawaran Umum	9.480.000.000.00	**0,316%**

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Investasi

BSI memiliki investasi pada surat berharga di tahun 2024 dan 2023 baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi. Rincian investasi atas surat berharga BSI per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Investasi Pada Surat Berharga

(dalam jutaan Rupiah)

Objek Transaksi	2024		2023	
	Nilai Nominal	Nilai Tercatat	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
RUPIAH				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	2.320.383	2.300.433	1.835.552	1.847.602
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)	2.006.619	1.962.324	895.000	878.000
Sukuk Bank Indonesia	2.000.000	2.028.369	1.724.704	1.724.704
Reksa dana	-	-	400.000	405.089
Efek Beragun Aset Syariah-Surat Partisipasi (EBAS-SP)	27.301	29.476	27.301	31.787
Total	6.354.303	6.320.602	4.882.557	4.887.182
MATA UANG ASING				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	46.466	46.181	6.728	6.702
Total nilai wajar melalui laba rugi	6.400.769	**6.366.783**	**4.889.285**	**4.893.884**

Objek Transaksi	2024		2023	
	Nilai Nominal	Nilai Tercatat	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
RUPIAH				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	10.455.701	10.251.000	7.119.539	7.087.426
Sukuk Bank Indonesia	11.148.698	11.148.698	20.693.578	20.744.693
Reksa dana	2.500.000	2.543.914	1.200.000	1.219.721
Sukuk Korporasi	-	-	120.000	120.890
Total	24.140.399	23.979.612	29.133.117	29.172.730
MATA UANG ASING				
Sukuk Bank Indonesia	8.127.975	8.127.975	1.539.700	1.544.442
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	273.615	261.066	-	-
Total	8.401.590	8.389.041	1.539.700	1.544.442
Total Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	32.541.989	**32.368.653**	**30.672.817**	**30.717.172**
Biaya perolehan diamortisasi				
RUPIAH				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	22.078.936	22.127.374	33.952.697	34.092.672
Sukuk korporasi	638.800	638.800	947.800	947.800
Wesel ekspor	309.746	309.746	200.858	200.858
Total	23.027.482	23.075.920	35.101.355	35.241.330
MATA UANG ASING				
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	431.346	433.580	443.434	449.140
Wesel ekspor	6.870	6.870	-	-
Total	438.216	440.450	443.434	449.140
Total Biaya perolehan diamortisasi	23.465.698	**23.516.370**	**35.544.789**	**35.690.470**
Total Investasi Pada Surat Berharga		**62.251.808**		**71.301.526**
Cadangan kerugian penurunan Nilai		**(35.288)**		**(132.506)**
Bersih		**62.216.518**		**71.169.020**

Ekspansi

Pada tahun 2024, BSI tidak melakukan kegiatan ekspansi.

Divestasi

Pada tahun 2024, BSI tidak melakukan kegiatan divestasi.

Penggabungan/Peleburan Usaha

Pada tahun 2024, BSI tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

Akuisisi

Pada tahun 2024, BSI tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Utang/Modal

Pada tahun 2024, BSI tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang/modal.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Pada tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Transaksi Afiliasi Sebagai Kegiatan Usaha yang Dijalankan dalam Rangka Menghasilkan Pendapatan Usaha dan Dijalankan Secara Rutin, Berulang, dan/atau Berkelanjutan

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 POJK 42/2020, terdapat transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan yang disampaikan pada bagian transaksi pihak berelasi. BSI telah melakukan pendataan atas transaksi tersebut dan tercatat pada Catatan atas Laporan Keuangan 44.

Kewajaran Transaksi dan Pemenuhan Ketentuan Terkait

Transaksi yang dilakukan BSI telah memenuhi POJK Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Transaksi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arm's length principle)*. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan BSI dan bebas dari konflik kepentingan. Pada tahun 2024 tidak terdapat transaksi pihak afiliasi dan/atau berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS.

Pernyataan Direksi Terkait Transaksi Afiliasi

Dalam melakukan transaksi, khususnya dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi, BSI telah memiliki prosedur sesuai dengan yang ditentukan oleh regulator. Dalam prosedur tersebut, Direksi menjadi bagian dari organisasi yang melakukan *review* terhadap rencana, realisasi dan evaluasi terhadap transaksi BSI. Dengan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah melalui prosedur yang memadai dan selaras dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*arm's length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit Terkait Transaksi Afiliasi

Salah satu tugas penting Komite Audit adalah melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu, Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank untuk publik atau pemangku kepentingan lain serta menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, transaksi dengan pihak afiliasi dan/atau berelasi menjadi bagian dari telaah dan pemantauan Komite Audit. Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Karena itu, peran Komite Audit dan Dewan Komisaris menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum (*arm's length principle*).

Transaksi Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

(1) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
(2) Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
(3) Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venturer*;
(4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
(5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
(6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
(7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Nama Pihak dan Sifat Hubungan Transaksi Pihak Berelasi

Berikut adalah nama pihak dan sifat hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Hubungan Pihak Berelasi Sebagai Pemegang Saham Utama

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

Hubungan Pihak Berelasi Sebagai Pemegang Saham Pengendali

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Hubungan Pihak Berelasi Sebagai Pemegang Saham

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BRI Danareksa Sekuritas
PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas
AirNav Indonesia

Entitas dan Lembaga Pemerintah

BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
Dana Pensiun Bank Mandiri
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perum BULOG
Perum DAMRI
Perum Jasa Tirta I
Perum Jasa Tirta II
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Perum Perhutani
Perum Perumnas
Perum Peruri
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
PT Adhi Commuter Properti Tbk
PT Adhi Jalintim Riau
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Persada Beton
PT Adhi Persada Gedung
PT Adhi Persada Properti
PT Aero Globe Indonesia
PT Aerofood Indonesia
PT Aerojasa Cargo
PT Agro Medika Nusantara
PT Agro Sinergi Nusantara
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
PT Amarta Karya (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk
PT Angkasa Pura I
PT Angkasa Pura II
PT Angkasa Pura Hotel
PT Angkasa Pura Kargo
PT Angkasa Pura Logistik

PT Angkasa Pura Properti
PT Angkasa Pura Retail
PT Angkasa Pura Sarana Digital
PT Angkasa Pura Solusi
PT Angkasa Pura Solusi Integra
PT Angkasa Pura Supports
PT Antam Resourcindo
PT ASABRI (Persero)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Asuransi Asei Indonesia
PT Asuransi BRI Life
PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
PT Asuransi Jiwa IFG
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PT Asuransi Jiwa Taspen
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT Aviasi Pariwisata Indonesia
PT AXA Mandiri Financial Services
PT Bahana Artha Ventura
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT Bahana Sekuritas
PT Bahana TCW Investment Management
PT Bakti Timah Medika
PT Balai Pustaka
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Baturaja Multi Usaha
PT Berdikari
PT Berdikari Logistik Indonesia
PT Berkah Industri Mesin Angkat
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Bina Karya (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Asset Management
PT BNI Sekuritas
PT Borneo Alumina Indonesia
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia
PT Bukit Asam Medika
PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Energi Investama
PT Bukit Multi Properti
PT Bukit Prima Bahari
PT Bumi Daya Plaza
PT Bumi Sawindo Permai
PT Cinere Serpong Jaya
PT Citilink Indonesia
PT Citra Lautan Teduh
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Danareksa (Persero)
PT Danareksa Finance
PT Danareksa Investment Management
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Elnusa Petrofin
PT Elnusa Tbk
PT Emas Antam Indonesia
PT Energi Agro Nusantara
PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Equiport Inti Indonesia
PT Estika Daya Mandiri
PT Finnet Indonesia
PT Fintek Karya Nusantara
PT Gag Nikel
PT Gapura Angkasa
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
PT Graha Investama Bersama
PT Graha Niaga Tata Utama
PT Graha Sarana Duta
PT Griyaton Indonesia
PT Hakaaston
PT Haleyora Powerindo
PT HK Realtindo
PT Hutama Karya (Persero)
PT Hutama Karya Infrastruktur
PT Indofarma Global Medika
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Indonesia Chemical Alumina
PT Indonesia Coal Resources
PT Indonesia Comnets Plus
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
PT Indonesia Power
PT Indopelita Aircraft Services
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Industri Karet Nusantara
PT Industri Kemasan Semen Gresik
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Infomedia Nusantara
PT Infomedia Solusi Humanika
PT Inhutani I
PT Inhutani IV
PT Inka Multi Solusi
PT Inka Multi Solusi Service
PT Inka Multi Solusi Trading
PT Inti Konten Indonesia
PT IPC Terminal Petikemas
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
PT Jalin Pembayaran Nusantara
PT Jalintim Adhi Abipraya
PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Prima Logistik Bulog
PT Jasa Raharja
PT Jasa Tirta Energi
PT Jasa Tirta Luhur
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Jogja Solo
PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Manado Bitung
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Related Business
PT Jasamarga Solo Ngawi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasaraharja Putera
PT Jembatan Nusantara
PT KA Properti Manajemen
PT Kalimantan Jawa Gas
PT Kaltim Adhiguna Dermaga
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kaltim Industrial Estate
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar
PT Kawasan Industri Nusantara
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT KBN Prima Logistik
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Api Logistik
PT Kereta Api Pariwisata
PT Kereta Commuter Indonesia
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostika
PT Kimia Farma Tbk
PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia
PT Kodja Terramarin

PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Global Trading
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Information Technology
PT Krakatau Jasa Industri
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Samudera
PT Krakatau Medika
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Samudera Solusi
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Sarana Properti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan
PT Krakatau Wajatama
PT Krida Upaya Tunggal
PT Laras Astra Kartika
PT Len Industri (Persero)
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Mega Eltra
PT Metra Digital Media
PT Mitra Rakata
PT Mitra Tours & Travel
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Mulia Sasmita Bhakti
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Nindya Beton
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nusa Karya Arindo
PT Nusa Pratama Property
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Services
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT Paguntaka Cahaya Nusantara
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Services
PT PANN Pembiayaan Maritim
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pelabuhan Bukit Prima
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelayanan Energi Batam
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelindo Solusi Logistik
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permata Graha Nusantara
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina Hulu Rokan
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Maintenance and Construction
PT Pertamina Marine Solutions
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Training & Consulting
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT PG Rajawali II
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Pindad International Logistic
PT Pindad Medika Utama
PT PLN Energi Primer Indonesia
PT PLN Nusantara Power
PT PLN Nusantara Renewables
PT PNM Investment Management
PT PNM Ventura Syariah
PT PNM Venture Capital
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT Pos Properti Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Infrastruktur
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Sinergi Banjaratma
PT PP Tirta Riau
PT PP Urban
PT Pratama Mitra Sejati
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
PT Prima Medica Nusantara
PT Prima Multi Terminal
PT Produksi Film Negara (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek

PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekayasa Engineering
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Saka Energi Indonesia
PT Sang Hyang Seri
PT Sarana Aceh Ventura
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Jakarta Ventura
PT Sarana Jambi Ventura
PT Sarana Jatim Ventura
PT Sarana Kalbar Ventura
PT Sarana Kalteng Ventura
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sei Mangkei Nusantara Tiga
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Indonesia Logistik
PT Semen Padang
PT Senggigi Pratama Internasional
PT Sepatim Batamtama
PT Sigma Cipta Caraka
PT Sigma Cipta Utama
PT Sigma Mitra Sejati
PT Sinergi Colomadu
PT Sinergi Gula Nusantara
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Solusi Bangun Beton
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo
PT Sucofindo Advisory Utama
PT Sucofindo Episi
PT Sumberdaya Arindo
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Surya Energi Indotama
PT Swadharma Sarana Informatika
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
PT Taspen (Persero)
PT Taspen Abadi Sentosa
PT Telekomunikasi Selular
PT Telemedia Dinamika Sarana
PT Telkom Akses
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Satelit Indonesia
PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Telkomsel Mitra Inovasi
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Karya Persada Properti
PT Timah Tbk
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT Tracon Industri
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol
PT Tugu Pratama Interindo
PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Tusam Hutani Lestari
PT United Tractors Semen Gresik
PT Usaha Gedung Mandiri
PT Varia Usaha Bahari
PT Varia Usaha Beton
PT Varia Usaha Dharma Segara
PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Wahana Optima Permai
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Waskita Modern Realti
PT Waskita Toll Road
PT Widya Tirta Selaras
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Serang Panimbang
PT Yodya Karya

Pengendalian Kegiatan Perusahaan

Karyawan kunci

Realisasi Transaksi

Saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2024	2023
Aset		
Jumlah aset dari pihak berelasi	67.538.852	73.571.244
Jumlah aset	408.613.432	353.624.124
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset	16,53%	20,80%

Uraian	2024	2023
Liabilitas		
Jumlah liabilitas dari pihak berelasi	4.131.869	3.416.331
Jumlah liabilitas	105.647.971	87.222.911
Persentase jumlah liabilitas dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	3,91%	3,92%
Dana *Syirkah* Temporer		
Jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak berelasi	58.737.626	46.154.530
Jumlah dana *syirkah* temporer	257.923.889	227.662.092
Persentase jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak berelasi terhadap jumlah dana syirkah temporer	22,77%	20,27%

Gaji dan tunjangan, bonus dan tantiem, imbalan jangka panjang untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp174,87 miliar dan Rp152,25 miliar atau 1,48% dan 1,49% dari jumlah beban operasional.

Rujukan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada Catatan 44 atas Laporan Keuangan yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Kewajaran dan Alasan Dilakukan Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan secara wajar (*arm's length principle*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal dan sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan BSI dan bebas dari konflik kepentingan.

Pemenuhan Peraturan Terkait

Selama tahun 2024 dan 2023, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. BSI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasl dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Pada tahun 2024 tidak terdapat transaksi pihak berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS.

Pernyataan Direksi Terkait Transaksi Pihak Berelasi

Dalam melakukan transaksi, khususnya dengan pihak berelasi, BSI telah memiliki prosedur sesuai dengan yang ditentukan oleh regulator. Dalam prosedur tersebut, Direksi menjadi bagian dari organisasi yang melakukan *review* terhadap rencana, realisasi dan evaluasi terhadap transaksi BSI. Dengan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah melalui prosedur yang memadai dan selaras dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*arm's length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit Terkait Transaksi Pihak Berelasi

Salah satu tugas penting Komite Audit adalah melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu, Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank untuk publik atau pemangku kepentingan lain serta menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, transaksi dengan pihak berelasi menjadi bagian dari telaah dan pemantauan Komite Audit. Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Karena itu, peran Komite Audit dan Dewan Komisaris menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum (*arm's length principle*).

Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan Dalam Valuta Asing sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024. Pemberian pembiayaan kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian pembiayaan kepada calon nasabah penerima fasilitas BSI pada umumnya dan diberikan sesuai *market rate* dan wajar (*arm's length basis*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya

Informasi perubahan peraturan perundang-undangan Tahun 2024 dan dampaknya terhadap BSI dijelaskan sebagai berikut.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian yang dilakukan BSI	Dampak terhadap Laporan Keuangan
1.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital oleh Bank Umum.	Pengaturan penyelenggaraan layanan digital.	Penyesuaian ketentuan internal	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
2.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.	Pengaturan mengenai penerapan Manajemen Risiko terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dalam rangka mendukung pengawasan aktif DPS.	Penyesuaian ketentuan internal	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
3.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Yang Diaudit di Pasar Modal.	Pengaturan mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik.	Menyampaikan laporan Akuntan Publik atas laporan keuangan yang diaudit dengan mengungkapkan Hal Audit Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mempedomani ketentuan POJK ini, pertama kali untuk audit atas laporan keuangan tahunan 2023.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
4.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Pengaturan mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah, DPS, Audit Syariah, Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Kaji Ulang Ekstern Tata Kelola Syariah.	Penyesuaian ketentuan internal, penyesuaian struktur organisasi, penyesuaian anggaran dasar.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
5.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK PKM SJK).	Pengaturan mengenai: 1. Prinsip Pelindungan Konsumen 2. Prilaku Dasar Pelindungan Konsumen 3. Literasi dan Inklusi Keuangan 4. Kerahasiaan data dan/atau informasi 5. Penerapan keamanan siber dalam pelindungan konsumen 6. *Product life cycle* 7. Mekanisme penyajian dan penyampaian informasi produk 8. Mekanisme penawaran produk 9. Mekanisme klausul baku 10. Mekanisme penagihan produk pembiayaan 11. Mekanisme pengambilalihan atau penarikan agunan 12. Pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa 13. Penilaian sendiri pemenuhan ketentuan Pelindungan Konsumen 14. Fungsi atau unit pelindungan konsumen 15. Kewajiban pengembangan kapasitas pengawai terhadap ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan secara berkala.	Penyesuaian ketentuan internal.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian yang dilakukan BSI	Dampak terhadap Laporan Keuangan
6.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia	Pengauran mengenai penerapan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber yang selanjutnya disebut KKS pada setiap produk BSI yang diawasi oleh Bank Indonesia.	Penyesuaian ketentuan internal	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
7.	POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan	1. Pengaturan Strategi *Anti Fraud* untuk lembaga jasa keuangan 2. Perubahan definisi *fraud* 3. Penggolongan jenis perbuatan *fraud* ditentukan penggolongannya 4. Kewajiban LJK untuk memastikan organisasi yg dikendalikan (yayasan, koperasi, dll) menerapkan strategi *anti fraud* 5. Pertanggungjawaban unit kerja SAF tidak lagi ke Dirut akan tetapi bertanggung jawab ke anggota direksi 6. Persyaratan pimpinan SAF terdapat penambahan persyaratan pengalaman di bidang *anti fraud* 7. Pembaharuan Pedoman *anti fraud*.	Penyesuaian ketentuan internal	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
8.	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum	Peraturan mengenai kewajiban menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi, Perbaikan Rencana Resolusi dan/atau Pemutakhiran Rencana Resolusi kepada LPS	Penyesuaian ketentuan internal	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
9.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank	Peraturan mengenai kewajiban pengendalian internal yang berintegritas terhadap proses penyusunan sampai dengan penyampaian Laporan Keuangan Bank.	- Penyesuaian ketentuan internal. - Menyampaikan laporan pengendalian internal kepada OJK dengan memedomani ketentuan POJK ini yang disampaikan sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
10.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.08/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.	Peraturan yang mengatur mengenai kewajiban menyusun dan melaporkan kepada OJK laporan rencana, laporan realisasi, penyesuaian laporan, dan perubahan laporan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.	Penyesuaian ketentuan internal.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.
11.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.	Peraturan mengenai tata kelola syariah DPS, Pelaksanaan Kaji Ulang ekstern atas Tata Kelola Syariah.	Penyesuaian Ketentuan Internal dan penyesuaian Struktur Organisasi.	Tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dalam rangka mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku yang relevan dengan operasi BSI

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024:

Tabel Perubahan Standar Akuntansi Keuangan

No	Perubahan Standar Akuntansi Keuangan	Dampak Perubahan Standar Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan
1.	Amandemen PSAK 116: "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;	Implementasi dari standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
2.	Amandemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar;	Implementasi dari standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
3.	Amandemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan	Implementasi dari standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.
4.	Revisi PSAK 401: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" tentang penghilangan penyajian laporan perubahan aset kelolaan sebagai salah satu komponen laporan keuangan.	Implementasi dari standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank dinilai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08/POJK 03/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*/RBBR). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, *Good Corporate Governance (GCG)*, Rentabilitas *(Earnings)* dan Permodalan *(Capital)*

Tabel Tingkat Kesehatan Bank

Faktor Penilaian	Penilaian Per 31 Desember 2024	Penilaian Per 31 Desember 2023
	Peringkat	Peringkat
Profil Risiko	2	2
Good Corporate Governance (GCG)	2	2
Rentabilitas	1	1
Permodalan	1	1
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	2	**2**

Peringkat Tingkat Kesehatan BSI dengan metode penilaian berbasis risiko (RBBR) berada pada Peringkat Komposit 2 (PK 2) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen terhadap kemampuan BSI dalam menjaga kelangsungan usaha di masa depan, ditemukan bahwa BSI tidak menghadapi faktor-faktor signifikan yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usahanya. Evaluasi ini mencakup analisis mendalam terhadap berbagai aspek operasional, keuangan, dan pasar, yang menunjukkan bahwa bank memiliki fundamental yang kuat serta strategi yang adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan industri.

Assessment Manajemen Terhadap Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen secara rutin melakukan evaluasi dan *assessment* terkait hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Evaluasi antara lain dilakukan melalui analisis SWOT yang yang terdiri dari Kekuatan *(Strenght)* dan Kelemahan *(Weakness)*, analisis ini melihat faktor internal, beserta mengidentifikasi faktor secara eksternal melalui Kesempatan *(Opportunity)* dan Ancaman *(Threat)* yang bertujuan sebagai asumsi dasar kelangsungan bisnis Bank. Selain itu BSI juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko untuk menilai kemampuan Perseroan dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan penilaian tingkat kesehatan bank, dapat disimpulkan bahwa BSI tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Dengan kekuatan internal yang solid, peluang eksternal yang terbuka, serta kemampuan untuk mengelola ancaman dan risiko, BSI diperkirakan akan terus berkembang dan menghadapi tantangan bisnis dengan efektif. BSI ini telah menunjukkan kematangan dalam pengelolaan bisnis dan siap menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis serta perubahan pasar yang terus berkembang.

Asumsi yang Digunakan Manajemen Untuk Melakukan *Assessment*

Dalam melaksanakan penilaian atas kemampuan BSI untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, digunakan beberapa asumsi dan pertimbangan. Selain asumsi dalam analisis SWOT, asumsi dalam penilaian tingkat kesehatan BSI juga menjadi dasar penilaian. Tingkat kesehatan Bank dinilai dengan menggunakan empat asumsi yaitu profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas dan permodalan.

Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

BSI sebagai Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam industri perbankan yang *highly regulated* selalu berkomitmen menjalankan pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan para *stakeholders*. Pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan BSI meliputi pemenuhan kewajiban perpajakan badan (*corporate tax)* maupun pemenuhan kewajiban perpajakan selaku pemotong atau pemungut pajak (*withholding tax*). Pengelolaan perpajakan di Bank BSI dilakukan oleh Corporate Finance & Accounting Group di bawah kewenangan Direktur Keuangan dan Strategi (Finance & Strategy Director).

Untuk menjaga kualitas pengelolaan dan pengendalian aspek perpajakan yang baik, BSI memiliki kerangka governansi yang memadai, memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perpajakan dari mulai identifikasi transaksi-transaksi yang menjadi objek pajak, administrasi pembayaran dan pelaporan pajak serta pengelolaan risiko perpajakan. Kerangka governansi tersebut melalui proses yang komprehensif dan terstruktur, antara lain:

1. Memiliki Standar Prosedur Operasional Perpajakan yang dievaluasi secara berkala mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai pedoman dan panduan bagi segenap Unit Kerja dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Perusahaan. Secara berkala, BSI juga memberikan sosialisasi dan pelatihan perpajakan kepada para pegawai di Unit Kerja lainnya.
2. Melakukan sentralisasi administrasi pembayaran dan pelaporan perpajakan seluruh Cabang Bank BSI di Indonesia di Kantor Pusat dengan bekerja sama dengan penyedia jasa aplikasi perpajakan yang diakui oleh Otoritas Perpajakan. Hal ini untuk meminimalisir risiko terkena sanksi denda administrasi keterlambatan bayar dan/atau lapor pajak dari Otoritas Perpajakan.

Tabel Kontribusi Kepada Negara

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Pajak	Tahun 2024	Tahun 2023
PPh Pasal 4 ayat 2	1.102.518	774.238
PPh Pasal 21	739.230	515.311
PPh Pasal 22	34.990	9.517
PPh Pasal 23	56.796	39.346
PPh Pasal 25	1.990.404	1.622.277
PPh Pasal 26	27.672	14.724
PPh Pasal 29	445.253	55.843
PPN WAPU	575.077	277.193
PPN Dalam Negeri	475.928	30.068
PPN Luar Negeri	17.398	10.808
Bea Meterai	3.687	1.331
Jumlah	5.468.953	3.350.656

Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD)

Penyediaan dana kepada pihak terkait diatur dalam Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan peraturan ini, penyaluran dana besar merujuk pada pemberian dana kepada individu atau kelompok yang tidak termasuk dalam pihak terkait, yang besarnya mencapai 10% atau lebih dari modal inti bank. Secara keseluruhan, penyaluran dana besar kepada pihak terkait dibatasi paling tinggi 10% dari modal inti bank. Sementara itu, penyaluran dana kepada pihak selain terkait dibatasi paling tinggi 25% dari modal inti (Tier 1) bank. POJK BMPD bagi BUS ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022

BSI memiliki Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024 yang mengatur berbagai kebijakan terkait pemberian pembiayaan, baik kepada Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah, serta kebijakan pembiayaan dalam Valuta Asing. Dalam menjalankan kebijakan ini, BSI selalu mengacu pada ketentuan regulasi perbankan yang berlaku, dengan memastikan bahwa setiap pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Dalam pemberian pembiayaan, BSI mengikuti prosedur yang serupa dengan pembiayaan pada umumnya, yaitu dengan mempertimbangkan keuntungan yang wajar bagi bank. Sebagai upaya untuk mengelola risiko, penyediaan dana besar *(large exposure)* kepada satu peminjam atau kelompok peminjam yang mencapai 10% atau lebih dari modal inti bank harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Proses pemberian pembiayaan ini diawasi dengan seksama oleh Komite Pembiayaan, yang terdiri dari anggota yang kompeten, termasuk Direktur Utama, yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan besar. Jika Direktur Utama berhalangan hadir, Wakil Direktur Utama dapat menggantikan posisinya dalam proses pengambilan keputusan.

Pada tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BPMD.

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar

No	Penyedia Dana	2024		2023	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)	*Number of Account* (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1.112	1.430.221	781	1.216.755
2	Kepada 25 Debitur Inti				
	Individu	25	35.204.051	25	33.353.263
	Grup	25	49.455.058	25	46.735.610
	Total Debitur Inti	50	84.659.109	50	80.088.873

Transaksi *Spot* dan *Forward*

Informasi mengenai transaksi *spot* dan *forward* BSI adalah sebagai berikut

Tabel Transaksi *Spot dan Forward*

No.	Transaksi	2024					2023				
		Nominal	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas		Nominal	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas	
			Bukan *Hedging*	*Hedging*	Tagihan	Liabilitas		Bukan *Hedging*	*Hedging*	Tagihan	Liabilitas
A.	**Terkait dengan Nilai Tukar**	954.260	96.570	857.690	-	-	**114.862**	-	**114.862**	-	-
1	*Spot*	96.570	96.570	-	-	-	-	-	-	-	-
2	*Forward*	857.690	-	857.690	-	-	114.862		114.862	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	**Lainnya**	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Jumlah		954.260	96.570	857.690	-	-	**114.862**		**114.862**	-	-



HUMAN CAPITAL

05 »


Kelola
Keterbukaan
Info Saham
Permintaan Info
ID - EN
Bank Syariah Indonesia

Strategi Manajemen *Human Capital*



Bank telah menetapkan *Human Capital Roadmap* untuk mendukung transformasi organisasi dan sumber daya manusia (SDM) BSI yang inovatif dan proaktif dalam menjawab tantangan serta perubahan di masa yang akan datang. Fokus strategi *Human Capital* (HC) pada tahun 2024 adalah peningkatan produktivitas pegawai, perbaikan bisnis proses, penyelarasan kinerja dengan *reward*, akselerasi peningkatan kapabilitas pegawai, serta penguatan integrasi budaya *risk awareness* perusahaan. Fokus tersebut bertujuan untuk memperkuat kebijakan fundamental *human capital*.

Beberapa program yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mendukung implementasi fokus strategi Human Capital di antaranya adalah penyelenggaraan program Staff Development Program (SDP), Officer Development Program (ODP), Talent *on Assignment* pada intitusi-institusi di luar bank, Program Beasiswa S2 bagi pegawai talent BSI tahun 2024 pada universitas ranking top 50 dunia, dan pemutakhiran Human Capital Information System (HCIS).

Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen akan kesejahteraan pegawai, manajemen melakukan *annual increment*, melanjutkan pemberian token bonus di tengah tahun, memberikan apresiasi umroh bagi pegawai terbaik, memberikan program ESOP bagi pegawai bertalenta, memberikan perluasan fasilitas kendaraan bagi pejabat representative Bank bagi seluruh unit kerja, dan memfasilitasi berbagai *program well-being*.

Pengembangan organisasi selaras dengan *Corporate Plan* PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2022-2032 dengan aspirasi BSI menjadi Top 10 Global Syariah Bank. Dalam mencapai aspirasi tersebut BSI secara berkesinambungan melakukan *review* terhadap organisasi guna pencapaian *key metric* BSI, antara lain peningkatan *customer base*, profitabilitas dan *volume asset* bank pada tahun 2024 melalui penyesuaian struktur organisasi yang berfokus pada:

a. Memperkuat BSI dengan struktur organisasi yang lean dan efektivitas proses bisnis yang dapat mempercepat dan optimalisasi pelayanan bank terhadap nasabah.
b. Memperkuat fungsi IT untuk mendukung stabilisasi, realibilitas dan keamanan IT Bank.
c. Mengembangkan bisnis, infrastruktur maupun *operations digital* BSI.
d. Penguatan BSI performance culture melalui peningkatan *Product Holding Ratio* (PHR) dengan pendekatan *customer centric organization*.
e. Penguatan *Good Corporate Governance* melalui pembentukan unit kerja yang mengelola fungsi ESG dan Pelindungan Data Pribadi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen *Human Capital*

Rekrutmen

Pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan dan strategi Bank merupakan hal esensial dalam menunjang pelaksanaan layanan, operasional, maupun bisnis Bank. Pemenuhan pegawai dilakukan sesuai rencana pemenuhan pegawai (*man power planning*) dengan mempertimbangkan strategi Bank, anggaran, kebutuhan organisasi, *source* pegawai, maupun waktu pemenuhan pegawai.

Kebutuhan pegawai Bank dipenuhi dari sumber internal dan eksternal melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penentuan kualifikasi, pencarian kandidat, proses seleksi dan penempatan.

Dalam pemenuhan kebutuhan pegawai diutamakan dipenuhi dari internal Bank yang dilakukan melalui skema rotasi, mutasi dan promosi pegawai. Sementara itu, dalam hal pemenuhan kebutuhan pegawai dari eksternal Bank, dilakukan melalui jalur seleksi sebagai berikut:

1. Reguler
   Jalur pemenuhan pegawai yang diperuntukkan bagi kandidat yang baru lulus kuliah (*fresh graduate*) untuk menempati jabatan level Staff di Kantor Pusat, *Regional Office* berserta Unit Kerja di bawah koordinasi *Regional Office*.
2. *Professional Hire*
   Jalur pemenuhan pegawai yang diperuntukkan bagi kandidat yang telah memiliki pengalaman memadai di bidang pekerjaannya sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan untuk menempati jabatan pada *level Officer*, *Manager*, *Middle Manager*, *Senior Manager*.
3. Officer Development Program (ODP)
   Jalur pemenuhan pegawai yang diperuntukkan bagi talenta terbaik fresh graduate untuk ditempatkan di jabatan level Officer dan dikembangkan menjadi pemimpin Bank di masa depan (*future leader*).

   Pada tahun 2024, seleksi kebutuhan ODP dilakukan dengan program baru yaitu BSI ROCK (BSI *Recruitment on Campus for Knowledge*) yang merupakan program one stop recruitment untuk membangun *employer branding*, *sharing knowledge* dan *connecting business*. Salah satu agenda yang diselenggarakan dalam rangkaian program BSI ROCK yaitu *sharing knowledge* terkait BSI *profile*, literasi perbankan syariah, peluang karir di BSI, keterampilan yang dibutuhkan di industri saat ini dan wawasan lain dengan menghadirkan pembicara Board of Director BSI.

Pada tahun 2024, BSI melakukan rekrutmen eksternal sebagai berikut:

Program	Jalur Rekrutmen	Jumlah Pegawai
Non-Development Program	Reguler	175
	Professional Hire (Pro Hire)	
Development Program	Officer Development Program (ODP) General, Wholesale, IT, Digital	315

Pengembangan Kompetensi

Berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Human Capital Bab V Pelatihan dan Pengembangan, metode pengembangan kompetensi dan pembelajaran pegawai mengacu kepada pendekatan *experience*, *engagement*, dan *education*. Komposisi pengembangan disesuaikan dengan level dan kebutuhan jabatan saat ini (*current*) maupun jabatan proyeksi (*future*).

a. *Experience*
   Pengembangan kompetensi dan pembelajaran Pegawai yang dilakukan melalui pengalaman kerja nyata atau penugasan lain yang dapat berbentuk antara lain: penempatan dan penugasan (rotasi/mutasi), penugasan sementara (*detasering*), penugasan ke dalam *project* strategis Bank, *attachment* (magang) ke perusahaan induk atau perusahaan lain di dalam group, *on the job training*, dan *role play*.
b. *Engagement*
   Pengembangan kompetensi dan pembelajaran Pegawai yang dilakukan melalui interaksi individu antara pegawai dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Bank, yang dapat berbentuk namun tidak terbatas kepada *coaching*, *counselling* atau *mentoring*.

c. *Education*
Program pengembangan kompetensi dan pembelajaran pegawai secara sistematis yang dapat dilakukan secara mandiri maupun di dalam kelas sesuai jenis-jenis layanan pembelajaran.

Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan Bank sesuai dengan kebutuhan di posisinya. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

No	Nama Kompetensi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	*Business Capabilities*	8.397	Mampu memahami pengembangan kapabilitas organisasi meliputi pengelolaan proses bisnis.
2	*Financing Analysis*	583	Mampu melakukan analisis pembiayaan terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.
3	*Asset & Liability Management*	342	Mampu memahami *treasury* dan pengelolaan portofolio pada neraca bank dengan mempertimbangkan risiko perbankan syariah.
4	*Investment & Portfolio Management*	126	Mampu memahami produk-produk keuangan dan instrumen-instrumen di pasar modal.
5	*Customer Relationship Management*	7.740	Mampu memahami kebutuhan nasabah dengan memberikan solusi tepat dan menjalin relasi baik untuk pencapaian target Bank.
6	*Stakeholder Management*	258	Mampu melakukan pengelolaan hubungan dengan *stakeholder* internal dan eksternal perusahaan.
7	*Product Knowledge*	9.398	Mampu memahami pengetahuan, keterampilan dan keahlian mengenai produk dan layanan.
8	*Fiqh Muamalah Maaliyah*	11.938	Mampu memahami transaksi dalam syariat Islam, akad-akad pada produk perbankan, serta pengembangan produk.
9	*Product Development and Pricing*	473	Mampu memahami strategi pengembangan dan manajemen produk untuk nasabah.
10	*Human Capital Management*	256.382	Mampu memahami pengelolaan manajemen sumber daya manusia.
11	*Information & Communication Technology*	4.117	Mampu memahami kebutuhan nasabah IT, berikut mengelola strategi, perencanaan, pengembangan, arsitektur, infrastruktur, portofolio, operasional, keamanan serta kinerja fungsi IT dan *financial technology*.
12	*Digital Banking*	19.562	Mampu memahami keterampilan dan keahlian terkait dengan *digital awareness, Agile/entrepenuer thinking, risk & governance*.
13	*Data Analytic*	325	Mampu melakukan analisis data untuk kepentingan pasar dan nasabah.
14	*Legal & Compliance*	8.320	Mampu memahami ketentuan hukum, peraturan, dan perundang-undangan perbankan umum dan syariah.
15	*Operations*	9.610	Mampu memahami keseluruhan operasional perbankan syariah.
16	*Risk Management*	2.898	Mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.
17	*Audit*	4.360	Mampu memahami sistem pengendalian internal secara keseluruhan.
18	*Accounting and Finance*	1.001	Mampu memahami aktivitas mengelola data keuangan untuk kebutuhan internal dan kebutuhan eksternal, mengelola jasa pemeriksaan akuntansi, mengelola jasa perpajakan serta melakukan analisis dan kontrol keuangan.
19	*Procurement & Logistics Management*	27	Mampu memahami aktivitas pengelolaan logistik dan *procurement* yang menunjang aktivitas bisnis perbankan, juga mencakup pengelolaan inventori, pengelolaan vendor, pendataan dan pemeliharaan aset fisik perusahaan.
20	*Project Management*	22	Mampu melalukan kegiatan proyek meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.
21	*Strategic Banking Management*	1.288	Mampu melakukan penyusunan arah strategis perusahaan.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Hingga berakhirnya tahun buku 2024, BSI telah merealisasikan anggaran pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp132,7 miliar.

Pengembangan Karir

Salah satu bentuk pengembangan karir pegawai adalah melalui mekanisme promosi. Bank mengklasifikasikan proses promosi menjadi sebagai berikut:

1. Promosi Jabatan
   Promosi jabatan adalah proses penempatan pegawai dari kelompok jabatan yang lebih rendah ke kelompok jabatan yang lebih tinggi. Peningkatan jalur karir dimulai ketika pegawai memenuhi kualifikasi jabatan sesuai dengan persyaratan posisi di kelompok jabatan yang dituju.
2. Promosi Grade
   Promosi *grade* adalah proses penyesuaian *grade* ke *grade* yang lebih tinggi. Bank dapat mempertimbangkan memberikan promosi *grade* kepada pegawai yang memenuhi parameter yang telah ditetapkan.

Penilaian Kinerja

BSI menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pencapaian kinerja pegawai.
2. Mengembangkan budaya kerja perusahaan yang positif dan berorientasi kepada pencapaian produktivitas.
3. Meningkatkan *engagement* pegawai.

Proses pengelolaan kinerja dilakukan secara berkesinambungan dengan memastikan adanya keselarasan, yaitu dari penetapan *Corporate Goals* diturunkan menjadi target dan sasaran unit kerja hingga level individu. Dengan demikian, keselarasan strategi dari korporat ke individu terjaga serta ada keterkaitan antara kinerja individu terhadap kinerja Bank.

Siklus pengelolaan kinerja secara tahunan dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan:

1. *Performance Planning* untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).
2. *Performance Monitoring* untuk mereviu sasaran dan target kinerja serta menentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan agar sasaran dan target tercapai.
3. *Performance Evaluation* yaitu evaluasi sasaran dan target kinerja yang ditetapkan untuk menghasilkan nilai kinerja pegawai di akhir periode.

Dalam proses pengelolaan kinerja pegawai, Bank mengutamakan terciptanya komunikasi 2 (dua) arah antara pegawai dan manajer agar tercipta hubungan yang harmonis dengan penyampaian saran perbaikan/umpan balik (*development dialogue*) yang diberikan oleh manajer untuk peningkatan kinerja pegawai. Seluruh proses pengelolaan kinerja telah dilakukan secara *online* melalui sistem kepegawaian (Sistem Informasi Pegawai/SIP) sehingga pegawai dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi tentang kinerja pegawai. Umpan balik pada penilaian kinerja akhir tahun akan dijadikan rencana pengembangan pegawai di tahun berikutnya.

Remunerasi

Bank Syariah Indonesia menaati ketentuan pemerintah yang berlaku terkait remunerasi pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku antara lain standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah perusahaan beroperasi. Pengelolaan sistem remunerasi (*reward*) adalah salah satu strategi Bank dalam memberikan remunerasi kepada pegawai yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial yang kompetitif. Kebijakan sistem imbalan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2024 telah melalui penyelarasan dengan posisi remunerasi pegawai BSI terhadap *market* untuk memastikan BSI tetap kompetitif.

Reward diberikan oleh Bank dengan mengedepankan prinsip *competitiveness* dan *fairness* yang berbasis kinerja dan risiko dengan mempertimbangkan pelaksanaan *best practice* dalam industri perbankan. Untuk dapat mempertahankan *market competitiveness*, secara reguler, Bank menggunakan hasil Survei Gaji Tahunan (*Annual Salary Survey*) di industri perbankan di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga survei independen yang kompeten.

Tujuan pemberian *reward* adalah untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar, meretensi (*retention*) para pegawai talenta, dan memotivasi pegawai terutama pegawai talenta. Selain itu, pemberian *reward* tersebut sebagai upaya menarik (*attracting*) talenta terbaik di industri yang dibutuhkan Bank untuk mencapai tujuan bisnis dan menjaga kesinambungan usaha.

Bank memberikan *reward* yang bersifat finansial dan non-finansial. *Reward* yang bersifat finansial diberikan dalam bentuk bantuan suka cita dan duka cita, serta bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah bencana alam. Sementara itu, *reward* yang bersifat non-finansial antara lain dalam bentuk apresiasi Umrah bagi 26 pegawai terbaik pada Quartal 3 (Q3) tahun 2024. Pemberian apresiasi Umrah tersebut merupakan *Unique Value Proposition* (UVP) dari BSI di market sebagai salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan menumbuhkan nilai-nilai spiritual Islami bagi pegawai penerima apresiasi Umrah. Apresiasi lain yang berbentuk non-finansial juga diberikan dalam bentuk *recognition* kepada unit kerja dan individu berdasarkan inovasi terbaik atau pencapaian khusus lain yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja maupun reputasi BSI. Apresiasi tersebut diberikan pada acara "*BSI Excellence Award*" sebagai bentuk apresiasi tertinggi dari Bank.

Program Pensiun

Bank telah menyusun kebijakan atas program pelatihan atau pembekalan untuk pegawai yang akan memasuki masa purnabakti dengan kriteria peserta dan waktu yang jelas dan terencana. Pelaksanaan pelatihan tersebut diikuti pula oleh pasangan pegawai.

System and Infrastructure
Human Capital

Sistem dan infrastruktur *Human Capital* pada bank adalah kerangka yang dirancang untuk mengelola sumber daya manusia secara strategis, guna mendukung pencapaian tujuan bisnis bank. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen utama dari sistem dan infrastruktur tersebut:

a. Organisasi
   1. Struktur Organisasi, menampilkan bagan organisasi serta deskripsi jabatan.
   2. Peraturan Perusahaan, menampilkan ketentuan pengelolaan SDM yang berlaku.

b. *Employee*/Pegawai
   1. *Employee Information*/Informasi Pegawai, informasi detil mengenai pribadi pegawai.
   2. *Employee Letter*/Surat Pegawai, informasi surat ketetapan dan penugasan pegawai.
   3. *Employee Request*/Permohonan Pegawai, daftar pengajuan transaksi pegawai.
   4. *Employee Work Status*/Status Kerja Pegawai, informasi mengenai survey pegawai dan atau status pekerjaan dalam masa pandemi.
   5. *Curriculum Vitae*, rangkuman mengenai informasi pegawai mengenai data pribadi, training, karir serta prestasi & sanksi pegawai
   6. *Announcement*, sarana informasi ke seluruh pegawai.

c. *Career*/Karir
   1. *Award*/Penghargaan, daftar data penghargaan pegawai.
   2. *Disipline*/Pelanggaran, daftar data pelanggaran pegawai.
   3. *Career Transition*/Perubahan Karir, daftar data karir pegawai yang di ajukan oleh admin pusat

d. *Time*/Waktu Kehadiran
   1. Presensi/Kehadiran, daftar kehadiran personal pegawai.
   2. Daftar Data Kehadiran, data kehadiran seluruh pegawai (sesuai kewenangan).
   3. *Employee Logbook*, data catatan pekerjaan pegawai.
   4. *Attandance Correction Request*, perbaikan data presensi.
   5. *Leave*/Cuti, data pengajuan cuti pegawai.
   6. *Overtime*/Lembur, data pengajuan lembur pegawai.
   7. *On Duty*/Perjalanan Dinas, data pengajuan perjalanan dinas.

e. *Reimbursement*
   1. Daftar *Reimbursement*/Klaim, daftar data pengajuan reimbursmen.
   2. Pengajuan *Reimbusement*/Klaim, data klaim pengajuan reimburse.
   3. Pembatalan *Reimbursement*/Klaim, pembatalan pengajuan reimburse.

f. *Loan*/Pinjaman, pengajuan FPP / pembiayaan pegawai

g. *Payroll*
   1. *Salary History*/*Payslip*
   2. Data daftar *salary*/gaji

h. *Performance*/Evaluasi
   1. *Key Performance Indicators* (KPI): Kinerja karyawan diukur berdasarkan KPI yang terkait dengan strategi bank.
   2. Penilaian Berbasis Kompetensi: Fokus pada pencapaian target dan perilaku kerja sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

i. *Training*, data Training Pegawai.

j. *Recruitment*, penerimaan pegawai internal dan external.

Internalisasi Budaya

Menanamkan Nilai AKHLAK: Mendorong Inovasi dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan di 2024

Tahun 2024 menjadi momentum strategis bagi BSI untuk mengintegrasikan *core values* AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) ke dalam setiap aspek operasional dan budaya kerja. Manajemen secara konsisten terlibat dalam kegiatan internalisasi BSI *One Culture* seperti Nobar Video AKHLAK, Taujih Pekanan Ber-AKHLAK, CEO Menyapa, program BYOND by BSI Activation, serta kegiatan-kegiatan internalisasi budaya lainnya. Dengan mengedepankan inovasi sebagai katalis perubahan dan kolaborasi sebagai penggerak harmoni, BSI meluncurkan sejumlah program yang bertujuan menciptakan dampak berkelanjutan bagi internal organisasi dan seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan semangat Kompeten dan Adaptif, BSI memperkuat budaya inovasi melalui Innovation Culture Journey 2024. Program ini bertujuan mendorong kreativitas insan BSI sekaligus menciptakan ekosistem yang mendukung ide-ide baru menjadi solusi nyata. Adapun inisiatif utama dalam program ini meliputi:

1. *Innovation Challenge*: Kompetisi inovasi ini terdiri atas tiga kategori utama, yaitu:
   - *Best Idea - Breakthrough*, untuk ide inovatif dengan potensi perubahan besar.
   - *One Unit One Implementation Innovation*, menantang setiap unit kerja untuk menerapkan setidaknya satu inovasi di unit kerja.
   - *Best Implementation - Breakthrough*, penghargaan bagi inovasi yang berhasil diterapkan dan membawa dampak signifikan.
2. Webinar *Innovation Series* dan *Innovation Clinic*: Dilaksanakan secara *hybrid* (*online* dan *offline*), kegiatan ini menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pendampingan praktis untuk mempercepat adopsi inovasi di seluruh lini organisasi.
3. Pembakuan Proses Inovasi: Sebagai langkah strategis, BSI berkomitmen menjadikan proses inovasi sebagai bagian dari kebijakan dan aturan perusahaan, memastikan keberlanjutan dan keselarasan inovasi dalam kerangka kerja yang terstruktur.

Dalam semangat *Harmonis* dan *Kolaboratif*, BSI meluncurkan *Collaboration Survey* sebagai langkah konkret untuk mengukur dan memperkuat sinergi antarunit kerja. Survei ini memungkinkan setiap unit kerja memberikan penilaian, umpan balik, atau apresiasi terhadap unit kerja lain yang telah berkolaborasi. Program ini tidak hanya mendorong transparansi dan perbaikan berkelanjutan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang saling mendukung dan mengapresiasi.

Dengan landasan nilai AKHLAK, BSI berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dan memperkuat kolaborasi di tahun-tahun mendatang. Budaya kerja yang *Amanah*, *Kompeten*, *dan Adaptif*, serta kolaborasi yang *Harmonis dan Loyal*, organisasi akan terus tumbuh menjadi entitas yang relevan, kompetitif, dan membawa manfaat luas bagi masyarakat. BSI One Culture dalam men-*drive performance* menjadikan insan BSI memiliki *high performance high engagement*.

Keterbukaan Informasi
Kepada Pegawai

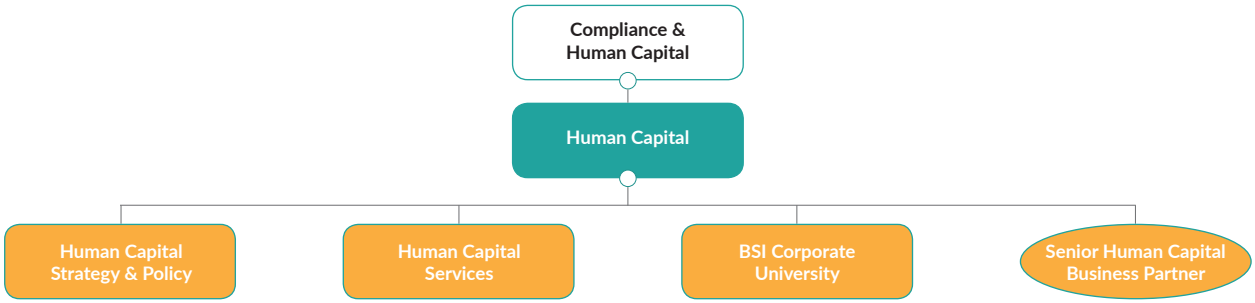
Sekretaris Komite Policy & Procedure (Unit Kerja Policy & Procedure) melakukan sosialisasi atas ketentuan Bank bersama dengan Unit Kerja Owner, terdapat beberapa media sosialisasi yang dilakukan, yaitu:

1. Pembuatan sosialisasi ketentuan melalui Infografis dan *Executive Summary*.
2. Sharing Knowledge
   Sekretaris Komite Policy & Procedure ((Unit Kerja Policy & Procedure) bersama Unit Kerja Owner sebagai narasumber dalam Sharing ketentuan kepada seluruh pegawai BSI berkoordinasi dengan BSU.
3. *Refreshment* dan Quiz
   Pegawai mengakses materi baca melalui *New Policy System* dan mengerjakan Refreshment menggunakan *Learning Management System* (SMILE). Refreshment dan Quiz dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun dimana hal ini bekerjasama dengan BSU.
4. Update NPS (*New Policy System*)
   NPS merupakan aplikasi yang berbasis *web* dimana berisikan seluruh ketentuan internal Bank Syariah Indonesia sehingga memudahkan User untuk mengakses ketentuan dan juga memberikan pemahaman kepada *User* terkait pengimplementasian ketentuan Bank.

Berikut uraian Data Sosialisasi, *Sharing Knowledge*, *Refreshment*, dan *Quiz* periode Januari sampai dengan 31 Desember 2024:

Pelaksanaan Sosialisasi Periode Januari sampai dengan Desember 2024				
Lingkup Pengaturan	Sosialisasi (Exsum & Infografis)	*Sharing Knowledge*	*Refreshment*	*Quiz*
BUS	91	4	2	2
FTD	70	5	2	2
RFD	90	4	2	2
WFD	93	4	3	3
ERI	-	5	-	-
Total	**344**	**22**	**9**	**9**

Struktur Pengelola
Human Capital



BSI menggunakan pendekatan *human capital framework* yang sejalan dengan *employee journey* atau *employee life cycle* dalam pengelolaan *human capital*. Organisasi pengelolaan Human Capital di BSI terdiri dari Human Capital Strategy & Policy Group yang merumuskan kebijakan dan strategi terkait human capital, Human Capital Services Group yang menangani operasional layanan kepegawaian, BSI Corporate University yang menyelenggarakan program pengembangan kompetensi pegawai, serta HC Business Partner yang bermitra dengan unit kerja sebagai *strategic partner* untuk mendukung pencapaian target bisnis.

Rencana Kerja
Human Capital 2025

Rencana kerja *human capital* untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan dan *system career path* pegawai kantor pusat dan jaringan.
b. Melakukan re-desain organisasi dan perencanaan *strategic workforce* serta pemenuhan *critical position*.
c. Meningkatkan produktivitas pegawai melalui penajaman KPI, perbaikan benefit, skema insentif untuk Top Performing Sales, dan program peningkatan kapabilitas pegawai (*upskilling*, *reskilling*, dan uji kompetensi).
d. Mengoptimalkan pengembangan pegawai melalui pelaksanaan *Development Dialogue*, pelaksanaan *Individual Development Planning* (IDP), *Self-Assessment*, dan pemantauan *Competency Performance Index* (CPI).
e. Mempersiapkan ketersediaan suksesor melalui pengembangan kebijakan talent dan peningkatan rasio *bench strength*, khususnya untuk posisi manajerial.
f. Menjalankan berbagai *inisiatif project* dan penyempurnaan HCMS dalam rangka mendukung pencapaian target *bankwide*.



TEKNOLOGI INFORMASI

06 »



Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi

Dalam rangka mencapai visi menjadi "*Top 10 Global Islamic Bank* di 2025" dan "*Top 5 Global Islamic Bank* di 2030" serta misi untuk meningkatkan jumlah nasabah, aset, dan *Return on Equity* (ROE), BSI menyusun strategi Teknologi Informasi (TI) 2024 – 2026. Strategi ini berfokus sebagai penyedia *platform* keuangan syariah terbaik pada solusi finansial, sosial dan spiritual. Sebagai acuan dalam penetapan dan eksekusi strategi, BSI menyusun *House of Strategy IT* dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu *People*, *Process & Technology*. Bank melakukan beberapa inisiatif dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

a. *People:* Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen pegawai dan *training & development*.
b. *Process:* Perbaikan proses TI secara kontinu dengan perbaikan tata kelola pengelolaan di fase *project* (SDLC) hingga operasional.
c. *Technology:* Pelaksanaan inisiatif strategis TI pada 4 (empat) domain arsitektur TI (Aplikasi, Infrastruktur, *Security*, dan Data)

Selaras dengan fokus strategi 2024 - 2026, BSI menyusun strategi TI untuk tahun 2024 sebagai berikut:

a. *Digital Solution for Retail and Wholesale*
b. *Business & Operation Transformation*
c. IT RASS (*Reliability, Availability, Serviceability, Security*)

Inovasi Teknologi Informasi

PT Bank Syariah Indonesia Tbk terus melakukan perencanaan dan pengembangan TI dalam hal ini teknologi dan infrastruktur untuk mendukung strategi BSI 2024 yang di antaranya terkait dengan *core banking*, serta penguatan bisnis dan *digital banking*. Berikut merupakan beberapa inovasi pengembangan teknologi informasi pada tahun 2024:

1. Peluncuran aplikasi *superapps* BYOND by BSI, pengembangan BYOND by BSI sebagai *one stop digital platform financial superapp* untuk menjadi sahabat spiritual, sosial, dan finansial.
2. Aplikasi Bewize dengan salah satu fitur utama *Cash Management System*, sebagai layanan perbankan nasabah perusahaan ataupun institusi untuk pengelolaan keuangan nasabah secara terpadu.
3. Penambahan dan *replacement* ATM dan CRM, untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi di lokasi yang *Strategic, Visible & Secure*.
4. Pengembangan lanjutan yang berfokus pada *project Government & Regulatory*, dalam mendukung *project* pemerintahan dan regulator, seperti pengembangan BI Fast dan QRIS.
5. Pengembangan lanjutan terkait penguatan perimeter keamanan sistem.
6. Pengembangan *Data Center* yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan layanan dan ketahanan sistem.
7. Pengembangan lanjutan *Big Data & Analytic*, pengembangan dan perluasan kapabilitas teknologi *Big Data & Data Analytics* dengan memanfaatkan data untuk *analytic & decision making* sebagai *data master*, serta mendukung layanan sesuai kebutuhan nasabah serta melakukan pengembangan bisnis berbasis data.

Infrastruktur
Teknologi Informasi

Bank Syariah Indonesia (BSI) senantiasa meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis, jumlah nasabah, dan transaksi. BSI melakukan pengembangan infrastruktur berupa implementasi *Data Center* untuk pemenuhan *high availability* dengan *Intercity Data Center*, penambahan kapasitas infrastruktur *server, storage*, dan pemutakhiran *platform* teknologi, serta implementasi *Cloud* untuk mendukung operasional aplikasi seperti *superapps* BYOND by BSI. Selain itu, BSI melakukan penguatan keamanan teknologi dan ketahanan terhadap ancaman siber dengan mengimplementasikan *Extended Security Intelligence & Automation Management* (XSIAM) dan *Multifactor Authentication* (MFA).

Tata Kelola
Teknologi Informasi

Proses pengembangan TI menggunakan metode *agile* dan/atau *waterfall* yang diatur dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC). Dalam pelaksanaannya terdapat pembagian fase yang pengembangannya dimulai dari *Planning, Design, Development, Testing, Release and Deployment* ke *environment production*, hingga *Post Implementation Review* (PIR).

Strategi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Tahun 2024

Strategi dan langkah peningkatan kapabilitas keamanan siber BSI mencakup 3 (tiga) aspek yaitu "*People, Process & Technology*".

PEOPLE

Sebagai langkah peningkatan kapabilitas sumber daya manusia teradapat beberapa *action* yang dilakukan di antaranya:

a. Pemenuhan pelatihan dan sertifikasi kepada 33 pegawai CSO.
b. Pemenuhan posisi pegawai "*vacant*" level N2, N3 dan N4 dengan total 12 pegawai.
c. Pemenuhan aktivitas *IT Security Awareness* kepada internal dan eksternal.

PROCESS

Aspek *process* juga menjadi *concern* yang ditingkatkan secara kapabilitas pengamanan siber dengan dilakukannya *action* di antaranya:

a. Implementasi sertifikasi ISO 27001:2022.
b. Optimalisasi aktivitas proaktif seperti *threat hunting* (*darkweb*) dan *takedown services* terhadap akun atau *website* palsu yang mengatasnamakan BSI.
c. Pelaksanaan *Phishing simulation* terhadap pegawai internal untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber.

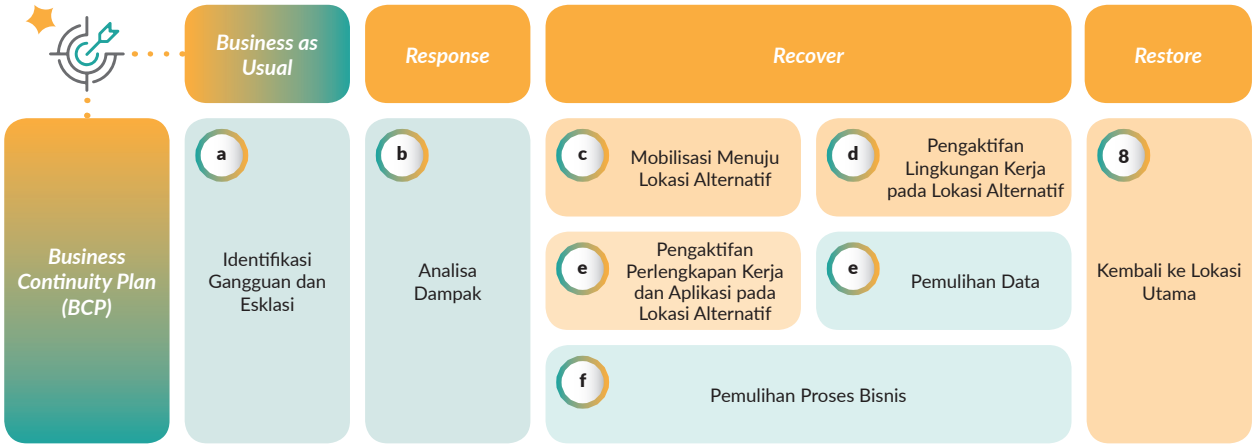
TECHNOLOGY

BSI berhasil meningkatkan kapabilitas pengamanan siber pada aspek *technology* yang terbukti dengan BSI terbukti dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024 *Rating Scorecard* BSI stabil pada predikat "A" , tidak terjadinya *security* insiden yang bersifat major dan terjadi peningkatan skor maturitas keamanan siber (parameter OJK) untuk periode data per-akhir Desember 2024.

Peningkatan kapabilitas serta perbaikan yang berjalan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mendukung visi BSI 2030 yaitu menjadikan BSI terbaik dalam keamanan siber pada industry global perbankan syariah. Aspek *People*, *Process*, *Technology* untuk mencapai *Strong Rating* (*Public & Internal*), peningkatan security maturity level yang bertumbuh, serta organisasi yang *Lean* dan proaktif dalam mengelola risiko keamanan siber.

Mekanisme Identifikasi Disrupsi (Gangguan)

BSI telah memiliki mekanisme untuk mengidentifikasi disrupsi atau gangguan. Hal itu diatur dalam ketentuan umum terkait *Business Continuity Management* (BCM) dan secara khusus dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Business Continuity Plan* (BCP). Jika terjadi gangguan pada TI, Bank mengatasinya berdasarkan tahapan identifikasi kejadian *disaster* agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai hasil identifikasi dan kewenangan struktur organisasi *Crisis Management Team* (CMT).



Strategi Keamanan Sistem Siber (*Cyber Security*)

BSI menerapkan semua kebijakan dan standar prosedur TI di Bank, sekaligus memastikan setiap informasi yang dimiliki oleh unit kerja pengguna TI mendapatkan perlindungan yang baik terhadap semua gangguan yang dapat menyebabkan kerugian akibat bocornya data atau informasi penting. Bank memastikan pengawasan keamanan yang memadai dalam setiap pengembangan atau modifikasi sistem TI dan memastikan ketahanan dan keamanan siber Bank secara independen terhadap fungsi pengelolaan operasional TI. Penerapan prinsip dasar keamanan siber di BSI, antara lain mencakup:

1. Informasi adalah aset
2. Kesesuaian dengan risiko
3. Kepatuhan terhadap peraturan
4. Pemberian persetujuan
5. Beradaptasi dan terukur
6. Sistem aman secara desain
7. Pertahanan yang berlapis
8. Pemisahan tugas dan pembatasan akses
9. Akuntabilitas
10. Audit
11. Perbaikan berkesinambungan

Kriteria dalam pengendalian keamanan siber yang digunakan adalah:

1. Kerahasiaan (*Confidentiality*)
2. Keutuhan (*Integrity*)
3. Ketersediaan (*Availability*)

BSI telah membentuk unit kerja *Chief Information Security Office* (CISO) Group yang bertugas untuk mengelola keamanan siber dengan berfokus pada 6 aspek, diantaranya yaitu:

1. Proyek Keamanan Siber dan Quality Assurance
2. Pengelolaan Identity dan Keamanan
3. AplikasiPengelolaan Keamanan jaringan dan data
4. Layanan berbasis keamanan IT
5. Pengelolaan Keamanan Operasional
6. Pengelolaan Monitoring Keamanan Siber

Dalam mendukung digitalisasi layanan perbankan BSI, strategi keamanan siber dirancang sejalan untuk mengamankan BSI dari ancaman siber terhadap platform digital, baik ancaman yang datangnya dari luar maupun dari dalam BSI. BSI juga menerapkan kerangka keamanan siber NIST dan kerangka manajemen keamanan siber lainnya yang digunakan sebagai praktik keamanan global di *industry* keuangan.

Dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2024, Postur keamanan BSI secara konsisten menunjukkan Kinerja dengan Rating Terbaik (*Strong Rating A*) dan berada di atas rata-rata Rating di Industri Keuangan global (*Rating B*). Postur Keamanan ini dinilai secara *independent* oleh Security ScoreCard, sebuah badan yang bergerak di *industry Rating* keamanan dunia yang berbasis di Amerika Serikat.

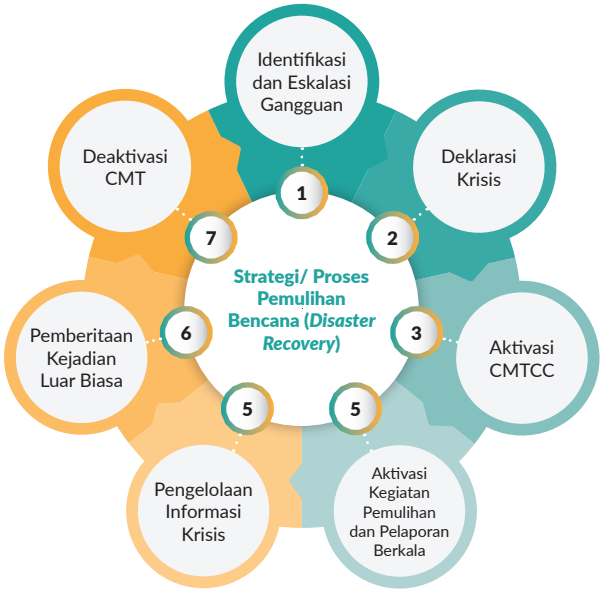
Secara *industry practice*, BSI juga telah tersertifikasi oleh ISO 27001:2022 semenjak Februari 2024 (disertifikasi oleh British Standard Institute/BSI), yang juga merupakan standar kualifikasi keamanan siber standar internasional. BSI juga mendapatkan hasil penilaian Maturitas Keamanan Siber dengan status "Tinggi (Tingkat 2)" sesuai *assesment* oleh Ernst & Young (EY) dengan pengukuran keamanan Siber sebagaimana yang diatur di dalam SEOJK No.29 Tahun 2022.

BSI akan terus mengembangkan dan memperbaiki strategi dan implementasi keamanan siber secara terus menerus untuk memastikan pelanggan selalu mendapatkan layanan yang aman dan handal dari BSI sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual.

Strategi/Proses Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*)

Pada prinsipnya, kebutuhan Bank saat terjadi kondisi krisis adalah menciptakan bisnis kembali ke kondisi normal. Proses pemulihan bencana (*disaster recovery*) merupakan integrasi antara *Emergency Respon* (ER), *Business Continuity* (BC), dan *Data Recovery* (DR).

Bank telah memiliki prosedur penanganan krisis, di antaranya meliputi kegiatan identifikasi gangguan, proses deklarasi krisis, hingga aktivasi kegiatan pemulihan. Alur prosedur *Crisis Management Plan* adalah sebagai berikut:



Penjelasan detail terkait prosedur penanganan krisis sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Eskalasi Gangguan
   a. Pegawai pihak terdampak mendeteksi adanya gangguan Kejadian Luar Biasa dan melakukan upaya perbaikan.
   b. Pegawai/pihak terdampak selanjutnya membuat laporan dan melakukan eskalasi kepada koordinator tim terkait.
   c. Koordinator Tim *Crisis Management* (CM), *Emergency Response* (ER), *Business Continuity* (BC), *Disaster Recovery* (DR) melakukan evaluasi dan analisa dari laporan Kejadian Luar Biasa. Dalam melakukan evaluasi dan analisa, Koordinator Tim terkait dapat berkonsultasi dengan BCM *Command Center*.
   d. Jika berpotensi menjadi krisis, maka Koordinator Tim terkait melakukan eskalasi kepada Ketua *Crisis Management Team* (CMT).
2. Deklarasi Krisis
   a. Ketua CMT mendapat laporan analisa gangguan Kejadian Luar Biasa yang berpotensi menjadi krisis.
   b. Verifikasi terhadap laporan gangguan yang berpotensi menjadi krisis tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi. Dalam melakukan verifikasi, Ketua CMT setempat dapat melakukan konsultasi kepada CMT/Ketua CMT level di atasnya.
   c. Jika gangguan tersebut tidak dapat ditangani dan berpotensi menjadi krisis, maka Ketua CMT akan melakukan "Deklarasi Krisis" jika dibutuhkan Tindakan.
3. Aktivasi *Crisis Management Team Crisis Center* (CMTCC)
   a. CM *Service* selaku penyelenggara, mengaktifkan CMTCC *Virtual* atau Fisik setelah mendapatkan instruksi dari Ketua CMT.
   b. CMT dapat melakukan koordinasi di CMTCC Virtual atau jika diperlukan bertemu maka dilakukan pada CMTCC Fisik.
   c. Jika CMTCC Fisik Utama bisa digunakan, maka CMT akan berkumpul di ruangan CMTCC. Namun apabila CMTCC Fisik Utama tidak bisa digunakan, maka CMTCC Fisik Alternatif perlu diaktifkan.
4. Aktivasi Kegiatan Pemulihan dan Pelaporan Berkala
   a. Ketua CMT memimpin, mengoordinasikan, dan menginstrusikan Kegiatan Pemulihan.
   b. Koordinator Tim Komunikasi Internal dan Eksternal, Koordinator Tim CM, ER, BC, DR menjalankan rencana komunikasi, pemulihan serta melaporkan perkembangannya kepada CM/ER/BC/DR *Services*, Wakil Ketua CMT, dan Ketua CMT.
   c. CM/ER/BC/DR *Services* bertugas untuk memandu dan memberikan saran dalam kegiatan pemulihan kepada Koordinator Tim Komunikasi, Koordinator Tim CM, Koordinator Tim ER, Koordinator Tim BC, dan Koordinator Tim DR.
   d. Setelah mendapatkan laporan perkembangan, CMT turut serta memberikan saran dalam kegiatan pemulihan.
5. Mekanisme Pengelolaan Informasi Krisis
   a. Pihak terkait menyampaikan adanya artikel negatif di media yang berisiko terhadap reputasi Bank dan dampak yang besar.
   b. Unit kerja yang terkait dengan substansi atau hal yang ada dalam artikel negatif tersebut menyusun kronologis.
   c. Dalam hal diperlukan maka unit *reviewer* dapat memberikan *review* atas substansi dari artikel negatif maupun kronologis tersebut.
   d. Artikel negatif, kronologis, dan *review* tersebut kemudian dikaji dan dianalisa oleh Koordinator Tim Komunikasi Internal dan/atau Eksternal.
   e. Koordinator Tim Komunikasi Internal dan/atau Eksternal lalu mengeluarkan usulan Strategi dan Taktik Pengelolaan informasi dan meminta persetujuan Ketua CMT.
   f. Setelah mendapatkan persetujuan, Ketua CMT memastikan pelaksanaan Strategi dan Taktik. Kemudian Koordinator Tim Komunikasi Internal dan/atau Eksternal bersama dengan Pihak Terkait melakukan eksekusinya.
   g. Koordinator Tim Komunikasi Internal dan/atau Eksternal melakukan eksekusi dan terus melakukan monitoring dan pelaporan.
6. Pemberitaan Kejadian Luar Biasa/Komunikasi Krisis
   a. Ketua CMT Kantor Pusat melakukan diskusi dan memerintahkan pembuatan Pemberitaan Kejadian Luar Biasa.

b. Koordinator Tim Komunikasi Eksternal Kantor Pusat lalu mengumpulkan informasi terkait kebutuhan komunikasi eksternal dari Pihak Terkait.
c. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, Tim Komunikasi Eksternal Kantor Pusat menyusun draf siaran pers, kemudian meminta persetujuan kepada Ketua CMT Kantor Pusat.
d. Setelah *draft* siaran pers disetujui, Koordinator Tim Komunikasi Eksternal Kantor Pusat akan mempertimbangkan untuk menyelenggarakan Konferensi Press atau melakukan siaran pers.
e. Jika melakukan konferensi pers, maka Juru Bicara Bank yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menyampaikan dan menanggapi pesan dari pihak eksternal.

7. Deaktivasi *Crisis Management Team* (CMT)
   a. Tim Komunikasi Eksternal, Koordinator Tim CM, Koordinator Tim ER, Koordinator Tim BC, Koordinator Tim DR menyelesaikan kegiatan komunikasi dan pemulihan pada lokasi yang terdampak.
   b. Ketua CMT melakukan evaluasi pasca krisis dan terus mengkomunikasikannya kepada CMT.
   c. Setelah krisis dianggap berakhir, maka pada level Region/Area/Cabang/KLN, Ketua CMT setempat mendeklarasikan berakhirnya krisis dan operasional kembali *as usual*.
   d. Pada level Kantor Pusat, Ketua CMT Kantor Pusat mendeklarasikan berakhirnya krisis lalu melanjutkan serah terima pengawasan *business as usual* kepada *Head of* BCM.

Sistem Pelaporan kepada Direksi

Berkenaan dengan pelaporan kepada Direksi terkait dengan dinamika di bidang TI, Bank telah memiliki prosedur, seperti tergambar di bawah ini.

Alur Proses Eskalasi Crisis Insiden IT

Tim 1 s.d. 5 Pra Crisis (Insiden IT)



- Menerima Laporan Insiden IT
- Melakukan Deteksi Problem
- Tindak lanjut penanganan insiden
- Update ke DIR IT, DIR RISK, SOR IT dan BCM
- Penonaktifan Layanan (sesuai kewenangan)
- Mempersiapkan *Holding Statement & Pelaporan*
- Mempersiapkan *Switch Over*
- SteerCo BCM
- Deklarasi krisis & Pengaktifan CMT
- Keputusan *switch over*



Ketua CMT dan Head of BCM

- Setelah menerima *update* dari GH IOG/ CSO, Ketua CMT dan/atau *Head of* BCM akan melakukan analisa singkat
- Dengan pertimbangan Analisa, makan dideklarasi/ diaktifkan ***Crisis Management Team*** **(CMT)**



Ketua CMT dan Head of BCM

Melakukan koordinasi dengan anggota CMT di *Command Center*



Anggota CMT

1. IOG
2. HCS
3. CSO
4. BCM
5. DSG
6. DSG
7. CSG
8. CFA
9. PFA
10. SPM
11. ASP
12. Unit *Support*

Keterangan:

CM	: Crisis Management	DR	: Disaster Recovery
ER	: Emergency Response	BCM	: Business Continuity Management
BC	: Business Continuity	CMT	: Crisis Management Team

Ketua CMT dan Head of BCM





Anggota CMT

Ketua CMT dan Head of BCM:
Melaporkan kepada *Management* dan sebagai *Lead Crisis* Insiden IT

IOG / CSO / ASP:
- Penyelesaian *Fixing / Switch Over*
- Membuat Laporan secara tertulis ke Regulator terkait insiden TI: IOG -> Insiden *Non Cyber* CSO -> Insiden *Cyber* sesuai ketentuan:
  - Maks. 5 HK OJK setelah insiden terjadi (sesuai POJK 11 tahun 2022)
  - Maks. 3 HK ke BI terkait sistem pembayaran (OPG / TGM / DBO) setelah insiden terjadi (sesuai PBI 23/6/ PBI/2021)

SOR IT: Supervisi pada penyelesaian & Verifikasi Pelaporan

ISG: Koordinator PMO

CSG: *Courtesy & Press Release*

CCG: Penanganan keluhan nasabah melalui *contact center* dan media

HCP & HCS: Komunikasi Internal & Deployment Pegawai

SPM & CFA: Keuangan

DSG: Koordinator Jaringan (Region, Area dan Cabang)

CPG: *Support Compliance*

IOG/CSO:
Melaporkan ke Ketua dan Wakil Ketua CMT bahwa layanan sudah kembali normal

SOR IT:
Melakukan evaluasi kegiatan sesuai alur proses eskalasi



GH IOG/CSO SOR IT



Ketua CMT dan Head of BCM

Ketua CMT dan Head of BCM:
Menonaktifkan CMT dan menyusun laporan insiden

CSG & CCG: Melakukan publikasi bahwa layanan telah kembali normal

SME*): *Research* RCA

SOR IT: Supervisi *Research* RCA

*) *Subject Matric Expert* (SME) adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam bidang pekerjaan sesuai bidangnya

Anggota CMT





Ketua CMT dan Head of BCM



BoD



Struktur Pengelola
Teknologi Informasi

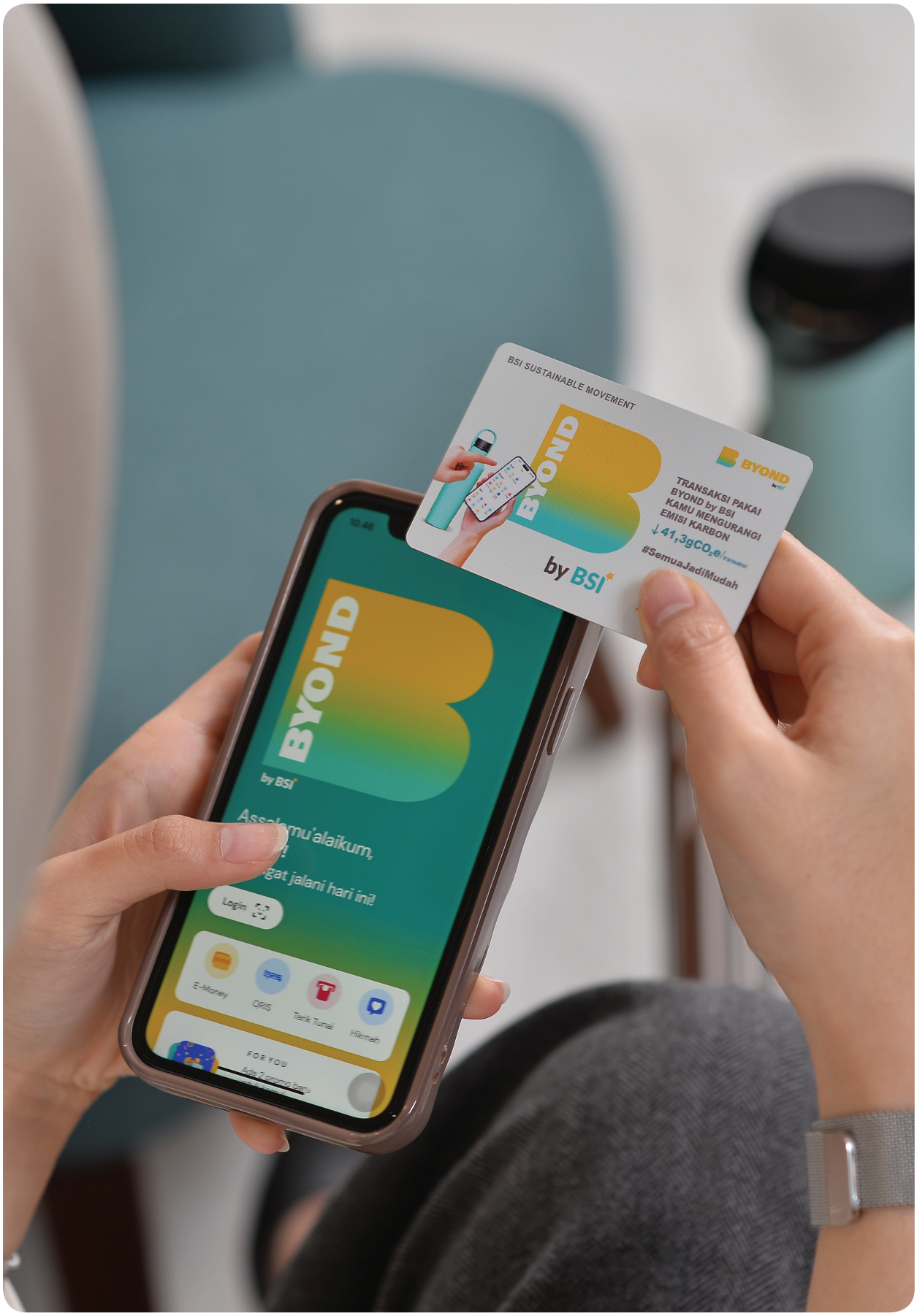
Organisasi pengelolaan TI dipimpin oleh Direktur Teknologi Informasi dengan pengelolaan berada di bawah Direktorat TI, yang didukung oleh struktur di bawahnya sebagai berikut:

1. SEVP Information Technology meliputi:
   a. IT Strategic Planning Group (ISG)
   b. IT & Digital Development Group (IDG)
   c. IT Application Support Group (ASP)
   d. IT Operation Group (IOG)
2. SEVP Digital Banking meliputi:
   a. Digital Banking Retail Group (DBR)
   b. Digital Banking Wholesale Group (DBW)
   c. Data & Decision Management Group (DDM)
3. Unit Kerja Supervisi Langsung meliputi:
   a. Digital Banking & E-Channel Operations Group (DBO)
   b. Chief Information Security Office Group (CSO)
   c. Senior Operational Risk Head IT (SOR-IT)

Rencana Kerja
Teknologi Informasi Tahun 2025

Melakukan pengembangan aplikasi/*platform* untuk melakukan akuisisi nasabah dan memenuhi kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi finansial, sosial dan spiritual yang berfokus pada target segment consumer, UMKM, dan institusi.

1. *Digital Solution for Consumer Retail and Wholesale*
   Pengembangan solusi teknologi yang inovatif dan efisien bagi bisnis konsumer ritel dan *wholesale* dengan mengoptimalkan berbagai aspek operasional, seperti integrasi transaksi digital dan personalisasi pengalaman pelanggan, mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
2. *Business & Operation Transformation*
   Transformasi proses bisnis dan operasional terkait transaksi dan pembiayaan dijalankan untuk mendukung sentralisasi, simplifikasi dan otomasi proses, sehingga tercapainya layanan yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
3. IT RASS (*Reliability, Availability, Serviceability, Security*)
   Mengembangkan sistem dan infrastruktur teknologi yang handal untuk mendukung bisnis bank dengan inovasi teknologi yang adaptif sehingga siap untuk menjawab tantangan ke depan. Hal tersebut semakin diperkuat dengan Implementasi multi-cloud, *Extended Security Intelligence & Automation Management* (XSIAM), pengembangan use case GenAI yang contoh penerapannya pada Smart Advisor Griya.


BSI SUSTAINABLE MOVEMENT
BYOND
by BSI
TRANSAKSI PAKAI BYOND by BSI KAMU MENGURANGI EMISI KARBON
↓41,3gCO2e/transaksi
#SemuaJadiMudah
BYOND
by BSI
Login
E-Money
QRIS
Tarik Tunai
Hikmah
FOR YOU



TATA KELOLA PERUSAHAAN

07



Komitmen Penerapan Tata Kelola

Implementasi Praktik Terbaik Tata Kelola yang Menjadi Bagian Integral dari Strategi Bisnis adalah Kunci untuk Kesuksesan BSI Jangka Panjang.

BSI senantiasa berupaya meningkatkan praktik terbaik penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance* (GCG)) sesuai standar nasional maupun internasional di industri yang berlaku. Hal ini menjadi penting bagi BSI untuk menghadapi risiko dan tantangan yang dihadapi, baik yang berasal dari intern maupun ekstern yang semakin banyak dan kompleks. Seiring perkembangan peraturan perundang-undangan, BSI selalu berusaha melakukan pemutakhiran ketentuan terkait GCG yang akan dipedomani. BSI meyakini, penerapan GCG sesuai standar terkini akan meningkatkan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh *stakeholders* Bank, yakni menciptakan keselarasan antar tujuan Bank dengan tujuan pemangku kepentingan agar terjalin dengan baik.

Pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan Bank dapat tercermin dalam pertumbuhan berkelanjutan. Dengan menerapkan praktik pertanggungjawaban lingkungan dan sosial, diharapkan Bank dapat membangun reputasi yang kuat dalam memenuhi tuntutan pasar yang semakin menantang. Oleh karenanya, BSI berusaha terus mengimplementasikan praktik GCG yang menjadi bagian integral dari strategi bisnis sebagai kunci untuk kesuksesan BSI jangka panjang.

Pencapaian Penerapan Tata Kelola

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, yang mengusung visi menjadi *Top* 10 (sepuluh) *Islamic Bank* secara global, membuat BSI untuk selalu bergerak menuju kedepan agar menjadi *role model* bank-bank syariah lain di Indonesia. Komitmen serta konsistensi BSI dalam menjaga dan meningkatkan praktik tata kelola yang baik dapat dimaknai sebagai perwujudan dalam mengemban amanah besar, tonggak perekonomian perbankan syariah di Indonesia.

Di tahun 2024, pada saat usia BSI genap memasuki tahun ketiga pasca merger berbagai pencapaian telah berhasil diraih BSI. Dalam bidang tata kelola dibuktikan dari posisi Bank dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dengan meraih predikat sebagai Perusahaan kategori "**Sangat Terpercaya**". BSI dinilai oleh pihak eksternal mampu menjaga tata Kelola Perusahaan yang unggul, transparan, dan berkelanjutan serta menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Semua pencapaian BSI sampai dengan saat ini, tidak terlepas dari komitmen Direksi, Dewan Komisaris, dan peran Dewan Pengawas Syariah serta seluruh insan BSI yang menjalankan praktik bisnis sesuai dengan etika bisnis dan standar perilaku Perusahaan (Kode Etik Perusahaan/*Code of Conduct*) dalam setiap tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan kerja.



Awarding CGPI Tahun 2024



Piagam Penghargaan CGPI Tahun 2024

Bagi BSI, dalam menjalankan bisnis tidak hanya memakai standar perbankan, tetapi juga menetapkan nilai-nilai syariah (*maqashid syariah*) menjadi landasan utama. Prinsip syariah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan jati diri BSI dalam mengatur seluruh tindak laku BSI sebagai Bank dan perusahaan terbuka, serta prinsip yang harus dijaga serta diimplementasikan oleh seluruh Insan BSI dalam mencapai tujuan Bank sesuai dengan Visi dan Misi BSI.

Dalam menjalankan GCG, BSI telah mendapatkan sertifikat ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan, Sertifikat ISO 3701:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, Sertifikat ISO 22301:2019 Sistem Keberlangsungan Bisnis, dan Sertifikat ISO 2701:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

2021	Kesadaran Implementasi GCG sudah mulai sejak dilaksanakannya merger menjadi BSI. BSI mengambil *best practice* dari masing-masing bank *legacy* untuk kemudian disempurankan dan diimplementasikan di BSI. BSI juga telah melakukan penyempurnaan Implementasi GCG dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
	• Pembentukan Komite-komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, yaitu:
	  - Komite Audit
	  - Komite Pemantau Risiko
	  - Komite Remunerasi dan Nominasi
	• Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
	• Pelakasanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan publik
	• Melaksanakan keterbukaan Informasi secara tepat waktu, antara lain dalam publikasi Laporan Keuangan, Informasi maupun peristiwa atau fakta material
	• Menyusun Laporan Tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat. Memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.
	
	Selain itu, BSI juga turut berkomitmen terhadap anti gratifikasi yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BSI juga telah memperoleh ISO 37301:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
	
	Dalam rangka ikut menilai kualitas penerapan tata kelola, BSI ikut serta dalam program riset dan pemeringkatan pelaksanaan tata kelola, yaitu *Corporate Governnace Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh pihak Independen. Dalam program CGPI 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021 dengan tema: "Membangun Ketahanan perusahaan dalam Kerangka *Good Corporate Governance*". BSI berhasil meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 88,89.

2022	• Melakukan *Right Issue* untuk memperkuat struktur permodalan BSI • Menjadi Bank Syariah pertama yang memperoleh sertifikat ISO 37001:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan • Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, BSI melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Coorporation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF), yang disebut ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard*
2023	• Mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan • BSI kembali meraih predikat "Sangat Terpercaya" dengan nilai 91,50 pada penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) • Melakukan 4 (empat) kali sosialisasi penguatan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi
2024	• BSI kembali berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan • BSI berhasil mendapatkan kembali sertifikasi dan melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan • Sebagai perwujudan dan komitmen BSI dalam penerapan Tata Kelola dan Perusahaan terbuka yang menjalankan praktik keterbukaan informasi, BSI mengungkapkan praktik terbaik yang mengadopsi prinsip-prinsip ACGS pada laman *website* Perusahaan. • Untuk kali pertama BSI melakukan pengukuran kematangan kepatuhan yang mencerminkan tingkat kepatuhan BSI terhadap ketentuan internal dan eksternal serta perundang-undangan yang berlaku

Dasar Penerapan
Tata Kelola Perusahaan

Sebagai bank syariah, landasan utama pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan BSI adalah Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip-prinsip syariah tersebut dijalankan BSI dengan tata kelola perusahaan yang baik, yang tunduk dan berpedoman pada berbagai ketentuan serta peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur BSI sebagai perseroan terbatas, bank dan/atau perusahaan terbuka, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang- Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.
4. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terkait dengan penerapan tata kelola, antara lain:
    a. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah dicabut dengan POJK No.2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
    b. SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola, antara lain:
    a. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
    b. POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
    c. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
    d. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
    e. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
    f. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut perubahannya.
    g. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
    h. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
    i. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
    j. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
    k. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
    l. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
    m. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
    n. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
    o. POJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
    p. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
    q. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
    r. POJK No. 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.
    s. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
    t. POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
    u. POJK No.2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
    v. POJK No. 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
    w. SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

x. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS.
y. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
z. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
aa. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
bb. SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
cc. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
dd. POJK dan SEOJK terkait lainnya.

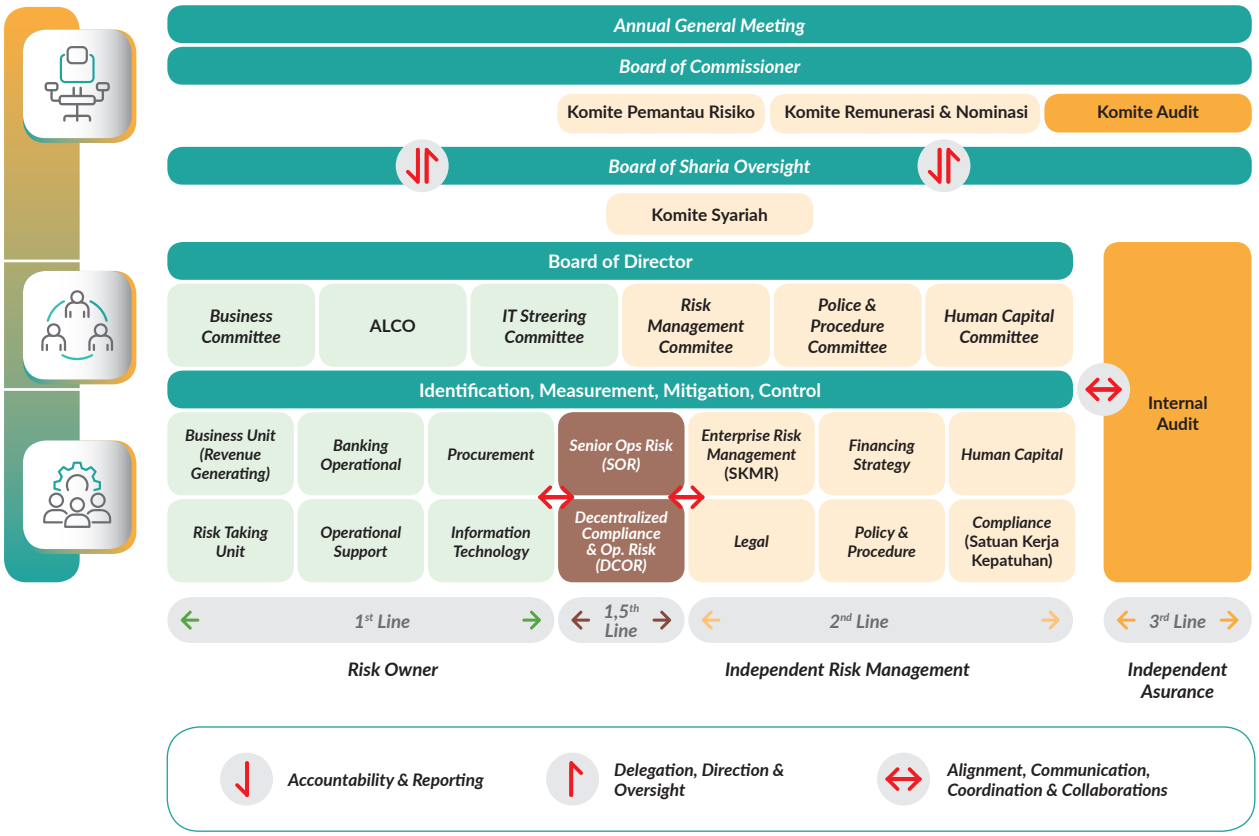
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (PERMEN BUMN) yang mengatur mengenai anak perusahaan BUMN, seperti PERMEN BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, Bank mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di Indonesia maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance* (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel *Committee on Banking Supervision*.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan



BSI melakukan optimalisasi seluruh fungsi organ yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif dan mendukung integritas informasi yang digunakan untuk pelaporan maupun pengambilan keputusan, sehingga mendorong penguatan pertahanan tiga lapis (*three lines model*), dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, serta mencapai tujuan BSI tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

Struktur GCG BSI secara garis besar terdiri atas organ utama dan organ pendukung yang didukung oleh Kebijakan dan Prosedur. Struktur organisasi tata Kelola BSI mencakup:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Dewan Pengawas Syariah
4. Direksi
5. Komite di bawah Dewan Komisaris
6. Komite Syariah
7. Komite di bawah Direksi

Governance Soft Structure

Untuk terus meningkatkan kualitas dan ruang lingkup tata kelola yang berkelanjutan, BSI telah merumuskan dan menerapkan *governance soft structure* untuk mengatur hubungan antar organ di BSI sehingga tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing organ jelas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, prinsip GCG, etika bisnis yang sehat atau praktik terbaik. Keberadaan *governance soft structure* merupakan bentuk dari internalisasi GCG dalam proses bisnis Bank yang menyempurnakan infrastruktur GCG.

Governance Soft Structure BSI digunakan sebagai kerangka kerja dan tata Kelola dalam penyusunan kebijakan serta implementasi kegiatan Bank yang meliputi:
1. Anggaran Dasar Bank yang telah diubah beberapa kali, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No.37 Tanggal 17 Mei 2024, dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. AHU-0035266. AH.01.02.Tahun 2024.
2. Tata Tertib Dewan Komisaris disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor:KEP.KOM/001/2021 tanggal 1 Februari 2021.
3. Tata Tertib Direksi disahkan dalam Keputusan Direksi No.01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/002/2024 yang disahkan Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2024.
5. Pedoman dan Tata Tertib (Piagam) Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024 yang disahkan Dewan Komisaris tanggal 1 Juli 2024.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.01/001-SKB/Dirkom tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
7. Kode Etik (*Code of Conduct*) PT Bank Syariah Indonesia.
8. Piagam Audit Intern PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 27 September 2022.
9. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
10. Kebijakan Anti Fraud PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
11. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
12. Kebijakan Proses Seleksi Pemasok/Vendor Penyedia Barang dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
13. Petunjuk Teknis Operasional *Whistleblowing System* (WBS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
14. Kebijakan Dana dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
15. Komitmen Anti Penyuapan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, menyelaraskan dengan Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Bank. Saham Perseroan adalah saham-saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang terdiri dari:
1. Saham Seri A Dwiwarna, merupakan saham khusus yang hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
2. Saham Seri B, merupakan saham biasa yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham Secara Umum

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama yaitu setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham BSI baik pemegang saham Seri A Dwiwarna maupun pemegang saham Seri B memiliki hak yang sama di luar Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna, antara lain sebagai berikut:
1. Hak Pemegang Saham terkait RUPS:
    a. Meminta penyelenggaran RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Mengusulkan mata acara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
c. Menyetujui dalam RUPS antara lain terkait:
   - Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank.
   - Menyetujui usulan perubahan Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan syarat kuorum keputusan.
   - Menyetujui laporan tahunan atas kinerja Direksi, dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Bank.
   - Menyetujui pemberian remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank.
   - Menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Bank termasuk pembagian dividen.
d. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
e. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
f. Mendapatkan penjelasan prosedur voting sebelum RUPS dimulai.
g. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat yang relevan dengan mata acara RUPS pada setiap pembahasan mata acara RUPS.

2. Hak lainnya:
   a. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar
   c. Kesempatan untuk turut serta dalam penambahan modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d. Menerima informasi Perusahaan yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk disampaikan dan/atau diumumkan kepada publik.
   e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BSI.
   f. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Istimewa Saham Seri A Dwiwarna

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak istimewa yang khusus dan hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
   a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
   b. Perubahan permodalan.
   c. Penggabungan, peleburan, pemisahan.
   d. Pembubaran serta pengambilalihan Perseroan oleh perusahaan lain.
2. Hak untuk menetapkan pedoman strategis Perseroan secara organik maupun non-organik.
3. Mengusulkan mata acara RUPS.
4. Meminta dan mengakses data Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Proses Penyelenggaraan RUPS

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Sedangkan RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Tempat RUPS

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
3. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
   a. Tempat kedudukan Perseroan.
   b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
   c. Ibukota provinsi Dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
   d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek Dimana saham Perseroan dicatatkan.

Pemberitahuan RUPS

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
2. Mata acara rapat wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

Pengumuman RUPS

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
2. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:
   a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
   b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat.
   c. Tanggal penyelenggaraan RUPS.
   d. Tanggal pemanggilan RUPS.
   e. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, jika RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.
3. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Usulan Mata Acara RUPS

Usulan mata acara RUPS dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah:
   a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna.
   b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Pemanggilan RUPS

1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
2. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Ringkasan Risalah	Hasil RUPS
Diberitahukan kepada OJK pada tanggal 28 Maret 2024 Nomor 04/651-3/DIR-CSG	Diumumkan pada tanggal 5 April 2024 melalui website Perseroan, *website* KSEI, dan *website* BEI.	Diumumkan pada tanggal 25 April 2024 melalui website Perseroan, *website* KSEI, dan *website* BEI.	RUPS Tahunan 2024 dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Mei 2024 bertempat di Aryanusa Ballroom Menara Danareksa Lt.2, Jalan Medan Merdeka Selatan No.14, Jakarta Pusat.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 diumumkan pada tanggal 21 Mei 2024 melalui *Website* BSI, Website IDX, dan KSEI	Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 diumumkan pada tanggal 14 Juni 2024 melalui *Website* BSI

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan validasinya dilaksanakan oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Adapun Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	Hadir
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Hadir
3.	Ngatari	Direktur Retail Banking	Hadir
4.	Saladin D. Effendi	Direktur Information technology	Hadir
5.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Hadir
6.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Hadir
7.	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Hadir
8.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Hadir
9.	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Hadir
10.	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Hadir
11.	Muliaman D. Hadad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Tidak Hadir
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hadir
13.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Hadir
14.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Hadir
15.	Suyanto	Komisaris	Hadir
16.	Masduki Baidlowi	Komisaris	Hadir

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
17.	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Hadir
18.	Sutanto	Komisaris	Hadir
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	Hadir
20.	Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hadir
21.	Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
22.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
23.	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.669.226.396 suara atau 99,6947192% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Abstain: 102.741.680 suara atau 0,2345543% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Tidak Setuju: 30.980.313 suara atau 0,0707265% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No.00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka Rapat Umum Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.700.583.339 suara atau 99,7663056% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.023.550 suara atau 0,2329148% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 341.500 suara atau 0,0007796% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp5.703.743.109.251,- (lima triliun tujuh ratus tiga miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah), sebagai berikut:

1. Sejumlah 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp1.140.748.621.850,- (satu triliun seratus empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib.
2. Sebesar 15% (lima belas persen) atau sejumlah Rp855.561.466.388,- (delapan ratus lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan Rupiah) atau sebesar Rp18,5470451 (delapan belas koma lima empat tujuh nol empat lima satu Rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
   b) Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
      - Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
      - Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
      - Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) atau sejumlah Rp3.707.433.021.013,- (tiga triliun tujuh ratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tiga belas Rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Ketiga

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.261.904.914 suara atau 98,7648241% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.095.650 suara atau 0,2330794% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 438.947.825 suara atau 1,0020965% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
   a. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
   b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut pada angka 1 dan 2 huruf a di atas, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) dan/atau Akuntan Publik Lucy Luciana Suhenda, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau laporan lainnya pada Tahun Buku 2024, termasuk penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Keempat

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.015.157.594 suara atau 98,2015119% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.105.607 suara atau 0,2331021% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 685.685.188 suara atau 1,5653859% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
   a. Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2023 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2024- 2026, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. Gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah:
   a. Bonus atas kinerja Tahun Buku 2023; dan
   b. Remunerasi untuk Tahun Buku 2024 dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I").

Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Keenam

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju*: 41.728.719.882 suara atau 95,2646372% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.027.250 suara atau 0,2329232% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 1.972.201.257 suara atau 4,5024395% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
*Termasuk 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna sesuai dengan hak Istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang – undangan: (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah; dan (d) peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Ketujuh

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 41.781.044.082 suara atau 95,3840908% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 102.028.550 suara atau 0,2329262% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 1.919.875.757 suara atau 4,3829829% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan;
   b. Ngatari sebagai Direktur Retail Banking Perseroan;
   c. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan;
   d. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan;
   e. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan;
   f. Moh Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan;
   g. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen Perseroan;
   h. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan;
   i. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan;
   j. Imam Budi Sarjito sebagai Komisaris Perseroan;
   k. Sutanto sebagai Komisaris Perseroan;
   l. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
   m. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   n. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   o. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;
   p. Didin Hafidhuddin sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;

   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
2. Mengangkat kembali untuk periode kedua:
   a. Hery Gunardi sebagai Direktur Utama Perseroan;
   b. Tribuana Tunggadewi sebagai Direktur Compliance & Human Capital Perseroan;
   c. Ade Cahyo Nugroho sebagai Direktur Finance & Strategy Perseroan;
   d. Anton Sukarna sebagai Direktur Sales & Distribution Perseroan;
   e. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen Perseroan;
   f. Suyanto sebagai Komisaris Perseroan;
   g. Masduki Baidlowi sebagai Komisaris Perseroan;
   h. Komaruddin Hidayat sebagai Komisaris Independen Perseroan;
   i. Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   j. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   k. Oni Sahroni sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah;

   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat M. Arief Rosyid Hasan sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 6 November 2023 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Mengangkat:
   a. Harry Gusti Utama sebagai Direktur Retail Banking Perseroan;
   b. Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan;
   c. Fauzi sebagai Komisaris Perseroan;
   d. Nazaruddin sebagai Komisaris Perseroan;
   e. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen Perseroan;
   f. Jaih Mubarok sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
   g. Abdul Ghofur Maimoen sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPST Tahunan Tahun Buku 2023, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Muliaman D. Hadad
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	:	Suyanto
Komisaris	:	Masduki Baidlow
Komisaris	:	Abu Rokhmad
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Mohamad Nasir
Komisaris	:	Fauzi*
Komisaris	:	Nazaruddin*
Komisaris Independen	:	Felicitas Tallulembang*

DIREKSI

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Compliance & Human Capital	:	Tribuana Tunggadew
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novari
Direktur Information Technology	:	Saladin D. Effendi
Direktur Risk Management	:	Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Retail Banking	:	Harry Gusti Utama*
Direktur Treasury & International Banking	:	Ari Rizaldi*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag
Anggota	:	Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A, M.H
Anggota	:	Dr. H. Oni Sahroni, M.A
Anggota	:	Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., M.H., M.Ag*
Anggota	:	Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A*

Catatan:
*Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan Realisasinya

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Ringkasan Risalah	Hasil RUPS
Diberitahukan kepada OJK pada tanggal 5 April 2023 Nomor 03/609-3/DIR-CSG	Diumumkan pada tanggal 13 April 2023 melalui *website* Perseroan, *website* KSEI, dan website BEI.	Diumumkan pada tanggal 28 April 2023 melalui *website* Perseroan, *website* KSEI, dan website BEI.	RUPS Tahunan 2023 dilaksanakan pada hari senin, 22 Mei 2023 pukul 14.45 – 16.13 WIB, bertempat di Wisma Mandiri 1 Lantai 11, JL M.H. Thamrin Kav. 5 jakarta 10350.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023 diumumkan pada 24 Mei 2023 melalui *website* Perseroan	Hasil RUPS Tahunan 2023 diumumkan pada tanggal 27 Juni 2023 melalui *website* Perseroan

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan validasinya dilaksanakan oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan DPS hadir pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022. Adapun Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	Hadir
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Hadir
3.	Ngatari	Direktur Retail Banking	Hadir
4.	Saladin D. Effendi	Direktur Information technology	Hadir
5.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Hadir
6.	Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Hadir
7.	Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Hadir
8.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Hadir
9.	Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Hadir
10.	Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Hadir
11.	Muliaman D. Hadad	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Tidak Hadir
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Hadir
13.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Hadir
14.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Hadir
15.	Suyanto	Komisaris	Hadir
16.	Masduki Baidlowi	Komisaris	Hadir
17.	Imam Budi Sarjito	Komisaris	Hadir
18.	Sutanto	Komisaris	Hadir
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	Hadir
20.	Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Hadir
21.	Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
22.	Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir
23.	Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Hadir

*Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Agenda Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
Hasil Pemungutan Suara Setuju: 43.674.736.431 suara atau 99,7457892% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Abstain: 56.022.255 suara atau 0,1279455% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju: 55.286.609 suara atau 0,1262654% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Terdapat 1 pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), sesuai Laporan Nomor 00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.730.252.213 suara atau 99,8725779% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 33.357 suara atau 0,0000762% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Terdapat 1 pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp4.260.181.677.875,- (empat triliun dua ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah), sebagai berikut:
   a. Sejumlah 20,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp852.036.335.575,- (delapan ratus lima puluh dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan.
   b. Sejumlah 10,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sekurang-kurangnya Rp426.018.167.788,- (empat ratus dua puluh enam miliar delapan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen.
   c. Sejumlah 70,0% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp2.982.127.174.512,- (dua triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Ketiga

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.730.285.561 suara atau 99,8726541% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 9 suara atau 0,0000000% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Keempat

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.337.078.325 suara atau 98,9746346% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 55.765.961 suara atau 0,1273601% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 393.201.009 suara atau 0,8980053% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Seri B terbanyak dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:
1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2023.
3. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Kelima

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Tahun 2022.

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan

Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

Agenda Keenam

Persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 43.730.251.914 suara atau 99,8725773% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 55.759.725 suara atau 0,1273459% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 33.656 suara atau 0,0000769% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
Menyetujui Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Agenda Ketujuh

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara
Setuju: 42.235.569.738 suara atau 96,4589733% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Abstain: 58.265.601 suara atau 0,1330689% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Tidak Setuju: 1.492.209.956 suara atau 3,4079578% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham.

Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Sdr. Achmad Syafii sebagai Direktur Information Technology;
   b. Sdri. Tiwul Widyastuti sebagai Direktur Risk Management;
   c. Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris;
   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Adiwarman Azwar Karim semula sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2021, menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat:
   a. Sdr. Saladin D. Effendi sebagai Direktur Information Technology;
   b. Sdr. Grandhis sebagai Direktur Risk Management;
   c. Sdr. Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
   d. Sdr. Abu Rokhmad sebagai Komisaris;
   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuan (*fit and proper test*).

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya. Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Muliaman D. Hadad*
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	:	Suyanto
Komisaris	:	Masduki Baidlow
Komisaris	:	Imam Budi Sarjito
Komisaris	:	Sutanto
Komisaris Independen	:	M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Mohamad Nasir
Komisaris	:	Abu Rokhmad*

DIREKSI

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	:	Ngatari
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	:	Tribuana Tunggadew
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novar
Direktur Treasury & International Banking	:	Moh. Adib
Direktur Information Technology	:	Saladin D. Effendi*
Direktur Risk Management	:	Grandhis Helmi Harumansyah*

*Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Tindak Lanjut: Telah Terealisasi

Keputusan RUPS pada Tahun Buku dan 1 (Satu) Tahun Sebelum Tahun Buku yang Direalisasikan pada Tahun Buku

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi pada tahun 2024 dan RUPS Tahun Buku 2022 telah terealisasi pada tahun 2023. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun Buku 2023 dan RUPS Tahun Buku 2022 yang belum direalisasikan pada tahun 2024.

Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank Syariah Indonesia untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan BSI antara lain memimpin dan mengurus Bank termasuk memimpin tim manajemen dalam proses penyusunan dan evaluasi strategi Bank sekurang-kurangnya setiap tahun. Dalam menjalankan tugas, Direksi tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili BSI baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Hery Gunardi	Direktur Utama	Mensupervisi Vice President, seluruh Direksi dan Internal Audit Group
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Mensupervisi seluruh Direksi, ESG Group dan Operation Group
Ngatari*	Direktur Retail Banking	Mensupervisi seluruh Group yang membidangi Retail Banking yaitu Institutional Banking, Alternative Channel & Government Project, SME Business, Micro Business, Islamic Ecosystem Solution, dan EBO.
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Mensupervisi SEVP Human Capital, Compliance & AML-CTF Group, Legal Group, Corporate Secretary & Communication Group dan Data Protection Group.
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Mensupervisi SEVP Consumer Product Solution, Distribution Strategy Group, Retail Deposit Solution Group, Transaction Bankin Retail Group, Wealth Management Group, Regional Office Group dan SORH Distribution & Consumer Group.
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Mensupervisi SEVP Corporate Strategy, Strategyc Planning & Performance Management Group, Corporate Finance & Accounting Group, Procurement & Fixed Asset Group, dan SORH Corporate Center.
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Mensupervisi seluruh Group yang membidangi Wholesale Transaction Banking yaitu Corporate Business 1, 2 dan 3 serta Commercial Business 1, 2 dan 3.
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	Mensupervisi seluruh Group yang membidangi Treasury & International Banking yaitu Trasury & Global Market, International & Financial Institution, Office of Chief Economist
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	Mensupervisi SEVP Information Technology dan Digital Banking
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Mensupervisi SEVP Wholesale Risk dan Retail & Consumer Risk

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024.
**Mulai menjabat sejak 17 Mei 2024.

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa pekerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain.
5. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan.
7. Tidak menagih lagi pokok, margin, ujrah, dan bagi hasil lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian bagi hasil Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila

ditentukan lain oleh RUPS.
2. Pengangkatan anggota Direksi akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud terkait dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan otoritas lain yang terkait (jika ada), serta telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
3. Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan masa jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode berturutturut, atau maksimum 6 (enam) tahun sejak pengangkatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan

Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Tata Tertib Direksi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021 tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun isi dari Tata Tertib Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Bertindak
2. Organisasi dan Pembidangan Tugas
3. Kebijakan Umum
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Pengaturan Rapat
6. Komite
7. Senior Executive Vice President
8. Korespondensi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:
1. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
2. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
4. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap anggota Direksi tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Seluruh Direksi tidak memilik rangkap jabatan baik pada perusahan lain maupun institusi lainnya.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam menjalankan tugas tersebut.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Direksi memiliki kebijakan rapat yang telah diatur dalam Tata Tertib Direksi. Kebijakan rapat Direksi adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:

a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi - bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal - Rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha, di tempat kedudukan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
13. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya berdasarkan surat kuasa.
14. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
15. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
17. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
18. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
19. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat.
21. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
22. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai Keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
23. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
24. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota
25. Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
26 Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
27. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Rencana Rapat Direksi

Adapun rencana rapat Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut

Bulan	Agenda
Januari	• *Update* Laporan Kinerja Desember 2023 • Strategi Bisnis
Februari	• *Update* Laporan Kinerja Januari 2024 • Strategi Bisnis
Maret	• *Update* Laporan Kinerja Februari 2024 • Strategi Bisnis
April	• *Update* Laporan Kinerja Maret 2024 • Strategi Bisnis
Mei	• *Update* Laporan Kinerja April 2024 • Strategi Bisnis
Juni	• *Update* Laporan Kinerja Mei 2024 • Strategi Bisnis

Bulan	Agenda
Juli	• *Update* Laporan Kinerja Juni 2024 • Strategi Bisnis
Agustus	• *Update* Laporan Kinerja Juli 2024 • Strategi Bisnis
September	• *Update* Laporan Kinerja Agustus 2024 • Strategi Bisnis
Oktober	• *Update* Laporan Kinerja September 2024 • Strategi Bisnis
November	• *Update* Laporan Kinerja Oktober 2024 • Strategi Bisnis
Desember	• *Update* Laporan Kinerja November 2024 • Strategi Bisnis

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	9 Januari 2024	• *Update* Cabang Rugi • *Update* BEWIZE • *Strategy* Dana Murah (Giro Tabungan)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
2.	16 Januari 2024	• *Update Revisi Cabang Rugi* • *Update* Laporan Kinerja Desember 2023	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
3.	23 Januari 2024	• *Update Hasil Digital & Transaction Banking Workshop* • *Update Marketing* BEWIZE	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
4.	31 Januari 2024	*Update* Apresiasi Purnabakti, Peresmian Perkumpulan BSI Alumni dan BSI *Excellence Award* (BEA)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
5.	13 Februari 2024	Presentasi Usulan Waktu dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan Usulan Threshold - Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris, PSP Mayoritas dan RUPS pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
6.	20 Februari 2024	• Inisiatif *Strategis Regulatory Issues* • Usulan Pengadaan Mesin ATM dan CRM Tahun 2024 • Laporan Kinerja Januari 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
7.	6 Maret 2024	• *Update* Kerjasama Sinergi ATM H2H BSI & Mandiri • *Update* Safari Ramadhan 1445 H	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
8.	14 Maret 2024	Laporan Kinerja Februari 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
9.	19 Maret 2024	• Proyeksi *Maret 2024* • *Update Fee Based Income* • *Update SME dan Mikro* • *Update* SLIK	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
10.	24 Maret 2024	• Penanganan Ins*iden IT 23/3/2024* • Antisipasi lonjakan transaksi menjelang Lebaran dan Pembayaran Pajak 31 Maret 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
11.	26 Maret 2024	Risiko Operasional KCP Rantau Prapat	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
12.	3 April 2024	• *Update* BSI *University* • *Update Progress* Sirius *Project*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Ngatari	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
13.	23 April 2024	Laporan Kinerja Maret 2024	Hery Gunardi	Tidak Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
14	26 April 2024	Permohonan Persetujuan Usulan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
15.	2 Mei 2024	*Update Corporate Plan* BSI	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
16.	7 Mei 2024	Strategi Pengembangan DPK untuk Institusi	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Ngatari	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
17.	14 Mei 2024	• Laporan *Kinerja April 2024* • *Review* Layanan Cabang & E-Channel	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Ngatari	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
			Zaidan Novari	Hadir
			Moh. Adib	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Tidak Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
18	21 Mei 2024	• RKAP & *Review* RBB BSI 2024-2026 • *Capital Strategy* 5 Tahun • *Product Profitability* & CM per Direktorat	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
19.	28 Mei 2024	• *Update* Revisi RBB BSI 2024-2026 • *Update Fee Based Income* • Usulan Kewenangan Memutus Final *Price & Issuance Size Sustainability* Sukuk BSI • Permohonan Talangan & Pembebanan Insiden Risiko Operasional Terkait Kejadian Transaksi Ilegal Melalui BSI *Net Banking* dan BSI *Cash Management System* (CMS)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
20	3 Juni 2024	Persetujuan Struktur Organisasi	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
21.	4 Juni 2024	• Persetujuan Alternate Direksi dan Direktur Supervisi • *Update IT Cash Management System* (CMS)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
22.	7 Juni 2024	Agenda HC	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
23.	11 Juni 2024	• Laporan Kinerja Mei 2024 • *Update* Rencana Kerja Direktorat Treasury • *Update* Rencana Kerja Direktorat Retail	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
24.	19 Juni 2024	• *Update* Rencana Kerja *Human Capital* • *Update* Rencana Kerja Operation	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Tidak Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
25.	26 Juni 2024	*Strategy Level Up* Pertumbuhan Pawning	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi	Tidak Hadir
26.	9 Juli 2024	• Laporan Kinerja Juni 2024 • *Update* IT *Governance*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
27.	22 Juli 2024	*Update* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Laporan Pemantauan Risiko	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
28.	30 Juli 2024	• *Update* IT *Project* • Persetujuan TIRO Case KCP Banjarmasin Hasan Basri	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
29.	13 Agustus 2024	• Persetujuan *Strategic Partnership Bancassurance* (Bosporus) • Laporan Kinerja Juli 2024 • Laporan Hasil Pelaksanaan BSI Expo	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
30	15 Agustus 2024	Struktur Organisasi Bankwide BSI	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
31.	22 Agustus 2024	• *Update* IT *Maturity* • *Update Case Fraud & Action Plan*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
32.	3 September 2024	• Strategi Peningkatan Giro • *Update Case Fraud & Action Plan*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
33.	18 September 2024	• *Update* Kinerja Keuangan Agustus 2024 & Proyeksi Keuangan Desember 2024 • Usulan Kebijakan Umum Direksi Untuk RKAP 2025 • *Update New Cash Management System* (NCMS) • *Update* BSI *Net Banking*, *Deploy* EDC dan ATM	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
34.	24 September 2024	• Permohonan Penyelesaian Program *Debt for Nature Swap* KLH (BPDLH Kemenkeu) • *Update* Kualitas Pembiayaan Consumer • Usulan dan Progres Pembangunan BSI Tower	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
35.	7 Oktober 2024	• *Update* Pelaporan CGPI 2023 • Usulan Penihilan Rekening *Overdraft Legacy* • Tindak Lanjut Perubahan Struktur Organisasi	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Tidak Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
36	15 Oktober 2024	• Kinerja September 2024 • *Update* Kolektibilitas Bankwide Segmen Pembiayaan	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Tidak Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
37.	22 Oktober 2024	• *Update* RKAP, RBB & RAKB • *Update* SME & Mikro Banking • Update Treasury & Global Market	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
38.	5 November 2024	• *Update* Data Analytic • *Update* SME & Mikro Banking • *Update Fee Based Income* (FBI)	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Tidak Hadir
39	12 November 2024	• Inisiatif Strategis Penguatan Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Syariah • *Update* Laporan Kinerja Oktober 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
40.	19 November 2024	• *Update* Pelindungan Data Pribadi (PDP) • *Update* Bulion Bank	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
41.	26 November 2024	• *Update Data Analytic* • *Current Update Card Business Group*	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Harry Gusti Utama	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
42.	2 Desember 2024	• *Update Macro Economy* dan Arah Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran • *Forecast* Pencapaian Bisnis 31 Des 2024	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
43.	13 Desember 2024	• Implementasi *Wholesale Transaction Banking* di Wilayah dan Progress Bisnis *New Cash Management System* (NCMS) • *Update* Bisnis Consumer	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Tidak Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Tidak Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
44.	17 Desember 2024	• *Update* Bisnis Kustodian • *Update Action Plan* CIF Ganda dan *Cleansing Data* • *Update* Persiapan Sistem IT dan Operasional Menjelang Libur Tahun Baru	Hery Gunardi	Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir
45	31 Desember 2024	Proyeksi Pencapaian Target 31 Desember 2024: Laporan Direktur Bisnis, Keuangan, Risk dan Operation	Hery Gunardi	Tidak Hadir
			Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Anton Sukarna	Hadir
			Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Zaidan Novari	Hadir
			Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Harry Gusti Utama	Hadir
			Ari Rizaldi	Hadir

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hery Gunardi	Direktur Utama	45	43	95 %	11	9	81,9 %	1	1	100%
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	45	38	84 %	11	10	90,9 %	1	1	100%
Ngatari*	Direktur Retail Banking	17	15	88 %	4	2	50 %	1	1	100%
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	28	24	85 %	8	8	100 %	-	-	-
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	45	40	88 %	11	7	63,6 %	1	1	100%
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	45	40	88 %	12	12	100 %	1	1	100%
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	45	35	77 %	12	10	83,3 %	1	1	100%
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	45	38	84 %	12	9	75 %	1	1	100%
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	17	15	88 %	4	4	100 %	1	1	100%
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	28	26	92 %	8	6	75 %	-	-	-
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	45	42	93 %	12	12	100 %	1	1	100%
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	45	40	88 %	12	8	66,7 %	1	1	100%

*Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024.
**Mulai menjabat sejak 17 Mei 2024.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Kebijakan terkait peningkatan kompetensi Direksi diatur dalam Standar Operasional Prosedur Human Capital yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Program pengembangan kompetensi mencakup pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri dan bisnis Bank. Setiap anggota Direksi diwajibkan mengikuti program pengembangan kompetensi secara berkala untuk memastikan tetap memiliki pemahaman yang relevan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Keikutsertaan Direksi dalam peningkatan kompetensi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Hery Gunardi	Direktur Utama	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Kementrian BUMN Tema : Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainibility	Bali/Jum'at, 19 Januari 2024	Kementrian BUMN RI
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		The 6th International Wealth Management Conference 2024 Tema : Crafting Resilient Portfolios and Scaling Advisory Services Amidst Volatile Markets	Jakarta/Rabu, 24 April 2024	Certified Wealth Managers' Association (CWMA)
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Program International Strategy Governance for Boards.	Lausanne Switzerland/ Senin-Selasa, 30 September - 1 Oktober 2024	IMD Lausanne Swiss
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia	Bandung, Jumat, 20 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Kementrian BUMN Tema : Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainibility	Bali/Jum'at, 19 Januari 2024	Kementrian BUMN RI
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Focus Group Discussion (FGD) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tema : Implementasi Strategi Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024	Jakarta/Jum'at, 26 Januari 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		The 6th International Wealth Management Conference 2024 Tema : Crafting Resilient Portfolios and Scaling Advisory Services Amidst Volatile Markets	Jakarta/Rabu, 24 April 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Selasa - Rabu, 7 - 8 Mei 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Jakarta/Senin, 20 Mei 2024	JMS Education
		Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi 7 - Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta/Senin, 24 Juni 2024	Lembaga Sertifikasi Keuangan Syariah (LSPKS)
		Workshop - Monitoring Implementasi ESG di Mandiri Group dan Sharing Best Practice terkait ESG Framewoork & Disclosure	Jakarta/Kamis , 25 Juli 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Training The DIFSS 2024 - Durham Islamic Finance Summer School 2024	Inggris/Senin , 29 Juli 2024 - Jum'at, 02 Agustus 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session Mandiri Board Forum Q3 2024 Tema : Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/Jum'at, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Focus Group Discusson (FGD) Bank Indonesia Tema : Enhancing Fraud Detection System to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry	Jakarta/Selasa, 27 Agustus 2024	Bank Indonesia
		Mandiri Leadership Forum Workshop Tema : Championing The Future Admist Great Challenge Through Transformational Leadership	Batam/Kamis, 29 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Sharing Session Mandiri Board Forum Q3 2024 Tema : Collborative Future - Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/Jum'at, 15 November 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Ngatari*	Direktur Retail Banking	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024 Tema: Gen AI Seasons Narsum: Gautam Gorki - Partner, Deloitte SEA and Head, Data & AI For FSI	Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		TELP series 2 dengan Tema Leadership Transformation	Jakarta, Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Forum Diskusi Makroprudensial dengan Topik "Strategi Funding dan Lending Perbankan"	Jakarta, Senin, 4 Maret 2024	Bank Indonesia
		Seminar Pembiayaan UMKM	Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024	Investor Trust
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Sertifikasi Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Jakarta/Rabu, 26 Juni 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah - LSPKS
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah	Online/Kamis-Jumát, 4-5 Juli 2024	LPPI
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5 Tema: Mengelola Risiko Hukum, Kepatuhan, Reputasi dan Strategic	Online/Kamis, 25 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University, Maisa Edukasi
		Refreshment Manajemen Risiko Perbankan Level 5: Mengelola Risiko Asuransi, Risiko Transaksi Intra Group, Stress & Back Testing dan Menganalisa Kebutuhan Sistem Informasi	Online/Jumát, 26 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Agenda: Optimalisasi Peran Industri Keuangan Guna Pencegahan Green Financial Crime dan Tindak Pidana Asal Lainnya	Jakarta/Senin, 29 April 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Jakarta/Rabu-Kamis, 7-8 Mei 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Jakarta/Senin, 20 Mei 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Seminar Agenda: Grand Syaikh & Launching BSI Scholarship 2024	Jakarta/Kamis, 20 Juni 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University Corporate Secretary & Communication Group
		Seminar Agenda: Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Ibu/Perempuan "Bundaku SiCantiks: Ibu Cerdas Keuangan, Mewujudkan Keluarga Sejahtera"	Jakarta/Selasa, 25 Juni 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Webinar Agenda: Penanganan Kejahatan Siber termasuk Perjudian Daring sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang	Jakarta/Rabu, 17 Juli 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
		Mandiri Leadership Forum Workshop	Jakarta/Kamis, 29 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Workshop Alignment Buku Saku Syariah, FAQ dan Sharia Video Campaign	Bandung/Senin, 9 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Workshop Wakil Menteri BUMN "SOE's Strategic Program and Risk Management for Indonesia's Future"	Jakarta/Jumat, 13 September 2024	Kementerian BUMN
		Employee & Industrial Relations Conference 2024 Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN	Bali/Jumat, 20 September 2024	Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMN
		Menjadi Moderator dalam Webinar FKDKP dengan tema "ESG, Aspek Perbankan untuk Mendorong Pencapaian SDG's (Sustainable Development Goals)"	Onlien/Jumat, 27 September 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		FGD OJK terkait Persamaan Persepsi Perizinan Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum	Bali/Selasa, 8 Oktober 2024	Otoritas Jasa Keuangan
		Webinar FKDKP dengan Tema: "Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas 2045"	Online/Rabu, 11 Desember 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Refreshment Manajement Risiko Perbankan Level 5 Tema: Mengelola Risiko Hukum, Kepatuhan, Reputasi dan Strategic	Online/Kamis, 25 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University, Maisa Edukasi
		Refreshment Manajement Risiko Perbankan Level 5: Mengelola Risiko Asuransi, Risiko Transaksi Intra Group, Stress & Back Testing dan Menganalisa Kebutuhan Sistem Informasi	Online/Jumát, 26 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Forum Group Discussion (FGD) dengan Kementrian BUMN dan Komisi VI DPR RI	Jakarta/Selasa, 13 Feb 2024	CSG
		Board Forum Q1 2024 BMRI	Bandung/Jumat, 23 Feb 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Forum Diskusi Makroprudensial dengan Topik "Strategi Funding dan Lending Perbankan"	Jakarta/Senin, 4 Maret 2024	Bank Indonesia
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Productivity Sales for Regional CEO	Jakarta/05-07 Juli 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Program Pelatihan Steward Leadership Impact	Thailand/ Senin - Jumat, 11-15 November 2024	Bank Syariah Indonesia University
		KSF Direktorat Sales and Distribution	Jakarta/ Senin, 25 November 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Knowledge Sharing Forum (KSF) - Series I Tahun 2024 -"Gen All Seasons"	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Kementrian BUMN Tema : Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainibility	Bali/ Jum'at, 19 Januari 2024	Kementerian BUMN RI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session Tema: Success Story Al Rajhi - Kearney	Jakarta/Senin, 18 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Meeting Kearney x BSI - Sharing Session Membangun Digital Ecosystem di Bisnis Retail Consumer Al Rajhi	Jakarta/ Kamis, 4 April 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Alignment Penyusunan Corporate Plan 2025-2029	Jakarta/ Kamis, 2 Mei 2024	SISM, Mandiri
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/Rabu-Kamis, 3-4 Juli 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Workshop Alignment Corporate Plan Bank Mandiri 2025-2029 (Part II)	Jakarta/ Jumat, 19 Juli 2024	SISM, Mandiri
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination Managing Director of Lippo	Jakarta/ Jumat, 9 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Mandiri Leadeship Forum Workshop	Batam/ Kamis, 29 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Sharing Session Board Forum Q3 2024 Tema: Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Selasa, 10 September 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Training Executive Development : Durham Islamic Finance Summer School 2024	Senin-Jumat, 07-11 Okt 2024	London Business School
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024 Tema: Gen Al Seasons	Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Menghadiri Webinar OJK terkait Strategi Mengakselerasi Pangsa pasar Keuangan Syariah	Online, Kamis, 21 Maret 2024	OJK

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Narasumber dalam acara Talkshow dalam Banten Halal Festival Ramadhan	Jakarta, Selasa, 2 April 2024	IDN/KDEKS, BI, MES, KNEKS
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	Pembekalan Resertifikasi MR Jenjang 7	Online/Senin, 24 Juni 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Ujian Resertifikasi MR Jenjang 7	Jakarta/Rabu, 26 Juni 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Agenda: Executive Overview of Islamic Banking	Online/Kamis - Jumát, 04 - 05 Juli 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Upgrading Asesor tentang MUK Versi 2023 angkatan IV	Sabtu, 06 Juli 2024	Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP)
		Seminar Agenda: Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko Level 5	Rabu-Kamis, 4-5 September 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah - LSPKS
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Board Forum Q1 2024 BMRI	Bandung/Kamis, 22 Februari 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 5-6 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)
		Resertifikasi Manajemen Risiko Level 7	Jakarta/Rabu, 17 Juli 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	Knowledge Sharing Forum Series 1 Tahun 2024	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Workshop Digital & Transaction Strategic Direction Tahun 2024 : Level Up To The Next Journey	Batam/Sabtu, 20 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Seminar Penyelarasan Jenjang 7 untuk Direksi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko level 5	Jakarta/ Rabu-Kamis, 19-20 Juni 2024	Bankers Association for Risk Management (BARA)

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
		Program Upgrading Perangkat Assesmen Versi 2023	Jakarta/Sabtu, 22 Juni 2024	LSP-LSPP
		Seminar Internasional Manajemen Risiko	Bali/Kamis, 27 Juni 2024	Bank Indonesia
		Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Surabaya/Senin 08 Juli 2024	OJK
		Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	Jakarta/Rabu, 17 Juli 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah - LSPKS
		Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS) dan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS)	Aceh/Selasa, 23 Juli 2024	OJK
		Nusantara Sharia Economic Forum 2024	Jakarta/Selasa, 30 Juli 2024	NET TV
		Program Business Essential Batch III Tahun 2024	Jakarta/Senin, 7 Oktober	BUMN
		Risk & Governance Summit 2024	Jakarta/Selasa, 26 November 2024	OJK
		AI for Leaders Leveraging Data Analytics	Singapore/Senin-Jumat, 2-6 Desember 2024	National University of Singapore
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

* Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024.
** Mulai menjabat sejak 17 Mei 2024.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Direksi yang telah diangkat dalam RUPS wajib mengikuti program orientasi yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*. Program orientasi dilakukan dengan menyampaikan materi-materi terkait Bank, yang antara lain mencakup:

1. Pengenalan Visi dan Misi Bank
2. *Corporate Plan*
3. Rencana Bisnis Bank
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
5. Pengenalan Perbankan Syariah
6. Manajemen Risiko
7. Tata Kelola Perusahaan
8. Pengenalan Budaya Bank

Pelaksanaan program orientasi bagi Direksi baru yaitu Bapak Harry Gusti Utama dan Bapak Ari Rizaldi telah dilaksanakan sebagai berikut.

No	Tanggal/ Pukul	Agenda	Group	Pemateri	Venue
1	Senin, 3 Juni 2024 (09.00-10.30)	Corporate Plan	CAG	Bp. Jiwo Sukarno	The Tower Lt.7
2	Rabu, 5 Juni 2024 (09.00-10.30)	*Risk Profile* BSI	OPR	Ibu Indriati Tri Handayani	
3	Kamis, 6 Juni 2024 (09.00-10.30)	Rencana Bisnis Bank	SPM	Bp. Diaz Hartadi	
4	Jumat, 7 Juni 2024 (09.00-10.30)	Pengenalan Syariah dan Akad Syariah	Bank Syariah Indonesia University	Bp. Bambang Sutrisno Bp. Saptono Budi Satryo	
5	Senin, 10 Juni 2024 (09.00-10.30)	One Culture	Bank Syariah Indonesia University	Bp. Bambang Sutrisno Ibu Nurdianah Habibie	
6	Rabu,12 Juni 2024 (09.00-10.30)	Good Corporate Governance, Fit and Proper Test	CPG	Ibu Rosalina Dewi	

Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Melaksanakan RUPS yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan.
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan rencana kerja lainnya.
3. Menyusun Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Keberlanjutan.
4. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpangan dan pengawasan keuangan.
5. Melaksanakan rapat internal Direksi maupun bersama group terkait.
6. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalian risiko yang dihadapi Bank.
7. Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dalam melaksanakan cakupan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite di bawah Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko
2. IT Steering Committee
3. Komite Policy & Procedure
4. Komite Bisnis
5. Komite Sumber Daya Manusia
6. Komite Aset dan Liabilitas
7. Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan secara tahunan dengan kriteria penilaian yaitu pelaksanaan tugas dan rapat yang telah dilaksanakan masing-masing komite selama tahun buku. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Direksi, selama tahun 2024 seluruh Komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.
2. Pengunduran dirinya telah efektif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan.
4. Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
5. Meninggal dunia.
6. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
7. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi hasil penyelenggaraan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk memastikan BSI menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dewan Komisaris BSI terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Perbandingan jumlah Komisaris dan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban tersebut merupakan wujud dari akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:
1. Dewan Komisaris bertugas:
   a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPS Luar Biasa secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Pengawas Bank;
   c. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
   d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
   e. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan yang berlaku;
   f. Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
   g. Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap panting bagi kepengurusan Bank;
   h. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
   i. Memberitahukan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
   j. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.
2. Agar supaya fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1, huruf a dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:
   a. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;
   b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;

c. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya insani. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi;
d. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
e. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan Business Plan dan penjabarannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan prudential banking practices termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
g. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko;
i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas dan Pemegang Saham;
k. Melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
l. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud*;
m. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program Komite – Komite penunjang Dewan Komisaris.

3. Setiap Komisaris harus memperhatikan tugas, tanggung jawab dan batasan batasan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagaimana diatur berikut ini:
   a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 108 ayat 4, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
   b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Komisaris Utama, maka Komisaris Utama mempunyai tugas serta tanggung jawab:

1. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
2. Bertindak sebagai Ketua Rapat dalam Rapat Dewan Komisaris;
3. Memastikan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komite-komite Dewan Komisaris terlaksana termasuk ketertiban Risalah Rapat;
4. Menerima laporan – laporan dari Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris;
5. Mengkoordinasikan semua tugas Dewan Komisaris yang sedapat mungkin telah dibagi rata secara merata.

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	• Anggota Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	• Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Audit
Masduki Baidlowi	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Suyanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Abu Rokhmad	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Sutanto*	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Fauzi**	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Nazaruddin**	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	• Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	• Ketua merangkap Anggota Komite Audit • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi • Anggota Komite Pemantau Risiko
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	• Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Audit

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
** Mulai menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. Membeli, menjual, menyewakan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;
   b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa mengambil uang dari rekening pinjaman atau hutang yang telah dibuat tidak dianggap sebagai pinjaman untuk maksud ketentuan ini;
   c. Menggadaikan, menjaminkan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
   d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin {borg atau avalist) yang melampaui pembatasan nilai rupiah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
   e. Mencatatkan saham-saham Perseroan di Pasar Modal;
   f. Tidak menagih lagi, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapus bukukan, dengan ketentuan dari waktu ke waktu RUPS menetapkan jumlah hapus tagih yang dapat dipergunakan, baik untuk hapus tagih piutang pokok macet yang telah dihapus buku maupun hapus tagih atas selisih antara nilai pokok dengan nilai penagihan atau pelepasan hak atas piutang pokok macet yang telah dihapus buku.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Tindakan dalam hal sebagaimana tersebut pada ayat (2), harus dijalankan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris dan wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan-tindakan tersebut.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas dengan beban Bank.
5. Setiap Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal dari Direksi maupun dari seluruh jajaran di bawahnya dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Setiap Komisaris berhak untuk menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau unit-unit di bawahnya tanpa ikut memberikan keputusan.
7. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terbukti melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank.
8. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tangga! pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, di mana yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris Independen dan non Independen diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Masa jabatan Komisaris Independen dan Non Independen sebanyak 2 (dua) periode berturutturut, atau maksimum 6 (enam) tahun.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
   - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
   - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
   - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
7. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pedoman Tata Tertib Kerja (*Board Charter*) Dewan Komisaris

Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabanya, Dewan Komisaris merujuk pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tersebut mengikat setiap anggota Dewan Komisaris, agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan profesional. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan secara berkala. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor: KEP. KOM/001/2021. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris dengan cakupan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Struktur Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Informasi Kerahasiaan Bank dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
7. Komite-komite dan Lembaga penunjang lainnya
8. Jenis dan Kuorum Rapat
9. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
10. Pimpinan Rapat
11. Bahan Rapat
12. Keputusan Rapat
13. Risalah Rapat
14. Penyelenggaraan Rapat
15. Sekretaris Dewan Komisaris
16. Pembidangan Tugas Rutin
17. Waktu Kerja Komisaris
18. Penandatanganan Dokumen
19. Perjalanan Dinas
20. Pendidikan Berkelanjutan
21. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
22. Perubahan
23. Penutup

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:

1. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
2. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
3. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
4. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
5. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan rangkap jabatan.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali. Selain itu tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen				
	Muliaman Dharmansyah Hadad	Adiwarman Azwar Karim	Komaruddin Hidayat	Mohamad Nasir	Felicitas Tallulembang
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	√	√	√	√	√

Pernyataan Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Dalam rangka tugas dan jabatan saya sebagai Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Mohammad Nasir
Keterangan tentang identitas : [redacted]
Alamat tetap : [redacted]

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 14 Juni 2024

(Mohammad Nasir)

SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Dalam rangka tugas dan jabatan saya sebagai Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Muliaman D. Hadad
Keterangan tentang identitas : [redacted]
Alamat tetap : [redacted]

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 14 Juni 2024

(Muliaman D. Hadad)

SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Dalam rangka tugas dan jabatan saya sebagai Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Komaruddin Hidayat
Keterangan tentang identitas : [redacted]
Alamat tetap : [redacted]

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 14 Juni 2024



(Komaruddin Hidayat)

SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Dalam rangka tugas dan jabatan saya sebagai Anggota Dewan Komisaris/Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Felicitas Tallulembang
Keterangan tentang identitas : [redacted]
Alamat tetap : [redacted]

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

Jakarta, 14 Juni 2024



(Felicitas Tallulembang)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Adiwarman A Karim
Jabatan : Wakil Komisaris Utama

Dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen pernyataan dalam kedudukannya selaku Wakil Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. yang selanjutnya disebutkan **"Perusahaan"**), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Saya cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pernyataan ini dibuat, tidak pernah:
   a. dinyatakan pailit;
   b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit;
   c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Saya bukan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Saya tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
4. Saya tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada 2 (dua) BUMN/Perusahaan;
5. Saya tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
6. Saya tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang bersangkutan selama lebih dari 2 (dua) periode;
7. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Wakil Komisaris Utama).

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun. Dengan demikian, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya nyatakan di sini dan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Juni 2024



Adiwarman A Karim

*)
Apabila yang bersangkutan menjabat sebagaimana dimaksud butir 4, 5, dan 6, maka yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut sebagai anggota Dewan Komisaris.

SAKSI-SAKSI:
1.....: _____
2.....: _____

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
3. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
5. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
10. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
11. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
12. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan, di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.
13. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
14. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
15. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
16. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
17. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
18. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
19. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili.
20. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
21. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
22. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
23. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
24. Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

25. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
26. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
27. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Bulan	Agenda
1.	Januari	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
2.	Februari	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
3.	Maret	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project* 3. *Update* Persiapan RUPS
4.	April	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
5.	Mei	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project* 3. *Update* Layanan Cabang dan *Update Review* RBB
6.	Juni	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
7.	Juli	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
8.	Agustus	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
9.	September	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
10.	Oktober	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
11.	November	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*
12.	Desember	1. *Update* Laporan Kinerja 2. *Update Progress Project*

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
1.	26 Januari 2024	Perubahan Penetapan Keanggotaan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
2.	26 Januari 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk S.D 31 Desember 2023	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
3.	21 Februari 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Januari 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
4.	21 Februari 2024	Usulan RUPST Tahun Buku 2023	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
5.	04 April 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bulan Februari 2024 (Reschedule Rapat 28 Mar 2024)	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
6.	25 April 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bulan Maret 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Imam Budi Sarjito	Hadir	
			Sutanto	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
7.	31 Mei 2024	Perubahan Penetapan Keanggotaan Anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
8.	31 Mei 2024	Evaluasi Kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bulan April 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
9.	13 Juni 2024	Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Ibadah Haji
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
10.	27 Juni 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Mei 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Ibadah Haji
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
11.	25 Juli 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Juni 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Izin
			Suyanto	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
12.	11 September 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Juli 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Izin
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Tidak Hadir	Izin
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
13.	26 September 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Agustus 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Izin
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
14.	10 Oktober 2024	Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris (Komite Remunerasi dan Nominasi)	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
15.	30 Oktober 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan September 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran	Alasan Ketidakhadiran
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
16.	8 November 2024	Usulan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025-2027	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi	Tidak Hadir	Izin
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
17.	21 November 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan Oktober 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Hadir	
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	
18.	19 Desember 2024	Evaluasi Kinerja Bank Syariah Indonesia Bulan November 2024 dan Pwc *Hardclose Meeting* Audit Bank Syariah Indonesia Tahun 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	
			Masduki Baidlowi	Hadir	
			Suyanto	Hadir	
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Izin
			Fauzi	Hadir	
			Nazaruddin	Hadir	
			Komaruddin Hidayat	Hadir	
			Mohamad Nasir	Hadir	
			Felicitas Tallulembang	Hadir	

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
1	26 Januari 2024	Evaluasi Kinerja BSI bulan Desember 2023	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ngatari	Tidak Hadir
			Suyanto	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Tidak Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
			Imam Budi Sarjito	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Sutanto	Hadir	Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Moh. Adib	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Tidak Hadir
					Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
2	21 Februari 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Januari 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ngatari	Hadir
			Suyanto	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Imam Budi Sarjito	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Sutanto	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Moh. Adib	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
					Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
3	04 April 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Februari 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ngatari	Hadir
			Suyanto	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Imam Budi Sarjito	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Sutanto	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Moh. Adib	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
					Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
4	25 April 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Maret 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Tidak Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ngatari	Tidak Hadir
			Suyanto	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Imam Budi Sarjito	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Sutanto	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Moh. Adib	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
					Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
5	30 Mei 2024	Evaluasi Kinerja BSI April 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Tidak Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Suyanto	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Fauzi	Hadir	Zaidan Novari	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
			Nazaruddin	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Harry Gusti Utama	Hadir
6	06 Juni 2024	Revisi RBB 2024	Muliaman Dharmansyah Hadad	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Suyanto	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Fauzi	Hadir	Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Harry Gusti Utama	Hadir
7	27 Juni 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Mei 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Zaidan Novari	Tidak Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
					Harry Gusti Utama	Hadir
8	11 September 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Juli 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Tidak Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Tidak Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Tidak Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Tidak Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
					Harry Gusti Utama	Hadir
9	26 September 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Agustus 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Ari Rizaldi	Tidak Hadir
					Harry Gusti Utama	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat - Direksi	Kehadiran
10	30 Oktober 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan September 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
					Harry Gusti Utama	Hadir
11	21 November 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan Oktober 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
					Harry Gusti Utama	Hadir
12	19 Desember 2024	Evaluasi Kinerja BSI Bulan November 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Ari Rizaldi	Hadir
					Harry Gusti Utama	Hadir

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi dan DPS	Kehadiran
1	25 Juli 2024	Evaluasi Kinerja BSI bulan Juni 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Tidak Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Zaidan Novari	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda	Peserta Rapat - Dewan Komisaris	Kehadiran	Peserta Rapat – Direksi dan DPS	Kehadiran
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Ari Rizaldi	Tidak Hadir
					Harry Gusti Utama	Hadir
					Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
					DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Hadir
					Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
					Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
2	08 November 2024	Rencana Bisnis Bank 2025 - 2027	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi	Tidak Hadir	Tribuana Tunggadewi	Tidak Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Ari Rizaldi	Tidak Hadir
					Harry Gusti Utama	Hadir
					Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
					DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Hadir
					Dr. H. Oni Sahroni, MA	Tidak Hadir
					Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir
3	19 Desember 2024	PwC *Hardclose Meeting* Audit BSI Tahun 2024	Adiwarman Azwar Karim	Hadir	Hery Gunardi	Hadir
			Masduki Baidlowi	Hadir	Bob Tyasika Ananta	Hadir
			Suyanto	Hadir	Ade Cahyo Nugroho	Hadir
			Abu Rokhmad	Tidak Hadir	Anton Sukarna	Hadir
			Fauzi	Hadir	Tribuana Tunggadewi	Hadir
			Nazaruddin	Hadir	Zaidan Novari	Hadir
			Komaruddin Hidayat	Hadir	Saladin Dharmanugraha Effendi	Hadir
			Mohamad Nasir	Hadir	Grandhis Helmi Harumansyah	Hadir
			Felicitas Tallulembang	Hadir	Ari Rizaldi	Tidak Hadir
					Harry Gusti Utama	Hadir
					Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
					DR. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H	Hadir
					Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
					Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Hadir

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	18	18	100%	12	12	100%	2	2	100%
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	18	18	100%	12	12	100%	2	2	100%
Masduki Baidlowi	Komisaris	18	15	83%	12	11		2	2	100%
Suyanto	Komisaris	18	18	100%	12	12	100%	2	2	100%
Abu Rokhmad	Komisaris	18	15	83%	12	10		2	2	100%
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	6	6	100%	4	4	100%	1	1	100%
Sutanto*	Komisaris	6	6	100%	4	4	100%	1	1	100%
Fauzi**	Komisaris	12	11	92%	8	8	100%	-	-	-
Nazaruddin**	Komisaris	12	12	100%	8	8	100%	-	-	-
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	18	17	94%	12	11		2	2	100%
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	18	18	100%	12	12	100%	2	2	100%
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	12	12	100%	8	8	100%	-	-	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
* Mulai menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan terkait peningkatan kompetensi Dewan Komisaris diatur dalam Standar Operasional Prosedur Human Capital yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Program pengembangan kompetensi mencakup pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan terkini dalam industri dan bisnis Bank. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan mengikuti program pengembangan kompetensi secara berkala untuk memastikan tetap memiliki pemahaman yang relevan dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Keikutsertaan Dewan Komisaris dalam peningkatan kompetensi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Pembekalan Resertifikasi Penyetaraan Jenjang 7 Manajemen Risiko	Jakarta/ Senin, 19 Agustus 2024	Indonesia Risk Professional Association - IRPA
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Masduki Baidlowi	Komisaris	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Suyanto	Komisaris	Knowledge Sharing Forum (KSF) Series 1 Tahun 2024 Gen AI Seasons	Jakarta/Rabu, 10 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Abu Rokhmad	Komisaris	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty: Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung, Jumat, 23 Februari 2024	BSI X Mandiri
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema :Leadership Transformation	Jakarta, Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta, Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University X IBI
Sutanto*	Komisaris	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty: Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung, Jumat, 23 Februari 2024	BSI X Mandiri
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema :Leadership Transformation	Jakarta, Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta, Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University X IBI
Fauzi**	Komisaris	Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Online/Kamis-Jumat, 4-5 Juli 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Seminar Penyelaranan Komisaris (Level 4 dan Level 5)	Jakarta/Rabu-Kamis, 17-18 Juli 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Nazaruddin**	Komisaris	Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Online/Kamis-Jumat, 4-5 Juli 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Seminar Penyelaranan Komisaris (Level 4 dan Level 5)	Jakarta/Rabu-Kamis, 17-18 Juli 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/ Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/ Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/ Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/ Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/ Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indonesia	Jakarta/ Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/ Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future	Bandung/ Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Refreshment Manajement Risiko Perbankan Level 5: Mengelola Risiko Asuransi, Risiko Transaksi Intra Group, Stress & Back Testing dan Menganalisa Kebutuhan Sistem Informasi	Online/Jumát, 26 Januari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Board Forum Q4 Tahun 2024 Sharing Session Navigating Uncertainty : Role of Islamic Ecosystem in Driving Economic Growth	Bandung/Jumat, 23 Februari 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI
		Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/Senin, 20 Mei 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/Jumat, 09 Agustus 2024	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Seminar Nasional "Pengembangan Produk Bank Syariah: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Board Forum Q3 - 2024 Collaborative Future : Paving Pathways For Better Indoneisa	Jakarta/Jumat, 15 November 2024	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	Board Forum Q1 - 2024 Innovation and Sustainability to Catalyze Mandiri's Market Dominance Sharing Session Sustainability Synergy: Constructive Collaboration on Mandiri Ecosystem	Jakarta/20 Mei 2024	Mandiri Group
		Pembekalan Skema Sertifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Online/Senin-Selasa, 24-25 Juni 2024	ASBISINDO
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Online/Kamis-Jumat, 4-5 Juli 2024	LPPI
		Pembekalan Skema Sertifikasi 4 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Lanjutan)	Jakarta/Rabu, 10 Juli 2024	ASBISINDO
		Pembekalan Skema Sertifikasi Jenjang 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Fast Track)	Online/27-28 Juli 2024	JMS Education
		Onboarding Commissioner Program Angkatan 8 Tahun 2024	Jakarta/Rabu – Kamis, 07 – 08 Agustus 2024	BUMN
		Board Forum Q2 - 2024 Strategic Innovation in Conglomerates for Market Domination	Jakarta/Jumat, 09 Agustus 2024	Mandiri Group
		Pemantapan Materi Skema Sertifikasi Jenjang 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan (Fast Track)	Online/Jumat, 16 Agustus 2024	JMS Education
		Seminar Nasional "PENGEMBANGAN PRODUK BANK SYARIAH: "Penguatan Karakteristik dan Pengaturan Perbankan Syariah"	Jakarta/Rabu, 06 November 2024	ASBISINDO
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta/Selasa, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University
		Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia	Bandung/Jumat, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

*Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
*Mulai menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Mengingat latar belakang anggota Dewan Komisaris beragam, BSI selalu mengadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Melalui program tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Bank Syariah Indonesia secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:
1. Pengenalan Korporasi terkait Corporate Strategy, dan visi misi
2. Pelatihan Perbankan Syariah
3. Pelatihan Manajemen Risiko
4. Pelatihan GCG Perusahaan Terbuka

Pada tahun 2024 terdapat 3 (tiga) orang Dewan Komisaris baru yaitu Fauzi, Nazaruddin, Felicitas Tallulembang. Seluruh Dewan Komisaris baru telah mengikuti program orientasi bagi Dewan Komisaris baru dengan waktu dan materi program orientasi sebagai berikut.

No	Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
1.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Corporate Plan	Rabu, 5 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Change Management & Transformation Office Group
2.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Pengenalan Syariah dan Akad Syariah	Kamis, 6 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Compliance & AML-CFT Group
3.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	Jumat, 7 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Operational Portfolio & Market Risk Group
4.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - One Culture	Senin, 10 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group
5.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Rencana Bisnis Bank (RBB)	Rabu, 12 Juni 2024 13.00-14.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Strategic Planning & Performance Management Group
6.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - *Good Corporate Governance* (GCG)	Kamis, 13 Juni 2024 08.00-09.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Compliance & AML-CFT Group

Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar BSI, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Secara umum Dewan Komisaris berharap agar manajemen dapat menjaga keberlanjutan kinerjanya ke depan. Secara khusus, tanggapan, nasihat, rekomendasi Dewan Komisaris pada kinerja BSI per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

No.	Tema	Arahan/Nasihat/Rekomendasi Dewan Komisaris
1.	Kinerja	Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja manajemen per 31 Desember 2024 yang tumbuh dengan sehat, efisien dan tangguh, yang antara lain ditunjukkan oleh: 1. Total asset tembus Rp400 T menjadi Rp408,6 T tumbuh 15,6% (YoY) atau 108% dari target; 2. Laba bersih sebesar Rp7,0 T yang tumbuh 22,8% (YoY) atau 115,2% dari target; 3. *Cost to Income Ratio* sebesar 50,89% atau lebih rendah dari target 51,49%; 4. Kualitas pembiayaan terjaga dengan *NPF Gross* sebesar 1,90% lebih baik dari target sebesar 2,00%; dan 5. Terealisasinya beberapa inisiatif strategis seperti *launching BYOND by BSI*, *Project Bosphorus*, *New CMS*, dan lain-lain.
2.	Dana Pihak Ketiga	1. CASA per 31 Desember 2024 mencapai Rp197 T, yang tumbuh 10,65% dari Desember 2023 namun hanya mencapai 97,78% dari target sebesar Rp201 T terutama karena tidak tercapainya target Giro. Untuk itu, agar disusun strategi untuk meningkatkan giro transaksional yang lebih sustain, antara lain dengan optimalisasi ekosistem ISE (Islamic Ecosystem) dan aplikasi New CMS. 2. Pertumbuhan Tabungan secara YoY sebesar Rp15,8 T (Desember 2023 sebesar Rp124,7 T menjadi Desember 2024 sebesar Rp140,5 T) atau growth sebesar 12,67% agar diupayakan tidak mengalami penurunan secara signifikan di bulan Januari 2025. 3. Untuk meningkatkan pertumbuhan Tabungan, agar dapat dipertimbangkan juga mengenai produk Investasi Terikat sebagai *game changer*, mengingat jumlah nominal dan pertumbuhannya selama tahun 2024 cukup signifikan. 4. Konsentrasi Top 50 deposan Desember 2024 sebesar Rp77,9 T mengalami kenaikan sebesar Rp6,8 T apabila dibandingkan Desember 2023 sebesar Rp71,1 T atau growth sebesar 9,6%, walaupun secara konsentrasi sudah mengalami penurunan dari 24,19% (Desember 2023) menjadi 23,79% (Desember 2024) dan masih di bawah *appetite* (30%), namun agar tetap diupayakan *manage* CoF sejak awal tahun mengingat kondisi *pricing* dana di *market* kemungkinan masih tinggi.
3.	Pembiayaan	1. Realisasi pembiayaan consumer Desember 2024 sebesar Rp138,2 T dengan tingkat pencapaian sebesa 97,22% dari target agar menjadi perhatian mengingat pembiayaan consumer memberikan *yield* tinggi dan kualitas yang baik, sehingga perlu disiapkan strategi *up front loading*. 2. Perbaikan kolektibiltas 2 yang cukup signifikan pada segmen SME sebesar 95 bps secara YoY agar terus dipantau perkembangannya dan dipastikan perbaikannya bersifat sustain. 3. Untuk pencairan baru pembiayaan Produk Oto yang sudah menggunakan bisnis model yang baru yang berbasis *Captive Customer*, agar dipastikan kualitasnya tetap terjaga pada tahun 2025, mengingat NPF dan Kol 2 pada posisi Desember 2024 masing-masing relatif tinggi sebesar 2,62% dan 3,14% dengan *write off* di bulan Desember 2024 sebesar Rp117 M.
4.	Laba Rugi	1. Pelampauan realisasi biaya *overhead* Desember 2024 terutama pos BUA (realisasi Rp5.572 M vs budget Rp5.285 M) dan pos biaya promosi (realisasi Rp944 M vs budget Rp847 M) agar menjadi perhatian dan menjadi bahan evaluasi ke depan terutama pada saat penyusunan *budget* dan dalam rangka mengontrol biaya *overhead* lebih ketat lagi terutama untuk biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan perolehan bisnis. 2. Bank perlu mendorong percepatan perizinan pengelolaan Hasanah Card secara mandiri dari OJK agar dapat lebih mendorong peningkatan pendapatan dari sisi pembiayaan dan *Fee Based Income* di tahun 2025.
5.	Lainnya	1. Bank agar mewaspadai dan mengantisipasi risiko perekonomian global (antara lain pergantian Presiden Amerika Serikat (AS) di tahun 2025 ini, eskalasi perang dagang, ketegangan geopolitik terutama di Timur Tengah, dan turunnya preferensi terhadap *green economy*) dan domestik (antara lain potensi peningkatan defisit fiskal, inflasi dan nilai tukar) yang berdampak terhadap bisnis dan kinerja bank. 2. UREG (User Registrasi) BYOND by BSI per 31 Desember 2024 mencapai 1,98 juta nasabah dengan tingkat aktivasi 1,31 juta nasabah atau 66,3%. Sementara UREG BSI Mobile sebesar 7,39 juta nasabah dengan USAK (User Aktif) mencapai mencapai 3,52 juta nasabah atau 47,6%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tingkat aktivasi UREG BYOND by BSI lebih tinggi dibandingkan BSI Mobile, baru sekitar 26,79% nasabah BSI Mobile yang bermigrasi ke BYOND by BSI. Atas hal ini, proses migrasi BYOND by BSI perlu dikaji/dievaluasi dan dikawal agar bisa berjalan dengan lebih cepat sehingga BYOND by BSI bisa diimplementasikan dengan lebih optimal. 3. Bank perlu lebih mengintensifkan lagi program aktivasi mesin EDC (*Electric Data Capture*). 4. Bank perlu mendorong percepatan proses pengajuan perizinan Usaha Bullion (Bullion Bank) ke OJK untuk mengoptimalkan potensi bisnis emas yang semakin besar di Indonesia.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Bank, yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Adapun beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Fungsi Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB):
   a. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2024 - 2026, termasuk evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2024 setiap bulan.
   b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting dalam rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas, dan efisiensi.
   c. Melakukan penelaahan terhadap Revisi RBB 2024-2026.
   d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester, serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan.
   e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan terhadap RBB Tahun 2025-2027.

2. Menelaah Informasi Keuangan: Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya.
3. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Pengendalian Internal di BSI:
    a. Memastikan bahwa sistem pengendalian internal di BSI berjalan dengan baik.
    b. Memastikan Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
    c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
4. Melakukan Pengawasan terhadap Tingkat Kesehatan Bank: Melakukan pengawasan, pemantauan, serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank per semester dan mendukung Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
5. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Melakukan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kepatuhan di BSI:
    a. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di BSI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan dilaksanakan dengan baik, serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan.
    b. Melakukan reviu atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala.
    c. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Strategi Anti-Fraud, Program Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), serta Prinsip Mengenal Nasabah.
    d. Memastikan penerapan prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh tingkatan, dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG, reviu terhadap laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan Direksi, dan pemantauan terhadap hasil *self-assessment* GCG.
7. Evaluasi dan Pengawasan terhadap Teknologi Informasi: Mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis serta pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi di BSI.
8. Pemantauan terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengelolaan dan pengembangan SDM, khususnya yang berkaitan dengan fungsi strategis SDM dalam mendukung pencapaian kinerja Bank.
9. Memberikan Persetujuan terhadap Hal-hal yang Wajib Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris: Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Melakukan Kunjungan Pengawasan. Selama tahun 2024 ini Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan ke 6 (enam) Kantor Region dengan Kantor Area dan/atau Kantor Cabang yang terletak pada Region I (Aceh), Region II (Medan), Region VII (Semarang), Region VIII (Surabaya), Region IX (Kalimantan), Region X (Makassar) dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

No.	Indikator	Bobot Penilaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala berjalan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
2	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
3	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Komisaris bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
4	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
5	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
6	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
7	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%
8	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	10%
9	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada seluruh jenjang organisasi.	10%
10	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris • Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	10%

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment*. Hasilnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala berjalan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
2	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
3	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Komisaris bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
4	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
5	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
6	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
7	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%

No.	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
8	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.	10%	100%
9	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* pada seluruh jenjang organisasi.	10%	100%
10	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris • Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	10%	100%

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remuerasi. Hasil *review* digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan besaran tantiem Direksi dan Dewan Komisaris. Hasil *review* atas kinerja Direksi selanjutnya disampaikan kepada RUPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi didasarkan pada pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI). Adapun KPI pada tahun 2024 yaitu:

1. Perpektif *financial*
2. Perspektif internal *process*
3. Perspektif *People Development*

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

No	Perspektif	Bobot	KPI	Bobot	Target	Keterangan	Sifat	Dec-24			
								Real	Target	Penc.	Skor
1	Financial	60,00%	ROE (Return on Equity)	15%	15,63%	Return On Equity Desember 2024	Max	17,77%	15,63%	113,67%	17,05
2			Laba Bersih BSI	20%	Rp6.080 M	Laba setelah dikurangi pajak dan zakat	Max	Rp7.006 M	Rp6.080 M	115,23%	23,05
3			Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	15%	2	Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	Min	2	2	100,00%	15,00
4			Pembiayaan	10%	Rp272.987 M	Pembiayaan BSI Desember 2024	Max	Rp278.481 M	Rp272.987 M	102,01%	10,20
5			FaR	15%	8,63%	Financing at Risk Desember 2024	Min	7,25%	8,63%	115,94%	17,39
6	Internal Process	15,00%	Market Capitalization (Rp. T)	15%	Rp110 T	Market Capitalization Desember 2024	Max	Rp126T	Rp110T	114,48%	17,17
7	People Development	10,00%	Employee Productivity	10%	Rp348 Juta/ Pegawai	Rp Juta (Laba bersih/pegawai)	Max	Rp406 Juta/ Pegawai	Rp348 Juta/ Pegawai	116,67%	11,67
			Total	**100%**							**111,53**

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara tahunan. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite
2. Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite
3. Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris
4. Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu

KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh auditor internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor;
2. Memberikan Rekomendasi Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024;
3. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan BSI Tahun Buku 2024;
4. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Laporan Keuangan Publikasi selama tahun 2024.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Usulan Remunerasi Pengurus 2024 dan Tantiem Kinerja 2023;
2. Usulan Kandidat Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI tahun 2024;
3. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
3. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran;
4. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Pelaksanaan Kepatuhan, antara lain:
   a. Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan / Laporan Kepatuhan,
   b. Laporan Kepatuhan Terintegrasi & Laporan Tata Kelola Terintegrasi,
   c. Laporan Anti Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
5. Mengawasi dan mengevaluasi Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mengawasi pelaporan *Recovery & Resolution Plan*
7. Mengawasi risiko atas usulan aksi korporasi atau tindakan lainnya seperti usulan *Threshold* (Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris).

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.



Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus sejalan dengan prinsip syariah. DPS juga memastikan implementasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Profil Dewan Pengawas Syariah

Profil Dewan Pengawas Syariah dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas, tanggung jawab dan fungsi utama, antara lain meliputi:

1. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan.
2. Bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang berlaku.
3. Berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip Syariah.
4. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
5. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan.
6. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang dikeluarkan Perseroan.
7. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
8. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah, terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
9. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
10. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
    a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.
    b. Melaporkan kegiatan usaha Perseroan kepada OJK atau penggantinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK atau penggantinya.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan Perbankan Syariah.

Persyaratan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan memenuhi persyaratan, diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang (OJK). Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah mengikuti ketentuan:

a. Undang-undang Perbankan Syariah.
b. Peraturan Bank Indonesia.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
d. Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
e. Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah mengacu pada Anggaran Dasar yang mengatur tentang Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Tugas, Tanggung Jawab dan Fungsi Utama, Larangan DPS, Masa Jabatan, Pemberhentian, Kebijakan Rapat.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuagan syariah lain. Adapun rangkap jabatan DPS adalah sebagai berikut.

Tabel Rangkap Jabatan DPS

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Toyota Astra Finance Services
		Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional	Majelis Ulama Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Bank Permata Unit Usaha Syariah
		Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum	UIN Sunan Gunung Djati Bandung
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Asuransi Al - Amin
		Sekretaris Badan Pelaksana Hariah DSN	Majelis Ulama Indonesia
		Wakil Sekretaris	Komisi Fatwa MUI
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Dana Pensiun Iuran Pasti BI
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota	-	-

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah dilarang untuk:

1. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi asset dan/atau keuntungan Perseroan.
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
3. Merangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan Rapat

Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas Syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh keputusan dan hasil rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam risalah rapat dan hal tersebut merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah. Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib didokumentasikan dengan baik oleh Perseroan.

Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat DPS dapat diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
1.	17 Januari 2024	Permohonan Opini DPS BSI mengenai Restrukturisasi (MRA) nasabah WIKA.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
2.	22 Januari 2024	Permohonan Opini DPS BSI mengenai Restrukturisasi (MRA) nasabah WIKA.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
3.	23 Januari 2024	Produk Pembiayaan BSI Oto	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
4.	30 Januari 2024	Penggunaan Dana TBDSP untuk pembangunan Klinik Pesantren Raudhatlutalibin Leteh Rembang	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
5.	21 Februari 2024	1. Produk Tapenas (Tabungan Perencanaan Masa Depan) Kerjasama Bancassurance Model Integrasi 2. Novasi dengan akad Hawalah Bil Ujrah	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
6.	6 Maret 2024	1. Mitra Pemasaran Perdagangan Efek 2. Proyek Bosporus. 3. BSI Valas Multicurrency.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
7.	13 Maret 2024	Pembahasan Sosialisasi POJK (Tata Kelola Syariah dan Managemen Risiko Syariah) NO. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
8.	20 Maret 2024	1. Penghentian Kerjasama *Host to Host* ATM Bank Mandiri & Penyataan Kembali Kerjasama Penggunaan Layanan EDC Mandiri. 2. Skema Gadai Angsuran.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
9.	3 April 2024	*Review* dokumentasi akad *sustainable* sukuk.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
10.	17 April 2024	Pelunasan Haji Khusus Menggunakan Hasanah Card	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
11.	26 April 2024	Pembahasan BI *Fast* Tahap 2	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
12.	3 Mei 2024	1. Pembahasan Intraday dan PKS BSI 2. *Incoming smoothing* Nasabah DPK Dapen Freeport dan usulan pembuatan kebijakan income smoothing (by request Nasabah).	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
13.	22 Mei 2024	1. Harmonisasi Pemotongan Zakat dan Infaq 2. Income Smoothing 3. *Buyback* Cilem	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
14.	26 Juni 2024	Skema akad project Medina, MMQ Indent	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
15.	24 Juli 2024	Kesesuaian Syariah terkait Aplikasi/Platform Bewize	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
16.	31 Juli 2024	Kesesuaian Syariah terhadap transaksi tarik tunai tanpa kartu Non Nasabah di ATM BSI dan Nasabah di ATM Non BSI	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
17.	07 Agustus 2024	Simpanan Lindungi Nilai Syariah	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
18.	21 Agustus 2024	1. Kesesuaian Syari'ah pada Klausula akad project Bosporus BSI dgn Prudential. 2. Pengajuan telaah ulang atas Opini nomenklatur Kredit pada Hasanah Card.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
19.	04 September 2024	1. Tabungan Easy Pool BYOND by BSI Fitur Umrah dan Orang Tua Asuh	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
20	02 Oktober 2024	1. Penyaluran dana TBDSP (Ambulan) kepada Yayasan Sri Sanathana Dharma. 2. Hasanah Card dan KKI QRIS, Hasanah Card Segmen Muda, dan Debit Bisnis. 3. Temuan atas Produk Mitra Kopkar Pola Channeling.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
21	09 Oktober 2024	Penerapa Tata Kelola Syariah sesuai POJK 2 Tahun 2024.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
22	21 Oktober 2024	Temuan OJK terkait Implementasi Akad Take Over; Qardh Bai dan Murabahah	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
23	06 November 2024	1. Pengkinian *recovery plan* tahun 2024 Skema *Joint Financing* dengan Multifinance Syariah 2. *Landing Page*	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
24	13 November 2024	1. Usulan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2025 2. SRIA 3. Harmonisasi Standar Akad Musyarakah	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
25	26 November 2024	Kajian Akad Pembiayaan Pensiun yang disertai dengar Rahn pada Pensiun Realtime Berkah.	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir
26	10 Desember 2024	1. BYOND by BSI lyfe 2. Pembiayaan Griya d BYOND by BSI 3. Kajian skema channeling kepada Koperasi Konvensional (dalam rangka permohonan Fatwa/keselarasan syariah ke DSN-MUI)	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Kehadiran
27	18 Desember 2024	1. Implementasi PYD berdasarkan Akad Mudharabah dengan DIB (Tanazul 'an al-haq) 2. *Risk participation* 3. Persiapan rapat *harclose* dengan PWC	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Hadir
			Dr. H. Mohamad Hidayat	Hadir
			Dr. H. Oni Sahroni, MA	Hadir
			Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Hadir
			Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Hadir

Agenda dan peserta rapat gabungan DPS bersama Dewan Komisaris dan Direksi telah disajikan pada Sub Bab Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat DPS

Nama	Jabatan	Rapat DPS			Rapat Gabungan DPS			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	27	27	100%	3	3	100%	1	1	100%
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	27	27	100%	3	3	100%	1	1	100%
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	27	27	100%	3	3	100%	1	1	100%
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Anggota	27	27	100%	3	3	100%	1	1	100%
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota	27	27	100%	3	3	100%	1	1	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Pelatihan & Courtesy Visit Transaction Banking to Arab Saudi	Saudi Arabia, 4 – 12 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Refreshment BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO	Jakarta, 8-9 dan 13 Agustus 2024	ASBISINDO
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Jakarta, 11 September 2024	DSN MUI
		Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah	Malang, 26-27 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta, 20 Desember 2024	DSN MUI
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Pelatihan & Courtesy Visit Transaction Banking to Arab Saudi	Saudi Arabia, 4 – 12 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Sosialisasi POJK Tata Kelola Syariah & SEOJK Managemen Risiko bagi BUS dan UUS	Jakarta, 28 Februari 2024	OJK
		Sosialisasi dari OJK perihal Pedoman Produk pembiayaan musyarakah	Jakarta, 26 Mei 2024	OJK
		Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Jakarta, 11 September 2024	DSN MUI
		Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah	Malang, 26-27 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta, 20 Desember 2024	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta, 17 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Sosialisasi dari OJK perihal Pedoman Produk pembiayaan musyarakah	Jakarta, 26 Mei 2024	OJK
		Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Refreshment BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO	Jakarta, 8-9 dan 13 Agustus 2024	ASBISINDO
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Jakarta, 11 September 2024	DSN MUI
		Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah	Malang, 26-27 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta,11-12 Oktober 2024	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta, 17 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Sosialisasi SEOJK tentang tata kelola syaiah bagi BUS dan UUS	Jakarta, 18 Desember 2024	OJK
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Tanggal/Tempat	Penyelenggara
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag*	Anggota	Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Executive Overview of Islamic Banking	Online, 4 – 5 Juli 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Refreshment BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO	Jakarta, 8-9 dan 13 Agustus 2024	ASBISINDO
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Jakarta, 11 September 2024	DSN MUI
		Pelatihan Transaksi Valuta Asing bagi Dewan Pengawas Syariah	Malang, 26-27 September 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta,11-12 Oktober 2024	DSN MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember Tahun 2024 Tema : Execution Matters: Rencana Tidak Mengubah Apa-Apa	Jakarta, 17 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.*	Anggota	Pembekalan BSMR Dewan Pengawas Syariah dan Komite Syariah Jenjang 4	Online, 2-3 Juli 2024	LSPKS
		Executive Overview of Islamic Banking	Online, 4 – 5 Juli 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
		Pelatihan dasar muamalah maaliyah dan Fatwa DSN MUI, Day 2. Materi ke DSNan.	Online, 15-17 Juli 2024	DSN MUI
		Orientasi Pelatihan Dasar Pengawas Syariah Perbankan Syariah (PDPS)	Online, 2 Agustus 2024	DSN MUI
		Refreshment BSMR jenjang 4 dengan ASBISINDO	Jakarta, 8-9 dan 13 Agustus 2024	ASBISINDO
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS XX Tahun 2024	Jakarta,11-12 Oktober 2024	DSN MUI
		"Sharing Session di Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PT Bank Syariah Indonesia Tbk oleh Juan Hasang Enterprise Solution Architecht Manager AWS Indonesia Topik : Bank of The Future"	Bandung, 20 Desember 2024	PT Bank Syariah Indonesia Tbk

*Mulai menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024

Program Orientasi bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah baru yaitu Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag dan Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A. Seluruh Dewan Pengawas Syariah baru telah mengikuti program orientasi bagi Dewan Komisaris baru dengan waktu dan materi program orientasi sebagai berikut.

No	Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
1.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - *Corporate Plan*	Rabu, 5 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Change Management & Transformation Office Group
2.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Pengenalan Syariah dan Akad Syariah	Kamis, 6 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Compliance & AML-CFT Group

No	Pelatihan	Waktu	Penyelenggara
3.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	Jumat, 7 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Operational Portfolio & Market Risk Group
4.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - *One Culture*	Senin, 10 Juni 2024 09.00-10.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group
5.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - Rencana Bisnis Bank (RBB)	Rabu, 12 Juni 2024 13.00-14.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Strategic Planning & Performance Management Group
6.	Program Orientasi Untuk BoC & DPS - *Good Corporate Governance* (GCG)	Kamis, 13 Juni 2024 08.00-09.30	• PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bank Syariah Indonesia University • Corporate Secretary and Communication Group • Compliance & AML-CFT Group

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran melalui berbagai cara yang memastikan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas pasar modal. Pemberian nasihat dilakukan melalui rapat dan diskusi rutin dengan manajemen Bank atau lembaga yang terlibat, guna membahas masalah operasional dan memastikan kesesuaian dengan syariah. Selain itu, DPS juga dapat mengeluarkan laporan tertulis yang merinci hasil audit dan pengawasan mereka, termasuk rekomendasi atau perbaikan yang diperlukan.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dalam bentuk:
   a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
   b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
      - Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
      - Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
   c. Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
   d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.
   a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/ atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
   b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
   c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
      - ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
      - ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
   d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan.
   e. Melakukan reviu terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
   f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
   g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Uji Petik DPS Periode 1 Januari 2024-31 Desember 2024

No.	Tanggal	Lokasi/Kantor Cabang BSI
1	• 24 -26 Januari 2024 • 24 -26 Januari 2024 • 31 Januari - 3 februari 2024	• KC BOGOR PAJAJARAN SUKASARI • KCP DEPOK DUA • KC METRO A YANI // Audit Mikro
2	• 12-13 Februari 2024 • 19-20 Februari 2024 • 19-20 Februari 2024 • 19-21 Februari 2024 • 20-24 Februari 2024 • 21-24 Februari 2024	• KCP CILEGON MERAK • KC PETTARANI • KCP KENDARI LEPO-LEPO • KC PATI SUDIRMAN • KCP BATANG • KCP GOMBONG
3	• 1 - 6 Maret 2024 • 1 - 6 Maret 2024 • 1 - 6 Maret 2024	• KC MEDAN S PARMAN • KCP TEBING TINGGI SUDIRMAN 1 • KC PEMATANGSIANTAR
4	• 1-3 April 2024 • 2-4 April 2024 • 19-21 April 2024	• KCP PALEMBANG SIMPANG PATAL • KC MARTAPURA • KC BANDA ACEH DIPONEGORO
5	• 13-17 Mei 2024 • 13-17 Mei 2024 • 20-22 Mei 2024 • 20-22 Mei 2024 • 21-22 Mei 2024	• KCP BOYOLALI PANDANARAN 1 • KCP MAGELANG GATOT SOEBROTO • KC DUMAI • KCP BATAM BATU AJI • KCP BANGKALAN TRUNOJOYO
6	• 3-5 Juni 2024 • 3-5 Juni 2024 • 5-7 Juni 2024 • 12-14 Juni 2024	• KC KETAPANG • KC KUTAI KARTANEGARA • KC JAMBI PATTIMURA • KCP PADANG PARIAMAN
7	• 8-9 Juli 2024 • 3-5 Juli 2024 • 3-5 Juli 2024 • 11-12 Juli 2024 • 15-16 Juli 2024 • 15-16 Juli 2024 • 17-18 Juli 2024	• KC MANADO MANTOS • KC PASURUAN BALAIKOTA • KC BLITAR • KC BENGKULU • KC SUMBAWA DIPONEGORO • KCP BANYUWANGI A YANI • KCP SIDOARJO A YANI
8	• 12-14 Agustus 2024 • 20-21 Agustus 2024 • 20-21 Agustus 2024	• KC CIMAHI • KC JAKARTA THE TOWER • KCP JAKARTA PANGKALAN JATI 2
9	• 05-07 September 2024 • Senin, 09 september 2024 • Selasa, 10 september 2024	• KC KUALA SIMPANG • KC JAKARTA MAYESTIK • KCP JAKARTA MEGA KUNINGAN
10	• 21-23 Oktober 2024 • 24-25 Oktober 2024	• KCP CALANG • KCP PAMULANG
11	• 03 November 2024 • 13 November 2024 • 13 November 2024 • 18 November 2024	• KC JAKARTA SUNTER • KCP DEPOK CINERE • KCP JAKARTA KEMANGGISAN • KC BEKASI JATIWARINGIN

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
1	Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 31 Desember 2023	01/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/01/2024
2	Murabahah Komoditi Untuk BSI Dubai / Middle East	02/BSI/DPS/OPINI/I/2024	22/01/2024
3	Restrukturisasi Pembiayaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	03/BSI/DPS/OPINI/I/2024	22/01/2024
4	Pengesahan Dokumen terkait BSI Paylater	04/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/01/2024
5	Pengesahan Template MP dan PKS cardless withdrawal	05/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/01/2024
6	Penggunaan Dana TBDSP untuk Pembangunan Klinik Pesantren Raudhatlutalibin Leteh Rembang	06/BSI/DPS/OPINI/I/2024	31/01/2024
7	Pengesahan Dokumen Terkait BSI Cash Management	07/BSI/DPS/OPINI/I/2024	31/01/2024
8	Struktur Tiering Ujrah	08/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/02/2024

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
9	Notional Pooling	09/BSI/DPS/OPINI/I/2024	16/02/2024
10	BSI OTO	10/BSI/DPS/OPINI/I/2024	24/01/2024
11	Pengesahan Dokumen Terkait Sustainable Sukuk Mudharabah BSI	11/BSI/DPS/OPINI/II/2024	21/02/2024
12	Novasi Supplier Financing Kepada Nasabah PT Barata Indonesia dan PT Waskita Beton Precast, Tbk	12/BSI/DPS/OPINI/II/2024	21/02/2024
13	Produk BSI Tabungan Valas Multicurrency	13/BSI/DPS/OPINI/III/2024	8/3/2024
14	Project Bosporus	14/BSI/DPS/OPINI/III/2024	6/3/2024
15	Pengesahan Template Dokumentasi Harmonisasi Akad MMQ Segmen Retail	15/BSI/DPS/OPINI/III/2024	1/3/2024
16	Penghentian Kerjasama Host to Host (H2H) ATM Bank Mandiri & Pernyataan Kembali Kerjasama Penggunaan Layanan EDC Bank Mandiri (BMRI)	16/BSI/DPS/OPINI/III/2024	3/20/2024
17	Produk Tapenas (Tabungan Perencanaan Masa Depan) Kerjasama	17/BSI/DPS/OPINI/III/2024	2/21/2024
18	Permohonan Opini DPS Skema Gadai Angsuran	18/BSI/DPS/OPINI/III/2024	3/20/2024
19	Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek (MPPPE)	19/BSI/DPS/OPINI/III/2024	3/20/2024
20	Kesesuaian Syariah terkait Skema Bagi Hasil yang Diharapkan Dapen PT Freeport	20/BSI/DPS/OPINI/V/2024	5/3/2024
21	Kesesuaian Syariah terkait Skema Bisnis Intraday	21/BSI/DPS/OPINI/V/2024	3/5/2024
22	Pengesahan Template Standar Prosedur Bisnis dan Perjanjian Kerjasama Terkait Bancassurance	22/BSI/DPS/OPINI/VI/2024	6/25/2024
23	Distribusi Revenue secara Bertahap	23/BSI/DPS/OPINI/V/2024	5/22/2024
24	Fitur Buyback Cicil Emas BSI Gold	24/BSI/DPS/OPINI/V/2024	5/22/2024
25	Kesesuaian Syariah Sistem Global Transaction Sharia (GTS/Bewize)	25/BSI/DPS/OPINI/V/2024	7/24/2024
26	Permohonan Opini DPS perihal Produk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Financing	26/BSI/DPS/OPINI/VI/2024	12/6/2024
27	Implementasi Skema Akad untuk Pembiayaan Rumah Indent	27/BSI/DPS/OPINI/VI/2024	6/26/2024
28	Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 30 Juni 2024	28/BSI/DPS/OPINI/VIII/2024	8/22/2024
29	Pengesahan Template Simplifikasi Akad (Ijab Qabul) Deposito Mudharabah	29/BSI/DPS/OPINI/VIII/2024	8/18/2024
30	Pengesahan Template Dokumen Terkait Murabahah Komoditi Untuk BSI Dubai	30/BSI/DPS/OPINI/VIII/2024	8/26/2024
31	Kesesuaian Syariah terhadap BI Fast Tahap 2 (*Request for Payment* dan *Bulk Credit*)	31/BSI/DPS/OPINI/V/2024	5/26/2024
32	Pengesahan Debit Online	32/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	7/30/2024
33	Pengesahan Template Manual Produk Tarik Tunai Tanpa Kartu Antar Bank Melalui Jaringan Pihak Ketiga	33/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/11/2024
34	Fitur Orang Tua Asuh Pada BYOND by BSI	34/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/4/2024
35	Fitur Pembelian Paket Umrah Pada BYOND by BSI	35/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/4/2024
36	Pengesahan Template Akad Financial Institution Bank To Bank Wakalah Facility	36/BSI/DPS/OPINI/X/2024	10/14/2024

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
37	Pengesahan Template Dokumentasi Transaksi Lindung Nilai Syariah Interbank Melalui *Foreign Exchange Trading* (Fxt)	37/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/26/2024
38	Pengesahan Dokumen Terkait Bsi Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah Secara Manual Dan Elektronik	38/BSI/DPS/OPINI/X/2024	10/2/2024
39	Tabungan Zakat	39/BSI/DPS/OPINI/IX/2024	9/4/2024
40	BSI Debit Bisnis	40/BSI/DPS/OPINI/X/2024	10/2/2024
41	Permohonan Perpanjangan Implementasi Qardh Bai' dan Murabahah (Temuan Audit OJK terkait Belum Diimplementasikannya Hawalah bil Ujrah serta Bai' dan Murabahah)	41/BSI/DPS/OPINI/X/2024	10/21/2024
42	*Easy Pool*	42/BSI/DPS/OPINI/X/2024	9/4/2024
43	Landing Page Consumer	43/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/8/2024
44	Pengesahan Template Akad Musyarakah Mutanaqishah Pengadaan Barang Inden	44/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/8/2024
45	Rencana Aksi pemulihan (*Recovery Plan*) tahun 2024	45/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/6/2024
46	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025	46/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/13/2024
47	Pengesahan Dokumen-Dokumen Terkait Pembelian Paket Umrah Pada Superapps BYOND by BSI	47/BSI/DPS/OPINI/XI/2024	11/20/2024
48	Pengesahan Template Manual Produk Pembiayaan Griya Dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pengadaan Barang Inden	48/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/4/2024
49	Opini Pengesahan Debit Bisnis	49/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/10/2024
50	Kebijakan PUPMSJT	50/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/4/2024
51	Pengesahan Dokumen-Dokumen Terkait Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)	51/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/19/2024
52	Pengembangan Menu/ Fitur BYOND by BSI Lyfe Pada Supperaps BYOND by BSI	52/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/10/2024
53	Pengesahan Memorandum Prosedur Operasional Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting* - ICOFR)	53/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/31/2024
54	Implementasi *Income Smoothing* & Tanazul Haq Pada Akad Mudharabah Sesama Lembaga Keuangan Syariah (Dubai Islamic Bank)	54/BSI/DPS/OPINI/XII/2024	12/18/2024

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah dan Dasar Penilaiannya

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja DPS

Prosedur Pelaksanaan penilaian kinerja DPS dilakukan secara Self assessment yang dilaksanakan secara periodik setiap semester berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang dilakukan oleh Bank dan disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK No. 17 Tahun 2023 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian Kinerja DPS

Kriteria penilaian kinerja DPS dilihat berdasarkan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS yang ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan opini DPS dan pelaksanaan pengawasan syariah (Uji Petik) DPS.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Pegawas Syariah

Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah, berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPS tersebut kecuali bila terdapat tanggal pemberhentian lain yang ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang berlaku.

Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas Syariah akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut:

1. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
2. Mengundurkan diri dan pengunduran diri tersebut telah berlaku efektif;
3. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan surat keputusan Pengadilan;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Merangkap jabatan pada jabatan yang dilarang untuk dijabat oleh anggota Dewan Pengawas Syariah karena ketentuan dari Dewan Syariah Nasional dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Meninggal dunia;
7. Diberhentikan oleh RUPS;
8. Termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi Dan Dewan Komisaris

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru.

Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris mengacu/berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mendapat persetujuan RUPS.



Indikator Penetapan Remunerasi

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah Dalam penetapan remuneration *package* tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi telah memperhatikan:

1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva.
3. Kewajaran dengan *peer group*.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (net), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
   a. Tunjangan Hari Raya
   b. Tunjangan Purna Jabatan
   c. Tunjangan Perumahan dan Utilitas
   d. Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi
   e. Fasilitas Kesehatan
   f. Fasilitas *Club Membership* dan Anggota Perkumpulan Profesi
   g. Fasilitas Biaya Komunikasi
   h. Fasilitas Kantor Non Inventaris
   i. Fasilitas Perjalanan Dinas
   j. Fasilitas Bantuan Hukum
   k. Izin Cuti
3. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
   a. Tunjangan Hari Raya
   b. Tunjangan Purna Jabatan
   c. Fasilitas Kesehatan
   d. Fasilitas Perjalanan Dinas

Dewan Komisaris

Remunerasi	Januari - Desember 2024	
	Orang	Nominal (Rp)
Honorarium	10	15.099.884.161
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	10	2.849.577.548
Tunjangan Hari Raya	10	1.176.070.000
Asuransi Purna Jabatan	7	6.237.244.490
Kesehatan	-	-
Total		**25.491.161.199**

Direksi

Remunerasi	Januari - Desember 2024	
	Orang	Nominal (Rp)
Salary	10	30.108.298.387
Tunjangan Perumahan	10	2.809.103.226
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	10	2.472.600.000
Asuransi Purna Jabatan	6	10.709.977.567
Kesehatan	-	-
Total		**46.099.979.180**

Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi	Januari - Desember 2024	
	Orang	Nominal (Rp)
Honorarium	5	2.898.255.807
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	-	-
Tunjangan Hari Raya	4	259.940.000
Asuransi Purna Jabatan	4	1.464.474.115
Kesehatan	-	-
Total		**4.622.669.922**

Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank diatur dalam Anggaran Dasar Bank dimana syarat diangkatnya anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diantaranya adalah memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank dan wajib memenuhi ketentuan terkait yang berlaku dibidang perbankan syariah, pasar modal, dan anak perusahaan BUMN.
Kebijakan tersebut dilaksanakan Bank dengan mengacu pada:

1. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, beserta Lampirannya.
3. POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/ Mbu/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
9. Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG) Tahun 2024.

Organ Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank merupakan kombinasi atas keberagaman karakteristik secara individu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Bank dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Keberagaman karakteristik tersebut tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, gender, latar belakang pendidikan, pengalaman profesional, integritas, dedikasi, serta pemahaman terhadap perbankan syariah, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank.

Dalam proses pencalonan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank, dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi Bank wajib mengidentifikasi dengan memperhatikan keberagaman karakteristik yang dibutuhkan oleh Bank, untuk selanjutnya usulan dan/atau rekomendasi dimaksud disampaikan kepada Pemegang Saham dan RUPS. Khusus untuk calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank, selain mendapatkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi juga wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam MSMPG Tahun 2024, usulan penetapan Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank kepada RUPS, diajukan berdasarkan kesepakatan antar Pemegang Saham yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau Perjanjian Pemegang Saham (Shareholder Agreement/SHA) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan yang mengikat Bank sebagai Anak Perusahaan BUMN.

Komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank saat ini telah memenuhi kriteria dimaksud yang mencakup keragaman dalam hal usia, representasi gender untuk Dewan Komisaris dan Direksi, kualifikasi pendidikan, dan pengalaman yang relevan sesuai kebutuhan Bank.

Keberagaman komposisi Direksi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian adalah sebagai berikut.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Hery Gunardi	Direktur Utama	62 Tahun	Pria	Sarjana Administrasi Niaga Master Finance and Accounting Doktor Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Finance and Accounting, Manajemen Bisnis
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	61 Tahun	Pria	Sarjana Akuntansi Magister Finance, Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi, Finance, Business Administration

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Ngatari*	Direktur Retail Banking	59 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/ Pengolahan Hasil Pertanian	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	56 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi, Manajemen
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	57 Tahun	Wanita	Sarjana Hukum Spesialis Kenotariatan Magister Hukum Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Hukum
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	54 Tahun	Pria	Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	46 Tahun	Pria	Sarjana Akuntansi Master in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi, Business Administration
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	57 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ilmu Ekonomi, Manajemen Keuangan
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	59 Tahun	Pria	Sarjana Ilmu Agronomi Magister Manajemen Agrobisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	54 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	50 Tahun	Pria	Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Information Technology
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	43 Tahun	Pria	Sarjana Teknik Magister Business Administration-Strategic Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Business Administration-Strategic Management

* Berhenti menjabat sejak 17 Mei 2024.
** Mulai menjabat sejak 17 Mei 2024.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja dan keahlian adalah sebagai berikut.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	64 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan Master of Public Administration Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan	Ekonomi, Public Administration, Keuangan
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	61 Tahun	Pria	Insinyur Ekonomi Sarjana Ekonomi Master Administrasi Bisnis Master Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan	Ekonomi, Administrasi Bisnis
Masduki Baidlowi	Komisaris	66 Tahun	Pria	Sarjana Muda Sastra Arab Sarjana Bidang Pendidikan	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan perbankan	Hukum, Keuangan
Suyanto	Komisaris	62 Tahun	Pria	Sarjana Studi Pembangunan Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta Doktor Ekonomi-Manajemen Strategi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan	Perbankan Syariah, Keuangan
Abu Rokhmad	Komisaris	48 Tahun	Pria	Sarjana Syari'ah/ Hukum Perdata Islam Magister Agama Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan	Hukum, Perbankan Syariah
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	65 Tahun	Pria	Sarjana Ekonomi Master Economy Doctor Economy	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi, Perbankan
Sutanto*	Komisaris	61 Tahun	Pria	Sarjana Administrasi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Administrasi, Perbankan
Fauzi**	Komisaris	57 Tahun	Pria	Sarjana Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, Perbankan
Nazaruddin**	Komisaris	56 Tahun	Pria	Sarjana Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	71 Tahun	Pria	Sarjana Ushuluddin Magister Filsafat Doktor Filsafat Post-Doctorate Research Program	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan perbankan	Pendidikan, Filsafat
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	64 Tahun	Pria	Sarjana Akuntansi Magister Sains in Accounting Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan	Akuntansi, Perbankan
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	65 Tahun	Wanita	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan	Manajemen

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
* Mulai menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Direksi, Dewan Komisaris dan DPS wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Kepemilikan Saham Direksi Lebih dari 5%

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Hery Gunardi	Direktur Utama	3.354.400 lembar	-	-	-
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	1.134.400 lembar	-	-	-
Ngatari*	Direktur Retail Banking	-	-	-	-
Harry Gusti Utama**	Direktur Retail Banking	Nihil	-	-	-
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	2.280.100 lembar	-	-	-
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	2.280.100 lembar	-	-	-
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	2.280.100 lembar	-	-	-
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	1.071.400 lembar	-	-	-
Moh. Adib*	Direktur Treasury & International Banking	13.400 lembar	-	-	-
Ari Rizaldi**	Direktur Treasury & International Banking	-	-	-	-
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	343.100 lembar	-	-	-
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	343.100 lembar	-	-	-

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Lebih dari 5%

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama merangkap Independen	-	-	-	-
Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	-	-	-	-
Masduki Baidlowi	Komisaris	1.086.400 Lembar	-	-	-
Suyanto	Komisaris	1.086.400 Lembar	-	-	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Abu Rokhmad	Komisaris	163.500 Lembar			
Imam Budi Sarjito*	Komisaris	-	-	-	-
Sutanto*	Komisaris	-	-	-	-
Fauzi**	Komisaris	115.000 Lembar	-	-	-
Nazaruddin**	Komisaris	-	-	-	-
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	-	-	-	-
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	-	-	-	-
Felicitas Tallulembang**	Komisaris Independen	-	-	-	-

* Berhenti menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024
* Mulai menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024 dan efektif sejak tanggal 10 Desember 2024

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah Lebih dari 5%

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BSI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	-	-	-	-
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	-	-	-	-
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	-	-	-	-
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH. M.Ag	Anggota	-	-	-	-
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.	Anggota	-	-	-	-

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank termasuk pada penyampaian laporan kepada Regulator mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Bank disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik. Penyampaian laporan wajib dilakukan segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Bank.

Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dibeli/dijual	Harga Pembelian per saham	Tanggal Transaksi	Tujuan dari Transaksi	Status Kepemilikan
Hery Gunardi	Direktur Utama	167.000	Rp2.400	21 Februari 2024	Investasi	Kepemilikan Langsung
		976.800	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung

Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dibeli/dijual	Harga Pembelian per saham	Tanggal Transaksi	Tujuan dari Transaksi	Status Kepemilikan
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	586.000	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	553.500	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	553.500	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	553.500	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	553.500	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Saladin Dharmanugraha Effendi	Direktur Information Technology	343.100	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur Risk Management	343.100	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Masduki Baidlowi	Komisaris	263.700	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Suyanto	Komisaris	263.700	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung
Abu Rokhmad	Komisaris	263.700	Rp3.071,2408	26 September 2024	Dalam rangka pemenuhan POJK No.59/POJK.03/2017, terhadap saham-saham tersebut ditangguhkan/ diblokir selama 3 (tiga) tahun dan akan dibuka blokirnya secara bertahap setiap tahun.	Kepemilikan Langsung

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris Pembentukan Komite Audit bertujuan membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 04/KEP-KOM/002/2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 1 Juli 2024, tugas dan tanggung jawab Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan:
    a. Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran BSI serta Rencana Jangka Panjang BSI.
    b. Mempelajari laporan keuangan interim dan tahunan, baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
    c. Mempelajari perubahan angka/nilai signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/Laba.
    d. Mempelajari pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
    e. Mempelajari laporan realisasi rencana kerja dan anggaran, serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan signifikan.
    f. Melakukan pertemuan dengan unit kerja terkait dan auditor eksternal untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi.
    g. Melaporkan hasil pemantauan dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
2. Pengendalian Internal:
    a. Pemantauan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
    b. Memastikan BSI memiliki sistem pengendalian internal yang baku dan sesuai dengan praktik yang berlaku.
    c. Menilai hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal dan Auditor Eksternal.
    d. Memantau dan mengevaluasi tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal dan pihak eksternal lainnya.
    e. Melaporkan hasil pemantauan dan memberi masukan yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Kepatuhan:
    a. Pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan BSI terhadap peraturan di bidang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya.
    b. Mempelajari laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal.
    c. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit dan laporan keuangan dengan standar yang berlaku.
    d. Melaporkan hasil pemantauan dan memberikan masukan yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
4. Audit Internal:
    a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
    b. Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Internal dan temuan signifikan dari hasil pemeriksaan.
    c. Melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Internal untuk membahas temuan audit dan memberi masukan.
    d. Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Internal untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait pelanggaran hukum dan peraturan.
5. Audit Eksternal:
    a. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan BSI kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS.
    b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP, termasuk kesesuaian dengan standar audit, kecukupan waktu pengerjaan, dan pengkajian cakupan jasa.

Adapun, Ketua Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menentukan rencana kerja tahunan.
2. Membuat laporan mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Menunjuk anggota Komite Audit non-Dewan Komisaris atau pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.
4. Menghadiri rapat.
5. Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan rapat komite.

Selain itu, Anggota Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
2. Menghadiri rapat, berperan aktif, dan memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan rapat Komite.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada pembaruan piagam Komite Audit, para anggota Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal berikut:

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Audit:
   Pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk proses pelaporan keuangan.
2. Evaluasi Pengendalian Internal:
   Evaluasi kecukupan pengendalian internal di BSI.

3. Penelaahan Informasi Keuangan:
   Penelaahan terhadap informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh BSI kepada publik dan/atau pihak otoritas, termasuk laporan keuangan dan laporan terkait.
4. Ketaatan Terhadap Peraturan:
   Penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BSI.
5. Pendapat Independen:
   Pemberian pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik.
6. Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik:
   Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
7. Pemeriksaan oleh Auditor Internal:
   Penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
8. Pengaduan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:
   Penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BSI.
9. Potensi Benturan Kepentingan:
   Penelaahan dan pemberian saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan BSI.

Wewenang Komite Audit

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit adalah:
1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di BSI serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa BSI untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Meminta laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor eksternal serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
3. Meminta auditor internal dan/atau auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
5. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan Keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 04/KEP-KOM/002/2024 tentang pedoman dan tata tertib kerja (piagam) Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 1 Juli 2024 yang merupakan pembaruan dari Piagam Komite Audit sebelumnya (Nomor 01/003-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk).

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Isi Piagam Komite Audit, secara umum meliputi:
1. Tujuan umum dibentuknya Komite Audit
2. Kewenangan
3. Keanggotaan
4. Persyaratan Keanggotaan
5. Tugas dan Tanggung Jawab
6. Hubungan Kerja
7. Rapat
8. Pelaporan
9. Masa Tugas dan Kompensasi
10. Kerahasiaan Bank
11. Penutup

Masa Jabatan Komite Audit

Masa Tugas anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Akuntansi, Perbankan
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Public Administration, Keuangan
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ekonomi, Administrasi Bisnis
Komaruddin Hidayat	Anggota	Komisaris Independen	Pendidikan, Filsafat
Felicitas Tallulembang*	Anggota	Komisaris Independen	Manajemen
M. Zacky Thayib**	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi, Manajemen
M. Gunawan Yasni***	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi, Keuangan
Suharto****	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi
Rahmatina Awaliah Kasri*	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi Islam, Keuangan

** Berhenti menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024
*** Berhenti menjabat sejak tanggal 5 Maret 2024
**** Mulai menjabat sejak tanggal 19 Februari 2024
* Mulai menjabat sejak tanggal 31 Mei 2024

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Mohamad Nasir Ketua (Merangkap Anggota) Komite Audit/Komisaris Independen
Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Muliaman D. Hadad Anggota Komite Audit/ Komisaris Utama/Komisaris Independen
Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Adiwarman A. Karim Anggota Komite Audit/Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Komaruddin Hidayat Anggota Komite Audit/Komisaris Independen
Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Felicitas Tallulembang Anggota Komite Audit/Komisaris Independen
Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris



Suharto

Anggota Komite Audit/Pihak Independen

Indramayu, 20 Maret 1966/Usia 58 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

58 Tahun

Berdomisili di Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 04/014/HCP-PKWT tanggal 6 Februari 2024

Riwayat Pendidikan

- D3 Accounting, Universitas Padjadjaran (1988)
- S1 Accounting, STIE Jagakarsa (1996)
- S2 Magister Management In Business, IPB University (2021)

Sertifikasi

- Certification in Audit Committee Practices
- Manajemen Risiko Perbankan Jenjang VI - Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah.
- Manajemen Risiko Perbankan Level IV - Lembaga Sertifikasi Perbankan.
- General Banking Perbankan Umum Level III, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. 2016.
- Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan 65, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). 2016.
- Certified Bank Auditor (CBA), Bank Administration Institute (BAI)
- Certified Fraud Examiners (CFE) - Association Certification Fraud Examiners (ACFE)
- Qualified Internal Auditor (QIA) - Yayasan Pengembangan Internal Auditor (YPIA

Pengalaman Kerja

- Audit Manager Retail Banking Audit, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2020-2022)
- Group Head Internal Audit, PT Bank Syariah Mandiri. (2017-2020)
- Audit Manager Distribution Audit, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2015-2017)
- Audit Manager REB IV Makassar, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2012-2015)
- Departement Head Audit Development, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2010-2012)

Periode dan Masa Menjabat

Periode Pertama: 6 Februari 2024 – 6 Februari 2026

Rangkap Jabatan

-



Rahmatina Awaliah Kasri

Anggota Komite Audit/Pihak Independen

Padang, 12 Mei 1980/Usia 44 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

44 Tahun

Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 04/135/HCP-PKWT tanggal 26 Juni 2024

Riwayat Pendidikan

- Bachelor of Economics, Universitas Indonesia, Indonesia (2002)
- Post Graduate Diploma, Australian National University, Australia (2004)
- Master of International and Development Economics, Australian National University, Australia (2005)
- Master of Business Administration in Islamic Banking and Finance, International Islamic University of Malaysia, Malaysia (2008)
- Doctor of Philosophy in Islamic Economic and Finance, University of Durham, United Kingdom (2015))

Sertifikasi

- Certificate of Workplace Assessor - Financial Sector Indonesian Professional Certification Authority (Badan Nasional Sertifikasi Profesi or BNSP)
- Certificate of Islamic Banking Risk Management - Level 1 Indonesian Professional Certification Authority (Badan Nasional Sertifikasi Profesi or BNSP)
- Certificate of Professional Lecturer – Islamic Economics Ministry of Research, Technology and Higher of Indonesia

Pengalaman Kerja

- Head of Quality Management Unit, Sharia Financial Professional Certification Institute (LSP Keuangan Syariah) (2022 – 2023)
- Director, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2018 – sekarang)
- Director, Islamic Economics Undergraduate Program, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2015 – 2018)
- Senior Researcher, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2008 – sekarang)
- Lecturer/Researcher, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2002 – sekarang)

Periode dan Masa Menjabat

Periode Pertama: 1 Juli 2024 – 30 Juni 2025

Rangkap Jabatan

- Senior Researcher, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2008 – sekarang)
- Lecturer/Researcher, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia (2002 – sekarang)
- Director, Center for Islamic Economics and Business, Faculty of Economics and Business – Universitas Indonesia (2018 – sekarang)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Mohamad Nasir	Ketua (Merangkap Anggota)	• Sarjana Usuludin • Magister Filsafat • Doktor Filsafat	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan
Muliaman D. Hadad	Anggota	• Sarjana Ekonomi • Master of Public Administration • Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Sarjana Ekonomi Agrikultur • Sarjana Ekonomi • Master of Business Administration in General Management • Master of Arts in Economics and Economics Policy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Sarjana Akuntansi • Magister Akuntansi • Doktor Akuntansi	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan perbankan
Felicitas Tallulembang	Anggota	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan
Suharto	Anggota	• Diploma III Akuntansi • Sarjana Akuntansi • Magister Management In Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Rahmatina Awaliah Kasri	Anggota	• Bachelor of Economics • Post Graduate Diploma • Master of International and Development Economics • Master of Business Administration in Islamic Banking and Finance • Doctor of Philosophy in Islamic Economic and Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan

Independensi Komite Audit

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Mohamad Nasir	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	Komaruddin Hidayat	Felicitas Tallulembang	Suharto	Rahmatina Awaliah Kasri
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2024

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Mohamad Nasir	Ketua (Merangkap Anggota)	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Muliaman D. Hadad	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Adiwarman A. Karim	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Komaruddin Hidayat	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Felicitas Tallulembang	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Suharto	Anggota	Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta/Senin, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta/ Senin, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI
		Penyetaraan Sertifikasi BSMR Jenjang VI	Jakarta/ 21 Juni 2024	ASBISINDO
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang VI	Jakarta/ 28 Juni 2024	LSPKS
		Certification in Audit Committee Practices Review Course Batch XLIV.	Jakarta/ 6-8 Agustus 2024	IKAI Indonesian Institute of Audit Committee
Rahmatina Awaliah Kasri	Anggota	Pembekalan untuk Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang IV	Jakarta/11-12 Juli 2024	ASBISINDO
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang IV	Jakarta/5 Agustus 2024	LSPKS
		Certification in Audit Committee Practices Review Course Batch XLIV.	Jakarta/6-8 Agustus 2024	Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)
		Global Reporting Initiative (GRI) Certified Training Course	Jakarta/3-5 September 2024	National Center for Corporate Reporting (NCCR)
		Certification in Global Reporting Initiative (GRI)	Jakarta/15 September 2024	National Center for Corporate Reporting (NCCR)
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember 2024 Tema : Execution Matters	Jakarta/17 Desember 2024	National Center for Corporate Reporting (NCCR)

Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Kebijakan Rapat Komite Audit antara lain:

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau Anggota Komite lainnya yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Rapat dapat dilakukan secara tatap muka maupun melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2024, tanggal pelaksanaan, agenda dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	16 Januari 2024	PwC : Clearance Meeting	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
2.	16 Januari 2024	Laporan Publikasi Triwulan IV tahun 2023	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
3.	18 Januari 2024	Laporan Realisasi Audit bulan Triwulan IV/2023	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
4.	07 Maret 2024	*Update Progress* Perkembangan IT Triwulan IV/2023 (*Reschedule* dari jadwal sebelumnya 29 Februari)	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
5.	07 Maret 2024	Persiapan Operasional & IT terhadap Ramadhan dan Lebaran 2024 (*Reschedule* dari jadwal sebelumnya 29 Februari)	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
6	20 Maret 2024	Pengembangan *Customer Care* 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
7.	25 April 2024	Laporan Publikasi Triwulan I tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
8.	3 Mei 2024	Optimalisasi *Data Analytics* BSI 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • M. Zacky Thayib • M. Gunawan Yasni
9.	31 Mei 2024	Laporan Hasil Audit Triwulan I tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
10.	27 Juni 2024	Progress Implementasi Penanganan Agunan Terintegrasi dan Permasalahan nya	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
11.	25 Juli 2024	Kick Off Meeting dari Kantor Akuntan Publik PriceWaterHouseCoopers (KAP PWC) Perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
12.	15 Agustus 24	Laporan Realisasi RAKB semester I tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
13.	15 Agustus 24	Laporan Realisasi Audit semester I tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
14.	22 Agustus 24	*Clearence Meeting* Audit Laporan Keuangan dan Laporan Publikasi per Juni 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
15.	11 September 24	*Update progress* Perkembangan IT (*Operation*) Semester I 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
16.	19 September 24	Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* posisi Triwulan II	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
17.	17 Oktober 2024	Laporan Realisasi Audit Triwulan III 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
18.	17 Oktober 2024	Laporan Hasil pemeriksaan BPK	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
19.	17 Oktober 2024	*Update progress Combine Assurance* Terhadap Penerapan prinsip 2 Syariah semester I 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
20.	8 November 2024	Permohonan Persetujuan RAKB Tahun 2025	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
21.	21 November 2024	Laporan penerapan Strategi Anti *Fraud* posisi Triwulan III	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri
22.	12 Desember 2024	*Update* Hasil Pemeriksaan BPK: Subsidi Margin KUR, Pembiayaan, Beban Operasional dan Investasi tahun 2024	• Mohamad Nasir • Muliaman D. Hadad • Adiwarman A. Karim • Komaruddin Hidayat • Felicitas Tallulembang • Suharto • Rahmatina Awaliah Kasri

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Mohamad Nasir	Anggota	22	22	100%
Muliaman D. Hadad	Anggota	22	22	100%
Adiwarman A. Karim	Anggota	22	22	100%
Komaruddin Hidayat	Anggota	22	21	95%
Felicitas Tallulembang*	Anggota	14	14	100%
M. Zacky Thayib**	Anggota	3	3	100%
M. Gunawan Yasni**	Anggota	3	3	100%
Suharto***	Anggota	14	14	100%
Rahmatina Awaliah Kasri***	Anggota	14	14	100%

* Mulai menjabat sejak tanggal 31 Mei 2024
** Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Mei 2024
*** Mulai menjabat sejak tanggal 26 Juni 2024

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali sebagaimana tertera pada daftar Rapat Komite Audit dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor;
2. Memberikan Rekomendasi Usulan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024;
3. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Honorarium Jasa Audit Laporan Keuangan BSI Tahun Buku 2024;
4. Memberikan Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris perihal persetujuan Laporan Keuangan Publikasi selama tahun 2024.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris, terutama yang berkaitan dengan kebijakan remunerasi dan nominasi Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi.
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Terkait dengan fungsi nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
   f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisis data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
7. Memiliki data base dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk melakukan survei sesuai kebutuhan Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI No. 01/001-SKB/Dirkom tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia. Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Adapun isi piagam Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain:

a. Latar Belaksang
b. Definisi
c. Tujuan
d. Fungsi, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab
e. Keanggotaan dan Tata Tertib
f. Sistem Nominasi dan Remunerasi
g. Penutup

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Komaruddin Hidayat	Ketua (merangkap Anggota)	Komisaris Independen	Pendidikan, Filsafat
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Public Administration, Keuangan
Adiwarman A. Karim	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Administrasi Bisnis
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Akuntansi, Perbankan
Felicitas Tallulembang	Anggota	Komisaris Independen	Manajemen
Masduki Baldlowi	Anggota	Komisaris	Hukum, Keuangan
Teszy Mira Ekakusma	Sekretaris dan *Non Member Voting*	Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group	Psikologi, Sumber Daya Manusia

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Komaruddin Hidayat
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Muliaman D. Hadad
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Adiwarman A. Karim
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Mohamad Nasir
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Felicitas Tallulembang
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Masduki Baldlowi
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris



Teszy Mira Ekakusma

Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi

Jakarta, 7 Agustus 1979

Warga Negara Indonesia

45 Tahun

Berdomisili Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

SK No. 04/426-KEP/DIR tanggal 17 September 2024

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Psikologi, Universitas Padjadjaran Bandung (2002)
- Magister Ilmu Psikologi, Universitas Indonesia (2004)

Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 4

Pengalaman Kerja

- Human Capital Strategy & Policy Group Head, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024)
- Human Capital Services Group Head, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023-2024)
- Human Capital Strategy & Policy Group Head, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-2023)
- DH Talent Analytics, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022)
- HCBP Head Retail Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019)
- HCBP Head Consumer Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
- HCBP Head Transaction Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015)
- SR PS HCBP Micro & Retail Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2014)
- PS HCBP, Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007-2012)
- Cash Outlet Manager, Banjarmasin Pelindo Trisakti, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007)
- Business Development Offier, Regional IX Banjarmasin, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006-2007)
- Temporary Assignment Officer, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006)
- Officer Development Program, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2004-2006)

Periode dan Masa Menjabat

Sesuai masa jabatan sebagai Human Capital Strategy & Policy Group Head

Rangkap Jabatan

Tidak ada

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Komaruddin Hidayat	Ketua (merangkap Anggota)	• Sarjana Ushuluddin • Magister Filsafat • Doktor Filsafat • Post-Doctorate Research Program	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan perbankan
Muliaman D. Hadad	Anggota	• Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan • Master of Public Administration • Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Insinyur Ekonomi • Sarjana Ekonomi • Master Administrasi Bisnis • Master Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Mohamad Nasir	Anggota	• Sarjana Akuntansi • Magister Sains in Accounting • Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan
Felicitas Tallulembang	Anggota	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan
Masduki Baldlowi	Anggota	• Sarjana Muda Sastra Arab • Sarjana Bidang Pendidikan	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan dan perbankan
Teszy Mira Ekakusma	Sekretaris	• Sarjana Psikologi • Magister Ilmu Psikologi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	Komaruddin Hidayat	Muliaman D. Hadad	Adiwarman A. Karim	Mohamad Nasir	Felicitas Tallulembang	Masduki Baldlowi	Teszy Mira Ekakusma
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Program Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Komaruddin Hidayat	Ketua (merangkap Anggota)	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Muliaman D. Hadad	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Adiwarman A. Karim	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Mohamad Nasir	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Felicitas Tallulembang	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Masduki Baldlowi	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Teszy Mira Ekakusma	Sekretaris	Mini Workshop:OKR HC Team 2024	Jakarta, 8 Januari 2024	BSI
		SEMINAR PERSONAL COLOUR AND STYLE	Jakarta, 3 Juni 2024	BSI
		PERSONAL COLOUR & STYLE ANALYSIS BATCH 1	Jakarta, 4 Juni 2024	BSI
		CEO MENYAPA HUMAN CAPITAL	Jakarta, 29 Juli 2024	BSI
		Refreshment Manajemen Risiko	Online, 21 Februari 2024	Maisa Edukasi
		TOP EXECUTIVE LEARNING PROGRAM SERIES 2	Jakarta, 26 Februari 2024	BSI
		KNOWLEDGE SHARING FORUM (KSF) "Sharping Your Branding in Sharia Banking Leadership"	Jakarta, 14 Maret 2024	BSI
		Manajemen Risiko Jenjang 4,11 -12 juli	Online, 11 – 12 Juli 2024	ASBISINDO
		KSF BEST PRACTICE HUMAN CAPITAL	Jakarta, 26 November 2024	BSI
		Top Executive Learning Program Desember 2024	Jakarta, 17 Desember 2024	BSI
		Sertifikasi Profesi SDM	Online, 27 Maret – 2 April 2024	PT QUBISA
		Refreshment PHR Consumer Product	Online, 27 September – 31 Desember 2024	BSI
		Refreshment BYOND by BSI Vol.1	Online, 15 Oktober – 31 Desember 2024	BSI

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

1. Rapat dihadiri oleh semua anggota dan bila perlu hanya dapat dihadiri oleh anggota dengan hak suara (voting member).
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pejabat Human Capital.
3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai kebutuhan dan penugasan dari Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila ketua berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Hasil atau keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
7. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	22 Februari 2024	Usulan Kandidat Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI tahun 2024	Komaruddin Hidayat Muliaman D. Hadad Adiwarman A. Karim Mohamad Nasir Teszy Mira Ekakusma
2	25 Maret 2024	Usulan Remunerasi Pengurus 2024 dan Tantiem Kinerja 2023	Komaruddin Hidayat Muliaman D. Hadad Adiwarman A. Karim Mohamad Nasir Masduki Teszy Mira Ekakusma

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Komaruddin Hidayat	Ketua (merangkap Anggota)	2	2	100%
Muliaman D. Hadad	Anggota	2	2	100%
Adiwarman A. Karim	Anggota	2	2	100%
Mohamad Nasir	Anggota	2	2	100%
Masduki Baldlowi	Anggota	2	1	50%
Teszy Mira Ekakusma	Sekretaris	1	1	100

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Usulan Remunerasi Pengurus 2024 dan Tantiem Kinerja 2023;
2. Usulan Kandidat Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI tahun 2024;
3. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan

Kebijakan Suksesi Direksi

Prinsip Dasar

1. Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Pasar Modal serta ketentuan lainnya.
2. Pencalonan dan Pengajuan Calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengen memperhatikan persyaratan tersebut di atas.

Prosedur Seleksi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
2. Dewan Komisaris menyampaikan atas dasar saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

Persyaratan dan Kriteria.

Persyaratan dan kriteria calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris dan Direksi.
   a. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
   b. Persyaratan integritas bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi:
      - memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku;
      - memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
      - tidak tercantum dalam DTL (Daftar Tidak Lulus); dan
      - memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi sebagaimana dimaksud PBI No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 huruf b,Pasal 41 ayat (4) huruf a dan Pasal 41 ayat (5).
   c. Persyaratan kompetensi, meliputi:
      - bagi calon anggota Dewan Komisaris meliputi antara lain:
        1) memiliki pengetahuan, pemahaman dan/atau pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
        2) memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan prinsip kehati- hatian dan Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah; dan
        3) memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan manajemen risiko.
      - bagi calon anggota Direksi meliputi antara lain:
        1) memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup;
        2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan syariah, bidang keuangan atau keuangan syariah;
           Pemenuhan persyaratan pengalaman dan keahlian bagi calon Direksi, mencakup pula pemenuhan persyaratan bahwa mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS.memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis datam rangka pengembangan Bank yang sehat dan tangguh; dan
        3) memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko.

d. Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi, meliputi:
   - tidak memiliki kredit/pembiayaan macet; dan
   - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

e. Calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi tidak memiliki indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi Keuangan yang meliputi:
   - tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:
     1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuanatau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
     2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank Syariah;
     3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat; dan/atau
     4) melanggar Prinsip Syariah di bidang perbankan syariah;
   - terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap; terbukti menyebabkan Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan;
   - terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
   - terbukti memiliki kredit/pembiayaan macet;
   - terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
   - tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Syariah yang sehat;
   - terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pemerintah; atau

- tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau tindakan sebagaimana dimaksud pada butir (1), butir (3) dan/atau butir (4) di atas.

2. Dewan Pengawas Syariah
   Calon anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. integritas, yang paling kurang mencakup:
      - memiliki akhlak dan moral yang baik;
      - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
      - memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (sustainabie)', dan
      - tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper tesi) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidangperbankan dan/atau keuangan secara umum; dan

   b. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
      - tidak termasuk dalam danar kredit/pembiayaan macet; dan
      - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

3. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
   Dalam memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan atau Komite Pemantau Risiko, Komite wajib memperhatikan visi dan misi Bank, prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.
4. Komite menyampaikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris secara tertulis untuk disampaikan kepada RUPS paiing lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan RUPS.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024 tentang pedoman dan tata tertib kerja (piagam) komite pemantau risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 1 Juli 2024. Pada Piagam tersebut, terncantum tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit atas:
   a. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   b. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
   c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
   d. Kepatuhan Bank terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
2. Melakukan pemantauan dan penelaahan paling sedikit atas:
   a. Laporan Profil Risiko.
   b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
   c. Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu:
      - Risiko Kredit
      - Risiko Pasar
      - Risiko Operasional
      - Risiko Likuiditas
      - Risiko Hukum
      - Risiko Kepatuhan
      - Risiko Reputasi
      - Risiko Stratejik
      - Risiko Imbal Hasil
      - Risiko Investasi

   d. Kebijakan Pembiayaan Bank dan kebijakan lainnya yang diwajibkan Regulator untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris oleh Direksi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit atas:
   a. Hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank.
   b. Kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa Bank telah mengelola risiko secara memadai.
   c. Pelaksanaan rencana kerja dan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
4. Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit-unit kerja terkait guna membahas hal-hal yang berada dalam lingkup pengawasannya.

5. Melaporkan hasil pemantauan dan penelaahan secara berkala, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
6. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dan melakukan reviu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Ketua Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya. Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk hal- hal sebagai berikut:

1. Menentukan rencana kerja tahunan.
2. Menyusun laporan kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Menunjuk anggota komite pemantau risiko non komisaris atau pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris komite untuk membantu kegiatan komite termasuk terkait rapat komite dan penyusunan risalah rapat komite.
4. Menghadiri rapat.
5. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Rapat Komite.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
2. Mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Memperoleh Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, *Risk Appetite Statement*, dan Laporan lainnya terkait penerapan manajemen risiko Bank.
4. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024 tentang pedoman dan tata tertib kerja (piagam) komite pemantau risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 1 Juli 2024 yang merupakan pembaruan dari Piagam Komite Pemantau Risiko sebelumnya.

Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur sejumlah hal yang meliputi:

1. Latar Belakang
2. Pemantau Risiko
3. Definisi, Visi dan Misi, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Struktur Keanggotaan
5. Kerahasiaan
6. Imbal Jasa Anggota Komite
7. Rapat Komite
8. Perubahan
9. Penutup

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa tugas dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya. Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Adiwarman A. Karim	Ketua (Merangkap Anggota)	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Administrasi Bisnis
Muliaman D. Hadad	Anggota	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Ekonomi, Public Administration, Keuangan
Mohamad Nasir	Anggota	Komisaris Independen	Akuntansi, Perbankan
Komaruddin Hidayat	Anggota	Komisaris Independen	Pendidikan, Filsafat
Felicitas Tallulembang	Anggota	Komisaris Independen	Manajemen

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Suyanto	Anggota	Komisaris	Perbankan Syariah, Keuangan
Abu Rokhmad	Anggota	Komisaris	Hukum, Perbankan Syariah
Fauzi	Anggota	Komisaris	Manajemen, Perbankan
Nazaruddin	Anggota	Komisaris	Manajemen
Bowo Setiyono	Anggota	Pihak Independen	Ekonomi, Perbankan dan Finance
Noor Anis	Anggota	Pihak Independen	Matematika, Perbankan

Profil Komite Pemantau Risiko

Adiwarman A. Karim
Ketua (Merangkap Anggota) Komite Pemantau Risiko/Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Muliaman D. Hadad
Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris Utama/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Mohamad Nasir
Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Komaruddin Hidayat
Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Felicitas Tallulembang
Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Suyanto
Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Abu Rokhmad
Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Fauzi
Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris

Nazaruddin
Anggota Komite Pemantau Risiko/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode dan Masa Jabatan: Mengikuti Periode Jabatan Dewan Komisaris



Bowo Setiyono

Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen

Purworejo, 5 November 1975/Usia 49 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

49 Tahun

Berdomisili di Yogyakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 04/016/HCP-PKWT tanggal 1 Februari 2024

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (1999)
- Master of Commerce, Banking and Finance University of New South Wales, Sydney, Australia (2004)
- PhD degree Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economiques (LAPE), Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Université de Limoges (2015)

Sertifikasi

- Certified Risk Professional (CRP)
- Certified Financial Planner (CFP)
- Bank Risk Management 5 (LSP-KS)
- General Banking (LSPP)
- Certificate-International Risk Management & Wealth Management Refreshment Program for Executives

Pengalaman Kerja

- Komite Pemantau Risiko PT BRI Syariah Tbk (Desember 2019 – Januari 2021)
- Deputi Direktur MBA FEB UGM (Januari 2016 – Saat ini)
- Dosen Tetap FEB UGM (Januari 2005 – Saat ini)

Periode dan Masa Menjabat

Periode Pertama: 01 Februari 2024 – 31 Desember 2024

Rangkap Jabatan

- Deputi Direktur MBA FEB UGM (Januari 2016 – Saat ini)
- Dosen Tetap FEB UGM (Januari 2005 – Saat ini)



Noor Anis

Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen

Kudus, 11 Agustus 1964/usia 60 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

60 Tahun

Berdomisili di Depok, Jawa Barat, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 04/013/HCP-PKWT tanggal 6 Februari 2024

Riwayat Pendidikan

- Sarjana S-1 Matematika-Statistika Institut Teknologi Bandung (ITB) (1989)

Sertifikasi

- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Jenjang VI
- Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS),

Pengalaman Kerja

- Program Development Manager PT Prastika Praveena Bina Mandiri (2022-2023)
- Group Head Strategy & Performance Management Group PT Bank Syariah Mandiri (2015-2021)
- Department Head Decision Support Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2015)

Periode dan Masa Menjabat

Periode Pertama: 06 Februari 2024 – 05 Februari 2026

Rangkap Jabatan

-

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Adiwarman A. Karim	Ketua (Merangkap Anggota)	• Insinyur Ekonomi • Sarjana Ekonomi • Master Administrasi Bisnis • Master Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Muliaman D. Hadad	Anggota	• Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan • Master of Public Administration • Doctor of Philosophy	Memiliki pengalaman kerja di bidang sektor keuangan dan perbankan
Mohamad Nasir	Anggota	• Sarjana Akuntansi • Magister Sains in Accounting • Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan, pendidikan dan perbankan

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Sarjana Ushuluddin • Magister Filsafat • Doktor Filsafat • Post-Doctorate Research Program	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan dan perbankan
Felicitas Tallulembang	Anggota	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang kesehatan
Suyanto	Anggota	Sarjana Kedokteran	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan
Abu Rokhmad	Anggota	• Sarjana Syari'ah/Hukum Perdata Islam • Magister Agama • Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan
Fauzi	Anggota	Sarjana Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Nazaruddin	Anggota	Sarjana Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan
Bowo Setiyono	Anggota	• Sarjana Ekonom • Master of Commerce, Banking and Finance • PhD degree Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economiques (LAPE)	Memiliki pengalaman kerja di bidang pendidikan
Noor Anis	Anggota	Sarjana Matematika-Statistika	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Adiwarman A. Karim	Muliaman D. Hadad	Mohamad Nasir	Komaruddin Hidayat	Felicitas Tallulembang	Suyanto	Abu Rokhmad	Fauzi	Nazar uddin	Bowo Setiyono	Noor Anis
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Adiwarman A. Karim	Ketua (Merangkap Anggota)	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Muliaman D. Hadad	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Mohamad Nasir	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Komaruddin Hidayat	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Felicitas Tallulembang	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Suyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Abu Rokhmad	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Fauzi	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Nazaruddin	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian pendidikan dan/atau pelatihan Anggota Dewan Komisaris		
Bowo Setiyono	Anggota	Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI
		Penyetaraan Sertifikasi BSMR Jenjang V	Jakarta, 10-11 Juli 2024	ASBISINDO
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang V	Jakarta, 31 Juli 2024	LSPKS
		Webinar “EV Insurance, International Best Practice for Innovation of New Energy Products and Services	Jakarta, 31 Oktober 2024	OJK Institute
		Webinar “The Future of Data Analytics in the Financial Industry: Trends and Innovations”	Jakarta, 12 September 2024	OJK Institute
		the 10th Indonesian Finance Association (IFA) Conference on “Sustainable Finance and its Roles in Shaping Emerging Capital Markets”	Jakarta, 10 Oktober 2024	IFA, OJK, KSEI, IDX
		Webinar “How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector”	Jakarta, 2 Mei 2024	OJK Institute
		Webinar “Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia”	Jakarta, 25 April 2024	OJK Institute
		Webinar “Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah”	Jakarta, 21 Maret 2024	OJK Institute
		Webinar “Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia”	Jakarta, 14 Maret 2024	OJK Institute
		Webinar “Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector”	Jakarta, 07 Maret 2024	OJK Institute
		Diseminasi Riset “The Greenwashing Trap: How to Build Public Awareness”	Jakarta, 05 Desember 2024	OJK Institute & UN - Environment Programme
		Top Executive Learning Program (TELP) - Desember 2024 Tema : Execution Matters Pembicara : Bpk Zulkifli Zaini (Komisaris PTPN III)	Jakarta, 17 Desember 2024	Bank Syariah Indonesia University

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Noor Anis	Anggota	Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2024 Tema : Leadership Transformation	Jakarta, 26 Februari 2024	Bank Syariah Indonesia University
		One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris PT Bank Syariah Indonesia, Tbk	Jakarta, 4 Maret 2024	Bank Syariah Indonesia University dan IBI
		Penyetaraan Sertifikasi BSMR Jenjang V	Jakarta, 10-11 Juli 2024	ASBISINDO
		Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang V	Jakarta, 31 Juli 2024	LSPKS
		Webinar "The Future of Data Analytics in the Financial Industry: Trends and Innovations"	Jakarta, 12 September 2024	OJK Institute
		Bedah Buku - Keamanan Siber Bank	Jakarta, 7 November 2024	OJK Institute
		Seminar - Financial Services Technical Update : PMK 74/2024 - Cadangan Piutang Tak Tertagih - Diskusi Dampak terhadap Usaha Perbankan dan Multi Finance	Jakarta, 12 November 2024	PwC Indonesia
		Seminar - Transformasi Anti Fraud di Era Digital : Integrasi Teknologi AI dan Kepatuhan POJK 12/2024 dan 15/2024 bagi Lembaga Keuangan	Jakarta, 26 November 2024	PwC Indonesia

Rapat Komite Pemantau Risiko

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/KEP-KOM/001/2024, berikut ini kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko, antara lain:

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen Non Komisaris.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota yang ditunjuk, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
6. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	26 Januari 2024	Evaluasi Laporan Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Tahun 2023 dan Rencana Program SDM 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
2	21 Februari 2024	Laporan APU PPT Tahun 2023	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
3	21 Februari 2024	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Triwulan IV/2023	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
4	21 Februari 2024	Usulan Threshold (Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris)	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
5	29 Februari 2024	Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2023	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
6	20 Maret 2024	Progres Pemenuhan & Pengembangan Islamic Ecosystem 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
7	25 April 2024	*Update* Penyusunan dan/atau Revisi Kebijakan, Prosedur atau Update Metoda Pengukuran & Mitigasi Risiko (Per Maret 2024)	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
8	3 Mei 2024	*Update* Regulasi atau Revisi Kebijakan dan Prosedur (Per Maret 2024)	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
9	30 Mei 2024	Laporan APU PPT Triwulan I Tahun 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
10	30 Mei 2024	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Triwulan I Tahun 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
11	13 Juni 2024	*Update* Perkambangan Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen *Wholesale* 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
12	27 Juni 2024	Laporan Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Triwulan I/2024 dan Progress Implementasi *One Culture*	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
13	11 Juli 2024	*Market & Research Updates*	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
14	25 Juli 2024	Strategi Pertumbuhan Retail dan Pengendalian FAR	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
15	15 Agustus 2024	Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I tahun 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
16	11 September 2024	Laporan APU PPT semester I tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan) Semester I tahun 2024 (*Reschedule* 22 Agustus)	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
17	19 September 2024	Evaluasi Kinerja Model Bisnis dan Strategi Peningkatan FBI	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
18	26 September 2024	Pendalaman Penanganan *High Risk Account* segmen *Wholesale*, Oto dan Griya	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
19	17 Oktober 2024	Evaluasi Kinerja Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
20	30 Oktober 2024	Persetujuan *Recovery Plan & Resolution Plan* 2024	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
21	8 November 2024	Evaluasi Kinerja *Marketing Communication*	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
22	21 November 2024	Evaluasi dan Strategi Jaringan 2024 - 2025	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
23	12 Desember 2024	Strategi Pengembangan SDM untuk mendukung RBB 2025-2027	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis
24	12 Desember 2024	*Update* Regulasi/Revisi Kebijakan dan Prosedur (Per Desember 2024) - POJK No. 17, Bullion Bank, POJK No. 15, IcoFR, Hapus tagih.	1. Muliaman Dharmansyah Hadad 2. Adiwarman Azwar Karim 3. Suyanto 4. Abu Rokhmad 5. Imam Budi Sarjito 6. Sutanto 7. Komaruddin Hidayat 8. Mohamad Nasir 9. Bowo Setiyono 10. Noor Anis

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Muliaman Dharmansyah Hadad	Ketua	24	24	100%
Adiwarman Azwar Karim	Anggota	24	24	100%
Suyanto	Anggota	24	24	100%
Abu Rokhmad	Anggota	24	21	88%
Imam Budi Sarjito*	Anggota	8	8	100%
Sutanto*	Anggota	8	8	100%
Komaruddin Hidayat	Anggota	24	24	100%
Mohamad Nasir	Anggota	24	24	100%
Felicitas Tallulembang**	Anggota	15	15	100%
Bowo Setiyono	Anggota	24	24	100%
Noor Anis	Anggota	24	23	96%

* Berhenti menjabat sejak tanggal 31 Mei 2024
*** Mulai menjabat sejak tanggal 31 Mei 2024

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
3. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran;
4. Mengawasi dan mengevaluasi Hasil Laporan Pelaksanaan Kepatuhan, antara lain:
   a. Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan/Laporan Kepatuhan,
   b. Laporan Kepatuhan Terintegrasi & Laporan Tata Kelola Terintegrasi,
   c. Laporan Anti Pencucian uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
5. Mengawasi dan mengevaluasi Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Mengawasi pelaporan *Recovery & Resolution Plan*
7. Mengawasi risiko atas usulan aksi korporasi atau tindakan lainnya seperti usulan *Threshold* (Batas Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris).

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

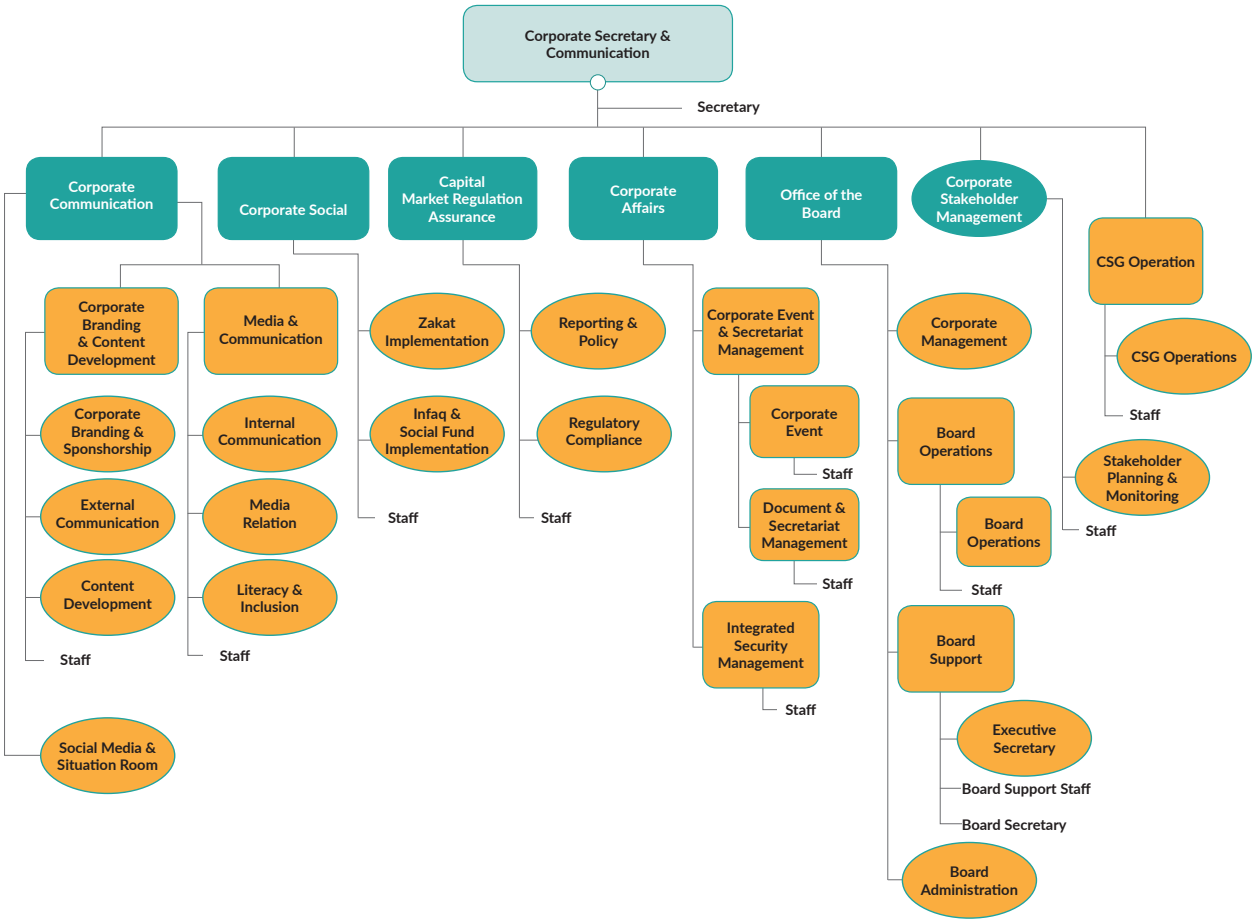
Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Peran tersebut terutama bertujuan menciptakan komunikasi yang baik, serta menjaga persepsi terhadap citra BSI. Karena itu, Bank telah membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang merupakan mandat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Mengacu pada regulasi tersebut, fungsi utamanya antara lain memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal serta menjadi penghubung Bank dengan pemangku kepentingan.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Compliance & Human Capital. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, organisasi Sekretaris Perusahaan terbagi ke dalam 6 (enam) bidang aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas Pengurus Bank.

Untuk menjalankan aktivitas tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki beberapa departemen di bawahnya. Sekretaris Perusahaan tetap melakukan koordinasi dan supervisi langsung terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen.



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur Corporate Secretary. Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yaitu:

1. Tata Kelola Kepatuhan
    a. Menjadi *host* penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
    b. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan DPS serta jajaran yang mendukung di bawahnya.
    c. Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, serta peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
    d. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
    e. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku, antara lain tentang Perseroan, surat berharga syariah, saham perbankan syariah, pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.
    f. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan dan pasar modal.
        - Menyampaikan laporan-laporan kepada regulator maupun publik baik berupa laporan berkala maupun insidentil.
        - Mengawal korespondensi Bank dengan cara memberikan *advice* kebahasaan/reviu terhadap dokumen korporat Bank.
        - Mengelola dokumen, khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan pusat arsip.
        - Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dokumen kantor pusat, regional *office*, area/*branch office* ataupun *outlet* lainnya serta memberikan *advice* terkait pengelolaan dokumen dimaksud.
2. Tata Kelola Komunikasi Korporat
    a. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Bank.
    b. Membuat strategi penyebaran informasi kepada *stakeholders* internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan.
    c. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat.
    d. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun isu-isu industri syariah secara umum.
    e. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media marketing yang efektif dan tepat sasaran.
    f. Mengelola *stakeholders* dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik.
    g. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif.
    h. Melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.
3. *Corporate Branding* dan *Sustainable Finance*
    a. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standardisasi dalam implementasi *Corporate Identity Bank*.
    b. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan.
    c. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh organisasi di Bank.
    d. Menyusun *monitoring* dan reviu pelaksanaan program keuangan berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
    e. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan *awareness* dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dan lainnya.
    f. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap sejalan dengan program *Corporate Planning Bank* sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
    g. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis.
    h. Mengelola proses dan kinerja *corporate branding* dan RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif stakeholders dan shareholders untuk peningkatan *brand equity*, serta berkontribusi terhadap peningkatan *awareness* dan bisnis Bank.

Profil Sekretaris Perusahaan



Wisnu Sunandar

Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 1 Oktober 1978, usia 46 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

46 Tahun

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

SK No. 04/112-KEP/DIR
tanggal 20 Maret 2024

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik, Universitas Indonesia (1997-2003).
- Magister Manajemen, Prasetiya Mulya Business School (2012-2014).

Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 4

Pengalaman Kerja

- Regional CEO I Aceh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021-2024)
- Regional CEO II Medan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (2021)
- Regional CEO I Medan PT. Bank Syariah Mandiri (2020-2021)
- Regional CEO VII Banjarmasin PT Bank Syariah Mandiri (2018-2020)
- Area Manager Area Medan Ahmad Yani PT Bank Syariah Mandiri (2015-2018)
- Deputy Group Head Consumer Finance Group PT Bank Syariah Mandiri (2015)

Rangkap Jabatan

-

Hubungan Afiliasi

-

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Top Executive Learning Program Series 2	Jakarta, 26 Februari 2024	Internal Bank
Knowledge Sharing Forum (KSF) "Sharping Your Branding In Sharia Banking Leadership"	Jakarta, 14 Maret 2024	Internal Bank
Workshop Penyusunan Kertas Kerja Standarisasi Branding BSI	Jakarta, 26 Maret 2024	Internal Bank
Personal Colour & Style Analysis	Jakarta, 4 Juni 2024	Internal Bank
Innovation Vol 2 Innovate or Evaporate	Jakarta, 25 Juli 2024	Internal Bank
Webinar Series 2 BYOND by BSI Update	Jakarta, 14 November 2024	Internal Bank
Top Executive Learning Program Series 3	Jakarta, 17 Desember 2024	Internal Bank

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Sepanjang tahun buku 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugas, yang rinciannya berikut ini:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri serta membuat risalah rapat Direksi termasuk rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyiapkan informasi daftar pemegang saham, daftar khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Menjalankan fungsi kepatuhan Bank terhadap pasar modal.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dokumentasi data legalitas Bank, antara lain akta RUPS, akta Perubahan Anggaran Dasar, akta Perubahan Susunan Pengurus, tanda domisili perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
7. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada BSI atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
8. Menyelenggarakan *corporate event* dan/atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship*.
9. Menyelenggarakan *event* dengan media.
10. Menerbitkan siaran pers.
11. Menggelar kegiatan edukasi, literasi dan inklusi keuangan syariah.
12. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK. *Sustainable finance* terkait bisnis, yang mencakup: *product and services*, *governance*, dan *capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program pemerintah).

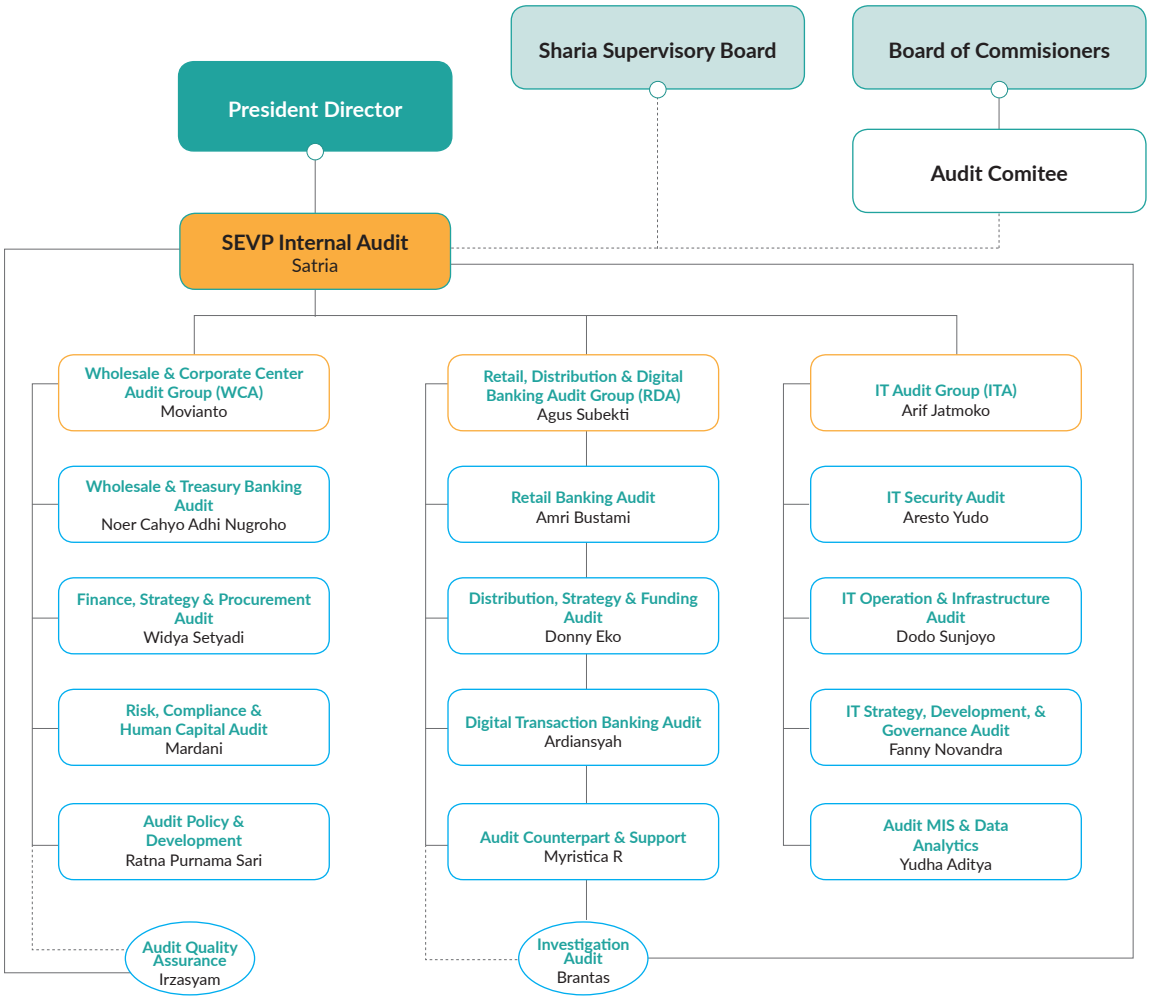
Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melaksanakan fungsi Audit Internal melalui aktivitas *assurance* dan *consulting* yang bersifat independen dan dilakukan secara obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah dan rekomendasi perbaikan untuk operasional Bank melalui pendekatan yang sistematis berdasarkan risiko dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja serta kecukupan dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan proses tata Kelola Bank.

Struktur Organisasi Internal Audit

Struktur dan kedudukan Internal Audit dalam Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh *Senior Executive Vice President* (SEVP) Internal Audit yang membawahi 3 (tiga) grup dan 2 (dua) Department dengan spesialisasi tugas pada:

1. Wholesale & Corporate Center Audit
   a. Wholesale & Treasury Banking Audit
   b. Finance, Strategy & Procurement Audit
   c. Risk, Compliance & Human Capital Audit
   d. Audit Policy & Development Audit
2. Retail, Distribution & Digital Banking Audit
   a. Retail Banking Audit
   b. Distribution, Strategy & Funding Audit
   c. Digital Transaction Banking Audit
   d. Audit Counterpart & Support
3. IT Audit
   a. IT Strategy, Development & Governance Audit
   b. IT Operation & Infrastructure Audit
   c. IT Security Audit
   d. Audit MIS & Data Analytics
4. Investigation Audit Department
5. Audit Quality Assurance



Kedudukan Internal Audit Dalam Struktur Organisasi

Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Induk.

Profil Kepala Internal Audit



Satria

SEVP Internal Audit

Menggala, 25 September 1967/usia 57 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

57 Tahun

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Nomor: 03/153-KEP/DIR
tanggal 28 April 2023

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Universitas Bandar Lampung (1990)
- Magister Management Universitas Bandar Lampung (2008)

Sertifikasi

- Certified Internal Audit Executive
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 7

Pengalaman Kerja

- SEVP Internal Audit BSI (2023 - sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2025)
- Dana Pensiun Bank Mandiri Empat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Chief Retail Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2021)
- Group Head / Senior Vice President Cash & Trade Operations Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016)
- Regional CEO Sulawesi Maluku (8 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015)
- Regional CEO Sumatera II (6 Provinsi) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013)
- Deputy Regional Manager Kanwil XII Jayapura (Papua & Papua Barat) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011)
- Area Manager Makasar (Sulawesi Selatan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011)
- Area Manager Samarinda (Kalimantan Timur) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010)
- Area Manager Jakarta Fatmawati (Jakarta Selatan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009)
- Area Manager Lampung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2007)
- City Operation Manager Palembang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006)
- Dept Head COS City Operation Palembang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005)
- Operation Manager HUB Denpasar (Bali, NTB & NTT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2002)
- Kepala Cabang Tjk Bambu Kuning Bandar Lampung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2000)
- Kepala Cabang Panjang Bandar Lampung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1999)

Pelatihan yang diikuti pada tahun 2024

- Workshop Digital Transaction Banking
- Top Executive Learning

Program Peningkatan Kompetensi Internal Audit

No	Jenis Pelatihan
1	Pengadaan Konstruksi
2	Transaksi Valuta Asing untuk RM Wholesale
3	KSF Standarisasi Pengadaan dan Vendor Management serta Penyusunan HPS
4	Seminar Anti Fraud
5	Bank Mandiri Audit Course (BMAC)
6	Konferensi Auditor Internal YPIA
7	Pelatihan Transaksi Valuta Asing Untuk RM Wholesale
8	Training PPT
9	Konferensi Auditor Internal IIA
10	Fundamentals of Cybersecurity Auditing
11	Asian Conference IIA Bali
12	*Workshop Analysist and Reporting with Excel Dashboard*
13	*Cyber Risk Management*
14	Penanganan Kejahatan Perbankan Dengan berlakunya UU P2SK & POJK 16 tahun 2023.
15	Pelatihan Tingkat Maturitas Digital Bank
16	Mastering ITIL v4 Fundamental
17	Devops Foundation
18	*Training Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR)

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Internal Audit *Charter*

Bank memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. Piagam Audit Intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:

1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan Manajemen.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ditinjau ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun yang mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan penetapan dari Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam menjalankan tugasnya Internal Audit mengacu pada Piagam Audit Intern yang telah disahkan pada tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama. Adapun isi dari Piagam Audit Intern yaitu:

1. Visi, Misi dan Fungsi Internal Audit
2. Kedudukan dalam Organisasi
3. Ruang Lingkup Aktivitas Audit Intern
4. Kewenangan, Tanggung Jawab dan Hubungan serta Komunikasi Audit Intern dengan Unit Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian
5. Kode Etik dan Profesi
6. Persyaratan Auditor Internal
7. Pembatasan dalam Penugasan
8. Lain-lain

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*).
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan Eksternal Audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.
7. SKAI wajib melakukan komunikasi dengan regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
8. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.

Kewenangan Internal Audit

SKAI memiliki kewenangan yaitu:

1. Melakukan aktivitas audit intern terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.

4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personal, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak ekstern atau non-Audit Intern dalam pelaksanaan audit, baik lingkup Bank maupun di luar Bank, apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan aktivitas audit intern seusai Kode Etik Audit Intern.
10. Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan/atau teknik audit lainnya kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (dikecualikan rapat pembahasan persetujuan pembiayaan) tanpa mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
12. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari Entitas Utama bagi Konglomerasi Keuangan.

Komposisi Personil Internal Audit

Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, SKAI memiliki 107 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	SEVP Internal Audit	1
2	Group Head	3
3	Department Head	15
4	Auditor	83
5	Staff	5
Total		**107**

Sertifikasi Profesi Personil

Pengembangan kompetensi Auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit baik untuk Level Nasional maupun Level Internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi Level Nasional dan Level Internasional sampai periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
SEVP	1	Level 5
Group Head	3	Level 1
	3	Level 2
	3	Level 3
	2	Level 4
	1	Level 5
Department Head	13	Level 1
	13	Level 2
	13	Level 3
	1	Level 4
Team Leader	39	Level 1
	39	Level 2
	1	Level 3
Officer	46	Level 1
	30	Level 2
Staff	1	Level 1

2. *Certified* Fraud *Examiner* (CFE)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Department Head	1	CFE

3. *Certified Risk Professional* (CRP)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CRP

4. *Certified Information System Auditor* (CISA)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CISA
Department Head	2	CISA

5. *Certified Information System Security Professional* (CISSP)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CISSP

6. *Encase Certified Examiner* (EnCE)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	EnCE

7. *Computer Hacking Forensic* (CHFI)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CHFI

8. *Ceritified Qualified Internal Auditor* (QIA)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	QIA
Team Leader	4	QIA
Officer	5	QIA

9. *Control Objective for Information Technologies* (COBIT)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	COBIT
Department Head	2	COBIT

10. *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	ITIL
Team Leader	1	ITIL

11. *Certified Bank Internal Auditor* (CBIA) Level *Supervisor*

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	Level Supervisor
Department Head	12	Level Supervisor
Team Leader	37	Level Supervisor

12. *Certified Bank Internal Auditor* (CBIA) Level *Auditor*

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	Level Auditor
Department Head	13	Level Auditor
Team Leader	39	Level Auditor
Officer	45	Level Auditor
Staf	1	Level Auditor

13. *Certified Internal Audit Executive* (CIAE)

Jabatan	Jumlah	Lembaga Sertifikasi
SEVP	1	BPKP
Group Head	2	BPKP

14. Certified Ethical Hacker (CEH)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CEH

15. Certified E- Business Proffesional (CEP)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CEP

16. Certified in The Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Team Leader	1	CGEIT

17. Sertifikasi ISO

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Department Head	2	ISO 27001, ISO 22301
Team Leader	1	ISO 27001, ISO 9001

18. Sertifikasi Cyber Security (CC)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Department Head	1	CC

Kode Etik Auditor

1. Integritas
   Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukannya.
   Aturan perilaku
   a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab.
   b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundangundangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesinya.
   c. Tidak secara sadar/sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit internal atau reputasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   d. Mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.
2. Objektivitas
   Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkatan tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang ditinjau. Auditor Internal melakukan penilaian secara berimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.
   Aturan Perilaku:
   a. Tidak diperkenankan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau hubungan apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal secara proporsional. Termasuk dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
   b. Dilarang menerima apa pun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
   c. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan yang ditinjau.
3. Kerahasiaan
   Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan secara hukum atau profesi.

Aturan Perilaku:

a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
b. Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apa pun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

4. Kompetensi

Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit internal.

Aturan Perilaku:

a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman sesuai dengan yang dimilikinya.
b. Melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
c. Senantiasa meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2024

Berdasarkan *Annual Audit Plan* (AAP) dan Strategi Audit Tahun 2024 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, rencana audit tahun 2024 ditetapkan sebanyak 33 penugasan. Realisasi pelaksanaan kegiatan audit tahun 2024 hingga 31 Desember 2024 sebanyak 59 penugasan atau 178% dari target, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Target AAP 2024	Realisasi Non AAP	Realisasi AAP & Non AAP sampai dengan Desember 2024
1	Audit Assurance	33	20	53
2	Audit Consulting	-	6	6

RAPAT INTERNAL AUDIT

Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.03/2019, Unit Kerja Internal Audit memiliki kewenangan:

1. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Selama tahun 2024, Internal Audit telah menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris, Direksi, DPS, SEVP, Komite Audit serta Auditor Eksternal dengan rincian sebagai berikut.

1. Rapat Internal Audit dengan Audit Eksternal (Regulator dan KAP) sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) kali dengan melibatkan peserta rapat dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan DPS.
2. Rapat Internal Audit dengan Direktur sebanyak 2 (dua) kali.
3. Rapat Internal Audit dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali.
4. Rapat Internal Audit dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 5 (lima) kali.
5. Rapat Internal Audit dengan SEVP Internal Audit 8 (delapan) kali.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

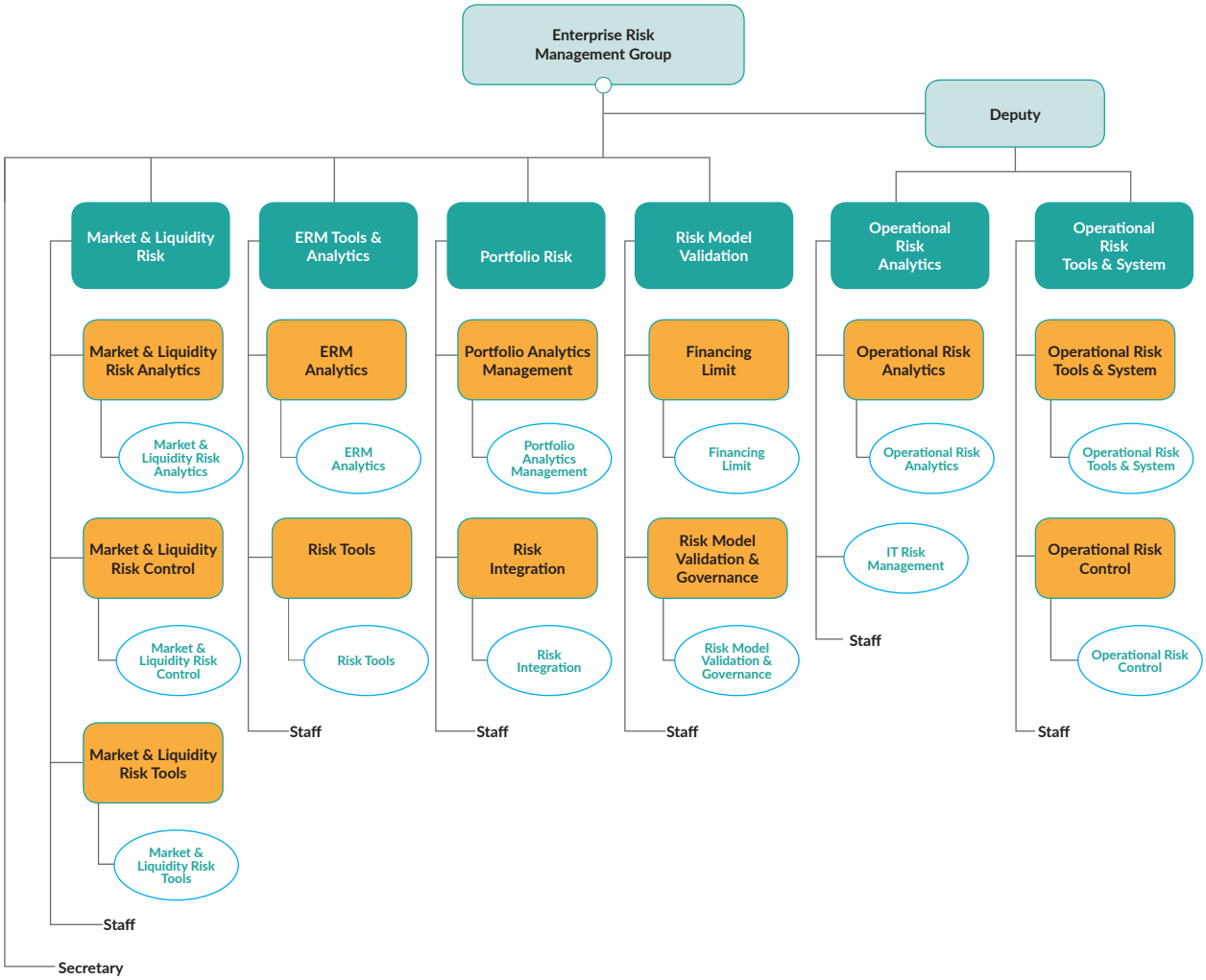
Terdapat 6.788 temuan Dimana 3.507 temuan dapat diselesaikan sebelum *exit meeting* dan per posisi Desember 2024, sebanyak 2.896 temuan telah diselesaikan, sehingga penyelesaian temuan sudah 88% dan 12% yang belum *overdue*.

No	Auditor	Jumlah Temuan	Done sebelum Exit Meeting	Total DMTL	Done Des '24		On Progress	
					Jml	%	Jml	%
1	Internal	4.125	1.678	2.447	2.212	90%	235	10%
2	Eksternal	2.663	1.829	832	684	82%	148	18%
Grand Total		**6. 788**	**3.507**	**3.279**	**2.896**	**88%**	**383**	**12%**

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko Bank Syariah Indonesia dilaksanakan oleh Enterprise Risk Management Group yang disupervisi oleh Direktur Manajemen Risiko.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Rincian tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategis, dan kerangka kerja manajemen risiko termasuk sharia *risk*.
2. Mengembangkan prosedur dan perangkat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko termasuk sharia *risk*.
3. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi atau eksposur risiko baik secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per jenis aktivitas fungsional, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan termasuk *sharia risk*.
6. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja dan pendapatan masing-masing satuan kerja operasional Bank atau aktivitas fungsional Bank.
7. Mengaji usulan kegiatan usaha baru yang dikembangkan oleh fungsi tertentu Bank yang difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola kegiatan usaha baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan dan dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan, serta termasuk sharia *risk*.

8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan/atau Komite Manajemen Risiko terkait penerapan manajemen risiko, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank.
9. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (model internal). SKMR dapat meminta pendapat SKAI atau *independent specialist* untuk memvalidadi data atau model yang digunakan.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala atau paling sedikit secara triwulanan kepada:
    a. Direktur utama atau Direktur Manajemen Risiko
    b. Komite Manajemen Risiko
    c. Regulator Perbankan
    d. Perusahaan Induk
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala sesuai dengan kebuthan Bank.
12. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi pada perusahaan induk dalam konglomerasi.

Profil Kepala Enterprise Risk Management Group



Indriati Tri Handayani

Pjs. Group Head Enterprise Risk Management Group

Jakarta, 03 Mei 1972/Usia 52 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

52 Tahun

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat kuasa

Riwayat Pendidikan

- Magister Hukum Universitas Indonesia (1999)
- Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1994)

Sertifikasi

- Sertifikasi Audit Intern Bank
- Sertifikasi Manajemen Risiko level 5
- Sertifikasi kepatuhan
- Sertifikasi General Banking
- Sertifikasi Asesor Risk Management

Pengalaman Kerja

- Pjs. Group Head Enterprise Risk Management Group BSI (2024 – sekarang)
- Pjs. Group Operational, Portfolio & Market Risk Group (2024)
- Group Head Policy & Procedure Group BSI (2022 – sekarang)
- Group Head Audit Policy & Counterpart Group BSI (2021 – 2022)

Pengembangan Kompetensi Enterprise Risk Management Group

1. KSF Pricing Management and Liquidity & Market Risk
2. KSF Prinsip Kehati-Hatian Produk BSI Deposito
3. Level Up Your Fee Based Income with Remittance
4. Level Up Business with Digital ZIZWAF
5. Webinar Ngopih Seri Legalitas dan Kewenangan Bertindak Untuk Perkumpulan
6. Refreshment Manajemen Risiko
7. Top Executive Learning Program Series 2

8. Persiapan Implementasi Project Financing Factory
9. KSF Menyusun ROPA & DPIA
10. KSF Menyusun ROPA & DPIA (RDA)
11. Webinar Tata Cara Penggunaan Microsoft Office 365
12. Cyber Risk Management
13. Transaksi Valuta Asing Untuk RM Wholesale Batch 1
14. Risk Maturity Index (RMI)
15. Data Analysis and Visualization with Microsoft Excel 365
16. Introduction to Phyton for Data Science
17. Artificial Intellegence and Machine Learning Fundamentals for OPR
18. SQL for Data Analytics
19. Big Data with Hadoop and Spark
20. Python For Data Analyst
21. Excel Power Tools For Data Analytic
22. Big Data With Hadoop & Spark
23. Training Transaksi Valuta Asing Batch 2
24. KSF "bsi digital wholesale insight vol 2
25. Data Analysis And Visualization Batch 1
26. Introduction To Python For Data Science
27. Webinar Ngopih Prinsip Kehati-Hatian
28. Data Analysis and Visualization Batch 2
29. Seminar Personal Colour And Style
30. Microsoft Power BI Data Analyst
31. Artificial Intellegence And Machine
32. Innovation Clinic Series Vol. 1
33. Refreshment "BSI Digital Insight Vol 3"
34. Certified Data Science Specialist (CDSS)
35. Unlocking Your Innovation Potential
36. Sustainable Financing Wholesale
37. Refreshment Phr Treasury & Trade
38. Environmental, Social & Governance (ESG)
39. Training For Trainer Batch 1
40. Innovation Vol 2 Innovate or Evaporate
41. Training For Trainers Batch 2
42. General Banking Level 1 Batch 1
43. General Banking Level 1 Batch 2
44. Perpanjangan Sertifikasi (BCMCP)
45. Training SQL For Data Analytics
46. Refreshment "BSI Digital Insight Vol 4"
47. General Banking Level 1 Batch 3
48. FGD Kebutuhan Pelatihan BOSM
49. Big Data Analysis Using Python Batch 1
50. Innovation Vol 3 Everyone Can Innovate
51. Certified Anti Fraud Professional (CAFP)
52. Operational Risk & Risk Control Self Assessment (RCSA)
53. Big Data Analysis Using Python Batch 2
54. Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi
55. Sharing Knowledge: Ketentuan PTO
56. Pelatihan Climate Risk Management
57. Refreshment Fiqh Muamalah Maaliyah
58. Refresment Ketentuan Pembiayaan Oktober 2024
69. Webinar Bsi Cakap Digital Series 1
60. Refreshment Prinsip-Prinsip Penghimpunan Dana
61. Webinar IT Security Awareness Kantor Pusat
62. Webinar BSI Cakap Digital Series 2
63. Webinar BSI Cakap Digital Series 3
64. Webinar BSI Cakap Digital Series 4
65. Webinar BSI & Mandiri Group
66. Webinar Series 2 BYOND by BSI Update
67. Pembekalan MR Jenjang 5 Batch 2
68. Webinar BSI Cakap Digital Series 6
69. Refreshment Treasury
70. Legal Officer Forum Tahun 2024
71. Webinar BSI Cakap Digital Series 7
72. Webinar BSI Cakap Digital Series 8
73. Webinar BSI Cakap Digital Series 9
74. Top Executive Learning Program Desember 2024
75. Refreshment BYOND by BSI Vol.1

Sertifikasi Manajemen Risiko

No.	Jabatan	Jumlah	Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi
1.	Group Head	1 Orang	Manajemen Risiko Level 5	LSPKS
2.	Deputy	1 Orang	Manajemen Risiko Level 4	LSPKS
3.	Dept. Head	6 Orang	• Manajemen Risiko Level 3 (4 orang) • Manajemen Risiko Level 2 (2 orang)	LSPKS
4.	Manager	12 orang	• Manajemen Risiko Level 3 (5 orang) • Manajemen Risiko Level 2 (7 orang)	LSPKS
5.	Senior Officer	1 Orang	Manajemen Risiko Level 2	LSPKS
6.	Officer	14 Orang	• Manajemen Risiko Level 3 (2 orang) • Manajemen Risiko Level 2 (1 orang) • Manajemen Risiko Level 1 (11 orang)	LSPKS

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2024

Selain menjalankan tugas pokok sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko, ERM telah melakukan banyak kolaborasi dan *enhancement* untuk memperkuat penerapan manajemen risiko di BSI, antara lain:

1. 1*st Pilot*: *Bottom-Up Climate Risk Stress Testing*
2. Pemutakhiran Portfolio Guideline
3. Penerapan Manajemen Risiko pada Produk Bullion Tahap 1
4. Penerapan Manajemen Risiko pada Kantor Cabang Luar Negeri
5. *Risk Due Diligence* untuk *Strategic Bancassurance*
6. *Task Force Anti Fraud*
7. Pemutakhiran *Recovery Plan* dan *Resolution Plan*

Komite di Bawah Direksi

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui pembahasan *risk appetite*, metodologi dan penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan tugasnya Komite Manajemen Risiko mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 04/503A-KEP/DIR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur antara lain:

1. Struktur Organisasi Komite
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib Risk Management Committee
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Working Group Risk Management Committee
5. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi *stress* dalam pengukuran risiko dan *contigency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk memastikan integrasinya dengan perusahaan induk.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan).
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Finance & Strategy Director
Sekretaris	Fungsi Kesekretariatan Komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group Komite
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. Risk Management Director 2. Finance & Strategy Director 3. Wholesale Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. Sales & Distribution Director/Consumer Product Solution SEVP 6. Information Technology Director 7. Treasury & International Banking Director 8. Wholesale Risk SEVP 9. Retail & Consumer Risk SEVP 10.Operations SEVP
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Compliance & Human Capital Director/Group Head Compliance & AML-CFT
Non Permanent – Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait Materi
Invitee	1. Vice President Director* 2. SEVP/Group Head Internal Audit

*Dalam hal Vice President Director bertindak sebagai Director Pemateri/Pejabat *Alternate Voting Member*, maka kedudukan Vice President Director bukan sebagai *Invitee*.

PROFIL KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

No.	Tanggal	Agenda
1	26 Januari 2024	Penetapan Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 31 Desember 2023
2	19 Maret 2024	Pemutakhiran *Portfolio Guideline* Segmen Wholesale dan SME
3	22 April 2024	Penetapan Profil Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 31 Maret 2024
4	12 Juni 2024	Penetapan: a. Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) atau *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) Secara Individual dan Profil Risiko Terintegrasi Semester I tahun 2024 b. Formula perhitungan *Country Exposure Limit* (CEL)
5	18 Juli 2024	Penetapan: a. Tingkat Kesehatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 Juni 2024 b. *Risk Appetite Statement* tahun 2024
6	14 Oktober 2024	Penetapan Profil Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 September 2024
7	06 November 2024	Pemutakhiran Portfolio Guideline Segmen Wholesale dan SME
8	11 November 2024	Penetapan *Limit Treasury*
9	28 November 2024	Penetapan: a. Evaluasi motodologi Perhitungan CKPN b. Kebutuhan CKPN & PPKA segmen Pembiayaan Retail & Consumer
10	13 Desember 2024	Pemutakhiran Limit Trading & safety level likuiditas tahun 2025
11	17 Desember 2024	Perubahan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) atau *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) Secara Individual dan Profil Risiko Terintegrasi Semester II tahun 2024

IT *Steering Committee*

IT *Streering Committee* dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan rencana strategis di bidang teknologi informasi atau *information technology* (IT), penganggaran IT, penetapan proyek strategis IT dan pengamanan IT. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite ini mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PEDOMAN KERJA IT STEERING COMMITTEE

Dalam menjalankan tugasnya IT *Streering Committee* mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor No. 04/504A-KEP/DIR tentang IT *Streering Committee*.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB IT STEERING COMMITTEE

IT *Steering Committee* adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP yang secara garis besar tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis IT (IT *Strategic Plan*), IT *Resources*, strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
2. Memonitor kesesuaian rencana strategis IT, anggaran IT dan *delivery project* IT hingga mengevaluasi efektivitas biaya IT.
3. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT, investasi bidang IT hingga menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT .
4. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat IT operasional.

STRUKTUR KEANGGOTAAN IT STEERING COMMITTEE

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Information Technology Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group komite
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Information Technology Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management 6. Digital Banking SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

PROFIL IT STEERING COMMITTEE

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN IT STEERING COMMITTEE

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI IT STEERING COMMITTEE

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS IT STEERING COMMITTEE

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1	31 Januari 2024	*Project* Inisiatif dan Usulan Anggaran IT Strategis Tahun 2024
2	19 April 2024	Perubahan Inisiatif dan Perubahan Anggaran IT Strategis Tahun 2024
3	16 Juli 2024	Penguatan *Governance* untuk *Release Control Board* (RCB)
4	19 Desember 2024	*Update Progress* Inisiatif dan Perubahan Anggaran IT Strategis 2024

Komite *Policy & Procedure*

Komite *Policy & Procedure* beranggotakan Direksi/SEVP. Komite ini berwenang merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur, termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup komite di bawah Direksi lainnya.

PEDOMAN KERJA KOMITE POLICY & PROCEDURE

Dalam menjalankan tugasnya Komite *Policy & Procedure* mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 04/508A-KEP/DIR tanggal 14 Oktober 2024 tentang Komite Policy & Procedur PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang mengatur antara lain:

1. Struktur Organisasi Komite
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group Risk Management Committee*
5. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE POLICY & PROCEDURE

Tugas dan tanggung jawab Komite Policy & Procedure adalah:

1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/ penyempurnaan kebijakan.
2. Menetapkan pemutakhiran prosedur Perseroan di luar kebijakan dan standar prosedur *human capital* dan kebijakan manajemen risiko, dan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Komite lain di bawah Direksi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE POLICY & PROCEDURE

Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Compliance & Human Capital Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group komite.
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. Risk Management Director 2. Compliance & Human Capital Director
Anggota Tetap - *Non Voting Member*	Group Head Compliance & AML – CFT
Non Permanent – Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi 3. SEVP Operations*
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait Materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

*) Khusus ketentuan Bank terkait lingkup operasional

PROFIL KOMITE POLICY & PROCEDURE

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN KOMITE POLICY & PROCEDURE

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE POLICY & PROCEDURE

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE POLICY & PROCEDURE

Rapat dan pelaksanaan tugas Komite Policy & Procedure selama tahun 2024 yaitu penetapan ketentuan Bank dilakukan secara sirkuler, dengan jumlah 177 ketentuan, yang terdiri dari Kebijakan 8 ketentuan, Manual Produk (MP) 54 ketentuan, Memorandum Prosedur Operasional (MPO) 20 ketentuan, Standar Prosedur (SP) 95 ketentuan. Mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Policy & Procedure dapat dilakukan melalui forum rapat, sirkulasi, atau mekanisme lainnya sepanjang memenuhi persyaratan kourum peserta yang ditetapkan.

Jenis Ketentuan	Ketentuan Baru				Sub Total	Ketentuan Revisi				Sub Total	Grand Total
	BUS	FT	RF	WF		BUS	FT	RF	WF		
Kebijakan	1	-	-	-	1	4	1	-	2	7	8
Manual Produk	-	4	-	1	5	-	3	35	11	49	54
Standar Prosedur	3	1	-	2	6	21	19	17	32	89	95
Memorandum Prosedur	2	5	9	-	16	2	-	2	-	4	20
Sub Total	**6**	**10**	**9**	**3**		**27**	**23**	**54**	**45**		
				Ketentuan Baru	**28**				**Ketentuan Revisi**	**149**	
										Grand Total	**177**

Komite Bisnis

Komite Bisnis dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk dan jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

PEDOMAN KERJA KOMITE BISNIS

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada Keputusan Direksi No 04/506A-KEP/DIR tentang Komite Bisnis (*Business Committee*) yang mengatur antara lain:

1. Struktur organisasi komite.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib *Business Committee*
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group Business Committee*
5. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BISNIS

Komite Bisnis bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Bank.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk pengembangan produk, tarif, prosedur terkait, limit eksposure risiko, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis. Mekanisme pembuatan kebijakan dan prosedur terkait produk Bank mengacu pada ketentuan internal Bank.
3. Membahas dan menetapkan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) berupa RPPB tahunan dan RPPB perubahan untuk diajukan izin kepada Regulator, serta penghentian produk Bank untuk dilaporkan kepada Regulator.
4. Membahas dan menetapkan strategi bisnis yang menjadi fokus Perseroan, antara lain melalui anchor client Perseroan.
5. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja inisiatif strategi bisnis/proyek.
6. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja Perseroan dan aliansi dengan Perusahaan induk serta *sister company*.
7. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat.
8. Mengkomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/ Keputusan komite dilaksanakan sesuai Keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan terkait.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE BISNIS

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh unit kerja yang bertindak sebagai ketua working group komite.
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Wholesale Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. Sales & Distribution Director/Consumer Product Solution SEVP 6. Risk Management Director/Wholesale Risk SEVP/Retail & Consumer Risk SEVP 7. SEVP Operations 8. Corporate Strategy SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contributing Non Voting Member	1. Group Head / Pejabat setara Pemateri 2. Group Head / Pejabat setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

PROFIL KOMITE BISNIS

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN KOMITE BISNIS

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE BISNIS

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE BISNIS

No.	Tanggal	Agenda
1.	16 January 2024	Usulan Management Limit PT Pertamina (Persero) dan PT Jasa Marga (Persero)
2.	15 March 2024	Usulan Management Limit Sinarmas Group
3.	28 March 2024	Usulan Revitalisasi Tapenas Kolektif
4.	04 April 2024	Risalah Kombis Perpanjangan PKS BSI dengan waskita dan Limit Commercial Line
5.	04 April 2024	- Permohonan Pembukaan Principal dan Wilayah Pemasaran Produk BSI Distributor Financing. - Revisi Manual Produk BSI Distributor Financing.
6.	23 April 2024	Usulan Penetapan *Underlying* Pembiayaan Bagi Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I PT Bank Syariah Indonesia Tbk
7.	23 April 2024	Usulan Magement Limit PT SMI Group
8.	25 June 2024	Usulan RPPB periode Juni 2024
9.	15 Juli 2024	Manajemen Limit PLN tahun 2024
10.	17 Juli 2024	Manajemen Limit Medco tahun 2024
11.	14 Agustus 2024	Manajemen Limit Astra Group
12.	20 Agustus 2024	Manajemen Limit Telkom Group tahun 2024
13.	18 September 2024	Manajemen Limit Salim Group tahun 2024
14.	19 September 2024	Manajemen Limit PT PP Group tahun 2024
15.	19 September 2024	Usulan RPPB periode September 2024
16.	28 November 2024	Usulan RPPB periode 2025

Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Bank, serta penanganan kasus kepegawaian.

PEDOMAN KERJA KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Pedoman kerja Komite Sumber Daya Manusia mengacu pada Keputusan Direksi No 03/319-KEP/DIR tentang Komite Sumber Daya Manusia (Human Capital Committee) yang mengatur antara lain:

1. Struktur organisasi komite.
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite
3. Tata Tertib Human Capital Committee
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Working Group Human Capital Committee
5. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite SDM bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:

1. Menyusun strategi dan kebijakan human capital termasuk budaya perusahaan, kompensasi dan benefit.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan human capital.
4. Menetapkan arahan strategis dan kebijakan sistem operasional pengelolaan *human capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.

5. Menetapkan arah strategis pengembangan sistem informasi human capital.
6. Menetapkan dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
7. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan human capital yang bersifat strategis.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Compliance & Human Capital Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group Komite
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. President Director 2. Vice President Director 3. Compliance & Human Capital Director 4. Finance & Strategy Director 5. Sales & Distribution Director 6. Risk Management Director 7. Human Capital SEVP
Non Permanent – Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

PROFIL KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Selama tahun 2024, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Menetapkan kebijakan compensation benefit tahun 2024 yaitu Pelaksanaan *Annual Salary Increment*
2. Menetapkan individual *Performance Management & Rewards* tahun 2024 yaitu:
   a. Distribusi normal penilaian kinerja pegawai
   b. Penilaian kinerja pegawai Senior Manager dan Senior Executive Vice President
   c. Pemberian apresiasi (bonus) atas kinerja tahun 2024
3. Menetapkan *Talent & Succession Management* yaitu:
   a. Kebijakan Promotion Cycle dan implementasinya
   b. Penilaian Talent Classification pegawai Senior Manager Senior Executive Vice President
   c. Pemenuhan dan Mobility Pegawai Senior Manager
   d. Pemenuhan Pegawai Senior Executive Vice President

Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas atau *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank.

PEDOMAN KERJA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.04/505A-KEP/DIR tanggal 14 Oktober 2024 mengatur terkait Struktur Organisasi Komite, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Asset & Liabilities Committee bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan asset dan liabilities.
2. Mengevaluasi posisi asset dan liabilities Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.
3. Melakukan evaluasi posisi Bank dan strategi Asset & Liabilities Management guna memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
4. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALM Bank.
5. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
6. Melakukan batasan manajemen likuiditas, manajemen dampak perubahan suku bunga, manajemen nilai tukar valuta asing, manajemen pendapatan dan investasi dan manajemen *pricing*.
7. Menetapkan metodologi *Fund Transfer Pricing*.
8. Melakukan pembahasan bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Perseroan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Treasury & International Banking Director
Sekretaris	Fungsi kesekretariatan komite dilaksanakan oleh Ketua Working Group komite
Anggota Tetap - *Voting Member*	1. President Director 2. Vice President Director 3. Treasury & International Banking Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management Director/Wholesale Risk SEVP/ Retail & Consumer Risk SEVP 6. Wholesale Transaction Banking Director 7. Retail Banking Director 8. Sales & Distribution Director/Consumer Product Solution SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/Group Head Compliance Group & AML-CFT
Non Permanent – Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contributing – Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

PROFIL KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASET DAN LIABILITAS

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	16 Januari 2024	Strategi funding 2024
2	14 Maret 2024	Strategi pengelolaan COF dan optimalisasi pendapatan margin pembiayaan
3	30 April 2024	Strategi pengelolaan *funding* melalui penerbitan sukuk, *review* kuota special nisbah DPK dan nisbah deposito wakaf
4	28 Mei 2024	Usulan kewenangan memutus final price dan issuance size sustainability sukuk BSI
5	3 Juni 2024	Strategi *funding*, financing monitoring, dan usulan pembentukan Task Force
6	9 Juli 2024	Strategi *funding* dan pembiayaan konsumer
7	20 Agustus 2024	Strategi DPK, usulan penetapan *pricing* pembiayaan SME beragun sukuk, dan review metodologi perhitungan cadangan likuiditas
8	18 September 2024	Usulan *special price* pembiayaan konsumer dan plafond pembelian instrumen *banking book*
9	22 Oktober 2024	Pemutakhiran recovery plan, review nisbah spesial DPK, dan usulan special price pembiayaan SME & Cicil Emas
10	14 November 2024	Strategi asset & liability
11	6 Desember 2024	Strategi *funding* Desember 2024 dan plafond pembelian instrumen banking book periode 2025

Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management

PEDOMAN KERJA STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Pedoman Kerja Komite *Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management* mengacu pada Keputusan Direksi No. 04/507A-KEP/DIR yang mengatur terkait:

1. Struktur Organisasi *Steering Committee*
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Steering Committee*
3. Tata Tertib *Steering Committee*
4. Tugas, Wewenang; Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab *Working Group Steering Committee*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB *STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT*

Tugas dan tanggung jawab Komite *Steering Committee Crisis Management - Business Continuity Management*.

1. Menetapkan strategi pencegahan, penanganan, pemulihan, strategi komunikasi untuk penanganan dampak bencana termasuk pandemik COVID-19 di Bank.
2. Membahas dan menetapkan strategi operasional Bank selama periode bencana termasuk pandemik COVID-19, antara lain aktivasi BCM, penetapan unit kerja critical, mekanisme kerja unit kerja (WFH/WFO), jam kerja operasional, dan hal-hal lain diperlukan dalam kondisi darurat bencana termasuk pandemi COVID-19.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan aliansi dengan perusahaan induk dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Bank.
4. Membahas dan menetapkan benefit dan/atau tunjangan sementara bagi pegawai terkait dengan dampak bencana termasuk pandemi COVID-19.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang terkait pencegahan dan penanganan kondisi darurat bencana termasuk COVID-19.
6. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi operasional yang telah disetujui *Steering Commiitee*.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang memerlukan penanganan *Crisis Management Team* (CMT).

STRUKTUR KEANGGOTAAN STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Fungsi	Pejabat
Ketua	Vice President Director
Wakil Ketua	Information Technology Director
Sekretaris 1	Fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang bertindak sebagai Ketua Working Group komite. Group Head Operations Development
Sekretaris 2	Group Head IT Operations
Sekretaris 3	Group Head Human Capital Strategy and Policy
Permanent Voting Member	1. Vice President Director 2. Information Technology Director 3. Sales & Distribution Director/Consumer Banking SEVP 4. Compliance & Human Capital Director/Human Capital SEVP 5. Risk Management Director/Financing Risk SEVP 6. Finance & Strategy Director 7. Operations SEVP 8. Human CapitalDigital Banking SEVP
Contributing Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi

PROFIL STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Profil anggota Komite baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

PELATIHAN STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Pelatihan anggota Komite yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	3 September 2024	Persetujuan Perubahan Metodologi Penentuan Kritikalitas Aplikasi dan Recovery Strategy.

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah

Komite Remunerasi dan Nominasi

Uraian terkait Komite Remunerasi dan Nominasi telah disajikan pada sub bab Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Dalam proses pemberian remunerasi bagi manajemen dan seluruh karyawan, Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang berlaku bagi Bank sebagai perbankan syariah dan perusahaan terbuka, mengedepankan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian dengan prinsip syariah, serta mempertimbangkan kewajaran nilai dalam industri, dalam memberikan kompensasi yang seimbang dan terukur sesuai dengan kinerja setiap insan Bank.

Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan *prudent risk taking* dan produktifitas pegawai sehingga tercapainya target bisnis Bank yang optimal, sustain dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank.

Kebijakan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam proses pemberian remunerasi bagi manajemen yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki peranan penting dalam merekomendasikan penentuan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Bank dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebelum disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Hal mana, telah kami uraikan sebelumnya pada bagian tugas, tanggungjawab serta wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu:

a. POJK Nomor 59 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan lampirannya;
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/ Mbu/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
d. Mandiri *Subsidiaries Management Principles Guideline* (MSMPG) Tahun 2024; dan
e. Anggaran Dasar Bank.

Penyusunan kebijakan remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. Terciptanya manajemen risiko yang efektif;
b. Stabilitas keuangan bank;
c. Kecukupan dan penguatan permodalan Bank;
d. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang;
e. Potensi pendapatan bank di masa yang akan datang; dan
f. Kesesuaian dengan prinsip syariah.

Kebijakan remunerasi dimaksud memuat:

1. Struktur remunerasi yang mencakup skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan, serta komponen remunerasi berupa ;
   a. Gaji;
   b. Honorarium;
   c. Insentif; dan/atau
   d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
2. Metode dan mekanisme penetapan remunerasi.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bahwa penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.

Dalam mengusulkan struktur dan besaran remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi memperhatikan beberapa faktor penting yaitu :

a. Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala Bank secara peer to peer dalam industri perbankan nasional secara umum, maupun dalam industri perbankan syariah secara khusus;
b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
c. pencapaian target kinerja Bank secara *bank wide*;
d. pencapaian kinerja atau *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
e. risiko dan kompleksitas tugas Dewan Pengawas Syariah sesuai tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Pengawas Syariah;
f. proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris memperhatikan perbandingan risiko dan kompleksitas tugas antara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris; dan
g. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk 1 periode tahun buku sesuai dengan Keputusan RUPS. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengevaluasi kebijakan remunerasi tersebut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, serta mengusulkan kembali struktur dan besaran remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dalam setiap pelaksanaan RUPS Tahunan Bank.

Kebijakan Remunerasi Pegawai

Prinsip-prinsip tata kelola tersebut juga diterapkan dalam pemberian remunerasi bagi seluruh karyawan Bank sebagaimana tertuang dalam Standar Prosedur Operasional Human Capital PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2022 (SPO HC)

Berbeda dengan kebijakan remunerasi bagi manajemen yang mewajibkan adanya keputusan RUPS, untuk kebijakan remunerasi pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Sesuai dengan SPO HC, Komite Remunerasi dan Nominasi juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan :

a. Kinerja keuangan;
b. pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva;
c. kewajaran dengan peer Unit Kerja Kantor Pusat;dan
d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Informasi terkait remunerasi pegawai telah disampaikan pada Sub Bab Remunerasi dalam Bab Human Capital Laporan Tahunan ini.

Cakupan Kebijakan Remunerasi Berdasarkan Kriteria Tertentu

Untuk menciptakan keselarasan dan mendorong peningkatan motivasi karyawan atas perbedaan wilayah kerja, tingkat risiko dan kapasitas pekerjaan, Bank melakukan pengukuran dan menetapkan kebijakan remunerasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui *benchmarking* terhadap *peers*.

Penghasilan tidak tetap merupakan komponen penghasilan yang diterima pegawai dalam jumlah yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu.

Penghasilan tidak tetap terdiri dari:

a. Tunjangan Tidak Tetap Tunjangan yang diberikan tunai kepada pegawai tertentu yang perhitungannya berdasarkan jabatan, sifat pekerjaan maupun lokasi kerja. Tunjangan ini dapat berubah (bertambah/berkurang) atau tidak diberikan apabila pegawai tidak lagi memegang jabatan atau berada pada lokasi kerja sebelumnya. Tunjangan ini terdiri dari :
   1) Tunjangan Posisi Tunjangan posisi diberikan untuk jabatan yang memiliki kekhususan karena keahlian tertentu, tanggung-jawab ataupun risiko bisnis yang diemban yang tidak dihitung dalam pertimbangan *job grading* serta posisi annual guaranteed cash terhadap pasar.
   2) Tunjangan Komunikasi Tunjangan komunikasi diberikan sebagai subsidi karena pekerjaannya menuntut berkomunikasi secara intensif dengan pihak eksternal menggunakan alat komunikasi pribadi.
   3) Tunjangan Lokasi Tunjangan lokasi diberikan atas dasar pertimbangan geografis perbedaan biaya hidup.
   4) Bantuan Transportasi Bantuan yang diberikan secara lumpsum kepada jabatan Area Segmen dan *Business Manager* untuk menunjang mobilitas dalam melaksanakan tugasnya dengan ketentuan apabila pegawai sudah tidak menjabat pada posisi tersebut maka bantuan transportasi akan hilang
b. Bonus
   Bonus merupakan apresiasi Bank atas kinerja atau kondisi tertentu. Bonus Kinerja Adalah penghargaan Bank atas pencapaian kinerja pegawai pada periode tertentu. Bonus ditetapkan berdasarkan hasil kinerja individu pegawai, kinerja Unit Kerja dan kinerja Bank secara umum dengan memperhatikan strategi bisnis dan kemampuan Bank.
c. Insentif
   Insentif merupakan apresiasi Bank atas pencapaian penjualan/pendapatan operasional pada batas dan atau kriteria tertentu. Insentif terdiri dari:
   1) Insentif Reguler
      Merupakan insentif yang diberikan secara reguler dalam bentuk tunai berdasarkan pencapaian penjualan per unit/produk atau hasil penagihan sesuai dengan skema insentif masing-masing.
   2) Insentif Jangka Panjang.
      Merupakan insentif yang diberikan dalam kurun waktu tertentu (lebih dari 1 tahun) kepada pegawai jika mampu meningkatkan nilai perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Misal: opsi kepemilikan saham, dan lain lain.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Dengan mengedepankan prisip kehati-hatian, Bank menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas usaha Bank.

Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, mempertimbangkan: Kinerja, yaitu kinerja manajemen, pegawai, unit bisnis dan kinerja Bank secara keseluruhan; dan Risiko yang dihadapi Bank.

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang Bersifat Variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Bank memberikan remunerasi yang bersifat variabel tersebut dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat variabel. Persentase pemberian Remunerasi dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank dapat diberikan berbeda pada setiap tingkat

jabatan dengan memperhatikan antara lain peran dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam pengelolaan Bank

Monitoring Implementasi Kebijakan Remunerasi

Dalam pelaksanaan monitoring implementasi kebijakan remunerasi, Bank secara berkala melakukan:

a. Mengevaluasi skala gaji dan bonus secara periodik untuk memastikan sistem rumunerasi Bank kompetitif dengan pasar.
b. Me*review* fasilitas benefit pegawai berdasarkan data-data implementasi yang diperoleh dari Unit Kerja Terkait dan data pasar berdasarkan hasil *survey* yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang kompeten yang ditunjuk Bank atas berdasarkan benchmark yang dilakukan langsung kepada *peers*.
c. Mengadakan forum pertemuan dengan Unit Kerja Terkait untuk memastikan Unit Kerja tersebut telah memiliki pemahaman yang baik terhadap fasilitas *benefit* pegawai sehingga implementasi pemberian fasilitas *benefit* pegawai tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. *Monitoring* atas penyesuaian organisasi dan peringkat jabatan, program pengembangan pegawai, *workforce planning* dan memastikan implementasinya telah sesuai dengan ketentuan Human Capital.
e. *Monitoring* terhadap seluruh proses pemenuhan pegawai mulai dari proses pencarian kandidat (*sourcing*), seleksi (*selection*), konfirmasi (*confirmation*) sampai dengan penempatan dan memastikan telah sesuai dengan ketentuan Human Capital.
f. *Monitoring* Pelatihan dan Pengembangan Pegawai;
g. *Monitoring* atas pelaksanaan hubungan industrial di Bank;
h. *Monitoring* Sistem Imbalan; dan
i. *Monitoring* Talenta dan Suksesi.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Tahun 2024, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal dalam penyusunan kebijakan Remunerasi. Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku baik dibidang perbankan maupun pasar modal dan ketentuan Bank sebagai Perusahaan Anak Bank Mandiri, dengan tetap mempertimbangkan market analysis yang dilakukan oleh internal Bank.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura	10	119.699	10	56.633	5	9.122
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *): a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki		-		-		-
Total		**119.699**	**10**	**56.633**	**5**	**9.122**

*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah DPS
di atas Rp 2 miliar	8	2	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	2	5	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	3	3
Rp 500 juta ke bawah	-	-	2

*) yang diterima secara tunai

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Selain itu, Bank memberikan kompensasi yang bersifat variabel diantaranya Tunjangan Lokasi, Tunjangan Jabatan tertentu, Tunjangan Penampilan untuk pegawai *frontliner*, Kompensasi Lembur, Bonus pencapaian kinerja, Insentif penjualan, retention program serta program *Long Term Incentive* dalam bentuk saham. Khusus untuk anggota Dewan Komisaris Independen mendapatkan remunerasi dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 45/ POJK.03/2015. Untuk menunjang kedinasan pegawai, Bank memberikan fasilitas kedinasan meliputi rumah dinas, penggantian biaya utilities, pulsa telepon, dan Kendaraan dinas sewa. Sedangkan untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan maupun kebutuhan lainnya, Bank memberikan fasilitas Kredit Kesejahteraan Pegawai.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Taker* (MRT)

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi BSI adalah *Material Risk Takers*. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama pada tahun buku 2024 sejumlah 20 orang.

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pejabat Eksekutif

BSI tidak menerbitkan program *shares option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun pegawai sepanjang tahun 2024.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

1. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah; 1,6:1
2. Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; 1,1:1
3. Rasio gaji DPS yang tertinggi dan terendah; 1,46:1
4. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah; 67,0:1
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi. 1,68:1

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Selama tahun 2024, tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank Mandiri kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang di tangguhkan		Keterangan
	Tunai	Saham (Rp)	
Dewan Komisaris	-	4.356.643.200	Total saham bloked x harga penutupan perdagangan akhir tahun 2024 (per 30 Des 2024) : 1.595.840 lembar saham x Rp 2.730
Direksi	-	25.391.429.700	Total saham bloked x harga penutupan perdagangan akhir tahun 2024 (per 30 Des 2024) : 9.300.890 lembar saham x Rp 2.730

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang di tangguhkan		Keterangan
	Tunai	Saham (Rp)	
Dewan Komisaris	-	2.121.920.269	Total saham bloked x harga harga saham pelaksanaan : 690.900 lembar saham x Rp 3.071,2408
Direksi	-	13.709.947.690	Total saham bloked x harga harga saham pelaksanaan : 4.463.000 lembar saham x Rp 3.071,2408

Jumlah Remunerasi yang Diberikan Dalam 1 (Satu) Tahun Kepada Pihak MRT

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

		Remunerasi yang bersifat tetap	Remunerasi yang bersifat variabel
Tunai	Dewan Komisaris	54.511.240.930	-
	Direksi	105.993.031.490	-
Saham	Dewan Komisaris	-	2.121.920.269
	Direksi	-	13.706.947.690

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	2.234.722.931			
Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	11.684.482.010			

Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik

1. Penunjukan KAP dan AP serta penetapan biaya/honorariumnya untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
2. KAP dan/atau AP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, dapat diusulkan kembali guna melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku berikutnya setelah mempertimbangkan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku. Syarat untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan evaluasi Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Kantor Akuntan Publik mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan yang masih berlaku.
   b. Kantor Akuntan Publik terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan.
   c. Akuntan Publik yang menjadi Signing Partner terdaftar aktif pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
   d. Berafiliasi sebagai member (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala internasional.
   e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum yang breast lebih dari Rp10 triliun.
   f. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank Syariah atau unit usaha Syariah.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan *Fee*

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	*Fee* Jasa Audit*
2024	Kantor Akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-4 penugasan	Lucy Luciana Suhendra	Tahun ke-1 penugasan	5.950.000.000
2023	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-3 penugasan	M. Jusuf Wibisana	Tahun ke-3 penugasan	5.600.000.000
2022	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-2 penugasan	M. Jusuf Wibisana	Tahun ke-2 penugasan	5.400.000.000
2021	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tahun ke-1 penugasan	M. Jusuf Wibisana	Tahun ke-1 penugasan	5.100.000.000

*Termasuk PPN & OPE

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Fee atas Jasa lain yang diberikan akuntan sebesar Rp3.799.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. *Comfort Letter* & AUP Gagal Bayar terkait penerbitan *Sustainability* Sukuk
2. AUP PSA 62 31 Desember 2024
3. AUP Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 31 Desember 2024
4. AUP Kustodian 31 Desember 2024

Sistem Pengendalian Internal

BSI melaksanakan Sistem Pengendalian internal (SPI) secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BSI. Penerapan SPI secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya SPI BSI yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh *risk taking unit* dan satuan kerja pendukung serta SKAI.

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Komponen Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan Bank mengacu pada ketentuan regulator perbankan serta mempertimbangkan prinsip/praktik internal control yang berlaku secara internasional (*International Best Pratice*), yaitu:

1. Lingkungan Internal (*Internal Environment*).
2. Penetapan Sasaran (*Objective Setting*).
3. Identifikasi Kejadian (*Event Identification*).
4. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*).
5. Respon atas Risiko (*Risk Response*).
6. Aktivitas-aktifitas pengendalian (*Control Activities*).
7. Sistem Informasi, Komunikasi, dan Akuntansi (*Information, Communication and Accountancy*).
8. Pemantauan (*Monitoring*).

Lingkungan Internal (*Internal Environment*)

Bank memiliki komitmen, perilaku dan kepedulian yang tercermin pada:

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Guna menghasilkan SDM yang memiliki, integritas dan kompetensi yang baik serta memberikan kontribusi signifikan, maka Bank:
   a. Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan sumber daya manusia.
   b. Merencanakan kecukupan pegawai dan proses rekrutmen sesuai kebutuhan operasional Bank.
   c. Memberikan remunerasi kepada pegawai (gaji, bonus, dsb).
   d. Berdasarkan kinerja dengan mempertimbangkan besaran remunerasi kelompok jabatan pada peer group.
   e. Memberikan fasilitas kesejahteraan kepada pegawai (kesehataan, asuransi tenaga kerja, pembiayaan pegawai, purna bakti pegawai, dsb) sesuai kemampuan bank.
   f. Mengimplementasikan sistem pembinaan pegawai.
   g. Menetapkan hubungan industrial (*industrial relation*) dan hubungan kepegawaian (*employee relations* yang harmonis serta saling menguntungkan.
   h. Menetapkan sistem pemutusan hubungan kerja.

2. Struktur Organisasi
   a. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank menetapkan suatu organisasi yang bersifat fleksibel sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan serta stategis bisnis Bank.
   b. Bank memiliki struktur organisasi yang memadai dan mencerminkan pembidangan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Bank memiliki kebijakan tertulis mengenai ketentuan dan tata cara perubahan struktur organisasi.
   d. Organisasi Bank, ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Prinsip Syariah, Integritas, Nilai Etika, dan Kompetensi
   Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai kewajiban dan komitmen untuk membangun prinsip syariah, integritas, nilai etika dan pemenuhan kompetensi seluruh pihak dan/atau pegawai yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
4. Gaya Kepemimpinan dan Filosofi Manajemen Penggunaan Internal Bank.
   a. Pengelolaan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* termasuk prinsip syariah.
   b. Pengambilan keputusan Bank antara lain melalui dalam rapat Direksi dan Direksi berwenang menetapkan mekanisme lain untuk pengambilan keputusan.
   c. Proses pengambilan keputusan Bank dilakukan secara *bottom up* dan *top down*.
   d. Bank menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
5. Komitmen terhadap kompetensi
   a. Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
   b. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.
   c. Proses pengambilan keputusan Bank dilakukan secara *bottom up* dan *top down*. Bank menetapkan kebijakan yang bertujuan mencegah timbulnya peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
   d. Komitmen terhadap kompetensi Seluruh proses rekrutmen, pengembangan dan jenjang karir dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai.
   e. Manajemen menugaskan dan menempatkan pegawai berdasarkan *job exposure*, tingkat pengetahuan, kemampuan, penguasaan akan kompetensi teknis dan penerapan perilaku serta hasil penilaian kinerja pegawai.

Penetapan Sasaran (*Objective Setting*)

Bank menetapkan sasaran sebagai persyaratan dari proses *event identification, risk assessment* dan *risk response* yang efektif. Sasaran Bank terdiri atas:

1. Sasaran yang bersifat *high level* dari *strategic objectives* dan sejalan dengan visi, misi, dan prinsip operasional Bank.
2. Sasaran yang bersifat turunan dari *strategic objectives* pada level operasional (aktivitas, unit kerja dan lain-lain).

Identifikasi Kejadian (*Event Identification*)

1. Guna mencapai sasaran, Bank mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi kemampuan Bank untuk mengimplementasikan strategi dan mencapai sasaran secara efektif.
2. Identifikasi dilakukan terhadap kejadian yang diperkirakan berdampak negatif (risiko) yang membutuhkan penilaian dan respon Bank, serta terhadap kejadian yang diperkirakan berdampak positif yang merupakan peluang bagi Bank untuk menetapkan strategi guna mencapai sasaran Bank.
3. Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor – faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material.
4. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, wajib didukung oleh:
   a. Sistem informasi manajemen yang tepat waktu.
   b. Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko Bank.
5. Melaksanakan proses identifikasi risiko dengan melakukan analisis terhadap:
   a. Karakter risiko yang melekat pada Bank.
   b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.
   c. Pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi.
6. Melaksanakan proses pengukuran risiko melalui:
   a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
   b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi dan faktor risiko, yang bersifat material.
   c. Melakukan pengukuran secara berkala baik untuk produk, portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank.
   d. Pengukuran risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan menggunakan metode yang ditetapkan regulator dan atau yang dikembangkan oleh Bank.
7. Melaksanakan pemantauan risiko melalui:
   a. Evaluasi terhadap *risk eksposur* seluruh aktvitas transaksi dan bisnis Bank yang bersifat material dan yang berdampak pada kondisi permodalan Bank.
   b. Bank memantau kepatuhan terhadap limit internal. Penggunaan Internal Bank.
   c. Bank memantau konsistensi pelaksanaan penerapan manajemen risiko dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
   d. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat materiil.
8. Melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
9. Melaksanakan fungsi pengendalian risiko nilai tukar, risiko likuiditas melalui penerapan asset and liabilities management (ALMA).

Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Bank dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

1. Bank melalui unit kerja yang memiliki fungsi mengelola Manajemen Risiko mengidentifikasi dan menilai secara terus menerus terhadap aspek-aspek yang mempengarusi pencapaian sasaran Bank.
2. Penilaian atas efektivitas pelaksanaan kontrol untuk mencegah/meminimalisir terjadinya risiko dilakukan secara independen oleh Unit Kerja Internal Audit sehingga cakupan audit lebih luas dan menyeluruh.
3. Penilaian risiko dilakukan dengan:
   a. Mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi Bank.
   b. Menetapkan limit risiko yang menjadi tolak ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang diperbaharui secara periodik.
4. Penilaian risiko dilakukan terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif), risiko yang tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya. Apabila Bank memutuskan mengambil risiko tersebut, maka wajib menetapkan mitigasi risiko.
5. Penilaian risiko mencakup semua individual maupun keseluruhan (aggregate), meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko investasi. dan risiko terintregasi.

Respon atas Risiko (*Risk Response*)

Bank menetapkan tindakan-tindakan untuk merespon risiko berdasarkan pada penilaian terhadap risiko dan kontrol yang relevan. Tindakan respon yang dilakukan dapat meliputi *risk mitigation*, atau *risk reduction*, dan/atau *risk sharing*, dan/atau *risk acceptance* sebagaimana diterapkan dalam kebijakan Bank.

Dalam mempertimbangkan tindakan-tindakan respon maka Bank mempertimbangkan *cost & benefits*, dan memilih tindakan respon yang mengarah pada kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan dampak (*impact*) yang sesuai dengan batasan *risk tolerance* dan *risk appetite* Bank.

Aktivitas-Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) – Pengendalian Keuangan dan Operasional

KEGIATAN PENGENDALIAN

a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Review*)
   - Direktur Bidang secara berkala meminta laporan kinerja operasional dari unit kerja yang berada di bawah supervisinya dan menginstruksikan tindakan pelurusan atau arahan-arahan lain.
   - Kepala unit kerja secara berkala meminta laporan kinerja operasional dari pejabat di bawahnya dan mengkaji ulang realisasi serta solusi pencapaian target (rencana kerja).

b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*) Kaji ulang ini dilakukan/kepala Unit Kerja, meliputi:
   - Penilaian profil risiko Unit Kerja.
   - Analisis data operasional.
   - Identifikasi penyebab penyimpangan serta tindakan perbaikan (*corrective action*). terhadap realisasi pencapaian target.
   - Permasalahan di Unit Kerja yang dapat merugikan Bank baik secara materiil maupun immateriil.

c. Pengendalian Sistem Teknologi Informasi (STI)
   - Setiap fungsi jabatan dalam Unit Kerja melakukan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi sesuai ketentuan.
   - Unit Kerja yang membidangi STI melakukan pengendalian umum maupun pengendalian aplikasi:
     1) Pengendalian umum.
        Meliputi pengendalian operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan software, pengamanan akses serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian dimaksud diterapkan terhadap *server*, *users workstation* dan jaringan internal/eksternal.
     2) pengendalian aplikasi.
        Diterapkan terhadap program yang digunakan bank dalam mengolah transaksi untuk memastikan semua transaksi benar dan akurat.

d. Pengendalian Aset Fisik (*Physical Control*)
   - Bank menetapkan kebijakan dan Standart Prosedur Operasional mengenai pengelolaan aset Bank.
   - Pengelolaan dan pengendalian aset Bank dilakukan oleh seluruh Unit Kerja yang membidangi sarana dan logistik.
   - Jajaran Bank wajib memelihara aset Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Dokumentasi
   - Bank menyusun dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem, dan standar akutansi serta proses audit secara memadai.
   - Bank memperbaharui dokumen secara berkala guna menggambarkan kegiatan Bank secara aktual.
   - Bank mengelola dan mengendalikan dokumen agar senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern, akuntan publik dan otoritas pengawasan.
   - Unit Kerja Internal Audit menilai ketersediaan dan keakuratan dokumen Bank.

f. Bank wajib meyakini kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit yang ditetapkan, dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi.

KEGIATAN PEMISAHAN FUNGSI

a. Penetapan batas fungsi, wewenang, dan tanggung jawab jajaran Bank diatur dalam struktur organisasi.
b. Fungsi-fungsi yang tidak boleh dilakukan perangkapan meliputi bisnis, risiko, dan operasional.
c. Bank menerapkan pemisahan fungsi (*segregation of duties/four eyes principal*) antara fungsi pembuat, pemeriksa, pemutus, dan pengawas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk menghindari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*).
d. Prinsip *Check* dan *Recheck*
   - Setiap kegiatan/transaksi memuat unsur pembuat (*maker*), pemeriksa, (*checker*) dan pemberi persetujuan (*approver*).
   - Bobot tanggung jawab di antara *maker*, *checker*, dan *approver* ditetapkan sesuai dengan batas wewenang masing-masing.
e. Bank wajib menunjuk pejabat/petugas alternate apabila terdapat pejabat/petugas yang berhalangan atau tidak mampu melaksanakan tugas untuk posisi-posisi yang strategis.

Pengendalian Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memastikan seluruh kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan Bank.

Fungsi Kepatuhan memiliki peran penting dalam menciptakan budaya kepatuhan yang kuat di seluruh jenjang organisasi. Fungsi Kepatuhan memastikan bahwa Bank tetap beroperasi dengan mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga integritas dan kepercayaan nasabah, serta mendukung keberlanjutan operasional Bank secara sehat dan sesuai regulasi. Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan meliputi pembentukan langkah-langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan, identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan, serta penilaian terhadap efektivitas kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ada di bank agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan prinsip syariah untuk bank umum syariah.

Selain itu, Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan prosedur yang ada, agar selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan kegiatan usaha bank tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia (BI), maupun prinsip-prinsip syariah yang mengatur bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi Kepatuhan telah melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan Direksi yang terkait dengan pembiayaan dan non-pembiayaan. Fungsi Kepatuhan juga memberikan reviu, opini, dan tanggapan terhadap kebijakan yang berjalan serta akad yang digunakan, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah yang berlaku. Selain itu, Fungsi Kepatuhan juga memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK dan Bank Indonesia, termasuk yang terkait dengan penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sistem Informasi, Komunikasi dan Akuntansi (*Information, Communication and Accountancy*)

SISTEM INFORMASI

1. Bank memiliki Sistem Informasi Manajemen yang mengintegrasikan kegiatan kerja di setiap Unit Kerja dan menginformasikan laporan kegiatan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sistem Informasi Manajemen mencakup informasi keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan, informasi pasar, dan penerapan manajemen risiko.
3. Sistem Informasi Manajemen menyediakan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit (audit trail).
4. Bank memiliki rencana kontinjensi yang up to date, terdokumentasi, dan teruji atas kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diprediksi sebelumnya.
5. Bank menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan disajikan dalam format yang konsisten.
6. Bank memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif agar informasi yang dikelola terjaga kerahasian, integritas, dan ketersediannya.
7. Pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek sumberdaya manusia dan proses penggunaan informasi teknologi.
8. Menjaga rahasia dan merahasiakan informasi nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di perbankan.
9. Mematuhi ketentuan rahasia Bank apabila terjadi permasalahan hukum yang memerlukan informasi nasabah penyimpan dan/atau simpanannya. Dalam hal ini, ketentuan tentang Rahasia Bank tidak berlaku untuk hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang.
10. Melaksanakan sistem teknologi informasi dan pengamanan sistem teknologi informasi.

SISTEM KOMUNIKASI

1. Bank memiliki saluran komunikasi yang efektif yang memungkinkan seluruh jajaran memahami dan mematuhi kebijakan serta prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya.
2. Struktur organisasi Bank memberikan ruang arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas unit kerja.

SISTEM AKUNTANSI

Bank dan jajaran Bank yang terkait sistem akuntansi wajib:
1. Menyusun ketentuan akuntansi sebagai acuan unit kerja dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi, mencatat/membukukan, dan melaporkan transaksi Bank.
2. Memelihara catatan pembukuan yang akurat dan konsisten atas transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
3. Bersama Unit Kerja Bisnis secara berkala atau sekurang-kurangnya setiap bulan melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dengan data hasil olahan sistem informasi. Setiap penyimpangan yang terjadi wajib segera diinvestigasi dan diluruskan. Proses rekonsiliasi wajib didokumentasikan.

Monitoring

1. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
   Kegiatan pemantauan adalah monitoring atas penyimpangan/ketidaksesuaian antara proses dengan ketentuan. Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern.
2. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan
   Tindakan koreksi penyimpangan adalah pemulihan atas penyimpangan/ketidaksesuaian antara proses dengan ketentuan serta penentuan upaya pemulihannya. Kelemahan dalam pengendalian intern baik yang diidentifikasi oleh satuan unit kerja operasional (risk taking unit), Unit Kerja Internal Audit maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kesesuaian dengan *Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission* (COSO)

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi Bank Syariah Indonesia dalam rangka mengawal tercapainya tujuan Bank. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan 5 (lima) elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Di BSI, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian (*Internal Environment)*
2. Penetapan tujuan *(Objective Setting)*
3. Identifikasi kejadian/peristiwa *(Event Identification)*
4. Penilaian risiko (*Risk Assessment)*
5. Respon atas risiko *(Risk Response)*
6. Aktivitas pengendalian *(Control Activity)*
7. Informasi dan komunikasi (*Information & Communication)*
8. Pemantauan (*Monitoring)*

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil *review* Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan di *monitoring* pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, BSI telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2024, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Internal di BSI secara umum telah memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidentil terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan di *monitoring* pelaksanaannya secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal Bank pada tahun 2024, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara keseluruhan telah berjalan memadai.

Manajemen Risiko

Seiring dengan dinamika eksternal serta produk dan jasa BSI terus berkembang, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai wujud komitmen atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, tetapi juga sikap kehati-hatian manajemen dalam pengelolaan Bank. Dengan harapan, kinerja BSI akan terus tumbuh secara berkelanjutan dengan dukungan penerapan manajemen risiko yang memadai. Melalui penerapan manajemen risiko yang tepat, diharapkan dapat melindungi Bank secara individu maupun entitas afiliasinya dari dampak perubahan di lingkungan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Bank. Sesuai dengan regulasi, manajemen risiko Bank merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. BSI senantiasa melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kerangka manajemen risiko serta melakukan sosialisasi di lingkungan organisasi agar tercipta budaya risiko yang baik di lingkungan Bank.

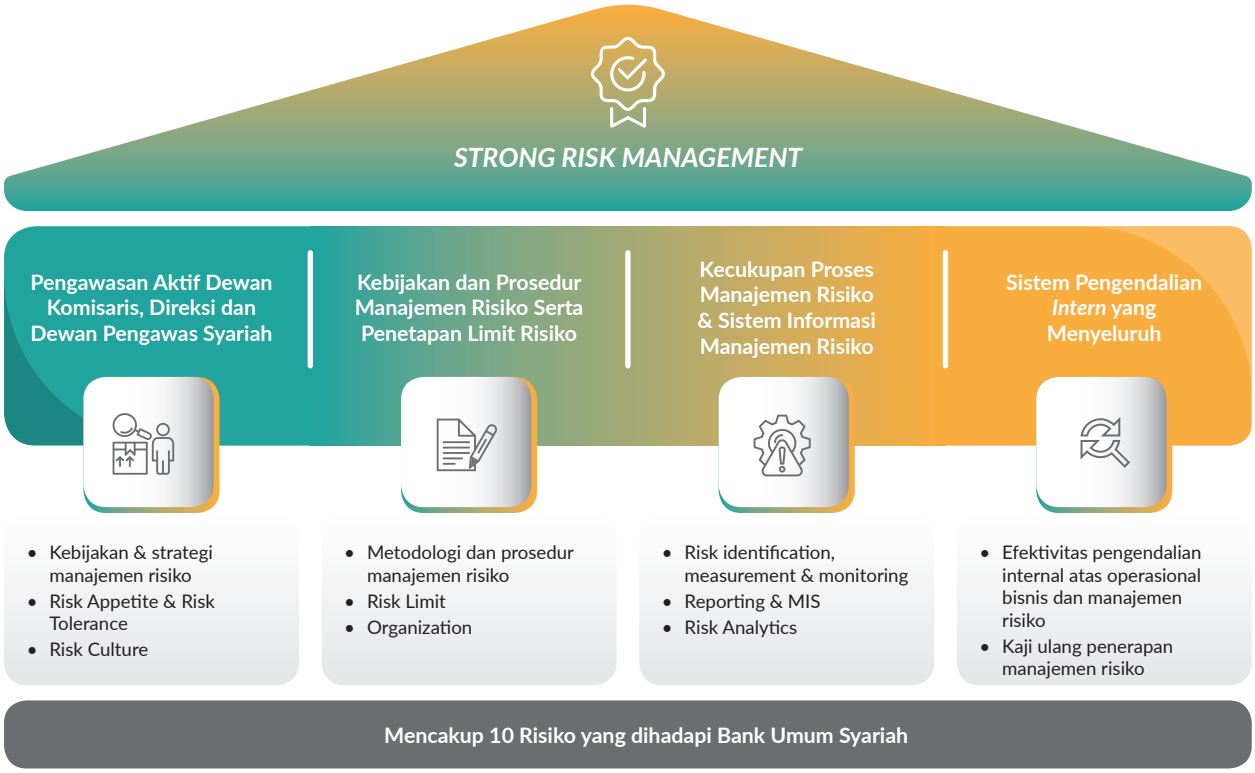
Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko, BSI mengacu pada ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/ POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
5. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.
6. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.
7. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
8. POJK Nomor 38/ POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
9. POJK No.11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
10. POJK No.57/POJK/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/ POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. SEOJK No.21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
13. SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB Bagi Bank Umum.
14. SEOJK No.6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
15. POJK No. 37/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank.
16. Peraturan Bank Indonesia No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/ POJK.03/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/ POJK.03/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bank Umum.
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/ SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam menjalankan Sistem manajemen risiko, Bank mengacu pada 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko yaitu:



Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di BSI. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berlangsung secara berkala melalui mekanisme kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit. Selain itu, koordinasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan pejabat eksekutif bank juga dilakukan melalui rapat-rapat rutin, seperti Rapat Komisaris dan Direksi.

Direksi menjalankan pengawasan aktif dengan intensitas tinggi melalui berbagai komite yang ada, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, IT Steering Committee, Komite Bisnis, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan dan Prosedur, Komite SDM, serta BCM Steering Committee. Koordinasi internal di tingkat Direksi juga diperkuat melalui rapat-rapat rutin, termasuk Rapat Dewan Direksi dan Rapat Direktur Bidang.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat-rapat dengan seluruh jajaran eksekutif bank. Mereka juga senantiasa membangun komunikasi yang konstruktif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi untuk memastikan keselarasan dalam pengelolaan prinsip syariah dan manajemen risiko.

Dengan demikian, ketiga pihak ini bekerja secara sinergis dalam mengawasi dan mengoptimalkan implementasi manajemen risiko di BSI.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Bank membuat dan menetapkan kebijakan manajemen risiko dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis serta menetapkan prosedur, ketentuan pelaksanaan atas limit transaksi/aktivitas, produk dan portofolio Bank.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Kebijakan dan prosedur disusun dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik, ukuran dan kompleksitas usaha, tingkat risiko yang diambil, toleransi risiko, profil risiko, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, prinsip syariah, dan/atau praktik perbankan yang sehat. Bank menetapkan ketentuan pokok dalam menerapkan manajemen risiko antara lain meliputi:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap risiko yang melekat pada setiap kegiatan usaha sesuai dengan karakteristik, ukuran dan kompleksitas usaha.
2. Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko untuk menilai secara tepat eksposur risiko pada setiap kegiatan usaha.
3. Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan manajemen risiko sehingga mencerminkan eksposur risiko yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
4. Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang, termasuk Batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi risiko yang merupakan Batasan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank.
5. Penetapan peringkat profil risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menetukan Langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha tertentu serta untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, komite, Satuan Kerja Manajemen Risiko, satuan kerja operasional, SKAI dan satuan kerja pendukung lainnya.
7. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko dilakukan untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, prinsip syariah dan ketentuan intern Bank, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, efektivitas budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi Bank, serta tersedianya informasi manajemen risko yang lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
8. Kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi ekstern dan intern terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana darurat (*contingency plan)*.

PROSEDUR DAN PENETAPAN LIMIT

Untuk memastikan eksposur risiko tetap terkendali, BSI menyediakan kebijakan dan prosedur yang memadai sebagai acuan bagi seluruh unit kerja. Ini mencakup penetapan limit risiko yang dirancang untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas bank. Pengelolaan risiko ini melekat pada setiap aktivitas operasional dan bisnis BSI.

Dalam rangka mengendalikan risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, BSI menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) dan limit risiko. RAS berfungsi sebagai panduan untuk menerima, memantau, menghindari, atau memaksimalkan risiko terkait peluang bisnis yang ada. Dengan adanya RAS, BSI dapat menjalankan bisnis secara dinamis dan mencapai target yang telah ditetapkan, sambil tetap menjaga tingkat risiko dalam batas yang terkendali (*manageable*).

Bank menentukan limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah.

Prosedur dan penetapan limit risiko meliputi:
1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank.
4. Penetapan limit secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit risiko secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional Bank yang memiliki eksposur risiko.

Besaran limit risiko diusulkan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko.

Kecukupan Proses Manajemen Risiko

BSI menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta tersedianya sistem informasi yang memadai. Bank mengelola seluruh jenis risiko yang terkait dengan operasional bisnis Bank sesuai ketentuan regulator yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil dan risiko investasi secara menyeluruh dan terintegrasi.

1. Identifikasi Risiko
   a. Bank mengidentifikasi karakteristik risiko yang melekat pada seluruh aktivitas Bank termasuk emerging risk.
   b. Bank mengidentifikasi risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.
   c. Bank mengidentifikasi risiko terhadap seluruh risiko secara berkala serta termasuk sharia risk.
   d. Bank mengidentifikasi risiko terhadap seluruh risiko secara berkala serta termasuk sharia risk.
   e. Membuat metode atau sistem untuk melakukan proses identifikasi risiko pada seluruh produk dan kegiatan usaha.
   f. Bank mengidentifikasi risiko dengan memastikan bahwa risiko dari produk dan kegiatan usaha baru telah melalui penerapan manajemen risiko yang layak sebelum produk atau kegiatan usaha diterbitkan.

2. Pengukuran Risiko
    a. Bank mengevaluasi kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan paling sedikit secara triwulanan atau sewaktu-waktu yang disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan konsisi eksternal yang mempengaruhi kondisi Bank secara langsung.
    b. Bank melakukan pengukuran risiko secara berkala baik untuk produk, portofolio maupun sekuruh aktivitas bisnis Bank.
    c. Bank menyesuaikan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
    d. Bank melakukan pengukuran risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan menggunakan model/metode yang ditetapkan regulator dan atau yang dikembangkan oleh Bank.
    e. Bank mengaplikasikan model/metode pengukuran risiko sesuai pula dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK.
    f. Bank perlu melakukan validasi dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model/metode pengukuran risiko validasi tersebut dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi internal audit dan/atau satuan kerja lainnya yang independent terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model/metode pengukuran risiko.
    g. Bank melakukan evaluasi terhadap sistem pengukuran risiko secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
    h. Bank melakukan stress testing dan kaji ulang hasil stress testing secara berkala untuk mengambil Langkah yang tepat dalam hal perkiraan kondisi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil *stress testing* dan kaji ulang menjadi masukan dalam menetapkan atau mengubah kebijakan dan limit risiko Bank.
3. Pemantauan Risiko
    a. Bank mengevaluasi eksposur risiko melalui pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau berdampak terhadap kondisi permodalan Bank.
    b. Bank menyesuaikan proses pelaporan dalam hal terdapa perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko Bank yang bersifat material.
    c. Bank membuat sistem dan prosedur pemantauan risiko yang antara lain berupa pemantauan terhadap besar eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit risiko internal dan hasil stress testing, serta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
    d. Bank menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*back up*) dan prosedur yang befektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.
    e. Bank memantau konsistensi pelaksanaan penerapan manajemen risiko dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
    f. Setiap unit kerja mempunyai tanggung jawab untuk memantau eksposur risiko di unit kerjanya.
4. Pengendalian Risiko
    a. Bank membuat sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
    b. Bank melakukan proses pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, serta prinsip syariah.
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang mencakup laporan atau informasi antara lain:
    a. Eksposur risiko baik eskposur kuantitatif maupun kualitatif, secara keseluruhan (komposit), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
    b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit.
    c. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Sistem Pengendalian Inten yang Menyeluruh

Bank menetapkan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi *segregation of duty* dan *dual control* dalam setiap aktivitas operasional.

Sistem pengendalian internal dalam penerapan manejemen risiko mencakup:

1. Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.
2. Wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
3. Jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
4. Struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akuran dan tepat waktu.
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lain yang berlaku, prinsip syariah, dan ketentuan internal Bank.
7. Kaji ulang yang independent terhadap kebijakan, kerangka kerja dan prosedur operasional Bank.
8. Pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen.

9. Dokumentasi prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan Bank atas hasil audit.
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhada penanganan kelemahan-kelemagan Bank dan tindakan Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap tahun oleh SKMR dan SKAI. Frekuensi kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko Kredit dan Risiko Investasi

Risiko kredit dan investasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank, antara lain penyediaan dana, surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan (*trade financing*), transaksi nilai tukar, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi. Risiko kredit dapat juga diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi pada satu atau sekelompok debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu.

Dalam pengelolaanya, BSI memiliki perangkat organisasi manajemen risiko kredit dan investasi untuk memastikan aktivitas pembiayaan bank berjalan sesuai prinsip kehati-hatian. Bank menetapkan tiga pilar organisasi dalam proses pembiayaan:
- Pilar pertama: Unit bisnis yang bertugas melakukan inisiasi bisnis.
- Pilar kedua: Unit *risk assessment* yang bertugas menganalisis risiko pembiayaan.
- Pilar ketiga: Unit *financing operation* yang menjaga proses pencairan pembiayaan dilakukan secara independen.

Selain itu, BSI menetapkan unit *recovery* yang bertugas menangani pembiayaan bermasalah. Unit ini beroperasi secara independen terhadap unit bisnis dan unit *risk assessment* yang memberikan pembiayaan.

BSI menyusun kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolaan pembiayaan yang sehat, sesuai prinsip kehati-hatian, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur tersebut mencakup: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis *Portfolio Guideline*, Manual Produk, dan Petunjuk Teknis Operasional untuk setiap segmen pembiayaan.

Bank juga menetapkan limit internal seperti BMPD (*in-house*), *credit line*, kewenangan memutus pembiayaan, portofolio sektor industri, dan limit portofolio investasi surat berharga. Pada tingkat transaksional, Bank menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan, termasuk untuk investasi surat berharga. Bank membuat prosedur penetapan limit risko risiko kredit yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk apperite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Secara lebih rinci, BSI mengelola risiko kredit melalui langkah-langkah berikut:

a. Arah Ekspansi Pembiayaan
   Ekspansi pembiayaan BSI mengacu pada *Portfolio Guideline* , yang meliputi:
   1) *Industry Class*
      Bank mengelola risiko pembiayaan dengan menetapkan klasifikasi sektor industri yang menjadi target pasar. Bank membagi klasifikasi industri (*industry class*) ke dalam empat kelompok: menarik, netral, selektif, dan waspada. Dari 101 sektor industri yang diklasifikasikan, pembiayaan diarahkan pada sektor/bidang usaha dengan klasifikasi menarik dan netral.
   2) *Industry Limit*
      Untuk mengelola risiko konsentrasi portofolio pembiayaan, Bank menetapkan limit portofolio pembiayaan untuk masing-masing sektor industri. Limit ini ditetapkan berdasarkan kriteria *industry class* dari masing-masing sektor.
   3) *Industry Acceptance Criteria*
      Bank menetapkan *Industry Acceptance Criteria* sebagai proses awal untuk menentukan calon nasabah sasaran di suatu sektor industri. Kriteria ini dirumuskan berdasarkan faktor-faktor kritis dari masing-masing sektor industri, baik yang diukur secara kuantitatif maupun kualitatif.
b. Penetapan Metode Akuisisi dan Pengukuran Risiko Nasabah
   Bank menggunakan metode akuisisi melalui *originating system*, *Risk Acceptance Criteria*, skoring pembiayaan ritel, serta *financing risk rating* untuk pembiayaan SME lebih dari Rp1,5 miliar dan pembiayaan *wholesale* .
c. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)
   Bank menggunakan alat bantu seperti *watchlist tools* untuk mendeteksi kondisi nasabah secara dini. Hal ini memungkinkan Bank menetapkan strategi akun, termasuk aktivitas penagihan (*collection*), pemulihan (*recovery*), atau restrukturisasi. Sistem ini juga mencakup *portfolio alert* untuk memantau kinerja portofolio pembiayaan dan memastikan kesesuaian dengan limit risiko yang ditetapkan oleh internal Bank maupun regulator.
d. Pengembangan Alat Bantu Pemulihan (*Rescue Tools*)
   Bank mengembangkan *rescue tools* sebagai alat bantu untuk memantau upaya yang dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah. Alat ini digunakan untuk meminimalkan potensi kerugian bagi Bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dengan prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar, dan itikad baik.
e. Pelaksanaan Uji Stres (*Stress Test*)
   Bank secara berkala dan insidentil melaksanakan uji stres terhadap kondisi ekstrem namun mungkin terjadi (*plausible*). Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dampak buruk dari perubahan kondisi eksternal, seperti perubahan makroekonomi, yang dapat memengaruhi kinerja pembiayaan Bank.

f. Penetapan Jangka Waktu Pembiayaan
   Bank menetapkan jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis pembiayaan, imbal hasil, likuiditas, dan potensi risiko.
g. Evaluasi Kecukupan Limit Risiko
   Bank secara rutin melakukan kajian atau evaluasi terhadap kecukupan limit risiko untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan operasional dan regulasi.
h. Sistem Pengendalian Internal
   Bank menetapkan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pembiayaan guna memastikan efektivitas pengelolaan risiko.

Guna mengintegrasikan data dalam pengelolaan risiko kredit, BSI memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang menyediakan data pengelolaan risiko kredit. Bank melaporkan eksposur risiko kredit secara rutin, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

Risiko Pasar

BSI memiliki eksposur terhadap risiko pasar dari aktivitas treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga, pasar uang, *forex* (*foreign exchange*), serta produk emas karena adanya persediaan emas. Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pergerakan variabel pasar terhadap portofolio Bank.

BSI menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi antara *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan *forex*:
a. *Front Office*
   Unit bisnis atau unit treasury menjalankan fungsi *front office* sebagai pelaksana transaksi *treasury*. Fungsi ini berperan sebagai *first line of defence* yang langsung melakukan transaksi.
b. *Middle Office*
   Unit manajemen risiko menjalankan fungsi *second line of defence*. Tugasnya meliputi *review limit* risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan eksposur risiko pasar.
c. *Back Office*
   Unit kerja operasional menjalankan fungsi *back office* dengan melakukan penyelesaian (*settlement*) dan pembukuan transaksi.

BSI juga menetapkan kebijakan, prosedur, dan *limit* sebagai pedoman penerapan manajemen risiko pasar, meliputi: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury and International Banking*, PTO *Asset and Liability*, PTO *Market Liquidity Risk Tools*, dan Ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya.

Risiko *Benchmark* Suku Bunga
Dalam proses pengelolaan risiko *benchmark* suku bunga, BSI melakukan langkah-langkah berikut:
a. Identifikasi Risiko
   Identifikasi dilakukan pada produk dan aktivitas bank untuk mengetahui adanya risiko *benchmark* suku bunga serta sumber risikonya. Tujuannya agar risiko dapat dikendalikan dan diminimalisir. Hasil identifikasi juga digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dan manajemen.
b. Pengukuran Risiko
   Pengukuran risiko menggunakan dua metode, yaitu metode Standar dan metode internal yaitu *Value at Risk* (VaR). VaR menggambarkan potensi kerugian maksimum akibat pergerakan *yield* surat berharga dalam kondisi pasar yang normal.
c. Pemantauan Eksposur Risiko
   Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan melalui sistem *treasury* Bank.
d. Pengendalian Risiko
   Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan *limit trading* surat berharga. Jika terjadi *unrealized loss* akibat penurunan harga pasar surat berharga, Bank dapat melakukan penjualan atau *cut loss* sesuai mekanisme yang ditetapkan guna menghindari kerugian lebih besar. Penetapan harga pasar surat berharga trading dilakukan secara harian menggunakan harga pasar dari sumber independen.

Risiko Nilai Tukar
BSI mengelola risiko nilai tukar melalui langkah-langkah berikut:
a. Identifikasi Risiko
   Identifikasi dilakukan pada produk dan aktivitas bank untuk mengetahui adanya risiko nilai tukar serta sumber risikonya. Tujuannya agar risiko dapat dikendalikan dan diminimalisir.
b. Pengukuran Risiko
   Pengukuran risiko menggunakan alat *Value at Risk* (VaR) . Bank juga menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai limit yang telah ditetapkan.
c. Pemantauan Eksposur Risiko
   Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan melalui sistem *treasury* Bank.
d. Pengendalian Risiko
   Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit dan penyeimbangan posisi valas (*squaring position*).

Selain itu, Bank melakukan *stress test* untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika terjadi krisis. Secara rutin, Bank melakukan *stress test* risiko pasar untuk menilai kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi.

Dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko, BSI memiliki *Treasury Core System* yang dapat menyediakan data untuk pengukuran risiko pasar. Bank secara rutin melaporkan eksposur manajemen risiko pasar kepada pihak internal maupun eksternal.

Pengelolaan Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book* serta Metodologi Valuasi

a. *Trading Book*
   Pengelolaan portofolio *trading book* dilakukan sesuai limit yang telah ditetapkan dan batasan regulasi. Bank melakukan *mark to market* atas surat berharga *trading* secara harian menggunakan harga pasar dari sumber independen, seperti Penilai Harga Efek Indonesia, *Bloomberg*, atau *Reuters*.
b. *Banking Book*
   Risiko pasar pada banking book adalah risiko penurunan profitabilitas dan nilai ekonomis modal akibat perubahan tingkat imbal hasil pasar dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar pada banking book dilakukan melalui tinjauan ulang harga aset dan liabilitas (*price asset and liabilities*) untuk memastikan imbal hasil yang maksimal.

Risiko Likuiditas

BSI mengelola risiko likuiditas untuk menjaga kecukupan atau ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban Bank. Risiko likuiditas dapat timbul dari aktivitas fungsional pembiayaan, *treasury* dan investasi, serta pendanaan dan penerbitan surat berharga. Risiko ini dibagi menjadi dua kategori utama:

a. Risiko Likuiditas Pendanaan
   Risiko ini muncul ketika Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain. Ketidakmampuan memperoleh arus kas yang cukup sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan oleh:
   1) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif , termasuk penjualan aset likuid.
   2) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
b. Risiko Likuiditas Pasar
   Risiko ini terjadi ketika Bank tidak mampu menutup posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau adanya gangguan di pasar.

Dalam pengelolaanya, BSI menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara lain:

a. *Front Office*: Unit *treasury* sebagai pelaksana transaksi.
b. *Middle Office*: Unit manajemen risiko yang bertugas melakukan *review limit* dan pengukuran risiko.
c. *Back Office*: Unit operasional yang bertugas melakukan penyelesaian (*settlement*) dan pembukuan transaksi.

BSI menetapkan kebijakan, prosedur, dan limit sebagai pedoman dalam pengelolaan risiko likuiditas, meliputi: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury* dan *International Banking*, PTO *Asset and Liability*, PTO *Market and Liquidity Risk Tools*, serta menetapkan indikator/limit likuiditas sebagai berikut:

- Giro Wajib Minimum (GWM)
- *Safety Level*
- Deposan Inti
- *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)
- Aset Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL-NCD)
- Aset Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

BSI mengelola risiko likuiditas melalui langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Risiko Likuiditas
   Identifikasi dilakukan pada produk dan aktivitas Bank untuk mendeteksi potensi risiko likuiditas.
b. Penempatan Dana pada Aset Likuid Berkualitas Tinggi
   Bank menempatkan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.
c. Pengukuran Rasio-Rasio Likuiditas
   Bank melakukan pengukuran rasio-rasio likuiditas seperti proyeksi *cashflow*, *liquidity gap*, LCR, dan NSFR.
d. Pemeliharaan Akses ke Pasar Uang Antar Bank Syariah
   Bank memastikan akses ke pasar uang antar Bank Syariah untuk mendukung likuiditas.
e. Pelaksanaan *Stress Test* Risiko Likuiditas
   Bank melakukan *stress test* risiko likuiditas secara berkala untuk menilai kecukupan likuiditas dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi, termasuk penyusunan *Recovery Plan*.
f. Penetapan Limit Risiko Likuiditas
   Bank menetapkan limit risiko likuiditas sesuai kondisi internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
g. Pemantauan Rasio Likuiditas
   Bank memantau rasio likuiditas secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan.
h. Penetapan Indikator Peringatan Dini dan Rencana Pendanaan Darurat (LCP)
   Bank menetapkan indikator peringatan dini serta *Liquidity Contingency Plan* (LCP) melalui mekanisme seperti: Penggunaan instrumen pasar uang, Penjualan surat berharga, Peningkatan nisbah imbal hasil dana, dan Penggunaan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia.
i. Pemantauan Indikator Eksternal
   Bank memonitor pergerakan indikator eksternal seperti nilai tukar USD/IDR, *yield* surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, dan informasi pasar terkini.

BSI memiliki *Management Information System* (MIS) yang menyediakan data dan informasi untuk pengukuran risiko likuiditas. Bank secara berkala menyampaikan laporan eksposur risiko likuiditas kepada pihak internal maupun eksternal.

Risiko Opersional

Bank terekspos risiko operasional akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat terjadi pada seluruh aktivitas Bank, sehingga BSI menerapkan

framework pengelolaan risiko operasional yang komprehensif di seluruh organisasi termasuk pada semua lini bisnis Bank baik di *first-line unit*, *second-line unit*, maupun *third-line unit* .

a. Pemisahan Fungsi dan Tanggung Jawab
   Bank menerapkan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) melalui pemisahan fungsi *maker*, *checker*, dan *approver*/otorisator, serta mekanisme *dual control* dalam setiap transaksi.
b. Strategi Pengelolaan Risiko Operasional
   Bank menetapkan strategi untuk mengelola aktivitas yang memiliki eksposur risiko operasional yang signifikan. Kebijakan manajemen risiko operasional diinternalisasikan ke dalam proses bisnis dan aktivitas pendukung Bank. Prosedur turunan dari kebijakan ini mencakup pengendalian operasional umum yang berlaku di seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung Bank, serta pengendalian operasional spesifik yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lini bisnis dan aktivitas pendukung bisnis.

   Selain itu, Bank menetapkan kebijakan lain sebagai panduan antara lain *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kelangsungan operasional Bank saat terjadi bencana (*disaster*), Kebijakan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) untuk penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Enhanced Due Diligence* (EDD), Kebijakan manajemen risiko anti-fraud sebagai panduan penerapan anti-*fraud*, Ketentuan pengelolaan risiko kerjasama dengan pihak lain, serta Kebijakan manajemen risiko teknologi informasi.

   Bank mengevaluasi kebijakan, standar prosedur, dan petunjuk teknis secara berkala minimal satu tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi internal maupun eksternal.
c. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Operasional
   Bank melakukan identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor penyebabnya pada seluruh aktivitas fungsional dan produk Bank antara lain melalui *Risk Self Assessment* (RCSA), *Risk Mapping*, dan *Event Analysis*.

   Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko operasional yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas termasuk risiko baru (*emerging risk*). Pengukuran risiko dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif seperti *Risk Control and Self Assessment* (RCSA), *Key Risk Indicators* (KRI), dan *Loss Event Database* (LED). Bank juga mengembangkan basis data mengenai kerugian akibat risiko operasional dan isu-isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian di masa mendatang.
d. Mitigasi Risiko Operasional
   Untuk memitigasi risiko operasional Bank menerapkan langkah-langkah berikut yaitu pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya (*outsourcing*) pada sebagian kegiatan operasional Bank.

Bank secara berkala meninjau ulang prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontinjensi, dan praktik operasional lainnya. Bank menetapkan limit transaksi operasional untuk menjalankan prinsip kehati-hatian tanpa menghambat kelancaran aktivitas operasional. Evaluasi limit risiko operasional dilakukan secara berkala meliputi Limit Transaksi Operasional Kantor Pusat, Region, Area, dan Cabang, Limit Transaksi *Electronic Channel* (*Internet Banking*, ATM, dan *Mobile Banking*), *Limit Procurement*, Limit Kustodian , serta *Limit Bulk Transaction*.

***Business Continuity Management* (BCM)**

BSI menerapkan BCM untuk menjamin keberlangsungan operasional Bank saat terjadi bencana (*disaster*). Pada tahun 2024 Bank melakukan langkah-langkah penguatan BCM antara lain pemutakhiran Standar Prosedur BCM, pemutakhiran *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Risk Assessment* (RA) serta pembuatan *safety briefing* penanganan bencana, pelaksanaan uji coba *Emergency Response Plan* untuk bencana kebakaran, pelaksanaan uji coba *Business Continuity Plan* (BCP) Kantor Pusat melalui *Business Recovery Center* (BRC) Fatmawati , pelaksanaan uji coba *Call Tree* dan *Table Top* baik di Kantor Pusat maupun jaringan cabang, pelaksanaan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) aplikasi kritikal BSI secara periodik, sosialisasi BCM kepada unit kerja di Kantor Pusat dan jaringan cabang, sertifikasi ISO 22301 BCM, serta pembentukan *Crisis Management Team* (CMT) IT untuk memperkuat organisasi BCM.

***Tools* Pengelolaan Risiko Operasional**

BSI menerapkan alat pengelolaan risiko operasional berikut:

a. *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
   RCSA digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan memitigasi risiko operasional. RCSA dilakukan secara mandiri oleh unit kerja dan direviu oleh SORH/RBC. Proses RCSA dilakukan secara *end-to-end* untuk memastikan potensi risiko diidentifikasi secara menyeluruh dan mitigasi dilakukan secara dini. RCSA dilakukan secara berkala setiap bulan.
b. *Key Risk Indicator* (KRI)
   KRI digunakan untuk mendeteksi secara dini indikator-indikator yang dapat meningkatkan eksposur risiko operasional dengan menetapkan *threshold* tertentu. Pemantauan KRI dilakukan oleh unit kerja setiap bulan.
c. *Loss Event Database* (LED)
   LED digunakan untuk mencatat kejadian kerugian operasional yang dialami Bank. Pencatatan dilakukan langsung saat terjadi insiden dan dilaporkan setiap bulan.
d. *Control Testing* (CT)
   CT digunakan untuk menguji kecukupan kontrol operasional dan menetapkan langkah perbaikan secara berkelanjutan. CT telah diterapkan dalam proses bisnis pembiayaan gadai, mikro, konsumer kendaraan, komersial, korporasi, dan operasional cabang. CT dilakukan oleh RBC dan DCOR melalui *onsite review* secara berkala.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

Risiko hukum yang timbul dapat berupa tuntutan kerugian materil ataupun immateril apabila Bank tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi tuntutan kerugian terhadap Bank dalam jumlah yang cukup material, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Pengukuran risiko hukum dilakukan untuk mengetahui potensi kerugian Bank akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan, serta ketiadaan dan/atau perubahan ketentuan. Bank menggunakan indikator/parameter pengukuran risiko hukum, meliputi:

1. Potensi kerugian akibat tuntutan litigasi.
2. Pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan produk dan aktivitas Bank tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya:

a. Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
c. Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
d. Menentukan kebijakan cadangan perkara.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah. Dalam industri perbankan, Bank wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan yang mengatur Bank, seperti:

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
b. Kualitas Aset Produktif;
c. Penyisihan Penghapusan Aset (PPA);
d. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
e. *Good Corporate Governance* (GCG); dan
f. Rencana Bisnis Bank (RBB).

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat memengaruhi kelangsungan Bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemahaman tentang GCG dan kode etik.
b. Memperkuat pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
c. Menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d. Meningkatkan pelaksanaan *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian Uang (APU), dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
e. Memperkuat pelaksanaan sertifikasi kepatuhan.
f. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.
g. Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk mereviu dan menganalisis kepatuhan produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank, antara lain:

a. Kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Bank, seperti pemberitaan negatif di media massa dan keluhan nasabah.
b. Hal-hal lain yang juga dapat menurunkan reputasi Bank, seperti penurunan kinerja Bank, kelemahan dalam tata kelola Bank, pelanggaran etika bisnis, serta gugatan hukum.

Untuk menghadapi risiko ini, Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko reputasi yang signifikan. Bank juga menetapkan prosedur komunikasi guna menyikapi berita atau publikasi negatif, serta mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif. Selain itu, Bank menetapkan prosedur penanganan keluhan nasabah dan strategi penggunaan media yang efektif untuk merespons berita negatif.

Sebagai langkah antisipasi, Bank memiliki protokol untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis. Protokol ini mencakup struktur manajemen krisis dan standar prosedur manajemen krisis.

Bank melakukan identifikasi risiko reputasi dengan menggunakan berbagai sumber informasi, seperti pemberitaan media massa, opini publik di jejaring sosial, pengaduan nasabah, dan survei kepuasan nasabah, termasuk memperhitungkan jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian risiko

reputasi. Untuk memantau risiko reputasi, Bank menggunakan indikator peringatan dini, seperti jumlah dan cakupan publikasi negatif serta frekuensi keluhan nasabah. Setiap unit kerja wajib melaporkan kejadian di unit kerjanya masing-masing yang memengaruhi citra atau reputasi Bank kepada unit kerja yang bertanggung jawab mengelola komunikasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Bank menetapkan mekanisme untuk melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi. Pengendalian risiko reputasi dilakukan melalui dua pendekatan utama:

a. Pencegahan kejadian yang dapat menimbulkan risiko reputasi , melalui:
   1) Tindak lanjut dan penyelesaian keluhan nasabah serta perkara hukum yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko.
   2) Penguatan komunikasi eksternal dan internal untuk mengendalikan potensi eksposur risiko reputasi.
   3) Komunikasi atau edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan guna membentuk reputasi positif.
b. Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko reputasi, yaitu segala respons Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi lebih lanjut.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik dapat bersumber dari berbagai faktor, antara lain kelemahan dalam proses formulasi stratejik, ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang tidak memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Untuk menghadapi risiko ini, Bank menetapkan prosedur yang memadai guna mengidentifikasi dan merespons perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, Bank menetapkan limit risiko stratejik secara umum, termasuk batasan penyimpangan dari target bisnis yang telah ditetapkan, seperti:

- Limit deviasi anggaran.
- Limit deviasi target waktu pencapaian atau penyelesaian inisiatif strategis.

Bank melakukan identifikasi risiko stratejik menggunakan data dari regulator, media massa, serta laporan realisasi terhadap target bisnis dan kinerja unit kerja. Analisis risiko dilakukan terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pasar baru atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa.

Bank juga mengidentifikasi dan mencatat deviasi atau penyimpangan sebagai akibat pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang tidak terealisasi atau tidak efektif, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan Bank. Selain itu, Bank mencatat dan menatausahakan pengalaman serta penyimpangan pelaksanaan rencana stratejik. Untuk memastikan posisi kompetitifnya di industri, Bank secara berkala mengevaluasi kinerjanya. Pengendalian risiko stratejik dilakukan melalui *performance review* atas realisasi bisnis.

Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi Tingkat imbal hasil yang diterima dari Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari Bank kepada bank lain. Pengelolaan risiko imbal hasil bertujuan untuk meminimalkan perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga melalui pengelolaan tingkat imbal hasil sehingga tetap kompetitif terhadap pasar.

Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko imbal hasil yang signifikan dengan mempertimbangkan:

a. Kondisi ekonomi dan kondisi pasar serta dampaknya pada risiko imbal hasil Bank.
b. Keahlian Bank untuk menghasilkan laba pada pasar tertentu dan kemampuan mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko imbal hasil pada pasar tersebut.
c. Bauran dan diversifikasi portofolio Bank.

Bank menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko imbal hasil mencakup organisasi aset dan *liability management*, komposisi aset dan kewajiban dan pengukuran risiko. Bank memiliki prosedur antara lain mengenai penilaian mismatch antara aset dan kewajiban berdasarkan waktu penyesuaian imbal hasil pembiayaan dan dana pihak ketiga serta mekanismenya baik untuk pembiayaan maupun dana pihak ketiga. Bank menetapkan limit untuk mengelola risiko imbal hasil secara konsisten, antara lain untuk membatasi konsentrasi sumber pendanaan, instrumen, segmen pasar atau imbal hasil tertentu.

Bank melakukan pemantauan eksposur risiko imbal hasil secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko termasuk potensi penurunan pendapatan imbal hasil. Bank melakukan pemantauan eksposur risiko imbal hasil melalui laporan *gross revenue*, evaluasi realisasi pendapatan imbal hasil bersih terhadap target dan laporan lainnya.

Recovery Plan

Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) adalah rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan (*financial stress*) yang mungkin terjadi di BSI. BSI telah menyiapkan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang termasuk di dalamnya *trigger level* dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) untuk mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank apabila terjadi *financial stress*.

BSI memutakhirkan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) setiap tahun. Hal ini selain untuk memenuhi kewajiban sesuai regulasi, juga untuk menjaga Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) tetap sesuai dengan kondisi terkini dan mampu menjadi panduan pada saat Bank mengalami kesulitan keuangan (*financial stress*).

Penilaian Risiko

BSI melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap risiko inheren serta kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasionalnya. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) mengenai kondisi risiko usaha dan potensi kerugian yang dihadapi BSI di masa mendatang dalam periode tertentu.

Berdasarkan hasil penilaian per 31 Desember 2024, peringkat komposit profil risiko Bank adalah 2 (dua), dengan predikat risiko inheren "*Low to Moderate*" dan predikat kualitas penerapan manajemen risiko "*Satisfactory*".

Profil Risiko	Juni 2024			Desember 2024		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko Komposit	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko Komposit
Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Pasar	*Low*	*Satisfactory*	1	*Low*	*Satisfactory*	1
Risiko Likuiditas	*Low*	*Satisfactory*	1	*Lowko*	*Satisfactory*	1
Risiko Operasional	*Moderate*	*Fair*	3	*Moderate*	*Fair*	3
Risiko Hukum	*Low*	*Satisfactory*	1	*Low*	*Satisfactory*	1
Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Stratejik	*Low*	*Satisfactory*	1	*Low*	*Satisfactory*	1
Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Investasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Peringkat Komposit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2

Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

BSI melakukan Pengukuran *Risk Maturity Level* (RML) menggunakan referensi dari *The Risk Management Society – Risk Maturity Model* (RIMS – RMM) yang dikombinasikan dengan pendekatan RMI dari Kementerian BUMN. Pengukuran terdiri dari 2 aspek yaitu Aspek Dimensi dan Kinerja. Aspek Dimensi terdiri atas 5 (lima) atribut sebagai parameter yang menggambarkan proses penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di semua lini perusahaan. Aspek kinerja terdiri dari Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir dan Peringkat Komposit Risiko.

Hasil penilaian RML tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024, BSI berada pada Level 4 dengan *score* 4,33 yang berarti manajemen risiko memasuki *fase* praktik yang lebih baik, mencakup:

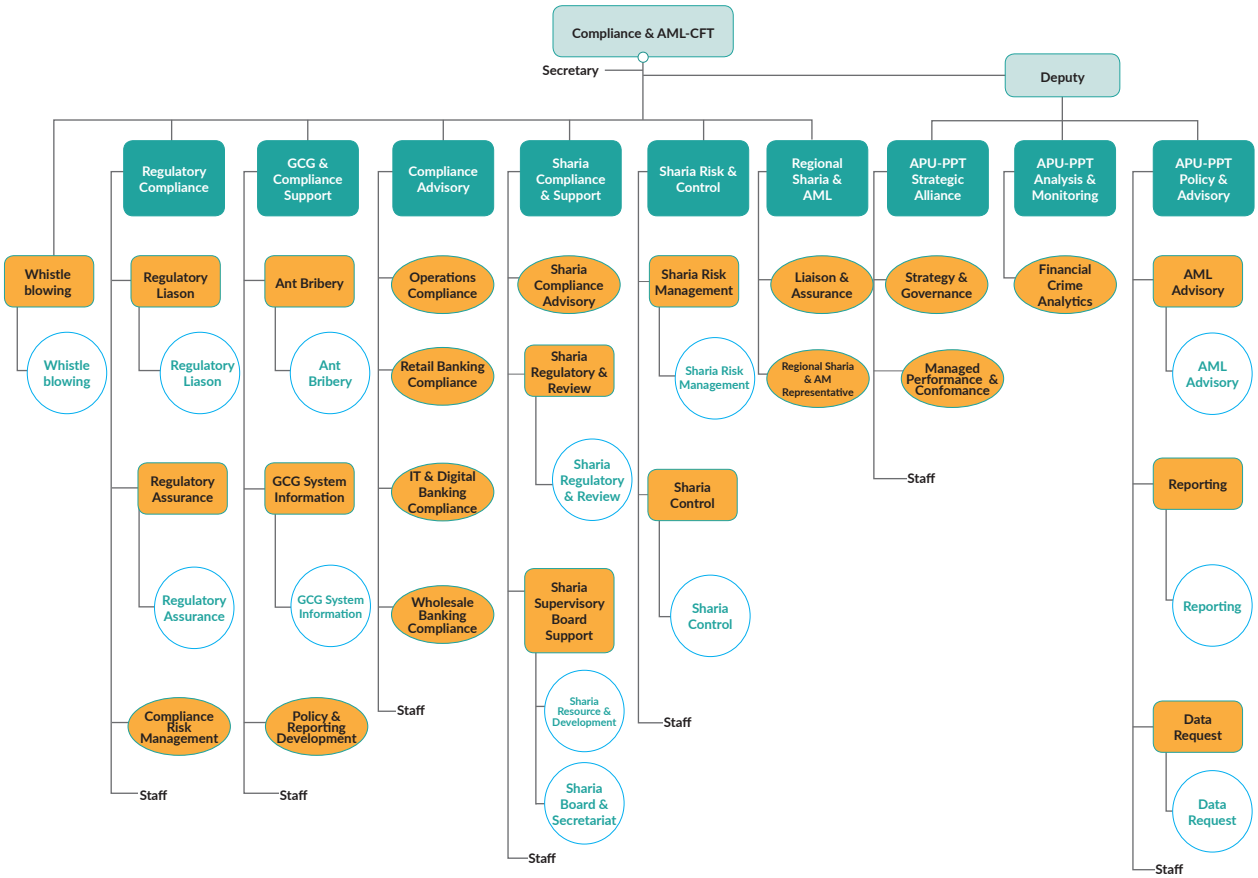
1. Penerapan seluruh dimensi praktik manajemen risiko sesuai standar global industry.
2. Budaya risiko lebih luas dan makin terintegrasi.
3. Kerangka kerja manajemen risiko diimplementasikan cukup efektif.
4. Sistem informasi manajemen risiko telah memadai.
5. Evaluasi pencapaian kinerja telah dilakukan secara berkala.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penelaahan dan diskusi bersama Manajemen, Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, Internal Audit dan Eksternal Auditor, serta beberapa Unit terkait, Direksi dan Dewan Komisaris menilai pada tahun 2024 manajemen risiko telah berjalan secara memadai.

Fungsi Kepatuhan

Struktur Organisasi



Profil Kepala Fungsi Kepatuhan



Rosalina Dewi T

Kepala Fungsi Kepatuhan

Jakarta, 23 Juli 1979/usia 45 tahun per Desember 2024

Warga Negara Indonesia

45 Tahun

Berdomisili di Tangerang, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Ketetapan No. 02/06343-SK/HC-BSI tanggal 03 Juni 2022

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum Universitas Indonesia (2001)
- Magister Economics & Islamic Finance Universitas Indonesia (2006)
- Magister Notary Public Universitas Indonesia (2014)

Sertifikasi

Sertifikat Manajemen Risiko Perbankan Level 6

Pengalaman Kerja

- Group Head Compliance PT Bank Syariah Indonesia TBk. 2022-sekarang
- Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 2021 -2022
- Investor Relations Department Head PT. Bank BRI Syariah, Tbk. 2018 - 2019
- Branch Manager PT. Bank BRI Syariah, Tbk. 2016 - 2018
- Corporate Legal Department Head – Corporate Secretary Group PT. Bank BRI Syariah, Tbk. 2008 - 2014
- Legal and Investor Relations Team Leader – Corporate Secretary Group PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk. 2004 - 2006

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
   a. Melakukan sosialisasi regulasi dengan menggunakan media seperti memo, email atau media komunikasi internal pegawai. Jika terdapat regulasi eksternal baru, maka regulasi tersebut akan diumumkan dan disosialisasikan ke unit kerja terkait dan/atau seluruh karyawan BSI.
   b. Melakukan analisis dan menyusun *resume* atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, OJK-Pasar Modal, LPS atau Peraturan eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head terkait.
   c. Melakukan sosialisasi regulasi secara *online/virtual* terhadap unit kerja terkait jika terdapat regulasi/ ketentuan yang baru.
   d. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan Working *Group Policy & Procedure* (WPP).
2. Produk dan Aktivitas Baru Bank
   Melaksanakan pendampingan/klinik atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank dengan Unit Kerja terkait yang termasuk dalam kriteria PAB ke dalam RBB.
3. *Compliance Testing*
   Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang terkait dengan pembiayaan maupun non pembiayaan, serta memberikan reviu, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.
4. *Compliance Monitoring*
   a. Melaksanakan pengkinian sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga, serta penguatan dan *enhancement* Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
   b. Unit Kerja Kepatuhan melakukan *monitoring* terhadap prudential *banking ratio* diantaranya rasio NPF, BMPD, GWM, PDN, dan KPMM;
   c. Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen BSI atas hasil temuan OJK, BPK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.
5. *Good Corporate Governance* (GCG)
   a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan peraturan yang terdapat pada Peraturan OJK, Peraturan BI dan Surat Edaran BI tentang Penerapan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS).
   b. Pemenuhan *Governance Structure* dan Kebijakan Tata Kelola sesuai dengan peraturan regulator.
   c. GCG Self Assessment dan Pelaporan Pelaksanaan GCG dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator yaitu POJK No. 17 Tahun 2023, POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
   d. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* di BSI.
6. Syariah *Compliance*
   a. Memastikan seluruh produk dan jasa Bank, Pedoman Operasional produk dan jasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
   b. Melakukan asistensi terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru.
   c. Melakukan asistensi terhadap pembiayaan dalam jumlah besar yang menjadi keputusan direksi.
   d. Melakukan pemastian terhadap usulan pengajuan kebijakan dan putusan Direksi terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku.
   e. Pemastian pelaksanaan prinsip syariah dalam tahapan ex-post (kerjasama dengan SKAI)
   f. Melakukan uji petik ke kantor cabang secara sampling untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di kantor cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.
7. Melaksanakan *Compliance Assurance* terhadap aktivitas Operasional Bank. *Compliance assurance* dilaksanakan dalam upaya menjaga agar keputusan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   a. Pembiayaan
      - Melakukan reviu kepatuhan pembiayaan, pelaksanaan rapat teknis dan pemberian opini kepatuhan pembiayaan pada Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
      - Melakukan kaji ulang kepatuhan terhadap pembiayaan debitur besar yang telah cair dalam rangka memastikan kepatuhan proses pencairan dan pemenuhan perjanjian nasabah dengan Bank.
   b. Jaringan Kantor Bank
      - Memastikan persiapan operasional atas pembukaan, pemindahan alamat lokasi, peningkatan status kantor bank telah memenuhi persyaratan melalui penerbitan *compliance checklist* yang ditetapkan regulator
      - *Memonitoring* pemenuhan RBB terkait realisasi pengembangan jaringan kantor
   c. Pengendalian Biaya
      - Memastikan kepatuhan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) melalui reviu dan opini pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa
      - Memastikan pengeluaran biaya-biaya lain dalam operasional bank yang dapat meningkatkan pengendalian biaya yang efisien

- Melaksanakan kaji ulang kepatuhan dalam rangka pengendalian biaya yang dilakukan melalui uji sampling

d. Aktivitas Operasional Lain
   - Melakukan *compliance testing* terhadap pelaksanaan proses aktifitas operasinal
   - Memberikan opini kepatuhan terhadap kegiatan/ aktifitas operasional yang memerlukan pendapat dari SKK.

Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dan operasional bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh komitmen kepada pihak lain telah dilaksanakan.

8. Penerapan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang bertujuan untuk menciptakan manajemen kepatuhan yang lebih efektif berdasarkan standar internasional. Sertifikasi ini dilaksanakan pada lingkup proses *Anti Money Laundering* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Group (AMG).

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPPSPM)

Menindaklanjuti Indonesia sebagai anggota *Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing* (FATF) yang ke-40, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force* (FATF) pada 5 April 2024. Penerbitan Keppres tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) yang merupakan kejahatan lintas batas negara. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu dilakukan komitmen internasional yang tercantum dalam standar internasional di bidang TPPU dan TPPT.

Di samping itu tujuan Keppres ini memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penurunan emisi serta juga meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan nilai ekonomi dari proses bisnis penangkapan, pengangkutan, dan penyimpanan karbon.

Bank Syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional dengan jaringan nasional dan global mempunyai peranan penting untuk memastikan integritas transaksi keuangan atas seluruh produk dan layanan yang digunakan oleh nasabah serta membantu penegakan hukum dalam menjalankan program anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) hal ini tidak hanya sebagai wujud pemenuhan komitmen kepatuhan atas regulasi, juga sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar syariah.

Penerapan Program APU PPT & PPPSPM

Bank dalam melakukan penerapan program APU PPT dan PPPSPM sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *International Best Practices* yang mencakup 5 pilar APU PPT & PPPSPM:

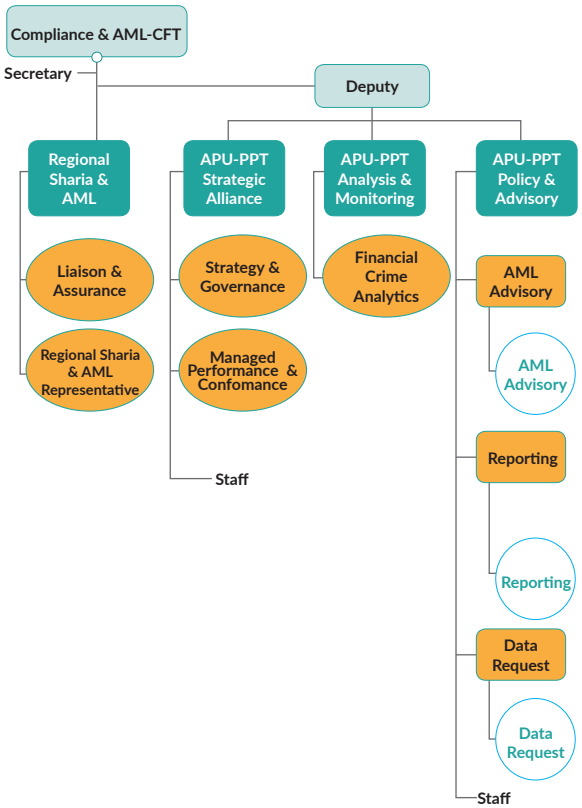
1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
   Direksi sebagai Dewan Pengarah terus melakukan pemantauan atas pemenuhan komitmen Bank terkait dengan Sistem Manajemen Kepatuhan, Budaya Kepatuhan, aspek Tata Kelola sesuai dengan sasaran dan arah strategis organisasi secara berkelanjutan.
2. Kebijakan dan prosedur
   Implementasi Pilar 2 sebagai pelaksanaan fungsi ex-ante sesuai ISO 37301:2021 adalah memastikan kebijakan kepatuhan, sasaran kepatuhan yang selaras dengan nilai, sasaran dan strategi organisasi telah dikomunikasikan, pelaksanaannya telah mempertimbangkan isu eksternal untuk pihak yang berkepentingan sehingga dapat memitigasi risiko kepatuhan terkait APU PPT & PPPSPM.
3. Pengendalian internal
   Penerapan pengendalian internal untuk mengelola kewajiban kepatuhan dan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkala sehingga dapat tergambar dalam tinjauan manajemen untuk peluang continuous improvement dan kebutuhan terhadap perubahan pada sistem manajemen kepatuhan.
4. Sistem informasi manajemen
   Meliputi pengembangan sistem APU PPT & PPPSPM beserta pelaporan APU PPT & PPPSPM kepada regulator.
5. Sumber daya manusia dan pelatihan
   Peningkatan kesadaran/awareness terkait APU PPT & PPPSPM terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan, sehingga seluruh SDM mematuhi kewajiban kepatuhan, kebijakan, prosedur dan dapat melaporkan segala isu terkait dengan APU PPT & PPPSPM. Disamping itu melakukan komunikasi dengan *stakeholder* internal maupun eksternal terus berupaya dilakukan peningkatan untuk memastikan setiap pegawai berkontribusi terhadap *continuous improvement* dari sistem manajemen kepatuhan.

Struktur Organisasi APU PPT & PPPSPM

Bank telah memiliki kebijakan dalam menerapkan program program APU PPT dan PPPSPM yang disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta dalam pelaksanaannya diawasi secara aktif oleh Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan penerapan APU PPT dan PPPSPM PT Bank Syariah Indonesia Tbk dikelola oleh Unit kerja Compliance & AML CFT Group (CAC).

Unit kerja Compliance & AML CFT Group (CAC) berada di Kantor Pusat yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun pengukuran efektivitas penerapan program APU PPT dan PPPSPM di *outlet*/ cabang dilakukan oleh AMLO yang berada di setiap Region, yang secara intensif berkoordinasi dengan unit kerja Compliance & AML CFT Group (CAC) di Kantor Pusat.

Adapun Struktur Organisasi APU PPT & PPPSPM dapat digambarkan sebagai berikut:



Program APU PPT & PPPSPM Tahun 2024

Sesuai dengan ketentuan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.08 tahun 2023 serta peraturan PPATK maka telah diterapkan program APU PPT & PPPSPM melalui:

1. Penyusunan, penyesuaian, pembaharuan, dan memastikan kecukupan APU PPT dan PPPSPM di seluruh ketentuan internal Bank Syariah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan Uji Petik dan Sosialisasi APU PPT & PPPSPM yang dilakukan oleh AMLO di outlet/cabang berdasarkan *Risk Based Approach*;
3. Peningkatan kualitas dan monitoring terhadap kewajiban pelaporan terkait APU PPT dan PPPSPM, antara lain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), termasuk kewajiban pelaporan APU PPT dan PPPSPM lainnya sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement* (SLA) yang ditentukan Regulator;
4. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU PPT dan PPPSPM, antara lain:
   a. Pengembangan sistem aplikasi Simple BSI yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan uji petik APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan oleh AMLO;
   b. *Enhancement* Aplikasi New AML sesuai perkembangan teknologi pada penerapan APU PPT dan PPPSPM, terdiri atas 2 tahapan yaitu: tahap 1 *Screening* dan *Risk Rating* dan tahap 2 *Transaction Monitoring* dan *Reporting*;
5. Peningkatan *awareness* dan kompetensi penerapan program APU PPT dan PPPSPM seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia melalui: sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*, antara lain:
   a. *Refreshment* Implementasi APU PPT & PPPSPM Region I s.d X.
   b. Webinar APU PPT & PPPSPM Series 1 s.d 4.
   c. *Training For Trainer* (TFT): *Banking Operations & Service School Batch I – V.*
   d. Learning Hub APU PPT & PPPSPM RO VII Semarang.
   e. Pembuatan *awareness* APU PPT & PPPSPM dalam bentuk video/komik/infografis yang disampaikan ke seluruh region melalui AMLO setiap bulannya.
6. Peningkatan kualitas data nasabah melalui program perbaikan dan/atau pengkinian data yang berfokus pada ketersediaan informasi nasabah secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh;
7. BSI telah mendapatkan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dengan ruang lingkup APU PPT & PPPSPM pada tahun 2022, dan telah melaksanakan proses *Surveillance* Tahun ke-2 (audit pengawasan) pada bulan November 2024 serta berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37301:2021 dengan status dapat dilanjutkan.

8. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain:
   a. *Presidential Lecture* dalam rangka memperingati 22 Tahun Gerakan APU PPT Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 April 2024.
   b. Kegiatan Edukasi APU PPT & PPPSPM ke beberapa sekolah di Kabupaten Klungkung bersama PPATK. Tim PPATK hadir bersama dengan mitra yaitu BSI dan Pegadaian yang turut memeriahkan kegiatan PPATK Mengajar di SMKN 1 Klungkung dan SMAN 2 Semarapura pada tanggal 20 Februari 2024.
   c. *Groundbreaking* Desa BSI Semoyo di Desa Semoyo, cecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), BSI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Non-Governmental Organization* (NGO), serta masyarakat setempat melaksanakan program penanaman pohon. Jenis pohon yang ditanam adalah pohon produktif dengan total 10.671 untuk Desa Semoyo dan lainnya. Kegiatan ini ditargetkan dapat mengurangi emisi karbon.
   d. BSI bersama dengan PPATK serta para Guru Besar, Regulator, Pihak Pelapor lainnya, Konsultan, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul di Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024 untuk memulai pembahasan *Financial Integrity Rating* (FIR) 2024. Acara ini menjadi momen penting dalam upaya bersama untuk meningkatkan integritas sistem keuangan Indonesia. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Perkara Hukum

Tabel Perkara Hukum

No.	Perkara Penting	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	289	19	-
2.	Dalam proses penyelesaian	161	4	-
Total		**450**	**23**	**-**

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

No	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1	**No perkara:** 404/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst **Para Pihak :** Penggugat : PT Atriumasta Sakti Tergugat : BSI (dahulu BSM) **Ringkasan perkara :** Gugatan yang diajukan oleh PT Atriumasta Sakti nasabah pembiayaan karena BSI belum melaksanakan putusan Basyarnas (Badan Arbirase Syariah Nasional) yang telah menghukum BSI untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 878.791.366,- kepada ybs. **Nilai gugatan:** Materiil sebesar Rp 9.441.701.946,- Immateriil sebesar Rp 300.000.000.000,-	1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat menerima dengan alasan bahwa putusan tersebut telah dimohonkan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga diminta menunggu pelaksanaan eksekusinya. 2. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakara Pusat.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil/ aanmaning kepada BSI untuk melaksanakan amar putusan dimaksud. BSI telah menghadiri sidang aanmaning, namun Penggugat tidak hadir. Sampai dengan saat ini BSI belum menerima relaas panggilan sidang/ aanmaning kembali.	Membayar ganti rugi

No	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
2	**No perkara:** 519/Pdt.g/2023/PN.Bdg **Para Pihak:** Penggugat: Sukmawati Tergugat I: Anton Mashary Tergugat I: PT BSI Turut Tergugat I: KPKNL Turut Tergugat II: Gina Riswara Koswara,SH **Ringkasan Perkara:** Gugatan perlawanan terhadap lelang eksekusi yang diajukan oleh BSI. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki perjanjian dengan Direktur PT Lucky Sakti (Anton Mashary/Tergugat I) terkait aset Penggugat yang dijadikan agunan di BSI. **Nilai gugatan:** Materiil sebesar Rp 350.000.000.000,- Immateriil sebesar Rp 500.000.000.000,-	1) Pengadilan Negeri Bandung telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. 2) Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung. Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI. Dalam perkara ini posisi BSI kuat dimana BSI telah memenangkan perkara di PN dan PT.	Terhadap pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penggugat, BSI telah mengajukan Kontra Memori Kasasi. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI.	Tidak ada
3	**No perkara:** 655/Pdt.G/2024/PN.Tgr **Para Pihak:** Penguggat I:Enung Zauhar Insiah Penggugat II: Dessy Nur Fitriani Penggugat III: Andri Taufik Ismail Penggugat IV: Annisa Nurul Hasanah Penggugat V: Syifa Noorlia Fatimah/ Penggugat VI: Ghyna Ade Noor Maya/ Tergugat I: BSI KCP Tangerang Jatiuwung d/h BSM Tergugat II:Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM) Tergugat III: Notaris Siti Rohmah Caryana, SH Tergugat IV: Notaris Lilek Zaenah, SH **Ringkasan Perkara:** Para Penggugat keberatan dengan lelang yang dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM) dan Para Penggugat merasa tidak pernah melakukan jual beli tanah berupa SHGB No. 222 kepada Koperasi Sumber Insan Mandiri (KOPSIM)/Tergugat II **Nilai gugatan:** Materiil sebesar Rp 20.700.000.000,- Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	Menghadiri dan monitor proses persidangan dimaksud	Tidak ada

No	Pokok Perkara / Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
4	**No perkara:** 601/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Utr **Para Pihak:** Penggugat: Ronald Suwandri Tergugat: BSI Turut Tergugat I: PT Jaya Makmur Hasta Turut Tergugat II: Paul Setiawan Turut Tergugat III: Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara **Ringkasan Perkara:** Gugatan terkait dengan keberatan atas lelang terhadap aset milik Penggugat untuk pelunasan kewajiban nasabah atas nama PT Jaya Makmur Hasta **Nilai gugatan:** Materiil sebesar Rp 10.000.000.000,- Immateriil sebesar Rp 30.000.000.000,-	Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Terdapat potensi risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI.	Menghadiri dan monitor proses persidangan dimaksud	Tidak ada

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2024, tidak terdapat perkara hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2024, BSI tidak memiliki anak Perusahaan sehingga tidak terdapat informasi perkara hukum yang sedang dihadapi oleh anak Perusahaan.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Kesalahan Pelaporan			
1	**Jenis Pelanggaran**	Kesalahan Pelaporan Jabatan di Laporan SDM SMT	
	Otoritas	OJK	
	Tanggal Pengenaan	01 Februari 2024	
	Nominal	Rp600.000	
	Unit Kerja Terkait	HCS	
	Keterangan	1. Pada saat pelaporan data bulanan periode Juni 2023 (yang dilaporkan pada bulan Juli), proses *recovery* sistem i-*port* HC belum selesai sehingga pelaporan dilakukan secara manual sehingga terdapat beberapa data yang belum ter-*update* 2. Saat ini pengolahan data dan validasi pelaporan menggunakan aplikasi i-*port* HC yang terintegrasi dengan SIP, sehingga sumber data pelaporan dapat lebih *update* dan akurat	
		vide	Surat OJK Nomor 8/PB.223/2024 tanggal 01 Februari 2024

Kesalahan Pelaporan			
2	Jenis Pelanggaran	Kesalahan Pelaporan Data SLIK	
	Otoritas	OJK	
	Tanggal Pengenaan	01 Februari 2024	
	Nominal	Rp5.500.000	
	Unit Kerja Terkait	FOG	
	Keterangan	1. Telah dilakukan pembaharuan tanggal jatuh tempo dan akan dilakukan penutupan pada rekening tersebut, hal ini dikarenakan rekening Hasanah *Card* tidak terdapat transaksi atau tidak aktif 2. Untuk proses perbaikan kolektibilitas yang dilakukan setiap awal bulan perlu dilakukan *cross check* silang antara petugas pelaporan dengan unit risk 3. Akan dilakukan cleansing secara berkala terhadap inputan kode jenis agunan yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan serta dilakukan *enhance* untuk *field* jenis agunan dengan bukti kepemilikan jaminan pada *core system* 4. Telah disampaikan kepada pengawas perihal duplikasi pada NPWP badan usaha disebabkan karena proses merger dan saat ini masih dalam proses penggabungan dua CIF menjadi satu CIF pada aplikasi *Web* OJK	
		vide	Surat OJK Nomor SR-8/PB.223/2024 tanggal 01 Februari 2024
Kesalahan Pelaporan			
1	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Laporan Realisasi Implementasi Produk	
	Otoritas	OJK	
	Tanggal Pengenaan	13 Maret 2024	
	Nominal	Rp50.000.000	
	Unit Kerja Terkait	TBG	
	Keterangan	1. Sejak bulan Maret dan April, BSI secara paralel telah menyusun laporan realisasi. Pada tanggal 8 Mei 2023, mengalami insiden *ransomware* sehingga sistem BSI termasuk *digital value chain* juga terkena dampak, sehingga tidak ada data realisasi transaksi pada periode tersebut yang dapat dilaporan 2. Setelah insiden terjadi, Bank melakukan proses *recovery* namun untuk data nasabah pada sistem DVC tidak bisa *recover* (hilang). Sesuai arahan IT Bank, proses *pentest* ulang pada 9 dan 14 November 2023 dilakukan sebelum sistem *live* 3. BSI melakukan pengiriman laporan realisasi berdasarkan surat Nomor 03/4717-3/DIR-TBG dan diterima OJK pada 23 November 2023 4. Melakukan *back up* data dan sistem *Digital Value Chain* untuk mitigasi risiko kegagalan sistem	
		vide	Surat OJK Nomor S-95/PB.22/2024 tanggal 13 Maret 2024
2	Jenis Pelanggaran	Sanksi Laporan Bank Umum Terintergrasi (LBUT)	
	Otoritas	Bank Indonesia	
	Tanggal Pengenaan	26 April 2024	
	Nominal	Rp300.000	
	Unit Kerja Terkait	TGM	
	Keterangan	Koreksi di luar batas waktu penyampaian Kelompok Informasi (KI) Harian LBUT periode data 03 November 2023 dengan nama informasi yaitu utang luar negeri dan kewajiban Bank Lainnya dalam valas jangka pendek – Risiko dan Permodalan Harian dengan jumlah baris yang dikoreksi sebanyak 3 (tiga) baris	
		vide	Surat Bank Indonesia Nomor 26/103/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 26 April 2024
3	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Pelaporan Transaksi Efek	
	Otoritas	OJK	
	Tanggal Pengenaan	27 Mei 2024	
	Nominal	Rp24.000.000	
	Unit Kerja Terkait	TGM	
	Keterangan	Keterlambatan pelaporan transaksi efek atas perubahan sistem pelaporan pada BEI dari CTP-PLTE versi lama menjadi CTP-PLTE versi baru dan berkomitmen untuk setiap pengujian dari BEI akan dihadiri oleh PIC	
		vide	Surat OJK Nomor S-475 /PM.121/2024 tanggal 27 Mei 2024

Sanksi Lainnya			
1	Jenis Pelanggaran	Langkah Perbaikan atas Insiden IT tanggal 08 Mei 2024 Kegagalan terhadap prinsip pemrosesan Pelindungan Data Pribadi (PDP)	
	Otoritas	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
	Tanggal Pengenaan	15 Februari 2024	
	Nominal	Sanksi Administratif Peringatan Tertulis	
	Unit Kerja Terkait	1. CISO	2. IOG
	Keterangan	1. Pada tanggal 08 Mei 2023 terjadi insiden siber pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, dimana terdapat gangguan sistem yang diakibatkan oleh *ransomware* 2. Kominfo berpendapat telah terjadi kegagalan terhadap prinsip pemrosesan pelindungan data pribadi dan berakibat terjadinya pengungkapan yang tidak sah terhadap data pribadi 3. Berdasarkan point 2 di atas BSI dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis 4. Untuk selanjutnya BSI diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari antara lain: a. Mengimplementasikan *tools* DLP untuk meminimalisir kegagalan keamanan data pribadi; b. Mengkaji dan memperbaiki praktik dan proses pelindungan data pribadi terhadap ketentuan-ketentuan yang dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), termasuk poin rekomendasi sebagaimana disarankan dalam Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-139/M.KOMINFO/AI.05.01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024	
		vide	Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-139/M.KOMINFO/AI.05.01/02/2024 tanggal 15 Februari 2024

Selain itu, tidak terdapat sanksi adminstratif oleh Dewan Komisaris dan Direksu yang diperoleh dari regulator.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

BSI senantiasa menyampaikan informasi terkini secara akurat berkenaan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Bank kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan merupakan hasil rangkuman dan pengolahan internal, yang kemudian menjadi sebuah laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti regulasi di pasar modal tentang keterbukaan informasi.

Transparansi informasi yang disampaikan oleh Bank berupa posisi, kondisi, kinerja, serta prospek keuangan yang tersedia laporan tahunan, laporan keuangan berkala, laporan interim hingga siaran pers dan pengungkapan informasi lainnya kepada publik. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan seluruh materi informasi tersebut untuk menganalisis kinerja Bank. Seluruh informasi diperbarui secara berkala untuk selanjutnya disampaikan juga kepada Pemegang Saham dan otoritas pasar modal melalui beragam saluran komunikasi. Penyampaian informasi berkala ini merupakan bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang efektif dan merata antara Bank dengan seluruh pemangku kepentingan.

Investor Relation

BSI telah membentuk unit kerja Investor Relation Group yang bertugas untuk menangani hubungan, baik dengan regulator maupun para pemegang saham (*Shareholder*) dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) di Bank serta menyediakan informasi yang tepat mengenai Perseroan. Informasi yang disediakan terkait dengan strategi, kinerja operasional maupun kinerja keuangan yang disajikan secara reguler dan tersedia di *website* Bank. Kedua hal ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai gambaran penuh atas kinerja Perseroan yang berguna bagi pemegang saham existing maupun calon pemegang saham dalam berinvestasi di saham Bank maupun bagi para pemangku kepentingan.

Perseroan telah menyediakan saluran komunikasi bagi investor dan entitas pasar modal untuk dapat terhubung dengan Investor Relation dengan detail sebagai berikut.

Investor Relation Group
Gd. The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27
Kel. Karet Kuningan
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta 12930 Indonesia
Website Hubungan Investor: ir.bankbsi.co.id
E-mail: investor-relations@bankbsi.co.id

Profil Kepala Investor Relation



Rizky Budinanda

Investor Relation Group Head

Cirebon, 29 Desember 1977 (47 Tahun)

Warga Negara Indonesia

47 Tahun

Berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan No. 02/01067-SKPT/HC-BSI

Riwayat Pendidikan

- Bachelor of Banking and International Finance, Flinders University of South Australia (2000)
- Master of Applied Finance, Monash University Australia (2001)

Sertifikasi

Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Pengalaman Kerja

- *Group Head Investor Relation* – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022-sekarang)
- *Senior Vice President Financial Institution Group & Public Sector* – HSBC (2013-2022)
- *Head of Execution, Corporate & Invesment Banking* – PT Bank DBS Indonesia (2009-2012)
- *Assistant Vice President, Execution, Corporate Banking* – PT Bank DBS Indonesia (2007-2009)
- *Investment Banking*, PT Mandiri Sekuritas (2003-2007)

Tugas dan Tanggung Jawab *Investor Relation*

Adapun tugas dan tanggung jawab *Investor Relation* dalam organisasi Bank meliputi:

1. Menjaga hubungan dengan regulator, pemegang saham serta entitas pasar modal yang di antaranya adalah fund managers, *buy-side* & *sell-side analyst*, *stock broker*, perusahaan asuransi, *rating agency* dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan di pasar modal.
2. Membangun strategi komunikasi dan informasi yang menghasilkan *positive awareness* kepada pemegang saham secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan dengan tujuan menjalin hubungan keuangan (*financial relation*) yang erat antara Perseroan dan pemegang saham.
3. Secara proaktif mengkomunikasikan strategi dan kinerja perusahaan guna membentuk valuasi jangka panjang saham Perseroan melalui beberapa kegiatan komunikasi seperti *Quarterly Earnings Call/ Analyst Meeting*, *one on one meetings*, *Annual Public Expose*, *Investor Conference*, *Roadshow* & *Non-Deal Roadshow* ataupun kegiatan komunikasi lainnya baik lokal maupun internasional.
4. Memenuhi kewajiban *feeding* informasi yang akurat serta valid kepada pihak investor dan pihak terkait lainnya dalam rangka menumbuhkan persepsi Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang memiliki reputasi baik, kredibel, dan menarik bagi investor.
5. Melakukan analisa terhadap kondisi pasar beserta pergerakan saham yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka memberikan *update* mengenai valuasi perusahaan terkini.
6. Menjaga pemenuhan seluruh ketentuan pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan dan pemenuhan data/informasi yang dibutuhkan investor, regulator serta *stakeholder* lainnya.
7. Meningkatkan literasi/pemahaman mengenai pasar modal kepada seluruh pegawai Perseroan melalui sharing session dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya.

Pelaksanaan Tugas *Investor Relation*

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham/pemangku kepentingan Perseroan yang telah dilakukan oleh *Investor Relation Group* selama tahun 2024 meliputi:

No	Jenis Aktivitas	Jumlah	Deskripsi	Lokasi
1	*Quarterly Earnings Call*	4	Pemaparan laporan kinerja keuangan Perseroan secara triwulanan kepada investor institusi maupun *Analyst*	Jakarta
2	*Investor Conference*	15	Pengenalan tentang Perseroan dan pemaparan *update* mengenai kinerja dan strategi Perseroan yang dilakukan melalui Konferensi secara *offline* ataupun *online* kepada existing investor dan calon investor potensial yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia	Jakarta, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Australia, UAE
3	*Non-Deal Roadshow*	11	Kegiatan komunikasi kepada *existing investor* maupun investor potensial yang dilakukan melalui kegiatan *roadshow* baik di dalam maupun luar Indonesia	Jakarta, Thailand, Singapore, Malaysia, French, Germany, United Kingdom, Edinburgh, United States
4	*Institutional Investor Meeting*	756	Pemaparan update mengenai kinerja dan strategi Perseroan yang dilakukan melalui *One on One meeting* atau *group meeting* secara *offline* ataupun *online* dengan existing investor dan calon investor potensial	Jakarta
5	*Collaboration Event dengan Perusahaan Sekuritas*	6	Kolaborasi dengan perusahaan sekuritas dengan tujuan Pengenalan tentang Perseroan berupa *update* kinerja keuangan, yang utamanya ditujukan kepada investor retail	Jakarta
6	*Annual Rating Review*	2	Pertemuan dengan *Credit Rating Agencies* untuk update peringkat perusahaan.	Jakarta

Siaran Pers

Tanggal	Tema *Press Release*
2 Januari 2024	BSI Maslahat Jalin Kerjasama dengan Rumah Singgah Pasien Sedekah Rombongan di Surabaya
3 Januari 2024	Perluas Inklusi dan Literasi Perbankan Syariah, BSI Gandeng TNI AD
3 Januari 2024	Saham BSI Prospektif, Masuk Top 5 Bank dengan Kenaikan Tertinggi
6 Januari 2024	Sepanjang Januari 2024, Cabang BSI di Seluruh Indonesia Layani Weekend Banking
7 Januari 2024	Masjid BSI Sebagai Pusat Kesejukan di Destinasi Wisata
8 Januari 2024	Jadi Destinasi Wisata BHC, Masjid BSI Bakauheni Dikunjungi 6.500 Jamaah per Bulan Saat Libur Nataru
8 Januari 2024	BSI Maslahat Salurkan Bantuan Kemanusiaan Tahap 3 Untuk Palestina
9 Januari 2024	RDN Online, Kolaborasi BSI & Mandiri Sekuritas Buka Akses Lebih Luas di Pasar Modal Syariah
11 Januari 2024	BSI Dukung Pengembangan Usaha Mikro, Siap Salurkan 16 Triliun KUR Syariah di 2024
11 Januari 2024	BSI Permudah Mustahik Untuk Memiliki Rumah
14 Januari 2024	Mitra Tani Modern, Contoh Sukses UMKM Center BSI Surabaya Bantu UMKM Naik Kelas
15 Januari 2024	BSI Terus Optimalisasi Layanan ZISWAF dan Donasi di BSI Mobile
15 Januari 2024	Wujudkan Layanan Berkelanjutan, BSI Buka Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Telkom
15 Januari 2024	BSI Dorong Digitalisasi Pembayaran di Pasar Gede
16 Januari 2024	Luncurkan RDN Online Syariah Pertama, BSI Dorong Percepatan Bisnis Pasar Modal Syariah
17 Januari 2024	Luncurkan RDN Syariah, BSI Dorong Perkembangan Pasar Modal Syariah
18 Januari 2024	Makin Menarik Dikoleksi, Saham BRIS Tembus 2.000
19 Januari 2024	BSI Genjot Pembayaran Cashless Lewat BSI Hasanah Card
23 Januari 2024	BSI Maslahat Salurkan Bantuan Musim Dingin, Makanan Hangat dan Siap Saji untuk Rakyat Palestina
24 Januari 2024	Dorong Anak Muda Miliki Rumah, BSI Tawarkan Jangka Waktu Hingga 30 Tahun
26 Januari 2024	BSI Maslahat dan BSI Serahkan Bantuan Program Rumah Singgah Sedekah Rombongan Cabang Semarang
30 Januari 2024	Pergerakan Saham dan Bisnis Wealth Management Tumbuh Positif, BSI Raih Dua Penghargaan Internasional Finance Award

Tanggal	Tema *Press Release*
31 Januari 2024	Market Cap Tembus Rp100 T, BSI Naik Peringkat di Perbankan Syariah Global
1 Februari 2024	Laba Tumbuh 33%, BSI Berhasil Cetak Kinerja Impresif
1 Februari 2024	Tiga Tahun BSI, Makin Eksis di Industri Keuangan Syariah
2 Februari 2024	BSI Rilis Platform Digital Untuk Nasabah Institusi
2 Februari 2024	3 Tahun BSI Makin Eksis di Industri Keuangan Syariah, Hadirkan Beyond Sharia Banking
3 Februari 2024	459 Cabang BSI di Seluruh Indonesia Layani Weekend Banking Sepanjang Februari 2024
5 Februari 2024	BSI Dorong Anak Muda Investasi Emas
6 Februari 2024	Tiga Tahun Berdiri, BSI Terus Perkuat Layanan kepada Nasabah
7 Februari 2024	BSI Terus Dorong Digital Banking Menuju Beyond Syariah Banking
8 Februari 2024	Konsistensi BSI Perkuat Bisnis Global dan Kustodi Diakui Internasional
13 Februari 2024	Perkuat Ekosistem Halal, BSI Permudah Pembayaran Sertifikasi Halal UMKM
13 Februari 2024	Kian Menarik Minat Investor, Rerata Volume Perdagangan BRIS Naik Signifikan
16 Februari 2024	BSI Siapkan Layanan Prima Pelunasan Haji 2024
21 Februari 2024	BSI Genjot Bisnis SME, Permudah UKM Akses Pembiayaan Syariah
22 Februari 2024	BRIS Bisa Tembus Rp2.700, Terdorong Kinerja Fundamental yang Apik
22 Februari 2024	BSI UMKM Center Surabaya, Barometer Inkubator Bisnis UMKM Jawa Timur
23 Februari 2024	BSI & Alumni IPB Jadikan Deposito Wakaf Solusi Bagi Mahasiswa Tidak Mampu
27 Februari 2024	Pasar Perbankan Syariah Besar & Luas, BSI Targetkan Peningkatan 2-3 Juta Nasabah per Tahun
28 Februari 2024	BSI Regional Medan Dorong Pembiayaan Lewat UMKM
1 Maret 2024	BSI Regional Surabaya Targetkan Penyaluran KUR Syariah Rp1,94 Triliun Tahun 2024
1 Maret 2024	Majukan Olahraga dan Pariwisata, BSI Dukung F1 Powerboat di Balige
1 Maret 2024	BSI Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Pesantren Lewat Agen Laku Pandai
5 Maret 2024	Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, BSI Dorong Seluruh Faskes Berikan Pelayanan Maksimal
6 Maret 2024	BSI Dorong ZISWAF Jadi Instrumen Ekonomi Syariah Berkelanjutan
8 Maret 2024	BSI Hadirkan "Sukuk Gold Ownership Program" untuk Investasi Sukuk & Kepemilikan Emas
8 Maret 2024	Perkuat Potensi UMKM, BSI Sediakan 1.000 Sertifikat Halal Lewat Program Selasar
9 Maret 2024	Berdayakan Mustahik Menjadi Muzakki, BSI dan BSI Maslahat Luncurkan Program Desa BSI Klaster Peternakan di Mojokerto
10 Maret 2024	Gelar Gema Ramadan, BSI Dorong Penguatan Transaksi Digital Masjid
13 Maret 2024	Perkuat Ekonomi Umat, BSI Serahkan Zakat Lebih dari Rp222 Miliar
13 Maret 2024	BRIS Masih Terus Menarik Minat Investor Asing
15 Maret 2024	BSI Masuk Top 10 Global Islamic Bank
18 Maret 2024	Raih Capaian Positif di Awal 2024, BSI Semarakan Ramadhan 1445 H
18 Maret 2024	Berbagi Keberkahan di Bulan Ramadan, BSI Adakan Santunan bagi 3.333 Anak Yatim
18 Maret 2024	BSI (BRIS) Siapkan Uang Tunai Rp45 T Selama Lebaran
18 Maret 2024	BSI Beri Sinyal Bakal Bagikan Dividen Semester I 2024
19 Maret 2024	Berbagi Keberkahan, Wapres Hadiri dan Berikan Santunan bagi 3.333 Anak Yatim
22 Maret 2024	Gandeng Pertamina Lubricants, BSI Berikan Kemudahan Akses Permodalan Bagi Mitra
23 Maret 2024	BSI Perbanyak Layanan Weekend Banking di Seluruh Indonesia Sepanjang Ramadhan
26 Maret 2024	Dorong Sustainable Banking, BSI Dukung Pembiayaan Sawit Bagi Para Petani Plasma
27 Maret 2024	BSI dan Otorita Ibu Kota Negara Teken MOU untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
01 April 2024	Asbisindo Dukung OJK dalam Berakhirnya Restrukturisasi Kredit Perbankan Akibat Pandemi
01 April 2024	Libur Idul Fitri BSI Siapkan Rp45 Triliun Uang Tunai, Penuhi Kebutuhan Uang Kartal Masyarakat

Tanggal	Tema *Press Release*
02 April 2024	Kinerja Tumbuh Double Digit, BRIS masuk Top Gainer LQ 45
02 April 2024	Safari Ramadhan BUMN di Aceh, BSI Adakan Pasar Murah 1.000 Paket Sembako
04 April 2024	Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Desa, BSI Perkenalkan Ekosistem Keuangan Syariah
04 April 2024	BSI Siapkan Posko Mudik Untuk Istirahat & Layani Konsultasi Zakat
05 April 2024	BSI Fasilitasi Mudik Gratis Untuk 644 Pemudik
06 April 2024	BSI Sediakan Layanan Bayar Zakat dengan Mudah Melalui BSI Mobile
06 April 2024	570 Cabang BSI Tetap Buka Selama Libur Lebaran 2024
17 April 2024	Abu Dhabi Islamic Bank Dikabarkan Bakal Beli Saham BSI
18 April 2024	Permudah Masyarakat Dapatkan Rumah, BSI Hadirkan Griya One Day Approval
18 April 2024	Update Pemberitaan ADIB Bakal Beli Saham BSI
20 April 2024	Harga Emas Terus Melonjak, Target Bisnis Pembiayaan Emas BSI Tumbuh 30% di 2024
23 April 2024	BSI Dorong Pembiayaan Kendaraan Ramah Lingkungan Untuk Kurangi Emisi Karbon
28 April 2024	BSI dan Kemenag Gelar Senam Haji Indonesia untuk Persiapkan Jasmani & Rohani Calon Jemaah
30 April 2024	BSI Cetak Laba Impresif Rp1,71 Triliun Hingga Maret 2024
2 Mei 2024	Memacu Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah
3 Mei 2024	BSI Tetapkan Wisnu Sunandar Jadi Corsec Baru
7 Mei 2024	Lewat Sustainable Finance, Bank Syariah Punya Potensi Besar Selaraskan ESG dan SDG
13 Mei 2024	BSI Berangkatkan 83% Jamaah Haji Indonesia Tahun 2024
13 Mei 2024	Ratusan Masyarakat Demo Kementerian BUMN Desak BSI Bersih dari KKN
14 Mei 2024	Kinerja Fundamental BRIS Solid, Analis Rekomendasikan Beli, TP Diproyeksi Rp3.400
14 Mei 2024	Bank Syariah Didorong Jaga Ketahanan dan Pertumbuhan Berkelanjutan
14 Mei 2024	BSI Kerja Sama dengan PT Badak NGL, Tingkatkan Literasi dan Inklusi Perbankan Syariah
14 Mei 2024	BSI Akan Gelar International Expo Bank Syariah Pertama dan Terbesar di Indonesia
15 Mei 2024	Perkuat Keuangan Berkelanjutan, BSI Terbitkan Sukuk Sustainability
17 Mei 2024	RUPST BSI
20 Mei 2024	Beasiswa BSI Scholarship Pelajar 2024 Telah Dibuka, Daftarkan Dirimu Segera!
21 Mei 2024	Porsi Kepemilikan Saham BSI Siap Ditambah
22 Mei 2024	Pembiayaan Tumbuh Double Digit, Kinerja BSI Makin Solid
24 Mei 2024	Dorong UMKM Naik Kelas, BSI Ikut Serta dalam Jelajah Kuliner Nusantara Bandung
29 Mei 2024	Dirut BSI Gelar Kuliah Umum Literasi Perbankan Syariah di Universitas Syiah Kuala Aceh
30 Mei 2024	Resmikan Green Building BSI Aceh, Wapres Sampaikan Strategi Pengembangan Industri Keuangan Syariah
31 Mei 2024	Lewat Jelajah Kuliner Nusantara di Medan, BSI Terus Dorong UMKM Naik Kelas
3 Juni 2024	BSI Siapkan 200 Kursi Roda di Tanah Suci Untuk Layani Jamaah Haji Lansia
4 Juni 2024	Hati-Hati Penipuan Jelang Idul Adha, BSI Himbau Nasabah Cek Informasi di Kanal Resmi
4 Juni 2024	Kementerian BUMN Perkuat Ekosistem UMKM Aceh, Sukses Selenggarakan Karya Nyata Festival BUMN Vol.7
5 Juni 2024	BSI Selalu Berkomitmen Layani & Kembangkan Ekonomi Umat Melalui Kolaborasi Stakeholder
5 Juni 2024	Raih Antusiasme Pasar, Sukuk ESG BSI Rp9 Triliun atau Oversubscribe Tiga Kali Lipat
6 Juni 2024	BSI Cairkan Dividen Tunai Rp855,56 Miliar 20 Juni 2024
6 Juni 2024	Lebih dari 5 Ribu Pelajar dan Mahasiswa Dapat Beasiswa dari BSI
6 Juni 2024	Transaksi Pembelian Hewan Kurban via BSI Mobile Meningkat 35%
7 Juni 2024	Bisnis Pembiayaan Emas BSI Melesat 30%* di Media Cetak terdapat

Tanggal	Tema *Press Release*
7 Juni 2024	Transaksi Riyal di BSI Naik 57,18% Pada Musim Haji 2024
8 Juni 2024	Jelang Idul Adha, 604 Cabang BSI di Seluruh Indonesia Layani Weekend Banking Selama Juni 2024
9 Juni 2024	Maliq & D'essential, RAN hingga Hanan Attaki akan Ramaikan BSI International Expo 2024
10 Juni 2024	BSI Gandeng Qasir.id Dorong Digitalisasi 24 Ribu UMKM
10 Juni 2024	BSI Tegaskan Komitmen Terus Dorong Pembiayaan UMKM
12 Juni 2024	BSI Umumkan Imbal Hasil Sukuk ESG, 6,65%-6,8% Per Tahun
13 Juni 2024	Hery Gunardi Dinobatkan CEO of The Year dan BSI Sebagai Bank Syariah Terbaik
14 Juni 2024	Wujudkan Komitmen Perkuat Ekosistem Halal Indonesia, BSI Gelar International Expo 2024
16 Juni 2024	Tingkatkan Layanan Wealth Management Syariah, BSI Resmikan Outlet BSI Prioritas di Surabaya & Pondok Indah
17 Juni 2024	Sambut Idul Adha 1445 Hijriah, BSI Salurkan 9.390 Hewan Potong ke Seluruh Indonesia
20 Juni 2024	BSI International Expo 2024
20 Juni 2024	BSI Terima Kunjungan Kehormatan Vice Grand Syekh Al-Azhar, Sertifikasi Halal jadi Pembahasan
20 Juni 2024	BSI dan Al-Azhar Mesir Satukan Visi untuk Ekosistem Islam yang Berkelanjutan di BSI Expo 2024
21 Juni 2024	Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia, BSI Scholarship 2024 Targetkan 2.300 Pelajar & Mahasiswa
21 Juni 2024	Perkuat Ekosistem Halal, BSI Gandeng Mitra Strategis
22 Juni 2024	Gandeng 17 Developer, BSI Tawarkan Promo Menarik Margin Setara 2,22%
23 Juni 2024	Penutupan BSI International Expo 2024
23 Juni 2024	BSI & MES Luncurkan Deposito Wakaf untuk Jaminan Sosial Pekerja Informal
24 Juni 2024	Komitmen BSI dalam Melayani Jamaah Haji, BSI Sambut Kepulangan Jemaah Haji 2024
26 Juni 2024	Konsisten Ajak Masyarakat Go Green, BSI Kurangi 940 Kg Jejak Karbon Selama BSI International Expo 2024
27 Juni 2024	Diskusi Buku "Mega Merger In The Pandemic Era": Catatan Sejarah, Referensi Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia
28 Juni 2024	Segera Resmikan UMKM Center di Makassar, BSI Perkuat Pemberdayaan UMKM di Indonesia Timur
29 Juni 2024	BSI Siap Jadi Partner Para Ibu Lewat Produk-Produk Syariah yang Cocok untuk Keluarga
1 Juli 2024	Bagi Hasil Pertama Sukuk ESG BSI Akan Dibayarkan September 2024
3 Juli 2024	BSI Diminati Pemagang dari Kampus Luar Negeri
3 Juli 2024	Buyer Mesir Raih Peringkat Pertama Business Matching BSI International Expo 2024
4 Juli 2024	Bangun Ekosistem Halal hingga Inisiatif ESG, BSI jadi Benchmark Perbankan Malaysia
4 Juli 2024	BSI & ITB Luncurkan BSI Deposito Wakaf untuk Masjid di Cirebon
6 Juli 2024	BSI Buka Layanan Weekend Banking di 540 Kantor Cabang Selama Juli 2024
8 Juli 2024	Kapitalisasi Pasar Moncer, BRIS Masuk Indeks PEFINDO i-Grade
11 Juli 2024	BSI Targetkan Top 3 Bank Syariah Global: Perjalanan dan Tantangan di Balik Mega Merger
11 Juli 2024	Kinerja Naik 15,3 Persen BSI Prioritas Dapat Award International
15 Juli 2024	BSI Imbau Nasabah Selalu Waspadai Modus Penipuan
17 Juli 2024	BSI Telah Masuk 5 Besar BUMN Kapitalisasi Pasar Terbesar
19 Juli 2024	Transaksi Digital Banking Naik 45%, BSI Apresiasi Nasabah Lewat Hujan Rezeki BSI Mobile
20 Juli 2024	Transaksi Saham Syariah Bisa Pakai Rekening BSI
22 Juli 2024	Ketertarikan Milenial Investasi Emas Meningkat
22 Juli 2024	BSI Dinobatkan Sebagai Rising Star di Ajang Contact Center World Asia Pacific 2024
22 Juli 2024	Asbisindo Dorong Penguatan Ekosistem Haji & Umrah Sebagai Potensi Ekonomi dan Devisa
24 Juli 2024	BSI Gelar CEO Mengajar di Makassar & Berikan Beasiswa Rp5,5 Miliar
24 Juli 2024	Resmikan UMKM Center Makassar, BSI Perkuat Pemberdayaan UMKM di Indonesia Timur

Tanggal	Tema *Press Release*
27 Juli 2024	BSI Ajak 140 Anak Yatim Belanja, Ajarkan Literasi Transaksi Syariah
30 Juli 2024	Gerakan Wakaf Uang: Kolaborasi BSI, Kemenag, & BWI Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
30 Juli 2024	Boss BSI: Pak Erick punya Strong Leadership dan Gesit Ambil Keputusan
31 Juli 2024	BSI & Kemenag Salurkan Rp9,17 M Program Bantuan Masjid Ramah 2024 Tahap I
31 Juli 2024	Dirut BSI : Culture AKHLAK Jadi Pondasi Membangun SDM BSI di Media Cetak
1 Agustus 2024	Perkuat Capital Market Syariah, BSI Siapkan Modal Kerja Jangka Pendek Syariah Pertama Bagi Sekuritas
2 Agustus 2024	Perbankan Perlu Lebih Agile Hadapi Tantangan & Peluang Ekonomi Masa Depan
2 Agustus 2024	Selama Agustus 2024, BSI Buka Layanan Weekend Banking di 568 Kantor Cabang
4 Agustus 2024	Konsisten Dukung Bisnis Berkelanjutan Dengan Portofolio Rp59,2 Triliun, BSI Raih Dua Penghargaan
5 Agustus 2024	BSI Mobile Ujung Tombak untuk Tingkatkan Penetrasi Digital & Layanan Keuangan Terintegrasi
6 Agustus 2024	Melalui ODP, BSI Siapkan Future Leader Bank Syariah
7 Agustus 2024	BSI Dukung Pemerintah Berantas Judi Online, Syariah Compliance Jadi Landasan
8 Agustus 2024	103 Ribu BSI Agen Capai Volume Transaksi Tembus Rp31 T
9 Agustus 2024	Cabor Panjat Tebing Raih Emas Olimpiade Paris 2024, BSI Akan Apresiasi 'Spiderman Indonesia'
12 Agustus 2024	Konsisten Jalankan ESG, BSI Raih Penghargaan KGIA 2024
12 Agustus 2024	Payroll BSI Tumbuh 8,72%, Sinergi Jadi Strategi Utama
14 Agustus 2024	Torehkan Kinerja Impresif Sepanjang 2023, BSI Raih Penghargaan Prominent Award 2024
14 Agustus 2024	BSI Ajak Usaha Kecil Naik Kelas Melalui Festival UMKM di Hari Kemerdekaaan
16 Agustus 2024	BSI Serahkan Beasiswa Deposito Wakaf
18 Agustus 2024	Islamic Book Fair 2024 Apresiasi BSI, Bank Pendukung Gerakan Literasi
19 Agustus 2024	BSI ROCK Jaring Talenta Terbaik Indonesia di Kampus IPB
20 Agustus 2024	Bisnis Remitansi BSI Meningkat 10%, Transaksi Tembus Rp50 Triliun
21 Agustus 2024	Komitmen Dukung UMKM, Porsi Pembiayaan UMKM BSI Naik
21 Agustus 2024	Pembiayaan BSI Griya Tumbuh Positif, Tembus Rp54,34 Triliun
23 Agustus 2024	Konsisten Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, BSI Terima Penghargaan dari OJK
26 Agustus 2024	BSI UMKM Center, Inisiatif Strategis Dukung Wirausaha Jadi Berdaya & Naik Kelas
28 Agustus 2024	Dorong Customer Based di Luar Negeri, BSI Siapkan Layanan Migran di Malaysia
29 Agustus 2024	BSI Perluas Jaringan Layanan Gadai Emas Lewat BSI Agen
31 Agustus 2024	Perkuat Jaringan UMKM, BSI Gandeng Komunitas Pengusaha TDA Luncurkan Kartu Co-Branding
1 September 2024	Synergy Run, Kolaborasi BSI & Pelindo untuk Tingkatkan Literasi Perbankan Syariah
1 September 2024	BSI Dukung Eksistensi UMKM Dalam Sibakul Jogja Sport Fest 2024
2 September 2024	Kinerja Keuangan Moncer, BSI Cetak Pertumbuhan Laba 20,28%
3 September 2024	Raih Emas Olimpiade Paris 2024, BSI Beri Apresiasi Rp1 M untuk Veddriq Leonardo
4 September 2024	Harpelnas 2024, BSI Berikan Ultimate Service yang Lebih Responsif dan Personal
5 September 2024	Sukseskan PON XXI Aceh-Sumut, BSI Siapkan Uang Tunai Rp2,8 Triliun
5 September 2024	Sambangi Undip, BSI Jaring Talenta Terbaik di Kampus Lewat BSI Rock
6 September 2024	BSI Siapkan 910 ATM/CRM di Aceh Selama PON 2024
6 September 2024	Sepanjang September 2024, BSI Buka Layanan Weekend Banking di 504 Kantor Cabang
8 September 2024	Yuk Hadir, 9 dan 10 September BSI Gelar Nobar di Taman Sari
8 September 2024	BSI Optimalkan Seluruh Layanan, Dukung Kelancaran Transaksi Finansial PON XXI 2024
9 September 2024	Kehadiran BSI Pada PON Aceh-Sumut 2024, Bukti Komitmen Kuat Dukung Pengembangan Ekonomi & Olahraga

Tanggal	Tema *Press Release*
10 September 2024	Lewat Gelaran PON XXI, BSI Komitmen Majukan Olahraga Aceh
11 September 2024	Resmi Sponsori Persiraja, BSI Harap Laskar Rencong Bisa Promosi ke Liga 1
12 September 2024	Naik 65,52% Sejak Awal 2024, Saham BRIS Tembus All Time High
12 September 2024	Konsisten Perkuat Layanan, Nasabah Prioritas BSI Capai Lebih dari 60 Ribu
12 September 2024	BSI Contact Center Raih Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Award 2024
13 September 2024	Gelar BSI ROCK, BSI Perluas Kesempatan Karir untuk Anak Muda Indonesia
13 September 2024	Digital Banking Dinilai Optimal, BSI Raih Penghargaan Best Digital Bank
17 September 2024	BRIS Konsisten Menguat, Sempat Sentuh ATH di Level Rp3.180
17 September 2024	BSI Siap Akselerasi Global Hub & Islamic Ecosytem, Dukung Indonesia Islamic Financial Center (IIFC)
19 September 2024	BSI Dinobatkan The Most Efficient Bank & Best Performance Bank Kategori Bank Syariah
19 September 2024	Rangkaian CEO Mengajar (2 Rilis)
19 September 2024	BSI Raih Best Practices in Regulation Compliance dalam Anugerah ESG Republika Award 2024
20 September 2024	BSI Dorong Gaya Hidup Halal dan Ekonomi Syariah di Kompas Travel Fair 2024
23 September 2024	Perluas Pelayanan untuk Nasabah, BSI Gandeng Prudential Syariah
24 September 2024	Volume Transaksi QRIS dan ATM BSI di Aceh Naik Double Digit Selama PON XXI
25 September 2024	BSI Perluas Layanan Bank Garansi Gandeng Jamkrida Jakarta
26 September 2024	Didominasi BSI Griya, Pembiayaan Konsumer BSI Tumbuh 15,91%
27 September 2024	BSI Siap Jadi Mitra Strategis 400 Travel Umrah dan Haji
27 September 2024	Dukung UMKM Go Global, BSI Berangkatkan 5 UMKM Binaan ke Arab Saudi
29 September 2024	BSI Dukung Kemajuan Olahraga Indonesia Lewat Pendampingan Atlet Berprestasi
29 September 2024	Kinerja Solid & Berkelanjutan, Aset BSI Tumbuh 48% dalam 3 Tahun
1 Oktober 2024	Kinerja BSI Region X Makassar Solid, Bisnis Gadai dan Cicil Emas Bersinar
2 Oktober 2024	BSI Gandeng Asosiasi Haji Umrah, Perkuat Islamic Ecosystem
3 Oktober 2024	Payroll BSI Masuk dalam Tiga Besar Bank yang Diminati ASN
4 Oktober 2024	BSI Prioritas Perkuat Literasi Keuangan Syariah Melalui Gelaran Islamic Wealth Insight
5 Oktober 2024	BSI Buka 470 Outlet Weekend Banking Selama Oktober
8 Oktober 2024	Pertahankan Kinerja Positif, BSI Siapkan 4 Strategi Penguatan
10 Oktober 2024	Konsep Kemaslahatan BSI: Learn & Earn Sebanyak-Banyaknya, Return Seluas-Luasnya
14 Oktober 2024	BSI Dorong Kemandirian Umat melalui pembangunan dan optimalisasi Masjid Padepokan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta
15 Oktober 2024	Deposito Wakaf BSI & Alumni IPB Capai Rp20 Miliar, 165 Mahasiswa Sudah Terima Manfaat
16 Oktober 2024	Bisnis Emas Naik Dobel Digit, BSI Perkuat Gadai Emas Lewat BSI Agen
16 Oktober 2024	Tata Kelola Unggul, BSI Kukuhkan Posisi Sebagai Bank Syariah Terdepan
17 Oktober 2024	Perkuat Ekosistem Haji & Umrah, BSI Jadi Official Bank Partner Saudia Travel Fair 2024
18 Oktober 2024	Perkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat Bali, BSI Resmikan Sentra UMKM Bedugul
21 Oktober 2024	BSI Communication Summit 2024
21 Oktober 2024	Dukung Pemerintah, BSI dan REI Perkuat Sinergi Sediakan Rumah Layak bagi Masyarakat
22 Oktober 2024	Dukung Pembiayaan Ke Pengusaha E-Katalog, BSI Bekerjasama Dengan AKEN
25 Oktober 2024	Kinerja Impresif BSI Hasil Konsistensi Transformasi
26 Oktober 2024	BSI Lahirkan Bibit Wirausaha Muda Unggulan Aceh
28 Oktober 2024	BSI Siapkan Layanan Remittance di 12 Negara
29 Oktober 2024	Bisnis Sehat dan Sustain, Kunci Pertumbuhan Laba BSI Capai 21,60%

Tanggal	Tema *Press Release*
31 Oktober 2024	BSI Perkuat Halal Ekosistem, Optimalkan Potensi Industri Makanan dan Minuman
31 Oktober 2024	Tingkatkan Layanan Keuangan Syariah, BSI dan Askrindo Syariah Sepakati Kerjasama Rp1 Triliun
1 November 2024	BSI dan Jamkrida Dorong Bisnis UMKM Lewat Kemudahan Penjaminan
1 November 2024	BSI Andalkan Digitalisasi untuk Perkuat Penetrasi Keuangan Syariah
2 November 2024	BAZNAS dan BSI Luncurkan Green Zakat Framework
4 November 2024	SuperApp BYOND by BSI Siap Meluncur, Layanan Makin Lengkap, Lebih User Friendly, Semakin Aman
6 November 2024	Kembali Terpilih sebagai Ketua ASBISINDO, Hery Gunardi Optimistis Masa Depan Perbankan Syariah Nasional
6 November 2024	BSI Dukung Program Gizi Nasional Melalui Kemitraan dengan BGN
8 November 2024	BSI Fasilitasi Nasabah UMKM Go Global, Tembus ke 2 Negara
9 November 2024	Tulus hingga NDX Meriahkan BYOND by BSI Launching, Inklusif & Bawa Semangat Baru
9 November 2024	SuperApp BYOND by BSI Resmi Diluncurkan! Hadirkan Layanan Komprehensif yang Semakin Nyaman & Aman Diakses
14 November 2024	Tambah Jaringan ATM dan CRM, BSI Perkuat & Permudah Akses Bagi Masyarakat
15 November 2024	Yura Yunita & Wali akan Ramaikan Event BYOND by BSI di CFD
17 November 2024	Banyak Fitur & Program Khusus, BYOND by BSI Raih Respon Positif Pasar
19 November 2024	BSI Perkuat Ekonomi Hijau Melalui Rangkaian Event BYOND by BSI
21 November 2024	Milenial Dominasi Pengguna Aktif SuperApp BYOND, BSI Hadirkan Literasi di Mall-Mall Jabodetabek
22 November 2024	Konsisten Dukung Kemajuan Pendidikan, BSI Berikan Bantuan Langsung ke Pelajar
22 November 2024	BSI Genjot Bisnis Kendaraan di GAIKINDO Jakarta Auto Week 2024
22 November 2024	Dukung Industri Kreatif, BSI Kolaborasi Dengan Pinasthikafest Melalui Superapp BYOND by BSI
28 November 2024	Dorong Pendalaman Sektor Keuangan dari Industri Emas, BSI Luncurkan BSI Gold
29 November 2024	BSI Scholarship 2024 Sentuh 2.300 Penerima Manfaat, Bukti Nyata Kontribusi BSI untuk Kemajuan Pendidikan
2 Desember 2024	Sukses Tingkatkan Transaksi Digital, BSI Boyong 2 Penghargaan dari VISA
3 Desember 2024	Langkah Konkret Perkuat Layanan Inklusif, BSI Beri Fasilitas Ramah Difabel
3 Desember 2024	BSI Raih Dua BI Award 2024 sebagai Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik dan Peserta Sistem RTGS & SSS Terbaik
5 Desember 2024	Jelang Akhir Tahun, BSI Genjot Bisnis Perumahan Hingga Sabet Penghargaan Properti Indonesia Award 2024
5 Desember 2024	Perusahaan Tumbuh Berkelanjutan, Dirut BSI Raih the Best Industry Marketing Champion 2024 - Commercial Banking Sector
10 Desember 2024	Harga Emas Kian Menarik, Bisnis Logam Mulia BSI RO IX Kalimantan Tumbuh 223%
10 Desember 2024	Gelar Talenta Wirausaha 2024, BSI Targetkan 8.500 Peserta Dari Seluruh Indonesia
11 Desember 2024	Pengamat IT: Super Apps Bank Jangan Hanya Mudah tapi Juga Harus Aman
12 Desember 2024	Kinerja dan Layanan Tumbuh Solid, BSI Tambah Koleksi Penghargaan Jelang Akhir Tahun
15 Desember 2024	BSI Catat Kenaikan Signifikan Tabungan Haji, Buktikan Kepercayaan Jamaah
16 Desember 2024	Perkuat Implementasi ESG, BSI Kembangkan Ekonomi dan Tanam Pohon di Desa Semoyo Yogyakarta
17 Desember 2024	BSI dan ICMI berkolaborasi dalam Deposito Wakaf Seri Beasiswa ICMI, Fokus pada bantuan biaya pendidikan bagi Siswa Kurang Mampu
19 Desember 2024	BYOND by BSI Capai Target Satu Juta Pengguna, Game Changer Bagi BSI
21 Desember 2024	Dorong Kelestarian Lingkungan, BSI Ajak Masyarakat Terapkan Wisata Berkelanjutan di Cikole Lembang

Transparansi Penyampaian Laporan

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
1.	09 Januari 2024	04/028-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2023
2.	09 Januari 2024	04/029-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Desember 2023
3.	31 Januari 2024	04/168-3/DIR-CFA	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Laporan Keuangan Audited Posisi 31 Desember 2023
4.	01 Februari 2024	04/130-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Tahunan
5.	01 Februari 2024	04/131-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Informasi Pemenuhan Kewajiban Public Expose
6.	06 Februari 2024	04/143-3-CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2024
7.	06 Februari 2024	04/144-3-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Januari 2024.
8.	19 Februari 2024	04/315-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
9.	27 Februari 2024	04/199-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penjelasan Atas Pemberitaan Di Media Massa
10.	05 Maret 2024	04/220-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
11.	05 Maret 2024	04/474-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Audit
12.	06 Maret 2024	04/222-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 29 Februari 2024
13.	14 Maret 2024	04/278-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Form Informasi Data Efek Syariah (DES)
14.	14 Maret 2024	04/279-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Informasi Pemenuhan Kewajiban Public Expose Tahunan
15.	28 Maret 2024	04/651-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
16.	05 April 2024	04/350-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
17.	04 April 2024	04/346-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Maret 2024
18.	04 April 2024	04/341-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 31 Maret 2024
19.	05 April 2024	04/353-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Pemberitahuan Iklan RUPS
20.	22 April 2024	04/727-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2023
21.	22 April 2024	04/732-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2023
22.	25 April 2024	04/382-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
23.	24 April 2024	04/379-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa
24.	26 April 2024	04/384-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
25.	30 April 2024	04/800-3/DIR-CFA	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Laporan Keuangan Per 31 Maret 2023
26.	30 April 2024	04/400-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
27.	02 Mei 2024	04/402-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Perubahan Corporate Secretary
28.	07 Mei 2024	04/415-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 30 April 2024

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
29.	07 Mei 2024	04/416-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 April 2024
30.	21 Mei 2024	04/467-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
31.	21 Mei 2024	04/472-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi - Dividen Tunai - 21052024
32.	22 Mei 2024	04/484-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
33.	31 Mei 2024	04/1022-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Audit
34.	31 Mei 2024	04/1022-3/DIR--CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
35.	05 Juni 2024	04/570-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang / Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Mei 2024.
36.	05 Juni 2024	04/569-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 31 Mei 2024
37.	07 Juni 2024	04/584-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Tindaklanjut Atas Permintaan Penjelasan Mengenai Pemberitaan Media Online Terhadap PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)
38.	14 Juni 2024	04/467a-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
39.	13 Juni 2024	04/663-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
40.	14 Juni 2024	04/680-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
41.	05 Juli 2024	04/735-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 30 Juni 2024
42.	05 Juli 2024	04/736-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing per 30 Juni 2024.
43.	05 Juli 2024	04/1309-3/DIR-TGM	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penerbitan Sukuk Mudharabah Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap I Tahun 2024
44.	16 Juli 2024	04/798-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2024 yang Diaudit
45.	24 Juli 2024	04/848-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Nama Kantor Akuntan Publik
46.	05 Agustus 2024	04/907-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Juli 2024
47.	05 Agustus 2024	04/908-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Juli 2024
48.	03 September 2024	04/1105-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
49.	05 September 2024	04/1120-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Agustus 2024
50.	05 September 2024	04/1121-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 31 Agustus 2024
51.	23 September 2024	04/1179-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Surat Komitmen Pemenuhan Free Float Untuk Tetap
52.	25 September 2024	04/1234-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Mengenai VolatilitasTransaksi Efek
53.	01 Oktober 2024	04/1273-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi Atau Fakta Material / Material Information Or Facts Report
54.	02 Oktober 2024	04/1286-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Form Daftar efek Syariah (DeS)
55.	01 Oktober 2024	04/1274a-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Hery Gunardi
56.	01 Oktober 2024	04/1274b-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Bob Tyasika Ananta

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
57.	01 Oktober 2024	04/1274c-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Zaidan Novari
58.	01 Oktober 2024	04/1274d-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Anton Sukarna
59.	01 Oktober 2024	04/1274e-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Ade Cahyo Nugroho
60.	01 Oktober 2024	04/1274f-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Tribuana Tunggadewi
61.	01 Oktober 2024	04/1274g-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Grandhis Helmi Harumansyah
62.	01 Oktober 2024	04/1274h-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Saladin D. Effendi
63.	01 Oktober 2024	04/1274i-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Masduki Baidlowi
64.	01 Oktober 2024	04/1274j-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Suyanto
65.	01 Oktober 2024	04/1274k-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Kepemilikan Atau Perubahan Kepemilikan Saham Perseroan Oleh Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan a.n. Abu Rokhmad
66.	04 Oktober 2024	04/1212-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 30 September 2024
67.	04 Oktober 2024	04/1213-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang / Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing per 30 September 2024
68.	07 Oktober 2024	04/1745-3/DIR-CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Tambahan Dokumen Penunjang Dari Pemegang Saham Pengendali Sehubungan Dengan Imbauan Terkait Pemenuhan Kriteria Evaluasi Konstituen Indeks
69.	09 Oktober 2024	04/1319-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Persetujuan OJK Atas Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan / OJK Approval Information Report Om The Appointment Of Members Of The Board Of Directors Of The Company
70.	10 Oktober 2024	04/1329-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Bursa
71.	14 Oktober 2024	04/1774-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nominasi
72.	15 Oktober 2024	04/1343-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan
73.	29 Oktober 2024	04/1408-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
74.	06 November 2024	04/1443-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 31 Oktober 2024
75.	06 November 2024	04/1442-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 31 Oktober 2024
76.	06 Desember 2024	04/1586-3/CSG	PT Bursa Efek Indonesia BEI)	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek 30 November 2024
77.	06 Desember 2024	04/1587-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing Per 30 November 2024
78.	11 Desember 2024	04/1615-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Informasi Persetujuan OJK Atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Kode Etik

Code of Conduct merupakan pedoman internal Bank yang berisi tentang sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. Kode etik menjadi standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Bank yaitu Direktur, Dewan Komisaris, Senior Manajemen dan Pegawai dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta saat hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja.

Sasaran umum pedoman perilaku adalah menyusun suatu petunjuk agar setiap pelanggaran *code of conduct* dan etika bisnis oleh seluruh jajaran Bank dapat secara cepat terdeteksi. Industri perbankan merupakan bisnis yang berlandaskan asas saling percaya dan kepercayaan publik serta dijalankan secara beretika dan bertanggung jawab.

Perilaku dan etika bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, atau antara sesama jajaran Bank. Ketentuan mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi Bank. Perusahaan memiliki proses implementasi dan *monitoring* kepatuhan terhadap *code of conduct*. Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh jajaran Bank.

Pokok-Pokok Kode Etik

Adapun hal-hal yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
   Pelaksanaan terhadap benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
   a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang wajib dihindari.
   b. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus lainnya untuk:
      - dirinya sendiri;
      - keluarga/kerabat sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal;
      - perusahaan di mana yang bersangkutan dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan.
   c. Hubungan keluarga/kerabat dengan jajaran Bank sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal.
   d. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank termasuk keluarga/kerabat sampai dengan derajat kedua dengan Pejabat Eksekutif Bank, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.
   e. Jajaran Bank harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
   f. Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil atau memanfaatkan Fasilitas Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
   g. Jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri di luar jam kerja apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Larangan Gratifikasi/Risywah
   Jajaran Bank harus mengambil langkah tegas atas setiap bentuk pemberian hadiah atau bingkisan dari nasabah, rekanan atau pihak ketiga lainnya.
3. Kerahasiaan
   Jajaran Bank harus menjaga kerahasiaan data Bank, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyalahgunaan
   Jabatan Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan informasi yang dimilikinya dari kegiatan bisnis Bank.
5. Perilaku Insiders
   Insiders yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau keluarganya atau pihak ketiga lainnya.
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
   Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*highly regulated industry*) sehingga akurasi data yang disajikan sesuai.
7. Integritas Sistem Perbankan
   Jajaran Bank harus memastikan dirinya tidak terlibat tindakan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya yang dapat mengganggu sistem perbankan, seperti pembiayaan fiktif, penggelapan dana nasabah, penipuan transaksi, pemalsuan data dan sebagainya.
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
   Bank harus memastikan seluruh rekening atas nama Jajaran Bank pada Bank wajar dan sesuai dengan segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Bank. Unit Kerja Human Capital memastikan penggunaan rekening tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan Bank.
9. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
   Berkaitan dengan pelaksanaan *Code of Conduct* Bank, Jajaran Bank wajib membuat pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung.
10. Pengawasan, Pelaksanaan dan Pemutakhiran
    Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh Jajaran Bank.

11. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
    Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Kode Etik

Kode etik BSI berlaku untuk seluruh organisasi Bank, dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, hingga seluruh karyawan. Sebagai wujud komitmen penerapan kode etik di Bank, terutama dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas secara tahunan. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat eksekutif Bank sebagai bentuk preventif atas upaya pengendalian gratifikasi dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik BSI, dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik Bank telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan internal, seperti Peraturan Perusahaan (PP) PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Tahun 2021-2023 (PP BSI) serta ketentuan turunannya. PP BSI dapat diakses oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank melalui jaringan intranet (sebagai salah satu upaya mengurangi penggunaan kertas dan dukungan atas program *sustainable finance*).

Penyebarluasan atau sosialisasi kode etik bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BSI serta pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh jajaran manajemen dan pegawai taat dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan oleh manajemen dan unit kerja terkait.

Program sosialisasi yang telah berjalan secara berkala adalah "Taujih Pekanan". Program tersebut menjadi sarana bagi manajemen Bank dalam menyampaikan nilai-nilai perusahaan, yakni AKHLAK sebagai *core values* bagi pegawai BSI. Melalui kegiatan ini, pegawai BSI diharapkan selalu berada di koridor yang benar, sejalan dengan kode etik Bank. Kode etik juga disebarkan dalam bentuk lain, seperti infografis dan surat.

Penyebarluasan kode etik telah dilakukan melalui portal *New Policy System* (NPS) serta *website* Bank. Selain itu sosialiasi kode etik juga telah dilakukan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal, dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran sosialisasi	Tanggal		Peserta Sosialisasi
PIHAK INTERNAL (Pegawai Organik dan Non Organik BSI)	1	20 Februari 2024	Region VII Semarang
	2	04 Maret 2024	Region IX Kalimantan
	3	07 Maret 2024	Distribution & Strategy Group (DSG)
	4	27 Maret 2024	DBO Group
	5	28 Maret 2024	ASP Group
	6	14 Mei 2024	Region VI bandung
	7	19 Juni 2024	HCS Group
	8		HCP Group
	9		HCBP 1
	10		HCBP 2
	11	24 Juni 2024	BSU, HCP, HCS, SORH 1, PFA, CAC
	12	01 Juli 2024	Region III Palembang
PIHAK EKSTERNAL (Rekanan, Vendor, Mitra kerja dan Pihak ketiga lainnya)	1	14 Mei 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO VI Bandung
	2	01 Juli 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO III Palembang
	3	10 Oktober 2024	BSI Maslahat

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Penerapan dan penegakan kode etik di sebuah organisasi sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kegiatan. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap nilai-nilai etika, BSI telah melakukan berbagai upaya yang efektif, salah satunya adalah melalui penerapan pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh manajemen dan pegawai.

Pakta integritas ini berfungsi sebagai wujud nyata komitmen BSI terhadap etika kerja yang tinggi. Setiap individu yang bekerja di BSI, dari manajemen hingga pegawai, diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas ini sebagai bentuk pengakuan dan persetujuan terhadap kode etik yang berlaku. Ini juga menegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Selain itu, pembaruan pakta integritas ini dilakukan setiap tahun, yang menunjukkan bahwa BSI terus berkomitmen untuk memperbarui dan memastikan bahwa setiap pegawai dan manajemen tetap terikat pada nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Pembaruan tahunan ini juga menjadi mekanisme evaluasi terhadap kepatuhan terhadap kode etik, serta memberikan kesempatan untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perkembangan situasi atau peraturan yang berlaku.

Dengan langkah ini, BSI tidak hanya memastikan bahwa setiap pegawai dan manajer memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kode etik, tetapi juga memupuk budaya kerja yang profesional, bertanggung jawab, dan mengedepankan integritas.

Penegakan kode etik melalui pakta integritas ini diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran etika dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BSI sebagai lembaga keuangan yang dapat diandalkan dan memiliki integritas tinggi.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pembinaan disiplin kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan/peraturan perusahaan, antara lain melalui sanksi yang berjenjang:

1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
   a. Surat Pembinaan Non-Sanksi (SPNS)
   b. Surat Teguran Satu (ST 1)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:
   a. Surat Teguran Dua (ST 2)
   b. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
   c. Surat Peringatan Dua (SP 2)
   d. Surat Peringatan Tiga (SP 3)
3. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
   a. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPT)
   b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi Yang Diberikan

No.	Jenis Sanksi	Kategori Sanksi	Jumlah Sanksi		
			2022	2023	2024
1	SPNS	Ringan	8	9	30
2	ST 1		37	54	39
3	ST 2	Sedang	17	29	4
4	SP 1		118	159	155
5	SP 1 Setara SP 2		27	70	22
6	SP 1 Setara SP 3		11	21	18
7	SP 2		2	0	0
8	SP 3		0	0	0
9	SPT	Berat	20	31	39
10	PHK		68	111	119
Total			**308**	**484**	**426**

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Bank memberikan insentif jangka panjang (*Long Term Incentive*/ LTI) yang merupakan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham yang diterbitkan Bank sebesar persentase tertentu dari remunerasi yang bersifat variabel. Khusus untuk Komisaris Independen, LTI berupa saham dimaksud di konversi dan diberikan dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah LTI tersebut diberikan berdasarkan kinerja, peran dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam pengelolaan Bank, serta tingkat risiko atas jabatan yang diemban. LTI tersebut diberikan dalam bentuk ditangguhkan/diblokir selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dibayarkan setiap tahunnya secara proporsional.

Pemberian LTI tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketetapan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Mayoritas dan Kuasa RUPS, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementrian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.

Penjelasan terkait realisasi atas pemberian LTI telah disampaikan pada bagian Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan setiap pihak untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini tindakan penyimpangan di Bank. Kewajiban Bank dalam menerima dan menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan adalah:

1. Wajib menerima laporan dugaan tindakan penyimpangan dari pihak internal atau eksternal dan dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun tidak.
2. Wajib menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan yang telah menyertakan bukti-bukti permulaan yang cukup.
3. Wajib menyediakan informasi status proses penyelesaian laporan dugaan tindakan penyimpangan pada aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu:
   a. Bentuk penyimpangan/permasalahan yang dilaporkan;
   b. Pihak-pihak yang terlibat;
   c. Lokasi/Unit Kerja terjadinya penyimpangan;
   d. Perkiraan waktu terjadinya penyimpangan;
   e. Perkiraan nilai kerugian (jika ada); dan
   f. Kronologis penyimpangan.
2. Untuk mempercepat proses audit, Pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu:
   a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notariil.
   b. Keterangan tertulis saksi.
   c. Keterangan tertulis pelaku.
   d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dan lainnya.
   Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan Pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor dapat memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu:
   a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
   b. Nomor telepon atau alamat e-mail yang dapat dihubungi.

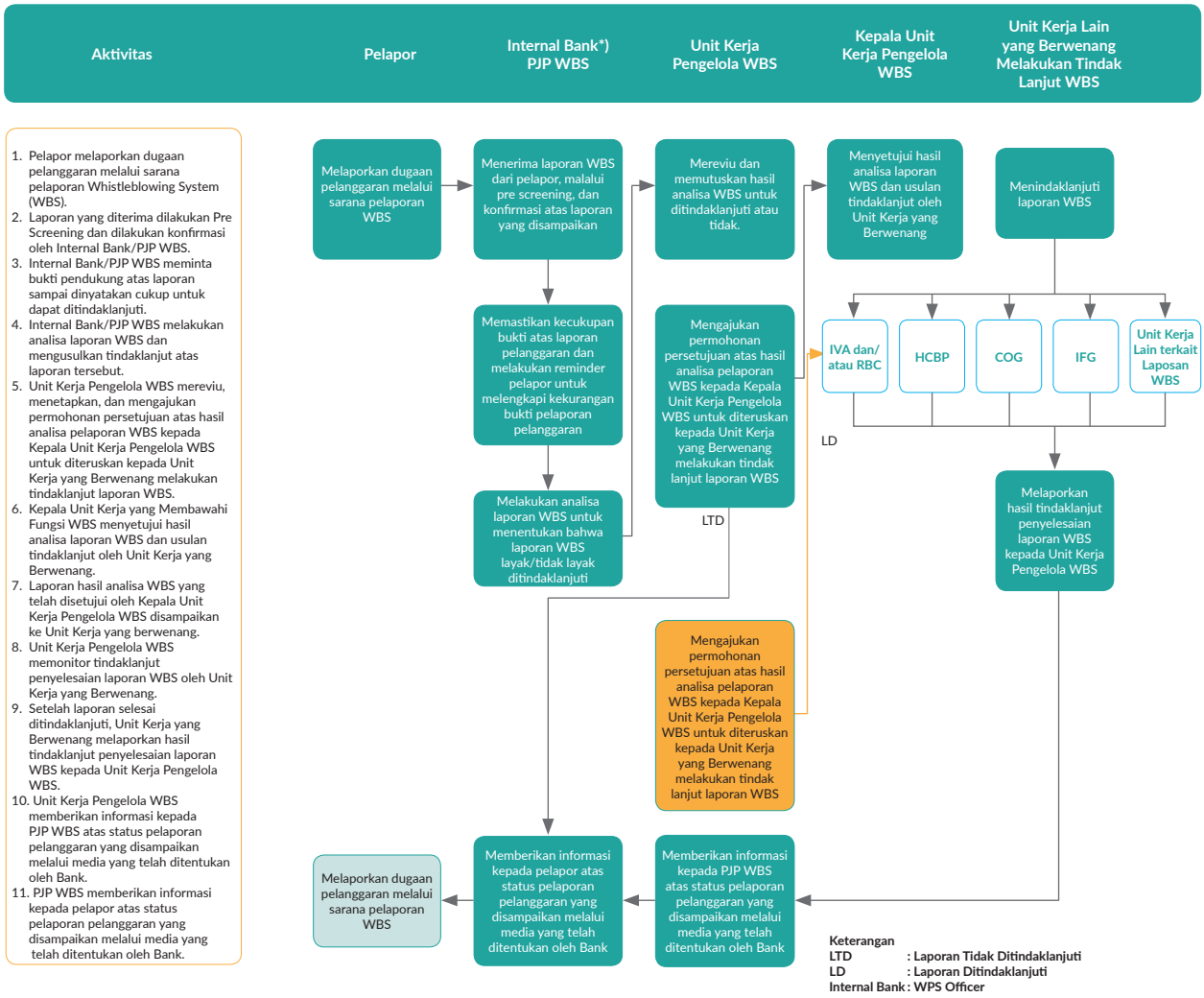
Bank menyediakan beberapa saluran pelaporan penyimpangan yaitu:

1. Whatsapp/telepon/SMS: 08117851851
2. E-mail: e-wbsi@rsm.id
3. Website : https://whistleblowing.tips/wbs/@E-WBSI

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

BSI memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor, menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan atas laporan yang disampaikan. Tindak lanjut tersebut dilakukan setelah Bank melakukan verifikasi bahwa laporan yang masuk terbukti benar dan didukung bukti memadai.

Penanganan Pengaduan



Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* adalah:

1. Tindakan penyimpangan yang tergolong *fraud*, antara lain:
   a. Kecurangan
   b. Penggelapan aset
   c. Pembocoran informasi
   d. Tindak Pidana Perbankan
   e. Pelanggaran Peraturan Perusahaan
   f. Benturan Kepentingan
   g. Penyuapan dan/atau Gratifikasi
   h. Tindakan Tidak Etis
   i. Perbuatan Melanggar Kepatuhan Syariah
   j. Tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan bentuk pelanggaran
2. Tindakan pembiaran yang tergolong *fraud*, antara lain:
   a. Pegawai Bank sengaja memberikan tanda tangan atas laporan atau dokumen yang diketahui rekayasa.
   b. Pegawai Bank sengaja memberikan persetujuan pembiayaan yang diketahui merupakan fiktif.
   c. Pegawai Bank sengaja melakukan otorisasi atau *override* atas suatu transaksi atau pencarian yang diketahui fiktif.
3. Tindakan penyimpangan khusus antara lain:
   a. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain penggunaan narkotika/zat adiktif/psikotropika, minuman keras, pencucian uang, judi.
   b. Tindakan asusila/amoral, seperti penyimpangan seksual, perselingkuhan, pelecehan seksual, dan lainnya.
   c. Pelanggaran *code of conduct* (benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, perilaku *insiders*).
   d. Pelanggaran norma sosial.
   e. Penyalahgunaan asset perusahaan.
   f. Tindakan lain yang dapat menimbulkan risiko materi maupun non materi.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Dalam mengelola laporan atas penyimpangan, Bank menggunakan pihak eksternal yaitu PT RSM Indonesia. Selain itu, Unit Kerja atau fungsi yang menangani pengelolaan WBS berada pada Compliance Group. Compliance Group bertanggungjawab kepada Direktur Utama atau Direktur, serta mempunyai hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi media pelaporan *whistleblowing system* dan Anti Gratifikasi kepada seluruh pegawai melalui *desktop computer* pegawai, *website* Bank, penyampaian pada kegiatan *training*, *sharing session*, dan Taujih Pekanan, serta pemberitahuan kepada nasabah, mitra/rekanan Bank dan masyarakat.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pengaduan atas *whistleblowing system* per 31 Desember 2024 sebanyak 60 pengaduan dengan komposisi pengaduan sebagai berikut:

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1.	Pembiayaan	19
2.	Operasional	11
3.	*Code of Conduct*	30

Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan dari *whistleblowing system* yang diterima sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak Ditindaklanjuti
60	20	3	3	34

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2024

Berdasarkan 20 laporan yang telah ditindaklanjuti, terdapat 17 (tujuh belas) laporan yang terbukti ada pelanggaran/*fraud* dan telah diberikan sanksi sesuai dengan aturan Bank.

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan dalam Mengatasi Praktik Korupsi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sebagai bentuk komitmen Jajaran Manajemen BSI terhadap pemberantasan Korupsi, dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diimplementasikan sejak awal merger pada tahun 2021 dan telah tersertifikasi ISO 37001:2016 SMAP dengan ruang lingkup *procurement* di unit kerja *Procurement* and *Fix Asset Group* Kantor Pusat, dan telah dilakukan Audit Surveillance setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, BSI melakukan resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada ruang lingkup *procurement* di Unit Kerja *Procurement and Fix Asset Group* dan melakukan perluasan sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada ruang lingkup *procurement* di BSI Coorporate University Kantor Pusat.

Strategi Anti Fraud

BSI menetapkan budaya anti *fraud* dengan Cegah, Deteksi, Tindak dan Pantau.

1. Cegah jangan sampai terjadi fraud di lingkungan Bank (*Zero Tolerance for Fraud*).
2. Deteksi untuk mengungkap kejadian fraud yang ada di lingkungan Bank.
3. Tindak cepat setiap pelaku fraud untuk menjaga usaha Bank yang sehat.
4. Pantau konsistensi dan komitmen tindak lanjut kejadian *fraud*.

Kebijakan Anti *Fraud* Bank (KAF) merupakan landasan pokok penerapan strategi Anti *Fraud* melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud*, yaitu:

1. Pencegahan *Fraud*;
2. Deteksi *Fraud*;
3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi Fraud
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*.

Pengawasan Aktif Manajemen

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Bank Syariah Indonesia berwenang dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jenjang organisasi, yang meliputi deklarasi Anti *Fraud* (*Anti Fraud Statement*) dan komunikasi yang memadai ke seluruh jenjang organisasi tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*.
2. Menandatangani pakta integritas di seluruh jajaran organisasi, baik Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai Bank, yang mencakup paling sedikit:
   a. Mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;

   c. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan fraud di lingkungan Bank; dan
   d. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jenjang organisasi.
4. Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan strategi anti *fraud* secara menyeluruh.
5. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan awareness dan pengendalian *fraud*.
6. Memantau dan mengevaluasi kejadian-kejadian *fraud*, serta penetapan tindak lanjutnya.
7. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pegawai Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *fraud*.
8. Peran aktif Dewan Pengawas Syariah guna menegakan dan memastikan pelaksanaan prinsip syariah (*syariah compliance*) pada aktivitas dan operasional Bank, DPS perlu melaksanakan peran aktifnya pada penegakan Kebijakan Anti Fraud terkait hal-hal sebagai berikut:
   a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Kebijakan Anti Fraud, khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip Syariah.
   b. Melakukan pengawasan dan memastikan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*.
   c. Melakukan pengawasan terhadap proses pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas kejadian-kejadian fraud serta penetapan tindak lanjut khususnya pada penyimpangan terkait dengan prinsip syariah.

Kebijakan Gratifikasi

Sesuai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20/2002, tindakan korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang/pihak lain melalui perbuatan melanggar hukum. Gratifikasi merupakan salah satu tindakan yang dilarang yang dapat mengarahkan seseorang melakukan pelanggaran *fraud* dan korupsi. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, BSI telah memiliki ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja Compliance.

Prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa, *fraud* suap dan/atau gratifikasi, mencakup:

1. Pengendalian gratifikasi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh Jajaran Bank
2. Setiap jajaran Bank wajib menghindari dan menolak pemberian gratifikasi yang dapat dianggap sebagai pemberian suap (baik itu pemberian dari pihak eksternal ataupun internal/sesama jajaran bank) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai pejabat bank.
3. Apabila pemberian gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib mengembalikan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan dan melaporkan pengembalian gratifikasi tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi (*Anti Bribery-Compliance* & AML-CFT Group) disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/*transfer* jika penerimaan dalam bentuk uang.
4. Jajaran bank yang melakukan penolakan/penerimaan Gratifikasi, maka wajib melaporkan hal tersebut kepada Unit Pengendali Gratifikasi melalui *e-mail* antibribery@bankbsi.co.id dan/atau *whatsapp* dengan nomor 08118 451 451 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penolakan/penerimaan gratifikasi dengan tembusan Kepala Unit Kerja pelapor.
5. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan reviu atas pelaporan penolakan/penerimaan gratifikasi dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut dan menerbitkan Surat Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima lengkap beserta dokumen pendukungnya.
6. Jajaran Bank wajib mengedukasi pemberi atau pihak yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dengan cara yang baik dan sopan mengenai larangan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan/atau gratifikasi lainnya yang dilarang bagi Jajaran bank.
7. Apabila jajaran bank mengetahui adanya penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan tidak dilaporkan oleh penerima, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing system* (WBS).

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2024

Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti oleh Anti Bribery BSI		
1	Jumlah Laporan	31
2	Total Nominal	Rp.17.411.760,-
3	Rekomendasi Penanganan	1. Gratifikasi berupa makanan ditetapkan untuk disalurkan ke Panti asuhan/ lembaga sosial lainnya. 2. Gratifikasi berupa uang telah dilakukan pengembalian dengan menyetorkan dana ke rekening Pemberi gratifikasi.
Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti oleh KPK		
1	Jumlah Laporan	2
2	Total Nominal	Rp 7.500.000,-
3	Rekomendasi Penanganan	1. Berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK atas objek Gratifikasi, ditetapkan menjadi milik negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara dengan Nomor Rekening Penyetoran Uang/Kompensasi Gratifikasi

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Pelaksanaan sosialisasi Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi Bank terhadap Pengendalian Gratifikasi sehingga tercipta budaya *Awareness* Anti *Fraud* yang mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Pada tahun 2024, program yang telah direalisasikan adalah:

1. Program *Risk Awareness* dan *Anti Fraud Campaign* kepada seluruh pegawai melalui sosialisasi *online* dan *offline*, *e-mail blast*, *desktop* komputer, poster, info grafis, video, media sosial dan *monitoring onsite*. Rincian pelaksanaan kegiatannya adalah:
   a. Sosialisasi konten/poster anti gratifikasi bekerja sama dengan *Corporate Secretary* & *Communication Group* (CSG) melalui e-mail *blast*, *whatsapp blast*, media sosial dan *website* perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal	Media
1	05 Februari 2024	Infografis : Jangan Takut untuk Menolak Gratifikasi	Email Blast
2	20 Maret 2024	Surat ke RO I-X No. 04/0038-3/CPG: Himbauan Larangan Gratifikasi Ramadhan & Idul Fitri	Surat
3	20 Maret 2024	Memo ke All Group No. 04/0371-3/CPG : Himbauan Larangan Gratifikasi Ramadhan & Idul Fitri	Memo
4	03 April 2024	Poster: Larangan Pemberian Gratifikasi dalam Rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445H	website dan media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter
5	12 Juni 2024	Infografis : Larangan Pemberian Gratifikasi dalam Rangka Hari Raya Idul Adha	Email Blast
6	12 Juni 2024	Poster: Larangan Pemberian Gratifikasi dalam Rangka Hari Raya Idul Adha	website dan media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter
7	02 Agustus 2024	Reminder batas pemberian hadiah sesama pegawai di BSI kepada Seluruh Group di Kantor pusat melalui Nota Dir No. 04/124-2/DIR-CHC	Nota ke All Group
8	02 Agustus 2024	Reminder batas pemberian hadiah sesama pegawai di BSI kepada Seluruh Pegawai di Kantor Jaringan melalui Surat Dir No.DIR04/1429-3/DIR-CAC	Surat ke All Region
9	06 Agustus 2024	Videografis: "Easy step Pelaporan Gratifikasi"	Blast Email BSI
10	17 September 2024	Infografis- Awareness terkait Maulid Nabi Muhammad SAW	Email Official Blast
11		Imbauan kepada pihak eksternal - Infografis *Awareness* terkait Maulid Nabi Muhammad SAW	website dan media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter
12	25 Oktober 2024	Compliance & AML CFT Awareness terkait Perbedaan Hadiah, Gratifikasi, Suap & Pemerasan	Antibribery Bank BSI
13	28 Oktober 2024	Poster- Semangat Sumpah Pemuda dalam mencegah Gratifikasi dan fraud	Email Official Blast
14	17 Desember 2024	Awareness- Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Natal dan tahun baru kepada Seluruh Group di Kantor pusat melalui Nota Dir No. 04/0207-2/DIR-CAC	Nota ke All Group
15	17 Desember 2024	Awareness- Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Natal dan tahun baru kepada Seluruh Pegawai di Kantor Jaringan melalui Surat Dir No.4/02267-3/DIR-CAC	Surat ke All Region
16	19 Desember 2024	Infografis Internal- Larangan Penerimaan Gratifikasi terkait Natal dan tahun baru	Email Official Blast **Antibribery Bank BSI**
17	23 Desember 2024	Imbauan kepada pihak eksternal - Infografis Awareness Larangan Pemberian Hadiah terkait Natal dan tahun baru melalui Website & Media Sosial (instagram)	Website BSI dan Media sosial official BSI, yaitu instagram, facebook, dan twitter

b. Sosialisasi Anti Gratifikasi (Laa Risywah) kepada pihak internal dan eksternal dengan rincian sebagai berikut:

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi secara *offline* dan *online*:

Sasaran Sosialisasi	Tanggal		Peserta Sosialisasi
PIHAK INTERNAL (Pegawai Organik dan Non Organik BSI)	1	20 Februari 2024	Region VII Semarang
	2	04 Maret 2024	Region IX Kalimantan
	3	07 Maret 2024	Distribution & Strategy Group (DSG)
	4	27 Maret 2024	DBO Group
	5	28 Maret 2024	ASP Group
	6	14 Mei 2024	Region VI bandung
	7	19 Juni 2024	HCS Group
	8		HCP Group
	9		HCBP 1
	10		HCBP 2
	11	24 Juni 2024	BSU, HCP, HCS, SORH 1, PFA, CAC
	12	01 Juli 2024	Region III Palembang
PIHAK EKSTERNAL (Rekanan, Vendor, Mitra kerja dan Pihak ketiga lainnya)	1	14 Mei 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO VI Bandung
	2	01 Juli 2024	Rekanan Notaris, Asuransi, Penjaminan, KAP, KJPP, Balai Lelang dan Kantor Hukum di bawah koordinasi RO III Palembang
	3	10 Oktober 2024	BSI Maslahat

2. Kunjungan ke Unit kerja dalam rangka monitoring implementasi pengendalian gratifikasi di unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Unit Kerja	Region
1	19 Januari 2024	Area Saharjo	RO V Jakarta 2
2		KC Saharjo	
3		KCP Tebet Barat	
4	19 Februari 2024	KCP Semarang Pandanaran	RO VII Semarang
5	20 Februari 2024	KCP Semarang MT Haryono	
6		KC Semarang Pandanaran	
7		KC Semarang A Yani	
8		KCP Tentara Pelajar	
9	21 Februari 2024	KCP Semarang Sudiarto	
10		KCP Semarang Majapahit	
11		KCP Ungaran Diponegoro 1	
12		KCP Tangerang Ciledug 1	RO IV Jakarta 1
13		KCP Kalideres	
14		KCP Kedoya	
15	04 Maret 2024	KCP Banjarmasin A. Yani	RO IX Kalimantan
16		KC Banjarmasin Lambung Mangkurat	
17	05 Maret 2024	KC Banjarmasin Banjar Baru	
18		KC Martapura	
19		KCP Martapura Pasar Intan	
20		KCP Banjarbaru A. Yani	

No.	Tanggal	Unit Kerja	Region
21	06 Maret 2024	Area Consumer Financing (ACF) Banjarmasin	
22		KCP Kayu Tangi	
23	25 Maret 2024	KCP Jakarta PUPR	RO V Jakarta 2
24		KCP Kementrian Kehutanan (Kementan)	
25		KCP ASABRI	
26	13 Mei 2024	KCP Buah Batu 2	RO VI Bandung
27		KCP Rancaekek	
28		KCP Astana Ayar	
29		KCP Ujung Berung 1	
30	15 Mei 2024	KC Suniaraja	
31		KCP Bandung Setiabudi	
32		KCP Lembang	
33		KCP Bandung UPI	
34	01 Juli 2024	KCP Palembang A. Rivai	RO III Palembang
35		KCP Palembang Veteran	
36	02 Juli 2024	KCP OPI Jakabaring	
37		KCP Palembang Sudirman	
38		KCP Palembang Pasar Ilir	
39		KCP Palembang Demang	
40		KCP Palembang Indralaya	
41		KCP Palembang Jakabaring	
42		KC Palembang Sudirman	
43	03 Juli 2024	KCP Palembang Patal	
44		KCP Palembang Kenten	

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen BSI yang menimbulkan kerugian pada Bank. Sementara upaya yang dilakukan oleh Bank untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan, antara lain melalui:

1. e-Poster
   Bank membuat poster elektronik (*e-poster*) yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan sebagai upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan.
2. Pakta Integritas
   Benturan kepentingan adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di kalangan pegawai maka seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank wajib mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pakta yang dinyatakan setiap tahun itu berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian. Saat ini, penyelenggaraan *annual disclosure* dikelola oleh unit kerja Human Capital dan annual disclosure tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian Bank.
3. E-mail Blast

Insider Trading

BSI merupakan Bank sebagai Perusahaan Terbuka yang patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yaitu memenuhi kewajiban Bank dengan mengacu pada ketentuan berlaku dan membentuk unit di *Corporate Secretary* yang bertanggung jawab jawab atas pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang paar modal dengan penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Orang Dalam harus menerapkan nilai-nilai Kode Etik Perseroan/Bank antara lain:

1. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan/Bank.

2. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra Perseroan/Bank pada umumnya.

Adapun larangan Transaksi Orang Dalam meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/ Bank; atau Efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan/Bank, selama Informasi Orang Dalam tersebut belum dipublikasikan/belum tersedia untuk umum.
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/ Bank; atau memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan/ Bank.
3. Memiliki konflik kepentingan.
4. Melakukan penyalahgunaan posisi/jabatan.
5. Melakukan manipulasi pasar.
6. Melakukan kegiatan *Short Selling* atau *Margin Trading*.

Selama tahun 2024 tidak terdapat *insider trading*.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait diatur dalam Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Penyaluran Dana Besar bagi Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan peraturan ini, penyaluran dana besar merujuk pada pemberian dana kepada individu atau kelompok yang tidak termasuk dalam pihak terkait, yang besarnya mencapai 10% atau lebih dari modal inti bank. Secara keseluruhan, penyaluran dana besar kepada pihak terkait dibatasi paling tinggi 10% dari modal inti bank. Sementara itu, penyaluran dana kepada pihak selain terkait dibatasi paling tinggi 25% dari modal inti (Tier 1) bank. POJK BMPD bagi BUS ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

BSI memiliki Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tahun 2024 yang mengatur berbagai kebijakan terkait pemberian pembiayaan, baik kepada Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah, serta kebijakan pembiayaan dalam Valuta Asing. Dalam menjalankan kebijakan ini, BSI selalu mengacu pada ketentuan regulasi perbankan yang berlaku, dengan memastikan bahwa setiap pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Dalam pemberian pembiayaan, BSI mengikuti prosedur yang serupa dengan pembiayaan pada umumnya, yaitu dengan mempertimbangkan keuntungan yang wajar bagi bank. Sebagai upaya untuk mengelola risiko, penyediaan dana besar (*large exposure*) kepada satu peminjam atau kelompok peminjam yang mencapai 10% atau lebih dari modal inti bank harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Proses pemberian pembiayaan ini diawasi dengan seksama oleh Komite Pembiayaan, yang terdiri dari anggota yang kompeten, termasuk Direktur Utama, yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembiayaan besar. Jika Direktur Utama berhalangan hadir, Wakil Direktur Utama dapat menggantikan posisinya dalam proses pengambilan keputusan.

Pada tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BPMD.

Tabel Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar

No	Penyedia Dana	2024		2023	
		Number of Account (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)	*Number of Account* (NoA)	Nominal (dalam jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1.112	1.430.221	781	1.216.755
2	Kepada 25 Debitur Inti				
	a. Individu	25	35.204.051	25	33.353.263
	b. Grup	25	49.455.058	25	46.735.610
Total Debitur Inti		**50**	**84.659.109**	**50**	**80.088.873**

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS

BSI telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan Itu yang Digunakan oleh BUS

Nama Konsultan	Ruang Lingkup Kerja
Assegaf Hamzah & Partners	Konsultan Hukum
Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP Law Firm)	Konsultan Hukum
Hotman Paris & Partners	Konsultan Hukum
Karimsyah	Konsultan Hukum
Dewan Syam & Partners Law Firm	Konsultan Hukum
James Purba & Partners	Konsultan Hukum
SSF Law Firm and Partners	Konsultan Hukum
Suhendra & Partners	Konsultan Hukum

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian

Internal *Fraud*	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh						Keterangan
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	Tahun Sebelumnya (2023)	Tahun Berjalan (2024)	
Total Fraud	-	-	11	24	1	4	-
Telah diselesaikan	-	-	11	24	1	4	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	8	1	2	

Buy Back Shares dan/atau *Buy Back Obligasi*

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan *Buy Back Share* dan *Buy Back Obligation* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbit dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2024, BSI tidak melakukan transaksi pembelian kembali saham dan/atau obligasi (*Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back* Obligasi).

Penyaluran Dana Untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana

Sebagai bentuk komitmen BSI dalam mendukung tercapainya tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), BSI melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang tujuan utamanya adalah untuk menebar manfaat bagi lingkungan operasional BSI, masyarakat yang dilayani, dan para pemangku kepentingan. Sebagai entitas syariah, penyusunan dan pelaksanakan program TJSL BSI senantiasa menjunjung tinggi prinsip Maqashid Syariah.

Sumber Dana	Zakat	Infak	Sosial	UPZBSI	Wakaf	Total
Pendidikan	2.076.590.959	10.810.047.742	296.700.000	56.750.027.762	171.560.934	70.104.927.397
Kesehatan	531.534.100	2.162.541.603	1.032.500.000	4.313.131.568	-	8.039.707.271
Kemanusiaan	3.521.136.525	43.282.311.591	26.377.286.485	30.375.046.430	340.200.000	103.895.981.031
Ekonomi	6.292.534.030	3.429.015.940	145.000.000	58.873.700.861	121.461.177	68.861.712.008
Dakwah Advokasi	144.098.000	8.157.368.525	5.503.136.000	3.529.745.806	-	17.334.348.331
Amil	2.548.779.205	12.635.391.696	2.413.393.192	19.739.098.598	-	37.336.662.691
Total	**15.114.672.819**	**80.476.677.097**	**35.768.015.677**	**173.580.751.025**	**633.222.111**	**305.573.338.730**

Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Dalam Jutaan Rupiah

Sumber	
Infaq dan Shadaqah	84,691
Denda	21,972
Pendapatan Nonhalal	1,240
Lainnya	4.094
	111,997
Penggunaan Dana Kebajikan	
Sumbangan	(117,028)
(Penurunan)/Kenaikan dana kebajikan	**(5.031)**
Saldo Awal Dana Kebajikan	9,907
Saldo Akhir Dana Kebajikan	4,876

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

BSI sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi.

Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama TKT.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:
1. *Integrated Risk Committee* (IRC)
   IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
   a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:

- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.

b. Rapat IRC Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

2. Board Forum Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai board forum yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

Hasil Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi BSI tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

No	Aspek	Semester I/2024	Semester II/2024
1	Direksi	1.56	1.22
2	Dewan Komisaris	1.60	1.30
3	Dewan Pengawas Syariah	1.67	1.50
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1.00	1.00
5	SKK (T)	1.25	1.25
6	SKAI (T)	1.00	1.00
7	PMR (T)	1.40	1.40
8	Pedoman TK (T)	1.33	1.33
9	Benturan Kepentingan	1.00	1.00
10	Kebijakan Remunerasi	1.00	1.00
	Nilai Akhir	1.28	1.20

Semester I Tahun 2024	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

***Governance* Struktur :**

Kekuatan :

a. Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Jumlah dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :

Sehubungan dengan RUPS Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, terdapat pengurus Perseroan yang diangkat melalui RUPS tersebut belum lulus fit & proper test maupun belum mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu :

a. 3 orang anggota Dewan Komisaris dan 2 orang anggota Direksi. Saat ini sedang dalam tahap reviu dan pemenuhan atas dokumen pengajuan fit & proper test OJK.
b. 2 orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Saat ini sedang dalam tahap reviu dan pemenuhan dokumen pengajuan persetujuan kepada OJK.

***Governance Process* :**

Kekuatan :

Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yag baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Seluruh organ dan infrasruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :
Perbaikan dalam penerapan manajemen risiko operasional terus dilakukan salah satunya dengan mengembangkan *Fraud Detection System* (FDS) guna menekan *insiden fraud*. Saat ini implementasi FDS masih memerlukan proses untuk mencapai hasil yang diharapkan.

***Governance Outcome* :**

Kekuatan :
a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu
b. Laporan Tata Kelola Bank, Laporan Tahunan Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank telah disampaikan tepat waktu kepada regulator.
c. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah.
d. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik.

Kelemahan:
Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti.

Semester II Tahun 2024	
Peringkat	**Definisi Peringkat**
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

***Governance* Struktur :**

Kekuatan :
a. Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. Jumlah dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :
Sehubungan dengan RUPS Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, terdapat pengurus Perseroan yang diangkat melalui RUPS tersebut belum mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, MA (anggota DPS)*

*saat ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat OJK Nomor SR-13/PB.02/2025 tanggal 09 Januari 2025.

***Governance Process* :**

Kekuatan :
Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu :
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yag baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Seluruh organ dan infrasruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kelemahan :
Penerapan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat kejadian fraud dan insiden system berulang pada periode penilaian.

***Governance Outcome* :**

Kekuatan :
a. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu
b. Laporan Tata Kelola Bank, Laporan Tahunan Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank telah disampaikan tepat waktu kepada regulator.
c. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah.
d. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik.

Kelemahan:
Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti.

Penerapan Pedoman
Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.		
Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 **Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.**	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS, baik yang hadir secara fisik melalui sistem yang disediakan Biro Administrasi Efek Perseroan maupun yang hadir secara elektronik melalui melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024, mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan. Pemungutan suara dilakukan pula secara elektronik (e-voting) bagi pemegang saham yang tidak hadir fisik atau yang memberikan kuasanya secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. Dengan demikian independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan Pemanggilan RUPS pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib dimaksud tersedia pula bagi Pemegang saham yang dapat diunduh saat RUPS melalui QR code yang disediakan dan pokok-pokok tata tertib RUPS tersebut juga dibacakan sebelum RUPS dimulai. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	1.2 **Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.**	Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSI hadir. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	1.3 **Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.**	Ringkasan Risalah RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2024, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dan telah diunggah pada Situs Web BSI, Web BEI, dan eASY KSEI (Web KSEI). **Keterangan: Terpenuhi (Comply)**
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1 **Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.**	BSI telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary & Communication* pada Bab V. Komunikasi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik (Public Expose), Pertemuan Analis (Analyst Meeting), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, BSI juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui web BSI. Pada web tersebut terdapat pula informasi alamat kantor pusat dan kantor cabang BSI, alamat e-mail, akses media sosial serta contact center sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	2.2 **Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.**	BSI senantiasa mengelola informasi dalam situs web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat memperoleh informasi terbaru terkait BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 **Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.**	BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2023 jumlah anggota Dewan Komisaris BSI berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BSI tidak melebihi jumlah anggota Direksi. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	3.2 **Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.**	Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada web Perseroan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 **Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (selfassessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris**	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	4.2 **Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.**	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	4.3 **Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.**	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	4.4 **Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi**	Kebijakan suksesi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi		
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 **Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.**	BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2023, jumlah Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	5.2 **Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.**	Direksi BSI memiliki latar belakang keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi pada web Perseroan. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	5.3 **Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.**	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BSI adalah Direktur Finance & Strategy yaitu Bapak Ade Cahyo Nugroho dengan pendidikan, pengalaman dan kompetensi di bidang keuangan hal tersebut dapat dilihat pada profil beliau pada web Perseroan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 **Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi**	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	6.2 **Kebijakan penilaian sendiri (self-*assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.**	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	6.3 **Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.**	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di BSI
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	**7.1** Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	Untuk mencegah terjadinya insider trading, BSI telah memiliki kebijakan yang mengatur hal tersebut di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) *Corporate Secretary & Communication*. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.	BSI telah memiliki kebijakan anti fraud. Kebijakan anti fraud BSI merupakan landasan pokok penerapan strategi anti fraud melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian fraud, yaitu: 1. Pencegahan Fraud; 2. Deteksi Fraud; 3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi Fraud; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Fraud. Kebijakan Anti Fraud BSI dapat diakses pada web BSI. BSI juga memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	BSI telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu SPO *Procurement* dan PTO *Procurement* pengadaan barang dan jasa. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	BSI memiliki kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur yang dijadikan pedoman dalam memberikan pinjaman kepada kreditur. Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk BSI. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *system whistleblowing*	BSI telah memiliki kebijakan *whistleblowing system* yang merujuk pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit BSI dan telah diunggah dalam web BSI (www.bankbsi.co.id) **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
Aspek 5: Keterbukaan Informasi		
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	**8.1** Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	BSI selalu mengelola Web Perseroan seoptimal mungkin sehingga informasi yang diperoleh pemegang saham atau investor atau publik merupakan informasi yang terbaru dan akurat. Selain Situs web, BSI juga memanfaatkan teknologi seperti SMS Banking dan Mobile Banking. Memanfaatkan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter untuk media keterbukaan Informasi. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini. **Keterangan: Terpenuhi (*Comply*)**

Good Corporate Governance Assessment

Self Assessment

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSI telah secara rutin melaksanakan *self-assessment* pelaksanaan GCG. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kajian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan regulator. Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di lingkungan BSI dilaksanakan setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. Hasil *self assessment* GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5.

Kriteria Penilaian

Pelaksanaan *self assessment* terhadap penerapan GCG mengacu pada Surat Edaran OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian penerapan GCG dilaksanakan melalui *self assessment* yang dilaksanakan oleh *Compliance Group*.

Skor Penilaian

PENILAIAN FAKTOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE Semester 1 Tahun 2024		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	2	"Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank".

Analisis

Berdasarkan hasil *Self Assesment* terhadap aspek *Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome* atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk posisi Semester 1 Tahun 2024, Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**
   a. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku serta tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta seluruh anggota memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang mendukungnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selain upaya yang terus dilakukan dalam melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
   b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
   c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   d. Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
   e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik. Selama Semester 1 tahun 2024 telah diselenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) kali, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (Rakomdir) sebanyak 7 (tujuh) kali.

2. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**
   a. Bank telah memiliki jumlah anggota Direksi melebihi jumlah minimum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain terkait dengan rangkap jabatan, independensi, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi..
   b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
   c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   d. Direksi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
   e. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi. Selama Semester 1 Tahun 2024 telah diselenggarakan 25 (dua puluh lima) kali rapat Direksi.
   f. Direksi telah melaksanakan pengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip GCG. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

3. **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**
   a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/ sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan/mengundang unit kerja terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.
   c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

4. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**
   a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
   b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
   c. Selama Semester 1 tahun 2024 DPS telah melaksanakan:

Rapat DPS	Pemberian Opini DPS	Uji Petik
16	24	27

5. **Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa**
   a. Secara umum Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.
   b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
   c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. **Penanganan benturan kepentingan**
   a. Bank telah memiliki ketentuan internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Indonesia, Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Indonesia dan Standar Prosedur Operasional Human Capital.
   b. Selama semester 1 Tahun 2024, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
   c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. **Penerapan fungsi kepatuhan**
   a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
   b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan.
   c. Guna memastikan setiap ketentuan internal dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap ketentuan internal yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan uji kepatuhan.
   d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan regulator.

8. **Penerapan fungsi audit intern**
   a. Kecukupan aspek Governance Struktur terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      1. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
      2. Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern serta ketentuan internal terkait dengan Audit Intern diantaranya Kebijakan Internal Audit Bank Syariah Indonesia, Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit dan PTO Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Online.
      3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja sumber daya manusia.
   b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      1. Direksi bersama SKAI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI.
      2. Temuan SKAI dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh SKAI dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
      3. SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
   c. Kualitas *outcome* atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders* (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

9. **Penerapan fungsi audit ekstern**
   a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
   b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen.
   c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. **Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**
   a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
   b. Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
   c. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal**
   a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi yang memadai.
   b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui website www.bankbsi.co.id dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap *stakeholders*. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
   d. Laporan pelaksanaan GCG telah disampaikan tepat waktu kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan GCG tahun buku 2023 telah dilaporkan ke OJK tanggal 23 April 2024 melalui surat nomor 04/736-3/DIR-CPG.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Kekuatan Pelaksanaan GCG**
   a. ***Governance Structure***
      Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.

   b. ***Governance Process***
      Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.

   c. ***Governance Outcome***
      Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Juni 2024 *(unaudited)* pada tabel berikut:

Pos	Juni	Penjelasan
Laba Perusahaan	3.401,32	Kinerja BSI di Juni 2024 secara YoY mengalami peningkatan antara lain: 1. Laba Perusahan meningkat dikarenakan sbb.: a. Meningkatnya pendapatan margin b. Meningkatnya *Fee Based Income* c. Kenaikan OHC yang terjaga 2. Asset meningkat dikarenakan sbb.: a. Meningkatnya DPK b. Meningkatnya Pembiayaan
Jumlah Asset	360.850,48	
OHC	5.074,15	
Pembiayaan	257.387,61	
Dana Pihak Ketiga	296.697,95	
a. Giro	55.338,45	
b. Tabungan	128.776,00	
c. Deposito	112.583,50	
CASA	184.114,45	

Sementara secara non finansial selama Semester I tahun 2024 Bank mendapatkan total 49 (empat puluh sembilan) penghargaan diantaranya :
1. The Best CEO 2023 (SWA)
2. Best Investor Relation – Banking Indonesia 2023 (International Finance Award)
3. Top Rank Sharia Bank in Satisfaction, Loyalty & Engagement 2024 (Infobank)
4. The Best Integrated CSR Program (First Indonesia)
5. The Best Leadership Focus on CSR Program (First Indonesia)
6. The Most Promising Company in Social Media Utilization for Banking Industry (Markplus Indonesia)
7. The Best Bank Umum Syariah 2024 (Infobank)
8. The Best Islamic Bank by Country – Indonesia (Islamif Finance News)
9. Big Cap - Kapitalisasi Pasar di atas Rp25 Triliun (Investortrust.id)
10. Best Islamic Wealth Manager (Global Private Banker)

2. **Kelemahan Pelaksanaan GCG**
   1. Sehubungan dengan RUPS Tahunan Bank yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, terdapat pengurus Perseroan yang diangkat melalui RUPS Tahunan tersebut belum lulus *fit & proper test* maupun belum mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu:
      a. 3 orang anggota Dewan Komisaris dan 2 orang anggota Direksi. Saat ini sedang dalam tahap reviu dan pemenuhan atas dokumen pengajuan *fit & proper test* OJK.
      b. 2 orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Saat ini sedang dalam tahap reviu dan pemenuhan dokumen pengajuan persetujuan kepada OJK.
   2. Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process*, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum selaras dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS, serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui Uji Petik terhadap implementasi prinsip syariah pada kantor cabang, penguatan aspek syariah melalui berbagai pelatihan, penyusunan dan pengkinian atas modul digital syariah, pelaksanaan *sharia combined assurance* dan proses digitalisasinya serta terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi.
   3. Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti dan memerlukan perhatian dari manajemen. Saat ini Bank telah melakukan *root cause analysis identification* yang digunakan untuk menetapkan tindak lanjut dalam upaya memitigasi agar tidak terjadi denda yang sama pada periode selanjutnya.

Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* Semester 2 Tahun 2024		
	Peringkat	**Definisi Peringkat**
Individual	**2**	"Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum BAIK. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank".

Analisis

Berdasarkan hasil *Self Assesment* terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process dan Governance Outcome* atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG untuk posisi Semester 2 Tahun 2024, Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang secara umum Baik, yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**
   a. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* dari OJK. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku serta tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi. Dewan komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta seluruh anggota memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai yang mendukungnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selain upaya yang terus dilakukan dalam melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.
   b. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
   c. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   d. Dewan Komisaris telah memiliki Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
   e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa tindakan pengawasan, evaluasi serta independensi dari Dewan Komisaris telah memadai, termasuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain melalui forum rapat Dewan Komisaris atau rapat Dewan komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang secara rutin untuk memastikan kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip GCG. Seluruh hasil rapat tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik. Selama Semester 2 tahun 2024 telah diselenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 8 (delapan) kali, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris (Rakomdir) sebanyak 5 (lima) kali.

2. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi**
   a. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* dari OJK. Bank telah memiliki jumlah anggota Direksi melebihi jumlah minimum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain terkait dengan rangkap jabatan, independensi, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi..
   b. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator, (dhi. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
   c. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
   d. Direksi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta *best practice* pelaksanaan GCG.
   e. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien dan setiap keputusan Rapat Direksi dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi. Selama Semester 2 Tahun 2024 telah diselenggarakan 20 (dua puluh) kali rapat Direksi.
   d. Direksi telah melaksanakan pengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip GCG. Temuan hasil audit telah ditindaklanjuti, serta hal-hal lain terkait dengan *governance process* telah dipenuhi dan memberikan hasil yang optimal.

3. **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite**
   a. Bank telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite telah memiliki Piagam/ sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
   b. Seluruh Komite menjalankan tugasnya secara independen dan efektif melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin melibatkan / mengundang unit kerja terkait agar mendapat masukan secara komprehensif dan terperinci mengenai permasalahan dan kondisi dalam kegiatan operasional.
   c. Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyampaikan laporan secara rutin atau rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

4. **Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah**
   a. Kompetensi, reputasi dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.
   b. Pengangkatan/penggantian anggota DPS serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku.
   c. Selama Semester 2 tahun 2024 DPS telah melaksanakan:

Rapat DPS	Pemberian Opini DPS	Uji Petik
16	23	19

5. **Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa**
   a. Secara umum Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.
   b. Proses pengembangan produk dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan Bank secara umum telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.
   c. Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. **Penanganan benturan kepentingan**
   a. Bank telah memiliki ketentuan internal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Bank Syariah Indonesia, Kebijakan Anti Fraud Bank Syariah Indonesia dan Standar Prosedur Operasional Human Capital.
   b. Selama semester 2 Tahun 2024, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.
   c. Kebijakan intern mengenai benturan kepentingan yang diterapkan Bank dapat menghindarkan terjadinya benturan kepentingan sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

7. **Penerapan fungsi kepatuhan**
   a. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama serta tidak membawahi fungsi bisnis dan operasional, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, maupun audit intern. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
   b. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait fungsi kepatuhan.
   c. Guna memastikan setiap ketentuan internal dan produk yang diluncurkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku maka setiap ketentuan internal yang diterbitkan terlebih dahulu dilakukan uji kepatuhan.
   d. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara tepat waktu. Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan regulator.

8. **Penerapan Fungsi Audit Intern**
   a. Kecukupan aspek *Governance Structure* terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      1. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
      2. Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern serta ketentuan internal terkait dengan Audit Intern diantaranya Kebijakan Internal Audit Bank Syariah Indonesia, Standar Prosedur Pengendalian Internal Audit dan PTO Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Online.
      3. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia SKAI terus dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja sumber daya manusia.
   b. Efektivitas proses pelaksanaan GCG terkait penerapan fungsi audit intern telah memadai, tercermin:
      1. Direksi bersama SKAI berupaya menjamin terselenggaranya pengendalian intern dalam setiap tingkatan manajemen melalui pelaksanaan pemeriksaan dan secara aktif mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan SKAI.
      2. Temuan SKAI dalam Laporan Hasil Audit telah mendapat disposisi dan arahan Direksi serta tindak lanjutnya dimonitor oleh SKAI dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
      3. SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
   c. Kualitas *outcome* atas penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders* (dhi. Komisaris), tercermin dalam laporan yang disampaikan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala, yaitu realisasi rencana audit; rekomendasi dan temuan signifikan; serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan disposisi Direksi.

9. **Penerapan Fungsi Audit Ekstern**
   a. Pelaksanaan audit oleh KAP berjalan efektif dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
   b. Penunjukan Akuntan Publik/KAP telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP independen.
   c. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik/KAP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. **Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**
   a. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.
   b. Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
   c. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan tentang BMPD kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan GCG serta Pelaporan Internal**
   a. Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen, didukung oleh Sistem Teknologi Informasi Bank terkait pemeliharaan asset dan informasi yang memadai.
   b. Bank secara transparan menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui website www.bankbsi.co.id dan media yang memadai sehingga dapat dengan mudah diakses oleh segenap *stakeholders*. Informasi berupa laporan keuangan dan non keuangan juga telah dilaporkan kepada regulator dan stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
   d. Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan tepat waktu kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan GCG Tahun Buku 2023 telah dilaporkan ke OJK melalui surat No. 04/736-3/DIR-CPG tanggal 23 April 2024.

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka kelemahan dan kekuatan pelaksanaan implementasi GCG di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Kekuatan Pelaksanaan GCG**
   a. ***Governance Structure***
   Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
   b. ***Governance Process***
   Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*.
   c. ***Governance Outcome***
   Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2024 *(unaudited)* pada tabel berikut:

Pos	Desember	*Growth* YoY		Penjelasan
	Nom	Nom	%	
Laba Perusahaan	7.002,96	1.299,22	22,78%	Kinerja BSI di Desember 2024 secara YoY mengalami peningkatan antara lain: 1. Laba Perusahan meningkat dikarenakan sbb.: a. Meningkatnya pendapatan margin b. Meningkatnya *Fee Based Income* c. Kenaikan OHC yang terjaga 2. Aset meningkat dikarenakan sbb.: a. Meningkatnya DPK b. Meningkatnya Pembiayaan
Jumlah Asset	408.811,92	55.187,80	15,61%	
OHC	11.658,03	1.537,37	15,19%	
Pembiayaan	278.481,27	38.165,22	15,88%	
Dana Pihak Ketiga	327.454,17	33.678,24	11,46%	
a. Giro	56.335,60	3.134,21	5,89%	
b. Tabungan	140.534,22	15.807,77	12,67%	
c. Deposito	130.584,35	14.736,26	12,72%	
CASA	196.869,81	18.941,98	10,65%	

Sementara untuk non finansial selama Semester 2 tahun 2024 Bank mendapatkan total 108 (seratus delapan) penghargaan diantaranya:
1. *The Most Profitable Sharia Bank* 2024
2. 1st *Winner of Indonesia Customer Service Quality Award* 2024
3. *Most Sharia Bank for Excellence Good Corporate Governance*
4. *Top* 20 *Financial Institution* 2024
5. *The Most Committed Top Leader on Human Capital* 2024
6. Lembaga/Instansi yang mendukung Percepatan Sertifikasi Halal di Jawa Timur
7. *Best* BUMN *Awards 2024 for Developing Sharia Economic Ecosystem Continuous Innovation, Category: Subsidiary*
8. Indonesia *Most Powerful Women* 2024 *in Implementing Inclusive Organizational Management to Create Productive Environtment*
9. *The Most Trusted Company*
10. *The Best Industry Marketing Champion* 2024 *for the Commercial Banking sector.*

2. **Kelemahan Pelaksanaan GCG**
   1. Sehubungan dengan RUPS Tahunan Bank yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 yang lalu, terdapat 1 (orang) anggota DPS yang diangkat melalui RUPS tersebut belum mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimoen, MA*
   **Belum efektif pada Semester 2 2024 namun telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat OJK Nomor SR-13/PB.02/2025 tanggal 09 Januari 2025 dan pengangkatannya telah dilaporkan ke OJK melalui Surat Nomor 05/081-3/DIR-CSG tanggal 13 Januari 2025.*
   2. Pelantikan Bapak Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) sebagai Kepala BPI Danantara* pada tanggal 22 Oktober 2024, yang dikategorikan sebagai Pejabat Publik, berpotensi menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Komisaris Independen sesuai POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka perubahan jabatan Bpk Muliaman D. Hadad sebagai Komisaris Utama tanpa merangkap Komisaris Independen akan dikukuhkan dalam RUPS Tahunan mendatang.
   ** Per tanggal laporan TKB posisi 31 Desember 2024, belum terdapat legalitas kelembagaan BPI Danantara.*
   3. Dari hasil *self assessment* terhadap *governance process*, masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh Produk Bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai.
   Pemetaan *root cause* atas ketidaksesuaian implementasi prinsip syariah pada aktivitas penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana antara lain dilakukan melalui uji petik, di mana aspek *awareness* dan kompetensi yang menjadi isu dominan ditindaklanjuti dengan melaksanakan *sharia collaborative forum*, sertifikasi kompetensi aspek syariah pegawai jaringan, serta literasi kepada tiga pilar (*risk* – operasional – bisnis).
   4. Masih terdapat denda dari regulator yang perlu ditindaklanjuti dan memerlukan perhatian dari manajemen. Saat ini Bank telah melakukan *root cause analysis identification* yang digunakan untuk menetapkan tindak lanjut dalam upaya memitigasi agar tidak terjadi denda yang sama pada periode selanjutnya.

Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal

Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Tahun 2024, merupakan kali keempat BSI mengikuti ajang penilaian penerapan tata kelola yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang dikenal dengan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG yang pertama di Indonesia untuk melakukan penilaian kualitas *corporate governance* suatu perusahaan yang diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Program CGPI diinisiasi sebagai upaya mendukung peningkatan penerapan praktik terbaik tata kelola yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam ekonomi bisnis, yang terdiri dari pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat bisnis dan pihak pendukung bisnis. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan yang beretika dan bermartabat, khususnya memperhatikan proses penciptaan nilai tambah bagi seluruh stakeholders.

Dengan demikian, program CGPI diharapkan mampu memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep *Corporate Governance* (CG) dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas agar secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan dan menerapkan GCG. Selain itu, program CGPI juga bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas GCG melalui perbaikan yang berkesinambungan sehingga program CGPI dapat menjadi sarana yang strategis dalam menyusun database, melakukan pemetaan (*mapping*) kondisi CG di Indonesia, dan menjadi *benchmark* implementasi GCG pada perusahaan publik, BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia.

Perusahaan peserta CGPI dapat memberikan manfaat dalam mengukur dan meningkatkan praktik GCG, serta upaya meningkatkan reputasi Perusahaan secara keseluruhan, menciptakan daya Tarik bagi para pemangku kepentingan, dan potensi keberhasilan jangka Panjang di pasar. Disamping itu Perusahaan peserta CGPI dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik, sehingga mampu mendorong seluruh anggota Perusahaan untuk menerapkan GCG secara lebih baik sesuai lingkup bisnisnya. Hasil CGPI menunjukkan perilaku kesungguhan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Beberapa manfaat yang dapat diperolah Perusahaan peserta CGPI antara lain:



Kriteria Penilaian

CGPI 2023 dengan tema "Membangun Kematangan Perusahaan dalam Kerangka GCG" dinilai dari pemenuhan aspek dan indikator penilaian, meliputi 3 aspek penilaian yang kemudian dirinci kedalam 24 indikator penilaian. Penjelasan secara rinci disimak sebagai berikut:

1. **Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)**
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan Organ, struktur dan infrastruktur yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Secara rinci aspek struktur tata kelola ini terdiri dari beberapa indikator berikut:

a. Pemegang Saham & RUPS
b. Dewan Direksi
c. Direksi
d. Organ Pendukung Dewan Komisaris
e. Organ Kelengkapan Direksi
f. Manajemen Fungsional

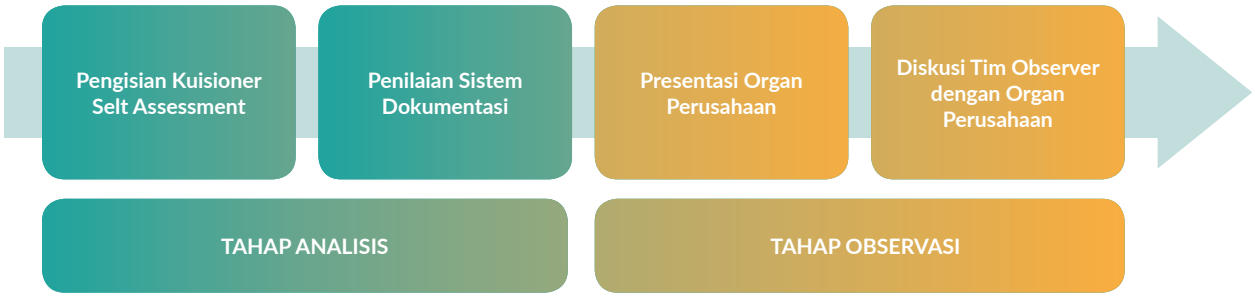
2. **Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*)**
Aspek ini merupakan penilaian terhadap sistem manajemen yang mampu mewujudkan optimalisasi seluruh fungsi manajemen sesuai dengan perubahan lingkungan konstektual perusahaan, serta prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek proses tata kelola terdiri dari beberapa indikator berikut:

a. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham dan RUPS
b. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi
c. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian
d. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi
e. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko
f. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kepatuhan
g. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengendalian dan Pengawasan
h. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perencanaan Strategis.
i. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi
j. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi
k. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
l. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi
m. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Membangun Kematangan Perusahaan

3. **Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)**
Aspek ini merupakan penilaian terhadap kinerja perusahaan yang optimal, berhasil guna, dan berdaya guna dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek hasil tata kelola terdiri dari beberapa indikator berikut:

a. Hasil dari Tata Kelola Organ Perusahaan
b. Kesesuaian Perilaku Keorganisasian
c. Hasil dari Tata Kelola Risiko, Kepatuhan, serta Pengendalian dan Pengawasan.
d. Hasil dari Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
e. Hasil dari Tata Kelola Membangun Kematangan Perusahaan

Tahapan dalam penilaian CGPI 2024



Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG).

Skor Penilaian

91,80
(Sangat Terpercaya)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam Program Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024 untuk penilaian tahun 2023 memperoleh capaian nilai sebesar 91,80. Berdasarkan kategori pemeringkatan nilai CGPI 2023, PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki nilai yang termasuk dalam predikat "Sangat Tepercaya".

Struktur Tata Kelola (30,82)	Proses Tata Kelola (30,45)	Hasil Tata Kelola (30,53)

Rincian nilai untuk setiap aspek penilaian CGPI 2024 untuk penilaian tahun 2023 yang dicapai PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)	Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*)	Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)
30,82 (dari nilai maksimum **33,33**) atau pencapaian **92,46%**	**30,45** (dari nilai maksimum **33,34**) atau pencapaian **91,32%**	**30,53** (dari nilai maksimum **33,33**) atau pencapaian **91,61%**

Hasil CGPI 2024 untuk penilaian tahun 2023 yang diperoleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan predikat "Sangat Tepercaya" tersebut menggambarkan bahwa organ perusahaan dan segenap anggota perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan prinsip dan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG). PT Bank Syariah Indonesia Tbk juga telah membangun sistem manajemen yang optimal, berkualitas dan bermutu tinggi dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, sesuai prinsip, nilai dan kepatuhan GCG. Dengan demikian PT Bank Syariah Indonesia Tbk dapat menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Beberapa rekomendasi BSI atas keikutsertaan pada CGPI 2024 mencakup pada aspek struktur tata kelola, aspek proses tata kelola dan aspek hasil tata kelola. Beberapa indikator penilaian CGPI masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Komitmen BSI untuk terus berupaya menjalankan praktik bisnis yang sehat, etikal dan bermartabat adalah salah satunya dengan mengikuti beberapa rekomendasi atas penilaian CGPI 2024. BSI meyakini, peningkatan dalam hal aspek tata kelola merupakan kunci dalam keberlanjutan BSI.

ASEAN *Governance Corporate Scorecard* (ACGS)

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, Bank Syariah Indonesia melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF), yang disebut ASEAN *Corporate Governance* (CG) *Scorecard*.
ASEAN CG *Scorecard* digunakan untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, *Sustainability Report*, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, *Website* Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya.

Kriteria Penilaian

Adapun komponen penilaian ASEAN CG *Scorecard* adalah sebagai berikut:

a. Hak-hak dan Perlakuan yang setara terhadap Pemegang Saham
b. Keberlanjutan dan Ketahanan
c. Pengungkapan dan Transparansi
d. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang Melakukan Penilaian dilakukan oleh ACMF melalui *Domestic Ranking Body* (DRB) yang ditunjuk oleh regulator masing-masing negara sebagai perwakilan di setiap negara peserta. DRB melakukan penilaian di skala nasional, untuk selanjutnya dilakukan *peer review* oleh DRB negara anggota ASEAN yang lain. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) sebagai DRB untuk melakukan penilaian di Indonesia.

Skor Penilaian

Lebih dari 80% praktik tata kelola yang diterapkan BSI telah mengadopsi pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN CG *Scorecard*. BSI dinilai sudah mampu melampaui kepatuhan terhadap persyaratan minimal standar internasional dan praktik tata kelola yang berada jauh diatas rerata penerapan pada emiten atau Perusahaan public (Tbk) yang masuk dalam 100 kapitalisasi pasar terbesar di bursa (*Big Cap*).

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

BSI senantiasa berusaha untuk melakukan penyempurnaan, tanpa terkecuali dalam hal praktik terbaik untuk tata kelola. Karenanya, beberapa rekomendasi atas *assessment* oleh pihak eksternal tidak luput untuk dilakukan tindaklanjut secara *continue*. Tentu saja hal ini bagi BSI merupakan bentuk komitmen bersama manajemen dan pegawai dalam rangka melakukan perbaikan terhadap implementasi praktik tata kelola ke depan, terutama untuk beberapa indikator penilaian yang masih perlu dilakukan penyempurnaan. BSI meyakini, minimalisir gap praktik tata kelola dengan standar prinsip-prinsip yang diatur dalam ASEAN CG *Scorecard* akan berdampak dalam eksistensi BSI untuk jangka panjang.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

08 »



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BSI senantiasa berupaya bahwa setiap keputusan dan aktivitas bisnis yang dilakukan mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya. Bank memandang bahwa tanggung jawab sosial merupakan sebuah kebutuhan yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, arah pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah dalam upaya meningkatkan peran Bank dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, BSI telah berkomitmen dalam menerapkan program keuangan berkelanjutan yang merupakan dukungan sektor keuangan dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Bank sangat menyadari bahwa sistem keuangan dapat mengambil peran penting dalam mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, yang akhirnya berdampak pada kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Sebagai lembaga jasa keuangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di BSI mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik dan standar internasional yaitu ISO 26000. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait tata kelola keberlanjutan, kinerja ekonomi berkelanjutan, kinerja lingkungan berkelanjutan dan kinerja sosial berkelanjutan disampaikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.

09 »



INDEKS REFERENSI OJK

Indeks Referensi
OJK

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
UMUM			
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.		√	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		√	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.		√	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√	POJK 29
KILAS KINERJA			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain: Information includes, among others:		
	1. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus.	19	SEOJK 10
	2. Laba bruto.	19	SEOJK 16
	3. Laba/Rugi Operasional.	19	SEOJK 10
	4. Laba /Rugi sebelum pajak.	19	
	5. Laba /Rugi bersih.	19	
	6. Laba (rugi).	19	SEOJK 16
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	19	SEOJK 10 SEOJK 16
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	*Not Applicable*	SEOJK 16
	9. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	*Not Applicable*	
	10. Laba (rugi) per saham.	19	SEOJK 10 SEOJK 16
	11. Jumlah aset.	18	
	12. Jumlah liabilitas.	18	
	13. Jumlah ekuitas.	19	
	14. Dana pihak ketiga.	19	SEOJK 10
	15. Pembiayaan yang diterima.	19	
	16. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	21	SEOJK 16 SEOJK 10
	17. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	21	
	18. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	21	
	19. Rasio lancar.	21	SEOJK 16
	20. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	21	
	21. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	21	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	22. Rasio KPMM.	21	SEOJK 10
	23. Aset produktif.	21	
	24. Rasio NPF gross dan net.	21	
	25. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	21	
	26. *Cost to Income Ratio* (CIR).	21	
	27. Persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD. /	21	
	28. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	21	
	29. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	21	
	30. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	21	SEOJK 10 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:		
	a. Jumlah saham yang beredar.	22	
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	22	
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	22	
	d. *Volume* perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	22	
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	23	SEOJK 16
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.	*Not Applicable*	
	b. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham. c. bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.	*Not Applicable*	
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.	*Not Applicable*	
	e. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).	*Not Applicable*	
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.	*Not Applicable*	
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	23	SEOJK 16
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	23	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	35-36	SEOJK 10 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	36	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	36	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	37	SEOJK 10 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	37	
	f. Aktivitas utama.	33	SEOJK 10
	g. Teknologi informasi.	34	
	h. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM.	33	
	i. Persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana.	35	
	j. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	34	
	k. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	33	
	l. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	33	
	m. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS.	*Not Applicable*	
	n. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan.	37-38	
	o. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	37-38	
	p. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	33	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	37-38	SEOJK 10 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	38-40	
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	45-46	SEOJK 16 SEOJK 10
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	46	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	46-48	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	48-49	SEOJK 10
	5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	45	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	56-57	SEOJK 16 POJK 29

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:		SEOJK 10 SEOJK 16
	1. Alamat	60-71	
	2. Nomor telepon	60-71	
	3. Alamat surat elektronik	60-71	
	4. Alamat situs web	60-71	
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	72-73	SEOJK 10 SEOJK 16
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup		SEOJK 10 SEOJK 16
	1. Visi Perusahaan	74	
	2. Misi Perusahaan	75	
	3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki Perusahaan.	74-75	
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 10 SEOJK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	76	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	76-77	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	78-85	
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	86-88	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	90-91	SEOJK 10 SEOJK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	89	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:		SEOJK 10 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.	92-103	
	2. Foto terbaru.	92-103	
	3. Usia.	92-103	
	4. Kewarganegaraan.	92-103	
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.	92-103	
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	92-103	
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan	92-103	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	92-103	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	92-103	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	104	SEOJK 10 SEOJK 16 POJK 13
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	104-106	SEOJK 16
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatan.	107-118	
	2. Foto terbaru.	107-118	
	3. Usia.	107-118	
	4. Kewarganegaraan.	107-118	
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.	107-118	
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:	107-118	
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris	107-118	SEOJK 10 SEOJK 16
	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.	107-118	
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	107-118	
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	107-118	
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	119	SEOJK 10 SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.	*Not Applicable*	SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	119-121	SEOJK 16
Profil Dewan Pengawas Syariah	Paling sedikit meliputi:		
	1. Susunan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota DPS yang terjadi setelah Tahun Buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan DPS sebelum dan setelah perubahan;	122-127	SEOJK 10
	2. Foto terbaru ;	122-127	
	3. Usia;	122-127	
	4. Kewarganegaraan;	122-127	
	5. Riwayat pendidikan;	122-127	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi : (i) Nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota DPS ; (ii) Rangkap jabatan anggota DPS (jika ada); dan (iii) Pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;	122-127	
	7. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota DPS selama Tahun Buku (jika ada). .	128	
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	130-134	SEOJK 10
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	135-136	SEOJK 10 SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:		SEOJK 10 SEOJK 16 POJK 17
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.	140	
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	142-143	
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	142-143	
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.	141	SEOJK 16
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:		SEOJK 16
	a. Kepemilikan institusi lokal.	143	
	b. Kepemilikan institusi asing.	143	
	c. Kepemilikan individu lokal.	143	
	d. Kepemilikan individu asing.	143	
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	144	SEOJK 10 SEOJK 16
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	144	SEOJK 10 SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha BUS	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:		SEOJK 10
	Struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:		
	a. Struktur kelompok usaha BUS, antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi (*sister company*), Entitas Induk sampai dengan *ultimate shareholder*.	145	
	b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS.	145	
	c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.	145	
Kronologis pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	146-147	SEOJK 16
Informasi pencatatan efek lainnya	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).	146-148	SEOJK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:		SEOJK 16
	1. Nama dan alamat.	148	
	2. Periode penugasan.	148	
	3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan.	148	
	4. Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing- masing penugasan yang diberikan selama tahun buku.	148	
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.	148	
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	149-150	SEOJK 16 SEOJK 10
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain:		SEOJK 10
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).	151-154	
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.	151-154	
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.	151-154	
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	154	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (*corporate plan*).	-	SEOJK 13 POJK 17
	2. Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).	164	
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 10 SEOJK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	170-176	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	171-176	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	171-176	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	171-176	
	d. Profitabilitas.	171-176	
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 10 SEOJK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	178-179, 182-183	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	180-181, 183-184	
	3. Penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset.	178-179, 182	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	180-181, 183-184	
	5. Ekuitas.	181, 184	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	185-187	
	7. Arus kas.	188-189	
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		196-201	SEOJK 10
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	195	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	196	
Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*).	Penjelasan atas:		SEOJK 16
	1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas.	200-203	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*).	203	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	203	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	241	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.	241	
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan- ikatan tersebut.	241	
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.	241	
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	241	
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Jenis investasi barang modal.	241-242	
	2. Tujuan investasi barang modal.	242	
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	241-242	
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	244-245	SEOJK 16
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		SEOJK 16
	1. Pendapatan/penjualan.	246	
	2. Laba (rugi).	246	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	246-247	
	4. Pemasaran.	247-249	
	5. Pengembangan SDM.	249	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	246	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	250	
	2. Laba (rugi).	-	
	3. Struktur modal (*capital structure*).	-	
	4. Kebijakan dividen.	250	
	5. Pemasaran.	251-253	
	6. Pengembangan SDM.	253	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	250	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	164-169	SEOJK 10 SEOJK 16
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	253-254	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	254	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	254	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	254	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	1. Total perolehan dana.	254-256	
	2. Rencana penggunaan dana.	254-256	
	3. Rincian penggunaan dana.	254-256	
	4. Saldo dana.	254-256	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).		
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.	254-256	
	b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.	254-256	
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.		
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:		
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.	256-257, 263	
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.	259-262	
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).	259-262	
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.	258, 263	
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.	258, 263	
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).	258, 263	
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms length principle*).	258, 263	SEOJK 16 SEOJK 13
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	258, 263	
	h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.	258, 263	
	i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	258	
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.	264-265	
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	264-265	SEOJK 16
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		
	1. Perubahan kebijakan akuntansi.	266	
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi.	266	SEOJK 16
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	266	
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Laporan distribusi bagi hasil.		192-194	SEOJK 10
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf.		191	SEOJK 10
Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.		192	SEOJK 10
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	203-241	SEOJK 10
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:		
	a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.	299-307	
	b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.	299-307	SEOJK 16
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Direksi.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	308	PBI 11 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi.	309	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	309-321	SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:		
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).	321	SEOJK 16
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).	321-327	
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:		
	a. Prosedur penilaian kinerja.	328	
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.	328	SEOJK 16
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. Bank yang bersangkutan. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.	375-376	PBI 11 POJK 17
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	329-330	PBI 11 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris.	332	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	335-345	PBI 11 SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:		SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).	345	
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).	345-351	
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.	353, 355	
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.	354, 355	
	c. Pihak yang melakukan penilaian.	354-355	
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:		SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.	356-357	
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.	356-357	
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	370	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		SEOJK 16
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	370-371	
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.	371	
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan **Catatan:** apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	371	
	d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	-	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:		SEOJK 16 PBI 11
	a. Nama.	358	
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.	358	
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.	358	
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.	358	
	e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	366-369	
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	380-382	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.	380-382	
	3. Kewarganegaraan.	380-382	
	4. Riwayat pendidikan.	380-382	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	380-382	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	380-382	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.	380-382	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.	380-382	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	378-379	
	8. Pernyataan independensi komite audit.	383	
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	384	
	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	384-387	PBI 11 SEOJK 16 POJK 17
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit.	387	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	389-390	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.	389-390	
	3. Kewarganegaraan.	389-390	
	4. Riwayat pendidikan.	389-390	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	389-390	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	389-390	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. .	389-390	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.	389-390	
	7. Pernyataan independensi komite.	391	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada). .	392	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	388	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*). .	388	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	392-393	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	393	
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	397-399	
	2. Usia.	397-399	
	3. Kewarganegaraan.	397-399	
	4. Riwayat pendidikan..	397-399	
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.	397-399	
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).	397-399	
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.	397-399	
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.	397-399	
	7. Pernyataan independensi komite.	400	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada). .	401-402	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	395-396	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite.	396	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	402-407	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	407	
Sekretaris perusahaan.	1. Nama.	410	SEOJK 16
	2. Domisili.	410	
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.	410	
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. .	410	
	4. Riwayat pendidikan.	410	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	411	
	6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	411	
Unit Audit Internal.	1. Nama kepala unit audit internal.	413	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal..	413	
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. .	413	
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).	413	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	415	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	414	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	411-412	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	414	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal.	414	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	417	
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	436	
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	436	
	3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.	436	POJK 17
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	436	
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal Control*) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	439-440	SEOJK 16
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	441	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	441	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	443-446	
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	446-452	SEOJK 16
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	452	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	453	SEOJK 16
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	453-456	PBI 11 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	458-460	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.	458-460	
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.	458-460	
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian. **Catatan:** dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	458	PBI 11
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		460-462	SEOJK 16

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	474-475	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	475-476	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	475	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	430	POJK 59
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	430-432	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	432	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: Remuneration is associated with risks that include: a. Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	432-433	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	433	
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarannya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*malus*), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (*clawback*).	433	
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern.	433	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	434	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: Variable Remuneration includes: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	434	
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	434	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material *risk takers.*	434	
	12. *Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	435	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	435	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	435	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	435	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	435	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	435	
	18. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	435	
	19. Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	435	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee Stock ownership program*/ESOP).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock Ownership program*/MSOP) dan/ atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock Ownership program*/ESOP). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Jumlah saham dan/atau opsi.	477	
	2. Jangka waktu pelaksanaan.		
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.		
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.		
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka.	376-377	SEOJK 16
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.	376-377	
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	477	SEOJK 16
	2. Perlindungan bagi pelapor.	477	
	3. Penanganan pengaduan.	478	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan.	479	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:		
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku.	479	
	b. Tindak lanjut pengaduan.	479	
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *Fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	479-481	SEOJK 16 POJK 17
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	481-483	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Penanganan benturan kepentingan		483	PBI 11 POJK 17
Batas Maksimum Penyaluran Dana.		484	PBI 11
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah.		485	PBI 11 POJK 17
Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS.		485	PBI 11
Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (*internal fraud*) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (internal *fraud*) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	485	PBI 11
Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	485	PBI 11
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana.		485-486	PBI 11
Pendapatan non halal dan penggunaannya.		486	PBI 11
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	489-491	SEOJK 16
	2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	491-493	
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	506	SEOJK 16
	a) Penjelasan strategi keberlanjutan.		
	b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup).		
	c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik.		
	d) Penjelasan Direksi.		
	e) Tata kelola keberlanjutan.		
	f) Kinerja keberlanjutan.		
	g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.		
	h) Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada.		
	i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.		
	2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	3. Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:		
	a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau		
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.		
	4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan.		
	5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:		
	a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan		
	b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan.		
	7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023/
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hery Gunardi
   Alamat kantor : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
   Alamat rumah : Jl. Taman Mpu Sendok no. 31 & 33, kel. Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021 - 3040 5999
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Ade Cahyo Nugroho
   Alamat kantor : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
   Alamat rumah : Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021 - 3040 5999
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Strategi

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

We, the undersigned:

Name : Hery Gunardi
Office address : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
Domiciled address : Jl. Taman Mpu Sendok no. 31 & 33, kel. Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telephone number : 021 - 3040 5999
Title : *President Director*

Name : Ade Cahyo Nugroho
Office address : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
Domiciled address : Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
Telephone number : 021 - 3040 5999
Title : *Finance and Strategy Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank");*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
   a. *All information in the Bank's financial statements have been fully and correctly disclosed; and*
   b. *The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
3. *We are responsible for the Bank's internal control systems.*

The statement has been made truthfully.

Jakarta, 4 Februari/*February* 2025

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of Board of Directors;*

METERAI TEMPEL
A26E3AMX152834580

Hery Gunardi
Direktur Utama/
President Director

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Keuangan dan Strategi/
Finance and Strategy Director

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' Responsibility for the Audit of the Financial Statements" paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-315/KM.1/2024.

00019/2.1457/AU.1/07/0229-1/1/II/2025

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. **Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman qardh dan pembiayaan**

   Lihat Catatan 2d (Kebijakan akuntansi material - Cadangan kerugian penurunan nilai, Catatan 3a (Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting - Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan), Catatan 9 (Piutang), Catatan 10 (Pinjaman *qardh*), Catatan 11 (Pembiayaan *mudharabah*), dan Catatan 12 (Pembiayaan *musyarakah*) atas laporan keuangan.

   Pada tanggal 31 Desember 2024, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang (terdiri dari piutang *murabahah, istishna*, dan *ijarah*), pinjaman *qardh* dan pembiayaan (terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*) adalah sebesar Rp10.291 miliar. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan ditentukan oleh Bank berdasarkan kerangka sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berlaku seperti yang dijelaskan pada Catatan 2d atas laporan keuangan.

   Kami memberikan fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat bruto atas piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan yang mewakili 67% dari jumlah aset Bank, dan nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan yang signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan.

   Piutang *murabahah* yang secara individual tidak dianggap signifikan, Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan model parameter risiko dengan menggunakan parameter-parameter utama yaitu *Probability of Default* ("PD") dan *Loss Given Default* ("LGD"). Untuk piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. ***Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing***

   Refer to Note 2d (Material accounting policies - Allowance for impairment losses), Note 3a (Use of critical accounting estimates and judgments - Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing), Note 9 (Receivables), Note 10 (Funds of qardh), Note 11 (Mudharabah financing), and Note 12 (Musyarakah financing) to the financial statements.

   As at 31 December 2024, the allowance for impairment losses on receivables (which consists of murabahah, istishna, and ijarah receivables), funds of qardh and financing (which consists of mudharabah and musyarakah financing) of the Bank was Rp10,291 billion. The allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing was determined by the Bank based on framework under applicable Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") as described in Note 2d to the financial statements.

   We focused on this area due to the size of the gross carrying value of receivables, funds of qardh and financing, which represented 67% of the total assets of the Bank, and the significance of the amount of allowance for impairment losses provided against receivables, funds of qardh and financing to the Bank's financial statements. In addition, the determination of allowance for impairment losses involves significant management judgement.

   Murabahah receivables which are not considered to be individually significant, the Bank assessed allowance for impairment losses collectively by using the risk parameter modelling approach that incorporated key parameters such as Probability of Default ("PD") and Loss Given Default ("LGD"). For receivables, funds of qardh and financing, which are considered individually significant, the Bank assessed allowances for impairment losses individually by estimating the expected cash flows obtained from the receivables, funds of qardh and financing.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut ini atas hal audit utama tersebut:

- Kami memperoleh pemahaman atas pendekatan manajemen dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan.

- Ketika bukti objektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan melakukan pengecekan baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai dan mempertimbangkan bukti eksternal jika tersedia. Berdasarkan sampel, kami membandingkan jadwal pembayaran kembali dan tingkat pengembalian efektif yang digunakan pada perhitungan dengan informasi yang tertera pada perjanjian piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan.

- Kami menilai metodologi dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan model cadangan kerugian penurunan nilai. Kami menilai PD dan LGD terhadap persyaratan PSAK No. 402, yang melibatkan (i) penilaian model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan sebagai basis untuk penentuan tingkat PD dan LGD, dengan melibatkan spesialis Teknologi Informasi ("TI") kami.

- Kami melakukan perhitungan matematis ulang atas cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kerugian penurunan nilai dengan melibatkan spesialis TI kami.

2. **Pengoperasian dan pengendalian atas sistem teknologi informasi (TI) pelaporan keuangan**

Bank sangat bergantung pada infrastruktur, sistem dan pengendalian TI untuk kegiatan operasional sehari-hari dan proses pelaporan keuangan bisnis Bank. Lingkungan TI Bank dianggap kompleks karena banyaknya sistem pelaporan keuangan utama dan integrasi antar sistem. Oleh karena itu, kami menganggap pengoperasian dan pengendalian atas sistem TI pelaporan keuangan Bank sebagai hal audit utama.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- *We understood management's approach to calculate the allowance for impairment losses for receivables, funds of qardh and financing.*

- *When objective evidence of impairment was identified by the Bank and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of the impairment allowance by checking both the amount and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation and considering external evidence where available. On a sample basis, we compared the schedule of repayment and the effective rate of return used in the calculation with the information as stipulated in the agreements over the receivables, funds of qardh and financing.*

- *We assessed the methodology and significant assumptions used in determining the allowance for impairment losses model. We assessed the PD and LGD against the requirements of SFAS No. 402, which involved (i) assessing the model and methodology used in quantitative calculation; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used as the basis to determine the PD and LGD rates by involving our Information Technology ("IT") specialists.*

- *We performed independent mathematical recalculation of the collective allowance for impairment losses by involving our IT specialists.*

2. ***Operation and controls of financial reporting information technology (IT) systems***

The Bank is heavily reliant on its IT infrastructure, systems and controls for its daily operations and the financial reporting processes of its business. The IT environment of the Bank is considered complex due to the number of key financial reporting systems and the interfaces among the systems. Given these factors, we consider the operation and controls of the financial reporting IT system of the Bank to be a key audit matter.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut ini atas hal audit utama tersebut:

- Kami melibatkan spesialis TI untuk menilai risiko yang terkait dengan lingkungan TI Bank sehubungan dengan proses pelaporan keuangan.
- Kami memperoleh pemahaman tentang sistem TI dan pengendalian yang mendukung proses pelaporan keuangan dan menilai rancangan, implementasi, dan pengoperasioan dari pengendalian utama yang dirancang untuk mempertahankan integritas dari sistem utama pelaporan keuangan. Penilaian ini termasuk pengendalian utama berikut ini:
  - Pengendalian manajemen perubahan: Proses dan pengendalian yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan melakukan otorisasi perubahan pada fungsionalitas dan konfigurasi dalam sistem;
  - Pengendalian atas keamanan akses pengguna: Pengendalian akses yang dirancang untuk memberlakukan pemisahan tugas, mengatur pengguna akun dengan hak akses istimewa dan data hanya diubah melalui mekanisme yang terotorisasi;
  - Pengendalian atas operasional TI: Pengendalian atas aktivitas operasi digunakan untuk memastikan bahwa setiap masalah yang muncul dikelola dengan tepat; dan
  - Pengendalian pengembangan sistem: Pengendalian atas pengembangan, konfigurasi dan implementasi dari sistem baru atau yang sudah ada.
- Kami menguji rancangan, implementasi dan operasi atas pengendalian utama yang bergantung pada TI yang mendukung proses pelaporan keuangan, seperti perhitungan otomatis sistem, pemrosesan transaksi, pembuatan laporan dan perpindahan data antar sistem. Pengujian kami mencakup pemeriksaan konfigurasi sistem yang relevan dan pengujian keluaran sistem, berdasarkan uji petik.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- *We involved IT specialist in assessing the risk associated with the Bank's IT environment in respect of its financial reporting process.*
- *We understood the IT systems and controls that supported the financial reporting process and assessed the design, implementation and operation of the associated key control designed to maintain the integrity of the key financial reporting systems. This assessment included the following key controls:*
  - *Change management controls: The processes and controls used to develop, test and authorise changes to the functionality and configurations within systems;*
  - *User access security controls: The access controls designed to enforce segregation of duties, govern the use of high privileged accounts and the data is only changed through authorised means;*
  - *IT operation related controls: The controls over operations used to check that any issues that arise are managed appropriately; and*
  - *System development controls: The controls relating to the development, configuration and implementation of new or existing systems.*
- *We tested the design, implementation and operation of key IT dependent controls that supported the financial reporting process, such as system-automated calculations, transaction processing, generation of reports and the data interfaces between systems. We inspected the relevant system configurations and tested system outputs, on a sample basis.*

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
4 Februari/*February* 2025

Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0229

Bank Syariah Indonesia Tbk
00019/2.1457/AU.1/07/0229-1/1/II/2025

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 DAN 2023

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 4	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	6	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	7 - 8	*Statements of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	9	*Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10	*Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11	*Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan atas Laporan Keuangan	12 - 145	*Notes to the Financial Statements*

****

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
ASET				***ASSETS***
KAS	4	8,080,689	5,255,841	***CASH***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2e, 5	49,966,279	32,440,778	***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2f, 6, 44			***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga		3,752,325	2,219,233	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	128,549	105,240	*Related parties*
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain		3,880,874	2,324,473	*Total current accounts and placements with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(14,809)	(20,745)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		3,866,065	2,303,728	*Net*
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	2g, 7, 44			***INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES***
Pihak ketiga		24,134,169	25,738,013	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	38,117,637	45,563,513	*Related parties*
Jumlah investasi pada surat berharga		62,251,806	71,301,526	*Total investments in marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(35,288)	(132,506)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		62,216,518	71,169,020	*Net*
TAGIHAN AKSEPTASI	2h, 8, 44			***ACCEPTANCE RECEIVABLES***
Pihak ketiga		12,694	244,074	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	172,451	187,154	*Related parties*
Jumlah tagihan akseptasi		185,145	431,228	*Total acceptance receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(1,851)	(4,312)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		183,294	426,916	*Net*
PIUTANG	2i, 9, 44			***RECEIVABLES***
Murabahah				*Murabahah*
Pihak ketiga		144,205,651	136,391,384	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	66,883	111,712	*Related parties*
Jumlah *murabahah*		144,272,534	136,503,096	*Total murabahah*
Istishna				*Istishna*
Pihak ketiga		11	30	*Third parties*
Ijarah				*Ijarah*
Pihak ketiga		188,361	217,241	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	-	1,159	*Related parties*
Jumlah *ijarah*		188,361	218,400	*Total ijarah*
Jumlah piutang		144,460,906	136,721,526	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(4,265,369)	(4,361,368)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		140,195,537	132,360,158	*Net*
PINJAMAN *QARDH*	2j, 10, 44			***FUNDS OF QARDH***
Pihak ketiga		12,863,002	9,468,085	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	910,782	1,838,996	*Related parties*
Jumlah pinjaman *qardh*		13,773,784	11,307,081	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(787,694)	(817,917)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		12,986,090	10,489,164	*Net*
Dipindahkan		277,494,472	254,445,605	*Carried forward*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
ASET (lanjutan)				***ASSETS** (continued)*
Pindahan		277,494,472	254,445,605	*Brought forward*
PEMBIAYAAN				***FINANCING***
Mudharabah	2k, 11, 44			*Mudharabah*
Pihak ketiga		937,079	881,133	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	2,000,000	1,000,000	*Related parties*
Jumlah *mudharabah*		2,937,079	1,881,133	*Total mudharabah*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(93,488)	(49,481)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		2,843,591	1,831,652	*Net*
Musyarakah	2k, 12, 44			*Musyarakah*
Pihak ketiga		88,044,668	63,452,727	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	26,142,550	24,763,470	*Related parties*
Jumlah *musyarakah*		114,187,218	88,216,197	*Total musyarakah*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(5,145,131)	(4,459,696)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		109,042,087	83,756,501	*Net*
Jumlah pembiayaan		117,124,297	90,097,330	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(5,238,619)	(4,509,177)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		111,885,678	85,588,153	*Net*
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH	2l, 13	3,122,255	2,190,107	***ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET***
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	2m, 14	7,723,853	5,352,843	***FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET***
ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH	2m, 14	2,102,344	1,128,334	***INTANGIBLE ASSETS - NET***
ASET PAJAK TANGGUHAN	2w, 22c	2,056,727	1,665,694	***DEFERRED TAX ASSETS***
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	2n, 15	4,228,103	3,253,388	***OTHER ASSETS - NET***
JUMLAH ASET		408,613,432	353,624,124	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	2o, 16, 44			***OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY***
Pihak ketiga		856,981	1,144,847	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	1,662	171,220	*Related parties*
		858,643	1,316,067	
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	17	291,578	255,932	***UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING***
SIMPANAN *WADIAH*				***WADIAH DEPOSITS***
Giro *wadiah*	2p, 18, 44			*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		16,260,234	18,023,665	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	2,886,845	2,823,859	*Related parties*
Jumlah giro *wadiah*		19,147,079	20,847,524	*Total wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	2p, 19, 44			*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		55,266,166	47,016,211	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	13,901	10,163	*Related parties*
Jumlah tabungan *wadiah*		55,280,067	47,026,374	*Total wadiah savings deposits*
Jumlah simpanan *wadiah*		74,427,146	67,873,898	*Total wadiah deposits*
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2p, 20, 44			***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Giro *wadiah*				*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		173,510	123,984	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	1,369	1,353	*Related parties*
Jumlah giro *wadiah*		174,879	125,337	*Total wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*				*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		8,985	7,788	*Third parties*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")				*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Pihak ketiga		2,481,425	1,401,191	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	885,225	226,985	*Related parties*
Jumlah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")		3,366,650	1,628,176	*Total Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")				*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Pihak ketiga		400,000	-	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	200,834	-	*Related parties*
Jumlah Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")		600,834	-	*Total Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Jumlah simpanan dari bank lain		4,151,348	1,761,301	*Total deposits from other banks*
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	2q, 21	18,417,864	11,900,055	***LIABILITIES TO BANK INDONESIA***
LIABILITAS AKSEPTASI	2h, 44			***ACCEPTANCE LIABILITIES***
Pihak ketiga		72,792	287,323	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	112,353	143,905	*Related parties*
Jumlah liabilitas akseptasi		185,145	431,228	*Total acceptance liabilities*
UTANG PAJAK	2w, 22a	889,642	539,042	***TAXES PAYABLE***
LIABILITAS IMBALAN KERJA	2v, 42, 44	534,730	667,264	***EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES***
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	41d	24,045	32,017	***ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES***
LIABILITAS LAIN-LAIN	23	5,867,830	2,446,107	***OTHER LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		105,647,971	87,222,911	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY*** *(continued)*
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Giro *mudharabah*	2r, 24, 44			*Mudharabah demand deposits*
Pihak ketiga		17,421,912	14,835,449	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	19,813,889	17,581,811	*Related parties*
Jumlah giro *mudharabah*		37,235,801	32,417,260	*Total mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	2r, 25, 44			*Mudharabah savings deposits*
Pihak ketiga		85,414,890	78,088,518	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	375,768	191,667	*Related parties*
Jumlah tabungan *mudharabah*		85,790,658	78,280,185	*Total mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	2r, 26, 44			*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga		92,556,398	87,628,737	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	38,122,469	28,356,052	*Related parties*
Jumlah deposito *mudharabah*		130,678,867	115,984,789	*Total mudharabah time deposits*
Jumlah giro, tabungan dan deposito *mudharabah*		253,705,326	226,682,234	*Total mudharabah demand deposits, savings deposits and time deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	2z, 27, 44			*Subordinated sukuk mudharabah*
Pihak ketiga		140,000	175,000	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	60,000	25,000	*Related parties*
Jumlah sukuk *mudharabah* subordinasi		200,000	200,000	*Total subordinated sukuk mudharabah*
Sukuk *mudharabah* diterbitkan	2z, 28, 44			*Issued mudharabah sukuk*
Pihak ketiga		2,653,063	3,608	*Third parties*
Pihak berelasi	2c	365,500	-	*Related parties*
Jumlah sukuk *mudharabah* diterbitkan		3,018,563	3,608	*Total issued mudharabah sukuk*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	2y, 29	1,000,000	776,250	*Mudharabah term financing*
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER		257,923,889	227,662,092	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham				*Share capital - Rp500 (full amount) par value per share*
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham				*Authorised share capital - 80,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.129.260.138 lembar saham	30	23,064,630	23,064,630	*Issued and fully paid-up capital - 46,129,260,138 shares*
Tambahan modal disetor	30	(3,929,100)	(3,929,100)	*Additional paid-in capital*
Keuntungan revaluasi aset tetap	14	553,440	444,530	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak		347,644	241,462	*Remeasurement of employee benefit liabilities - net of tax*
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak		(56,814)	6,154	*Unrealised (loss)/gain on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income - net of tax*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya		3,377,462	2,236,713	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		21,684,310	16,674,732	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		45,041,572	38,739,121	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS		408,613,432	353,624,124	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023*)	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI *MUDHARIB*				***INCOME FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
Pendapatan dari jual beli	2s, 31	13,404,055	12,627,780	*Income from sales and purchases*
Pendapatan dari bagi hasil	2s, 32	8,001,204	5,940,486	*Income from profit sharing*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	2s, 33	192,124	155,446	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	2s, 34	3,700,820	3,528,031	*Other main operating income*
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	2t, 35	(7,889,029)	(5,993,168)	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		17,409,174	16,258,575	***BANK'S SHARE IN PROFIT***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	2u, 36			***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan imbalan jasa perbankan		3,678,362	2,870,774	*Fee based income from banking services*
Keuntungan investasi surat berharga		587,199	242,110	*Gain from marketable securities*
Pendapatan lainnya		1,290,918	1,091,582	*Other income*
Jumlah pendapatan usaha lainnya		5,556,479	4,204,466	*Total other operating income*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	37	(5,284,136)	(5,035,215)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	38	(6,342,626)	(5,169,938)	*General and administrative*
Bonus *wadiah*		(586)	(1,107)	*Wadiah bonus*
Lain-lain		(166,294)	(42,944)	*Others*
		(11,793,642)	(10,249,204)	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih	2d, 39	(1,893,867)	(2,622,479)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
LABA USAHA		9,278,144	7,591,358	***INCOME FROM OPERATION***
PENDAPATAN/(BEBAN) NONUSAHA - BERSIH		4,312	(2,156)	***NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET***
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK		9,282,456	7,589,202	***INCOME BEFORE ZAKAT AND TAX EXPENSE***
ZAKAT	2a	(232,061)	(189,730)	***ZAKAT***
BEBAN PAJAK	2w, 22b	(2,044,507)	(1,695,729)	***TAX EXPENSES***
LABA BERSIH		7,005,888	5,703,743	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan revaluasi aset tetap	14	108,910	-	*Gain on revaluation on fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2v, 42	136,130	(35,181)	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait	22c	(29,948)	7,739	*Related income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	7b	(92,116)	61,631	*Unrealised (loss)/gain on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	22c	29,148	-	*Related income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak		152,124	34,189	*Total other comprehensive income net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		7,158,012	5,737,932	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (Rupiah penuh)	2aa, 40	151.88	123.65	***BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (full Rupiah)***

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 53

*) *Reclassified, see Note 53*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Keuntungan revaluasi aset tetap/ *Gain on revaluation of fixed assets*	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak/ *Remeasurement of employee benefit liabilities - net of tax*	(Kerugian)/ keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak/ *Unrealised (loss)/gain on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income - net of tax*	Saldo laba/*Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
							Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 1 Januari 2023		23,064,630	(3,929,100)	444,530	268,904	(55,477)	1,384,677	12,249,043	33,427,207	*Balance as at 1 January 2023*
Laba bersih		-	-	-	-	-	-	5,703,743	5,703,743	*Net income*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	(27,442)	61,631	-	-	34,189	*Other comprehensive income*
Pembagian dividen	30	-	-	-	-	-	-	(426,018)	(426,018)	*Dividend payment*
Penambahan cadangan umum	30	-	-	-	-	-	852,036	(852,036)	-	*Additional to general reserve*
Saldo per 31 Desember 2023		23,064,630	(3,929,100)	444,530	241,462	6,154	2,236,713	16,674,732	38,739,121	***Balance as at 31 December 2023***
Laba bersih		-	-	-	-	-	-	7,005,888	7,005,888	*Net income*
Penghasilan komprehensif lain	14	-	-	108,910	106,182	(62,968)	-	-	152,124	*Other comprehensive income*
Pembagian dividen	30	-	-	-	-	-	-	(855,561)	(855,561)	*Dividend payment*
Penambahan cadangan umum	30	-	-	-	-	-	1,140,749	(1,140,749)	-	*Additional to general reserve*
Saldo per 31 Desember 2024		23,064,630	(3,929,100)	553,440	347,644	(56,814)	3,377,462	21,684,310	45,041,572	***Balance as at 31 December 2024***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	**2024**	**2023**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan jual beli, bagi hasil, *ijarah* dan usaha utama lainnya		25,260,645	22,356,599	*Proceeds of margin, profit sharing, ijarah and other main operation*
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer		(7,854,159)	(5,930,162)	*Payment of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	9, 10, 11, 12, 36	2,097,759	1,703,364	*Receipts from recovery of written-off financing and receivable*
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		4,266,371	3,115,816	*Receipt of other operating income*
Pembayaran tantiem		(110,228)	(91,574)	*Payment of tantiem*
Pembayaran beban usaha		(14,283,894)	(12,698,368)	*Payment of operating expenses*
Penerimaan atas pendapatan nonusaha - bersih		112,287	25,571	*Receipt from non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(1,985,972)	(1,855,197)	*Payment of corporate income tax*
Pembayaran zakat		(268,348)	(205,881)	*Payment of zakat*
Penyaluran dana kebajikan		(117,028)	(80,736)	*Distribution of qardhul hasan funds*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas		7,117,433	6,339,432	*Cash flows before changes in assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas:				*Changes in assets and liabilities:*
(Kenaikan)/penurunan aset:				*(Increase)/decrease in assets:*
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		(1,472,899)	(3,972,560)	*Marketable securities - measured at fair value*
Surat berharga jangka pendek lainnya		(115,758)	(40,287)	*Other short-term securities*
Piutang		(7,739,380)	(11,834,760)	*Receivables*
Pinjaman *qardh*		(2,466,703)	(1,605,472)	*Funds of qardh*
Pembiayaan		(27,026,967)	(18,465,422)	*Financing*
Tagihan akseptasi		246,083	50,175	*Acceptance receivables*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*		(932,147)	(705,535)	*Assets acquired for ijarah*
Aset lain-lain		245,969	(2,886)	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas:				*Increase/(decrease) in liabilities:*
Liabilitas segera		(421,137)	322,716	*Obligations due immediately*
Simpanan *wadiah*		6,553,248	1,861,641	*Wadiah deposits*
Simpanan dari bank lain		2,390,047	(457,396)	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi		(246,083)	(50,175)	*Acceptance liabilities*
Utang pajak		(99,768)	48,173	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain		3,757,231	283,819	*Other liabilities*
Kenaikan dana *syirkah* temporer		27,023,092	30,269,572	*Increase in temporary syirkah funds*
Kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi		6,812,261	2,041,035	*Net cash generated from operating activities*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan/pelepasan investasi pada surat berharga		103,380,752	111,080,068	*Sale/disposal of investment in marketable securities*
Perolehan surat berharga		(92,955,821)	(120,672,073)	*Acquisition of marketable securities*
Hasil penjualan aset tetap		1,274	5,521	*Proceeds from sale of fixed assets*
Perolehan aset tetap dan aset hak guna		(2,935,755)	(826,243)	*Acquisition of fixed assets and right-of-use assets*
Perolehan aset tidak berwujud	14	(1,144,967)	(991,632)	*Acquisition of intangible assets*
Kas bersih dihasilkan dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi		6,345,483	(11,404,359)	*Net cash generated from/ (used in) investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa		(151,913)	(134,742)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen		(855,561)	(426,018)	*Payments of dividend*
Pembayaran pembiayaan berjangka *mudharabah*		(7,778,995)	(781,307)	*Payments of mudharabah term financing*
Penerimaan pembiayaan berjangka *mudharabah*		8,001,935	776,250	*Receipts from mudharabah term financing*
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan		-	(1,375,000)	*Settlement of securities issued*
Surat berharga yang diterbitkan		3,015,731	203,759	*Securities Issued*
Liabilitas kepada Bank Indonesia		6,517,809	11,900,055	*Liabilities from Bank indonesia*
Kas bersih dihasilkan dari aktivitas pendanaan		8,749,006	10,162,997	*Net cash generated from financing activities*
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		21,906,750	799,673	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		40,021,092	39,221,419	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		61,927,842	40,021,092	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:*
Kas	4	8,080,689	5,255,841	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	49,966,279	32,440,778	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	6	3,880,874	2,324,473	*Current accounts and placements with other banks*
JUMLAH		61,927,842	40,021,092	***TOTAL***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	**2024**	**2023**	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	31, 32, 33, 34	25,298,203	22,251,743	*Revenue from fund management as mudharib*
Pengurangan				*Deduction*
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:				*Current year income in which its cash and cash equivalents has not been received:*
Pendapatan dari jual beli		(620,300)	(623,425)	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil		(79,292)	(44,429)	*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(75,137)	(104,229)	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih		(33,132)	(29,685)	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya		(979,776)	(889,375)	*Other main operating income*
		(1,787,637)	(1,691,143)	
Penambahan				*Addition*
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Previous year income in which its cash and cash equivalent was received during current year:*
Pendapatan dari jual beli		623,425	588,556	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil		44,429	25,972	*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		104,229	43,778	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih		29,685	20,093	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya		889,375	898,140	*Other main operating income*
		1,691,143	1,576,539	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		25,201,709	22,137,139	*Available income for profit sharing*
Hak bagi hasil milik Bank		(17,312,680)	(16,143,971)	*Bank's share in profit sharing*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	35	7,889,029	5,993,168	*Third parties' share on return*
Dirinci atas:				*Details to:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		7,597,451	5,737,236	*Fund owners' share on distributed profit sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	17	291,578	255,932	*Fund owners' share on undistributed profit sharing*
Jumlah		7,889,029	5,993,168	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
Sumber dana zakat				***Sources of zakat funds***
Internal bank		232,061	189,730	*Internal bank*
Eksternal bank				*External bank*
Pegawai		36,452	33,041	*Employees*
Nasabah dan umum		38,743	34,731	*Customers and public*
		307,256	257,502	
Penyaluran dana zakat				***Distribution of zakat funds***
Disalurkan ke lembaga lain		(268,348)	(205,881)	*Distributed to other institutions*
Kenaikan dana zakat		38,908	51,621	*Increase in zakat funds*
Saldo awal dana zakat		196,774	145,153	***Beginning balance of zakat funds***
Saldo akhir dana zakat	16	235,682	196,774	***Ending balance of zakat funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
Sumber dana kebajikan				***Sources of qardhul hasan funds***
Infaq dan *shadaqah*		84,691	63,947	*Infaq and shadaqah*
Denda		21,972	17,915	*Penalty*
Pendapatan nonhalal		1,240	1,733	*Non-halal income*
Lainnya		4,094	-	*Others*
		111,997	83,595	
Penggunaan dana kebajikan				***Uses of qardhul hasan funds***
Sumbangan		(117,028)	(80,736)	*Donation*
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan		(5,031)	2,859	*(Decrease)/increase qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan		9,907	7,048	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Saldo akhir dana kebajikan	23	4,876	9,907	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank BRIsyariah Tbk ("Bank") berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., notaris di Jakarta.

BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008. Pada tahun 2009, BSBRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Pemegang Saham BSBRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

PT Bank BRISyariah berubah nama menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386. AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pada bulan Januari 2021, telah terjadi penggabungan antara PT Bank BRIsyariah Tbk dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah entitas induk Bank setelah penggabungan usaha.

1. GENERAL

a. Bank establishment and general information

PT Bank BRIsyariah Tbk (the "Bank") is located in Jakarta, Indonesia, and initially established under the name of PT Bank Jasa Arta ("BJA") based on the Deed of Establishment No. 4 dated 3 April 1969 made before Liem Toeng Kie, S.H., notary in Jakarta.

BJA changed its name to PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") based on Shareholders' Decision Statement, as stated in the Deed No. 45 dated 22 April 2008 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta and obtained a license from Bank Indonesia to change its business activities, from a conventional bank into a commercial bank based on sharia principles effective from 16 October 2008. In 2009, BSBRI changed its name to PT Bank BRISyariah based on Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 18 dated 14 April 2009 made before Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta.

PT Bank BRISyariah changed its name to PT Bank BRIsyariah Tbk as approved, accepted and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02 Year 2018 dated 10 January 2018.

In January 2021, there was a merger of PT Bank BRIsyariah Tbk with PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah. The merger has received approval from Financial Services Authority ("OJK") of Capital Market through its letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 and OJK Board of Commissioners Number 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021 concerning the Granting of Permit to Merge PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah into PT Bank BRIsyariah Tbk and a Name Change Permit Using a Business License from PT Bank BRIsyariah Tbk to become a Business License on behalf of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as the Merged Bank. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is the Bank's parent entity after the merger.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Pada bulan Juni 2022, terjadi perubahan klasifikasi saham pada anggaran dasar sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta sehubungan dengan:

- penerapan klasifikasi saham pada Bank menjadi saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan saham biasa Seri B yang merupakan saham biasa atas nama; dan
- reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Bank menjadi 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi saham biasa Seri B.

Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 tanggal 22 Juli 2022.

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir mengenai penyesuaian Anggaran Dasar BSI dengan ketentuan-ketentuan baru yang terkait dengan BSI sebagai Bank Umum Syariah yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima serta dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Bank establishment and general information** (continued)*

In June 2022, there was change in the shares classification in the Articles of Association as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 dated 24 June 2022 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, in connection with:

- *the implementation of the classification of shares in the Bank into Series A Dwiwarna share which is share with special rights and Series B common share which is ordinary share; and*
- *reclassification of 1 (one) share owned by the Republic of Indonesia in the Bank into 1 (one) Series A Dwiwarna share and all shares owned by other shareholders into Series B common shares.*

This change was accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 dated 22 July 2022.

The latest amendment to the Bank's Articles of Association in relation to the amendments of BSI's Articles of Association with new provisions relating to BSI as a Sharia Commercial Bank as outlined in the Deed of Meeting Resolutions on Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 dated 17 May 2024 made before Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. notary in Jakarta. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0035266.AH.01.02.Year 2024 dated 13 June 2024 and was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0145286 dated 13 June 2024.

According to Article 3 of the Bank's latest Articles of Association, the Bank's scope of business is to conduct banking activities based on Sharia principles.

The Bank's head office is located in The Tower Building, Gatot Subroto Street No. 27, Karet Semanggi Village, Setiabudi District, South Jakarta 12930.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Bank establishment and general information** (continued)*

As at 31 December 2024 and 2023, the Bank has business unit network with details as follows:

	2024	2023	
Kantor Cabang	153	153	*Branch Offices*
Kantor Cabang Pembantu	886	886	*Sub-Branch Offices*
Layanan Syariah Bank Umum	3,065	3,065	*Commercial Bank Sharia Services*
Kantor Cabang Luar Negeri	1	1	*Overseas Branch Office*
Kantor Fungsional	91	91	*Functional Offices*

b. Struktur dan manajemen

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

b. Structure and management

The composition of the Board of Commissioners as at 31 December 2024 based on the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 dated 23 October 2024 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2024	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Muliaman D. Hadad	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim	*Vice President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Suyanto	*Commissioner*
Komisaris	Masduki Baidlowi	*Commissioner*
Komisaris	Abu Rokhmad	*Commissioner*
Komisaris	Fauzi[1)]	*Commissioner*
Komisaris	Nazaruddin[1)]	*Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mohamad Nasir	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Felicitas Tallulembang[1)]	*Independent Commissioner*

1) Diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-170/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024, KEPR-171/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024, dan KEPR-172/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024.

1) Appointed at the Bank's Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") on 17 May 2024 and has received approval from the Financial Services Authority ("OJK") in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-170/D.03/2024 dated 9 December 2024, KEPR-171/D.03/2024 dated 9 December 2024, and KEPR-172/D.03/2024 dated 9 December 2024.

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners as at 31 December 2023 based on the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 dated 4 October 2023 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2023	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Muliaman D. Hadad	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim	*Vice President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Suyanto	*Commissioner*
Komisaris	Masduki Baidlowi	*Commissioner*
Komisaris	Imam Budi Sarjito[1)]	*Commissioner*
Komisaris	Sutanto[1)]	*Commissioner*
Komisaris	Abu Rokhmad	*Commissioner*
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan[1)]	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mohamad Nasir	*Independent Commissioner*

1) Telah diberhentikan dengan hormat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024.

1) Has been honorably discharged at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024.

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 December 2024 based on the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 dated 23 October 2024 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2024	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hery Gunardi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta	*Vice President Director*
Direktur	Ade Cahyo Nugroho	*Director*
Direktur	Anton Sukarna	*Director*
Direktur	Zaidan Novari	*Director*
Direktur	Saladin D. Effendi	*Director*
Direktur	Grandhis Helmi Harumansyah	*Director*
Direktur Kepatuhan	Tribuana Tunggadewi	*Compliance Director*
Direktur	Harry Gusti Utama[1)]	*Director*
Direktur	Ari Rizaldi[1)]	*Director*

1) Diangkat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-117/D.03/2024 tanggal 7 Oktober 2024 dan KEPR-116/D.03/2024 tanggal 7 Oktober 2024.

1) Appointed at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024 and has received approval from OJK in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-117/D.03/2024 dated 7 October 2024 and KEPR-116/D.03/2024 dated 7 October 2024.

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 December 2023 based on the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 dated 4 October 2023 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2023	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hery Gunardi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta	*Vice President Director*
Direktur	Ngatari[1)]	*Director*
Direktur	Zaidan Novari	*Director*
Direktur	Anton Sukarna	*Director*
Direktur	Saladin D. Effendi	*Director*
Direktur	Grandhis Helmi Harumansyah	*Director*
Direktur Kepatuhan	Tribuana Tunggadewi	*Compliance Director*
Direktur	Ade Cahyo Nugroho	*Director*
Direktur	Moh. Adib[1)]	*Director*

1) Telah diberhentikan dengan hormat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024.

1) Has been honorably discharged at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as at 31 December 2024 based on the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 35 dated 23 Oktober 2024 which was made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2024	
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Hasanudin	*Chairman*
Anggota	Mohamad Hidayat	*Member*
Anggota	Oni Sahroni	*Member*
Anggota	Jaih Mubarok[1)]	*Member*
Anggota	Abdul Ghofur Maimoen[2)]	*Member*

1) Diangkat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK sesuai dengan surat No. SR-450/PB.02/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
2) Diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat No. SR-13/PB.02/2025 tanggal 9 Januari 2025.

1) Appointed at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024 and has received approval from the OJK in accordance with letter No. SR-450/PB.02/2024 dated 14 October 2024.
2) Appointed at the Annual GMS on 17 May 2024 and has received approval from the OJK in accordance with letter No. SR-13/PB.02/2025 dated 9 January 2025.

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as at 31 December 2023 based on the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 dated 31 May 2021 which was made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2023	
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Hasanudin	*Chairman*
Anggota	Mohamad Hidayat	*Member*
Anggota	Oni Sahroni	*Member*
Anggota	Didin Hafidhuddin[1)]	*Member*

1) Telah diberhentikan dengan hormat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024.

1) Has been honorably discharged at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 04/200-KEP/DIR tanggal 31 Mei 2024 dan Surat Dewan Komisaris No. 04/017-3/KOM tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as at 31 December 2024 based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 04/200-KEP/DIR dated 31 May 2024 and the Letter of the Board of Commissioners No. 04/017-3/KOM dated 31 May 2024 as follows:

	31 Desember/*December* 2024	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Mohamad Nasir	*Chairman*
Anggota	Muliaman D. Hadad	*Member*
Anggota	Adiwarman Azwar Karim	*Member*
Anggota	Komaruddin Hidayat	*Member*
Anggota	Felicitas Tallulembang[1)]	*Member*
Anggota	Suharto	*Member*
Anggota	Rahmatina Awaliah Kasri	*Member*

1) Diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2024 dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEPR-172/D.03/2024 tanggal 9 Desember 2024.

1) Appointed at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024 and has received approval from OJK in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-172/D.03/2024 dated 9 December 2024.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 03/267-KEP/DIR tanggal 13 Juli 2023 dan Surat Dewan Komisaris No. 03/025-3/KOM tanggal 6 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as at 31 December 2023 based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 03/267-KEP/DIR dated 13 July 2023 and the Letter of the Board of Commissioners No. 03/025-3/KOM dated 6 July 2023 as follows:

	31 Desember/*December* 2023	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Mohamad Nasir	*Chairman*
Anggota	Muliaman D. Hadad	*Member*
Anggota	Adiwarman Azwar Karim	*Member*
Anggota	M. Arief Rosyid Hasan[1)]	*Member*
Anggota	Komaruddin Hidayat	*Member*
Anggota	M. Zacky Thayib	*Member*
Anggota	M. Gunawan Yasni	*Member*

1) Telah diberhentikan dengan hormat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 17 Mei 2024.

1) Has been honorably discharged at the Bank's Annual GMS on 17 May 2024.

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 Sekretaris Perusahaan dari Bank adalah Wisnu Sunandar dan pada tanggal 31 Desember 2023 Sekretaris Perusahaan dari Bank adalah Gunawan Arief Hartoyo.

Berdasarkan kebijakan Bank, manajemen kunci Bank mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp159.386 dan Rp134.912.

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 16.691 dan 17.245 orang.

c. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada bulan Mei 2018, Bank melakukan penawaran umum perdana saham meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (nilai penuh) per lembar saham kepada masyarakat di Indonesia. Bank telah mendapatkan surat pernyataan efektif pendaftaran PT Bank BRISyariah Tbk atas penawaran umum perdana saham dari OJK No. S.37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (”BEI”) pada tanggal 9 Mei 2018.

d. Penawaran Umum Saham Terbatas

Pada bulan Desember 2022, Bank meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (”PMHMETD” I), sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) tanggal 23 September 2022. Dari PMHMETD I, Bank telah meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.999.952.795 lembar saham Seri B (nilai penuh) dengan nilai nominal per lembar saham Rp500 (nilai penuh), dari Rp20.564.654 menjadi Rp23.064.630, sebagaimana tercantum pada Akta No. 191 tanggal 29 Desember 2022, Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta. Bank telah mendapatkan surat pernyataan efektif pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I kepada para pemegang saham Bank dari OJK dengan No. S.256/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022.

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

On 31 December 2024, Corporate Secretary of the Bank is Wisnu Sunandar and on 31 December 2023, Corporate Secretary of the Bank is Gunawan Arief Hartoyo.

Based on the Bank's policies, key management of the Bank consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Salaries and other compensation paid to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the year ended 31 December 2024 and 2023 are Rp159,386 and Rp134,912.

As at 31 December 2024 and 2023, the Bank has 16,691 and 17,245 employees, respectively.

c. Initial Public Offering ("IPO")

In May 2018, the Bank undertook the initial public offering of PT Bank BRIsyariah Tbk shares included 2,623,350,600 new shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share at a selling price of Rp510 (full amount) per share to the public in Indonesia. The Bank has received an effective registration statement letter of PT Bank BRISyariah Tbk regarding the initial public offering of shares from OJK No. S.37/D.04/2018 dated 30 April 2018. The offered shares began to be listed and traded on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") on 9 May 2018.

d. Limited Public Offering

In December 2022, the Bank increased additional paid-in capital through Right Issue with Pre-Emptive Rights I ("PMHMETD" I), in accordance with the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS") dated 23 September 2022. From PMHMETD I, the Bank has increased its share capital by 4,999,952,795 Series B shares (full amount) with a nominal value of Rp500 per share (full amount), from Rp20,564,654 to Rp23,064,630, as stated in Notarial Deed No. 191 dated 29 December 2022 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Bank has received an effective registration statement letter regarding PMHMETD I to the Banks' shareholders from OJK No. S.256/D.04/2022 dated 5 December 2022.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan Bank diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 4 Februari 2025.

Kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI Revisi 2013") serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 401, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Berdasarkan PSAK 401, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Bank are completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 4 February 2025.

The material accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of financial statements

Presented below are the material accounting policies applied in the preparation of the financial statements of the Bank in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant, Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines ("PAPSI Revised 2013") as well as capital market regulator regulations, which is Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies", enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

The financial statements are prepared in accordance with SFAS 401, "Presentation of Sharia Financial Statements". Based on SFAS 401, a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Statements of financial position;
(ii) Statements of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statements of changes in equity;
(iv) Statements of cash flows;
(v) Statements of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statements of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statements of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

The statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of cash flows and statements of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of financial statements** (continued)*

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except for statements of cash flows and statements of reconciliation of income and revenue sharing.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

The statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to fund owners under cash basis.

The statements of sources and distribution of zakat funds and statements of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

The statements of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds on a particular date.

The statements of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and the qardhul hasan funds balance on a particular date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 116: "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar;

- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Revisi PSAK 401: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" tentang penghilangan penyajian laporan perubahan aset kelolaan sebagai salah satu komponen laporan keuangan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(continued)*

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah ("Rp") which is also the Bank's functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS")

The following are new financial accounting standards, amendments and interpretations of financial accounting standards which become effective starting 1 January 2024:

- *Amendment of SFAS 116: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions;*
- *Amendment of SFAS 201: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current;*
- *Amendment of SFAS 201: "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with the covenant; and*
- *Revision of SFAS 401: "Presentation of Sharia Financial Statements" regarding the elimination of presentation of reports on changes in assets under management as a component of financial reports.*

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the Bank's financial statements for current period of prior financial years.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

(1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak: (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
(2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
(3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venturer*;
(4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
(5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
(6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
(7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Piutang *murabahah*

Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di PSAK 402 "Akuntansi *Murabahah*", ISAK 402 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*", dan PAPSI Revisi 2013.

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

c. Transactions with related parties

The Bank enters into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS 224 regarding "Related Party Disclosures" and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies".

A party is considered as a related party of the Bank if:

(1) directly or indirectly through one or more intermediaries, the party: (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;
(2) it is a member of the same group as the Bank;
(3) it is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;
(4) it is a member of the key management personnel of the Bank;
(5) it is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);
(6) it is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5); and
(7) it is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 44 of the financial statements.

d. Allowance for impairment losses

Murabahah receivables

The Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with SFAS 402 "Accounting for Murabahah", IFAS 402 "Impairment of Murabahah Receivables", and PAPSI Revised 2013.

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statement of financial position date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Piutang *murabahah* (lanjutan)

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
(3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
(4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
(6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
(7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
(8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan dan secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Allowance for impairment losses** (continued)*

Murabahah receivables (continued)

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

(1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
(2) a breach of contract, such as a default or arrears on principal or margin payments;
(3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;
(4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
(5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties;
(6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio;
(7) adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and
(8) national or local economic conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Piutang *murabahah* (lanjutan)

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(1) piutang *murabahah* memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, dan memiliki saldo nilai piutang secara individual di atas atau sama dengan Rp10.000; atau
(2) piutang *murabahah* yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki saldo nilai piutang di atas Rp10.000.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(1) piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
(2) piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
(3) piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* ("PD") dan *Loss Given Default* ("LGD").

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

Murabahah receivables (continued)

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

(1) murabahah receivables which have collectibility status as substandard, doubtful and loss, and have an individual receivables balance of above or equal to Rp10,000; or
(2) murabahah receivables that are restructured or have been restructured and which individually have a balance of receivables above or equal Rp10,000.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

(1) murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;
(2) murabahah receivables which individually have insignificant value; or
(3) restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the Probability of Default ("PD") and Loss Given Default ("LGD").

Impairment losses on financial assets recorded at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Piutang *murabahah* (lanjutan)

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan margin.

Aset produktif selain piutang *murabahah*

Aset produktif selain piutang *murabahah* terdiri terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku. Selain itu, Bank juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan POJK adalah sebagai berikut:

1) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

Murabahah receivables (continued)

Impairment losses are recognised in statements of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operating income other than margin income.

Earning assets other than murabahah receivables

Earning assets other than murabahah receivables consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Term Deposits and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees. The Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from uncollectible amount earning assets as stipulated in the applicable SFAS. In addition, the Bank also implemented Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 dated 31 January 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as at 7 February 2022.

The minimum allowance to be provided in accordance with POJK is as follows:

1) General reserve, shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset produktif selain piutang *murabahah* (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan POJK adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
   a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
   b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
   c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
   d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan POJK.

Bank melakukan pengkajian kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif yang dibentuk berdasarkan POJK No. 02/POJK.03/2022 dan mempertimbangkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih.

Aset nonproduktif

Aset nonproduktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"), rekening perantara, *temporary account*, dan properti terbengkalai.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA.

Penetapan nilai realisasi bersih wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000 atau lebih. Sementara untuk AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000 dapat menggunakan penilai internal Bank.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

Earning assets other than murabahah receivables (continued)

The minimum allowance to be provided in accordance with POJK is as follows: (continued)

2) Special reserves, shall be at least:

   a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
   b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
   c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
   d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on POJK.

The Bank conducts assessment upon the adequacy of the allowance for impairment losses on earning assets established based on POJK No. 02/POJK.03/2022 and consider the estimated loss of earning assets that is uncollectible.

Non-earning assets

Non-earning assets represent the Bank's assets other than earning assets which have potential loss such as foreclosed collaterals ("AYDA"), inter-branches account, temporary account and abandoned property.

AYDA is an asset acquired through auction or over the counter based on voluntary submission by collateral owner or based on the power of attorney to sell over the counter from collateral owner in the event of customer's failure in meeting their liabilities to the Bank. The Bank is required to settle its AYDA and prepare documentation of its effort to settle the assets.

The determination of net realisable value is required to be carried out by an independent appraiser for AYDA in the amount equivalent or more than Rp5,000. Internal appraiser of the Bank may be used for AYDA below Rp5,000.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset nonproduktif (lanjutan)

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:
a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
b) Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
c) Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

AYDA sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aset lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

Rekening perantara adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Temporary account adalah akun yang digunakan dalam operasional perbankan sehari-hari yang bersifat sementara dan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening perantara dan *temporary account*.

Kualitas rekening perantara dan *temporary account* ditetapkan sebagai berikut:
1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Properti terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

Non-earning assets (continued)

The Bank is required to use the lowest price if there are several values proposed by the independent or internal appraiser.

AYDA which completion efforts have been made is determined to have quality as follows:
a) Current, if owned within 1 (one) year.
b) Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
c) Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
d) Loss, if owned more than 5 (five) years.

AYDA acquired in relation to settlement of financing (presented in other assets account) are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, AYDA are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

Inter-branch account is receivable or payable arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Temporary accounts is accounts used in daily banking operations that are temporary and must be settled immediately within a certain time period determined by the Bank.

The Bank is required to settle its inter-branch account and temporary account.

The quality of inter-branch account and temporary account are determined as:
1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

Abandoned property is a fixed asset in the form of property owned by the Bank but not used for normal Bank business activities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset nonproduktif (lanjutan)

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian properti terbengkalai.

Kualitas properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:
a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
b) Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
c) Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

e. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dan Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia.

FASBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*. Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia merupakan penempatan berjangka di Bank Indonesia dengan prinsip *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

f. Giro dan penempatan pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum Syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank nonsyariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank.

Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank nonsyariah dikategorikan sebagai dana nonhalal, sehingga Bank Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.

g. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk) dan reksa dana.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Allowance for impairment losses *(continued)*

Non-earning assets (continued)

The Bank is required to settle its abandoned property.

The quality of abandoned property are determined as:
a) Current, if owned within 1 (one) year.
b) Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
c) Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
d) Loss, if owned more than 5 (five) years.

e. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS") and Bank Indonesia Sharia Term Deposits.

FASBIS are certificates issued by Bank Indonesia as evidence of short-term deposit of funds with the principles of wadiah. Bank Indonesia Sharia Term Deposits are term deposits in Bank Indonesia with the principles of jualah. Current accounts and placements with Bank Indonesia are presented at the outstanding balance.

f. Current accounts and placements with other banks

Current accounts with other Banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from Sharia Commercial Banks are recognised as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognised as the Bank's income.

The received current account service funds that come from non-sharia bank are categorised as non-halal funds, so Sharia Bank then distributed as qardhul hasan funds. Before the qardhul hasan funds are distributed, it is recorded in liabilities.

g. Investments in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk) and mutual funds.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

a. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan surat berharga termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan surat berharga, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan surat berharga termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu surat berharga dan diakui dalam laba rugi; dan
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi surat berharga dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan surat berharga tidak termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Investments in marketable securities *(continued)*

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in marketable securities either measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

a. Measured at amortised cost

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Marketable securities acquisition cost includes transaction cost; and*
- *The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.*

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the marketable securities, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Marketable securities acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the marketable securities and is recognised in profit or loss; and*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognised in other comprehensive income after considering unamortised difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognised in other comprehensive income. When marketable securities are derecognised, the accumulated gain or loss which has been previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.*

c. Measured at fair value through profit or loss

- *Marketable securities acquisition cost excludes transaction cost; and*
- *The difference between fair value and the carrying value is recognised in profit or loss.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit* ("L/C") dan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri ("SKBDN") yang diterima oleh bank penerima.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasi sebagai kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

i. Piutang

Piutang terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, dan piutang *ijarah.*

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Ijarah adalah akad sewa antara pihak yang menyewakan aset *ijarah (mu'jir)* dengan penyewa/penerima manfaat barang *(musta'jir)* atau antara penerima jasa *(musta'jir)* dengan pihak yang memberikan jasa *(ajir)* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat aset *ijarah* maupun jasa.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

h. Acceptance receivables and liabilities

Acceptance receivables and liabilities represent Letters of Credit ("L/C") and Domestic Documentary Letters of Credit ("SKBDN") transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptance receivables and liabilities are stated at amortised cost. Acceptances receivable are stated at net of allowance for impairment losses.

Acceptance receivables are classified as financing and receivables. Acceptance liabilities are classified as financial liabilities at amortised cost.

i. Receivables

Receivables consist of murabahah receivables, istishna receivables and ijarah receivables.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus directly attributable transaction costs which is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition, are measured at amortised cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

Istishna receivables are stated at the amount billed to customer less allowance for impairment losses. Deferred istishna margin is presented as a contra account of istishna receivables.

Ijarah is the lease contract between the party who rents out the ijarah assets (mu'jir) and the lessee/beneficiary of the goods (musta'jir) or between the recipient of the service (musta'jir) and the party who provide the service (ajir) to exchange benefits and ujrah, both benefits of ijarah assets or services.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Piutang (lanjutan)

Piutang *ijarah* terdiri dari piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa. Piutang *ijarah* atas aset adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Piutang *ijarah* multijasa adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* atas aset dan dan piutang *ijarah* multijasa disajikan sebagai pos lawan piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa. Bank mencatat *ujrah ijarah* atas aset yang akan diterima dan *ijarah* multijasa yang akan diterima sebagai aset lainnya.

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penjadwalan kembali piutang bagi debitur tanpa mengubah jumlah margin yang harus dibayar sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian dari restrukturisasi. Pendapatan margin setelah restrukturisasi diakui sesuai jadwal angsuran setelah restrukturisasi.

j. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn.* Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Akad *rahn* merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Receivables *(continued)*

Ijarah receivables consist of ijarah of assets and multi-services ijarah receivables. Ijarah of assets receivables are the principal portion of unpaid rent income at maturity. Multi-services ijarah receivables are the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on ijarah of assets receivables and multi-services ijarah receivables are presented as a contra account of ijarah of assets receivables and multi-services ijarah receivables. The Bank records ujrah receivables of ijarah of assets and multi-services ijarah as other assets.

Restructuring scheme involves extension of maturity date and/or rescheduling debtor's receivables without changing the total margin to be paid so that there is no gain or loss from restructurisation. Margin income after restructurisation is recognised based on the installment schedule after restructurisation.

j. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh contract.

Qardh contract is a borrowing contract with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Funds of qardh includes hawalah and rahn financing contract. Hawalah is a transfer of debts from debtors (customers) to other party (Bank) which obligate to shoulder or pay. The Bank will obtain an ujrah (fee) from this transaction, which is recognised as income when received.

Rahn contract is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets ujrah (fee) in return which are recognised on an accrual basis.

Funds of qardh are recognised at the same amount of funds lent when these occur. On the statements of financial position date, funds of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Pinjaman *qardh* (lanjutan)

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penjadwalan kembali pinjaman *qardh* bagi debitur. Pendapatan *ujrah* setelah restrukturisasi diakui sebesar *ujrah* yang disepakati setelah restrukturisasi.

k. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah *(predetermined ratio)* yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan/atau penjadwalan kembali pembiayaan bagi debitur. Pendapatan bagi hasil setelah restrukturisasi diakui sebesar hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati setelah restrukturisasi.

l. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*

Ijarah atas aset adalah *ijarah* atas manfaat dari aset *ijarah*.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***j. Funds of qardh** (continued)*

Restructuring scheme involves extension of maturity date and/or rescheduling debtor's funds of qardh. Ujrah income after restructurisation is recognised amounting to the agreed ujrah after restructurisation.

k. Financing

Financing with profit sharing scheme can be done in the form of mudharabah and musyarakah contract.

Mudharabah financing is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (predetermined ratio). On the statements of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah financing is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statements of financial position dates, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

Restructuring scheme involves extension of maturity date and/or rescheduling debtor's financing. Profit sharing income after restructurisation is recognised amounting to the profit sharing based on the agreed nisbah after restructurisation.

l. Assets acquired for ijarah

Ijarah of assets is ijarah for the benefits of ijarah assets.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* (lanjutan)

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa atas aset dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* atas aset disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:
(i) hibah; atau
(ii) penjualan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Ijarah atas jasa (multijasa) adalah *ijarah* atas manfaat dari jasa. *Ijarah* multijasa secara tidak langsung yaitu *ijarah* atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada penyewa. *Ijarah* multijasa tidak langsung tidak mengakui aset yang diperoleh untuk *ijarah*. Bank mengakui saldo pokok *ijarah* multijasa yang belum dibayar sebagai piutang *ijarah* multijasa.

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud

Aset tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga tahun untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah tidak disusutkan.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

l. Assets acquired for ijarah *(continued)*

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah of assets transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) a grant; or
(ii) sales.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

Ijarah of services (multi-services) is ijarah for the benefits of services. Indirect multi-services ijarah is an ijarah for services where another entity provides services to the lessee. Indirect multi-services ijarah does not recognise assets acquired for ijarah. The Bank recognise the unpaid principal balance of the multi-services ijarah as multi-services ijarah receivable.

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is valued with revaluation method. The acquisition cost includes directly attributable cost for the acquisition of the asset. The land is stated at fair value, based on the assessment performed by external independent appraisers which are registered with OJK. Valuation are performed regularly every three years to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from its carrying amount. All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. Land is not depreciated.

Fixed assets, except land, are depreciated from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Renovasi bangunan	10	*Buildings improvement*
Instalasi, kendaraan bermotor, inventaris kantor dan renovasi atas aset sewa	5	*Installation, vehicles, office equipment and leasehold improvement*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada "selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya.

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada "pendapatan dan beban nonusaha" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset hak guna

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Bank tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli; dan
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets *(continued)*

Fixed assets *(continued)*

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Costs after initial recognition are recognised as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only when the Bank is likely to benefit economically in the future with respect to these assets and the acquisition cost can be reliably measured. The carrying value of the replaced part are removed from the accounts. All other repairs and maintenance are charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income in the financial period when these costs occur.

The increase in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income.

The decrease in the carrying amount that offset previous increase of the same asset is charged to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income, other decrease is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

The net gains or losses arising from disposal of the fixed assets are determined by comparing the proceeds received from disposal with the carrying amount of the assets and recognised in "non-operating income and expenses" in the statements of profit or loss and other comprehensive income. When the revalued assets are sold, amounts recorded in equity are transferred to retained earnings.

Right-of-use assets

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

The Bank does not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option; and*
- *Leases of low value assets.*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Aset hak guna (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets *(continued)*

Right-of-use assets *(continued)*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Bank has the right to direct the use of the identified asset. The Bank has the right when it has a relevant decision-making right on how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
  1. *The Bank has the right to operate the asset; and*
  2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used.*

The Bank recognises a right-of-use assets and lease liabilities at the leases commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liabilities adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use assets is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liabilities are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each leases payment is allocated between the liabilities and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liabilities for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the leases term.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)

Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak.

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk perangkat lunak mencakup beban pekerja pengembang perangkat lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban, tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Perangkat lunak diamortisasi sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset yaitu 5 tahun.

n. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih akan diterima dan AYDA.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets** (continued)*

Intangible assets

Intangible assets are recognised if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Bank will obtain future economic benefits from the assets. Intangible assets consist of software.

Software acquired by the Bank is recorded at cost less accumulated amortisation. The amortisation method, estimated useful life and residual value are reviewed at the end of each reporting year and adjusted if deemed appropriate.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Software are amortised from the month of the usage of assets by computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets, which is 5 years.

n. Other assets

Other assets among other consist of prepaid expense and income receivables and AYDA.

Prepaid expenses are amortised over the useful life using the straight-line method. Foreclosed collaterals acquired in relation to settlement of financing are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, foreclosed collaterals are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

p. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

q. Liabilitas kepada Bank Indonesia

Liabilitas kepada Bank Indonesia (”PaSBI”) merupakan pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Bank sepakat melakukan akad *wakalah bil ististmar* untuk pengelolaan dana dengan agunan berupa surat berharga syariah. Dana yang diterima diakui sebagai liabilitas kepada Bank Indonesia. Bank melakukan pengelolaan dana untuk kegiatan investasi usaha secara keseluruhan *(mutlaqah)*, pengembalian dana kelolaan dan pembayaran hasil pengelolaan *(istitsmar)* dilakukan pada saat pelunasan. Liabilitas kepada Bank Indonesia dicatat sebesar nilai tunai yang diterima dari suatu instrumen intervensi surat berharga syariah dalam suatu operasi moneter reguler oleh Bank Indonesia.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

o. Obligations due immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

p. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah savings deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors in the Bank.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which are entrusted and can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

q. Liabilities to Bank Indonesia

Liabilities to Bank Indonesia ("PaSBI") is liquidity management based on Bank Indonesia sharia principles. Bank Indonesia and the Bank agreed to enter into a wakalah bil ististmar agreement for managing funds with collateral in the form of sharia securities. Funds received are recognized as liabilities to Bank Indonesia. The Bank manages funds for overall business investment activities (mutlaqah), returns of managed funds and payment of management results (istitsmar) are made at the time of settlement. Liabilities to Bank Indonesia are stated at the issuance cash value received from sharia securities intervention instrument in a regular monetary operation by Bank Indonesia.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqoh, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah*, dan akun lain yang sejenis, misalnya: giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak-pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

r. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing. An example of temporary syirkah funds is the receipt of funds from a mudharabah muthlaqoh, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah and other similar accounts. For example: mudharabah demand deposits, mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liabilities. This is because the Bank does not have any liabilities to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary syirkah funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realise gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary syirkah funds represent one of the statements of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

s. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna,* pendapatan dari *ijarah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* (“IMBT”) diakui selama masa akad secara merata sejak aset tersedia sampai akhir akad. Bank mengakui pendapatan *ijarah* multijasa porsi pokok sejak nasabah menerima jasa dari pihak penyedia jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan dan sejumlah biaya jasa yang harus dibayarkan Bank kepada pihak penyedia jasa. Bank mengakui pendapatan margin *ijarah* multijasa secara merata setelah selesainya pemberian jasa oleh pihak penyedia jasa selama masa akad *ijarah* antara Bank dan nasabah. Pendapatan IMBT dan *ijarah* multijasa disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait di laba rugi.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***r. Temporary syirkah funds** (continued)*

The owners of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

s. Income from fund management as mudharib

Income from fund management as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, istishna receivables, income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and other main operating income.

Income from murabahah receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

When calculating the effective margin, the Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Income from istishna is recognised at the date of transfer of assets.

Income from ijarah muntahiyah bittamlik (“IMBT”) is recognised over the contract period evenly from the time the assets become available until the end of the contract. The Bank recognises the principal portion of income from multi-services ijarah from the time the customer receives services from the service provider based on the progress of the services provided and the amount of service fees that must be paid by the Bank to the service provider. The Bank recognises income from multi-services ijarah margin evenly after the completion of service by the service provider during the period of the ijarah contract between the Bank and the customer. Income from IMBT and multi-services ijarah are presented on a net basis after deducting the related expenses in profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* (lanjutan)

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha *musyarakah* untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian dari pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

t. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima *(cash basis)*.

Bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan Bank.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad *wadiah* dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***s. Income from fund management as mudharib** (continued)*

Musyarakah income which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while musyarakah income which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liabilities.

Income from mudharabah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah investment.

Other main operating income consists of income derived from funds of qardh, Bank Indonesia Sharia Term Deposits, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

t. Third parties' share on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds under mudharabah mutlaqah principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined nisbah, while for customers of demand deposits and savings deposits under wadiah contract might be granted bonuses according to the Bank's policy.

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which are earned through the use of the Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pendapatan imbalan jasa perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan diakui pada periode akuntansi dimana jasa diberikan, dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dan dinilai berdasarkan jasa aktual yang telah diberikan sebagai proporsi atas total jasa yang harus diberikan.

v. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama tahun berjalan jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2021.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain terdiri atas:

(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial;
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset); dan
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

u. Fee based income from banking services

Fee based income from banking services is recognised in the accounting period in which the services are rendered, by reference to the stage of completion of the specific transaction and assessed on the basis of the actual service provided as a proportion of the total service to be provided.

v. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognised during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits and other long-term employee benefits such as grand leaves are recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on Bank regulations and Labor Law No. 11 of 2020 dated 2 November 2021.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit method.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognised as other comprehensive income consist of:

(i) Actuarial gain and losses;
(ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets); and
(iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti bersih langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

w. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut. Jika perlu, manajemen akan membentuk provisi berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar kepada otoritas pajak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Employee benefits *(continued)*

Defined benefit plan and other long-term employee benefits *(continued)*

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognised as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets) and re-measurement of liabilities (assets) is recognised immediately in the current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognised as expense at the earlier date between the occurrence of the amendments or curtailment program occurs, and the recognition of the costs of restructuring or severance. Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

w. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable that those temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses will be utilised in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined. If needed, management will provide provisions based on the estimated amount which will be paid to tax authority.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi bersih tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

x. Transaksi dan saldo mata uang asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah Indonesia sebagai mata uang fungsional. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (nilai penuh):

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***w. Taxation** (continued)*

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realised or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statements of financial position dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognised as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

x. Transaction and balance in foreign currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah as the functional currency. Transactions in foreign currencies are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

At statements of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time).

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognised in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (full amount):

	2024	2023	
1 Dolar Amerika Serikat	16,095.00	15,397.00	*1 United States Dollar*
1 Riyal Arab Saudi	4,284.00	4,106.00	*1 Saudi Arabian Riyal*
1 Euro Eropa	16,758.12	17,038.32	*1 European Euro*
1 Dolar Singapura	11,844.58	11,676.34	*1 Singapore Dollar*
1 Dolar Australia	10,013.51	10,520.77	*1 Australian Dollar*
1 Dolar Hong Kong	2,073.11	1,970.73	*1 Hong Kong Dollar*
1 Pound Sterling Inggris	20,218.54	19,626.56	*1 Great Britain Pound Sterling*
1 Yen Jepang	103.03	108.88	*1 Japan Yen*
1 Dolar Kanada	11,201.59	11,629.59	*1 Canadian Dollar*
1 Franc Swiss	17,815.04	18,299.27	*1 Swiss Franc*
1 Yuan China	2,198.50	2,170.06	*1 Chinese Yuan*
1 Dirham Uni Emirat Arab	4,382.00	4,192.50	*1 United Arab Emirates Dirham*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Pembiayaan berjangka *mudharabah*

Pembiayaan berjangka *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dengan bank lain sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) selama jangka waktu tertentu. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas yang diterima. Pada tanggal laporan posisi keuangan, dana *syirkah* temporer diukur dan disajikan sebesar nilai tercatat.

Hak pemilik dana atas bagi hasil usaha yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas.

z. Sukuk *mudharabah*

Sukuk *mudharabah* diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer.

aa. Laba per saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

ab. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

y. Mudharabah term financing

Mudharabah term financing is a joint financing made between the Bank as the business executor (mudharib) and the other bank as the owner of the funds (shahibul maal) during a certain period. The funds received from the fund owners are recognised as temporary syirkah funds amounting to the cash received. On the statements of financial position date, temporary syirkah funds are measured and presented at the carrying amount.

The right of the fund owner to the profit sharing that has been calculated but has not yet been distributed to the fund owner is recognised as a liability.

z. Sukuk mudharabah

Sukuk mudharabah is initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using a straight-line method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium associated to the initial recognition and transaction cost. The funds received from the fund owners are recognised as temporary syirkah funds.

aa. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the related year.

ab. Provisions

Provisions are recognised when the Bank has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Sumber dana kebajikan

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Dana Kebajikan berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

ad. Segmen operasi

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dan keuangan.

Di tahun 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian segmen operasi yang digunakan dalam laporan kinerja manajemen internal. Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok *Corporate Banking, Commercial Banking,* Hubungan Kelembagaan, Ritel, dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat.

***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

ac. Source of qardhul hasan funds

Based on Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Qardhul Hasan Funds comes from Funds that are Prohibited to be Recognised as Revenue (TBDSP Funds), which include the following:

1. The transaction that is not accordance with sharia principle and cannot be avoided include interest revenue (riba).
2. The sharia transaction does not fulfill the terms and conditions (principle and/or requirement.
3. Penalty funds (fines) because of not fulfilling the obligation on initial contract.
4. Unknown funds, the owner is known but was not found or the owner is known but return cost is higher than the stated amount.

ad. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The Bank presents operating segment based on the Bank's internal report that is presented to the Board of Directors as the chief operating decision maker.

In 2022, the Bank implements some changes in presentation of its operational segments for the internal management performance report. The Bank has identified and disclosed financial information based on main business (business segment) classified into Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional Relation, Retail and Treasury Banking & Head Office.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing

The Bank examines the quality of assets at statements of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised in the profit or loss, the Bank makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment.

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing is evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the expected cash in flows. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and/or the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif (Catatan 2d, 9, 10, 11, 12, 45a).

b. Kewajiban imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban imbalan kerja karyawan.

Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Bank mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

c. Perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba rugi.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing** (continued)*

Collectively assessed impairment allowances cover financing losses inherent in portfolios of receivables, funds of qardh, and financing with similar economic characteristics when there is objective evidence of impairment, yet the individual impaired items cannot be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as financing quality and product segmentation. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances (Note 2d, 9, 10, 11, 12, 45a).

b. Employee benefits liabilities

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or income for employee benefits include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of employee benefits liabilities.

The Bank determines the appropriate discount rate at the reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liabilities.

For the rate of future salary increases, the Bank collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

c. Taxation

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit loss.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

d. Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

e. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Bank sebagai *lessee*

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

f. Penyisihan kerugian aset nonproduktif

Bank menelaah potensi kerugian aset nonproduktif pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat penyisihan penurunan nilai yang harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penyisihan penurunan nilai harus dibentuk, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai dari aset nonproduktif. Estimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda (Catatan 15).

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

***c. Taxation** (continued)*

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

d. Fixed asset revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others: discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

e. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee

The Bank determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Bank has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

f. Allowance for impairment losses on non-earning assets

The Bank evaluates the potential loss of non-earning assets at each reporting date to assess whether provision for impairment losses should be recognised in the statements of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised, the Bank makes estimate on whether there is any indication of impairment of non-earning assets. These estimates are based on consideration of a number of factors and the end results may be different (Note 15).

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perlakuan penjualan aset pembiayaan

Penjualan aset syariah berupa pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* ("MMQ") griya dilakukan setelah memenuhi kondisi jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*), yang ditandai dengan berpindahnya kepemilikan aset pembiayaan MMQ yang diperjualbelikan, tidak ada kewajiban Bank untuk membeli kembali aset pembiayaan dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk instrumen investasi sekuritisasi efek beragun aset syariah surat partisipasi ("EBAS-SP").

Kontrak jual beli secara syariah harus dibuat dalam bentuk jelas dan final. Prinsip syariah mensyaratkan tidak boleh terdapat dua transaksi dalam satu kontrak. Sehingga Bank memperlakukan penjualan aset pembiayaan sebagai transaksi yang terpisah dari pembelian EBAS-SP kelas B.

Bank menerapkan kriteria jual beli sesungguhnya menggunakan PSAK 411, "Akuntansi *Wa'd*". Jual beli sesungguhnya ditandai dengan telah terjadi perpindahan dari Bank kepada penerbit atas:

a. hak dan kewajiban hukum aset syariah;
b. semua manfaat dan risiko dari aset syariah; dan
c. pengendalian atas aset syariah tersebut.

Sesuai dengan hal diatas, Bank menghentikan pengakuan pembiayaan MMQ secara menyeluruh (lihat Catatan 12g).

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

g. Treatment of sales of financing assets

The sale of sharia assets in the form of musyarakah mutanaqishah ("MMQ") financing is carried out after fulfilling the actual conditions of sale and purchase (al-bai' al-haqiqi), which is marked by the transfer of ownership of the MMQ financing assets being traded, there is no obligation of the Bank to buy back the financing assets in the form of financing or in the form of sharia asset-backed securities securitization investment instrument participation letter ("EBAS-SP").

Sharia sale and purchase contracts must be made in a clear and final form. Sharia principles require that there cannot be two transactions in one contract. So the Bank treats the sale of financing assets as a separate transaction from the purchase of class B EBAS-SP.

The Bank applies true sale criteria using SFAS 411, "Accounting of Wa'd". The true sale is marked by a transfer from the Bank to the issuer of:

a) legal rights and obligations of sharia assets;
b) all risks and rewards from sharia assets; and
c) control over the sharia assets.

Accordingly, the Bank derecognised the MMQ financing at its entirety (see Note 12g).

4. KAS / ***4. CASH***

	2024	2023	
Rupiah	7,623,321	4,912,435	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Riyal Arab Saudi	272,438	201,033	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Amerika Serikat	174,016	130,786	*United States Dollar*
Dolar Singapura	6,402	8,425	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	3,020	2,242	*Europe Euro*
Dolar Australia	1,423	793	*Australian Dollar*
Yen Jepang	69	127	*Japanese Yen*
	8,080,689	5,255,841	

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo dalam mata uang Rupiah tersebut sudah termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri ("ATM") masing-masing sebesar Rp1.738.176 dan Rp804.958.

As at 31 December 2024 and 2023, the Rupiah balance includes cash in Automated Teller Machines ("ATM") amounting to Rp1,738,176 and Rp804,958, respectively.

4. KAS (lanjutan)

Bank telah mengasuransikan kas dalam kluis, kas dalam perjalanan dan kas pada mesin ATM untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko bencana alam, pencurian, dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Askrida Syariah dan PT Asuransi Takaful Umum, keseluruhannya adalah pihak ketiga, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah dan PT Asuransi Jasindo Syariah, keseluruhannya adalah pihak berelasi.

***4. CASH** (continued)*

The Bank has insured cash in vaults, cash in transit and cash in ATMs to cover possible losses against the risk of natural disasters, theft and other risks to PT Asuransi Askrida Syariah and PT Asuransi Takaful Umum, all are third parties, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk., PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah and PT Asuransi Jasindo Syariah, all are related parties.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	2024	2023	
Rupiah	41,470,072	21,401,613	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	8,496,207	11,039,165	*United States Dollar*
	49,966,279	32,440,778	

b. Berdasarkan jenis / *b. By type*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Giro pada Bank Indonesia	13,470,072	16,901,613	*Current accounts with Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	28,000,000	4,500,000	*Bank Indonesia Sharia Certificates Facilities ("FASBIS")*
	41,470,072	21,401,613	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	8,127,975	10,854,885	*Bank Indonesia Sharia Term Deposits*
Giro pada Bank Indonesia	368,232	184,280	*Current accounts with Bank Indonesia*
	8,496,207	11,039,165	
	49,966,279	32,440,778	

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By time period*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	41,470,072	21,401,613	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	41,470,072	21,401,613	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	8,496,207	10,038,360	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	1,000,805	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	8,496,207	11,039,165	
	49,966,279	32,440,778	

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	41,470,072	21,401,613	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	41,470,072	21,401,613	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	8,496,207	10,269,315	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	769,850	*> 1 - ≤ 3 months*
	8,496,207	11,039,165	
	49,966,279	32,440,778	

e. Berdasarkan kolektibilitas

e. By collectibility

Kolektibilitas giro dan penempatan pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 54a.

The collectibility of current accounts and placements with Bank Indonesia is disclosed in Note 54a.

f. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM")

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio

GWM Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") diungkapkan pada Catatan 54l.

GWM Bank in accordance with Bank Indonesia Regulation and Board of Governors Members Regulations ("PADG") is disclosed in Note 54l.

g. Kisaran tingkat bonus tahunan

g. The range of annual bonus rate

	2024	2023	
Fasilitas Simpanan			*Bank Indonesia*
Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	5.25% - 5.50%	5.00% - 5.25%	*Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
Deposito Berjangka Syariah			*Bank Indonesia Sharia*
Bank Indonesia	4.35% - 5.58%	4.31% - 5.59%	*Term Deposit*

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	2024	2023	
Rupiah	2,700,430	639,257	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	1,001,663	1,284,332	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	79,938	365,480	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	34,578	10,468	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	19,758	14,795	*Europe Euro*
Pound Sterling Inggris	6,576	2,073	*Great Britain Pound Sterling*
Dirham Uni Emirat Arab	7,011	2,113	*United Arab Emirates Dirham*
Dolar Australia	7,987	4,364	*Australian Dollar*
Yen Jepang	2,863	1,338	*Japanese Yen*
Yuan China	19,805	-	*Chinese Yuan*
Dolar Hong Kong	265	253	*Hong Kong Dollar*
	1,180,444	1,685,216	
Jumlah	3,880,874	2,324,473	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,809)	(20,745)	*Allowance for impairment losses*
	3,866,065	2,303,728	

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS *(continued)*

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	2,400,000	250,000	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Giro	193,933	317,627	*Current accounts*
	2,593,933	567,627	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	1,158,392	1,651,606	*Current accounts*
	3,752,325	2,219,233	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	106,498	71,630	*Current accounts*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	22,051	33,610	*Current accounts*
	128,549	105,240	
Jumlah	3,880,874	2,324,473	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,809)	(20,745)	*Allowance for impairment losses*
	3,866,065	2,303,728	

c. Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas giro dan penempatan pada bank lain diungkapkan pada Catatan 54b.

c. By collectibility

The collectibility of current accounts and placements with other banks is disclosed in Note 54b.

d. Berdasarkan jatuh tempo

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

d. By maturity

Current accounts and placements with other banks have remaining period to maturity of less than 1 (one) month.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro dan penempatan pada bank lain

e. The movements of allowance for losses on current accounts and placements with other banks

	2024	2023	
Saldo awal	20,745	15,575	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	(6,999)	4,628	*(Reversal)/provision during the year (Note 39)*
Selisih kurs	1,063	542	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	14,809	20,745	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses from uncollectible current accounts with other banks.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

As at 31 December 2024 and 2023, no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

Seluruh pendapatan yang diterima dari giro pada bank nonsyariah dicatat sebagai dana kebajikan (Catatan 23).

All income received from current accounts with non-sharia banks are recorded as qardhul hasan funds (Note 23).

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Desember/*December* 2024		31 Desember/*December* 2023		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	2,320,383	2,300,433	1,835,552	1,847,602	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah ("SPNS")	2,006,619	1,962,324	895,000	878,000	*Sharia State Treasury Certificate ("SPNS")*
Sukuk Bank Indonesia	2,000,000	2,028,369	1,724,704	1,724,704	*Sukuk Bank Indonesia*
Reksa dana	-	-	400,000	405,089	*Mutual funds*
Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi ("EBAS - SP") (Catatan 7g dan 12g7)	27,301	29,476	27,301	31,787	*Sharia Asset Backed Securities - Letter of Participation ("EBAS - SP") (Note 7g and 12g7)*
	6,354,303	6,320,602	4,882,557	4,887,182	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	46,466	46,181	6,728	6,702	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Total nilai wajar melalui laba rugi	6,400,769	6,366,783	4,889,285	4,893,884	***Total fair value through profit or loss***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	10,455,701	10,251,000	7,119,539	7,087,426	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Sukuk Bank Indonesia	11,184,698	11,184,698	20,693,578	20,744,693	*Sukuk Bank Indonesia*
Reksa dana	2,500,000	2,543,914	1,200,000	1,219,721	*Mutual funds*
Sukuk korporasi	-	-	120,000	120,890	*Corporate sukuk*
	24,140,399	23,979,612	29,133,117	29,172,730	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Sukuk Bank Indonesia	8,127,975	8,127,975	1,539,700	1,544,442	*Sukuk Bank Indonesia*
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	273,615	261,066	-	-	Government Islamic Securities *("SBSN")*
	8,401,590	8,389,041	1,539,700	1,544,442	
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	32,541,989	32,368,653	30,672,817	30,717,172	***Total fair value through other comprehensive income***
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	22,078,936	22,127,374	33,952,697	34,092,672	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Sukuk korporasi	638,800	638,800	947,800	947,800	*Corporate sukuk*
Wesel ekspor	309,746	309,746	200,858	200,858	*Export bills*
	23,027,482	23,075,920	35,101,355	35,241,330	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	431,346	433,580	443,434	449,140	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Wesel ekspor	6,870	6,870	-	-	*Export bills*
	438,216	440,450	443,434	449,140	
Total biaya perolehan diamortisasi	23,465,698	23,516,370	35,544,789	35,690,470	***Total amortised cost***
Total investasi pada surat berharga		62,251,806		71,301,526	***Total investments in marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(35,288)		(132,506)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		62,216,518		71,169,020	*Net*

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan penerbit

b. By issuer

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2024	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2023	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2024	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2023
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at fair value through profit or loss*					
Rupiah					
Bank Indonesia	7.05	-	-	2,028,369	1,724,704
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	698,031	86,795
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	10,863	8,846
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	17,620	108,737
Seri SBSN PBS007	9.00	-	-	3,247	4,509
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	126,050	38,939
Seri SBSN PBS015	8.00	-	-	1,969	66,406
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	278,412	109,087
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	52	1,660
Seri SBSN PBS022	8.63	-	-	380	9,406
Seri SBSN PBS023	8.13	-	-	-	6,505
Seri SBSN PBS025	8.38	-	-	46,761	41,404
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	-	56,604
Seri SBSN PBS028	7.75	-	-	9,558	112,525
Seri SBSN PBS029	6.38	-	-	232	90,476
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	128,505	1,149
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	-	435,305
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	328,337	22,464
Seri SBSN PBS033	6.75	-	-	29,124	22,770
Seri SBSN PBS034	6.50	-	-	964	43,684
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	449,735	156,924
Seri SBSN PBS037	6.88	-	-	2,780	52,694
Seri SBSN PBS038	6.88	-	-	3,235	27,814
Seri SBSN SR014	5.47	-	-	-	223,102
Seri SBSN SR015	5.10	-	-	-	71,150
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	19,716	22,503
Seri SBSN SR017	5.90	-	-	23,254	2,342
Seri SBSN SR018T3	6.25	-	-	33,789	21,230
Seri SBSN SR018T5	6.40	-	-	18,597	2,572
Seri SBSN SR019T3	5.59	-	-	18,402	-
Seri SBSN SR019T5	6.10	-	-	13,679	-
Seri SBSN SR020T3	6.30	-	-	19,111	-
Seri SBSN SR020T5	6.40	-	-	12,661	-
Seri SBSN SR021T3	6.35	-	-	4,996	-
Seri SBSN SR021T5	6.45	-	-	373	-
SPN-S 01042025TRD	-	-	-	165,654	-
SPN-S 01092025TRD	-	-	-	138,603	-
SPN-S 02022025TRD	-	-	-	323,005	-
SPN-S 03032025TRD	-	-	-	469,597	-
SPN S 04082025TRD	-	-	-	75,910	-
SPN-S 07052024TRD	-	-	-	309,093	410,755
SPN-S 09042024TRD	-	-	-	160,206	417,645
SPN-S 14022024TRD	-	-	-	-	49,600
SPN-S 29052025TRD	-	-	-	320,256	-
Korporasi/*Corporation*					
EBAS - SP	-	-	-	29,476	31,787
Reksa Dana PT Bahana TCW Investment Management	-	-	-	-	254,418
Reksa Dana PT Trimegah Syariah	-	-	-	-	150,671
				6,320,602	4,887,182
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Pemerintah/*Government*					
Seri INDOIS25TRD	2.30	-	-	1,621	-
Seri INDOIS27TRD	4.40	-	-	13,096	6,702
Seri SNI25TRD	4.30	-	-	31,464	-
				46,181	6,702
				6,366,783	4,893,884
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Measured at fair value through other comprehensive income*					
Rupiah					
Bank Indonesia	6.93	-	-	11,184,698	20,744,693
Korporasi/*Corporation*					
Reksa Dana PT Eastspring Investment Indonesia	-	-	-	717,281	256,717
Reksa Dana PT Bahana TCW Investment Management	-	-	-	512,750	508,975
Reksa Dana PT Trimegah Sekuritas Indonesia	-	-	-	355,415	252,845
Reksa Dana PT BNP Paribas Asset Management	-	-	-	203,855	201,184
Reksa Dana PT Manulife Syariah Proteksi Utama	-	-	-	200,938	-
Reksa Dana PT Batavia Proteksi Syariah	-	-	-	351,601	-
RDST Syailendra Capital Protected Syariah 4	-	-	-	202,074	-
Sukuk CIMB Niaga Tahun 2023 Seri A	6.25	-	AA+(idn)sy	-	19,981
SMDR 2023 SERI B	9.45	-	idA+(sy)	-	100,908
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN PBSG001	6.63	-	-	573,996	376,008
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	1,041,777	827,094
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	1,501,152	-
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	366,579	370,150
Seri SBSN PBS029	6.38	-	-	999,665	515,711
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	1,619,080	594,982
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	-	965,562
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	1,636,720	973,873
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	598,793	594,430
Seri SBSN PBS037	6.88	-	-	1,913,238	1,869,617
				23,979,612	29,172,730

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan) / *b. By issuer (continued)*

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2024	Peringkat/ *Rating* 31 Desember/ *December* 2023	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2024	Nilai tercatat/ *Carrying value* 31 Desember/ *December* 2023
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)/ ***Measured at fair value through other comprehensive income*** *(continued)*					
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Seri SNI0630AFS	2.80	-	-	71,410	-
Seri SNI0229AFS	4.45	-	-	94,236	-
Seri SNI0729AFS	5.10	-	-	64,314	-
Seri SNI0632AFS	4.70	-	-	31,106	-
Bank Indonesia	4.78	-	-	8,127,975	1,544,442
				8,389,041	1,544,442
				32,368,653	30,717,172
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Measured at amortised cost*					
Rupiah					
Korporasi/*Corporation*					
BPD Kalsel 2022	8.00	A(idn)sy	A(idn)sy	35,000	35,000
CIMB Niaga Tahun 2023 Seri B	7.15	AA+(idn)sy	AA+(idn)sy	45,000	45,000
Inka Tahun Tahun 2020	10.59	-	idBBB+(sy)	-	75,000
ISAT Tahap I 2022	7.00	idAAA(sy)	idAAA(sy)	213,800	213,800
MPI Tahap I 22 Seri A	9.00	idA(sy)	idA(sy)	150,000	150,000
PTPN III Tahun 2018	11.25	-	idBBB+(sy)	-	85,000
PT Global Mediacom Tbk Tahun 2022	10.00	-	idA+(sy)	-	50,000
PT Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	8.60	-	idCCC(sy)	-	99,000
PT XL Axiata I Tahun 2022 Seri A	6.75	AAA(idn)sy	AAA(idn)sy	195,000	195,000
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN IFR0006	10.25	-	-	49,533	50,407
Seri SBSN IFR0010	10.00	-	-	98,377	99,774
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	1,921,650	1,923,235
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	712,393	710,589
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	156,743	156,558
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	166,538	168,951
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	7,590,093	7,619,962
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	105,663	108,697
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	-	7,859,178
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	3,353,999	3,356,547
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	-	3,067,898
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	6,625,521	6,623,442
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	298,577	296,272
Seri SBSN PBSG001	6.63	-	-	998,421	998,529
Seri SBSN SR014	5.47	-	-	-	501,295
Seri SBSN SR015	5.10	-	-	-	502,193
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	49,866	49,145
Wesel ekspor/*Export bills*	6.04	-	-	309,746	200,858
				23,075,920	35,241,330
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Pemerintah/*Government*					
Seri INDOIS24	4.35	-	-	-	157,283
Seri INDOIS25	4.33	-	-	61,861	60,845
Seri INDOIS25 *NEW*	2.30	-	-	80,494	77,042
Seri INDOIS27	4.40	-	-	241,688	153,970
Seri INDOIS29	5.10	-	-	49,537	-
Wesel Ekspor/*Export bills*	4.70	-	-	6,870	-
				440,450	449,140
				23,516,370	35,690,470
				62,251,806	71,301,526
Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*				(35,288)	(132,506)
				62,216,518	71,169,020

Jumlah nominal atas INDOIS25, INDOIS25 *NEW*, INDOIS25TRD, INDOIS27, INDOIS27TRD, INDOIS29, SNI25TRD dan SUVBI dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD551.028.356 (nilai penuh).

The nominal amount of INDOIS25, INDOIS25 NEW, INDOIS25TRD, INDOIS27, INDOIS27TRD, INDOIS29, SNI25TRD and SUVBI which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2024 amounted to USD551,028,356 (full amount).

Jumlah nominal atas INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 *NEW,* INDOIS27, INDOIS27TRD, dan SUVBI dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD129.913.931 (nilai penuh).

The nominal amount of INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 NEW, INDOIS27, INDOIS27TRD, and SUVBI which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2023 amounted to USD129,913,931 (full amount).

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan)

Bank mengakui (kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diklasifikasikan "Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain" untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(92.116) dan Rp61.631 yang disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

b. By issuer *(continued)*

The Bank recognised unrealised (loss)/gain on changes in the value of marketable securities classified as "Measured at fair value through other comprehensive income" for the year ended 31 December 2024 and 2023 amounting to Rp(92,116) and Rp61,631, respectively, which are recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By period***

	2024	2023	
≤ 1 tahun	19,175,310	24,005,262	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 3 tahun	4,724,828	1,734,919	*> 1 - ≤ 3 years*
> 3 - ≤ 5 tahun	4,418,800	8,694,459	*> 3 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	33,932,868	36,866,886	*> 5 years*
	62,251,806	71,301,526	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,288)	(132,506)	*Allowance for impairment losses*
	62,216,518	71,169,020	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2024	2023	
≤ 1 bulan	4,906,360	17,162,511	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	10,427,000	3,050,078	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	18,568,165	19,328,749	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 tahun	28,350,281	31,760,188	*> 1 year*
	62,251,806	71,301,526	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,288)	(132,506)	*Allowance for impairment losses*
	62,216,518	71,169,020	

e. Berdasarkan hubungan / ***e. By relationship***

	2024	2023	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	15,999,324	24,193,570	*Rupiah*
Mata uang asing	8,134,845	1,544,443	*Foreign currencies*
	24,134,169	25,738,013	
Pihak berelasi (Catatan 44)			*Related parties (Note 44)*
Rupiah	37,376,811	45,107,671	*Rupiah*
Mata uang asing	740,826	455,842	*Foreign currencies*
	38,117,637	45,563,513	
	62,251,806	71,301,526	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,288)	(132,506)	*Allowance for impairment losses*
	62,216,518	71,169,020	

f. Berdasarkan kolektibilitas / ***f. By collectibility***

Kolektibilitas investasi pada surat berharga diungkapkan pada Catatan 54c.

The collectibility of investments in marketable securities is disclosed in Note 54c.

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

g. Informasi penting lainnya

g. Other significant information

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai investasi surat berharga secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

The Bank assessed the impairment on investments in marketable securities individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses stated above is adequate.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Sukuk Pemerintah dengan jumlah nominal sebesar Rp19.800.000 (2023: Rp12.500.000) dijaminkan untuk fasilitas liabilitas kepada Bank Indonesia (Catatan 21).

As of 31 December 2024, Government Bonds with total nominal amount of Rp19,800,000 (2023: Rp12,500,000) are being pledged as collateral for the facilities of liabilities to Bank Indonesia (Note 21).

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for losses on investments in marketable securities are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	132,506	10,634	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan tahun berjalan (Catatan 39)	(97,218)	121,872	*(Reversal)/provision during the year (Note 39)*
Saldo akhir	35,288	132,506	*Ending balance*

Berikut adalah perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

The following are changes in the carrying value and allowance for impairment losses of securities classified as fair value through other comprehensive income.

	2024		2023		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Saldo awal tahun	30,717,172	13,406	3,051,045	-	*Beginning balance*
Efek-efek yang baru dibeli	92,827,061	15,743	60,357,389	13,406	*Newly purchased marketable securities*
Efek-efek yang jatuh tempo atau dijual	(91,024,256)	(3,776)	(32,770,121)	-	*Matured or sold marketable securities*
Amortisasi premium dan diskonto	(59,208)	-	17,228	-	*Amortisation of premium and discount*
Perubahan nilai wajar	(92,116)	66	61,631	-	*Changes in fair values*
	32,368,653	25,439	30,717,172	13,406	

Bank membeli investasi EBAS-SP kelas B pada bulan Juni 2023. EBAS-SP kelas B merupakan investasi kelas junior yang bersifat subordinasi dari EBAS-SP kelas A. Pembayaran imbal hasil kelas B akan dibayarkan setiap kuartal ketika imbal hasil kelas A telah terbayar. Pembayaran pokok kelas B akan dibayarkan ketika pokok kelas A telah terbayar penuh (ekspektasi di 2032).

The Bank purchased the EBAS-SP class B investment in June 2023. EBAS-SP class B is a junior class investment which is subordinate to EBAS-SP class A. Payment of class B profit sharing will be paid on quarterly basis when the class A profit sharing portion has been paid. Payment of class B principal will be paid only after all principal of class A are paid in full (expected in 2032).

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI / *8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	4,630	223,571	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	8,064	20,503	*Export L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
	12,694	244,074	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 44)			*Related parties (Note 44)*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	130,019	124,856	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	42,432	62,298	*Export L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
	172,451	187,154	
	185,145	431,228	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,851)	(4,312)	*Allowance for impairment losses*
	183,294	426,916	

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

Kolektibilitas tagihan akseptasi diungkapkan pada Catatan 54d.

The collectibility of acceptance reveivables is disclosed in Note 54d.

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity*

	2024	2023	
≤ 1 bulan	30,721	289,490	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	66,362	68,657	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	88,062	73,081	*> 3 - ≤ 12 months*
	185,145	431,228	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,851)	(4,312)	*Allowance for impairment losses*
	183,294	426,916	

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan dan liabilitas akseptasi / *d. The movements of allowance for losses on acceptance receivables and liabilities*

	2024	2023	
Saldo awal	4,312	4,814	*Beginning balance*
Pembalikan selama tahun berjalan (Catatan 39)	(2,457)	(374)	*Reversal during the year (Note 39)*
Selisih kurs	(4)	(128)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	1,851	4,312	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses from uncollectible acceptance receivables.

9. PIUTANG / *9. RECEIVABLES*

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas / *a. By currency, type and collectibility*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *murabahah*			*Murabahah receivables*
Lancar	138,808,664	131,312,555	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,156,308	2,168,075	*Special mention*
Kurang lancar	885,705	845,358	*Substandard*
Diragukan	545,922	679,468	*Doubtful*
Macet	1,875,935	1,415,388	*Loss*
	144,272,534	136,420,844	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Piutang *murabahah*			*Murabahah receivables*
Lancar	-	82,252	*Current*
Dalam perhatian khusus	-	-	*Special mention*
Kurang lancar	-	-	*Substandard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	-	-	*Loss*
	-	82,252	
	144,272,534	136,503,096	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,246,909)	(4,348,133)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	140,025,625	132,154,963	*Net*
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *istishna*			*Istishna receivables*
Lancar	11	29	*Current*
Dalam perhatian khusus	-	-	*Special mention*
Kurang lancar	-	-	*Substandard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	-	1	*Loss*
	11	30	
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(2)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	11	28	*Net*
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *ijarah*			*Ijarah receivables*
Ijarah atas aset			*Ijarah of assets*
Lancar	-	-	*Current*
Dalam perhatian khusus	229	423	*Special mention*
Kurang lancar	259	555	*Substandard*
Diragukan	359	927	*Doubtful*
Macet	15,095	9,175	*Loss*
	15,942	11,080	
Ijarah multijasa			*Multi-services ijarah*
Lancar	168,722	202,589	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,991	2,397	*Special mention*
Kurang lancar	209	590	*Substandard*
Diragukan	573	974	*Doubtful*
Macet	924	770	*Loss*
	172,419	207,320	
	188,361	218,400	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18,460)	(13,233)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	169,901	205,167	*Net*
	140,195,537	132,360,158	

9. PIUTANG (lanjutan) / *9. RECEIVABLES (continued)*

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas / *b. By currency, economic sector and collectibility*

	31 Desember/*December* 2024						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	2,027,607	39,430	21,455	13,489	568,938	2,670,919	*Manufacturing*
Jasa usaha	6,048,680	82,420	62,892	23,524	61,124	6,278,640	*Business services*
Konstruksi	253,772	31,504	3,749	1,676	11,955	302,656	*Construction*
Konsumer	103,296,742	1,622,280	564,069	374,330	910,087	106,767,508	*Consumer*
Listrik, gas dan air	33,256	778	140	60	12,715	46,949	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	810,491	21,702	6,963	1,476	16,354	856,986	*Transportation*
Perdagangan	14,693,042	289,257	186,436	94,645	163,665	15,427,045	*Trading*
Pertambangan	280,825	63	356	-	1,379	282,623	*Mining*
Pertanian	10,965,834	69,923	39,598	37,058	144,647	11,257,060	*Agriculture*
Sosial/59asyarakat	120,810	1,171	515	596	150	123,242	*Social/public*
Lainnya	446,338	-	-	-	940	447,278	*Others*
Jumlah piutang	138,977,397	2,158,528	886,173	546,854	1,891,954	144,460,906	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,721,993)	(290,167)	(299,464)	(220,601)	(1,733,144)	(4,265,369)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	137,255,404	1,868,361	586,709	326,253	158,810	140,195,537	*Net*

	31 Desember/*December* 2023						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	1,979,239	39,391	26,552	14,954	566,449	2,626,585	*Manufacturing*
Jasa usaha	5,411,312	86,857	46,951	33,821	42,574	5,621,515	*Business services*
Konstruksi	255,647	43,352	5,848	7,037	7,414	319,298	*Construction*
Konsumer	100,850,518	1,538,848	553,139	436,045	576,003	103,954,553	*Consumer*
Listrik, gas dan air	50,864	792	1,129	269	3,214	56,268	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	747,248	20,523	4,763	5,553	5,274	783,361	*Transportation*
Perdagangan	12,264,130	277,925	170,810	137,814	120,332	12,971,011	*Trading*
Pertambangan	184,123	3,379	326	340	777	188,945	*Mining*
Pertanian	9,022,610	159,384	36,732	45,412	102,164	9,366,302	*Agriculture*
Sosial/59asyarakat	93,644	402	253	124	193	94,616	*Social/public*
Lainnya	655,838	42	-	-	940	656,820	*Others*
	131,515,173	2,170,895	846,503	681,369	1,425,334	136,639,274	
Mata uang asing							***Foreign currency***
Pengangkutan	82,252	-	-	-	-	82,252	*Transportation*
	82,252	-	-	-	-	82,252	
Jumlah piutang	131,597,425	2,170,895	846,503	681,369	1,425,334	136,721,526	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,008,862)	(326,784)	(342,221)	(349,871)	(1,333,630)	(4,361,368)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	129,588,563	1,844,111	504,282	331,498	91,704	132,360,158	*Net*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	508,513	219,096	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	2,030,673	1,137,206	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	25,958,450	20,590,042	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	115,963,270	114,692,930	*> 5 years*
	144,460,906	136,639,274	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	-	-	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	-	-	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	-	82,252	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	-	82,252	
Jumlah	144,460,906	136,721,526	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,265,369)	(4,361,368)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	140,195,537	132,360,158	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	201,507	187,326	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	240,192	215,094	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	3,867,415	2,726,139	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	53,068,256	43,042,542	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	87,083,536	90,468,173	*> 5 years*
	144,460,906	136,639,274	

9. PIUTANG (lanjutan)

***9. RECEIVABLES** (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo (lanjutan)

***d. By remaining period to maturity** (continued)*

	2024	2023	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 bulan	-	-	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	-	82,252	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	-	82,252	
Jumlah	144,460,906	136,721,526	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,265,369)	(4,361,368)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	140,195,537	132,360,158	*Net*

e. Berdasarkan hubungan

e. By relationship

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	144,394,023	136,526,403	*Rupiah*
Mata uang asing	-	82,252	*Foreign currencies*
	144,394,023	136,608,655	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	66,883	112,871	*Rupiah*
Jumlah	144,460,906	136,721,526	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,265,369)	(4,361,368)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	140,195,537	132,360,158	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas

f. By collectibility

	31 Desember/*December* 2024		31 Desember/*December* 2023		
	Pokok/ *Principal*	**Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses***	**Pokok/ *Principal***	**Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses***	
Lancar	138,977,397	1,721,993	131,597,425	2,008,862	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,158,528	290,167	2,170,895	326,784	*Special mention*
Kurang lancar	886,173	299,464	846,503	342,221	*Substandard*
Diragukan	546,854	220,601	681,369	349,871	*Doubtful*
Macet	1,891,954	1,733,144	1,425,334	1,333,630	*Loss*
	144,460,906	4,265,369	136,721,526	4,361,368	

g. Informasi penting lainnya

1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *murabahah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

g. Other significant information

1) Employee loans that used murabahah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 30 (thirty) years period and paid through monthly salary deductions.

9. PIUTANG (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

2) Efektif *yield* margin piutang *murabahah* untuk Rupiah berkisar antara 9,37% sampai dengan 9,96% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 9,74% sampai dengan 10,37% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan untuk mata uang asing berkisar antara 1,05% sampai dengan 2,76% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 1,04% sampai dengan 1,11% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

***9. RECEIVABLES** (continued)*

***g. Other significant information** (continued)*

2) Effective margin yield murabahah receivables for Rupiah ranges from 9.37% to 9.96% per annum for the year ended 31 December 2024 and 9.74% to 10.37% per annum for the year ended 31 December 2023 and for foreign currencies ranges from 1.05% to 2.76% per annum for the year ended 31 December 2024 and 1.04% to 1.11% per annum for the year ended 31 December 2023.

3) The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	4,361,368	4,184,787	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	967,838	1,536,234	*Provision during the year (Note 39)*
Penerimaan kembali hapus buku	646,160	451,408	*Recoveries of write-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1,710,204)	(1,809,187)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	207	(1,874)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	4,265,369	4,361,368	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on murabahah receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible receivables.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Receivables are collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

4) Jumlah piutang yang direstrukturisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam Catatan 54h.

4) Total restructured receivables for the year ended 31 December 2024 and 2023 are disclosed in Note 54h.

5) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah piutang diungkapkan dalam Catatan 54i.

5) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") of receivables are disclosed in Note 54i.

10. PINJAMAN *QARDH* / *10. FUNDS OF QARDH*

a. Berdasarkan mata uang dan jenis / *a. By currency and type*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Rahn	8,081,126	5,576,102	*Rahn*
Qardh	2,624,707	3,087,794	*Qardh*
Kartu Hasanah	801,593	684,463	*Hasanah Card*
	11,507,426	9,348,359	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Qardh	2,266,358	1,958,722	*Qardh*
Jumlah	13,773,784	11,307,081	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787,694)	(817,917)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	12,986,090	10,489,164	*Net*

b. Berdasarkan mata uang dan sektor ekonomi / *b. By currency and economic sector*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Industri	442,609	276,669	*Manufacturing*
Jasa usaha	485,681	321,043	*Business services*
Konstruksi	1,053,849	1,792,006	*Construction*
Konsumer	8,991,765	6,424,136	*Consumer*
Pengangkutan	9,474	10,853	*Transportation*
Perdagangan	104,477	302,501	*Trading*
Pertanian	195,132	176,674	*Agriculture*
Listrik, gas dan air	195,244	-	*Electricity, gas and water*
Lainnya	29,195	44,477	*Others*
	11,507,426	9,348,359	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Industri	2,003,044	1,921,819	*Manufacturing*
Pengangkutan	59,004	32,580	*Transportation*
Listrik, gas dan air	200,885	-	*Electricity, gas and water*
Perdagangan	3,425	4,323	*Trading*
	2,266,358	1,958,722	
Jumlah	13,773,784	11,307,081	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787,694)	(817,917)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	12,986,090	10,489,164	*Net*

b. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	7,880,661	6,856,585	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	600,354	489,505	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	256,793	61,205	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	2,769,618	1,941,064	*> 5 years*
	11,507,426	9,348,359	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	2,099,432	1,951,208	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	166,926	7,514	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	-	-	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	2,266,358	1,958,722	
Jumlah	13,773,784	11,307,081	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787,694)	(817,917)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	12,986,090	10,489,164	*Net*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	1,444,041	1,741,674	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	4,315,569	2,934,831	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,351,567	2,789,229	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	1,334,153	695,668	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	2,062,096	1,186,957	*> 5 years*
	11,507,426	9,348,359	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 bulan	177,507	565,713	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	793,541	498,081	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	1,295,310	894,497	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	-	431	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	2,266,358	1,958,722	
Jumlah	13,773,784	11,307,081	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787,694)	(817,917)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	12,986,090	10,489,164	*Net*

e. Berdasarkan hubungan / *e. By relationship*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	10,596,644	7,509,363	*Rupiah*
Mata uang asing	2,266,358	1,958,722	*Foreign currency*
	12,863,002	9,468,085	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	910,782	1,838,996	*Rupiah*
Jumlah	13,773,784	11,307,081	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(787,694)	(817,917)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	12,986,090	10,489,164	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

Kolektibilitas pinjaman *qardh* diungkapkan pada Catatan 54e.

The collectibility of funds of qardh is disclosed in Note 54e.

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

1) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

1) The movements of allowance for impairment losses on funds of qardh are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	817,917	834,596	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	27,969	80,586	*Provision during the year (Note 39)*
Penerimaan kembali hapus buku	5,212	21,920	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(64,288)	(119,043)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	884	(142)	*Exchange rate differences*
Saldo akhir	787,694	817,917	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh*.

Management believes that the allowance for impairment losses on funds of qardh is adequate to cover potential losses from uncollectible funds of qardh.

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

2) Pinjaman *qardh* dijamin agunan yang diikat dengan gadai, hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

3) Jumlah pinjaman *qardh* yang direstrukturisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam Catatan 54h.

4) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* diungkapkan dalam Catatan 54i.

10. FUNDS OF QARDH *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

2) Funds of qardh are collateralised by pawning, registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, or by other guarantees generally accepted by the Bank.

3) Total restructured funds of qardh for the year ended 31 December 2024 and 2023 are disclosed in Note 54h.

4) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") of funds of qardh are disclosed in Note 54i.

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

11. MUDHARABAH FINANCING

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

a. By currency and type

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	2,869,127	1,870,347	*Working capital*
Investasi	45,809	10,786	*Investment*
	2,914,936	1,881,133	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Modal kerja	22,143	-	*Working capital*
Jumlah	2,937,079	1,881,133	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93,488)	(49,481)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,843,591	1,831,652	*Net*

b. Berdasarkan mata uang dan sektor ekonomi

c. By currency and economic sector

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Industri	7,171	7,510	*Manufacturing*
Jasa usaha	54,116	29,023	*Business services*
Konstruksi	16,354	5,733	*Construction*
Perdagangan	21,123	23,717	*Trading*
Pengangkutan	17,835	36,675	*Transportation*
Pertanian	100,000	1,853	*Agriculture*
Pertambangan	-	5,000	*Mining*
Lainnya	2,698,337	1,771,622	*Others*
	2,914,936	1,881,133	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pengangkutan	22,143	-	*Transportation*
Jumlah	2,937,079	1,881,133	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93,488)	(49,481)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,843,591	1,831,652	*Net*

11. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan) / *11. MUDHARABAH FINANCING (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	2,038,740	1,000,980	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	37,632	78,581	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	294,407	287,296	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	544,157	514,276	*> 5 years*
	2,914,936	1,881,133	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	22,143	-	*≤ 1 year*
Jumlah	2,937,079	1,881,133	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93,488)	(49,481)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,843,591	1,831,652	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	20,506	17,726	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	8,190	3,515	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,088,080	1,120,244	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	630,325	500,389	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	167,835	239,259	*> 5 years*
	2,914,936	1,881,133	
Mata uang asing			**Foreign currencies**
≤ 1 bulan	-	-	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	22,143	-	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	-	-	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	22,143	-	
Jumlah	2,937,079	1,881,133	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93,488)	(49,481)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,843,591	1,831,652	*Net*

e. Berdasarkan hubungan / *e. By relationship*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	914,936	881,133	*Rupiah*
Mata Uang Asing	22,143	-	Foreign currencies
	937,079	881,133	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	2,000,000	1,000,000	*Rupiah*
Jumlah	2,937,079	1,881,133	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(93,488)	(49,481)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,843,591	1,831,652	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

Kolektibilitas pembiayaan *mudharabah* diungkapkan pada Catatan 54f.

The collectibility of mudharabah financing is disclosed in Note 54f.

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

1) Efektif *yield* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* untuk Rupiah berkisar antara 3,94% sampai dengan 14,06% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan berkisar antara 4,01% sampai dengan 9,98% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

1) Effective profit sharing yield mudharabah financing for Rupiah ranges from 3.94% to 14.06% per annum for the the year ended 31 December 2024 and ranges from 4.01% to 9.98% per annum for the the year ended 31 December 2023.

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

11. MUDHARABAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

2) The movements of allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	49,481	39,440	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	44,110	11,962	*Provision during the year (Note 39)*
Penerimaan kembali hapus buku	31	-	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(134)	(1,921)	*Write-off during the year*
Saldo akhir	93,488	49,481	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *mudharabah*.

Management believes that the allowance for impairment losses on mudharabah financing is adequate to cover potential losses from uncollectible mudharabah financing.

3) Pembiayaan *mudharabah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank.

3) Mudharabah financing is collateralised by registered mortgage or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

4) Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam Catatan 54h.

4) Total restructured mudharabah financing for the year ended 31 December 2024 and 2023 are disclosed in Note 54h.

5) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* diungkapkan dalam Catatan 54i.

5) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") of mudharabah financing are disclosed in Note 54i.

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

12. MUSYARAKAH FINANCING

a. By currency and type

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Investasi	46,224,075	35,500,247	*Investment*
Modal kerja	28,511,351	30,524,281	*Working capital*
Konsumsi	36,105,093	20,016,965	*Consumption*
	110,840,519	86,041,493	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Investasi	3,071,894	1,931,367	*Investment*
Modal kerja	274,805	243,337	*Working capital*
	3,346,699	2,174,704	
Jumlah	114,187,218	88,216,197	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,145,131)	(4,459,696)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	109,042,087	83,756,501	*Net*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan sektor ekonomi / *By currency and economic sector*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Industri	7,215,612	6,951,404	*Manufacturing*
Jasa usaha	16,364,550	12,162,024	*Business services*
Konstruksi	16,470,495	16,628,029	*Construction*
Konsumer	36,105,092	20,016,965	*Consumer*
Listrik, gas dan air	5,701,749	3,910,607	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	6,553,830	7,278,632	*Transportation*
Perdagangan	7,343,272	6,867,078	*Trading*
Pertambangan	454,897	263,652	*Mining*
Pertanian	11,811,928	8,295,972	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	187,051	270,353	*Social/public*
Lainnya	2,632,043	3,396,777	*Others*
	110,840,519	86,041,493	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Industri	422,286	16,719	*Manufacturing*
Jasa usaha	-	122,321	*Business services*
Pertanian	897,542	-	*Agriculture*
Listrik, gas dan air	611,612	801,092	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	138,803	156,043	*Transportation*
Pertambangan	1,276,456	1,078,529	*Mining*
	3,346,699	2,174,704	
Jumlah	114,187,218	88,216,197	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,145,131)	(4,459,696)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	109,042,087	83,756,501	*Net*

c. Berdasarkan jangka waktu / *By period*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	7,881,104	9,168,106	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	4,848,282	5,114,278	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	9,738,081	10,001,175	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	88,373,052	61,757,934	*> 5 years*
	110,840,519	86,041,493	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	222,676	19,246	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	-	110,773	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	179,548	369,930	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	2,944,475	1,674,755	*> 5 years*
	3,346,699	2,174,704	
Jumlah	114,187,218	88,216,197	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,145,131)	(4,459,696)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	109,042,087	83,756,501	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *By remaining period to maturity*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	1,984,503	2,780,961	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	3,200,199	4,182,168	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	7,680,873	10,834,266	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	22,934,376	18,601,545	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	75,040,568	49,642,553	*> 5 years*
	110,840,519	86,041,493	

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / ***12. MUSYARAKAH FINANCING*** *(continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo (lanjutan) / ***d. By remaining period to maturity*** *(continued)*

	2024	2023	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
> 1 - ≤ 3 bulan	222,676	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	187,843	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	1,315,118	1,520,665	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1,808,905	466,196	*> 5 years*
	3,346,699	2,174,704	
Jumlah	114,187,218	88,216,197	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,145,131)	(4,459,696)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	109,042,087	83,756,501	*Net*

e. Berdasarkan hubungan / ***e. By relationship***

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	84,697,969	61,278,023	*Rupiah*
Mata uang asing	3,346,699	2,174,704	*Foreign currencies*
	88,044,668	63,452,727	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	26,142,550	24,763,470	*Rupiah*
Jumlah	114,187,218	88,216,197	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5,145,131)	(4,459,696)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	109,042,087	83,756,501	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / ***f. By collectibility***

Kolektibilitas pembiayaan *musyarakah* diungkapkan pada Catatan 54g.

The collectibility of musyarakah financing is disclosed in Note 54g.

g. Informasi penting lainnya / ***g. Other significant information***

1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *musyarakah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

1) Employee loans that used musyarakah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 30 (thirty) years period and paid through monthly salary deductions.

2) Efektif *yield* bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk Rupiah berkisar antara 7,74% sampai dengan 8,20% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan berkisar antara 7,11% sampai dengan 7,94% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan untuk mata uang asing berkisar antara 3,65% sampai dengan 13,63% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan berkisar antara 2,12% sampai dengan 14,17% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

2) Effective profit sharing yield of musyarakah financing for Rupiah ranges from 7.74% to 8.20% per annum for the year ended 31 December 2024 and ranges from 7.11% to 7.94% per annum for the year ended 31 December 2023 and for foreign currencies ranging from 3.65% to 13.63% per annum for the year ended 31 December 2024 and ranges from 2.12% to 14.17% per annum for the year ended 31 December 2023.

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Saldo awal	4,459,696	4,139,565	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	1,069,868	892,055	*Provision during the year (Note 39)*
Penerimaan kembali hapus buku	155,439	138,453	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(552,026)	(705,793)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	12,154	(4,584)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	5,145,131	4,459,696	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah*.

4) Pembiayaan *musyarakah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

5) Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam Catatan 54h.

6) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* diungkapkan dalam Catatan 54i.

7) Penjualan pembiayaan Griya untuk keperluan sekuritisasi Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi ("EBAS - SP").

Pada tanggal 3 April 2023, Bank menandatangani Perjanjian Jual Beli Tagihan Pembiayaan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF"). Bank sepakat untuk menjual pembiayaan Griya dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* ("MMQ") kepada PT SMF yang terdiri dari 1.604 debitur dengan nilai pokok sebesar Rp325.000. Harga jual yang diterima Bank adalah sebesar nilai tercatat pembiayaan. Seluruh pembiayaan yang dijual memiliki kolektibilitas lancar dan rata-rata tingkat imbalan 11,61% dengan rata-rata jangka waktu 10 tahun.

12. *MUSYARAKAH FINANCING* *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

3) The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is adequate to cover potential losses from uncollectible musyarakah financing.

4) Musyarakah financing is collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other collaterals generally acceptable by the Bank.

5) Total restructured musyarakah financing for the year ended 31 December 2024 and 2023 are disclosed in Note 54h.

6) The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") of musyarakah financing are disclosed in Note 54i.

7) The sales of Griya financing for the purposes of securitisation of Sharia Asset Backed Securities - Letter of Participation ("EBAS - SP").

On 3 April 2023, the Bank entered into a Financing Sale and Purchase Agreement with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF"). The Bank agreed to sell its Griya financing under the Musyarakah Mutanaqisah ("MMQ") contract to PT SMF, which consists of 1,604 debtors with a principal value of Rp325,000. The selling price received by the Bank equal to the carrying value of the financing. All financing sold has current collectibility and the average margin rate is 11.61% with an average maturity of 10 years.

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

7) Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada PT SMF. Transaksi ini telah mendapatkan opini Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai dengan surat No. 35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022 tanggal 16 September 2022.

Bank akan bertindak sebagai penyedia jasa pengumpul pembayaran pokok dan bagi hasil dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara periodik hasil penagihan pokok dan bagi hasil kepada PT SMF, dan mengurus keperluan administrasi debitur. Bank berhak mendapatkan imbalan jasa sebesar 5% dari hasil penagihan atas pokok dan bagi hasil. Bank mengakui imbalan jasa penagihan sebagai pendapatan imbalan jasa perbankan pada saat jasa telah diberikan.

Sebagai penyedia jasa, Bank memiliki opsi untuk membeli seluruh sisa pembiayaan MMQ yang belum dibayar nasabah jika saldo tersisa atas pembiayaan MMQ telah berkurang sampai menjadi 10% atau kurang, dari jumlah pembiayaan MMQ pada saat awal penjualan.

12. MUSYARAKAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

7) Subsequent to the sale and transfer of the collection of receivables, credit risks on the pool of financing were transferred from the Bank to PT SMF. This transaction has received the opinion of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Syariah Indonesia Tbk in accordance with letter No. 35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022 dated 16 September 2022.

The Bank will act as a service provider for collecting principal payments and profit sharing from debtors for each billing period, transferring periodically collection of principal and profit sharing to PT SMF and taking care of the debtor's administrative needs. The Bank is entitled to a service fee of 5% from the collection of principal and profit sharing. The bank recognise the servicing fee as fee based income when the service is renderred.

As a service provider, the Bank has the option to purchase the entire remaining MMQ financing that have not been paid by customers if the outstanding balance for MMQ financing has been reduced to 10% or less, of the total MMQ financing at the time of initial sale.

13. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH

Sesuai PSAK 407, akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMBT").

13. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET

Based on SFAS 407 this account represents lease object transactions from Ijarah Muntahiyah Bittamlik ("IMBT").

	2024	2023	
Mesin dan instalasi	1,898,777	1,384,735	*Machinery and installations*
Properti	1,651,516	1,750,572	*Property*
Alat transportasi	1,182,978	30,531	*Transportations*
Lainnya	5,399	8,309	*Others*
Jumlah	4,738,670	3,174,147	*Total*
Akumulasi penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai	(1,616,415)	(984,040)	*Accumulated depreciation, amortisation, and impairment*
Bersih	3,122,255	2,190,107	*Net*

Bank berhak menerima *ujrah* atas *ijarah* dan IMBT. *Ujrah* atas IMBT berdasarkan sisa jangka waktu hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The Bank is entitled to receive ujrah for ijarah and IMBT. Ujrah for IMBT by remaining period to maturity are as follows:

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	12	23	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	96	229	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	22,115	2,629	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	132,921	155,505	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	670,758	459,120	*> 5 years*
	825,902	617,506	

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET

Aset tetap, aset hak guna dan aset tidak berwujud - bersih terdiri dari:

Fixed assets, right-of-use assets and intangible assets - net consist of:

	2024	2023	
Aset tetap - bersih	7,066,275	4,790,002	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - bersih	657,578	562,841	*Right-of-use assets - net*
Aset tidak berwujud - bersih	2,102,344	1,128,334	*Intangible assets - net*
	9,826,197	6,481,177	

Aset tetap / *Fixed assets*

	2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation amount***
Tanah	2,444,841	62	-	116,525	1,750	2,563,178	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	642,280	27,298	(4,492)	-	318,671	983,757	*Buildings*
Instalasi	332,176	58,831	(5,443)	-	59,945	445,509	*Installation*
Kendaraan bermotor	60,245	1,011	(347)	-	-	60,909	*Vehicles*
Inventaris kantor	2,880,160	249,645	(53,694)	-	732,589	3,808,700	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	500,126	27,095	(395)	-	249,802	776,628	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	828,039	2,337,375	-	-	(1,362,757)	1,802,657	*Construction in progress*
	7,687,867	2,701,317	(64,371)	116,525	-	10,441,338	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(175,418)	(37,467)	804	-	-	(212,081)	*Buildings*
Instalasi	(242,850)	(37,263)	5,443	-	-	(274,670)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(53,240)	(3,104)	347	-	-	(55,997)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(2,232,052)	(333,889)	53,530	-	-	(2,512,411)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(148,326)	(123,273)	149	-	-	(271,450)	*Leasehold improvement*
	(2,851,886)	(534,996)	60,273	-	-	(3,326,609)	
Akumulasi penurunan nilai							***Accumulated impairment***
Tanah	(45,979)	(2,475)	-	-	-	(48,454)	*Land*
Nilai buku	4,790,002					7,066,275	***Book value***

	2023						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai revaluasi							***Revaluation amount***
Tanah	2,416,605	909	-	-	27,327	2,444,841	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	857,407	4,096	(241,079)	-	21,856	642,280	*Buildings*
Instalasi	291,951	22,110	(1,108)	-	19,223	332,176	*Installation*
Kendaraan bermotor	74,015	501	(14,271)	-	-	60,245	*Vehicles*
Inventaris kantor	2,789,894	65,728	(55,275)	-	79,813	2,880,160	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	377,351	13,023	-	-	109,752	500,126	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	535,011	550,999	-	-	(257,971)	828,039	*Construction in progress*
	7,342,234	657,366	(311,733)	-	-	7,687,867	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(144,289)	(31,129)	-	-	-	(175,418)	*Buildings*
Instalasi	(220,315)	(23,643)	1,108	-	-	(242,850)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(64,494)	(3,014)	14,268	-	-	(53,240)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(2,051,487)	(235,818)	55,253	-	-	(2,232,052)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(59,949)	(88,377)	-	-	-	(148,326)	*Leasehold improvement*
	(2,540,534)	(381,981)	70,629	-	-	(2,851,886)	
Akumulasi penurunan nilai							***Accumulated impairment***
Tanah	(45,979)	-	-	-	-	(45,979)	*Land*
Nilai buku	4,755,721					4,790,002	***Book value***

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Construction in progress as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Bangunan	355,621	564,067	*Buildings*
Inventaris kantor	1,447,036	263,972	*Office equipment*
	1,802,657	828,039	

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berkisar antara 12,00% - 96,43% dan 31 Desember 2023 adalah berkisar antara 5,00% - 95,00%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2025 sampai dengan 2026.

Jumlah beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp534.996 dan Rp381.981 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 38).

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, kecurian, dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Tripakarta Unit Syariah dan PT Zurich General Takaful Indonesia, keseluruhannya adalah pihak ketiga, PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah dan PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah, keseluruhannya adalah pihak berelasi, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp7.619.835 dan Rp6.137.294 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap yang diasuransikan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp2.543.082 dan Rp2.343.147.

Selain tanah, tidak terdapat perbedaan material antara nilai wajar aset dan nilai tercatatnya.

Nilai tanah Bank berdasarkan model biaya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.872.145 dan Rp1.870.333.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikator penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

***14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET** (continued)*

***Fixed assets** (continued)*

The estimated percentage of completion of construction in progress as at 31 December 2024 is between 12.00% - 96.43% and 31 December 2023 is between 5.00% - 95.00%. Those construction in progress as at 31 December 2024 are estimated to be completed in 2025 until 2026.

Total depreciation expenses of fixed assets charged in the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp534,996 and Rp381,981 for the year ended 31 December 2024 and 2023, respectively (Note 38).

The Bank has insured the fixed assets (except land rights) to cover for losses against fire, theft and other risks to PT Asuransi Tripakarta Sharia Unit and PT Zurich General Takaful Indonesia, all of which are third parties, PT Asuransi Staco Mandiri Sharia Unit and PT BRI Asuransi Indonesia Sharia Unit, all of which are related parties, with total insurance coverage amounting to Rp7,619,835 and Rp6,137,294 as at 31 December 2024 and 2023, respectively.

The Bank's management believes the amount is adequate to cover losses which may arise from the insured fixed assets.

As at 31 December 2024 and 2023, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp2,543,082 and Rp2,343,147 respectively.

Other than land, there is no material difference between the fair value of the asset and its carrying value.

The Bank's land value based on the cost model as at 31 December 2024 and 2023 is Rp1,872,145 and Rp1,870,333.

Management believes that there are no indicators of impairment of fixed assets as at 31 December 2024 and 2023.

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

Bangun, Guna dan Serah

Pada tanggal 28 April 2023, Bank dan PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan Bangun, Guna dan Serah ("BOT") atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta. Bank memberikan hak eksklusif kepada PT PP untuk memanfaatkan lahan, melakukan pembongkaran gedung eksisting dan melakukan pembangunan gedung baru. Bank berkomitmen untuk menyewa gedung baru selama 30 tahun dan pada akhir masa sewa, PT PP akan menyerahkan penguasaan lahan dan hak pengelolaan gedung kepada Bank.

Berdasarkan perjanjian BOT, Bank berhak menerima kompensasi atas penghancuran gedung lama dari PT PP sebesar Rp241.080 yang akan dibayarkan secara bertahap oleh PT PP selama 5 tahun. Kompensasi ini mengikat PT PP, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dikembalikan dalam keadaan apapun termasuk apabila Bank mengakhiri kontrak secara sepihak. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian, manajemen membuat pertimbangan signifikan bahwa kompensasi dianggap sebagai transaksi terpisah dengan perjanjian sewa gedung baru meskipun kedua unsur tersebut berada dalam satu kontrak yang sama, antara pihak yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Bank mengakui kompensasi yang diterima sebagai pendapatan lain-lain bersamaan dengan pengakuan kerugian atas pembongkaran gedung lama sebesar Rp241.080 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Bank telah menerima pembayaran sebesar Rp96.432 (2023: Rp48.216) dan sisanya dicatat sebagai piutang dari PT PP pada aset lain-lain sebesar Rp144.648 (2023: Rp192.864).

Revaluasi aset tetap

Penilaian kembali atas aset tetap dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) jenis dan hak yang melekat pada properti;
b) kondisi pasar;
c) lokasi;
d) karakteristik fisik; dan
e) karakteristik tanah.

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset nonkeuangan:

- Level 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik;
- Level 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

***14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET** (continued)*

Build, Operate and Transfer

On 28 April 2023, the Bank and PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") entered into an agreement in connection with the Build, Operate and Transfer ("BOT") of land and building located at Medan Merdeka Selatan Street No. 17 Jakarta. The Bank granted exclusive rights to PT PP to utilize the land, to demolish the existing building and construct a new building. The Bank commits to rent the building for 30 years and at the end of the lease period, PT PP will hand over the ownership rights of the land and the building to the Bank.

In accordance with the BOT agreement, the Bank is eligible to receive compensation for the demolition of the old building from PT PP amounting to Rp241,080 which will be paid in stages by PT PP over 5 years. This compensation is binding to PT PP, non-cancellable and non-refundable under any circumstances including if the Bank terminates the contract unilaterally. Considering the terms in the agreement, the management makes significant judgment that the compensation is accounted for as a separate transaction to the rental agreement of the new building even though the two elements are in the same contract, between the same parties and at the same time. The Bank recognised the compensation received as other income corresponding with the recognition of loss from demolition of old building amounting to Rp241,080 for the year ended 31 December 2023.

As at 31 December 2024, the Bank had received payment of Rp96,432 (2023: Rp48,216) and recorded the remaining as receivables from PT PP amounting in other assets to Rp144,648 (2023: Rp192,864).

Revaluation of fixed assets

The revaluation of fixed assets are performed based on Indonesian Valuation Standards. The valuation methods used are market data approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are among others are as follows:

a) type and right on property;
b) market condition;
c) location;
d) physical characteristic; and
e) land characteristic.

Fair value was determined by hierarchy and input used on technical valuation of non-financial assets:

- *Level 1: Input quoted (unadjusted) prices in active market for identical assets;*
- *Level 2: Input other than quoted market price in level 1 that are observable either directly or indirectly; and*
- *Level 3: Input that are not observable.*

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

Revaluasi aset tetap (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar tanah dikategorikan sebagai nilai wajar level 2 berdasarkan input dari teknik penilaian yang digunakan.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Berdasarkan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan persetujuan OJK melalui surat No. S-159/PB.31/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penambahan penyertaan modal melalui *inbreng* Aset Tetap Tidak Bergerak ("ATTB") milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp152.997 yang terdiri dari tanah senilai Rp127.750 dan bangunan senilai Rp25.247 (tidak termasuk pajak). Revaluasi atas ATTB dengan nilai pasar sebesar Rp152.997 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Rizki Djunaedy & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, berdasarkan laporannya tertanggal 2 Maret 2020. Penambahan ATTB selama tahun 2020 sejumlah Rp175.876 terdiri dari tanah senilai Rp144.527 (termasuk pajak sejumlah Rp16.777) dan bangunan senilai Rp31.349 (termasuk pajak senilai Rp6.102) yang berasal dari *inbreng* ATTB terkait penambahan modal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BRIS melakukan penyesuaian kebijakan revaluasi aset tetap sesuai ketentuan dengan BSI atas pencatatan tanah dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi menggunakan model revaluasi. Secara total pada tahun 2021, kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp80.276 dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.892. Penilaian atas tanah dilakukan oleh independen eksternal yaitu KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BNIS melakukan penyesuaian kebijakan dengan BSI atas pencatatan bangunan dari sebelumnya menggunakan model revaluasi menjadi menggunakan model biaya. Atas hal ini, Bank melakukan pembalikan atas penilaian kembali bangunan yang sebelumnya sudah dicatat di "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp9.361.

***14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET** (continued)*

***Revaluation of fixed assets** (continued)*

The fair value measurement for the land is categorised as level 2 fair value based on the inputs of the valuation technique used.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Based on the letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 dated 26 August 2020 and approval OJK by the letter No. S-159/PB.31/2020 dated 9 October 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has obtain additional share by inbreng Non-movable Fixed Assets ("ATTB") of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank Syariah Mandiri amounting Rp152,997 which consists of land amounting Rp127,750 and buildings amounting Rp25,247 (exclude tax). Revaluation of ATTB with market value amounting Rp152,997 was performed by Public Appraisal Service Office ("KJPP") Rizki Djunaedy & Partners, external independent appraisal registered in OJK, based on their report dated 2 March 2020. Addition of ATTB in 2020 amounting to Rp175,876 consists of land amounting to Rp144,527 (include tax amounting Rp16,777) and building amounting to Rp31,349 (include tax amounting to Rp6,102) from inbreng ATTB related to additional capital from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS")

On 31 January 2021, the ex-legacy BRIS made a policy adjustment of asset revaluation to be in line with BSI's policy for recording of land from cost model to revaluation model. In total in 2021, the increases in the carrying amount of land revaluation are recorded as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp80,276 and the decrease of carrying amount from revaluation is recorded as expenses in 2021 amounting to Rp12,892. The valuations of land was performed by KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan, an external independent appraisal.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

On 31 January 2021, ex-legacy BNIS made a policy adjustment to be in line with BSI's policy for recording of building from revaluation model to cost model. In this regard, the Bank reversed the revaluation of the building which had previously been recorded in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp9,361.

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET *(continued)*

Revaluasi atas tanah - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Revaluasi atas tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp67.617, dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, dalam laporannya tertanggal 25 November 2021. Selisih lebih nilai revaluasi tanah tahun 2021 sebesar Rp113.596 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan pada pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah sebesar Rp45.979 diakui dalam laba rugi tahun 2021 sebagai beban usaha lainnya.

Revaluation on land - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Revaluation on land with carrying amount on revaluation amounting to Rp67,617, performed by KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, an external independent appraisal registered on OJK, on their report dated 25 November 2021. Difference on land revaluation in 2021 amounting to Rp113,596 was recorded as "Surplus on Revaluation of Fixed Asset" and expressed on other comprehensive income. Impairment of carrying value from revaluation on land amounting to Rp45,979 was recognised in the profit or loss of the year 2021 as other operating expense.

Revaluasi atas tanah pada tahun 2024

Revaluasi atas tanah pada 31 Desember 2024 dilakukan oleh KJPP Dino Farid & Rekan serta KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun ("MBPRU") & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, dalam laporannya tertanggal 30 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024. Selisih lebih nilai revaluasi tanah tahun 2024 sebesar Rp116.525 dan pembalikan penurunan nilai dari periode sebelumnya sebesar Rp7.615 dicatat sebagai "Keuntungan Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan pada pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah sebesar Rp2.475 diakui dalam laba rugi tahun 2024 sebagai beban usaha lainnya.

Revaluation on land in 2024

Revaluation on land as at 31 December 2024 was performed by KJPP Dino Farid & Rekan and KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun ("MBPRU") & Rekan, external independent appraisals registered on OJK, on their report dated 30 July 2024 and 1 August 2024. Difference on land revaluation in 2024 amounting to Rp116,525 and reversal of impairment from prior period amounting to Rp7,615 were recorded as "Gain on Revaluation of Fixed Assets" and presented in other comprehensive income. Impairment of carrying value from revaluation on land amounting to Rp2,475 was recognised in the profit or loss of the year 2024 as other operating expense.

Perubahan cadangan revaluasi aset bersih setelah pajak adalah sebagai berikut:

The movements in the asset revaluation reserve net of tax are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	444,530	444,530	*Beginning year balance*
Kenaikan nilai tanah	108,910	-	*Gain on land value*
Saldo akhir tahun	553,440	444,530	*Ending year balance*

Aset hak guna / ***Right-of-use assets***

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan kantor	1,205,107	438,502	(289,324)	1,354,285	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	132,876	-	(114,427)	18,449	*Vehicles and technology system*
	1,337,983	438,502	(403,751)	1,372,734	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	(665,026)	(321,004)	289,324	(696,706)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	(110,116)	(22,761)	114,427	(18,450)	*Vehicles and technology system*
	(775,142)	(343,765)	403,751	(715,156)	
Nilai buku	562,841			657,578	***Book value***

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

Aset hak guna (lanjutan)

***Right-of-use assets** (continued)*

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan kantor	1,140,654	256,257	(191,804)	1,205,107	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	132,876	-	-	132,876	*Vehicles and technology system*
	1,273,530	256,257	(191,804)	1,337,983	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	(564,957)	(291,873)	191,804	(665,026)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	(68,284)	(41,832)	-	(110,116)	*Vehicles and technology system*
	(633,241)	(333,705)	191,804	(775,142)	
Nilai buku	640,289			562,841	***Book value***

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk semua sewa dengan kontrak jangka waktu tertentu, dibayar bulanan atau periodik. Terdapat pengecualian untuk sewa dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 12 bulan serta tidak ada opsi beli dan opsi perpanjangan, dan memiliki aset pendasar bernilai rendah, yaitu lebih kecil atau sama dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) dalam nilai penuh.

The Bank recognises the right-of-use assets and lease liabilities for all leases with time contracts, payable monthly or periodically. There are exceptions to the lease with a short term, which is less or equal to 12 months and there is no call option and extention option, and has a low value underlying asset, which is less than or equal to Rp70,000,000 (seventy million Rupiah) in full amount.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

Statements of profit or loss and other comprehensive income shows the following amounts related to lease:

	2024	2023	
Beban penyusutan aset hak guna (Catatan 38):			*Depreciation expense of right of use assets (Note 38):*
Bangunan kantor	321,004	295,562	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	22,761	38,143	*Vehicle and technology system*
	343,765	333,705	
Beban sewa (Catatan 38):			*Rent expenses (Note 38):*
Beban bunga:			*Interest expenses:*
Bangunan kantor	15,574	6,752	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	349	2,445	*Vehicle and technology system*
	15,923	9,197	
Beban berkaitan dengan sewa jangka pendek (kurang dari atau sama dengan 12 bulan)	354,593	272,262	*Expenses related to short term leases (less than or equal to 12 months)*
Beban berkaitan dengan sewa atas aset yang bernilai rendah yang bukan sewa jangka pendek	22,556	28,796	*Expenses related to leases of low value assets that are not short term leases*
	393,072	310,255	
Jumlah	736,837	643,960	*Total*

Aset tidak berwujud

Intangible assets

	2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Perangkat lunak	1,279,219	84,176	301,828	1,665,223	*Software*
Aset dalam penyelesaian	462,420	1,060,791	(301,828)	1,221,383	*Construction in progress*
	1,741,639	1,144,967	-	2,886,606	
Akumulasi amortisasi					***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	(613,305)	(170,957)	-	(784,262)	*Software*
Nilai buku	1,128,334			2,102,344	***Book value***

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

Aset tidak berwujud (lanjutan)

***Intangible assets** (continued)*

	2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Perangkat lunak	750,007	276,241	252,971	1,279,219	*Software*
Aset dalam penyelesaian	-	715,391	(252,971)	462,420	*Construction in progress*
	750,007	991,632	-	1,741,639	
Akumulasi amortisasi					***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	(491,319)	(121,986)	-	(613,305)	*Software*
Nilai buku	258,688			1,128,334	***Book value***

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah berkisar antara 4,19% - 98,24% dan 10,71% - 95,00%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2025 sampai dengan 2026.

The estimated percentage of completion of construction in progress as at 31 December 2024 and 2023 is between 4.19% - 98.24% and 10.71% - 95.00%. Those assets in progress as at 31 December 2024 are estimated to be completed in 2025 until 2026.

Jumlah beban amortisasi aset tidak berwujud yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp170.957 dan Rp121.986 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Catatan 38).

Total amortisation expenses of intangible assets charged in the statements of profit or loss and other comprehensive income is amounting to Rp170,957 and Rp121,986 as at 31 December 2024 and 2023, respectively (Note 38).

15. ASET LAIN-LAIN - BERSIH

15. OTHER ASSETS - NET

Aset lain-lain terdiri dari:

Other assets consist of:

	2024	2023	
Beban dibayar dimuka	1,975,414	1,194,999	*Prepaid expense*
Piutang pendapatan surat berharga	979,776	889,375	*Income receivables from securities*
Agunan yang diambil alih	711,370	825,759	*Foreclosed collaterals*
Tagihan SKBDN kepada nasabah	362,851	272,925	*SKBDN receivables to customers*
Pendapatan pembiayaan yang akan diterima	290,984	202,588	*Income receivables from financing*
Tagihan ATM	198,877	317,824	*ATM receivables*
Tagihan kepada pihak ketiga	144,648	192,864	*Receivables from third party*
Persediaan alat tulis kantor dan materai	71,420	75,659	*Office supplies and stamps*
Setoran jaminan	53,064	46,959	*Guarantee deposit*
Lainnya	398,854	315,996	*Others*
	5,187,258	4,334,948	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(959,155)	(1,081,560)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	4,228,103	3,253,388	*Net*

Lainnya antara lain properti terbengkalai, biaya yang ditangguhkan, serta berbagai macam tagihan, antara lain tagihan Bank Indonesia *Fast Payment* ("BI *Fast*"), tagihan atas transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* ("QRIS"), tagihan Kartu Hasanah, transaksi kliring, dan lebih bayar pajak penghasilan pasal 21.

Others are abandoned property, deferred fees, as well as various bills, such as Bank Indonesia Fast Payment ("BI Fast") bills, bills for Quick Response Code Indonesian Standard ("QRIS") transactions, Hasanah Card bills, clearing transactions and overpayment of income tax art 21.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

Mutasi agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan pada Catatan 54j.

Movement of the foreclosed collaterals as at of 31 December 2024 and 2023 are disclosed in Note 54j.

16. LIABILITAS SEGERA / *16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Zakat Bank	232,061	189,730	*Zakat of the Bank*
Liabilitas ATM Jalin	130,950	294,323	*Liabilities to ATM Jalin*
Liabilitas pihak ketiga	157,013	117,002	*Liabilities to third parties*
Titipan dana nasabah	57,800	25,224	*Deposit of customer funds*
Titipan tagihan pembayaran	42,310	54,573	*Remittance of bills payment*
Liabilitas ATM Bersama	30,809	34,535	*Liabilities to ATM Bersama*
Liabilitas ATM Prima	24,587	82,680	*Liabilities to ATM Prima*
Zakat pegawai, nasabah dan umum	3,621	7,044	*Zakat of employees, customers and public*
Titipan ATM	3,544	36,117	*ATM remittance*
Titipan lainnya	174,286	303,619	*Other remittances*
	856,981	1,144,847	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Titipan ATM	1,662	171,220	*ATM remittance*
	858,643	1,316,067	

Liabilitas pihak ketiga merupakan liabilitas atas transaksi QRIS, liabilitas *BI Fast,* jasa pembayaran, dan kewajiban dalam rangka sekuritisasi.

Liabilities to third parties represent liabilities arising from QRIS transactions, liabilities to BI Fast, payment services, and liabilities related to securitisation.

Liabilitas ATM Jalin, ATM Prima dan ATM Bersama, merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan ATM Bank oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Jalin, jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Liabilities to ATM Jalin, ATM Prima and ATM Bersama represent liabilities arising from using the Bank's network of ATM by customers of using ATM Jalin network, ATM Prima and ATM Bersama.

Titipan lainnya merupakan titipan *direct* terhadap mitra Bank, titipan bagi hasil deposito jatuh tempo dan lainnya.

Other remittances are direct remittances to the Bank's partners, remittances of time deposits profit sharing and others.

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui *platform E-Channel* Bank dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.

Zakat of employees, customers and publics are zakat paid individually through the Bank's E-Channel platform and will be distributed to zakat management institutions.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah *(shahibul maal)* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah.*

This account represents the undistributed share of the customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Bank's undistributed profit sharing as at 31 December 2024 and 2023, are as follows:

	2024	2023	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	222,038	191,504	*Time deposits*
Giro	41,388	43,929	*Demand deposits*
Sukuk *mudharabah* berkelanjutan	8,384	-	*Sustainability sukuk mudharabah*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,317	658	*Subordinated sukuk mudharabah*
	273,127	236,091	

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN (lanjutan)

17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING (continued)

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The Bank's undistributed profit sharing as at 31 December 2024 and 2023, are as follows: (continued)

	2024	2023	
Bukan Bank (lanjutan)			***Non-Bank** (continued)*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Deposito	9,236	2,820	*Time deposits*
Giro	2	-	*Demand deposits*
	9,238	2,820	
	282,365	238,911	
Bank Indonesia			***Bank Indonesia***
Rupiah			***Rupiah***
PaSBI	6,395	16,319	*PaSBI*
Bank			***Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	79	146	*Time deposits*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	2,739	556	*Mudharabah term financing*
	2,818	702	
	291,578	255,932	

18. GIRO *WADIAH*

18. WADIAH DEMAND DEPOSITS

Giro *wadiah* terdiri dari:

Wadiah demand deposits consist of:

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	15,113,900	16,475,273	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,064,416	1,261,650	*United States Dollar*
Euro Eropa	17,505	15,081	*European Euro*
Dolar Singapura	27,126	14,248	*Singapore Dollar*
Riyal Arab Saudi	37,287	257,413	*Saudi Arabian Riyal*
	16,260,234	18,023,665	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	2,847,492	2,818,082	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	12,213	5,777	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	27,140	-	*Saudi Arabian Riyal*
	2,886,845	2,823,859	
	19,147,079	20,847,524	

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which the third parties funds are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	0.02% - 0.04%	0.02% - 0.03%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00%	0.00%	*Foreign currencies*

19. TABUNGAN *WADIAH* / *19. WADIAH SAVINGS DEPOSITS*

Tabungan *wadiah* terdiri dari: / *Wadiah savings deposits consist of:*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	54,045,084	45,708,696	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,221,082	1,307,515	*United States Dollar*
	55,266,166	47,016,211	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	11,364	9,350	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	2,537	813	*United States Dollar*
	13,901	10,163	
	55,280,067	47,026,374	

Kisaran bonus tabungan *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut: / *The range rate of bonus from wadiah savings deposits given by customers are as follows:*

	2024	2023	
Rupiah	0.00%	0.00%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.00%	0.00%	*United States Dollar*

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")	2,240,000	1,505,000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	600,834	-	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Giro *wadiah*	174,143	125,292	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	8,985	7,788	*Wadiah savings deposits*
	3,023,962	1,638,080	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro *wadiah*	736	45	*Wadiah demand deposits*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")	1,126,650	123,176	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
	1,127,386	123,221	
	4,151,348	1,761,301	

b. Berdasarkan hubungan / *b. By relationship*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")	2,240,000	1,355,000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	400,000	-	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Giro *wadiah*	172,774	123,939	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	8,985	7,788	*Wadiah savings deposits*
	2,821,759	1,486,727	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro *wadiah*	736	45	*Wadiah demand deposits*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")	241,425	46,191	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
	242,161	46,236	
	3,063,920	1,532,963	

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / *DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)*

b. Berdasarkan hubungan (lanjutan) / *By relationship (continued)*

	2024	2023	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")	-	150,000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Giro *wadiah*	1,369	1,353	*Wadiah demand deposits*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	200,834	-	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
	202,203	151,353	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")	885,225	76,985	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
	4,151,348	1,761,301	

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	0.70% - 0.73%	0.72% - 0.73%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00%	0.00%	*Foreign currencies*

21. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA / *LIABILITIES TO BANK INDONESIA*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	18,417,864	11,900,055	*Rupiah*

Liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berisi instrumen Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia ("PaSBI") yang merupakan fasilitas penyediaan dana dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas Bank dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah dengan nilai nominal agunan masing-masing sebesar Rp19.800.000 dan Rp12.500.000.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank mendapatkan fasilitas PaSBI sebesar Rp18.417.864 dengan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Bank sebesar 6,25% per tahun dan Rp11.900.055 dengan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Bank sebesar 6,25% dan 6,85% per tahun. PaSBI 31 Desember 2024 jatuh tempo pada tanggal 6 Januari 2025 serta PaSBI 31 Desember 2023 jatuh tempo pada tanggal 4 dan 5 Januari 2024.

Liabilities to Bank Indonesia as at 31 December 2024 and 2023 containing Liquidity Management based on Bank Indonesia Sharia Principles ("PaSBI") instrument, which is a funding facility from Bank Indonesia for managing the Bank's liquidity with collateral in the form of securities that comply with sharia principles with collateral nominal value amounting to Rp19,800,000 and Rp12,500,000, respectively.

As at 31 December 2024 and 2023, the Bank obtained PaSBI facilities amounting to Rp18,417,864 with a percentage profit sharing paid by the Bank of 6.25% per annum and Rp11,900,055 with a percentage profit sharing paid by the Bank of 6.25% and 6.85% per annum. PaSBI 31 December 2024 matures on 6 January 2025 and PaSBI 31 December 2023 matures on 4 and 5 January 2024.

22. PERPAJAKAN / *TAXATION*

a. Utang pajak / *Taxes payable*

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

The details of taxes payable are as follows:

	2024	2023	
Utang pajak penghasilan			*Income tax payables*
Pasal 29	674,835	224,467	*Article 29*
Utang pajak lainnya			*Other tax payables*
Pasal 4 (2)	101,799	83,157	*Article 4 (2)*
Pasal 21	2,342	173,449	*Article 21*
Pasal 22	7,252	1,466	*Article 22*
Pasal 23	11,605	7,141	*Article 23*
Pasal 26	7,091	683	*Article 26*
PPN dan PPh lainnya	84,718	48,679	*VAT and other income taxes*
	214,807	314,575	
	889,642	539,042	

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***22. TAXATION** (continued)*

b. Beban pajak / ***b. Tax expense***

	2024	2023	
Beban pajak kini	2,436,340	1,678,581	*Current tax expense*
(Manfaat)/beban pajak tangguhan	(391,833)	17,148	*Deferred tax (benefit)/expense*
	2,044,507	1,695,729	

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan perhitungan penghasilan pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as stated in the statements of profit or loss and other comprehensive income and income tax calculation are as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	9,050,395	7,399,472	*Income before tax*
Beda temporer			*Temporary differences*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	2,105,668	223,334	*Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	(46,041)	(15,450)	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	(7,972)	3,144	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	(18,284)	(31,597)	*Provision for impairment losses on operational risk*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	3,595	(56,935)	*Provision for employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	(124,036)	(40,502)	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	24,090	8,988	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Lain-lain	(155,958)	(96,862)	*Others*
Jumlah beda temporer	1,781,062	(5,880)	*Total temporary differences*
Beda tetap			*Permanent differences*
Representasi dan sumbangan	80,176	60,517	*Representation and donation*
Keanggotaan nonasosiasi	2,724	934	*Non-association membership*
Penurunan nilai aset tetap	2,475	-	*Fixed assets impairment*
Biaya lainnya	157,443	174,871	*Others*
Total beda tetap	242,818	236,322	*Total permanent differences*
Total koreksi fiskal	2,023,880	230,442	*Total fiscal corrections*
Penghasilan kena pajak	11,074,275	7,629,914	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan badan	2,436,340	1,678,581	*Corporate income tax expense*
Pajak dibayar dimuka - pasal 25	(1,760,822)	(1,453,654)	*Prepaid tax - article 25*
Pajak yang dipotong pihak lain - pasal 22	(683)	(460)	*Tax withheld by other parties - article 22*
Utang pajak penghasilan - pasal 29	674,835	224,467	***Income tax payable - article 29***

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income tax expense by multiplying income before income tax to the applicable tax rate are as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	9,050,395	7,399,472	*Income before tax*
Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan	1,991,087	1,627,884	*Income tax expense calculated from income before tax*
Pengaruh pajak atas beda tetap	53,420	67,845	*Tax impact of permanent differences*
Beban pajak	2,044,507	1,695,729	*Tax expense*

22. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***22. TAXATION*** *(continued)*

c. Aset pajak tangguhan / ***c. Deferred tax assets***

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to statements of profit or loss***	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/*(Charged)/ credited to OCI***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	1,055,833	463,247	-	1,519,080	*Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	213,255	(10,129)	-	203,126	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	7,044	(1,754)	-	5,290	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	13,549	(4,024)	-	9,525	*Provision for impairment losses on operational risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	146,797	791	(29,948)	117,640	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	184,589	(27,288)	-	157,301	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	67,150	5,300	-	72,450	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap	(26,357)	(29,332)	-	(55,689)	*Depreciation of fixed assets*
Aset hak guna	31,682	(71,966)	-	(40,284)	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	(27,102)	66,988	-	39,886	*Lease liabilities*
Lainnya	(746)	-	29,148	28,402	*Others*
	1,665,694	391,833	(800)	2,056,727	

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ *(Charged)/ credited to statements of profit or loss***	**Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/*Credited/ (charged) to OCI***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	1,006,700	49,133	-	1,055,833	*Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	216,654	(3,399)	-	213,255	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	6,352	692	-	7,044	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	20,500	(6,951)	-	13,549	*Provision for impairment losses on operational risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	151,584	(12,526)	7,739	146,797	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	193,499	(8,910)	-	184,589	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	65,173	1,977	-	67,150	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap	(11,748)	(14,609)	-	(26,357)	*Depreciation of fixed assets*
Aset hak guna	27,135	4,547	-	31,682	*Right-of-use assets*
Liabilitas sewa	-	(27,102)	-	(27,102)	*Lease liabilities*
Lainnya	(746)	-	-	(746)	*Others*
	1,675,103	(17,148)	7,739	1,665,694	

Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Management believes that it is most likely that future taxable income will be available against the temporary differences which create deferred tax assets.

d. Surat ketetapan pajak / ***d. Tax assessment letters***

Pemeriksaan tahun pajak 2020 - BSI (*ex-legacy* BRIS)

Pada bulan April 2024, Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas Tahun Pajak 2020 untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (*ex-legacy* BRIS). Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses pemeriksaan pajak masih berlanjut.

Assessment for fiscal year 2020 - BSI (ex-legacy BRIS)

In April 2024, the Bank received an Inspection Order for the Fiscal Year 2020 addressed to PT Bank Syariah Indonesia Tbk (ex-legacy BRIS). Until the date of this financial statements, the tax audit is still in progress.

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Informasi lain

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ("PMK") No. 74 Tahun 2024

Pada tanggal 18 Oktober 2024, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ("PMK") No. 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan ini menggantikan PMK No. 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 219/PMK.011/2012. Perubahan ini berdampak pada penambahan nilai aset pajak tangguhan dan penambahan hutang pajak badan Bank untuk Tahun Pajak 2024.

Dampak Penerapan Pilar 2 *Organization for Economic Co-operation and Development* ("OECD")

Bank berada dalam cakupan ketentuan model Pilar Dua OECD sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 136 Tahun 2024, yurisdiksi tempat Bank didirikan, dan mulai berlaku mulai 1 Januari 2025. Oleh karena peraturan tersebut tidak berlaku pada tanggal pelaporan, Bank ini tidak memiliki eksposur pajak terkini terkait. Bank menerapkan pengecualian PSAK 212 untuk mengakui dan mengungkapkan informasi tentang aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua.

Dikarenakan kompleksitas dalam penerapan peraturan PMK No. 136 Tahun 2024 dan perhitungan pendapatan GloBE, dampak kuantitatif dari peraturan yang secara substantif diberlakukan tapi belum efektif tersebut belum dapat diestimasi dengan wajar. Oleh karena itu, meskipun terdapat entitas dengan tarif pajak efektif akuntansi di atas 15%, mungkin masih ada implikasi pajak Pilar Dua. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024, Bank masih menilai dampak dalam penerapan peraturan tersebut.

***22. TAXATION** (continued)*

e. Other information

Implementation of the Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 74 Year 2024

On 18 October 2024, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Minister of Finance Regulation ("PMK") No. 74 Year 2024 concerning the Establishment of Provisions for Uncollectible Receivables that can be Deducted from Gross Income. This regulation replaces PMK No. 81/PMK.03/2009 regarding the Formation or Accumulation of Reserve Funds That Can Be Deducted as Expenses, as amended by PMK No. 219/PMK.011/2012. This change impacts the increase in deferred tax assets and the addition of the Bank's corporate tax liabilities for the Fiscal Year 2024.

The impact of Pillar 2 of Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD")

The Bank is within the scope of the OECD Pillar Two model rules in accordance with the PMK No. 136 Year 2024, the jurisdiction in which the Bank is incorporated, and has come into effect from 1 January 2025. Since the regulation was not effective at the reporting date, the Bank has no related current tax exposure. The Bank applies the SFAS 212 exception to recognising and disclosing information about deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes.

Due to the complexities in applying the PMK No. 136 Year 2024 and calculation GloBE income, the quantitative impact of the substantively enacted but not yet effective regulation has not been reasonably estimable. Therefore, even for those entities with an accounting effective tax rate above 15%, there might still be Pillar Two tax implications. For the year ended 31 December 2024, the Bank is still assessing the impact of implementation of the regulation.

23. LIABILITAS LAIN-LAIN / *23. OTHER LIABILITIES*

	2024	2023	
Pendapatan diterima dimuka	3,722,200	204,383	*Deferred income*
Cadangan bonus dan tantiem	870,500	970,236	*Provision of bonus and tantiem*
Biaya notaris	339,583	284,286	*Notary fees*
Beban yang masih harus dibayar	232,316	288,492	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	181,296	123,193	*Lease liabilities*
Cadangan THR dan kepegawaian lainnya	173,854	174,053	*Provision of THR and other employee expenses*
Setoran jaminan	18,141	19,818	*Guarantee deposits*
Dana kebajikan	4,876	9,907	*Qardhul hasan funds*
Pendapatan administrasi pembiayaan ditangguhkan	3,537	12,757	*Deferred financing administration income*
Lainnya	321,527	358,982	*Others*
	5,867,830	2,446,107	

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari *ujrah* diterima dimuka atas transaksi *bancassurance* (lihat Catatan 48)*, supply chain financing, buyer chain financing, ijarah* atas aset, dan *ijarah* multijasa.

Deferred income consists of ujrah received in advance for bancassurance (see Note 48), supply chain financing transactions, buyer chain financing, ijarah on assets, and multi-services ijarah.

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Accrued expenses consist of reserves on network, ATM maintenance fees and OJK's contribution.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta *infaq* dan *shadaqah* yang berasal dari *E-Channel*. *Infaq* dan *shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Qardhul hasan funds consists of social funds originating from fines/penalties, transactions that are not in accordance with sharia principles and infaq and shadaqah originating from E-Channel. Infaq and shadaqah are assets that are given voluntarily by the owners, whether the use is limited (determined) or not.

Lainnya terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga, rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

Others consist of escrow account for financing installment, liabilities to third parties, administrative accounts, clearance intermediaries and others.

24. GIRO *MUDHARABAH* / *24. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS*

	2024	2023	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	14,048,692	11,204,495	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3,309,434	3,412,905	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	16,504	154,655	*Saudi Arabian Riyal*
	17,374,630	14,772,055	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	10,444,013	8,336,606	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	9,369,876	9,245,205	*United States Dollar*
	19,813,889	17,581,811	
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	47,282	63,394	*Rupiah*
	37,235,801	32,417,260	

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Mudharabah demand deposits is a current accounts product in which investor's fund can be withdrawn by check, bank guarantee and other payment instruction method.

24. GIRO *MUDHARABAH* (lanjutan) / *MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS (continued)*

Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah demand deposits per annum are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	2.28% - 3.37%	3.15% - 3.97%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.18% - 5.25%	0.13% - 5.64%	*United States Dollar*

25. TABUNGAN *MUDHARABAH* / *MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

	2024	2023	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	84,255,566	76,907,691	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	622,815	600,712	*United States Dollar*
	84,878,381	77,508,403	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	374,864	191,590	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	904	77	*United States Dollar*
	375,768	191,667	
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	536,509	580,115	*Rupiah*
	85,790,658	78,280,185	

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah savings deposits per annum are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	0.51% - 0.70%	0.66% - 0.69%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.22% - 0.23%	0.23%	*United States Dollar*

26. DEPOSITO *MUDHARABAH* / *MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan mata uang / *By currency*

	2024	2023	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	86,394,238	85,358,012	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	6,066,433	2,134,032	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	1,212	-	*Saudi Arabian Riyal*
	92,461,883	87,492,044	
Pihak berelasi (Catatan 44)			***Related parties (Note 44)***
Rupiah	36,862,143	27,472,220	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,260,326	883,832	*United States Dollar*
	38,122,469	28,356,052	
Bank			***Bank***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	94,515	136,693	*Rupiah*
	130,678,867	115,984,789	

26. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan) / ***26. MUDHARABAH TIME DEPOSITS*** *(continued)*

b. Berdasarkan jangka waktu / ***b. By period***

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	64,708,025	62,075,237	*1 month*
3 bulan	32,460,138	29,391,659	*3 months*
6 bulan	19,050,780	10,338,216	*6 months*
12 bulan	7,131,953	11,161,813	*12 months*
	123,350,896	112,966,925	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
1 bulan	6,099,471	1,736,093	*1 month*
3 bulan	675,420	647,482	*3 months*
6 bulan	143,673	102,252	*6 months*
12 bulan	408,195	532,037	*12 months*
	7,326,759	3,017,864	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
1 bulan	1,212	-	*1 month*
	130,678,867	115,984,789	

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***c. By remaining period to maturity***

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	72,806,931	70,387,004	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	30,168,394	25,851,195	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	20,375,571	16,728,726	*> 3 - ≤ 12 months*
	123,350,896	112,966,925	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan	6,446,277	2,254,257	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	466,066	265,355	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	414,416	498,252	*> 3 - ≤ 12 months*
	7,326,759	3,017,864	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
≤ 1 bulan	1,212	-	*≤ 1 month*
	130,678,867	115,984,789	

d. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp1.575.029 dan Rp1.369.418, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

d. Mudharabah time deposits that are used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp1,575,029 and Rp1,369,418, as at 31 December 2024 and 2023, respectively.

e. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

e. *Mudharabah time deposits represent third parties' investments which are entitled to receive a share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and previously approved nisbah*.

f. Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

f. The range rate of profit sharing for mudharabah time deposits per annum are as follows:

	2024	2023	
Rupiah	2.41% - 2.59%	2.48% - 2.55%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.21% - 0.23%	0.23% - 0.30%	*United States Dollar*

27. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	140,000	175,000	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	60,000	25,000	*Related parties (Note 44)*
	200,000	200,000	

Pada tanggal tanggal 15 Desember 2023, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 sebesar Rp200.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2028.

On 15 December 2023, the Bank issued Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 amounting to Rp200,000 and is due on 15 December 2028.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 dan sebelum dilunasinya semua dana sukuk dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio *Capital Adequacy Ratio* ("CAR") tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: (a) Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Agen Pemantau memandang perlu, berdasarkan permohonan Agen Pemantau secara tertulis, Bank wajib menyampaikan kepada Agen Pemantau dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Bank; (b) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan disampaikan kepada Agen Pemantau dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat permohonan dari Agen Pemantau.

During the validity period of the BSI Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 and prior to repayment of all sukuk funds and profit sharing, the Bank is obliged to: (i) maintain a Capital Adequacy Ratio ("CAR") ratio of not less than 12% (twelve percent); (ii) ensure that the 2023 Subordinated Sukuk Mudharabah will not be owned by more than 49 (fourty nine) investors; (iii) submit to the monitoring agency as follows: (a) A copy of the report submitted to OJK including the level assessment report the bank's health, no later than 5 (five) working days after the report handed over to the parties mentioned above. In case the Monitoring Agent views necessary, based on the written request of the Monitoring Agent, the Bank is obliged submit to the Monitoring Agent additional documents relating to the above report (if any) no later than 10 (ten) working days after the date the application letter is received by the Bank; (b) Annual financial reports that have been audited by a public accountant registered with the OJK and submitted to the Monitoring Agent within 5 (five) working days after receiving the application letter from the Monitoring Agent.

Seluruh dana hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023, akan dipergunakan oleh Bank untuk kegiatan usaha Bank dalam rangka memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan dana hasil penerbitan sebagai modal pelengkap dan meningkatkan aset produktif Bank.

All funds from the issuance of Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 will be used by the Bank for the Bank's business activities in order to strengthen its capital structure by calculating the proceeds from the issuance as complementary capital and increasing the Bank's productive assets.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 diterbitkan dengan peringkat idAA(sy) *(Double A Sharia)* yang diperoleh dari agen pemeringkat efek PT Pefindo pada tanggal 23 Februari 2024.

This Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is issued without script, except for the Subordinated Sukuk Mudharabah Jumbo Certificate which is issued in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as proof of ownership of Sharia Securities for the benefit of the Subordinated Sukuk Mudharabah Holders. The Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is issued with idAA(sy) (Double A Sharia) rating which was obtained from the securities rating agency PT Pefindo on 23 February 2024.

27. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

Pendapatan bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi, dimana besarnya nisbah adalah 88,55% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Profit sharing income is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah of Subordinated Sukuk Mudharabah Holders, where the ratio is 88.55% of the revenue shared with an indication of profit sharing equivalent to 7.90% per year. The term of the Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is 5 (five) years from the issuance date. This Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 is offered at a value of 100% of the amount of Subordinated Mudharabah Sukuk funds. Profit sharing income is paid every quarter, according to the payment date of profit sharing income.

Acting as trustee of the 2023 BSI Subordinated Sukuk Mudharabah is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

28. SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN

Sukuk *mudharabah* diterbitkan terdiri dari:

28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK

Issued mudharabah sukuk consist of:

	2024	2023	
Sukuk *mudharabah muqayyadah*	18,563	3,608	*Sukuk mudharabah muqayyadah*
Sukuk keberlanjutan	3,000,000	-	*Sustainability sukuk*
	3,018,563	3,608	

Sukuk *Mudharabah Muqayyadah*

Sukuk *Mudharabah Muqayyadah*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga	18,563	3,608	*Third Parties*

Pada tanggal 26 Juni 2023, Bank telah menerbitkan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp3.759. Pada tanggal 26 Maret 2024, Bank menerbitkan kembali Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap II ("*Sukuk Mudharabah Muqayyadah* I Tahap II") dengan nilai nominal sebesar Rp7.762. Pada tanggal 20 Desember 2024, Bank menerbitkan kembali Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap III ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap III") dengan nilai nominal sebesar Rp7,969. Total plafon penerbitan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* adalah sebesar Rp100.000. Besarnya nisbah masing-masing adalah sebesar 36,34% dan 20% yang diindikasikan sebesar 0,55% per tahun. Dana sukuk dan bagi hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2035, 26 Juni 2036 dan 20 Desember 2036.

On 26 June 2023, the Bank issued Long Term Mudharabah Muqayyadah Sukuk Conducted Without Through Public Offering I PT Bank BSI Tbk Year 2023 Phase I ("Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase I") with a nominal value of IDR 3,759. On 26 March 2024, the Bank re-issued the Long-Term Mudharabah Muqayyadah Sukuk Conducted Without Through Public Offering I PT Bank BSI Tbk Year 2023 Phase II ("Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase II") with a nominal value of Rp7,762. On 20 December 2024, the Bank re-issued the Long-Term Mudharabah Muqayyadah Sukuk Conducted Without Through Public Offering I PT Bank BSI Tbk Year 2023 Phase III ("Sukuk Mudharabah Muqayyadah I Phase III") with a nominal value of Rp7,969. The total ceiling for Muqayyadah Mudharabah Sukuk issuance is Rp100,000. The respective nisbah are 36.34% and 20%, which is indicated at 0.55% per year. Sukuk funds and profit sharing are paid every 3 (three) months and will mature on 26 December 2035, 26 June 2036 and 20 December 2036, respectively.

28. SUKUK MUDHARABAH DITERBITKAN (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* (lanjutan)

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan dalam rangka kerjasama antara Bank dengan BP Tapera selaku investor tunggal dimana BSI ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah kepada peserta BP Tapera. Skema kerjasama tersebut diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 perihal penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

Sukuk Keberlanjutan

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	2,634,500	-	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	365,500	-	*Related parties (Note 44)*
	3,000,000	-	

Pada tanggal 7 Juni 2024, Bank mendapatkan surat pernyataan efektif pendaftaran PT Bank Syariah Indonesia Tbk atas Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dari OJK No. S.64/D.04/2024.

Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan pemegang sukuk *mudharabah*. Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 diterbitkan dengan peringkat idAAA(sy) *(Triple A Sharia).*

Jumlah dana Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp3.000.000, yang terdiri dari:
- Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jumlah dana sukuk *mudharabah* sebesar Rp1.700.000 dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2025;
- Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jumlah dana sukuk *mudharabah* sebesar Rp220.000 dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2026; dan
- Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jumlah dana sukuk *mudharabah* sebesar Rp1.080.000 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2027.

Nisbah dan pendapatan bagi hasil Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dikelompokkan menjadi:
- Sukuk *Mudharabah* Seri A: pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 74,72% dan nisbah Bank adalah sebesar 25,28% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% per tahun;

28. *ISSUED MUDHARABAH SUKUK* *(continued)*

Sukuk Mudharabah Muqayyadah *(continued)*

The issuance of the sukuk was carried out in the context of cooperation between the Bank and BP Tapera as the sole investor where BSI was appointed as the Bank that distributes Tapera Syariah KPR to BP Tapera participants. This cooperation scheme is regulated in Law No. 4 Year 2016 and Government Regulation No. 25 Year 2020 concerning the implementation of public housing savings.

Sustainability Sukuk

On 7 June 2024, the Bank received an effective registration statement letter of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the Continuous Public Offering of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 from OJK No. S.64/D.04/2024.

The Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 was issued without script, except for the Sukuk Mudharabah Jumbo Certificate which was issued to be registered in the name of KSEI as proof of ownership for the benefit of the sukuk mudharabah holders. The Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 was issued with a rating of idAAA(sy) (Triple A Sharia).

The amount of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 is Rp3,000,000, consisting of:
- *Series A Sukuk Mudharabah with total mudharabah sukuk funds of Rp1,700,000 with a term of 370 calendar days from the issuance date and will mature on 24 June 2025;*
- *Series B Sukuk Mudharabah with total mudharabah sukuk funds of Rp220,000 with a term of 2 (two) years from the issuance date and will mature on 14 June 2026; and*
- *Series C Sukuk Mudharabah with total sukuk mudharabah funds amounting to Rp1,080,000 with a term of 3 (three) years from the issuance date and will mature on 14 June 2027.*

Nisbah and profit sharing income from Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 is grouped into:
- *Mudharabah Sukuk Series A: mudharabah sukuk profit sharing income which is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah, where the value of the sukuk holder's nisbah is 74.72% and the Bank's ratio is 25.28% of the revenue shared with a profit sharing equivalent of 6.65% per year;*

28. SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN

28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK

Sukuk Keberlanjutan (lanjutan)

Nisbah dan pendapatan bagi hasil Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dikelompokkan menjadi: (lanjutan)

- Sukuk *Mudharabah* Seri B: pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 75,29% dan nisbah Bank adalah sebesar 24,71% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% per tahun; dan
- Sukuk *Mudharabah* Seri C: pendapatan bagi hasil sukuk *mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil, dimana besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 76,41% dan nisbah Bank adalah sebesar 23,59% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% per tahun.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Bank untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada, baik langsung atau pun tidak langsung, atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan ("KUBL") dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial ("KUBS") sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, dengan porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50% untuk KUBL serta minimal 50% dan maksimal 70% untuk KUBS.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sustainability Sukuk *(continued)*

Nisbah and profit sharing income from Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 is grouped into: (continued)

- *Series B Mudharabah Sukuk: mudharabah sukuk profit sharing income which is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah, where the sukuk holder's nisbah is 75.29% and the Bank's nisbah is 24.71% of shared income with profit sharing equivalent to 6.70% per year; and*
- *Series C Mudharabah Sukuk: mudharabah sukuk profit sharing income which is calculated based on the multiplication of the profit sharing ratio, where the sukuk holder nisbah is 76.41% and the Bank's nisbah is 23.59% of shared income with a profit sharing equivalent of 6.80% per year.*

The funds obtained from the Continuous Public Offering of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024, after deducting the issuance cost, will be used by the Bank on the disbursement of new financing or existing financing, either directly or indirectly, for activities included in the category of Environmental Based Business Activity ("KUBL") and Social Based Business Activity ("KUBS") as regulated on POJK No. 18 Year 2023 concerning the Issuance and Requirements of Sustainability Debt and Sukuk Securities, with a minimum portion of 30% and a maximum portion of 50% for KUBL and a minimum portion of 50% and a maximum portion of 70% for KUBS.

Acting as trustee of Continuous Sustainability Sukuk Mudharabah I Bank BSI Phase I Year 2024 is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

29. PEMBIAYAAN BERJANGKA *MUDHARABAH*

29. MUDHARABAH TERM FINANCING

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	1,000,000	776,250	*Rupiah*

Per 31 Desember 2023, Bank memiliki fasilitas *line* pembiayaan berjangka *mudharabah* sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk sampai dengan 29 Februari 2024.

As at 31 December 2023, the Bank had a mudharabah term financing line facility amounting to USD100,000,000 (full amount) from PT Bank Maybank Indonesia Tbk to 29 February 2024.

29. PEMBIAYAAN BERJANGKA *MUDHARABAH* (lanjutan)

Per 31 Desember 2024, Bank memiliki fasilitas *line* pembiayaan berjangka *mudharabah* sebesar USD95.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan jangka waktu fasilitas dari 21 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2025.

Nisbah bagi hasil pembiayaan berjangka *mudharabah* sebesar 0,59% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 0,40% sampai dengan 0,42% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023. Tidak terdapat agunan yang dijaminkan untuk fasilitas ini.

29. MUDHARABAH TERM FINANCING *(continued)*

As at 31 December 2024, the Bank obtained a mudharabah term financing line facility amounting to USD95,000,000 (full amount) from PT Bank Maybank Indonesia Tbk with facility period from 21 February 2024 to 21 February 2025.

The profit sharing rate of the mudharabah term financing is 0.59% per annum for the year ended 31 December 2024 and 0.40% to 0.42% per annum for the year ended 31 December 2023. There is no collateral pledged for this facility.

30. EKUITAS

Modal Saham

Susunan pemegang saham Bank adalah sebagai berikut:

30. EQUITY

Share Capital

The composition of the Bank's shareholders are as follows:

	31 Desember/*December* 2024			
Pemegang Saham	**Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ *Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)***	**Persentase pemilikan/ *Ownership percentage***	**Jumlah modal (nilai penuh)/ *Amount of capital (full amount)***	***Shareholders***
Modal Dasar				***Authorised Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.00%	500	*Series A Dwiwarna share*
Saham biasa Seri B	79,999,999,999	100.00%	39,999,999,999,500	*Series B common shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna				***Series A Dwiwarna share***
Negara Republik Indonesia	1	0.00%	500	*Republic of Indonesia*
Saham biasa Seri B				***Series B common shares***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,740,608,436	51.47%	11,870,304,218,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,720,230,418	23.24%	5,360,115,209,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	15.38%	3,546,380,827,500	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dewan Komisaris:				*Board of Commissioners:*
Suyanto	1,086,400	0.00%	543,200,000	*Suyanto*
Masduki Baidlowi	1,086,400	0.00%	543,200,000	*Masduki Baidlowi*
Fauzi	115,000	0.00%	57,500,000	*Fauzi*
Abu Rokhmad	163,500	0.00%	81,750,000	*Abu Rokhmad*
Direksi:				*Board of Directors:*
Hery Gunardi	3,354,400	0.01%	1,677,200,000	*Hery Gunardi*
Bob Tyasika Ananta	1,134,400	0.00%	567,200,000	*Bob Tyasika Ananta*
Ade Cahyo Nugroho	2,280,100	0.00%	1,140,050,000	*Ade Cahyo Nugroho*
Anton Sukarna	2,280,100	0.00%	1,140,050,000	*Anton Sukarna*
Tribuana Tunggadewi	2,280,100	0.00%	1,140,050,000	*Tribuana Tunggadewi*
Zaidan Novari	1,071,400	0.00%	535,700,000	*Zaidan Novari*
Saladin D. Effendi	343,100	0.00%	171,550,000	*Saladin D. Effendi*
Grandhis Helmi Harumansyah	343,100	0.00%	171,550,000	*Grandhis Helmi Harumansyah*
Ari Rizaldi	13,400	0.00%	6,700,000	*Ari Rizaldi*
Masyarakat	4,560,108,228	9.90%	2,280,054,114,000	*Public*
	46,129,260,138	100.00%	23,064,630,069,000	

30. EKUITAS (lanjutan) / ***30. EQUITY*** *(continued)*

Modal Saham (lanjutan) / ***Share Capital*** *(continued)*

Pemegang Saham / *Shareholders*	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ *Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)*	Persentase pemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah modal (nilai penuh)/ *Amount of capital (full amount)*	
	31 Desember/*December* 2023			
Modal Dasar				***Authorised Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.00%	500	*Series A Dwiwarna share*
Saham biasa Seri B	79,999,999,999	100.00%	39,999,999,999,500	*Series B common shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna				***Series A Dwiwarna share***
Negara Republik Indonesia	1	0.00%	500	*Republic of Indonesia*
Saham biasa Seri B				***Series B common shares***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,740,608,436	51.47%	11,870,304,218,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,720,230,418	23.24%	5,360,115,209,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	15.38%	3,546,380,827,500	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dewan Komisaris:				*Board of Commissioners:*
Sutanto	1,010,100	0.00%	505,050,000	*Sutanto*
Suyanto	822,700	0.00%	411,350,000	*Suyanto*
Masduki Baidlowi	822,700	0.00%	411,350,000	*Masduki Baidlowi*
Imam Budi Sarjito	822,700	0.00%	411,350,000	*Imam Budi Sarjito*
Direksi:				*Board of Directors:*
Hery Gunardi	2,210,600	0.00%	1,105,300,000	*Hery Gunardi*
Bob Tyasika Ananta	548,400	0.00%	274,200,000	*Bob Tyasika Ananta*
Ngatari	18,621,200	0.04%	9,310,600,000	*Ngatari*
Zaidan Novari	517,900	0.00%	258,950,000	*Zaidan Novari*
Anton Sukarna	1,726,600	0.00%	863,300,000	*Anton Sukarna*
Tribuana Tunggadewi	1,726,600	0.00%	863,300,000	*Tribuana Tunggadewi*
Ade Cahyo Nugroho	1,726,600	0.00%	863,300,000	*Ade Cahyo Nugroho*
Moh. Adib	527,400	0.00%	263,700,000	*Moh. Adib*
Masyarakat	4,544,576,128	9.87%	2,272,288,064,000	*Public*
	46,129,260,138	100.00%	23,064,630,069,000	

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan hak istimewa sebagai berikut:

- menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai perubahan Anggaran Dasar, perubahan permodalan, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, serta pengambilalihan Bank oleh perusahaan lain;
- menetapkan pedoman terkait pengembangan strategis Bank secara organik maupun nonorganik;
- mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS; dan
- meminta dan mengakses data dan dokumen Bank.

Series A Dwiwarna share is share that is specially owned by the Republic of Indonesia which grants the following special rights:

- *approve in the General Meeting of Shareholders ("GMS") regarding changes to the Articles of Association, changes in capital, mergers, consolidations, separations, dissolution and acquisitions of the Bank by other companies;*
- *establish guidelines related to the Bank's organic and non-organic strategic development;*
- *propose the arrangement of the GMS and agenda of the GMS; and*
- *request and access data and documents of the Bank.*

Pelaksanaan hak-hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat dikuasakan kepada pemegang saham pengendali Seri B terbanyak, kecuali pelaksanaan hak terkait persetujuan atas penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran serta pengambilalihan Bank oleh perusahaan lain.

The exercise of the special rights of Series A Dwiwarna shareholders can be delegated to the majority controlling shareholder of Series B, except for the exercise of rights related to the approval for mergers, consolidations, separations, dissolution and acquisitions of the Bank by other companies.

Saham biasa Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. Pemegang Saham Seri B mempunyai hak memberikan suara dimana setiap satu saham berhak memberikan satu hak suara.

Series B common shares are ordinary shares which can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public. Series B Shareholders have the right to vote in which each one share has the right to give one voting right.

30. EKUITAS (lanjutan)

***30. EQUITY** (continued)*

Saldo laba - Telah ditentukan penggunaannya (Cadangan Umum)

Cadangan umum pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1/1995 Pasal 61 ayat (1) mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Retained earnings - Appropriated (General Reserves)

The general reserves are originally provided in accordance with Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) on Limited Liability Company (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-in capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Sesuai Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2022 No. 45 tanggal 22 Mei 2023 dan Tahun 2021 No. 155 tanggal 27 Mei 2022, pemegang saham menyetujui distribusi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan penggunaan sebagai berikut:

Deed of Decision of the General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk Year 2022 No. 45 dated 22 May 2023 and Year 2021 No. 155 dated 27 May 2022, shareholders approved the distribution of net profit for the year ended 31 December 2023 and 2022, with the following usage:

	2023	2022	
Laba ditahan	3,707,433	2,982,128	*Retained earnings*
Pembagian dividen	855,561	426,018	*Dividend-share*
Cadangan umum	1,140,749	852,036	*General reserves*
	5,703,743	4,260,182	

Tambahan Modal Disetor

Additional Paid-in Capital

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

The movements in additional paid-in capital are as follows:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	-	*Balance as at 1 January 2021*
Agio saham dari penggabungan usaha	3,237	*Agio shares from merger*
Imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dalam akuisisi terbalik	(5,374,061)	*Net consideration effectively transferred in reverse acquisition*
Penyesuaian yang timbul dari akuisisi terbalik untuk mencerminkan modal menurut hukum	(995,952)	*Adjustment arising from reverse acquisition to reflect the Bank's legal capital*
Tambahan modal disetor per 31 Desember 2021	(6,366,776)	*Additional paid-in capital as at 31 December 2021*
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas pada tahun 2022	2,499,976	*Additional paid-in capital due to Limited Public Offering in 2022*
Biaya emisi penerbitan saham	(62,300)	*Share issuance costs*
Saldo akhir	(3,929,100)	*Ending balance*

31. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

31. INCOME FROM SALES AND PURCHASES

	2024	2023	
Murabahah	13,404,030	12,627,711	*Murabahah*
Istishna	25	69	*Istishna*
	13,404,055	12,627,780	

32. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL / *32. INCOME FROM PROFIT SHARING*

	2024	2023	
Musyarakah	7,841,527	5,843,007	*Musyarakah*
Mudharabah	159,677	97,479	*Mudharabah*
	8,001,204	5,940,486	

33. PENDAPATAN DARI *IJARAH* - BERSIH / *33. INCOME FROM IJARAH - NET*

	2024	2023	
Ijarah muntahiyah bittamlik - bersih	171,137	43,574	*Ijarah muntahiyah bittamlik - net*
Ijarah multijasa - bersih	20,987	111,872	*Multi-services ijarah - net*
	192,124	155,446	

Pendapatan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMBT") - bersih merupakan pendapatan pokok dan margin IMBT setelah dikurangi beban penyusutan, dan penurunan nilai aset *ijarah*. Pendapatan *ijarah* multijasa - bersih merupakan pendapatan *ijarah* tidak langsung atas margin dan pokok *ijarah* multijasa setelah dikurangi biaya yang dibayarkan kepada pemberi jasa awal.

Income from Ijarah Muntahiyah Bittamlik ("IMBT") - net represents the principal and margin income from IMBT after deducting depreciation expenses and impairment of ijarah assets. Multi-services ijarah income - net represents indirect ijarah income from the principal and margin of multi-services ijarah after deducting fees paid to the initial service provider.

34. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *34. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

	2024	2023	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	3,086,500	3,012,345	*Income from investments in marketable securities*
Pendapatan dari Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	366,792	319,541	*Income from Bank Indonesia Sharia Term Deposits*
Pendapatan atas penempatan Giro Wajib Minimum ("GWM")	104,549	130,309	*Income from placement in Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM")*
Bagi hasil penempatan pada bank lain	76,109	24,086	*Profit sharing from placements with other bank*
Bonus dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	66,870	41,750	*Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
	3,700,820	3,528,031	

35. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL / *35. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN*

	2024	2023	
Deposito *mudharabah*	5,539,666	4,148,029	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	1,100,295	791,764	*Mudharabah demand deposits*
Tabungan *mudharabah*	432,774	466,655	*Mudharabah savings deposits*
PaSBI	368,533	221,325	*PaSBI*
Dana pihak ketiga terikat	180,666	119,316	*Restricted third party funds*
Sukuk keberlanjutan	108,999	-	*Sustainability sukuk*
SIMA dan SIKA	78,898	74,464	*SIMA and SIKA*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	37,282	32,710	*Mudharabah term financing*
Musyarakah-mudharabah musytarakah	20,576	21,003	*Musyarakah-mudharabah musytarakah*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	16,514	115,849	*Subordinated sukuk mudharabah*
SIPA	4,826	2,053	*SIPA*
	7,889,029	5,993,168	

36. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *36. OTHER OPERATING INCOME*

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari: / *Other operating income consists of:*

	2024	2023*)	
Pendapatan imbalan jasa perbankan			*Fee based income from banking services*
Pendapatan *rahn*	1,001,349	727,749	*Income from rahn*
Pendapatan layanan *internet banking*	414,190	314,155	*Income from internet banking services*
Pendapatan transaksi Bancassurance	343,480	-	*Income from Bancassurance transactions*
Pendapatan administrasi tabungan dan giro	333,028	346,871	*Income from saving deposits and demand deposits administration*
Pendapatan administrasi pembiayaan	313,896	331,669	*Income from financing administration*
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	168,141	101,813	*Income from administration and commission other than financing*
Pendapatan jasa pembayaran	166,418	135,742	*Income from payment services*
Pendapatan transaksi ATM	159,942	173,310	*Income from ATM transactions*
Pendapatan kartu Hasanah	147,380	143,621	*Income from Hasanah Card*
Pendapatan komisi asuransi	134,976	157,705	*Income from insurance commission*
Pendapatan jasa ekspor impor	127,598	105,916	*Income from export import services*
Pendapatan pembiayaan sindikasi	87,588	84,903	*Syndicated financing fee*
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	65,316	60,972	*Income from foreign exchange transaction - net*
Pendapatan jasa penjualan sukuk dan reksa dana	46,374	31,570	*Income from service of sale of sukuk and mutual funds*
Pendapatan transaksi *remittance*	31,237	26,749	*Income from remittance transactions*
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (*ta'widh*)	27,467	32,221	*Income from restructuring compensation (ta'widh)*
Lainnya	109,982	95,808	*Others*
	3,678,362	2,870,774	
Keuntungan investasi surat berharga			*Gain from marketable securities*
Keuntungan pelepasan surat berharga	593,258	216,017	*Gain on sale of marketable securities*
(Penurunan)/kenaikan nilai surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(6,059)	26,093	*(Decrease)/increase in marketable securities measured at fair value through profit or loss*
	587,199	242,110	
Pendapatan lainnya			*Other income*
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	1,290,918	1,091,582	*Subsequent recoveries of receivables and financing written-off*
	5,556,479	4,204,466	

Pendapatan imbalan jasa perbankan - lainnya antara lain pendapatan atas wesel SKBDN, pendapatan *trust receipt,* pendapatan cetak rekening koran, dan pendapatan administrasi jasa perbankan.

Fee based income from banking services - others are income from SKBDN bills, income from trust receipt, income from bank statement printing, and fees for banking service administration fees.

37. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *37. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES*

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari: / *Salaries and benefits consist of:*

	2024	2023	
Gaji dan upah	3,862,690	3,776,223	*Salaries and wages*
Tunjangan karyawan	997,154	976,738	*Employee allowances*
Pendidikan dan pelatihan	175,822	123,890	*Education and training*
Lainnya	248,470	158,364	*Others*
	5,284,136	5,035,215	

Lainnya antara lain beban imbalan kerja dan beban kegiatan komunitas pegawai.

Others are employee benefits expenses and employee community activity expenses.

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 53 / *) *Reclassified, see Note 53*

38. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *38. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Beban umum dan administrasi terdiri dari: / *General and administrative expenses consist of:*

	2024	2023	
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna dan amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 14)	1,049,718	837,672	*Depreciation of fixed assets and right-of-use assets and amortisation of intangible assets (Note 14)*
Beban promosi	902,652	679,093	*Promotion expenses*
Beban *outsourcing*	838,642	730,416	*Outsourcing expenses*
Beban penjaminan	599,218	530,276	*Underwriting expenses*
Beban komunikasi	396,939	301,509	*Communication expenses*
Beban sewa (Catatan 14)	393,072	310,255	*Rent expenses (Note 14)*
Beban transportasi	284,183	220,052	*Transportation expenses*
Beban pemeliharaan dan perbaikan	254,239	173,267	*Service and maintenance expenses*
Beban jasa tenaga ahli	196,396	161,460	*Professional fees expenses*
Beban pungutan OJK	192,549	162,414	*OJK fees expenses*
Beban perlengkapan	186,954	143,505	*Supplies expenses*
Beban lisensi *software*	175,629	88,045	*Software license expenses*
Beban barang dan jasa lain	157,330	125,900	*Other goods & services expenses*
Beban listrik, air dan gas	128,844	123,948	*Electricity, water and gas expenses*
Beban alat tulis kantor	121,582	103,813	*Office stationery expenses*
Beban asuransi	97,014	91,006	*Insurance expenses*
Ujrah administrasi	90,604	93,531	*Administrative ujrah*
Lainnya	277,061	293,776	*Others*
	6,342,626	5,169,938	

Beban umum dan administrasi lain-lain terdiri dari: beban penunjang kinerja, beban sinergi bank konvensional, beban perubahan nama kreditur, beban komisi jaringan visa, beban akses data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beban pajak reklame, dan lainnya.

Other general and administrative expenses consist of: performance support expenses, conventional bank synergy expenses, creditor name change expenses, visa network commission expenses, Population and Civil Registry Service data access expenses, advertising tax expenses, and others.

39. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NONPRODUKTIF - BERSIH / *39. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS - NET*

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih terdiri dari: / *Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:*

	2024	2023	
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)	(6,999)	4,628	*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)	(97,218)	121,872	*Investments in marketable securities (Note 7)*
Tagihan akseptasi (Catatan 8)	(2,457)	(374)	*Acceptances receivables (Note 8)*
Piutang (Catatan 9)	967,838	1,536,234	*Receivables (Note 9)*
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)	27,969	80,586	*Funds of qardh (Note 10)*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)	44,110	11,962	*Mudharabah financing (Note 11)*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)	1,069,868	892,055	*Musyarakah financing (Note 12)*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 41)	(8,443)	3,246	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 41)*
Aset nonproduktif	(102,910)	(29,681)	*Non-earning assets*
Aset lainnya	2,109	1,951	*Other assets*
	1,893,867	2,622,479	

40. LABA PER SAHAM / *40. EARNINGS PER SHARE*

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut: / *The computation of earnings per share, are as follows:*

	2024	2023	
Laba tahun berjalan	7,005,888	5,703,743	*Income for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (nilai penuh)	46,129,260,138	46,129,260,138	*Weighted average number of shares outstanding (full amount)*
Laba bersih per saham dasar dan dilusian (Rupiah penuh)	151.88	123.65	*Basic and diluted earnings per share (full Rupiah)*

41. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *41. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut: / *a. The Bank's receivables and payables from commitments and contingencies are as follows:*

	2024	2023	
Tagihan komitmen			***Commitments receivables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Pembelian berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	464,508	-	*Unsettled purchase of foreign currency futures*
Liabilitas komitmen			***Commitments payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2,090,286	1,775,974	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	202,609	267,737	*Irrevocable L/C*
Kewajiban subrogasi	140,040	137,094	*Subrogation payables*
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	489,752	114,862	*Sales of foreign currency futures unresolved*
	2,922,687	2,295,667	
Pihak berelasi			***Related parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	48,602	117,375	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	161,978	98,238	*Irrevocable L/C*
	210,580	215,613	
Liabilitas komitmen - bersih	2,668,759	2,511,280	***Commitments payables - net***
Tagihan kontinjensi			***Contingencies receivables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Pendapatan dari pembiayaan bermasalah	425,397	335,215	*Income from non-performing financing*
Bank garansi (*kafalah*) yang diterima	245,046	234,419	*Bank guarantees (kafalah) received*
Lainnya	35,611	30,923	*Others*
	706,054	600,557	
Liabilitas kontinjensi			***Contingencies payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Garansi yang diterbitkan	1,532,802	2,099,170	*Bank guarantees issued*
Pihak berelasi			***Related parties***
Garansi yang diterbitkan	507,923	738,668	*Bank guarantees issued*
	2,040,725	2,837,838	
Liabilitas kontinjensi - bersih	1,334,671	2,237,281	***Contingencies payables - net***

41. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

41. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

b. The transactions of commitments and contingencies in the normal course of the Bank's activities that have financing risks are as follows:

	2024	2023	
Garansi yang diterbitkan	2,040,725	2,837,838	*Bank guarantees issued*
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2,138,888	1,893,349	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	364,587	365,975	*Irrevocable L/C*
	4,544,200	5,097,162	

c. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan diungkapkan pada Catatan 54k.

c. The collectibility of commitments and contingencies with financing risk on administrative accounts is disclosed in Note 54k.

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontijensi adalah sebagai berikut:

d. The movements of allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	32,017	28,873	*Beginning balance*
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	(8,443)	3,246	*(Reversal)/provision during the year (Note 39)*
Selisih kurs	471	(102)	*Exchange rate difference*
Saldo akhir tahun	24,045	32,017	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan atas nilai estimasi komitmen dan kontijensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Management believes that the allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies is adequate and in compliance with OJK regulations.

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA

42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

	2024	2023	
Imbalan pasca kerja jangka panjang	374,963	463,243	*Long-term post-employment benefits*
Cuti besar	159,767	204,021	*Grand leaves*
	534,730	667,264	

Bank memiliki Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") sebagai berikut:

Bank has a defined contribution plan ("PPIP") for all permanent employees which managed by the pension funds ("DPLK") as follows:

1. DPLK BRI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/NB.1/2022 tanggal 21 Maret 2022.
2. DPLK AXA Mandiri yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/NB.01/2022 tanggal 18 April 2022.
3. DPLK BNI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-31/NB.01/2022 tanggal 13 Mei 2022.

1. *DPLK BRI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-19/NB.1/2022 dated 21 March 2022.*
2. *DPLK AXA Mandiri which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-29/NB.01/2022 dated 18 April 2022.*
3. *DPLK BNI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-31/NB.01/2022 dated 13 May 2022.*

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Jumlah iuran yang dibayarkan Bank sebesar Rp189.334 dan Rp181.524 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Selain itu, Bank memiliki Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ("PPUKP") untuk pegawai *ex-legacy* BRIS yang dikelola oleh DPLK BRI.

Perhitungan aktuaria per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 23 Desember 2024 dan 15 Desember 2023.

Perhitungan aktuaria tersebut menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

***42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES** (continued)*

The total contributions paid by the Bank amounting to Rp189,334 and Rp181,524 for the year ended 31 December 2024 and 2023.

In addition, the Bank has a defined benefit plan ("PPUKP") for ex-legacy BRIS employees which managed by DPLK BRI.

The actuarial calculations as at 31 December 2024 and 2023 were prepared by KKA Steven & Mourits, an independent actuary, in its reports dated 23 December 2024 and 15 December 2023, respectively.

The above actuarial calculations were using the Projected Unit Credit Method with the following key assumptions:

	2024	2023	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto	7.10%	6.70%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	6.50%	7.00%	*Rate of salary increases*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	36 - 56 tahun/*years*	36 - 56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Modifikasi Tabel Mortalitas/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia TMI-IV-2019	Modifikasi Tabel Mortalitas/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia TMI-IV-2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	*Disability rate*

Imbalan pasca kerja jangka panjang

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun disajikan sebagai berikut:

Long-term post-employment benefit

A reconciliation of the funding status of the pension plan are as follows:

	2024	2023	
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	504,612	585,282	*Present value of funded defined benefit obligations*
Nilai wajar aset dana pensiun	(129,649)	(122,039)	*Fair value of pension plan assets*
Nilai bersih kewajiban	374,963	463,243	*Net liability*

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of funded defined benefit obligations for the year are as follows:

	2024	2023	
Pada awal tahun	585,282	626,386	*At the beginning of the year*
Biaya jasa kini	65,683	86,195	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(140,986)	*Past service cost*
Biaya bunga	34,844	42,951	*Interest cost*
(Keuntungan)/kerugian pengukuran kembali aktuarial	(137,052)	33,913	*Actuarial (gain)/loss on remeasurement*
	548,757	648,459	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(44,145)	(63,177)	*Payment of post-employment benefit during the year*
	504,612	585,282	

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan) / ***Long-term post-employment benefit** (continued)*

Rekonsiliasi atas mutasi liabilitas bersih selama tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movements of the net liabilities for the year ended 31 December 2024 and 2023 is as follows:

	2024	2023	
Kewajiban bersih pada awal tahun	463,243	510,868	*Net liabilities at the beginning of the year*
Beban tahun berjalan	176,523	29,623	*Current year expenses*
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya akibat:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income due to:*
Perubahan asumsi ekonomis	(92,804)	32,719	*Changes in economic assumptions*
Perubahan dari penyesuaian historis	(43,326)	2,462	*Changes from experience adjustment*
	(136,130)	35,181	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(44,145)	(63,177)	*Payment of post-employment benefit during the year*
Kelebihan pembayaran imbalan	(84,528)	(49,252)	*Excess benefit payment*
Kewajiban bersih pada akhir tahun	374,963	463,243	*Net liabilities at the end of the year*

Mutasi nilai wajar aset program untuk tahun yang berakhir adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets for the year ended are as follows:

	2024	2023	
Pada awal tahun	122,039	115,518	*At the beginning of the year*
Hasil dari aset program	(923)	(1,267)	*Return on plan assets*
Keuntungan aktuarial	8,533	7,788	*Actuarial gains*
	129,649	122,039	

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Pension expenses recognised in the statements of profit or loss, are as follows:

	2024	2023	
Biaya jasa kini	65,683	86,195	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(140,986)	*Past service cost*
Bunga bersih	26,312	35,162	*Net Interest*
Kelebihan pembayaran imbalan	84,528	49,252	*Excess benefits payment*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	176,523	29,623	*Expense recognised in profit or loss*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	176,523	29,623	*Expense recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(136,130)	35,181	*Remeasurement effect recognised in other comprehensive income*
Biaya imbalan pasti	40,393	64,804	*Defined benefit cost*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset program diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang syariah masing-masing sebesar Rp129.649 dan Rp122.039.

As at 31 December 2024 and 2023, plan assets invested to sharia money market each amounting to Rp129,649 and Rp122,039.

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan)

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

Bank terekspos beberapa risiko atas program imbalan kerja seperti risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi di bawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun.

Untuk memastikan bahwa posisi investasi telah sesuai dengan kerangka *Asset Liability Matching* ("ALMA"), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 7,98 tahun (2023: 8,89 tahun).

Cuti besar

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES *(continued)*

Long-term post-employment benefit *(continued)*

The expected return on plan assets is determined by considering the expected return available on the assets in accordance with the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date. Expected return on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans such as the exposed risks in the defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to pension fund.

To ensure that the position of investments is consistent with the Asset Liability Management ("ALMA") framework, the Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investments will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumptions used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefit with its realisation.

The average duration of the defined benefit obligations as at 31 December 2024 is 7.98 years (2023: 8.89 years).

Grand leaves

The movements of allowance for grand leaves as at 31 December 2024 and 2023, respectively, are as follows:

	2024	2023	
Liabilitas pada awal tahun	204,021	178,150	*Liabilities at beginning of the year*
Beban cuti besar pada tahun berjalan	44,845	102,955	*Grand leaves expense during the year*
Pembayaran cuti besar selama tahun berjalan	(89,099)	(77,084)	*Payment of grand leaves during the year*
	159,767	204,021	

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

Cuti besar (lanjutan) / ***Grand leaves** (continued)*

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

Grand leaves expense for the year ended 31 December 2024 and 2023 based on actuarial calculation are as follows:

	2024	2023	
Biaya jasa kini	69,662	65,008	*Current service cost*
Biaya bunga	12,024	10,609	*Interest cost*
Kerugian aktuarial	10,688	27,338	*Actuarial loss*
Biaya jasa lalu	(47,529)	-	*Past service costs*
Jumlah	44,845	102,955	*Total*

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligations to changes in the actuarial assumptions is as follows:

31 Desember 2024	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities* Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ *(Increase)/decrease benefit obligation*	*31 December 2024*
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(30,654)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	33,688	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	100,720	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(76,546)	

31 Desember 2023	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities* Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ *(Increase)/decrease benefit obligation*	*31 December 2023*
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(41,838)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	46,501	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	123,028	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(96,626)	

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2024					***31 December 2024***
Pensiun	53,202	311,490	1,272,552	1,637,244	*Pension*
Cuti besar	90,747	353,551	1,077,635	1,521,933	*Grand leaves*
Jumlah	143,949	665,041	2,350,187	3,159,177	*Total*
31 Desember 2023					***31 December 2023***
Pensiun	67,173	313,056	1,720,505	2,100,734	*Pension*
Cuti besar	88,663	365,172	1,312,773	1,766,608	*Grand leaves*
Jumlah	155,836	678,228	3,033,278	3,867,342	*Total*

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan peraturan LPS No. 2 tanggal 22 September 2014 tentang perubahan peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 tentang program penjaminan simpanan dimana simpanan yang dijamin meliputi giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan simpanan dari bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijaminkan kepada LPS adalah Rp599.081 dan Rp530.162 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

43. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004 effective on 22 September 2005, as amended by The Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No. 3 dated 13 October 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution ("LPS") to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated 22 September 2014 regarding amendment of LPS Regulation No. 2/PLPS/2010 regarding the Deposit Guarantee Program, the deposits guaranteed included wadiah demand deposits, mudharabah demand deposits, wadiah savings deposits, mudharabah savings deposits, mudharabah time deposits and deposits from other banks.

Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008, regarding "the Amount of Public Deposits Guaranteed by the Government Established Deposit Insurance Institution", as at 31 December 2024 and 2023 the amount of deposits that are guaranteed by LPS amounted to Rp2,000,000,000 (full amount) for each customer of each bank.

As at 31 December 2024 and 2023, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party funds paid to LPS amounted to Rp599,081 and Rp530,162 for the year ended 31 December 2024 and 2023, respectively.

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

a. Jenis hubungan

Pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen:

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham pengendali
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

a. Type of relationships

Related parties from the entity level and/or management are:

Related party relationship as the ultimate shareholder
The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Finance

Related party relationship as the controlling shareholder
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham	***Related party relationship as the shareholder***
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT BRI Danareksa Sekuritas	*PT BRI Danareksa Sekuritas*
PT BNI Life Insurance	*PT BNI Life Insurance*
PT Mandiri Sekuritas	*PT Mandiri Sekuritas*
AirNav Indonesia	*AirNav Indonesia*
Entitas dan lembaga pemerintah	***Government entities and institutions***
BPJS Kesehatan	*BPJS Kesehatan*
BPJS Ketenagakerjaan	*BPJS Ketenagakerjaan*
Dana Pensiun Bank Mandiri	*Dana Pensiun Bank Mandiri*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
Perum BULOG	*Perum BULOG*
Perum DAMRI	*Perum DAMRI*
Perum Jasa Tirta I	*Perum Jasa Tirta I*
Perum Jasa Tirta II	*Perum Jasa Tirta II*
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	*Perum Percetakan Negara Republik Indonesia*
Perum Perhutani	*Perum Perhutani*
Perum Perumnas	*Perum Perumnas*
Perum Peruri	*Perum Peruri*
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	*Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia*
PT Adhi Commuter Properti Tbk	*PT Adhi Commuter Properti Tbk*
PT Adhi Jalintim Riau	*PT Adhi Jalintim Riau*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Adhi Persada Beton	*PT Adhi Persada Beton*
PT Adhi Persada Gedung	*PT Adhi Persada Gedung*
PT Adhi Persada Properti	*PT Adhi Persada Properti*
PT Aero Globe Indonesia	*PT Aero Globe Indonesia*
PT Aerofood Indonesia	*PT Aerofood Indonesia*
PT Aerojasa Cargo	*PT Aerojasa Cargo*
PT Agro Medika Nusantara	*PT Agro Medika Nusantara*
PT Agro Sinergi Nusantara	*PT Agro Sinergi Nusantara*
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	*PT Alur Pelayaran Barat Surabaya*
PT Amarta Karya (Persero)	*PT Amarta Karya (Persero)*
PT Aneka Tambang Tbk	*PT Aneka Tambang Tbk*
PT Angkasa Pura I	*PT Angkasa Pura I*
PT Angkasa Pura II	*PT Angkasa Pura II*
PT Angkasa Pura Hotel	*PT Angkasa Pura Hotel*
PT Angkasa Pura Kargo	*PT Angkasa Pura Kargo*
PT Angkasa Pura Logistik	*PT Angkasa Pura Logistik*
PT Angkasa Pura Properti	*PT Angkasa Pura Properti*
PT Angkasa Pura Retail	*PT Angkasa Pura Retail*
PT Angkasa Pura Sarana Digital	*PT Angkasa Pura Sarana Digital*
PT Angkasa Pura Solusi	*PT Angkasa Pura Solusi*
PT Angkasa Pura Solusi Integra	*PT Angkasa Pura Solusi Integra*
PT Angkasa Pura Supports	*PT Angkasa Pura Supports*
PT Antam Resourcindo	*PT Antam Resourcindo*
PT ASABRI (Persero)	*PT ASABRI (Persero)*
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	*PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)*
PT Asuransi Asei Indonesia	*PT Asuransi Asei Indonesia*
PT Asuransi BRI Life	*PT Asuransi BRI Life*
PT Asuransi Jasa Indonesia	*PT Asuransi Jasa Indonesia*
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah	*PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah*
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	*PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)*
PT Asuransi Jiwa IFG	*PT Asuransi Jiwa IFG*
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	*PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia*
PT Asuransi Jiwa Taspen	*PT Asuransi Jiwa Taspen*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	*PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)*
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	*PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk*
PT Aviasi Pariwisata Indonesia	*PT Aviasi Pariwisata Indonesia*
PT AXA Mandiri Financial Services	*PT AXA Mandiri Financial Services*
PT Bahana Artha Ventura	*PT Bahana Artha Ventura*
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia*
PT Bahana Sekuritas	*PT Bahana Sekuritas*
PT Bahana TCW Investment Management	*PT Bahana TCW Investment Management*

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Bakti Timah Medika
PT Balai Pustaka
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Baturaja Multi Usaha
PT Berdikari
PT Berdikari Logistik Indonesia
PT Berkah Industri Mesin Angkat
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Bina Karya (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Asset Management
PT BNI Sekuritas
PT Borneo Alumina Indonesia
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia
PT Bukit Asam Medika
PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Energi Investama
PT Bukit Multi Properti
PT Bukit Prima Bahari
PT Bumi Daya Plaza
PT Bumi Sawindo Permai
PT Cinere Serpong Jaya
PT Citilink Indonesia
PT Citra Lautan Teduh
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Danareksa (Persero)
PT Danareksa Finance
PT Danareksa Investment Management
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Elnusa Petrofin
PT Elnusa Tbk
PT Emas Antam Indonesia
PT Energi Agro Nusantara
PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Equiport Inti Indonesia
PT Estika Daya Mandiri
PT Finnet Indonesia
PT Fintek Karya Nusantara
PT Gag Nikel
PT Gapura Angkasa
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
PT Graha Investama Bersama
PT Graha Niaga Tata Utama
PT Graha Sarana Duta
PT Griyaton Indonesia
PT Hakaaston
PT Haleyora Powerindo
PT HK Realtindo
PT Hutama Karya (Persero)
PT Hutama Karya Infrastruktur
PT Indofarma Global Medika
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Indonesia Chemical Alumina
PT Indonesia Coal Resources
PT Indonesia Comnets Plus

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Bakti Timah Medika
PT Balai Pustaka
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Baturaja Multi Usaha
PT Berdikari
PT Berdikari Logistik Indonesia
PT Berkah Industri Mesin Angkat
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Bina Karya (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Asset Management
PT BNI Sekuritas
PT Borneo Alumina Indonesia
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia
PT Bukit Asam Medika
PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Energi Investama
PT Bukit Multi Properti
PT Bukit Prima Bahari
PT Bumi Daya Plaza
PT Bumi Sawindo Permai
PT Cinere Serpong Jaya
PT Citilink Indonesia
PT Citra Lautan Teduh
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Danareksa (Persero)
PT Danareksa Finance
PT Danareksa Investment Management
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Elnusa Petrofin
PT Elnusa Tbk
PT Emas Antam Indonesia
PT Energi Agro Nusantara
PT Energi Pelabuhan Indonesia
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Equiport Inti Indonesia
PT Estika Daya Mandiri
PT Finnet Indonesia
PT Fintek Karya Nusantara
PT Gag Nikel
PT Gapura Angkasa
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
PT Graha Investama Bersama
PT Graha Niaga Tata Utama
PT Graha Sarana Duta
PT Griyaton Indonesia
PT Hakaaston
PT Haleyora Powerindo
PT HK Realtindo
PT Hutama Karya (Persero)
PT Hutama Karya Infrastruktur
PT Indofarma Global Medika
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Indonesia Chemical Alumina
PT Indonesia Coal Resources
PT Indonesia Comnets Plus

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
PT Indonesia Power
PT Indopelita Aircraft Services
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Industri Karet Nusantara
PT Industri Kemasan Semen Gresik
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Infomedia Nusantara
PT Infomedia Solusi Humanika
PT Inhutani I
PT Inhutani IV
PT Inka Multi Solusi
PT Inka Multi Solusi Service
PT Inka Multi Solusi Trading
PT Inti Konten Indonesia
PT IPC Terminal Petikemas
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
PT Jalin Pembayaran Nusantara
PT Jalintim Adhi Abipraya
PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Prima Logistik Bulog
PT Jasa Raharja
PT Jasa Tirta Energi
PT Jasa Tirta Luhur
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Jogja Solo
PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Manado Bitung
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Related Business
PT Jasamarga Solo Ngawi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasaraharja Putera
PT Jembatan Nusantara
PT KA Properti Manajemen
PT Kalimantan Jawa Gas
PT Kaltim Adhiguna Dermaga
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kaltim Industrial Estate
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar
PT Kawasan Industri Nusantara
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT KBN Prima Logistik
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Api Logistik
PT Kereta Api Pariwisata
PT Kereta Commuter Indonesia
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostika
PT Kimia Farma Tbk

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
PT Indonesia Power
PT Indopelita Aircraft Services
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Industri Karet Nusantara
PT Industri Kemasan Semen Gresik
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Infomedia Nusantara
PT Infomedia Solusi Humanika
PT Inhutani I
PT Inhutani IV
PT Inka Multi Solusi
PT Inka Multi Solusi Service
PT Inka Multi Solusi Trading
PT Inti Konten Indonesia
PT IPC Terminal Petikemas
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
PT Jalin Pembayaran Nusantara
PT Jalintim Adhi Abipraya
PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Prima Logistik Bulog
PT Jasa Raharja
PT Jasa Tirta Energi
PT Jasa Tirta Luhur
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Jogja Solo
PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
PT Jasamarga Manado Bitung
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Related Business
PT Jasamarga Solo Ngawi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasaraharja Putera
PT Jembatan Nusantara
PT KA Properti Manajemen
PT Kalimantan Jawa Gas
PT Kaltim Adhiguna Dermaga
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kaltim Industrial Estate
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar
PT Kawasan Industri Nusantara
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT KBN Prima Logistik
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Api Logistik
PT Kereta Api Pariwisata
PT Kereta Commuter Indonesia
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostika
PT Kimia FarmaTbk

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Global Trading
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Information Technology
PT Krakatau Jasa Industri
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Samudera
PT Krakatau Medika
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Samudera Solusi
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Sarana Properti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan
PT Krakatau Wajatama
PT Krida Upaya Tunggal
PT Laras Astra Kartika
PT Len Industri (Persero)
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Mega Eltra
PT Metra Digital Media
PT Mitra Rakata
PT Mitra Tours & Travel
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Mulia Sasmita Bhakti
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Nindya Beton
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nusa Karya Arindo
PT Nusa Pratama Property
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Services
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT Paguntaka Cahaya Nusantara
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Services
PT PANN Pembiayaan Maritim
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pelabuhan Bukit Prima
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelayanan Energi Batam
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pelindo Daya Sejahtera

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Global Trading
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Information Technology
PT Krakatau Jasa Industri
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Samudera
PT Krakatau Medika
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Samudera Solusi
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Sarana Properti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan
PT Krakatau Wajatama
PT Krida Upaya Tunggal
PT Laras Astra Kartika
PT Len Industri (Persero)
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Mega Eltra
PT Metra Digital Media
PT Mitra Rakata
PT Mitra Tours & Travel
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Mulia Sasmita Bhakti
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Nindya Beton
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nusa Karya Arindo
PT Nusa Pratama Property
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Services
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT Paguntaka Cahaya Nusantara
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Services
PT PANN Pembiayaan Maritim
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pelabuhan Bukit Prima
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelayanan Energi Batam
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pelindo Daya Sejahtera

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelindo Solusi Logistik
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permata Graha Nusantara
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina Hulu Rokan
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Maintenance and Construction
PT Pertamina Marine Solutions
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Training & Consulting
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT PG Rajawali II
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelindo Solusi Logistik
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permata Graha Nusantara
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT *Pertamina Hulu Rokan*
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Maintenance and Construction
PT Pertamina Marine Solutions
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Training & Consulting
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT PG Rajawali II
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Pindad International Logistic
PT Pindad Medika Utama
PT PLN Energi Primer Indonesia
PT PLN Nusantara Power
PT PLN Nusantara Renewables
PT PNM Investment Management
PT PNM Ventura Syariah
PT PNM Venture Capital
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT Pos Properti Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Infrastruktur
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Sinergi Banjaratma
PT PP Tirta Riau
PT PP Urban
PT Pratama Mitra Sejati
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
PT Prima Medica Nusantara
PT Prima Multi Terminal
PT Produksi Film Negara (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekayasa Engineering
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Saka Energi Indonesia
PT Sang Hyang Seri
PT Sarana Aceh Ventura
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Jakarta Ventura
PT Sarana Jambi Ventura
PT Sarana Jatim Ventura
PT Sarana Kalbar Ventura
PT Sarana Kalteng Ventura
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sei Mangkei Nusantara Tiga
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Indonesia Logistik
PT Semen Padang

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Pindad International Logistic
PT Pindad Medika Utama
PT PLN Energi Primer Indonesia
PT PLN Nusantara Power
PT PLN Nusantara Renewables
PT PNM Investment Management
PT PNM Ventura Syariah
PT PNM Venture Capital
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT Pos Properti Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Infrastruktur
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Sinergi Banjaratma
PT PP Tirta Riau
PT PP Urban
PT Pratama Mitra Sejati
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring
PT Prima Medica Nusantara
PT Prima Multi Terminal
PT Produksi Film Negara (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Indonesia Niaga
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekayasa Engineering
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Saka Energi Indonesia
PT Sang Hyang Seri
PT Sarana Aceh Ventura
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Jakarta Ventura
PT Sarana Jambi Ventura
PT Sarana Jatim Ventura
PT Sarana Kalbar Ventura
PT Sarana Kalteng Ventura
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Sei Mangkei Nusantara Tiga
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Indonesia Logistik
PT Semen Padang

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Senggigi Pratama Internasional
PT Sepatim Batamtama
PT Sigma Cipta Caraka
PT Sigma Cipta Utama
PT Sigma Mitra Sejati
PT Sinergi Colomadu
PT Sinergi Gula Nusantara
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Solusi Bangun Beton
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo
PT Sucofindo Advisory Utama
PT Sucofindo Episi
PT Sumberdaya Arindo
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Surya Energi Indotama
PT Swadharma Sarana Informatika
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera
PT Taspen (Persero)
PT Taspen Abadi Sentosa
PT Telekomunikasi Selular
PT Telemedia Dinamika Sarana
PT Telkom Akses
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Satelit Indonesia
PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Telkomsel Mitra Inovasi
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Karya Persada Properti
PT Timah Tbk
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT Tracon Industri
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol
PT Tugu Pratama Interindo
PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Tusam Hutani Lestari
PT United Tractors Semen Gresik
PT Usaha Gedung Mandiri
PT Varia Usaha Bahari
PT Varia Usaha Beton
PT Varia Usaha Dharma Segara
PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Wahana Optima Permai
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Waskita Modern Realti
PT Waskita Toll Road
PT Widya Tirta Selaras
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Serang Panimbang
PT Yodya Karya

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Senggigi Pratama Internasional
PT Sepatim Batamtama
PT Sigma Cipta Caraka
PT Sigma Cipta Utama
PT Sigma Mitra Sejati
PT Sinergi Colomadu
PT Sinergi Gula Nusantara
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Solusi Bangun Beton
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo
PT Sucofindo Advisory Utama
PT Sucofindo Episi
PT Sumberdaya Arindo
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Surya Energi Indotama
PT Swadharma Sarana Informatika
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko
P*T Tanjung Emas Daya Sejahtera*
PT Taspen (Persero)
PT Taspen Abadi Sentosa
PT Telekomunikasi Selular
PT Telemedia Dinamika Sarana
PT Telkom Akses
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Satelit Indonesia
PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Telkomsel Mitra Inovasi
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Karya Persada Properti
PT Timah Tbk
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT Tracon Industri
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol
PT Tugu Pratama Interindo
PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Tusam Hutani Lestari
PT United Tractors Semen Gresik
PT Usaha Gedung Mandiri
PT Varia Usaha Bahari
PT Varia Usaha Beton
PT Varia Usaha Dharma Segara
PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Wahana Optima Permai
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Waskita Modern Realti
PT Waskita Toll Road
PT Widya Tirta Selaras
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Wijaya Karya Pracetak Gedung
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Serang Panimbang
PT Yodya Karya

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

***a. Type of relationships** (continued)*

Pengendalian kegiatan Bank	***Control on Bank's activities***
Karyawan kunci	*Key employees*

b. Transaksi dengan pihak berelasi

b. Transactions with related parties

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows:

	2024	2023	
Aset			*Assets*
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)			*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Pemegang saham pengendali	57,913	71,545	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	70,636	33,695	*Shareholders*
	128,549	105,240	
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)			*Investments in marketable securities (Note 7)*
Pemegang saham utama	37,381,958	44,361,541	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham pengendali	113,886	97,775	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	79,568	50,017	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	542,225	1,054,180	*Government entities and institutions*
	38,117,637	45,563,513	
Tagihan akseptasi (Catatan 8)			*Acceptance receivables (Note 8)*
Pemegang saham pengendali	31,564	30,910	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	10,868	30,700	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	130,019	125,544	*Government entities and institutions*
	172,451	187,154	
Piutang *murabahah* (Catatan 9)			*Murabahah receivables (Note 9)*
Entitas dan lembaga pemerintah	43,504	91,991	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	23,379	19,721	*Key employees*
	66,883	111,712	
Piutang *ijarah* (Catatan 9)			*Ijarah receivables (Note 9)*
Entitas dan lembaga pemerintah	-	1,159	*Government entities and institutions*
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)			*Funds of qardh (Note 10)*
Entitas dan lembaga pemerintah	908,077	1,837,225	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	2,705	1,771	*Key employees*
	910,782	1,838,996	
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)			*Mudharabah financing (Note 11)*
Entitas dan lembaga pemerintah	2,000,000	1,000,000	*Government entities and institutions*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)			*Musyarakah financing (Note 12)*
Entitas dan lembaga pemerintah	26,065,721	24,702,709	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	76,829	60,761	*Key employees*
	26,142,550	24,763,470	
Jumlah aset dari pihak berelasi	67,538,852	73,571,244	***Total assets from related parties***
Jumlah aset	408,613,432	353,624,124	*Total assets*
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset	16.53%	20.80%	***Percentage of total assets from related parties to total assets***

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties *(continued)*

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	2024	2023	
Liabilitas			*Liabilities*
Liabilitas segera (Catatan 16)			*Obligations due immediately (Note 16)*
Pemegang saham pengendali	1,662	171,220	*Controlling shareholders*
Simpanan *wadiah*			*Wadiah deposits*
Giro *wadiah* (Catatan 18)			*Wadiah demand deposits (Note 18)*
Pemegang saham utama	1,324,124	1,028,825	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	372	317	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,562,248	1,794,526	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	101	191	*Key employees*
	2,886,845	2,823,859	
Tabungan *wadiah* (Catatan 19)			*Wadiah savings deposits (Note 19)*
Entitas dan lembaga pemerintah	6,077	360	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	7,824	9,803	*Key employees*
	13,901	10,163	
Jumlah simpanan *wadiah*	2,900,746	2,834,022	*Total wadiah deposits*
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)			*Deposits from other banks (Note 20)*
Giro *wadiah*			*Wadiah demand deposits*
Pemegang saham	81	73	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,288	1,280	*Government entities and institutions*
	1,369	1,353	
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")			*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Pemegang saham pengendali	482,850	50,000	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	402,375	176,985	*Shareholders*
	885,225	226,985	
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")			*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Pemegang saham pengendali	200,834	-	*Controlling shareholders*
Jumlah simpanan bank lain	1,087,428	228,338	*Total deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi			*Acceptance liabilities*
Pemegang saham pengendali	65,402	69,371	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	14,205	27,251	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	32,746	47,283	*Government entities and institutions*
	112,353	143,905	
Liabilitas imbalan kerja			*Employee benefit liabilities*
Karyawan kunci	29,680	38,846	*Key employees*
Jumlah liabilitas dari pihak berelasi	4,131,869	3,416,331	***Total liabilities from related parties***
Jumlah liabilitas	105,647,971	87,222,911	*Total liabilities*
Persentase jumlah liabilitas dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	3.91%	3.92%	***Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities***

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties *(continued)*

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	2024	2023	
Dana *syirkah* temporer			*Temporary syirkah funds*
Giro *mudharabah* (Catatan 24)			*Mudharabah demand deposits (Note 24)*
Pemegang saham utama	5,977,295	4,130,335	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	25,542	19,594	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	13,811,052	13,431,882	*Government entities and institutions*
	19,813,889	17,581,811	
Tabungan *mudharabah* (Catatan 25)			*Mudharabah savings deposits (Note 25)*
Pemegang saham	-	3	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	338,761	161,403	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	37,007	30,261	*Key employees*
	375,768	191,667	
Deposito *mudharabah* (Catatan 26)			*Mudharabah time deposits (Note 26)*
Pemegang saham	29,200	36,450	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	38,037,617	28,280,905	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	55,652	38,697	*Key employees*
	38,122,469	28,356,052	
Sukuk *mudharabah* subordinasi (Catatan 27)			*Subordinated sukuk mudharabah (Note 27)*
Entitas dan lembaga pemerintah	60,000	25,000	*Government entities and institutions*
Sukuk *mudharabah* diterbitkan (Catatan 28)			*Issued mudharabah sukuk (Note 28)*
Pemegang saham pengendali	50,000	-	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	34,500	-	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	281,000	-	*Government entities and institutions*
	365,500	-	
Jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak berelasi	58,737,626	46,154,530	***Total temporary syirkah funds from related parties***
Jumlah dana *syirkah* temporer	257,923,889	227,662,092	*Total temporary syirkah funds*
Persentase jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak berelasi terhadap jumlah dana *syirkah* temporer	22.77%	20.27%	***Percentage of total temporary syirkah funds from related parties to total temporary syirkah funds***

Gaji dan tunjangan, bonus dan tantiem, imbalan jangka panjang untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp174.879 dan Rp152.251 atau 1,48% dan 1,49% dari jumlah beban operasional.

Salaries and allowances, bonuses and tantiem, long-term benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the years ended 31 December 2024 and 2023 are Rp174,879 and Rp152,251 or 1.48% and 1.49% of total operating expenses.

45. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal Bank juga menyebabkan risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, agar dapat beradaptasi dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal dan sistematis. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin maju.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan penyelesaian (*settlement risk*) dan risiko kredit akibat *country risk*.

Pengelolaan risiko kredit yang dilakukan Bank antara lain dengan meningkatkan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip prudensialitas agar terhindar dari penurunan kualitas pembiayaan. Selain itu, Bank juga berupaya untuk mengurangi eksposur risiko kredit, di antaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko kredit dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko kredit memungkinkan Bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas kredit.

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:

a. Pembiayaan *Wholesale*
   1. Perencanaan Pembiayaan
      a) *Setting risk* koridor
      b) Fokus sektor industri
      c) *Targeted customer* dan *client tiering*
      d) Manajemen limit dan manajemen *pipeline*
      e) *Portfolio guideline*
   2. Proses Akuisisi
      a) Proses analisa nasabah yang komprehensif
      b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan *wholesale* melalui *financing risk rating*
      c) Proses keputusan dengan *four eyes principle*
      d) Pemahaman dan penguasaan proses bisnis
      e) *Risk mitigation* melalui *term & condition* dan *covenant*
   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
      a) *Monitoring portfolio mix*
      b) *Account mapping* dan klasifikasi risiko

45. RISK MANAGEMENT

In running its business, the Bank is always faced with various risks. Rapid developments in the Bank's external and internal environment have also caused the risks faced by the Bank to become increasingly complex. Therefore, in order to be able to adapt and be able to compete in the business environment, the Bank is required to be able to implement reliable and systematic risk management. The applied risk management principles must be able to support the Bank in being more prudent in line with the increasingly advanced developments in business activities and banking operations.

a. Credit risk

Credit risk is the risk arising from the failure of customers or other parties to fulfill their obligations to the Bank as per the agreed contract, including credit risk due to debtor failure, counterparty credit risk, settlement risk, and credit risk due to country risk.

The credit risk management carried out by the Bank are by improving the balance between healthy financing expansion and financing management by taking into account the principle of prudentiality to avoid a decrease in the quality of financing. In addition, the Bank also seeks to reduce credit risk exposure through various credit risk mitigation by using a number of techniques, such as collateral and third party guarantees to reduce the impact of risk. Credit risk mitigation techniques allow the Bank to be protected from deteriorating financing quality.

The Bank manages credit risk by:

a. Wholesale Financing
   1. Financing Planning
      a) Setting risk corridor
      b) Industry sector focus
      c) Targeted customer and client tiering
      d) Limit and pipeline management
      e) Portfolio guideline
   2. Acquisition Process
      a) Comprehensive customer's due diligence
      b) Risk assessment for wholesale financing customers through financing risk rating
      c) The decision-making process with the four eyes principle
      d) Understanding and mastery of business process
      e) Risk mitigation by term & condition and covenant
   3. Maintenance & Intensive Monitoring
      a) Portfolio mix monitoring
      b) Mapping account and risk classification

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui: (lanjutan)

a. Pembiayaan *Wholesale* (lanjutan)
   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif (lanjutan)
      c) Reviu tahunan
      d) *Watchlist alert*
      e) Evaluasi *Financing Risk Rating*
      f) Evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN")
      g) Pemantauan pemenuhan *covenant*
      h) Pemantauan *second way out*
   4. *Optimal Collection & Recovery*
      a) Restrukturisasi
      b) Pemetaan nasabah sesuai kuadran dan penetapan strategi serta *action plan*
      c) Penyiapan infrastruktur & sistem *Collection & Recovery*
      d) Pemantauan *NPF* dan *Write Off*
      e) Program *Booster Collection & Recovery*

b. Pembiayaan Ritel
   1. Perencanaan Pembiayaan
      a) Fokus sektor, khusus untuk SME
      b) Fokus segmen & *targeted customer*
      c) Penetapan RAC & fitur produk
      d) Program produk
      e) *Portfolio Guideline*
   2. Proses Akuisisi
      a) Memastikan akuisisi nasabah sesuai target pasar, fitur produk dan RAC
      b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan ritel melalui *scoring*
      c) Implementasi *four eyes principle*
      d) Proses verifikasi*:* pendapatan*,* dokumen dan nasabah
      e) Implementasi *scoring model*
   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
      a) Pemantauan portofolio dan kualitas
      b) Reviu *Watchlist* dan reviu tahunan (batas SME > Rp5.000)
      c) Pemeliharaan *Scoring System*
      d) Pemantauan *post transaction*: *covenant, second way out, committed to payroll*, Perjanjian Kerjasama *Non-payroll*, hasil *welcoming call*
   4. *Optimal Collection & Recovery*
      a) Restrukturisasi
      b) *Mobile Collection*
      c) Peningkatan sistem *collection*
      d) Pemantauan NPF dan WO
      e) Program *Booster Collection & Recovery*
      f) Pemantauan Sistem Klaim & Subrogasi

45. RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Credit risk *(continued)*

The Bank manages credit risk by: (continued)

a. Wholesale Financing (continued)
   3. Maintenance & Intensive Monitoring (continued)
      c) Annual review
      d) Watchlist alert
      e) Financing Risk Rating Evaluation
      f) Allowance for Impairment Losses ("CKPN") Evaluation
      g) Covenant fulfillment monitoring
      h) Second way out monitoring
   4. Optimal Collection & Recovery
      a) Restructuring
      b) Customer mapping based on quadrants and setting strategy as well as action plan
      c) Preparation of Collection & Recovery infrastructure & systems
      d) NPF and Write Off monitoring
      e) Booster Collection & Recovery Program

b. Retail Financing
   1. Financing Planning
      a) Sector focus, especially for SME
      b) Segment focus & targeted customer
      c) RAC & product features setting
      d) Product program
      e) Portfolio Guideline
   2. Acquisition Process
      a) Ensuring customer acquisition based on target market, product features and RAC
      b) Risk assessment for retail financing customers through scoring
      c) The four eyes principle implementation
      d) Verification process: income, document and customer
      e) Scoring model implementation
   3. Maintenance & Intensive Monitoring
      a) Portfolio and quality monitoring
      b) Watchlist review and annual review (SME limit > Rp5,000)
      c) Scoring System maintenance
      d) Post transaction monitoring: covenant, second way out, committed to payroll, Non-Payroll Cooperation Agreement, welcoming call result
   4. Optimal Collection & Recovery
      a) Restructuring
      b) Mobile Collection
      c) Enhancement collection system
      d) NPF and WO monitoring
      e) Booster Collection & Recovery program
      f) Claim & Subrogation Monitoring System

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan)

***a. Credit risk** (continued)*

(i) Kualitas aset keuangan

(i) Financial assets quality

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

The following tables show the quality of financial assets by asset class for all financial assets exposed by credit risk (excluding allowance for impairment losses):

	31 Desember/*December* 2024					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49,966,279	-	-	-	49,966,279	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	3,880,874	-	-	-	3,880,874	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	62,251,806	-	-	-	62,251,806	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	185,145	-	-	-	185,145	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	136,369,827	2,438,836	2,156,308	3,307,563	144,272,534	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	11	-	-	-	11	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	166,065	2,657	2,220	17,419	188,361	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	12,997,531	455,249	43,157	277,847	13,773,784	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,869,536	-	-	67,543	2,937,079	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	102,812,355	6,991,160	2,791,965	1,591,738	114,187,218	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	1,221,765	37,634	11,361	-	1,270,760	*Other assets*)
	372,721,194	9,925,536	5,005,011	5,262,110	392,913,851	

	31 Desember/*December* 2023					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32,440,778	-	-	-	32,440,778	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,324,473	-	-	-	2,324,473	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	71,301,526	-	-	-	71,301,526	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	431,228	-	-	-	431,228	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	127,357,014	4,037,793	2,168,075	2,940,214	136,503,096	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	29	-	-	1	30	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	199,239	3,350	2,820	12,991	218,400	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	10,493,267	478,080	42,477	293,257	11,307,081	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,806,298	10,490	33,101	31,244	1,881,133	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	76,378,227	7,476,673	2,673,552	1,687,745	88,216,197	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	1,062,912	18,501	10,550	-	1,091,963	*Other assets*)
	323,794,991	12,024,887	4,930,575	4,965,452	345,715,905	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

(a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan dan debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi.
(d) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat standar

(a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.
(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan rating minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(i) Financial assets quality** (continued)*

Financial assets quality are defined as follows:

High grade

(a) Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the Government institutions, Local Government institutions, banks listed on the stock exchange and transactions with reputable banks with low probability of default on liabilities.
(b) Investments in marketable securities are securities issued by Government, securities and bonds that are included in investment grade with rating at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with excellent payments history and never being in arrears throughout the financing period and debtors whose accounts have never been restructured.
(d) Other assets are receivables from Government (including Bank Indonesia) or local government such as income receivables.

Standard grade

(a) Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with non-listed banks.
(b) Investments in marketable securities are non-investment grade securities with a minimum rating of idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with a good payment history and debtors whose accounts have been restructured.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut: (lanjutan)

Tingkat standar (lanjutan)

(d) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan PSAK 107, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap aset keuangan yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(i) Financial assets quality** (continued)*

Financial assets quality are defined as follows: (continued)

Standard grade (continued)

(d) Other assets are financial assets other than income receivables from Government or Local Government such as other receivables to third parties.

According to SFAS 107, past due financial assets are determined when the debtor fails to make payments on schedule. The table below shows aging analysis of past due but not impaired of financial assets:

	31 Desember/*December* 2024				
	≤ 30 hari/ *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	1,051,945	576,261	528,102	2,156,308	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	840	251	1,129	2,220	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	28,917	11,945	2,295	43,157	*Funds of qardh*
Pembiayaan *musyarakah*	2,678,490	76,347	37,128	2,791,965	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	5,734	3,710	1,917	11,361	*Other assets**)
	3,765,926	668,514	570,571	5,005,011	

	31 Desember/*December* 2023				
	≤ 30 hari/ *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	1,001,039	583,144	583,892	2,168,075	*Murabahah receivables*
Piutang *ijarah*	903	600	1,317	2,820	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	29,839	10,807	1,831	42,477	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,099	638	31,364	33,101	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	2,582,953	51,627	38,972	2,673,552	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	5,661	2,050	2,839	10,550	*Other assets**)
	3,621,494	648,866	660,215	4,930,575	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan)

***a. Credit risk** (continued)*

(ii) Analisis konsentrasi risiko

(ii) Risk concentration analysis

(a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

(a) Geographical sectors

The following tables show the details of credit exposures categorised by geographical area as at 31 December 2024 and 2023. The geographical area grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region:

	31 Desember/*December* 2024							
	Jabodetabek	Jawa/*Java*[*)]	Sumatra	Kalimantan/ *Borneo*	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Aset								***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49,966,279	-	-	-	-	-	49,966,279	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	3,877,702	1	2,838	2	331	-	3,880,874	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	62,061,900	171,820	18,086	-	-	-	62,251,806	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	142,589	42,556	-	-	-	-	185,145	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	42,193,159	33,304,210	42,128,094	12,818,821	13,828,250	-	144,272,534	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	11	-	-	-	-	11	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	23,034	56,676	51,733	6,022	50,896	-	188,361	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	5,084,526	3,093,729	2,431,501	897,166	2,266,862	-	13,773,784	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,159,867	565,598	199,541	5	12,068	-	2,937,079	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	61,156,477	18,933,010	22,072,923	4,645,877	6,824,312	554,619	114,187,218	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain[**)]	1,065,310	67,845	55,885	16,717	59,138	5,865	1,270,760	*Other assets*[**)]
	227,730,843	56,235,456	66,960,601	18,384,610	23,041,857	560,484	392,913,851	
Cadangan kerugian penurunan nilai							(10,343,630)	*Allowance for impairment losses*
Neto							382,570,221	***Net***
Rekening administratif								***Administrative accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,720,153	95,332	299,757	16,133	7,513	-	2,138,888	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	344,941	1,196	18,450	-	-	-	364,587	*Irrevocable L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	1,463,676	115,718	401,175	32,259	27,897	-	2,040,725	*Bank guarantees issued*
	3,528,770	212,246	719,382	48,392	35,410	-	4,544,200	

	31 Desember/*December* 2023							
	Jabodetabek	Jawa/*Java*[*)]	Sumatra	Kalimantan/ *Borneo*	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Aset								***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32,440,778	-	-	-	-	-	32,440,778	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,322,303	2	13	74	2,081	-	2,324,473	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	71,195,560	61,872	44,094	-	-	-	71,301,526	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	356,695	71,495	3,038	-	-	-	431,228	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	37,811,118	30,959,995	41,321,128	11,954,658	14,456,197	-	136,503,096	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	2	28	-	-	-	-	30	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	29,265	53,075	61,278	7,835	66,947	-	218,400	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	5,569,913	2,151,760	1,428,816	609,006	1,547,586	-	11,307,081	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,179,774	595,881	94,688	84	10,706	-	1,881,133	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	54,344,974	14,085,060	13,197,814	3,082,719	3,349,587	156,043	88,216,197	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain[**)]	952,061	48,854	33,252	11,293	46,503	-	1,091,963	*Other assets*[**)]
	206,202,443	48,028,022	56,184,121	15,665,669	19,479,607	156,043	345,715,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai							(9,846,025)	*Allowance for impairment losses*
Neto							335,869,880	***Net***
Rekening administratif								***Administrative accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,639,164	140,823	91,820	17,154	4,388	-	1,893,349	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	325,605	40,370	-	-	-	-	365,975	*Irrevocable L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	1,943,765	243,687	531,167	52,231	66,988	-	2,837,838	*Bank guarantees issued*
	3,908,534	424,880	622,987	69,385	71,376	-	5,097,162	

[*)] Pulau Jawa tidak termasuk area Jabodetabek
[**)] Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

[*)] *Java island excludes Jabodetabek area*
[**)] *Other assets consist of income receivables*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk *(continued)*

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan)

(ii) Risk concentration analysis *(continued)*

(b) Sektor industri

(b) Industrial sector

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2024 and 2023:

	31 Desember/*December* 2024					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49,966,279	-	-	-	49,966,279	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	3,880,874	-	-	3,880,874	*Current accounts and placement with other banks*
Investasi pada surat berharga	58,752,476	2,940,530	558,800	-	62,251,806	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	51,840	50,496	82,809	-	185,145	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	905	7,642	9,261,860	135,002,127	144,272,534	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	11	11	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	5,284	183,077	188,361	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	771,543	-	4,010,476	8,991,765	13,773,784	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	2,000,000	368,310	544,341	24,428	2,937,079	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	14,605,048	1,659,965	56,962,439	40,959,766	114,187,218	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	1,009,412	4,557	47,453	209,338	1,270,760	*Other assets*)
	127,157,503	8,912,374	71,473,462	185,370,512	392,913,851	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(10,343,630)	*Allowance for impairment losses*
Neto					382,570,221	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	48,751	1,420,812	564,968	104,357	2,138,888	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	137,527	-	227,060	-	364,587	*Irrevocable L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	251,201	59,536	1,699,968	30,020	2,040,725	*Bank guarantees issued*
	437,479	1,480,348	2,491,996	134,377	4,544,200	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / ***45. RISK MANAGEMENT*** *(continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan) / ***a. Credit risk*** *(continued)*

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan) / ***(ii) Risk concentration analysis*** *(continued)*

(b) Sektor industri (lanjutan) / *(b) Industrial sector (continued)*

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023: (lanjutan)

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2024 and 2023: (continued)

	31 Desember/*December* 2023					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32,440,778	-	-	-	32,440,778	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	2,324,473	-	-	2,324,473	*Current accounts and placement with other banks*
Investasi pada surat berharga	68,666,168	1,925,650	709,708	-	71,301,526	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	-	82,801	348,427	-	431,228	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	43,301	101,798	8,575,481	127,782,516	136,503,096	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	30	30	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	1,285	217,115	218,400	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	1,434,965	-	3,440,996	6,431,120	11,307,081	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,000,000	386,022	489,398	5,713	1,881,133	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	15,443,670	989,886	47,461,747	24,320,894	88,216,197	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	898,276	1,844	39,219	152,624	1,091,963	*Other assets*)
	119,927,158	5,812,474	61,066,261	158,910,012	345,715,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(9,846,025)	*Allowance for impairment losses*
Neto					335,869,880	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	85,700	1,332,153	385,595	89,901	1,893,349	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	23,845	-	342,130	-	365,975	*Irrevocable L/C*
Bank garansi yang diterbitkan	571,247	88,393	2,153,323	24,875	2,837,838	*Bank guarantees issued*
	680,792	1,420,546	2,881,048	114,776	5,097,162	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Analisis eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

1. *Secured financing*
2. *Partially secured financing*

Untuk *secured financing*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan adalah sebagai berikut:

a. *Physical collateral*, berupa objek benda bergerak maupun tidak bergerak antara lain: kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, serta properti lainnya.

b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko *benchmark* suku bunga.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

(iii) Analysis of maximum exposure to credit risk after considering the impact of collateral and other credit risk mitigation

1. Secured financing
2. Partially secured financing

For secured financing, the Bank determined the type and value of collateral according to the financing scheme. Types of collateral are as follows:

a. Physical collateral, in the form of movable or immovable objects, includes: motor vehicles, land and buildings, as well as other properties.

b. Financial collateral, such as deposits (savings, current accounts, time deposits), securities and gold.

In case of default, the Bank will use the collateral as the last resort to recover counterparty obligations.

Partially secured financing consists of financing for fixed income employees, financing for retirees and other consumer financing. In their payment obligations, partially secured financing is generally made through automatic payroll deduction. Hence, the risk level of partially secured financing is not as big as the carrying value.

Financing risk mitigations for partially secured financing consists of employee recruitment decision letter and certificate of retirement.

b. Market risk

Market risk is the risk due to changes in market prices, such as risks of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market risk consists of two types of risk: exchange rate risk and interest rate benchmark risk.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui:
- Menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi *front office, middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan valuta asing.
- Menerapkan *segregation of duty* dalam pelaksanaan transaksi *treasury* antara *dealer* dan *supervisor*.
- Melakukan *cut loss* posisi terbuka sukuk apabila terdapat penurunan harga pasar.
- Melakukan reviu terhadap kebijakan dan standar prosedur operasi yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
- Menetapkan batas risiko pasar mencakup Posisi Devisa Neto ("PDN"), *Value at Risk* ("VaR"), Posisi Terbuka, *Stop Loss*, Transaksi *Treasury*, dan *Cut Loss*.
- Melakukan pengukuran risiko pasar menggunakan VaR, Sensitivitas dan *Stress Test.*
- Memantau pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar Dolar Amerika Serikat /Rupiah, *yield*, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, Indonesia *Overnight Index Average* ("IndONIA"), dan informasi pasar terkini.
- Melakukan *mark to market* surat berharga dan revaluasi kurs secara harian.

Risiko *benchmark* suku bunga

Risiko *benchmark* suku bunga merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan, antara lain sukuk, dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko *benchmark* suku bunga yang terdiri atas risiko spesifik dan risiko umum diperhitungkan dalam penilaian Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap dampak kemungkinan perubahan atas risiko *benchmark* suku bunga terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta ekuitas dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

The Bank manages market risk through:

- *Applying the principle of segregation of duty by separating the functions of the front office, middle office, and back office in the carrying out securities and foreign exchange transactions.*
- *Applying segregation of duty in carrying out treasury transaction between dealer and supervisor.*
- *Doing sukuk open position cut loss if market price decline.*
- *Reviewing policies and standard operating procedures related to market risk management.*
- *Setting market risk limits include Net Open Position ("NOP"), Value at Risk ("VaR"), Open Position, Stop Loss, Treasury Transactions, and Cut Loss.*
- *Conducting market risk measurement using VaR, Sensitivity Analysis and Stress Test.*
- *Monitoring the movement of external indicators including the United States Dollar/Rupiah exchange rate, yield, government securities, market yields, gold prices, Indonesia Overnight Index Average ("IndONIA") and the latest market information.*
- *Conducting mark to market toward marketable securities and daily foreign exchange rate revaluation.*

Benchmark rate risk

Benchmark rate risk is the risk due to changes in financial instrument prices, such as sukuk, from trading book positions caused by changes in interest rates. Benchmark rate risk which consists of specific risk and general risk is taken into account in the Risk Weighted Assets valuation for Market Risk.

The following tables show the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in benchmark rate risk, assuming all other variables are constant for the years ended 31 December 2024 and 2023:

	31 Desember/*December* 2024			
	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	**Dampak terhadap laba rugi/ *Impact to profit or loss***	**Dampak terhadap ekuitas/ *Impact to equity***	
Risiko *benchmark* suku bunga	+1%	(75,735)	(579,785)	*Benchmark rate risk*
	-1%	75,735	579,785	

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko *benchmark* suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap dampak kemungkinan perubahan atas risiko *benchmark* suku bunga terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta ekuitas dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023: (lanjutan)

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

***Benchmark rate risk** (continued)*

The following tables show the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income to possible changes in benchmark rate risk, assuming all other variables are constant for the years ended 31 December 2024 and 2023: (continued)

	31 Desember/*December* 2023			
	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	**Dampak terhadap laba rugi/ *Impact to profit or loss***	**Dampak terhadap ekuitas/ *Impact to equity***	
Risiko *benchmark* suku bunga	+1%	(89,931)	(383,353)	*Benchmark rate risk*
	-1%	89,931	383,353	

Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya perbedaan posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam PDN baik neraca maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN. Perhitungan PDN disajikan dalam Catatan 54p.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

Exchange rate risk

Exchange rate risk is the risk due to the gap of foreign exchange positions owned by the Bank which is reflected in the NOP either on balance sheet or as a whole. Included in the foreign exchange position are the trading book positions carried out with the aim of gaining short-term foreign exchange transaction benefits as well as banking book positions to maintain NOP. The NOP calculation is disclosed in Note 54p.

The following tables show the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in exchange rate, assuming all other variables are constant for the years ended 31 December 2024 and 2023:

	31 Desember/*December* 2024		
	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	**Dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ *Impact to profit or loss and other comprehensive income before tax***	
Mata uang asing	+1%	9,931	*Foreign currencies*
	-1%	(9,931)	

	31 Desember/*December* 2023		
	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	**Dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ *Impact to profit or loss and other comprehensive income before tax***	
Mata uang asing	+1%	9,419	*Foreign currencies*
	-1%	(9,419)	

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan Bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo piutang dan pembiayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalisir risiko likuiditas antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan pemisahan fungsi antara unit *treasury* sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit operasional sebagai *back office*.

2) Melakukan penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.

3) Memelihara akses ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antarbank.

4) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.

5) Memantau kondisi likuiditas Bank secara berkala melalui beberapa rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* (“FDR”), *Liquidity Coverage Ratio* (“LCR”), rasio kewajiban antarbank, arus kas, dan liquidity gap.

6) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum (“GWM”) dan *secondary reserve*.

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk arising from the Bank's inability to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the Bank's activities and financial condition. Along with the development of the Bank’s business, liquidity risk is one of the risk that become the major concerns of the Bank. It may result from the growth of the Bank’s financing which is greater than the growth of third party funds. The difference between the availability of source of funds and the maturity of receivable and financing can lead to difficulty in fulfilling bank obligations to customers and other parties.

The actions taken by the Bank to minimise the liquidity risk include the following:

1) Separating the functions between the treasury unit as the front office, the risk management unit as the middle office, and the operations unit as the back office.

2) Placement of funds in high quality liquid assets as liquidity reserves.

3) Maintaining access to the money market through placements and financing between banks.

4) Reviewing policies and standard operating procedures related to the management of liquidity risk.

5) Monitoring the liquidity conditions periodically through some liquidity ratios such as the Financing to Deposit Ratio (“FDR”), Liquidity Coverage Ratio (“LCR”), the ratio of inter-bank liabilities, cash flow and liquidity gaps.

6) Setting the liquidity risk limit such as limit of Statutory Reserve Requirement (“GWM”) and secondary reserve.

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

Berikut adalah tabel analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

The following are the tables of assets and liabilities maturity analysis as at 31 December 2024 and 2023, based on the remaining time until the maturity date:

	31 Desember/*December* 2024						
Keterangan	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year***	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities***	**Jumlah/ *Total***	***Descriptions***
Aset							***Assets***
Kas	8,080,689	-	-	-	-	8,080,689	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	49,966,279	-	-	-	-	49,966,279	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	3,880,874	-	-	-	-	3,880,874	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	4,906,359	10,427,000	18,418,166	28,500,281	-	62,251,806	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	30,721	66,362	88,062	-	-	185,145	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istishna,* dan *ijarah*	201,507	240,192	3,867,415	140,151,792	-	144,460,906	*Receivables - murabahah, istishna and ijarah*
Pinjaman *qardh*	1,621,547	5,109,110	3,646,878	3,396,249	-	13,773,784	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	20,507	8,189	2,110,222	798,161	-	2,937,079	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	1,984,502	3,422,875	7,680,873	101,098,968	-	114,187,218	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain *)	343,605	75,786	216,260	635,109	-	1,270,760	*Other assets*)
Jumlah aset	71,036,590	19,349,514	36,027,876	274,580,560	-	400,994,540	***Total assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	858,643	-	-	-	-	858,643	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	291,578	-	-	-	-	291,578	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan *wadiah*	74,427,146	-	-	-	-	74,427,146	*Wadiah deposits*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	18,417,864	-	-	-	-	18,417,864	*Liabilities to Bank Indonesia*
Simpanan dari bank lain	4,151,348	-	-	-	-	4,151,348	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	30,721	66,362	88,062	-	-	185,145	*Acceptance liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	-	-	-	534,730	-	534,730	*Employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa	9,262	-	2,906	169,128	-	181,296	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain **)	555,333	-	-	-	-	555,333	*Other liabilities***)
Jumlah liabilitas	98,741,895	66,362	90,968	703,858	-	99,603,083	***Total liabilities***
Dana *syirkah* temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	85,790,658	-	-	-	-	85,790,658	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	79,254,419	30,634,460	20,789,988	-	-	130,678,867	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	37,235,801	-	-	-	-	37,235,801	*Mudharabah demand deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	-	-	-	200,000	-	200,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Sukuk *mudharabah* diterbitkan	-	-	1,700,000	1,318,563	-	3,018,563	*Issued mudharabah sukuk*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	*Mudharabah term financing*
Jumlah dana *syirkah* temporer	203,280,878	30,634,460	22,489,988	1,518,563	-	257,923,889	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(230,986,183)	(11,351,308)	13,446,920	272,358,139	-	43,467,568	***Maturity gap***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) *Other assets consist of income receivables*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts*

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

***45. RISK MANAGEMENT** (continued)*

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

***c. Liquidity risk** (continued)*

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo: (lanjutan)

The following are the tables of assets and liabilities maturity analysis as at 31 December 2024 and 2023, based on the remaining time until the maturity date: (continued)

	31 Desember/*December* 2023						
Keterangan	**Sampai dengan 1 bulan/** ***Up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/** ***More than 1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/** ***More than 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/** ***More than 1 year***	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/** ***Others that have no maturities***	**Jumlah/** ***Total***	***Descriptions***
Aset							***Assets***
Kas	5,255,841	-	-	-	-	5,255,841	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,670,928	769,850	-	-	-	32,440,778	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,324,473	-	-	-	-	2,324,473	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	17,162,511	3,050,078	19,328,749	31,760,188	-	71,301,526	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	289,490	68,657	73,081	-	-	431,228	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istishna,* dan *ijarah*	187,326	215,094	2,726,139	133,592,967	-	136,721,526	*Receivables - murabahah, istishna and ijarah*
Pinjaman *qardh*	2,307,387	3,432,912	3,683,726	1,883,056	-	11,307,081	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	17,726	3,515	1,120,244	739,648	-	1,881,133	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	2,780,961	4,182,168	11,022,109	70,230,959	-	88,216,197	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain *)	77,248	76,689	250,554	687,472	-	1,091,963	*Other assets**)
Jumlah aset	62,073,891	11,798,963	38,204,602	238,894,290	-	350,971,746	***Total assets***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	1,316,067	-	-	-	-	1,316,067	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	255,932	-	-	-	-	255,932	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan *wadiah*	67,873,898	-	-	-	-	67,873,898	*Wadiah deposits*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	11,900,055	-	-	-	-	11,900,055	*Liabilities to Bank Indonesia*
Simpanan dari bank lain	1,761,301	-	-	-	-	1,761,301	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	289,490	68,657	73,081	-	-	431,228	*Acceptance liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	-	-	-	667,264	-	667,264	*Employee benefits liabilities*
Liabilitas sewa	35	13,352	53,031	56,775	-	123,193	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain **)	646,909	-	-	-	-	646,909	*Other liabilities* **)
Jumlah liabilitas	84,043,687	82,009	126,112	724,039	-	84,975,847	***Total liabilities***
Dana *syirkah* temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	78,280,185	-	-	-	-	78,280,185	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	72,641,261	26,116,550	17,226,978	-	-	115,984,789	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	32,417,260	-	-	-	-	32,417,260	*Mudharabah demand deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	-	-	-	200,000	-	200,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Sukuk *mudharabah* diterbitkan	-	-	-	3,608	-	3,608	*Issued sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	776,250	-	-	-	-	776,250	*Mudharabah term financing*
Jumlah dana *syirkah* temporer	184,114,956	26,116,550	17,226,978	203,608	-	227,662,092	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(206,084,752)	(14,399,596)	20,851,512	237,966,643	-	38,333,807	***Maturity gap***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) *Other assets consist of income receivables*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts*

Bank senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem operasi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dengan melakukan *monitoring* terhadap kondisi likuiditas Bank melalui beberapa rasio likuiditas. Bank meyakini dana tetap tumbuh dan arus kas dari aktiva produktif dapat menjaga kecukupan likuiditas.

The Bank continually evaluates the effectiveness of the operating system to ensure that sufficient funds are available to meet all needs by monitoring the condition of the Bank's liquidity through several liquidity ratios. The Bank believes that funds will continue to grow and cash flow from earning assets will be able to maintain sufficient liquidity.

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Bank memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarises the comparison between the carrying values and fair values of financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as at 31 December 2024 and 2023 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

As at 31 December 2024 and 2023, the carrying value of the Bank's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

	31 Desember/*December* 2024		31 Desember/*December* 2023		
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Investasi pada surat berharga	62,251,806	62,478,192	71,301,526	70,704,166	*Investments in marketable securities*

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
(ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
(iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

The tables below show the financial instruments recognised at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
(ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
(iii) Level 3: Fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for asset and liability that are not based on observable market data.

Nilai wajar tingkat 1 dinilai menggunakan data dari *Bloomberg*.

The fair value level 1 is valued by using data from Bloomberg.

Nilai wajar tingkat 2 dinilai menggunakan data dari *Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA")* dan *Net Asset Value report* dimana dihitung dengan model diskonto arus kas dengan kurva *yield* (diambil dari data pasar) terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

The fair value level 2 is valued by using data from Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA") and Net Asset Value report which is calculated using a discounted cash flow model based on current yield curve (derived from market data) appropriated with the remaining term of maturity.

	31 Desember/*December* 2024				
	Nilai wajar/ *Fair value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Investasi pada surat berharga	62,478,192	-	62,448,716	29,476	*Investments in marketable securities*
	31 Desember/*December* 2023				
	Nilai wajar/ *Fair value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Investasi pada surat berharga	70,704,166	-	70,672,379	31,787	*Investments in marketable securities*

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, piutang, dan pembiayaan yang diberikan dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government sukuk classified as held to maturity, receivables and financing and marketable securities issued approximate their carrying values due to their short-term maturities.

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

a. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain, tagihan akseptasi dan aset lain-lain.

Nilai tercatat dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

b. Investasi pada surat berharga

Nilai wajar untuk investasi pada surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik risiko kredit, jatuh tempo, dan *yield* yang serupa atau menggunakan metode penilaian internal.

c. Liabilitas segera, simpanan *wadiah*, simpanan dari bank lain, liabilitas lain-lain, dan dana *syirkah* temporer.

Estimasi nilai wajar dari liabilitas segera, simpanan *mudharabah*, dan liabilitas lain-lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan *wadiah* dan simpanan dari bank lain dengan tingkat margin tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin pasar uang dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

d. Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dan dinyatakan berdasarkan *amortised cost.*

Estimasi nilai wajar terhadap piutang dan pembiayaan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin yang berlaku untuk piutang dan pembiayaan dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat margin pasar saat ini.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

a. Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks, acceptance receivables and other assets.

The carrying amount of current accounts and placements with Bank Indonesia and other banks, acceptance receivables and other assets are a reasonable approximations of fair value.

b. Investments in marketable securities

The fair value for amortised cost investments in marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit risk, maturity and yield characteristics or using internal valuation models.

c. Obligations due immediately, wadiah deposits, deposits from other banks, other liabilities and temporary syirkah funds.

The estimated fair value of obligations due immediately, mudharabah deposits and other liabilities are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of wadiah deposits and deposits from other banks with fixed rate margin and acceptance liabilities are determined based on discounted cash flows using money market margin rates for with similar remaining maturities.

d. Receivables and financing

Generally, the Bank's receivables and financing portfolio consists of receivables and financing that are stated at amortised cost.

The estimated fair values of receivables and financing are determined based on discounted cash flows using margin rates applied for receivables and financing with similar credit risk and remaining maturities.

The estimated fair value of loans represent the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

47. SEGMEN OPERASI

Segmen operasi Bank dibagi berdasarkan beberapa segmen operasi sebagai berikut: *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat. Dalam menentukan hasil segmen operasi, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Komponen *Internal Transfer Pricing Model* diterapkan dalam perhitungan kinerja laba rugi masing-masing segmen.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank:

- *Corporate Banking*: melayani badan usaha seperti BUMN dan anak perusahaannya, lembaga negara, perusahaan multinasional, bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal ventura *non-linkage*), pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka, dan perusahaan sekuritas.

- *Commercial Banking*: melayani badan usaha seperti BUMD dan anak perusahaannya, pemerintah daerah, rumah sakit (kecuali diatur dalam produk khusus), perguruan tinggi negeri dan swasta (yayasan yang memiliki perguruan tinggi).

- Hubungan Kelembagaan: saat ini difokuskan untuk pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah lembaga pemerintah dan dana pensiun BUMN.

- Ritel: saat ini meliputi antara lain:
  - Ritel SME: melayani badan usaha swasta berbentuk badan hukum dan nonbadan hukum untuk tujuan produktif, pendidikan dasar & menengah, klinik, koperasi, pola *linkage*, inti plasma, dan perorangan.
  - Ritel Mikro: ditujukan untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya adalah penyaluran pembiayaan bersubsidi untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat.
  - Ritel Konsumer: melayani perorangan untuk tujuan konsumtif/multiguna (antara lain produk Griya, Multiguna, Kendaraan, Pensiunan, Kartu Pembiayaan, Cicil Emas dan Gadai Emas, pembiayaan program pemerintah).

47. OPERATIONS SEGMENTS

The Bank's operating segment is divided based on the following operating segments: Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional Relation, Retail and Treasury Banking & Head Office. In determining the results of operating segments, certain asset and liability accounts and revenues and expenses are attributed to each segment based on management's internal reporting policies. The components of Internal Transfer Pricing Model are applied in the calculation of profit or loss performance of each segments.

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting:

- *Corporate Banking: serves business entities such as SOEs and their subsidiaries, state institutions, multinational companies, banks and non-bank financial institutions (including non-linkage venture capital), syndicated financing, public companies and securities companies.*

- *Commercial Banking: serves business entities such as BUMD and its subsidiaries, regional governments, hospitals (unless regulated in special products), state and private universities (foundations with tertiary institutions).*

- *Institutional Relation: currently focused on the management of customer funds and other transactions belonging to customers of government institutions and BUMN pension funds.*

- *Retail: currently includes, among others:*
  - *SME Retail: serving private business entities in the form of legal entities and non-legal entities for productive purposes, primary & secondary education, clinics, cooperatives, linkage patterns, plasma core and individuals.*
  - *Micro Retail: aimed at serving individual customers and micro entrepreneurs, including the distribution of subsidised financing to support government programs in empowering community businesses.*
  - *Consumer Retail: serving individuals for consumptive/multipurpose (among others Griya products, Multipurpose, Vehicles, Pensioners, Financing Cards, Gold Installments and Pawn Gold, government program financing).*

47. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank: (lanjutan)

- Lainnya: saat ini meliputi antara lain:
  - *Treasury*: segmen *treasury* terkait dengan kegiatan *treasury* Bank termasuk transaksi valuta asing*, money market, fixed income*, bisnis perbankan internasional, pasar modal, supervisi Kantor Luar Negeri.
  - Kantor Pusat: terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direviu oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi:

***47. OPERATIONS SEGMENTS** (continued)*

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting: (continued)

- *Others: currently include, among others:*
  - *Treasury: treasury segment related to the Bank's treasury activities including foreign exchange transactions, money market, fixed income, international banking business, capital market, supervision of Foreign Office.*
  - *Head Office: related to the management of assets and liabilities other than those already managed by other operating segments, including receiving cost allocation for centralised service provision to other segments as well as revenues/costs that are not allocated to other segment reporting.*

Performance is measured based on segment profit before income tax, as reported in an internal management report reviewed by the Bank Management. Segment profit is used to measure performance where management believes that the information is most relevant in evaluating the results of the segment relative to other entities operating in the industry.

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows:

	31 Desember/*December* 2024							
Keterangan	***Corporate Banking***	***Commercial Banking***	**Hubungan Kelembagaan/ *Institutional Relation***	***Retail Banking***	***Treasury Banking* & Kantor Pusat/ *Treasury Banking & Head Office***	**Penyesuaian & Eliminasi/ *Adjustment & Elimination***)**	**Jumlah/ *Total***	***Descriptions***
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib**)	4,758,365	1,643,295	4,743,000	26,466,294	2,321,675	(14,634,426)	25,298,203	*Revenue from fund management as mudharib**)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil*)	(3,682,258)	(1,179,454)	(4,192,316)	(13,010,908)	(614,513)	14,790,420	(7,889,029)	*Third parties' share on return**)
Hak bagi hasil milik Bank	1,076,107	463,841	550,684	13,455,386	1,707,162	155,994	17,409,174	*Bank's share in profit*
Pendapatan usaha lainnya	374,100	198,027	101	2,257,932	2,726,319	-	5,556,479	*Other operating income*
Beban usaha	(151,526)	(215,341)	(101,896)	(6,208,730)	(5,116,149)	-	(11,793,642)	*Operating expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih	(109,297)	(124,951)	-	(1,757,475)	97,856	-	(1,893,867)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
Total beban	(260,823)	(340,292)	(101,896)	(7,966,205)	(5,018,293)	-	(13,687,509)	*Total expenses*
Pendapatan/(beban) nonusaha - bersih	-	-	-	56,610	(52,298)	-	4,312	*Non-operating income/(expense) - net*
Laba sebelum zakat dan beban pajak	1,189,384	321,576	448,889	7,803,723	(637,110)	155,994	9,282,456	*Income before zakat and tax expense*
Zakat	(29,735)	(8,040)	(11,222)	(195,093)	12,029	-	(232,061)	*Zakat*
Beban pajak	(255,123)	(68,978)	(96,287)	(1,673,898)	49,779	-	(2,044,507)	*Tax expenses*
Laba bersih	904,526	244,558	341,380	5,934,732	(575,302)	155,994	7,005,888	*Net income*
Aset segmen								***Segment of assets***
Pembiayaan *wholesale*	58,719,889	18,497,916	-	-	-	-	77,217,805	*Wholesale financing*
Pembiayaan ritel								*Retail financing*
SME	-	-	-	21,634,863	-	-	21,634,863	*SME*
Mikro	-	-	-	27,745,691	-	-	27,745,691	*Micro*
Konsumer***)	-	-	-	151,882,883	-	-	151,882,883	*Consumer****)
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(4,382,847)	(1,201,453)	-	(4,707,382)	-	-	(10,291,682)	*Provision for impairment losses for financing*
Nonpembiayaan - bersih	597,762	-	-	-	139,826,110	-	140,423,872	*Non-financing - net*
	54,934,804	17,296,463	-	196,556,055	139,826,110	-	408,613,432	
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen								***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***
Pendanaan	21,619,859	12,013,780	89,456,637	205,226,059	26,603,912	-	354,920,247	*Funding*
Nonpendanaan	-	-	-	-	53,693,185	-	53,693,185	*Non-funding*
	21,619,859	12,013,780	89,456,637	205,226,059	80,297,097	-	408,613,432	

*) Termasuk komponen *internal transfer pricing* antarsegmen operasi
**) Termasuk eliminasi komponen *internal transfer pricing*
***) Termasuk segmen *pawning* dan hasanah *card*

**) Include component of internal transfer pricing among operating segments*
***) Include elimination of internal transfer pricing components*
****) Include pawning and hasanah card segment*

47. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi: (lanjutan)

47. OPERATIONS SEGMENTS (continued)

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows: (continued)

Keterangan	31 Desember/*December* 2023							*Descriptions*
	Corporate Banking	*Commercial Banking*	Hubungan Kelembagaan/ *Institutional Relation*	*Retail Banking*	*Treasury Banking* & Kantor Pusat/ *Treasury Banking & Head Office*	Penyesuaian & Eliminasi/ *Adjustment & Elimination**)	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib**)	4,169,405	1,014,705	3,655,374	22,626,774	2,306,807	(11,521,322)	22,251,743	*Income from fund management as mudharib**)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil*)	(2,981,436)	(654,183)	(3,325,439)	(10,277,479)	(445,294)	11,690,663	(5,993,168)	*Third parties' share on return**)
Hak bagi hasil milik Bank	1,187,969	360,522	329,935	12,349,295	1,861,513	169,341	16,258,575	*Bank's share in profit*
Pendapatan usaha lainnya	358,216	104,025	-	1,679,885	2,062,340	-	4,204,466	*Other operating income*
Beban usaha	(134,737)	(153,841)	(84,689)	(5,495,768)	(4,380,169)	-	(10,249,204)	*Operating expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih	(336,193)	(133,567)	-	(2,155,440)	2,721	-	(2,622,479)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
Total beban	(470,930)	(287,408)	(84,689)	(7,651,208)	(4,377,448)	-	(12,871,683)	*Total expenses*
Beban nonusaha - bersih	-	-	-	-	(2,156)	-	(2,156)	*Non-operating expenses*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	1,075,255	177,139	245,246	6,377,972	(455,751)	169,341	7,589,202	*Income before zakat and income tax expenses*
Zakat	(25,822)	(4,254)	(5,889)	(153,165)	(600)	-	(189,730)	*Zakat*
Beban pajak	(228,650)	(37,668)	(52,151)	(1,356,260)	(21,000)	-	(1,695,729)	*Tax expenses*
Laba bersih	820,783	135,217	187,206	4,868,547	(477,351)	169,341	5,703,743	*Net income*
Aset segmen								***Segment of assets***
Pembiayaan *wholesale*	54,541,919	12,969,097	-	-	-	-	67,511,016	*Wholesale financing*
Pembiayaan ritel								*Retail financing*
SME	-	-	-	19,345,720	-	-	19,345,720	*SME*
Mikro	-	-	-	22,912,195	-	-	22,912,195	*Micro*
Konsumer***)	-	-	-	130,547,113	-	-	130,547,113	*Consumer****)
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(4,042,106)	(1,105,624)	-	(4,540,732)	-	-	(9,688,462)	*Provision for impairment losses for financing*
Nonpembiayaan - bersih	920,109	-	-	-	122,076,433	-	122,996,542	*Non-financing - net*
	51,419,922	11,863,473	-	168,264,296	122,076,433	-	353,624,124	
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen								***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***
Pendanaan	22,354,117	6,990,589	79,770,650	185,573,903	14,508,087	-	309,197,346	*Funding*
Nonpendanaan	-	-	-	-	44,426,778	-	44,426,778	*Non-funding*
	22,354,117	6,990,589	79,770,650	185,573,903	58,934,865	-	353,624,124	

*) Termasuk komponen *internal transfer pricing* antarsegmen operasi
**) Termasuk eliminasi komponen *internal transfer pricing*
***) Termasuk segmen *pawning* dan hasanah *card*

**) Include component of internal transfer pricing among operating segments*
***) Include elimination of internal transfer pricing components*
****) Include pawning and hasanah card segment*

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

Perjanjian signifikan

Pada tanggal 27 September 2024, Bank menandatangani perjanjian *bancassurance* dengan PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Sharia Life") untuk memasarkan, mempromosikan dan mereferensikan produk asuransi Prudential Sharia Life melalui jaringan distribusi Bank. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal perjanjian dan akan terus berlaku dan efektif hingga tahun kelima belas (15) sejak tanggal peluncuran (1 Maret 2025). Adapun kewajiban Bank sebelum tanggal peluncuran terkait dengan penerbitan produk dan layanan asuransi di jaringan distribusi Bank antara lain mempersiapkan peraturan internal, pelatihan pegawai Bank, rencana pemasaran dan komunikasi serta penyesuaian sistem.

Liabilitas kontinjensi

Dalam menjalankan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum yang terkadang mengandung tuntutan ganti rugi dimana Bank berposisi sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan para pihak terhadap perjanjian/kontrak.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Significant Agreements

As at 27 September 2024, the bank signed bancassurance agreement with PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Sharia Life") to market, promote and refer Prudential Sharia Life insurance products through the Bank's distribution network. This collaboration agreement is effective from the date of agreement and will continue to be valid and effective until the fifteenth (15th) year from the launch date (1 March 2025). The Bank's obligations before the launch date related to the launching of insurance products and services in the Bank's distribution network include preparing internal regulations, training Bank employees, marketing and communication plans and system adjustments.

Contingent liabilities

In conducting the business, the Bank faces various legal cases which sometimes involve claims for compensation in which the Bank is positioned as a defendant, especially in relation to the parties' compliance with agreements/contracts.

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Liabilitas kontinjensi (lanjutan)

Walaupun terdapat perkara yang masih berproses, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan posisi hukum Bank, tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun yang masih dalam proses masing-masing sebesar Rp3.021 dan Rp2.988. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk telah memadai untuk menutup kerugian akibat hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses.

48. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

***Contingent liabilities** (continued)*

Although there are cases that are still in process, the Bank believes that based on information currently available and the Bank's legal position, these legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of the Bank.

As at 31 December 2024 and 2023, the Bank has established a provision (included in "Other Liabilities") for a number of legal claims which have permanent legal force (inkracht) and which are still in process amounting to Rp3,021 and Rp2,988, respectively. Management believes that the provision is adequate to cover losses due to the legal risks.

49. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

49. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the statements of cash flows are as follows:

Keterangan	1 Januari/ *1 January 2024*	Aktivitas nonkas/ *Non-cash activity*	Arus kas/ *Cash flow*	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	*Descriptions*
	31 Desember/*December* 2024						
Liabilitas sewa	123,193	210,016	(151,913)	-	-	181,296	*Lease liabilities*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	776,250	-	222,940	810	-	1,000,000	*Mudharabah term financing*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	200,000	-	-	-	-	200,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Sukuk *mudharabah* diterbitkan	3,608	(776)	3,015,731	-	-	3,018,563	*Issued sukuk mudharabah*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	11,900,055	-	6,517,809	-	-	18,417,864	*Liabilities to Bank Indonesia*

Keterangan	1 Januari/ *1 January 2023*	Aktivitas nonkas/ *Non-cash activity*	Arus kas/ *Cash flow*	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	*Descriptions*
	31 Desember/*December* 2023						
Liabilitas sewa	166,002	91,933	(134,742)	-	-	123,193	*Lease liabilities*
Pembiayaan berjangka mudharabah	778,375	-	(5,057)	2,932	-	776,250	*Mudharabah term financing*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,375,000	-	(1,175,000)	-	-	200,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Sukuk mudharabah diterbitkan	-	(151)	3,759	-	-	3,608	*Issued mudharabah sukuk*
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	11,900,055	-	-	11,900,055	*Liabilities to Bank Indonesia*

50. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 05/BSI/DPS/OPINI/I/2025 tanggal 16 Januari 2025, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"), serta opini syariah dari DPS.

Berdasarkan surat No. 01/BSI/DPS/OPINI/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, DPS PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta opini syariah dari DPS.

50. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letter No. 05/BSI/DPS/OPINI/I/2025 dated 16 January 2025, the Sharia Supervisory Board ("DPS") of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2024, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council ("DSN-MUI"), and sharia opinion of DPS.

Based on letter No. 01/BSI/DPS/OPINI/I/2024 dated 16 January 2024, the DPS of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2023, have complied with fatwa and sharia regulations issued by DSN-MUI, and sharia opinion of DPS.

51. RENCANA BARANG MODAL / *CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS*

Bank memiliki komitmen barang modal terkait dengan renovasi bangunan, pengadaan kendaraan dinas, perlengkapan komputer, ATM dan jasa lisensi sistem adalah sebesar Rp1.939.959 dan Rp2.018.556, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The Bank has capital expenditure plans in relation to the building renovations, procurement of office vehicles, computer equipments, ATMs and system license services amounting to Rp1,939,959 and Rp2,018,556 as at 31 December 2024 and 2023, respectively.

52. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF / *NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE*

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2024 are as follows:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

- *Amendment of SFAS 221: "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding the lack of convertibility.*

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

The above standards will be effective on 1 January 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

As at the authorisation date of financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

53. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN PERIODE SEBELUMNYA / *RECLASSIFICATIONS OF THE PRIOR PERIOD FINANCIAL STATEMENTS*

Bank melakukan reklasifikasi atas penyajian keuntungan investasi surat berharga yang menjadi bagian dari pendapatan imbalan jasa perbankan pada laporan keuangan periode sebelumnya. Pengaruh reklasifikasi tersebut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The Bank reclassified the presentation of gain from marketable securities which were part of fee based income from banking services in the prior period financial statements. The effect of the reclassification on the statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2023 are as follows:

	2023			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *After reclassification*	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA				***OTHER OPERATING INCOME***
Pendapatan imbalan jasa perbankan	3,112,884	(242,110)	2,870,774	*Fee based income from banking services*
Keuntungan investasi surat berharga	-	242,110	242,110	*Gain from marketable securities*

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia.

a. Kolektibilitas giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh giro dan penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan "Lancar".

a. Collectibility of current accounts and placements with Bank Indonesia

As at 31 December 2024 and 2023, all current accounts and placements with Bank Indonesia are classified as "Current".

b. Kolektibilitas giro dan penempatan pada bank lain

b. Collectibility of current accounts and placements with other banks

	2024		2023		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	3,880,874	14,809	2,324,473	20,745	*Current*

c. Kolektibilitas investasi pada surat berharga

c. Collectibility of investments in marketable securities

	2024		2023		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	62,251,806	35,288	71,202,526	33,506	*Current*
Macet	-	-	99,000	99,000	*Loss*
	62,251,806	35,288	71,301,526	132,506	

d. Kolektibilitas tagihan akseptasi

d. Collectibility of acceptance receivables

	2024		2023		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	185,145	1,851	431,228	4,312	*Current*

e. Kolektibilitas pinjaman *qardh*

e. Collectibility of funds of qardh

	2024		2023		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	13,452,780	512,708	10,971,347	528,368	*Current*
Dalam perhatian khusus	43,157	6,536	42,477	6,377	*Special mention*
Kurang lancar	6,446	820	5,655	669	*Substandard*
Diragukan	6,855	3,084	8,962	3,863	*Doubtful*
Macet	264,546	264,546	278,640	278,640	*Loss*
	13,773,784	787,694	11,307,081	817,917	

f. Kolektibilitas pembiayaan *mudharabah*

f. Collectibility of mudharabah financing

	2024		2023		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	2,869,536	25,945	1,816,788	16,472	*Current*
Dalam perhatian khusus	-	-	33,101	1,765	*Special mention*
Macet	67,543	67,543	31,244	31,244	*Loss*
	2,937,079	93,488	1,881,133	49,481	

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

g. Kolektibilitas pembiayaan *musyarakah*

g. Collectibility of musyarakah financing

	2024		2023		
	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	Jumlah/*Total*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	
Lancar	109,803,514	1,924,213	83,854,900	1,373,575	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,791,965	1,928,640	2,673,552	1,753,279	*Special mention*
Kurang lancar	424,908	227,708	627,436	363,211	*Substandard*
Diragukan	128,828	26,567	172,823	84,448	*Doubtful*
Macet	1,038,003	1,038,003	887,486	885,183	*Loss*
	114,187,218	5,145,131	88,216,197	4,459,696	

h. Piutang, pembiayaan dan pinjaman yang direstrukturisasi

Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

h. Restructured receivables, financing and funds

Receivables, financing and funds that have been restructured by the Bank as at 31 December 2024 and 2023 are as follows.

	2024					
	Piutang/ *Receivables*	Pinjaman *Qardh*/ *Funds of Qardh*	Pembiayaan *Mudharabah*/ *Mudharabah Financing*	Pembiayaan *Musyarakah*/ *Musyarakah Financing*	Jumlah/ *Total*	
Lancar	2,441,493	455,249	-	6,991,160	9,887,902	*Current*
Dalam perhatian khusus	347,765	7,637	-	2,574,563	2,929,965	*Special mention*
Kurang lancar	300,854	449	-	315,892	617,195	*Substandard*
Diragukan	160,586	700	-	51,580	212,866	*Doubtful*
Macet	1,014,695	243,304	64,205	730,372	2,052,576	*Loss*
Jumlah	4,265,393	707,339	64,205	10,663,567	15,700,504	*Total*

	2023					
	Piutang/ *Receivables*	Pinjaman *Qardh*/ *Funds of Qardh*	Pembiayaan *Mudharabah*/ *Mudharabah Financing*	Pembiayaan *Musyarakah*/ *Musyarakah Financing*	Jumlah/ *Total*	
Lancar	4,041,143	478,080	10,490	7,476,674	12,006,387	*Current*
Dalam perhatian khusus	683,014	7,577	1,463	2,522,407	3,214,461	*Special mention*
Kurang lancar	368,402	400	-	553,632	922,434	*Substandard*
Diragukan	398,071	811	-	125,188	524,070	*Doubtful*
Macet	1,044,542	258,737	27,882	724,418	2,055,579	*Loss*
Jumlah	6,535,172	745,605	39,835	11,402,319	18,722,931	*Total*

i. Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF")

i. Non-Performing Financing ("NPF") Ratio

	2024						
	Piutang/ *Receivables*	Pinjaman *Qardh*/ *Funds of Qardh*	Pembiayaan *Mudharabah*/ *Mudharabah Financing*	Pembiayaan *Musyarakah*/ *Musyarakah Financing*	Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah* - Bersih/ *Assets Acquired for Ijarah - Net*	Jumlah/ *Total*	
Jumlah saldo*)	144,460,906	13,773,784	2,744,964	114,135,639	3,122,255	278,237,548	*Total balance*)
NPF - Bruto*)	3,324,983	277,847	65,765	1,591,738	17,254	5,277,587	*NPF - Gross*)
Persentase NPF - Bruto	2.30%	2.02%	2.40%	1.39%	0.55%	1.90%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto*)	1,071,774	9,398	-	299,461	17,254	1,397,887	*NPF - Net*)
Persentase NPF - Neto	0.74%	0.07%	0.00%	0.26%	0.55%	0.50%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan musyarakah kepada bank lain

*) *Exclude receivables, funds of qardh, mudharabah financing, and musyarakah financing to other banks*

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

i. Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") (lanjutan)

i. Non-Performing Financing ("NPF") Ratio *(continued)*

	2023						
	Piutang/ *Receivables*	**Pinjaman *Qardh*/ *Funds of Qardh***	**Pembiayaan *Mudharabah*/ *Mudharabah Financing***	**Pembiayaan *Musyarakah*/ *Musyarakah Financing***	**Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah* - Bersih/ *Assets Acquired for Ijarah - Net***	**Jumlah/ *Total***	
Jumlah saldo*)	136,721,476	11,307,081	1,700,786	88,172,533	2,190,107	240,091,983	*Total balance**)
NPF - Bruto*)	2,953,206	293,257	29,467	1,687,745	21,353	4,985,028	*NPF - Gross**)
Persentase NPF - Bruto	2.16%	2.59%	1.73%	1.91%	0.97%	2.08%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto*)	927,484	10,085	-	354,903	21,353	1,313,825	*NPF - Net**)
Persentase NPF - Neto	0.68%	0.09%	0.00%	0.40%	0.97%	0.55%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar piutang, pinjaman *qardh,* pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan musyarakah kepada bank lain

*) *Exclude receivables, funds of qardh, mudharabah financing, and musyarakah financing to other banks*

j. Mutasi agunan yang diambil alih

j. Movement of the foreclosed collaterals

Mutasi agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

Movement of the foreclosed collaterals as at of 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2024	**2023**	
Saldo awal	825,759	859,007	*Beginning balance*
Penyelesaian	(114,389)	(33,248)	*Completion*
Saldo akhir	711,370	825,759	*Ending balance*

k. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi

k. Collectibility of commitments and contingencies

Kolektibilitas fasilitas pembiayaan yang belum digunakan adalah sebagai berikut:

The collectibility of unused financing facilities are as follows:

	2024	**2023**	
Lancar	4,542,007	5,041,570	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,193	31,313	*Special mention*
Kurang lancar	-	15,425	*Substandard*
Macet	-	8,854	*Loss*
	4,544,200	5,097,162	

l. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM")

l. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio

	2024	**2023**	
Rupiah			*Rupiah*
Kewajiban Pemenuhan GWM:			*Fulfillment of GWM:*
GWM Harian	0.00%	0.00%	*GWM Daily*
GWM Rata-Rata	7.50%	7.50%	*GWM Average*
Insentif GWM	(4.00%)	(2.90%)	*GWM Incentives*
Disinsentif Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM")	0.00%	0.00%	*Macroprudential Intermediation Ratio ("RIM") Disincentives*
Total Kewajiban Pemenuhan GWM	3.50%	4.60%	*Total of Fulfillment of GWM*
Realisasi Pemenuhan GWM	4.83%	6.76%	*Realisation Fulfillment of GWM*
Realisasi Pemenuhan GWM Rata-Rata	3.74%	4.87%	*Realisation Fulfillment of GWM Average*
Realisasi Pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") (d/h GWM Sekunder)	11.31%	21.35%	*Realisation Fulfillment of Macroprudential Liquidity Buffer ("PLM") (previously GWM Secondary)*

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

I. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") (lanjutan)

	2024	2023	
Valuta asing			*Foreign currencies*
Kewajiban Pemenuhan GWM	1.00%	1.00%	*Fulfillment of GWM*
Realisasi Pemenuhan GWM	1.46%	1.13%	*Realisation Fulfillment of GWM*

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah", sebagaimana telah diubah terakhir dengan PADG No. 12 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023. PADG baru tersebut mengatur setiap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

Dalam perhitungan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah, terdapat komponen insentif GWM sesuai PADG No. 4 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial", serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* ("FDR") menjadi RIM. Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target Bank Indonesia sebesar 94%.

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

I. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio *(continued)*

The GWM ratio as at 31 December 2024 and 31 December 2023 are calculated based on Board of Governors Members Regulations ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 regarding "The implementation of Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Banks, Sharia Banks and Sharia Business Units", as last amended by PADG No. 12 year 2023 dated 27 September 2023 and effectively came into force on 1 October 2023. The new PADG regulates every Sharia Bank and Sharia Business Unit to maintain GWM in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of third party funds ("TPF") in Rupiah and foreign exchange.

In calculating the fulfillment of Rupiah statutory reserves, there is a GWM incentive component which is in accordance with the PADG No. 4 year 2024 dated 22 May 2024 concerning "Amendment to the Regulation of the Members of the Board of Governors Number 11 of 2023 concerning the Implementation Regulation of the Macroprudential Liquidity Incentive Policy", as well as disincentives RIM according to Bank Indonesia Regulation Number 21/12/PBI/2019 dated 25 November 2019 concerning "Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

In addition, based on Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 which is effective from 1 May 2021 and Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 which is effective from 28 November 2019, there are changes in the calculation of GWM Financing to Deposit Ratios ("FDR") to RIM. Bank must pay additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the Bank Indonesia target of 94%.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

l. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") (lanjutan)

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

m. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM")

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rasio KPMM Bank dihitung berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya. Rasio KPMM pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

***54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS** (continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

***l. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio** (continued)*

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the GWM of Bank Indonesia.

As at 31 December 2024 and 2023, the Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM.

m. Minimum Required Capital Adequacy Ratio ("CAR")

As at 31 December 2024 and 2023, the CAR are calculated based on OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014, as amended in previous regulation. The CARs as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023	
Modal inti	41,685,617	36,095,427	*Core capital*
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	160,000	200,000	*Supplementary capital (maximum 100% over core capital)*
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR"))	2,105,714	1,819,801	*General reserves of allowance for impairment losses on earning assets (maximum 1.25% of Risk Weighted Assets ("RWA"))*
	43,951,331	38,115,228	
ATMR Risiko Kredit	168,052,923	145,078,091	*RWA for Financing Risk*
ATMR Risiko Pasar	1,693,430	1,640,536	*RWA for Market Risk*
ATMR Risiko Operasional	35,598,536	34,400,820	*RWA for Operational Risk*
	205,344,889	181,119,447	
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	21.58%	21.24%	*Bank's CAR for Credit Risk and Operational Risk*
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	21.40%	21.04%	*Bank's CAR for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk*
Rasio KPMM yang diwajibkan	9.99%	9.99%	*Minimum CAR*

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu *satisfactory*, maka KPMM minimum pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Based on the risk profile as at 31 December 2024 and 2023, which is satisfactory, the minimum CAR as at 31 December 2024 and 2023, was determined at 9% to less than 10%.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

m. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") (lanjutan)

Selain wajib membentuk modal inti dan modal pelengkap, Bank wajib untuk memenuhi *Countercyclical Buffer* yang ditetapkan dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR sesuai dengan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Hasil penilaian menunjukan bahwa Bank mampu untuk memenuhi KPMM sesuai dengan profil risiko dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*).

n. Rasio piutang, pembiayaan dan pinjaman usaha kecil

Rasio piutang, pembiayaan dan pinjaman usaha kecil terhadap jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman syariah yang diberikan Bank adalah sebesar 18,86% dan 18,93% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

o. Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar ("BMPD")

Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar ("BMPD") kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat piutang, pembiayaan dan pinjaman pihak terkait yang melampaui ketentuan BMPD.

Pihak terkait dalam ketentuan BMPD adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

p. Posisi Devisa Neto ("PDN")

Perhitungan PDN didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

***54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS** (continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

***m. Minimum Required Capital Adequacy Ratio ("CAR")** (continued)*

In addition to provide core capital and supplementary capital, the Bank is required to provide Countercyclical Buffer ranging from 0% to 2.5% of RWA based on POJK regulation No. 21/POJK.03/2014 regarding the Minimum Required Capital Adequacy Ratio of Sharia Bank.

The assessment result shows that the Bank has met the Minimum CAR in accordance with its risk profile and met additional capital buffer requirement.

n. Small business receivables, financing and funds ratio

The ratio of small business receivables, financing and funds to total sharia receivables, financing and funds are 18.86% and 18.93% as at 31 December 2024 and 2023, respectively.

o. Maximum Limit for Distribution of Funds and Distribution of Large Funds ("BMPD")

Based on the Maximum Limit for Distribution of Funds and Distribution of Large Funds ("BMPD") to the Financial Services Authority as at 31 December 2024 and 2023 there are no receivables, financing and funds related parties which exceeded the BMPD regulation.

Related parties in BMPD regulation are individuals or companies that have a controlling relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management and/or financial relationships.

p. Net Open Position ("NOP")

The NOP is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated 1 July 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain NOP ratio at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

p. Posisi Devisa Neto ("PDN") (lanjutan)

PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

p. Net Open Position ("NOP") *(continued)*

The NOP of Bank as at 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2024			
Mata uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi devisa neto/ *Net open position***	***Currencies***
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				***Statements of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	25,296,035	24,636,104	659,931	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	351,576	82,187	269,389	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	40,635	27,204	13,431	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	22,580	17,507	5,073	*European Euro*
Yuan China	19,607	-	19,607	*Chinese Yuan*
Dolar Australia	9,329	210	9,119	*Australian Dollar*
Dirham Uni Emirat Arab	6,941	22	6,919	*United Arab Emirates Dirham*
Pound Sterling Inggris	6,510	-	6,510	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	2,903	-	2,903	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	262	-	262	*Hong Kong Dollar*
			993,144	
Modal (Catatan 54m)			43,951,331	*Capital (Note 54g)*
Rasio PDN			2.26%	***NOP Ratio***

	2023			
Mata uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabilities***	**Posisi devisa neto/ *Net open position***	***Currencies***
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				***Statements of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	18,384,635	19,159,278	774,643	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	562,858	412,237	150,621	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	18,788	14,313	4,475	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	16,889	15,533	1,356	*European Euro*
Dolar Australia	5,114	29	5,085	*Australian Dollar*
Dirham Uni Emirat Arab	2,092	-	2,092	*United Arab Emirates Dirham*
Pound Sterling Inggris	2,052	-	2,052	*Great Britain Pound Sterling*
Yen Jepang	1,452	157	1,295	*Japanese Yen*
Dolar Hong Kong	251	-	251	*Hong Kong Dollar*
			941,870	
Modal (Catatan 54m)			38,115,228	*Capital (Note 54g)*
Rasio PDN			2.47%	***NOP Ratio***

q. Manajemen risiko

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian/insiden eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional selaras dengan pengembangan upaya pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan pengendalian internal di cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, dan pelaksanaan audit internal.

q. Risk management

Operational risk

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate internal processes, internal processes failures, human errors, system failures and/or external events/incidents that affect the Bank's operations.

Operational risk management is aligned with the development of internal control efforts. One of the efforts made is the implementation of internal control at the branch through the separation of duties and responsibilities, dual control mechanism in the implementation of the transaction function, deviation/ authorisation, restrictions on access to the system authority, increasing employee's competence and the implementation of internal audit.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

q. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut:

1) Menyusun manual produk, kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis operasional sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas operasional Bank dan mensosialisasikannya secara memadai.

2) Membentuk *Senior Operational Risk Head* (“SORH”) yang mengkoordinir fungsi *Decentralized Compliance and Operational Risk* (”DCOR”) dan *Regional Business Control* (”RBC”) dalam rangka pengelolaan risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan unit jaringan.

3) Menyiapkan *tools* yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko operasional, antara lain *Risk & Control Self Assessment, Key Risk Indicator, Loss Event Database*, Laporan Profil Risiko Operasional, dan *Control Testing.*

4) Melakukan kajian & analisis risiko operasional atas produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.

5) Menerapkan *Business Continuity Management* (“BCM”) untuk memastikan kelangsungan operasional Bank secara terus menerus meskipun terjadi gangguan (bencana) untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

6) Melakukan proses rekrutmen yang memadai untuk memastikan integritas dan kompetensi calon karyawan termasuk penerapan *Know Your Employee* (“KYE”), memberikan pelatihan dan sertifikasi yang berkesinambungan, meningkatkan kesadaran risiko melalui berbagai program *risk awareness*, serta menerapkan kebijakan *reward* dan *punishment* yang mendorong peningkatan kinerja dan disiplin pegawai.

54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

q. Risk management *(continued)*

Operational risk *(continued)*

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following:

1) Prepare product manuals, policies, procedures and operational technical instructions as a guidance in carrying out the Bank operational activities and socialise them adequately.

2) Establish a Senior Operational Risk Head (“SORH”) who coordinates Decentralized Compliance and Operational Risk (“DCOR”) and Regional Business Control (“RBC”) functions in the framework of operational risk management in the Head Office work units and network units.

3) Preparing tools used in implementing operational risk management, including Risk & Control Self Assessment, Key Risk Indicators, Loss Event Database, Operational Risk Profile Reports and Control Testing.

4) Performing operational risk review & analysis for proposed new products or activities which will be launched by the Bank.

5) Applying a Business Continuity Management (“BCM”) to ensure the continuity of operations of the Bank despite the disturbance (disaster) and to protect the interests of stakeholders.

6) Conducting an adequate recruitment process to ensure the integrity and competence of prospective employees, including the implementation of Know Your Employee (“KYE”), providing continuous training and certification, enhancing risk awareness through various risk awareness programs, and implementing reward and punishment policies that encourage improved employee performance and discipline.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

q. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

Risiko hukum yang timbul dapat berupa tuntutan kerugian material ataupun immaterial apabila Bank tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi tuntutan kerugian terhadap Bank dalam jumlah yang cukup material, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya:

1) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
3) Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Menentukan kebijakan cadangan perkara.

Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Syariah. Dalam industri perbankan, Bank wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional.

***54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS** (continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

***q. Risk management** (continued)*

Legal risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects. The emergence of legal risk can be caused by the absence of supporting laws and regulations or the weakness of the agreement, such as non-compliance with the legal terms of the contract or imperfect binding of collateral. As a company governed by the laws of the Republic of Indonesia, the Bank must comply with all applicable laws and regulations issued by Bank Indonesia/Financial Service Authority ("OJK") as a regulator in the banking industry in Indonesia as well as other regulations relating to business activities carried out by the Bank.

Legal risk that arise can be in the form of claims for material or immaterial losses if the Bank does not comply with the applicable rules and regulations. If there is a claim for losses against the Bank in a material amount, it can directly affect the Bank's financial performance.

In managing legal risk, the Bank performs actions such as:

1) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of legal risk in accordance with applicable regulations.
2) Developing a strong legal organisation.
3) Standardising contract and cooperation agreement in accordance with applicable regulations.
4) Determining the case provision policy.

Compliance risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank failures in complying and/or applying applicable laws and regulations and Sharia principles. In the banking industry, the Bank is required to comply with regulations issued by the Government, Bank Indonesia, OJK and the National Sharia Boards.

54. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DISYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak disyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia: (lanjutan)

q. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko kepatuhan (lanjutan)

Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan, yang mengatur Bank, seperti:

1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM");
2) Kualitas Aset Produktif;
3) Penyisihan Penghapusan Aset ("PPA");
4) Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
5) *Good Corporate Governance* ("GCG"); dan
6) Rencana Bisnis Bank ("RBB").

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat mempengaruhi kelangsungan Bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan di antaranya:

1) Meningkatkan pemahaman tentang GCG dan kode etik.
2) Penguatan pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
3) Menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4) Meningkatkan pelaksanaan *Know Your Customer* ("KYC"), Anti Pencucian Uang ("APU"), dan Pencegahan Pendanaan Teroris ("PPT").
5) Meningkatkan pelaksanaan *compliance certification*.
6) Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.
7) Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk mereviu dan menganalisis kepatuhan dari produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

***54. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS** (continued)*

The following additional information is required by applicable regulations and is not required by the Financial Accounting Standards in Indonesia: (continued)

***q. Risk management** (continued)*

***Compliance risk** (continued)*

In general, this risk is closely related to compliance with applicable laws and regulations, which governs the Bank, such as:

1) Capital Adequacy Ratio ("CAR");
2) Quality of Earning Assets;
3) Allowance of Earning Assets ("PPA");
4) Legal Lending Limit;
5) Good Corporate Governance ("GCG"); and
6) Bank Business Plan ("RBB").

The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to banking activities may affect the continuity of the Bank.

In managing the compliance risks, the Bank performs actions such as:

1) Improving understanding of GCG and the code of conduct.
2) Strengthening GCG implementation and ensuring that all financing debtors meet all financing needs.
3) Preparing and submitting GCG to Financial Services Authority.
4) Increasing the implementation of the Know Your Customer ("KYC"), Anti Money Laundering ("APU") and the Prevention of Financing for Terrorism ("PPT").
5) Improving the implementation of compliance certification.
6) Working closely with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank with sharia principles.
7) Empowering Sharia Compliance to review and analyse the compliance of the Bank's products/activities with sharia principles.

LAPORAN TAHUNAN 2024

MELAJU MENUJU TANTANGAN BARU

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
Sahabat Finansial, Sosial & Spiritual

Kantor Pusat
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930

Kontak
BSI Call - 14040
Telp. 62081584114040
contactus@bankbsi.co.id

Bank Syariah Indonesia @banksyariahindonesia Bank Syariah Indonesia bankbsi_id